DAFTAR ISI

Bab I PENDAHULUAN 1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan. 2
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 3
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 7
Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 10
2.1 Capaian Kinerja Makro 10
2.2 Kebijakan Keuangan 17
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 19
2.4 Pencapaian Target Kinerja APBD 19
Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 27
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 27
3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan 28
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 30
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 30
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .. 31
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 31
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. 32
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 91
5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 91
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 216
5.3 Neraca 217
5.3.1 Aset 217
5.3.2 Kewajiban 286
5.3.3 Ekuitas 302
5.4 Laporan Operasional (LO) 302
5.4.1 Pendapatan-LO 302
5.4.2 Beban 321
5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan 335
5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan 336
5.4.5 Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa 336
5.4.6 Pos Luar Biasa 336
5.4.7 Surplus/Defisit LO 337
5.5 Laporan Arus Kas (LAK) 337
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 337
5.5.2 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi 337
5.5.3 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi 338

5.5.4 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi 338
5.5.5 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi 338
5.5.6 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi 338
5.5.7 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 339
5.5.8 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan 339
5.5.9 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan 339
5.5.10 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 339
5.5.11 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris 340
5.5.12 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris 340
5.5.13 Kenaikan /(Penurunan) Kas 341
5.5.14 Saldo Akhir Kas 341
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 344
5.6.1 Ekuitas Awal 344
5.6.2 Surplus/(Defisit) LO 344
5.6.3 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar 344
5.6.4 Koreksi nilai persediaan 345
5.6.5 Koreksi kesalahan mendasar 345
5.6.6 Ekuitas Akhir 345
5.6.7 Pengungkapan Atas Pos-Pos Laporan Keuangan Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual. 345
5.7 Pengungkapan Perbedaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dan Laporan Operasional (LO) 346
5.7.1 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan – LRA Dan Pendapatan –LO 346
5.7.2 Pengungkapan Perbedaan Belanja – LRA Dan Beban – LO . 359
BAB VII PENUTUP 375

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2-1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023 10
Tabel 2-2 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023 11
Tabel 2-3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023 12
Tabel 2-4 PDRB Perkapita Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2023 12
Tabel 2-5 Indeks Gini Kabupaten Bondowoso 2021-2023 13
Tabel 2-6 Tingkat Kemiskinan Tahun 2021-2023 144
Tabel 2-7 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2023 ... 14
Tabel 2-8 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2023 15
Tabel 2-9 Perkembangan IPM Tahun 2021-2023 16
Tabel 2-10 Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Tahun 2021-2023 16
Tabel 2-11 Pencapaian Target Kinerja APBD – Pendapatan 19
Tabel 2-12 Pencapaian Target Kinerja APBD – Belanja 20
Tabel 2-13 Alokasi Anggaran Belanja Wajib (Mandatory Spending) 21
Tabel 2-14 Realisasi Alokasi Belanja Wajib (Mandatory Spending) Tahun 2021 ... 22
Tabel 2-15 Realisasi Alokasi Belanja Wajib (Mandatory Spending) Tahun 2022 ... 23
Tabel 2-16 Realisasi Alokasi Belanja Wajib (Mandatory Spending) Tahun 2023 ... 255
Tabel 4-1 Ilustrasi Penyusutan Aset Tetap Untuk Pertama Kalinya 69
Tabel 4-2 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Diperoleh Pada tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan 69
Tabel 4-3 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan . 69
Tabel 4-4 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal 70
Tabel 4-5 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Mengalami Perubahan Golongan Dari Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Masa Manfaatnya Telah Habis 71
Tabel 4-6 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Mengalami Perubahan Golongan Dari Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Masa Manfaatnya Masih Ada, Tetapi Lebih Besar Dari Kebijakan Akuntansi Di Golongan Aset Yang Baru 71
Tabel 4-7 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Mengalami Perubahan Golongan Dari Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Masa Manfaatnya Masih Ada, Tetapi Lebih Kecil Dari Kebijakan Akuntansi 71

Tabel 4-8 Masa Manfaat I 77
Tabel 4-9 Masa Manfaat II 78
Tabel 4-10 Masa Manfaat Aktiva Tak Berwujud 85
Tabel 5-1 Rincian Pendapatan 91
Tabel 5-2 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 92
Tabel 5-3 Rincian Pajak Daerah 92
Tabel 5-4 Dasar Hukum dan Metode Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah 93
Tabel 5-5 Rincian Pajak Hotel 94
Tabel 5-6 Rincian Pajak Restoran 94
Tabel 5-7 Rincian Pajak Hiburan 95
Tabel 5-8 Rincian Pajak Reklame 96
Tabel 5-9 Rincian Pajak Penerangan Jalan 96
Tabel 5-10 Rincian Pajak Parkir 97
Tabel 5-11 Rincian Pajak Air Tanah 97
Tabel 5-12 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 98
Tabel 5-13 Rincian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 98
Tabel 5-14 Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 99
Tabel 5-15 Retribusi Daerah 99
Tabel 5-16 Obyek Retribusi Jasa Umum 99
Tabel 5-17 Dasar Hukum dan Metode Perhitungan Retribusi Jasa Umum 100
Tabel 5-18 Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan 101
Tabel 5-19 Rincian Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 102
Tabel 5-20 Rincian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 103
Tabel 5-21 Rincian Retribusi Pelayanan Pasar 104
Tabel 5-22 Rincian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 105
Tabel 5-23 Rincian Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 106
Tabel 5-24 Rincian Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 106
Tabel 5-25 Rincian Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 107
Tabel 5-26 Obyek Retribusi Jasa Usaha 107
Tabel 5-27 Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 108
Tabel 5-28 Rincian Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan 108
Tabel 5-29 Rincian Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa 109
Tabel 5-30 Rincian Retribusi Rumah Potong Hewan 110
Tabel 5-31 Rincian Retribusi Rekreasi dan Olahraga 111
Tabel 5-32 Obyek Retribusi Perizinan Tertentu 111
Tabel 5-33 Rincian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 112
Tabel 5-34 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 113
Tabel 5-35 Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 113
Tabel 5-36 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 114
Tabel 5-37 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 114

Tabel 5-38 Rincian Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 114
Tabel 5-39 Rincian Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 115
Tabel 5-40 Rincian Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya 115
Tabel 5-41 Rincian Hasil Penjualan Aset Lainnya 115
Tabel 5-42 Rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 115
Tabel 5-43 Rincian Jasa Giro 115
Tabel 5-44 Rincian Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 116
Tabel 5-45 Rincian Pendapatan Bunga 116
Tabel 5-46 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah .. 116
Tabel 5-47 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 116
Tabel 5-48 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah 116
Tabel 5-49 Rincian Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 117
Tabel 5-50 Rincian Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 117
Tabel 5-51 Rincian Pendapatan dari Pengembalian 117
Tabel 5-52 Rincian Pendapatan BLUD 118
Tabel 5-53 Rincian Pendapatan Transfer 119
Tabel 5-54 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 119
Tabel 5-55 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 119
Tabel 5-56 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) 120
Tabel 5-57 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 121
Tabel 5-58 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 122
Tabel 5-59 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 123
Tabel 5-60 Rincian Dana Insentif Daerah (DID) 123
Tabel 5-61 Rincian Dana Desa 123
Tabel 5-62 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah 124
Tabel 5-63 Rincian Pendapatan Bagi Hasil 124
Tabel 5-64 Rincian Bantuan Keuangan 125
Tabel 5-65 Rincian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi . 126
Tabel 5-66 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 127
Tabel 5-67 Rincian Pendapatan Hibah 127
Tabel 5-68 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 127
Tabel 5-69 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP 128
Tabel 5-70 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD 128
Tabel 5-71 Rincian Belanja Daerah dan Belanja Transfer 129
Tabel 5-72 Rincian Belanja Daerah 129
Tabel 5-73 Rincian Belanja Operasi 130
Tabel 5-74 Rincian Belanja Pegawai 130
Tabel 5-75 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 130
Tabel 5-76 Rincian Belanja Gaji Pokok ASN 131

Tabel 5-77 Rincian Belanja Tunjangan Keluarga ASN 131
Tabel 5-78 Rincian Belanja Tunjangan Jabatan ASN..... 131
Tabel 5-79 Rincian Belanja Tunjangan Fungsional ASN 132
Tabel 5-80 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 132
Tabel 5-81 Rincian Belanja Tunjangan Beras ASN..... 132
Tabel 5-82 Rincian Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 132
Tabel 5-83 Rincian Belanja Pembulatan Gaji ASN 132
Tabel 5-84 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 133
Tabel 5-85 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 133
Tabel 5-86 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 133
Tabel 5-87 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN..... 133
Tabel 5-88 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 133
Tabel 5-89 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 134
Tabel 5-90 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 134
Tabel 5-91 Rincian Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 134
Tabel 5-92 Rincian Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD..... 134
Tabel 5-93 Rincian Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 135
Tabel 5-94 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 135
Tabel 5-95 Rincian Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 135
Tabel 5-96 Rincian Belanja Honorarium 135
Tabel 5-97 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 135
Tabel 5-98 Rincian Belanja Uang Representasi DPRD 136
Tabel 5-99 Rincian Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 136
Tabel 5-100 Rincian Belanja Tunjangan Beras DPRD 136
Tabel 5-101 Rincian Belanja Uang Paket DPRD..... 137
Tabel 5-102 Rincian Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 137
Tabel 5-103 Rincian Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 137
Tabel 5-104 Rincian Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 137
Tabel 5-105 Rincian Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 137
Tabel 5-106 Rincian Belanja Tunjangan Reses DPRD..... 137
Tabel 5-107 Rincian Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD..... 138
Tabel 5-108 Rincian Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD..... 138
Tabel 5-109 Rincian Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 138
Tabel 5-110 Rincian Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 138
Tabel 5-111 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH..... 138
Tabel 5-112 Rincian Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 139
Tabel 5-113 Rincian Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH..... 139
Tabel 5-114 Rincian Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 139

Tabel 5-115 Rincian Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 139
Tabel 5-116 Rincian Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH..... 140
Tabel 5-117 Rincian Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH..... 140
Tabel 5-118 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 140
Tabel 5-119 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 140
Tabel 5-120 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 140
Tabel 5-121 Rincian Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 141
Tabel 5-122 Rincian Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 141
Tabel 5-123 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 142
Tabel 5-124 Rincian Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 142
Tabel 5-125 Rincian Belanja Dana Operasional KDH/WKDH..... 142
Tabel 5-126 Rincian Belanja Pegawai BLUD 142
Tabel 5-127 Rincian Belanja Barang dan Jasa Sebelum Mapping 143
Tabel 5-128 Mapping Belanja Barang dan Jasa BOS 143
Tabel 5-129 Mapping Belanja Barang dan Jasa BLUD..... 148
Tabel 5-130 Rincian Belanja Barang Sebelum Mapping..... 151
Tabel 5-131 Rincian Belanja Barang Pakai Habis Sebelum Mapping..... 151
Tabel 5-132 Rincian Belanja Barang Pakai Habis Setelah Mapping..... 154
Tabel 5-133 Rincian Belanja Barang Tak Pakai Habis..... 156
Tabel 5-134 Rincian Belanja Barang Setelah Mapping 156
Tabel 5-135 Rincian Belanja Jasa Sebelum Mapping..... 156
Tabel 5-136 Rincian Belanja Jasa Kantor Sebelum Mapping..... 157
Tabel 5-137 Rincian Belanja Jasa Kantor Setelah Mapping..... 159
Tabel 5-138 Rincian Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Sebelum Mapping 161
Tabel 5-139 Rincian Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Setelah Mapping 161
Tabel 5-140 Rincian Belanja Sewa Tanah 162
Tabel 5-141 Rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Sebelum Mapping 162
Tabel 5-142 Rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Setelah Mapping 163
Tabel 5-143 Rincian Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Sebelum Mapping 164
Tabel 5-144 Rincian Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Sebelum Mapping 164
Tabel 5-145 Rincian Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 165
Tabel 5-146 Rincian Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya..... 165
Tabel 5-147 Rincian Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 165
Tabel 5-148 Rincian Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi..... 166
Tabel 5-149 Rincian Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 166
Tabel 5-150 Rincian Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Sebelum Mapping 167
Tabel 5-151 Rincian Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Setelah Mapping..... 167

Tabel 5-152 Rincian Belanja Jasa Setelah Mapping 168
Tabel 5-153 Rincian Belanja Pemeliharaan Sebelum Mapping..... 168
Tabel 5-154 Rincian Belanja Pemeliharaan Tanah 168
Tabel 5-155 Rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sebelum Mapping 169
Tabel 5-156 Rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Setelah Mapping .. 172
Tabel 5-157 Rincian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sebelum Mapping 175
Tabel 5-158 Rincian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Setelah Mapping 177
Tabel 5-159 Rincian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Sebelum Mapping 178
Tabel 5-160 Rincian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Mapping 179
Tabel 5-161 Rincian Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Sebelum Mapping . 179
Tabel 5-162 Rincian Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Setelah Mapping ... 179
Tabel 5-163 Rincian Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud..... 180
Tabel 5-164 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Sebelum Mapping 180
Tabel 5-165 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sebelum Mapping..... 180
Tabel 5-166 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Setelah Mapping..... 180
Tabel 5-167 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 181
Tabel 5-168 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 181
Tabel 5-169 Rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 181
Tabel 5-170 Rincian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 181
Tabel 5-171 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS Sebelum Mapping..... 182
Tabel 5-172 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS Setelah Mapping..... 182
Tabel 5-173 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD Sebelum Mapping 182
Tabel 5-174 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD Setelah Mapping..... 182
Tabel 5-175 Rincian Belanja Barang dan Jasa Setelah Mapping..... 182
Tabel 5-176 Rincian Belanja Subsidi 183
Tabel 5-177 Rincian Belanja Hibah 183
Tabel 5-178 Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat..... 184
Tabel 5-179 Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 184
Tabel 5-180 Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan..... 184
Tabel 5-181 Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 185

Tabel 5-182 Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 185
Tabel 5-183 Rincian Belanja Hibah Dana BOS 185
Tabel 5-184 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 186
Tabel 5-185 Rincian Belanja Bantuan Sosial 186
Tabel 5-186 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 186
Tabel 5-187 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 187
Tabel 5-188 Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 187
Tabel 5-189 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 187
Tabel 5-190 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 187
Tabel 5-191 Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 187
Tabel 5-192 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 188
Tabel 5-193 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 188
Tabel 5-194 Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 188
Tabel 5-195 Jenis Belanja Modal 189
Tabel 5-196 Rincian Belanja Modal Tanah 189
Tabel 5-197 Rincian Belanja Modal Lapangan 189
Tabel 5-198 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sebelum Mapping 190
Tabel 5-199 Rincian Mapping Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 194
Tabel 5-200 Rincian Mapping Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 195
Tabel 5-201 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Mapping 197
Tabel 5-202 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sebelum Mapping 202
Tabel 5-203 Rincian Mapping Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 203
Tabel 5-204 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Mapping 204
Tabel 5-205 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Sebelum Mapping . 205
Tabel 5-206 Rincian Mapping Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 206
Tabel 5-207 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Mapping ... 206
Tabel 5-208 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Sebelum Mapping 207
Tabel 5-209 Rincian Mapping Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 208
Tabel 5-210 Rincian Mapping Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 208
Tabel 5-211 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Mapping 208
Tabel 5-212 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Sebelum Mapping 209
Tabel 5-213 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Mapping 209

Tabel 5-214 Rincian Belanja Tidak Terduga 210
Tabel 5-215 Rincian Belanja Transfer 210
Tabel 5-216 Rincian Belanja Bagi Hasil 211
Tabel 5-217 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 211
Tabel 5-218 Rincian Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 211
Tabel 5-219 Rincian Belanja Bantuan Keuangan 212
Tabel 5-220 Rincian Surplus/(Defisit) 212
Tabel 5-221 Rincian Penerimaan Pembiayaan 212
Tabel 5-222 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 213
Tabel 5-223 Rincian Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 213
Tabel 5-224 Rincian Pengeluaran Pembiayaan 214
Tabel 5-225 Rincian Pembiayaan Netto 214
Tabel 5-226 Rincian Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA) ... 214
Tabel 5-227 Rincian Kas pada Rekening Bendahara, RKUD, dan Non RKUD 215
Tabel 5-228 Rincian Kas pada Rekening Kas Umum Daerah 215
Tabel 5-229 Rincian Aset Lancar 217
Tabel 5-230 Kas dan Bank 218
Tabel 5-231 Kas Daerah 218
Tabel 5-232 Kas Bendahara Penerimaan 219
Tabel 5-233 Kas Bendahara Pengeluaran 219
Tabel 5-234 Kas di BLUD RSUD 219
Tabel 5-235 Kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - FKTP 220
Tabel 5-236 Kas di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - FKTP 221
Tabel 5-237 Kas pada Bendahara BOS 221
Tabel 5-238 Kas Lainnya 222
Tabel 5-239 Rincian Piutang Pendapatan 222
Tabel 5-240 Rincian Piutang Pajak 222
Tabel 5-241 Rincian Piutang Pajak Reklame 223
Tabel 5-242 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan 223
Tabel 5-243 Rincian Piutang PPJ PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Situbondo 223
Tabel 5-244 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan PT Bonindo 224
Tabel 5-245 Tabel Surat Tagihan PPJ PT Bonindo 224
Tabel 5-246 Rincian Piutang Pajak Mineral 225
Tabel 5-247 Rincian Piutang Pajak Hotel 226
Tabel 5-248 Rincian Piutang Pajak Restoran 226
Tabel 5-249 Rincian Piutang Pajak Air Tanah 226
Tabel 5-250 Rincian Piutang Pajak Hiburan 226
Tabel 5-251 Rincian Piutang Pajak Parkir 227

Tabel 5-252 Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 227
Tabel 5-253 Rincian Piutang Pajak BPHTB 227
Tabel 5-254 Jenis Piutang Retribusi 228
Tabel 5-255 Tabel Piutang Retribusi Jasa Umum 228
Tabel 5-256 Rincian Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar 228
Tabel 5-257 Rincian Piutang Retribusi Sewa Los Pasar 229
Tabel 5-258 Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 229
Tabel 5-259 Rincian Piutang Klaim Non Kapitasi BPJS 229
Tabel 5-260 Tabel Piutang Retribusi Jasa Usaha 230
Tabel 5-261 Rincian Piutang Sewa Tanah Trotoar 230
Tabel 5-262 Rincian Piutang Retribusi Sewa Kios Terminal 230
Tabel 5-263 Rincian Piutang Retribusi Sewa Toko Pasar 231
Tabel 5-264 Rincian Piutang Kemitraan 231
Tabel 5-265 Tabel Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 231
Tabel 5-266 Rincian Piutang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 232
Tabel 5-267 Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah 232
Tabel 5-268 Rincian Piutang Bunga Jasa Giro BUD 232
Tabel 5-269 Rincian Piutang Bunga Tabungan/Jasa Giro Dana BOS 233
Tabel 5-270 Rincian Piutang Bunga Tabungan/Jasa Giro Dana SKPD (Dishub) 233
Tabel 5-271 Rincian Piutang Bunga Tabungan/Jasa Giro Dana BLUD 233
Tabel 5-272 Rincian Piutang Klaim BPJS 233
Tabel 5-273 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya 234
Tabel 5-274 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya 234
Tabel 5-275 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya 234
Tabel 5-276 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya 235
Tabel 5-277 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kpd Pihak III Lainnya 235
Tabel 5-278 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya 235
Tabel 5-279 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya 236
Tabel 5-280 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya 236
Tabel 5-281 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya 237
Tabel 5-282 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya 237
Tabel 5-283 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (Kemenkes) 237
Tabel 5-284 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya 238
Tabel 5-285 Rincian Piutang Bantuan Keuangan Partai Politik 238
Tabel 5-286 Rincian Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah 238
Tabel 5-287 Rincian Piutang Denda Keterlambatan Proyek 242
Tabel 5-288 Rincian Remunerasi Treasury Deposit Fasility 242
Tabel 5-289 Rincian Piutang Sewa ATM BNI 242
Tabel 5-290 Rincian Piutang Sewa ATM BRI 243
Tabel 5-291 Rincian Piutang Lain-Lain 243
Tabel 5-292 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat 243

Tabel 5-293 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Royalty 244
Tabel 5-294 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil SDA Minyak Bumi..... 244
Tabel 5-295 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil SDA Gas Bumi..... 244
Tabel 5-296 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi 244
Tabel 5-297 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Provinsi..... 244
Tabel 5-298 Rincian Piutang Yang Timbul Dari Perjanjian/Perikatan..... 246
Tabel 5-299 Pengelompokan/Klasifikasi Piutang Dari Perjanjian/Perikatan 246
Tabel 5-300 Rincian Piutang Yang Timbul Dari Perjanjian/Perikatan..... 247
Tabel 5-301 Rincian Piutang Kredit Sapi Kereman..... 247
Tabel 5-302 Rincian Piutang Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (Feeder Point) 247
Tabel 5-303 Rincian Piutang Kredit Pembelian Gabah Petani 248
Tabel 5-304 Rincian Piutang Kredit kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .. 248
Tabel 5-305 Rincian Piutang Kredit Penguatan Modal Usaha Perikanan 249
Tabel 5-306 Mutasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih..... 249
Tabel 5-307 Rincian Penyisihan Piutang 249
Tabel 5-308 Rincian Beban Dibayar Dimuka 250
Tabel 5-309 Rincian Perhitungan Beban Dibayar Dimuka Rumah Singgah Tenaga Kerja..... 250
Tabel 5-310 Rincian Perhitungan Beban Dibayar Dimuka Rumah Singgah Tenaga Kerja..... 250
Tabel 5-311 Mutasi Persediaan 251
Tabel 5-312 Belanja Barang Dan Jasa Yang Menjadi Persediaan 251
Tabel 5-313 Rincian Belanja Barang Persediaan Yang Tidak Diakui sebagai Persediaan 252
Tabel 5-314 Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa 252
Tabel 5-315 Rincian Penerimaan Hibah 253
Tabel 5-316 Rincian Pemakaian Persediaan Tahun 2023..... 254
Tabel 5-317 Rincian Persediaan Yang Kedaluwarsa/Expired Tahun 2023 255
Tabel 5-318 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Bahan Habis Pakai..... 255
Tabel 5-319 Rincian Hibah Natura dan Pakan..... 256
Tabel 5-320 Barang Pakai Habis Yang Sudah Kedaluwarsa/Expired 258
Tabel 5-321 Rincian Persediaan Yang Kedaluwarsa/Expired Per SKPD..... 258
Tabel 5-322 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Bahan Habis Pakai..... 258
Tabel 5-323 Rincian Penyertaan Modal Pemda..... 259
Tabel 5-324 Dasar Hukum Penyertaan Modal Pemda 259
Tabel 5-325 Perhitungan Penyertaan Modal Pada PDAM..... 260
Tabel 5-326 Rincian Penyertaan Modal Pemda Pada PT Bondowoso Gemilang..... 260
Tabel 5-327 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap 261

Tabel 5-328 Perbedaan Realisasi Belanja Modal Bruto dan Netto 261
Tabel 5-329 Rincian Selisih Realisasi Belanja Modal Bruto dan Netto 262
Tabel 5-330 Tabel Reklasifikasi Belanja Modal 262
Tabel 5-331 Hibah/Bantuan Yang Belum Mendapatkan BAST 263
Tabel 5-332 Rincian Hibah Tanah Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) 265
Tabel 5-333 Rincian Tanah Kas Desa Dalam Penelusuran 266
Tabel 5-334 Rincian Hibah Peralatan dan Mesin 267
Tabel 5-335 Kendaraan Yang Dipinjampakaikan 269
Tabel 5-336 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 269
Tabel 5-337 Rincian Hibah Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Pusat 270
Tabel 5-338 Rincian Hibah Gedung dan Bangunan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) 270
Tabel 5-339 Gedung dan Bangunan Yang Dipinjampakaikan 271
Tabel 5-340 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 272
Tabel 5-341 Rincian Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Pemerintah Pusat 273
Tabel 5-342 Rincian Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) 273
Tabel 5-343 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan 273
Tabel 5-344 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Lainnya 274
Tabel 5-345 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan 274
Tabel 5-346 Rincian Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan 275
Tabel 5-347 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan 275
Tabel 5-348 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 276
Tabel 5-349 Rincian Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset 276
Tabel 5-350 Rincian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset 277
Tabel 5-351 Rincian Properti Investasi 278
Tabel 5-352 Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 278
Tabel 5-353 Dana Cadangan 279
Tabel 5-354 Rincian Aset Lainnya 279
Tabel 5-355 Rekapitulasi Mutasi Tagihan Jangka Panjang 280
Tabel 5-356 Rekapitulasi TGR atas hasil Pemeriksaan APIP dan APEP yang Dilaporkan kepada Majelis TPTGR 280
Tabel 5-357 Rincian Aset Lainnya – Aset Lain-Lain 283
Tabel 5-358 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 285
Tabel 5-359 Rincian Utang Jangka Pendek 286
Tabel 5-360 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 286
Tabel 5-361 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka 287
Tabel 5-362 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Bondowoso 288
Tabel 5-363 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Gedung Kantor Kas Bank Jatim Kantor Kecamatan Tamanan 288

Tabel 5-364 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa ATM Bank Jatim Kantor Sekretariat DPRD 288
Tabel 5-365 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa ATM Bank Jatim Dinas Kesehatan 289
Tabel 5-366 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa ATM Bank Jatim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 289
Tabel 5-367 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa ATM Bank Jatim Sekretariat Daerah..... 289
Tabel 5-368 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa ATM Bank Jatim Kecamatan Sukosari 290
Tabel 5-369 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka Sewa ATM Bank BNI SMP 1 Bondowoso 290
Tabel 5-370 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Gedung Kantor Kas Bank Jatim RSUD dr. H. Koesnadi..... 290
Tabel 5-371 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka ATM BRI RSUD dr. H.Koesnadi 291
Tabel 5-372 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka ATM BNI RSUD dr. H.Koesnadi 291
Tabel 5-373 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame 291
Tabel 5-374 Rincian Utang Belanja 291
Tabel 5-375 Rincian Utang Bagi Hasil Parkir Berlangganan – Dispenda Prov Jatim 292
Tabel 5-376 Rincian Utang Bagi Hasil Parkir Berlangganan – Polres Bondowoso ... 292
Tabel 5-377 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya ... 292
Tabel 5-378 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya ... 293
Tabel 5-379 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Bahan Habis Pakai Umum (Alat Kesehatan) 293
Tabel 5-380 Rincian Saldo Utang Bahan Habis Pakai Umum (Alkes)..... 293
Tabel 5-381 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Bahan Habis Pakai Laboratorium (Bahan Kimia) 294
Tabel 5-382 Rincian Saldo Utang Bahan Habis Pakai Laboratorium (Bahan Kimia) 294
Tabel 5-383 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Obat 294
Tabel 5-384 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Obat 294
Tabel 5-385 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Oksigen 295
Tabel 5-386 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Oksigen..... 295
Tabel 5-387 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Bahan Habis Pakai Gigi 295
Tabel 5-388 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Bahan Habis Pakai Gigi..... 295
Tabel 5-389 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Bahan Habis Pakai IBS/RBS 295

Tabel 5-390 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Bahan Habis Pakai IBS/RBS ... 296
Tabel 5-391 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Bahan Habis Pakai Radiologi ... 296
Tabel 5-392 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Bahan Habis Pakai Cathlab ... 296
Tabel 5-393 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Bahan Habis Pakai Cathlab ... 296
Tabel 5-394 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Bahan Habis Pakai Orthopedi ... 296
Tabel 5-395 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Bahan Habis Pakai Orthopedi .. 297
Tabel 5-396 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Biaya Pemeriksaan Penunjang Medik ... 297
Tabel 5-397 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Nitrogen ... 297
Tabel 5-398 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Nitrogen ... 297
Tabel 5-399 Rincian Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi BPJS – Dinas Kesehatan . 297
Tabel 5-400 Rincian Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi BPJS – RSUD dr H. Koesnadi ... 298
Tabel 5-401 Rincian Utang Jasa Pelayanan Non Maskin ... 298
Tabel 5-402 Rincian Utang Jasa Pelayanan SJP ... 298
Tabel 5-403 Rincian Utang Jasa Pelayanan Covid-19 ... 298
Tabel 5-404 Rincian Utang Jasa Pelayanan Umum – Dinkes ... 298
Tabel 5-405 Rincian Utang Jasa Pelayanan Umum – RSUD dr H. Koesnadi ... 298
Tabel 5-406 Rincian Utang Jasa Pemusnahan Sampah Medis ... 299
Tabel 5-407 Rincian Utang Jasa Pelayanan Jampersal ... 299
Tabel 5-408 Rincian Utang Belanja Pegawai ... 299
Tabel 5-409 Rincian Utang Belanja Barang ... 299
Tabel 5-410 Rincian Utang Belanja Jasa ... 299
Tabel 5-411 Rincian Utang Belanja Perjalanan Dinas ... 300
Tabel 5-412 Rincian Utang Belanja Hibah ... 300
Tabel 5-413 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya ... 300
Tabel 5-414 Rincian Utang Titipan Dana Bantuan Sapi Banpres ... 301
Tabel 5-415 Rincian Utang Bantuan Sosial kepada Partai Politik ... 301
Tabel 5-416 Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Transfer ... 301
Tabel 5-417 Rincian Bantuan Keuangan Provinsi ... 301
Tabel 5-418 Kelompok Pendapatan LO ... 302
Tabel 5-419 Jenis Pendapatan Asli Daerah ... 303
Tabel 5-420 Obyek Pendapatan Pajak Daerah ... 303
Tabel 5-421 Rincian Pajak Hotel-LO ... 303
Tabel 5-422 Rincian Pajak Restoran-LO ... 304
Tabel 5-423 Rincian Pajak Hiburan-LO ... 304
Tabel 5-424 Rincian Pajak Reklame-LO ... 304
Tabel 5-425 Rincian Pajak Penerangan Jalan-LO ... 305

Tabel 5-426 Rincian Pajak Parkir-LO 305
Tabel 5-427 Rincian Pajak Air Tanah-LO 305
Tabel 5-428 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO 306
Tabel 5-429 Rincian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO 306
Tabel 5-430 Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO.. 306
Tabel 5-431 Obyek Pendapatan Retribusi Daerah 307
Tabel 5-432 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum 307
Tabel 5-433 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha 307
Tabel 5-434 Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu 308
Tabel 5-435 Obyek Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 308
Tabel 5-436 Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO 308
Tabel 5-437 Obyek Lain-Lain PAD Yang Sah-LO 309
Tabel 5-438 Rincian Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan- LO 309
Tabel 5-439 Rincian Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan-LO 310
Tabel 5-440 Rincian Jasa Giro-LO 310
Tabel 5-441 Rincian Pendapatan Bunga-LO 310
Tabel 5-442 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO 310
Tabel 5-443 Rincian Penerimaan atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO 311
Tabel 5-444 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO 311
Tabel 5-445 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO 311
Tabel 5-446 Rincian Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO . 312
Tabel 5-447 Rincian Pendapatan dari Pengembalian-LO 312
Tabel 5-448 Rincian Pendapatan dari BLUD-LO 313
Tabel 5-449 Rincian Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO..... 313
Tabel 5-450 Rincian Pendapatan Transfer 314
Tabel 5-451 Obyek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO 314
Tabel 5-452 Rincian Dana Bagi Hasil 314
Tabel 5-453 Rincian Dana Alokasi Umum – LO 315
Tabel 5-454 Rincian Dana Alokasi Khusus-Fisik 315
Tabel 5-455 Rincian Dana Alokasi Khusus – Non Fisik 317
Tabel 5-456 Obyek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 317
Tabel 5-457 Rincian Dana Insentif Daerah (DID 318
Tabel 5-458 Obyek Pendapatan Transfer Antar Daerah 318
Tabel 5-459 Rincian Pendapatan Bagi Hasil-LO 318
Tabel 5-460 Rincian Pendapatan Bagi Hasil-LO 319
Tabel 5-461 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO 319

Tabel 5-462 Pendapatan Hibah 319
Tabel 5-463 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO 320
Tabel 5-464 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO 320
Tabel 5-465 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO 320
Tabel 5-466 Rincian Pendapatan Lainnya 320
Tabel 5-467 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP 320
Tabel 5-468 Jenis Beban 321
Tabel 5-469 Obyek Beban Pegawai 321
Tabel 5-470 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN 322
Tabel 5-471 Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN 322
Tabel 5-472 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 323
Tabel 5-473 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD 323
Tabel 5-474 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 324
Tabel 5-475 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 324
Tabel 5-476 Rincian Beban Beban Pegawai BLUD 324
Tabel 5-477 Obyek Beban Persediaan 325
Tabel 5-478 Rincian Beban Barang 325
Tabel 5-479 Obyek Beban Jasa 325
Tabel 5-480 Rincian Beban Jasa 325
Tabel 5-481 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 326
Tabel 5-482 Rincian Obyek Beban Pemeliharaan 326
Tabel 5-483 Rincian Beban Pemeliharaan 327
Tabel 5-484 Obyek Beban Perjalanan Dinas 327
Tabel 5-485 Rincian Beban Pemeliharaan 327
Tabel 5-486 Obyek Beban Subsidi 328
Tabel 5-487 Rincian Beban Pemeliharaan 328
Tabel 5-488 Obyek Beban Hibah 328
Tabel 5-489 Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat 329
Tabel 5-490 Rincian Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 329
Tabel 5-491 Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 329
Tabel 5-492 Rincian Beban Hibah Barang Untuk Dijual/Diserahkan 329
Tabel 5-493 Obyek Beban Bantuan Sosial 330
Tabel 5-494 Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu 330
Tabel 5-495 Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat 330
Tabel 5-496 Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 331
Tabel 5-497 Obyek Beban Penyusutan dan Amortisasi 331

Tabel 5-498 Rincian Beban Penyusutan 332
Tabel 5-499 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 332
Tabel 5-500 Obyek Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 332
Tabel 5-501 Rincian Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah..... 332
Tabel 5-502 Rincian Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah..... 333
Tabel 5-503 Rincian Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 333
Tabel 5-504 Obyek Beban Transfer 334
Tabel 5-505 Rincian Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ... 334
Tabel 5-506 Rincian Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 334
Tabel 5-507 Rincian Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa 334
Tabel 5-508 Obyek Beban Lain-Lain..... 335
Tabel 5-509 Rincian Beban Penurunan Nilai Investasi 335
Tabel 5-510 Rincian Beban Lain-lain 335
Tabel 5-511 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional..... 336
Tabel 5-512 Rincian Pos Luar Biasa..... 336
Tabel 5-513 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi..... 337
Tabel 5-514 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi..... 337
Tabel 5-515 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi..... 338
Tabel 5-516 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi..... 338
Tabel 5-517 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi 338
Tabel 5-518 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi 339
Tabel 5-519 Arus Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan..... 339
Tabel 5-520 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan 339
Tabel 5-521 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan 339
Tabel 5-522 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris..... 340
Tabel 5-523 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris 340
Tabel 5-524 Rincian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)..... 340
Tabel 5-525 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris 340
Tabel 5-526 Rincian Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 341
Tabel 5-527 Rincian Kenaikan dan Penurunan Kas..... 341
Tabel 5-528 Saldo Akhir Kas..... 341
Tabel 5-529 Rincian Saldo Akhir Kas 342
Tabel 5-530 Rincian Kas di Kas Daerah..... 342
Tabel 5-531 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan..... 342
Tabel 5-532 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran..... 342
Tabel 5-533 Rincian Kas di BLUD RSU dr. H. Koesnadi..... 342
Tabel 5-534 Rincian Kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - FKTP 343
Tabel 5-535 Rincian Kas di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - FKTP..... 343

Tabel 5-536 Rincian Kas di Bendahara BOS 344
Tabel 5-537 Rincian Kas Lainnya 344
Tabel 5-538 Selisih Rincian Pendapatan Pajak Daerah 346
Tabel 5-539 Selisih Rincian Pendapatan Retribusi Daerah 348
Tabel 5-540 Selisih Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 350
Tabel 5-541 Selisih Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah 350
Tabel 5-542 Selisih Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah 353
Tabel 5-543 Selisih Rincian Pendapatan Dana Alokasi Umum 355
Tabel 5-544 Selisih Rincian DAK Fisik 356
Tabel 5-545 Selisih Rincian DAK Non Fisik 356
Tabel 5-546 Selisih Rincian Desa 357
Tabel 5-547 Selisih Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak 357
Tabel 5-548 Selisih Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan 358
Tabel 5-549 Selisih Rincian Pendapatan Hibah 358
Tabel 5-550 Selisih Rincian Pendapatan Lainnya 359
Tabel 5-551 Selisih Rincian Beban Pegawai 359
Tabel 5-552 Selisih Rincian Beban Persediaan 360
Tabel 5-553 Selisih Rincian Beban Jasa 362
Tabel 5-554 Selisih Rincian Beban Pemeliharaan 364
Tabel 5-555 Selisih Rincian Beban Perjalanan Dinas 365
Tabel 5-556 Selisih Rincian Beban Subsidi 366
Tabel 5-557 Selisih Rincian Beban Hibah 367
Tabel 5-558 Selisih Rincian Beban Bantuan Sosial 368
Tabel 5-559 Selisih Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 369
Tabel 5-560 Selisih Rincian Beban Penyisihan Piutang 369
Tabel 5-561 Selisih Rincian Beban Bantuan Sosial 369
Tabel 5-562 Selisih Rincian Beban Lain-Lain 370
Tabel 5-563 Selisih Rincian Beban Luar Biasa 370

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi dan Organisasi

Lampiran 2 : Penyisihan Piutang

Lampiran 3 : Rincian Penerimaan Hibah Bahan

Lampiran 4 : Rincian Penerimaan Hibah Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Lampiran 5 : Rincian Penerimaan Hibah Obat

Lampiran 6 : Rincian Penerimaan Hibah Barang Untuk Dijual/Diserahkan

Lampiran 7 : Rincian Aset Tidak Berwujud

Lampiran 8 : Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I
PENDAHULUAN

Sejarah Bondowoso bermula dengan adanya pengembangan wilayah kekuasaan Besuki ke arah Selatan pada Tahun 1789 oleh Menteri Anom Abhiseka Mas Astruno. Pada Tahun 1794 dalam usaha memperluas wilayah beliau menemukan suatu wilayah yang sangat strategis untuk kemudian disebut Bondowoso dengan diangkatnya beliau sebagai Demang di daerah yang baru dengan nama Abhiseka Mas Ngabehi Astrotruno atau yang biasa dikenal dengan Raden Bagus Assra.

Perkembangan Bondowoso dari hari ke hari semakin meningkat dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1819 atau hari Selasa Kliwon tanggal 25 Syawal 1234 H, Adipati Besuki R. Aryo Prawirodiningrat sebagai orang yang memperoleh kepercayaan dari Gubernur Hindia Belanda, dalam rangka memantapkan strategi politiknya menjadikan wilayah Bondowoso lepas dari Besuki, dengan status Keranggan Bondowoso dan mengangkat Raden Bagus Assra atau Mas Ngabehi Astrotruno menjadi penguasa wilayah dan pimpinan agama, dengan gelar M. NG. Kertonegoro dan berpredikat Ronggo I, ditandai penyerahan Tombak Tunggul Wulung.

Secara struktur wilayah administrasi pemerintahan, Kabupaten Bondowoso dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, berada di wilayah bagian Timur Jawa Timur.

Wilayah geografis Kabupaten Bondowoso berada pada 113”048’10”-113”048’26” Bujur Timur dan 7”050’10”–7”056’41” Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.560,10 km2 atau 3,26% dari total luas Provinsi Jawa Timur, menempati urutan ke-12 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Secara administratif dibatasi oleh:

1) Bagian Utara : Kabupaten Situbondo.
2) Bagian Selatan : Kabupaten Jember.
3) Bagian Timur : Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi.
4) Bagian Barat : Kabupaten Probolinggo dan Situbondo.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso terletak di Jl. Letnan Amir Kusman Nomor 2 Bondowoso, memiliki 23 Kecamatan 10 Kelurahan 209 Desa serta dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah terbagi : Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, 3 Staf Ahli, 3 Asisten, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, 7 Badan, 16 Dinas, Inspektorat, RSUD dr. H. Koesnadi, BUMD PDAM dan BUMD PT Bondowoso Gemilang.

Kemudian ketentuan perundang-undangan yang melandasi Kegiatan Operasional Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 61).

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bupati selaku pengelola keuangan daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai entitas akuntansi berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Kabupaten Bondowoso dimulai pada Tahun 2002, dimana Tahun 2023 merupakan tahun kesembilan penerapan basis akrual penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini disusun dengan metode pencatatan akuntansi berbasis akrual *(Accrual Basic Accounting*) dalam upaya menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan :

1. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
   a. Akuntabilitas
      Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
   b. Manajemen
      Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi
   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
   Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan :

1. Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
   a. Menyedikan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
   b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
   c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
   d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
   e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
   f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 31);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 32);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 33);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 29) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2024-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 5), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 46);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 156-5/2023);
41. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Sudah Kadaluwarsa;
42. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso;
43. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 34);
44. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 60 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 60);
45. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 64 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja dari Hibah yang Tidak Melalui Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 64);
46. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 59);
47. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
48. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 59); dan
49. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 61).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
2.4 Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
BAB IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1 Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1 Pendapatan-LRA;
5.1.2 Belanja
5.1.3 Transfer
5.1.4 Surplus/(Defisit)
5.1.5 Pembiayaan Netto
5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun Berjalan
5.2.3 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya
5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
5.3 Neraca
5.3.1 Aset
5.3.2 Kewajiban
5.3.3 Ekuitas
5.4 Laporan Operasional
5.4.1 Pendapatan – LO
5.4.2 Beban
5.4.3 Surplus/ Defisit dari Operasi
5.4.4 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

5.4.6 Pos Luar Biasa
5.4.7 Surplus/ Defisit LO
5.5 Laporan Arus Kas
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
5.5.5 Kenaikan / (Penurunan) Kas
5.5.6 Saldo Akhir Kas Total
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
5.6.1 Ekuitas Awal
5.6.2 Surplus/Defisit LO
5.6.3 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar
5.6.4 Ekuitas Akhir
5.7 Pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual
BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
BAB VII Penutup

Bab II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial.

Terdapat beberapa indikator yan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah antara lain : Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu yang dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Ekonomi Bondowoso Tahun 2023 mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 4,62% setelah tahun sebelumnya (2022) tumbuh sebesar 3,51%. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,11% point. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mengalami kontraksi.

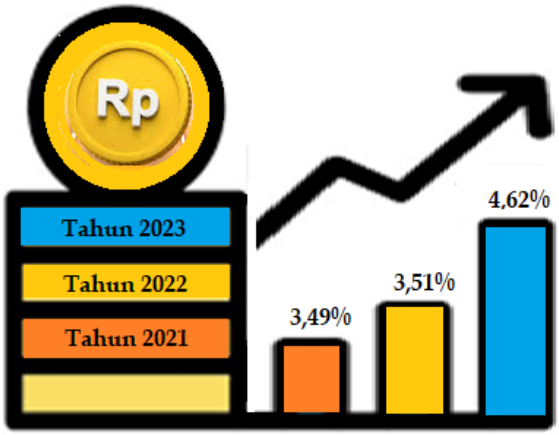

Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2023

Tabel 2-1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023

No	Uraian Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Ekonomi		
		Th 2021	Th 2022	Th 2023
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2,38%	-1,61%	2,06%
2	Pertambangan dan Penggalian	1,79%	5,91%	2,02%
3	Industri Pengolahan	3,81%	6,23%	5,02%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,34%	6,77%	7,02%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	6,31%	-0,77%	-0,33%
6	Konstruksi	0,38%	6,70%	6,00%

No	Uraian Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Ekonomi		
		Th 2021	Th 2022	Th 2023
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	6,43%	6,76%	6,42%
8	Transportasi dan Pergudangan	12,37%	14,09%	9,75%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,15%	11,99%	10,41%
10	Informasi dan Komunikasi	6,85%	3,09%	7,31%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,05%	1,13%	4,69%
12	Real Estat	1,44%	5,25%	1,78%
13	Jasa Perusahaan	1,65%	4,72%	6,78%
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,61%	-1,53%	-1,28%
15	Jasa Pendidikan	2,14%	1,93%	5,96%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,43%	1,36%	4,34%
17	Jasa Lainnya	4,18%	10,75%	9,59%
Pertumbuhan Ekonomi		**3,49%**	**3,51%**	**4,62%**

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,41%. Selain itu, pertumbuhan cukup tinggi lainnya pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,76%. Sementara itu, pertumbuhan lapangan usaha Jasa Lainnya juga tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 9,59%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi selanjutnya adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 7,31%. Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 7,10%.

Tabel 2-2 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023

No	Uraian Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB		
		Th 2021	Th 2022	Th 2023
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	29,47%	28,34%	27,88%
2	Pertambangan dan Penggalian	1,84%	1,86%	1,83%
3	Industri Pengolahan	24,42%	25,28%	25,43%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04%	0,04%	0,04%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	0,07%	0,07%	0,07%
6	Konstruksi	8,80%	9,13%	9,22%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	14,90%	15,37%	15,66%
8	Transportasi dan Pergudangan	0,75%	0,83%	0,91%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,63%	0,68%	0,71%
10	Informasi dan Komunikasi	5,64%	5,40%	5,41%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,83%	2,80%	2,80%
12	Real Estat	1,16%	1,14%	1,09%
13	Jasa Perusahaan	0,36%	0,36%	0,36%
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,32%	3,07%	2,86%
15	Jasa Pendidikan	3,52%	3,34%	3,37%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80%	0,77%	0,76%
17	Jasa Lainnya	1,44%	1,54%	1,61%
Jumlah		**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Struktur PDRB Bondowoso atas dasar harga berlaku Tahun 2023 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27,88%. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mendominasi struktur PDRB menurut lapangan usaha dengan kontribusi di atas 25%. Namun, tren kontribusinya terlihat semakin menurun dari tahun ke tahun.

Lapangan usaha lainnya yang memiliki peran dominan antara lain Industri Pengolahan sebesar 25,43%; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,66%; Konstruksi sebesar 9,22%; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 5,41%. Besaran kontribusi Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terlihat semakin meningkat selama tiga tahun terakhir. Selain itu, lapangan usaha Konstruksi dan Informasi dan Komunikasi cenderung konstan. Kontribusi dari 5 (lima) lapangan usaha yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi;

serta Informasi dan Komunikasi mencapai 83,60% dari total PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2023

Tabel 2-3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023

No	Uraian Lapangan Usaha	PDRB ADHK			PDRB ADHB		
		Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2021	Th 2022	Th 2023
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.818,35	3.756,87	3.834,43	6.204,93	6.489,78	6.906,68
2	Pertambangan dan Penggalian	257,49	272,71	278,22	388,06	425,65	453,48
3	Industri Pengolahan	3.358,39	3.567,46	3.746,55	5.140,41	5.788,78	6.300,31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,94	7,41	7,93	9,01	9,74	10,59
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	12,06	11,97	11,93	15,68	16,12	16,37
6	Konstruksi	1.107,78	1.182,05	1.252,99	1.852,41	2.091,20	2.282,93
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	2.182,66	2.330,19	2.479,69	3.136,50	3.520,24	3.880,21
8	Transportasi dan Pergudangan	113,59	129,60	142,24	158,08	189,64	224,70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	84,00	94,07	103,86	132,78	155,04	175,92
10	Informasi dan Komunikasi	1.041,68	1.073,90	1.152,35	1.188,01	1.236,89	1.339,17
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	399,27	403,80	422,72	596,56	641,28	693,49
12	Real Estat	175,91	185,14	188,44	243,67	259,97	269,44
13	Jasa Perusahaan	47,61	49,86	53,24	76,35	81,73	89,40
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	440,13	433,39	427,86	697,89	702,78	709,43
15	Jasa Pendidikan	529,62	539,84	572,03	741,71	764,93	834,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121,78	123,44	128,80	167,71	175,56	187,16
17	Jasa Lainnya	224,39	248,51	272,34	302,49	352,51	399,97
Jumlah		**13.921,65**	**14.410,20**	**15.075,62**	**21.052,23**	**22.901,86**	**24.773,36**

Perekonomian Bondowoso berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sepanjang 3 (tiga) tahun mengalami peningkatan dari Rp.21,05 triliyun pada Tahun 2021, menjadi Rp.22.90 triliyun pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 mencapai Rp.24,77 triliun. Begitu pula PDRB ADHK meningkat dari Rp.13,92 triliyun Tahun 2021, meningkat menjadi Rp.14,41 triliyun pada Tahun 2021 dan Tahun 2023 mencapai angka sebesar Rp.15,08 triliyun.

2. PDRB Perkapita

PDRB per kapita adalah nilai produksi (Produk Domestik Regional Bruto) yang dihasilkan oleh setiap penduduk setiap tahun. PDRB per kapita merupakan indikator pendekatan terhadap pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Bondowoso terus meningkat seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Bondowoso baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Adapun PDRB secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2-4 PDRB Perkapita Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2023

No	Uraian PDRB Per kapita	Tahun (dalam Juta)		
		2021	2022	2023
1	ADHB (Rp)	27,01	29,22	31,43
2	ADHK (Rp)	17,86	18,38	19,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Bondowoso untuk ADHB pada Tahun 2023 mencapai Rp.31,43 juta per tahun, yang berarti rata-rata setiap penduduk di Bondowoso mampu menghasilkan nilai komoditas barang dan jasa sebesar Rp.2,62 juta/bulan.

Sedangkan PDRB per kapita ADHK pada Tahun 2023 mencapai angka Rp.19,13 juta per tahun yang berarti produktivitas penduduk Bondowoso dalam menghasilkan barang dan jasa rata-rata sebesar Rp.1,59 juta/per bulan.

3. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan.

Tabel 2-5 Indeks Gini Kabupaten Bondowoso 2021-2023

No	Uraian	Th 2021	Th 2022	Th 2023
1	Gini Rasio	0,334	0,365	0,350

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan Indek Gini sepanjang Tahun 2023 di Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan menjadi 0,350 atau menurun 0,015 point dari Tahun 2022. Tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat di Bondowoso cenderung menurun meskipun masih dalam kategori ketimpangan “sedang”.

Distribusi pendapatan antar penduduk telah lama menjadi persoalan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Masalah distribusi pendapatan ini mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Kondisi penduduk Bondowoso yang dibawah garis kemiskinan saat ini (Tahun 2023) mengalami peningkatan ketimpangan berdasarkan indek kedalaman dan indek keparahan kemiskinan dibandingkan dengan kondisi Tahun 2022 meskipun indek gini menurun secara agregat diwilayah Bondowoso. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum dapat dirasakan secara merata pada penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan aspek yang kedua adalah distribusi pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersepit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 secara agregat di Kabupaten Bondowoso dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan semakin menurunnya indek gini serta menurunnya tingkat kemiskinan baik secara persentase maupun jumlah penduduk miskin.

Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi. Perlu adanya rumusan kebijakan lokal untuk lebih menurunkan besaran angka koefisien gini. Pemerintah akan lebih mengedepankan pengawasan terhadap pendanaan atau bantuan yang diberikan agar lebih tepat sasaran untuk menjangkau masyarakat yang kurang mampu serta distribusi pelaksanaan pembangunan daerah yang berkarakteristik kewilayahan dan kebutuhan masyarakat.

4. Persentase Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan yang digunakan sebagai indikator makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 2-6 Tingkat Kemiskinan Tahun 2021-2023

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2021	14,73	423.150	115,18	2,19	0,49
2022	13,47	449.760	105,69	1,62	0,33
2023	13,34	494.000	105,13	2,06	0,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Bondowoso, 2024

Secara umum, dalam periode 2021-2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2021 sebesar 115,18 ribu jiwa, berkurang sekitar 10,05 ribu jiwa menjadi 105,13 ribu jiwa pada Tahun 2023. Sementara itu, berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2021 sebesar 14,73%, berkurang sebesar 1,39% poin atau menjadi 13,34% pada Tahun 2023.

Garis Kemiskinan Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.494.000,00 per kapita per bulan apabila dibandingkan Tahun 2022, Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp.44.240,00 per kapita per bulan menjadi sebesar Rp.449.760,00. Peningkatan Garis Kemiskinan ini terjadi diantaranya akibat peningkatan harga diberbagai komoditas, terutama komoditas bahan makanan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Bondowoso mengalami kenaikan nilai dari 1,62 pada Tahun 2022 menjadi 2,06 pada Tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan penduduk miskin juga semakin melebar.

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan dari 0.33 pada Tahun 2022 menjadi 0,51 pada 2023 yang menunjukkan persebaran pengeluaran penduduk miskin dibawah garis kemiskinan semakin beragam. Kondisi ini menunjukkan, semakin bertambahnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso dibandingkan dengan Tahun 2022. Hal tersebut tentunya membutuhkan perlakuan dalam upaya pengentasan kemiskinan, dimana perlu adanya program pembangunan yang bersifat spesifik untuk tiap kelompok pengeluaran penduduk miskin.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas Agustus Tahun 2023 Kabupaten Bondowoso sebesar 4,15% mengalami penurunan 0,17% dari Tahun 2022 yang mencapai 4,32%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,17 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Menurunnya TPT menunjukkan nilai kinerja yang positif. Dengan berkurangnya TPT, berarti semakin banyak masyarakat yang memiliki akses ke lapangan kerja. Adapun data ketenagakerjaan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2-7 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2023

No	Rincian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Usia Kerja (jiwa)	632.700	636.559	629.946
2	Angkatan Kerja (jiwa)	467.488	474.928	468.642
3	Bukan angkatan Kerja (jiwa)	165.212	161.631	161.304
4	Bekerja (jiwa)	446.653	454.395	449.210

No	Rincian	Tahun		
		2021	2022	2023
5	Pengangguran Terbuka (jiwa)	20.835	20.533	19.432
6	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	4,46	4,32	4,15
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	73,89	74,61	74,39

Statistik Ketenagakerjaan pada Agustus Tahun 2023 terdiri dari 449.210 orang penduduk yang bekerja dan 19.432 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021 yaitu kondisi dimana merupakan puncak terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 1.154 orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 2.557 orang dan pengangguran menurun sebanyak 1.403 orang. Sedangkan apabila dibandingkan dengan kondisi Agustus Tahun 2022, jumlah angkatan kerja mengalami penurunan sebanyak 6.286 orang. Penduduk bekerja juga turun sebanyak 5.185 orang dan pengangguran turun sebanyak 1.101 orang. Sejalan dengan penurunan jumlah angkatan kerja pada Tahun 2023 maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menurun 0,22% poin dibandingkan Tahun 2022 menjadi 74,39%.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, terdapat tiga sektor lapangan pekerjaan utama yaitu Pertanian, manufaktur dan jasa. Lapangan pekerjaan Pertanian meliputi subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Lapangan pekerjaan manufaktur (industri) terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, dan sektor konstruksi. Sedangkan lapangan pekerjaan jasa yang terdiri dari sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi, transportasi dan komunikasi, keuangan serta jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan.

Tabel 2-8 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2023

No	Jenis Pekerjaan	Th 2021	Th 2022	Th 2023
1	Pertanian	204.486	174.079	194.643
2	Manufaktur	87.302	96.559	84.541
3	Jasa	154.865	183.757	170.026
Jumlah		**446.653**	**454.395**	**449.210**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2024

Pada Tahun 2023, penduduk yang bekerja sebanyak 449.210 orang, berkurang 5.185 orang dari Tahun 2022 yang sebesar 454.395 orang. Sektor pertanian menjadi kontribusi terbesar penyerapan tenaga kerja dengan persentase orang yang bekerja yaitu sebesar 43,33% (194.643 orang). Disusul dengan sektor jasa sebesar 37,85% (170.026 orang) dan manufaktur dengan persentase 18,82% (84.541 orang). Dibanding Tahun 2022 dari ketiga sektor lapangan usaha tersebut, Pertanian mengalami peningkatan persentase sebesar 5,02%, berbanding terbalik dengan sektor jasa dan manufaktur yang turun sebesar 2,58% dan 2,43% orang yang bekerja.

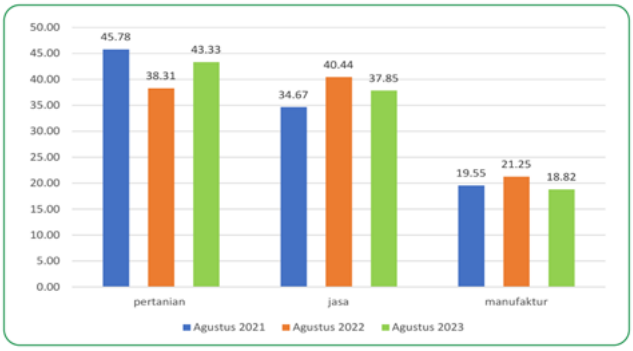

Gambar 1. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM juga menjadi salah satu ukuran untuk mengetahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Tabel 2-9 Perkembangan IPM Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Indek pembangunan Manusia/IPM (Penyesuaian dengan menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)	69,24	69,91	70,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2023

Pembangunan manusia di Kabupaten Bondowoso terus mengalami kemajuan hingga Tahun 2022, dengan status pembangunan manusia Kabupaten Bondowoso berada pada level "sedang". Pada Tahun 2023 ini, status pembangunan manusia Kabupaten Bondowoso meningkat menjadi level "tinggi". Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 mencapai 70,56, meningkat 0,65 poin (0,93%) dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 sebesar 69,91.

Tabel 2-10 Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	72,71	72,98	73,19
2	Harapan Lama sekolah (HLS)	13,29	13,31	13,32
3	Rata Lama Sekolah (RLS)	5,94	6,22	6,36
4	Pengeluaran per Kapita (Rp.000,00)	10.690	10.851	11.255

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2024

Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM Tahun 2023 sebesar 0,93% sedikit melambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 0,97%. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami perlambatan, kecuali dimensi standar hidup layak yang mengalami percepatan. Selama 2021–2023, IPM Kabupaten Bondowoso rata-rata meningkat sebesar 0,70% per tahun.

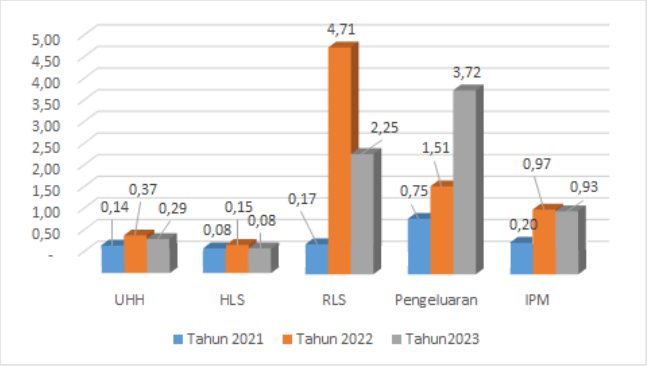

Gambar 2. Persentase Pertumbuhan Komponen Pembentuk IPM dan IPM Tahun 2021-2023

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2021 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,48 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,27% per tahun. Pada Tahun 2021, UHH Kabupaten Bondowoso adalah 72,71 tahun dan pada Tahun 2023

mencapai 73,19 tahun. UHH Tahun 2023 meningkat 0,21 tahun (0,29%) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2021-2023 (0,27%).

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2021 hingga 2023, HLS Kabupaten Bondowoso rata-rata meningkat 0,10% per tahun, sementara RLS meningkat 2,38% per tahun. RLS Tahun 2023 meningkat 0,14 tahun (2,25%) dibandingkan Tahun 2022, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2021-2023.

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada Tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Bondowoso mencapai Rp.11,255 juta per tahun. Capaian ini meningkat 404 ribu rupiah (3,72%) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2021-2023 yang sebesar 1,99% per tahun.

2.2 Kebijakan Keuangan

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai kebijakan yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi tersebut, diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan terutama peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Kebijakan anggaran untuk pendapatan daerah merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Bondowoso sesuai urusannya dan diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan serta lain – lain pendapatan daerah yang sah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, sebagai berikut:

a. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan restribusi daerah melalui upaya penertiban pemungutan pajak serta memperbaiki sistem pengendalian dan pengawasan sehingga diharapkan mampu meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah;
b. Melakukan rehabilitasi dan optimalisasi infrastruktur yang potensial serta mendukung sektor perekonomian;
c. Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD;
d. Melakukan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
e. Pengawasan obyek pajak pada saat terdapat penyelenggaraan kegiatan insidentil (pagelaran musik, pertandingan olah raga, dan lain-lain);
f. Pembinaan wajib pajak dalam penyelesaian masalah data obyek dan subyek pajak;
g. Penetapan pengenaan pajak dan restribusi daerah serta besarnya angsuran/tunggakan pajak yang terhutang;
h. Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak;

i. Melakukan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
j. Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak;
k. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, restribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan PBB serta pajak propinsi sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah;
l. Pembinaan terhadap kinerja perusahaan daerah; dan
m. Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual.

2. Dana Perimbangan

Kebijakan dana perimbangan yaitu:
a. Berperan serta secara aktif terhadap pengelolaan pajak dan pendapatan lainnya yang berupa pendapatan bagi hasil bagi daerah;
b. Menetapkan target pajak/bukan pajak yang diaplikasikan dalam realisasi pajak secara optimal; dan
c. Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

4. Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi.
Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang terukur dengan memperhatikan setiap belanja yang dikeluarkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran belanja daerah selalu diperhatikan beberapa hal yang menjadi arah kebijakan belanja daerah antara lain:
a. Memperhatikan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diwajibkan, yang dibatasi maupun yang dilarang;
b. Peningkatan sinergitas dan keterpaduan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan proses dan mekanisme penganggaran daerah;
c. Transparansi penyusunan dan pemanfaatan APBD yang memperhatikan skala prioritas dan mempertimbangkan aspirasi dan melibatkan masyarakat;
d. Menyediakan anggaran pendamping dan anggaran penunjang bagi pelaksanaan bantuan program, baik yang berasal dari pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, maupun dari pihak lainnya sesuai ketetuan yang dipersyaratkan;

e. Optimalisasi pemanfaatan dana perimbangan, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat; dan
f. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan pengelola anggaran daerah.

5. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dilakukan dengan memanfaatkan kelebihan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan guna mengatasi defisit belanja daerah dengan melakukan optimalisasi penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan optimalisasi pengeluaran pembiayaan guna menjaga kesinambungan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam Tahun 2023 melaksanakan peningkatan prioritas pembangunan. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui urusan wajib pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan sosial.

Untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan dan urusan kearsipan.

Kemudian urusan pilihan mencakup urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian dan urusan transmigrasi. Serta urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu urusan administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan penelitian dan pengembangan.

2.4 Pencapaian Target Kinerja APBD

1. Pendapatan

Pencapaian target kinerja APBD – Pendapatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2-11 Pencapaian Target Kinerja APBD – Pendapatan

No	Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	**PENDAPATAN**					
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**5.1.1.1**	**250.803.864.324,00**	**211.009.393.993,12**	**84,13**	**189.504.490.467,06**
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	49.134.556.436,00	43.384.281.391,00	88,30	41.397.270.293,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	22.663.724.898,00	21.566.432.779,68	95,16	16.881.328.762,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	4.629.838.580,00	4.629.838.583,13	100,00	4.544.375.373,27
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	174.375.744.410,00	141.428.841.239,31	81,11	126.681.516.038,79
7	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.1.2**	**1.739.325.133.208,00**	**1.743.448.656.008,00**	**100,24**	**1.678.782.423.998,00**
8	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	**5.1.1.2.1**	**1.389.056.385.732,00**	**1.364.855.214.487,00**	**98,26**	**1.297.910.080.036,00**

No	Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
9	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	148.777.849.245,00	137.443.488.069,00	92,38	163.050.876.593,00
10	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.2	872.817.215.000,00	881.906.003.493,00	101,04	829.591.176.619,00
11	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1.3	109.380.471.000,00	100.481.994.423,00	91,86	95.866.127.142,00
12	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.1.4	258.080.850.487,00	245.023.728.502,00	94,94	209.401.899.682,00
13	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**	**5.1.1.2.2**	**224.397.404.000,00**	**224.397.404.000,00**	**100,00**	**239.393.195.000,00**
14	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	7.725.363.000,00
15	Dana Desa	5.1.1.2.2.2	224.397.404.000,00	224.397.404.000,00	100,00	231.667.832.000,00
16	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	**5.1.1.2.3**	**125.871.343.476,00**	**154.196.037.521,00**	**122,50**	**141.479.148.962,00**
17	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	114.025.948.000,00	142.351.187.500,00	124,84	120.622.425.962,00
18	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	11.845.395.476,00	11.844.850.021,00	100,00	20.856.723.000,00
19	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.1.1.3**	**42.327.446.415,00**	**35.962.713.057,00**	84,96	**40.191.479.944,00**
20	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	11.601.665.000,00
21	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	42.327.446.415,00	35.962.713.057,00	84,96	28.589.814.944,00
22	**JUMLAH PENDAPATAN**	**5.1.1**	**2.032.456.443.947,00**	**1.990.420.763.058,12**	**97,93**	**1.908.478.394.409,06**

Dari pencapaian target kinerja pendapatan daerah tersebut dapat diketahui bahwa secara umum realisasi pendapatan Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa permasalahan di lapangan.

Dapat dijelaskan bahwa mekanisme pungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Pajak hiburan dan pajak penerangan jalan merupakan jenis pajak dengan sistem *self assessment.*Selanjutnya pajak reklame dan pajak air tanah dipungut dengan sistem *official assesment*, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2. Belanja

Pencapaian target kinerja APBD – Belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2-12 Pencapaian Target Kinerja APBD – Belanja

No	Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	**BELANJA**					
2	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.1**	**1.665.134.077.426,00**	**1.518.643.228.947,03**	**91,20**	**1.377.797.615.369,66**
3	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	888.555.037.995,00	806.488.789.870,40	90,76	787.984.360.335,00
4	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	639.964.409.788,00	582.713.480.289,63	91,05	475.352.226.339,66
5	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	1.781.923.800,00	1.781.923.800,00	100,00	2.183.163.800,00
6	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	130.888.705.843,00	124.626.774.987,00	95,22	93.266.283.855,00
7	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	3.944.000.000,00	3.032.260.000,00	76,88	19.011.581.040,00
8	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.2**	**223.286.778.648,00**	**169.833.845.333,03**	**76,06**	**190.396.577.000,00**
9	Belanja Modal - Tanah	5.1.2.2.1	1.893.088.000,00	94.915.970,00	5,01	0,00
10	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	98.603.399.436,00	82.098.298.764,00	83,26	86.205.466.900,00
11	Belanja Modal - Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	47.797.199.662,00	20.570.157.238,30	43,04	48.977.092.155,00
12	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	65.805.593.910,00	58.084.684.454,73	88,27	48.386.382.840,00
13	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	8.542.497.640,00	8.469.163.161,00	99,14	6.802.635.105,00
14	Belanja Modal - Aset Lainnya	5.1.2.2.6	645.000.000,00	516.625.745,00	80,10	25.000.000,00
15	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.1.2.3**	**20.025.307.180,00**	**749.265.471,00**	**3,74**	**1.149.787.428,00**
16	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	20.025.307.180,00	749.265.471,00	3,74	1.149.787.428,00
17	**JUMLAH BELANJA**	**5.1.2**	**1.908.446.163.254,00**	**1.689.226.339.751,06**	**88,51**	**1.569.343.979.797,66**
18	**BELANJA TRANSFER**					
19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.3.1.1	4.913.455.644,00	4.913.455.644,00	100,00	4.527.376.025,00
20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.1.3.1.2	2.266.372.490,00	2.266.372.490,00	100,00	0,00

No	Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
21	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.3.2	322.125.764.100,00	322.125.764.100,00	100,00	327.038.076.262,00
22	**JUMLAH BELANJA TRANSFER**	**5.1.3**	**329.305.592.234,00**	**329.305.592.234,00**	**100,00**	**331.565.452.287,00**
23	**JUMLAH BELANJA DAN BELANJA TRANSFER**		**2.237.751.755.488,00**	**2.018.531.931.985,06**	**90,20**	**1.900.909.432.084,66**
24	**SURPLUS/DEFISIT**		**(205.295.311.541,00)**	**(28.111.168.926,94)**	**13,69**	**7.568.962.324,40**
25	**PEMBIAYAAN**					
26	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.1**	**220.295.311.541,00**	**220.340.427.541,33**	**100,02**	**227.726.349.216,93**
27	Penggunaan SiLPA	5.1.4.1.1	220.295.311.541,00	220.295.311.541,33	100,00	227.595.111.216,93
28	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1.2	0,00	45.116.000,00	0,00	131.238.000,00
29	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.2**	**15.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000.000,00**
30	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.2.1	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
31	**PEMBIAYAAN NETTO**	**5.1.4**	**205.295.311.541,00**	**205.340.427.541,33**	**100,02**	**212.726.349.216,93**
32	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN**	**5.1.5**	**0,00**	**177.229.258.614,39**	**0,00**	**220.295.311.541,33**

Belanja Wajib Pemerintah Daerah (*Mandatory Spending*)

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pada pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik antara lain pemenuhan belanja wajib (*mandatory spending*) dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan.

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat hal khusus lainnya yang perlu diperhatikan yang merupakan pengeluaran wajib bagi pemerintah daerah (*mandatory spending*) yang merupakan pengeluaran yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU HKPD. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
- Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Alokasi anggaran belanja wajib (*mandatory spending*) selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2-13 Alokasi Anggaran Belanja Wajib (*Mandatory Spending*)

No	Komponen Alokasi	P-APBD Tahun 2021	P-APBD Tahun 2022	P-APBD Tahun 2023	Alokasi Minimal
I	**Bidang Pendidikan**				
	- Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan	620.989.926.706,00	642.934.876.277,00	685.664.157.183,00	
	- Total Belanja Daerah	2.122.623.772.122,00	2.119.667.776.128,00	2.231.367.341.488,00	

No	Komponen Alokasi	P-APBD Tahun 2021	P-APBD Tahun 2022	P-APBD Tahun 2023	Alokasi Minimal
	- Rasio Alokasi	**29,26%**	**30,33%**	**30,73%**	**20%**
II	**Bidang Kesehatan**				
	- Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan	226.280.720.600,00	370.115.482.417,00	456.379.036.778,00	
	- Total Belanja Diluar Gaji ASN	1.572.061.587.722,00	1.505.678.707.608,00	1.614.251.073.142,00	
	- Rasio Alokasi	**14,39%**	**24,58%**	**28,27%**	**10%**
III	**Bidang Infrastruktur**				
	- Alokasi Anggaran Bidang Infrastruktur	207.633.591.018,00	343.567.248.260,00	680.706.282.091,00	
	- Total Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan	812.600.076.533,00	810.372.533.857,00	1.907.961.713.254,00	
	- Rasio Alokasi	**25,55%**	**42,40%**	**35,68%**	**25%**

Realisasi belanja wajib (*mandatory spending*) dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2-14 Realisasi Alokasi Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi	%
I.	**Fungsi Pendidikan**			
	A. Urusan Dinas Pendidikan	**618.041.929.459,00**	**593.525.768.940,27**	**96,03**
	1. Belanja Operasi	565.021.725.052,00	544.113.273.236,32	96,30
	- Belanja Pegawai	445.192.144.975,00	432.620.325.551,00	97,18
	- Belanja Barang dan Jasa	70.337.648.227,00	69.641.044.150,32	99,01
	- Belanja Hibah	23.818.189.000,00	22.670.703.535,00	95,18
	- Belanja Bantuan Sosial	25.673.742.850,00	19.181.200.000,00	74,71
	2. Belanja Modal	53.020.204.407,00	49.412.495.703,95	93,20
	B. Belanja Sub Kegiatan Diluar Dinas Pendidikan yang Menunjang Pelaksanaan Fungsi Pendidikan	**2.947.997.247,00**	**2.432.211.026,00**	**82,50**
	1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.931.200,00	41.667.500,00	126,53
	2. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	505.556.200,00	369.393.051,00	73,07
	3. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	505.556.200,00	190.960.550,00	37,77
	4. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35.636.250,00	30.716.250,00	86,19
	5. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	199.922.900,00	192.377.500,00	96,23
	6. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	482.129.097,00	479.468.800,00	99,45
	7. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	76.911.750,00	74.211.750,00	96,49
	8. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum pada Badan Kepegawaian Daerah	531.119.200,00	479.875.687,00	90,35
	9. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum Pada Badan Kepegawaian Daerah	15.000.000,00	13.712.900,00	91,42
	10. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan pada Badan Kepegawaian Daerah	548.234.450,00	546.096.138,00	99,61
	11. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan pada Badan Kepegawaian Daerah	15.000.000,00	13.730.900,00	91,54
	Jumlah Fungsi Pendidikan	**620.989.926.706,00**	**595.957.979.966,27**	**95,97**
II.	**Fungsi Kesehatan**			

No	Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi	%
	A. Urusan Dinas Kesehatan	**197.069.855.807,00**	**0,00**	**0,00**
	1. Belanja Operasi	173.973.786.246,00	0,00	0,00
	- Belanja Pegawai	79.928.276.729,00	0,00	0,00
	- Belanja Barang dan Jasa	93.845.509.517,00	0,00	0,00
	- Belanja Hibah	200.000.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	2. Belanja Modal	23.096.069.561,00	0,00	0,00
	B. Belanja Sub Kegiatan Diluar Dinas Kesehatan yang Menunjang Pelaksanaan Fungsi Kesehatan	**29.210.864.793,00**	**26.505.011.655,77**	**90,74**
	1. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	101.686.000,00	40.390.956,00	39,72
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1.057.200.000,00	231.200.500,00	21,87
	3. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.636.645.380,00	2.591.397.360,00	98,28
	4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.260.259.799,00	7.117.251.540,00	98,03
	5. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.537.390.114,00	2.502.537.440,00	98,63
	6. Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.616.403.000,00	13.059.700.136,77	89,35
	7. Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	450.000.000,00	422.285.283,00	93,84
	8. Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.000.000,00	396.423.750,00	99,11
	9. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	151.280.500,00	143.824.690,00	95,07
	Jumlah Fungsi Kesehatan	**226.280.720.600,00**	**26.505.011.655,77**	**11,71**
III.	**Fungsi Infrastruktur Daerah**			
	1. Belanja Modal	109.662.409.494,00	196.554.645.695,81	179,24
	- Tanah	0,00	0,00	0,00
	- Peralatan dan Mesin	67.526.380.496,00	95.221.279.024,00	141,01
	- Bangunan dan Gedung	10.351.099.058,00	42.446.436.867,21	410,07
	- Jalan, Irigasi dan Bangunan	23.623.901.495,00	51.677.563.443,60	218,75
	- Aset Tetap Lainnya	7.135.028.445,00	7.025.222.811,00	98,46
	- Aset Lainnya	1.026.000.000,00	184.143.550,00	17,95
	2. Belanja Pemeliharaan	7.270.010.670,00	6.234.966.189,00	85,76
	3. Belanja Hibah	68.887.678.204,00	130.514.844.220,06	189,46
	4. Belanja Bantuan Sosial	21.813.492.650,00	35.217.459.036,80	161,45
	5. Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Fungsi Infrastruktur Daerah	**207.633.591.018,00**	**368.521.915.141,67**	**177,49**

Tabel 2-15 Realisasi Alokasi Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi	%
I.	**Fungsi Pendidikan**			
	A. Urusan Dinas Pendidikan	**641.061.000.777,00**	**551.931.845.460,00**	**86,10**
	1. Belanja Operasi	585.417.276.786,00	501.021.375.619,00	85,58
	- Belanja Pegawai	473.586.949.234,00	401.825.147.282,00	84,85
	- Belanja Barang dan Jasa	73.645.357.352,00	61.568.027.404,00	83,60
	- Belanja Hibah	26.784.970.200,00	26.228.200.933,00	97,92
	- Belanja Bantuan Sosial	11.400.000.000,00	11.400.000.000,00	100,00
	2. Belanja Modal	55.643.723.991,00	50.910.469.841,00	91,49
	B. Belanja Sub Kegiatan Diluar Dinas Pendidikan yang Menunjang Pelaksanaan Fungsi Pendidikan	**1.873.875.500,00**	**1.842.937.679,00**	**98,35**
	1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
	2. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.000.000,00	24.368.700,00	97,47

No	Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi	%
	3. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	52.920.500,00	52.900.500,00	99,96
	4. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	57.355.000,00	47.909.800,00	83,53
	5. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	120.400.000,00	119.970.000,00	99,64
	6. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	301.360.000,00	300.517.200,00	99,72
	7. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidkan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
	8. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	75.000.000,00	73.800.000,00	98,40
	9. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan pada Badan Kepegawaian Daerah	1.111.840.000,00	1.093.471.479,00	98,35
	Jumlah Fungsi Pendidikan	**642.934.876.277,00**	**553.774.783.139,00**	**86,13**
II.	**Fungsi Kesehatan**			
	A. Urusan Dinas Kesehatan	**205.948.428.096,00**	**176.205.617.715,96**	**85,56**
	1. Belanja Operasi	179.996.232.804,00	154.746.086.082,96	85,97
	- Belanja Pegawai	79.593.880.412,00	72.153.226.895,00	90,65
	- Belanja Barang dan Jasa	100.202.352.392,00	82.392.859.187,96	82,23
	- Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	- Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	2. Belanja Modal	25.952.195.292,00	21.459.531.633,00	82,69
	B. Belanja Sub Kegiatan Diluar Dinas Kesehatan yang Menunjang Pelaksanaan Fungsi Kesehatan	**164.167.054.321,00**	**156.266.193.013,70**	**95,19**
	1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi	153.109.592.311,00	148.685.087.933,70	97,11
	2. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi	5.879.163.881,00	5.653.216.749,00	96,16
	3. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi	4.648.563.329,00	1.476.305.000,00	31,76
	4. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	49.400.000,00	43.852.731,00	88,77
	5. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	312.084.800,00	246.002.200,00	78,83
	6. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	165.250.000,00	158.746.400,00	96,06
	7. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3.000.000,00	2.982.000,00	99,40
	Jumlah Fungsi Kesehatan	**370.115.482.417,00**	**332.471.810.729,66**	**89,83**
III.	**Fungsi Infrastruktur Daerah**			
	1. Belanja Modal	218.810.715.070,00	190.396.577.000,00	87,01
	- Tanah	0,00	0,00	0,00
	- Peralatan dan Mesin	94.843.227.036,00	86.205.466.900,00	90,89
	- Bangunan dan Gedung	60.870.234.024,00	48.977.092.155,00	80,46
	- Jalan, Irigasi dan Bangunan	54.943.962.965,00	48.386.382.840,00	88,06
	- Aset Tetap Lainnya	7.153.291.045,00	6.802.635.105,00	95,10
	- Aset Lainnya	1.000.000.000,00	25.000.000,00	2,50
	2. Belanja Pemeliharaan	5.383.309.380,00	4.780.461.309,00	88,80
	3. Belanja Hibah	95.743.715.810,00	93.266.283.855,00	97,41
	4. Belanja Bantuan Sosial	23.629.508.000,00	19.011.581.040,00	80,46
	5. Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Fungsi Infrastruktur Daerah	**343.567.248.260,00**	**307.454.903.204,00**	**89,49**

Tabel 2-16 Realisasi Alokasi Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi	%
I.	**Fungsi Pendidikan**			
	A. Urusan Dinas Pendidikan	**661.786.624.983,00**	**585.899.861.762,78**	**88,53**
	1. Belanja Operasi	616.319.586.045,00	554.638.508.421,00	89,99
	- Belanja Pegawai	500.439.409.246,00	439.736.035.794,00	87,87
	- Belanja Barang dan Jasa	63.336.607.944,00	62.898.245.048,00	99,31
	- Belanja Hibah	52.543.568.855,00	52.004.227.579,00	98,97
	- Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	2. Belanja Modal	45.467.038.938,00	31.261.353.341,78	68,76
	B. Urusan Dinas Kebudayaan	**7.390.000.000,00**	**3.920.924.210,00**	**53,06**
	1. Belanja Operasi	2.670.869.000,00	2.620.132.950,00	98,10
	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Barang dan Jasa	1.730.869.000,00	1.685.882.950,00	97,40
	- Belanja Hibah	940.000.000,00	934.250.000,00	99,39
	- Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	2. Belanja Modal	4.719.131.000,00	1.300.791.260,00	27,56
	C. Urusan Dinas Perpustakaan	**4.770.095.200,00**	**3.427.824.410,00**	**71,86**
	1. Belanja Operasi	3.344.699.900,00	3.147.153.510,00	94,09
	- Belanja Pegawai	1.878.131.600,00	1.823.922.039,00	97,11
	- Belanja Barang dan Jasa	1.466.568.300,00	1.323.231.471,00	90,23
	- Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	2. Belanja Modal	1.425.395.300,00	280.670.900,00	19,69
	D. Urusan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	**11.717.437.000,00**	**4.076.290.722,00**	**34,79**
	1. Belanja Operasi	3.511.091.500,00	3.478.447.252,00	99,07
	- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Barang dan Jasa	1.019.654.500,00	1.008.873.412,00	98,94
	- Belanja Hibah	2.491.437.000,00	2.469.573.840,00	99,12
	- Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	2. Belanja Modal	8.206.345.500,00	597.843.470,00	7,29
	Jumlah Fungsi Pendidikan	**685.664.157.183,00**	**597.324.901.104,78**	**87,12**
II.	**Fungsi Kesehatan**			
	A. Urusan Dinas Kesehatan	**451.443.113.778,00**	**410.971.504.119,55**	**91,04**
	1. Belanja Operasi	374.674.017.008,00	349.315.743.789,03	93,23
	- Belanja Pegawai	138.616.457.329,00	130.656.304.931,40	94,26
	- Belanja Barang dan Jasa	235.557.559.679,00	218.159.438.857,63	92,61
	- Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
	- Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	2. Belanja Modal	76.769.096.770,00	61.655.760.330,52	80,31
	B. Belanja Sub Kegiatan Diluar Dinas Kesehatan yang Menunjang Pelaksanaan Fungsi Kesehatan	**4.935.923.000,00**	**4.059.262.929,00**	**82,24**
	1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.821.450.000,00	1.646.146.180,00	90,38
	2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	454.000.000,00	448.100.000,00	98,70
	3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.902.473.000,00	1.216.150.049,00	63,92
	4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	758.000.000,00	748.866.700,00	98,80
	Jumlah Fungsi Kesehatan	**456.379.036.778,00**	**415.030.767.048,55**	**90,94**
III.	**Fungsi Infrastruktur Daerah**			

No	Uraian	Anggaran P-APBD	Realisasi	%
	1. Belanja Modal	223.892.226.348,00	169.833.845.333,03	75,86
	- Tanah	2.499.200.000,00	94.915.970,00	3,80
	- Peralatan dan Mesin	98.602.735.136,00	82.098.298.764,00	83,26
	- Bangunan dan Gedung	47.797.199.662,00	20.570.157.238,30	43,04
	- Jalan, Irigasi dan Bangunan	65.805.593.910,00	58.084.684.454,73	88,27
	- Aset Tetap Lainnya	8.542.497.640,00	8.469.163.161,00	99,14
	- Aset Lainnya	645.000.000,00	516.625.745,00	80,10
	2. Belanja Pemeliharaan	5.753.530.000,00	5.531.991.760,00	96,15
	3. Belanja Hibah	130.905.725.643,00	124.626.774.987,00	95,20
	4. Belanja Bantuan Sosial	3.929.000.000,00	3.032.260.000,00	77,18
	5. Belanja Bantuan Keuangan	316.225.800.100,00	322.125.764.100,00	101,87
	Jumlah Fungsi Infrastruktur Daerah	**680.706.282.091,00**	**625.150.636.180,03**	**91,84**

Bab III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menerapkan penganggaran berbasis kas secara lebih luas mulai Tahun 2015. Artinya, angka-angka yang telah ditetapkan dalam APBD bukan hanya pendapatan dan belanja yang melalui mekanisme kas daerah, namun juga mencakup pendapatan dan belanja yang tidak melalui kas daerah meliputi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. H. Koesnadi dan Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS). Hal ini yang mendasari ditetapkannya Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 64 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja dari Hibah yang Tidak Melalui Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Dari sisi pembiayaan, APBD Tahun 2023 juga telah berpedoman pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 52 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menganggarkan pendapatan sebesar Rp2.032.456.443.947,00 dan terealisasi sebesar Rp1.990.420.763.058,12 atau sebesar 97,93%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.908.478.394.409,06, realisasi pendapatan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp81.942.368.649,06 atau 4,29% dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya.

Sementara dari sisi belanja dan belanja transfer untuk Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menganggarkan sebesar Rp2.237.751.755.488,00 dan terealisasi sebesar Rp2.018.531.931.985,06 atau sebesar 90,20%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.900.909.432.084,66 realisasi belanja Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp117.622.499.900,40 atau sebesar 6,19%.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Tahun Anggaran 2023 dalam melaksanakan program dan kegiatan urusan Pemerintah Daerah yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang adalah sebagai lampiran 1.

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pendapatan Asli Daerah daerah secara umum telah mencapai target yang direncanakan sebesar 84,13%. Salah satunya pencapaian pendapatan masih terdapat hambatan khususnya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pencapaian realisasinya sebesar 81,11%. Pendapatan Asli Daerah merupakan potensi pendapatan yang dapat dikelola secara luas oleh pemerintah daerah. Hambatan yang muncul menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menyelesaikannya dan sekaligus menjadikannya peluang untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan sesuai potensi daerah yang dimiliki.

Permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

1. Masih adanya subyek pajak daerah yang menunda/menghindari ketentuan pembayaran pajak. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perlu lebih ditingkatkan;
2. Akurasi data wajib pajak dan retribusi serta pengembangan terhadap objek pajak dan retribusi perlu untuk ditingkatkan dengan terus melakukan updating data guna mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi;
3. Melakukan kajian terhadap kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya peningkatan PAD;
4. Penyusunan naskah akademik penyesuai tarif, Rincian obyek, prosedur / sistem pemungutan dan ketentuan umum lainnya, pajak dan retribusi daerah;
5. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan, sosialilasi langsung kepada wajib pajak atau melalui media elektronik, baliho, spanduk, dan lain lain. Serta penyelesaian permasalahan perpajakan daerah dengan cepat dan tepat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku serta memberikan penghargaan kepada aparatur pemungut pajak daerah yang berprestasi;
6. Melakukan kegiatan pemuktahiran data obyek dan subyek pajak dan Retribusi daerah dengan survei zona nilai tanah dan pendataan ulang obyek dan subyek pajak secara bertahap;
7. Meningkatkan kemampuan aparatur pemungut melalui pembinaan, diklat teknis dan fungsional serta studi banding/lapang tentang sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan pengawasan secara berkala pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
9. Meningkatkan koordinasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan dinas terkait terhadap pelaksanaan pemungutan sumber sumber pendapatan daerah.
10. Pemenuhan sarana dan prasarana pemungutan dan sistem pemungutan berbasis Tehnologi Informasi (TI), pajak dan retribusi daerah;
11. Perlunya peningkatan kinerja dan tanggungjawab petugas pemungut dalam pengelolaan sumber PAD; dan
12. Melakukan pengkajian kembali terhadap peraturan-peraturan daerah tentang pajak dan retribusi agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan dengan regulasi atau kebijakan diatasnya serta dapat terus mengikuti perkembangan jaman khususnya dalam mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah.

Dalam upaya peningkatan sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terdapat beberapa permasalahan yaitu belum adanya kepastian perhitungan dana perimbangan dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga pemerintah daerah harus memperhitungkan secara cermat pengalokasian dalam perencanaannya.

Kemudian penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 88,51% masih perlu ditingkatkan dengan melakukan penajaman kegiatan pembangunan berdasarkan skala prioritas. Efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah perlu didorong dengan memperhatikan pencapaian sasaran dan target belanja sesuai dengan tugas dan fungsi, indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya penyerapan belanja transfer pada Tahun 2023 sebesar 100,00%. Hal ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja transfer dalam membiayai pembangunan daerah.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai entitas pelaporan keuangan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan daerah. Sedangkan entitas akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan OPD, kemudian dikonsolidasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso merupakan entitas akuntansi keuangan daerah yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Koesnadi
4. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
9. Dinas Peternakan dan Perikanan
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19. Dinas Perhubungan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
23. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Inspektorat
27. Kecamatan Bondowoso
28. Kecamatan Tamanan
29. Kecamatan Tenggarang
30. Kecamatan Tegalampel
31. Kecamatan Curahdami
32. Kecamatan Wringin
33. Kecamatan Pakem

34. Kecamatan Binakal
35. Kecamatan Maesan
36. Kecamatan Grujugan
37. Kecamatan Pujer
38. Kecamatan Wonosari
39. Kecamatan Sukosari
40. Kecamatan Tlogosari
41. Kecamatan Tapen
42. Kecamatan Sumber Wringin
43. Kecamatan Prajekan
44. Kecamatan Klabang
45. Kecamatan Cermee
46. Kecamatan Ijen
47. Kecamatan Taman Krocok
48. Kecamatan Jambesari Darussholah
49. Kecamatan Botolinggo
50. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kebijakan akuntansi ini bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purposes financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, pernyataan-pernyataan di dalam kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis Akrual.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu basis akrual untuk penyusunan laporan operasional, neraca, perubahan ekuitas sedangkan basis kas untuk penyusunan laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas.

Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas; dan

Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Basis Pengukuran Rekening-Rekening Neraca

A. Pengukuran Aset

1. Pengukuran aset lancar, adalah sebagai berikut :
   a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
   b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
   c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
   d. Persediaan dicatat sebesar :

1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
3. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut; dan
5. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

B. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.2 Basis Pengukuran Rekening-Rekening Laporan Realisasi Anggaran

A. Pengukuran Pendapatan

1. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang diterima; dan
2. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

B. Pengukuran Belanja

1. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan; dan
2. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam penerapannya dipilah menjadi dua yaitu:

A. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan

1. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

   Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menganggarkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada APBD Kabupaten Bondowoso mulai Tahun Anggaran 2016 sehingga saldo dana BOS akan menjadi bagian dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021.

   Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

   a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
   b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;
   c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan kemudian diakui sebagai pendapatan daerah;
   d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan kemudian diakui sebagai pendapatan daerah; dan
   e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
2. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan kemudian diakui sebagai pendapatan daerah;
3. Pendapatan Asli Daerah–LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD;
   a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi;
   b. Pengakuan Pendapatan Transfer–LRA adalah pada saat diterimanya

Pendapatan Transfer–LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD;

c. Pendapatan Transfer–LRA ini hanya diakui dan dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD); dan
e. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA diakui oleh PPKD.

Pengukuran

1. Pendapatan Asli Daerah–LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran;
2. Pengukuran Pendapatan Transfer–LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD;
3. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD);
4. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
5. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
6. Pendapatan dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian

1. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan daerah;
2. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
   a. Pendapatan Asli Daerah-LRA;
   b. Pendapatan Transfer-LRA; dan
   c. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA;
3. Pendapatan Asli Daerah–LRA, Transfer–LRA, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dalam mata uang rupiah serta rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
4. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA;
5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama;
6. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya

dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;

B. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
   a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);
   b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*); dan
   c. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
2. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan;
3. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
4. Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah serta Pendapatan Non Operasional;
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD melalui penetapan, PAD tanpa penetapan dan PAD dari hasil eksekusi jaminan.
   a. PAD melalui penetapan terdiri dari :
      1) *Official Assesment*
         Yaitu kelompok pendapatan yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh yang bersangkutan, misalnya pendapatan pajak reklame; Pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.
      2) *Self Assesment*
         Yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut; Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan; Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP).
   b. PAD tanpa penetapan
      PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Retribusi, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan

Kekayaan Daerah; Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pendapatan telah diterima.

c. PAD dari hasil eksekusi jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya; Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan; Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

6. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat/Provinsi akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso; Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut kecuali DAU; Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali terdapat dokumen yang sah dari pemerintah yang mengakui adanya utang dana transfer kepada daerah maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat mengakuinya sebagai pendapatan transfer; Dokumen dari pemerintah tersebut dapat berupa laporan keuangan yang telah diaudit, peraturan menteri/gubernur, dan surat pemberitahuan.

Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur transfer disampaikan entitas penyalur sebelum Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerbitkan laporan keuangan; Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan; Namun, dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso setelah laporan keuangan diterbitkan; Apabila terjadi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut;

Selain yang telah disebutkan di atas, ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso sesuai ketentuan; Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan; Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang; Contoh jenis transfer ini adalah Dana Desa.

Dana BOS disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah provinsi, untuk selanjutnya pemerintah provinsi berkewajiban menyalurkannya kembali kepada satuan pendidikan yaitu sekolah yang sebagian besar bukan merupakan bagian dari unit kerja pemerintah provinsi; Terdapat tiga kelompok sekolah penerima Dana BOS, yaitu sekolah negeri di bawah pemerintah provinsi, sekolah negeri pada pemerintah kabupaten dan kota, serta sekolah swasta.

Penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso diakui sebagai pendapatan; Sedangkan

untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui sebagai pendapatan karena bukan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

7. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
   Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya; Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan; Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut; Untuk itu pengakuan pendapatan hibah dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.
8. Pendapatan Non Operasional
   Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya; Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal : Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.
9. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan kemudian diakui sebagai pendapatan daerah.

Pengukuran

Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

1. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
2. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
4. Pendapatan Transfer-LO diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat lebih salur pada tahun anggaran sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada pada penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan transfer-LO dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang Ekuitas.

5. Lebih salur diakui sebesar ketetapan dari entitas penyalur yang dapat berupa penyajian pada laporan keuangan yang telah diaudit, peraturan menteri/gubernur, dan pemberitahuan dari pihak yang menyalurkan *transfer*.

Penyajian

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
3. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
4. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

A. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Pengakuan

1. Beban diakui pada saat :
   a. Timbulnya kewajiban;
   b. Terjadinya konsumsi aset; dan
   c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.
3. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya pembelian BBM kendaraan dinas.
4. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya penyusutan atau amortisasi.
5. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada saat:
   a. Timbulnya kewajiban;

b. Terjadinya konsumsi aset; dan
c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

6. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso maka pengakuan beban terdiri dari:
   a. Pengakuan beban dengan mekanisme pembayaran LS; dan
   b. Pengakuan beban dengan mekanisme pembayaran UP/GU/TU.
7. Beban dengan mekanisme LS diakui berdasarkan adanya dokumen yang dapat digunakan sebagai dasar tagihan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan dapat dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan.
8. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU diakui berdasarkan adanya bukti- bukti pengeluaran kas yang berasal dari uang persediaan dan dapat dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan.
9. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
   a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misalnya daftar gaji, tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum dibayar.
   b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum dibayar.
      1) Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air dan sejenisnya diakui ketika tagihan beban langganan daya dan jasa tersebut telah diterima Pemda/OPD.
      2) Untuk alasan kepraktisan, beban langganan daya dan jasa dapat diakui ketika dibayarkan dan untuk tagihan yang belum dapat dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan akan diakui sebagai beban bersamaan dengan pengakuan utang belanja/beban.
   c. Beban Persediaan
      1) Beban persediaan diakui sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
      2) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
      3) Pencatatan jurnal atas transaksi pembelian/perolehan persediaan untuk alasan kepraktisan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan beban yaitu dengan mencatat akun “Beban Persediaan” setiap kali terjadi transaksi perolehan persediaan, namun pada saat penyusunan Laporan Operasional dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun “Beban Persediaan” ke nilai persediaan yang telah dikonsumsi pada tahun anggaran yang berkenaan.
   d. Beban Bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
   e. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
   f. Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat

kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

g. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
h. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode yang sudah ditetapkan.
i. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan.
j. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui oleh pihak yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan :

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu :
   a. Beban Operasi, yang terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban lain-lain;
   b. Beban Transfer;
   c. Beban Non Operasional;
   d. Beban Luar Biasa;
   e. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
2. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

B. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

1. Belanja diakui pada saat kas telah dikeluarkan:
   a. Dari RKUD; atau
   b. Oleh bendahara pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
   c. Oleh OPD langsung dari pendapatan yang belum disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima pendapatan wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan diakui sebagai belanja daerah;
   d. Untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan diakui sebagai belanja daerah.
2. Pengeluaran belanja yang dibayar dengan mekanisme LS (Langsung), yaitu belanja yang dibayar langsung dari RKUD, diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke Bank untuk dicairkan.
3. Selama periode berjalan, belanja-LS (belanja yang dibayar dengan mekanisme LS) dapat diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan. Sementara itu, untuk belanja-LS yang dibayar pada akhir tahun anggaran diakui pada saat SP2D-LS diserahkan ke Bank untuk dicairkan.
4. Belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran merupakan belanja yang dibayar dengan mekanisme UP/GU/TU. Belanja-UP/GU/TU diakui apabila bukti-bukti pertanggungjawaban atas belanja tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
5. BUD/Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D-GU (Ganti Uang Persediaan) apabila penggunaan UP sebelumnya telah disahkan pertanggungjawabannya.
6. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
7. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui pada saat :
   a. Kas telah dikeluarkan dari Rekening kas BLUD; dan
   b. Kas telah dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran BLUD dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

1. Nilai nominal bruto sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes dan potongan sejenis lainnya;

2. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengeluran SPJ belanja UP/GU/TU; dan
3. Belanja dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penyajian

1. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.
2. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
3. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:
   a. Belanja Operasi:
      - Belanja Pegawai xxx
      - Belanja Barang xxx
      - Bunga xxx
      - Subsidi xxx
      - Hibah xxx
      - Bantuan Sosial xxx

   b. Belanja Modal:
      - Belanja Aset Tetap xxx
      - Belanja Aset Lainnya xxx
      - Belanja Lain-lain/Tak Terduga xxx
4. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.
5. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut :
   - Pelayanan Umum xxx
   - Pertahanan xxx
   - Ketertiban dan Keamanan xxx
   - Ekonomi xxx
   - Perlindungan Lingkungan Hidup xxx
   - Perumahan dan Permukiman xxx
   - Kesehatan xxx
   - Pariwisata dan Budaya xxx
   - Agama xxx
   - Pendidikan xxx
   - Perlindungan sosial xxx
7. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

8. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
9. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
10. Belanja transfer, yang selanjutnya akan disebut transfer keluar terdiri dari bermacam-macam jenis. Transfer keluar berbeda dengan belanja pada umumnya. Belanja berarti pengeluaran uang dari entitas pemerintahan ke non-entitas pemerintahan. Sedangkan transfer merupakan penyaluran dana dari satu entitas pemerintah kepada entitas pemerintah lainnya serta sama-sama sebagai entitas pelaporan. Entitas pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota serta mencakup pula desa.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

A. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang atau lebih dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat lebih salur pada tahun anggaran sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada pada penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang SiLPA.

B. Belanja Transfer

Belanja transfer, yang selanjutnya akan disebut transfer keluar terdiri dari bermacam-macam jenis. Transfer keluar berbeda dengan belanja pada umumnya. Belanja berarti pengeluaran uang dari entitas pemerintahan ke non-entitas pemerintahan. Sedangkan transfer merupakan penyaluran dana dari satu entitas pemerintah kepada entitas pemerintah lainnya serta sama-sama sebagai entitas pelaporan. Entitas pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota serta mencakup pula desa.

Terdapat jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempunyai kewajiban untuk meneruskan/menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso sesuai ketentuan. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang. Contoh jenis transfer ini adalah Dana Desa.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam penerapannya dipilah menjadi dua yaitu:

A. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
2. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan

1. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pengukuran

1. Pengeluaran Pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah.
2. Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.4.5 Perolehan Dan Pelepasan Investasi Pemerintah Dalam Perusahaan Negara/ Daerah/ Kemitraan Dan Unit Operasi Lainnya

Pencatatan investasi pada perusahaan negara/daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya. Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode.

Hal-hal yang diungkapkan adalah :

a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

A. Kas dan Setara Kas pada Aset Lancar

Kas dan Setara Kas pada Aset Lancar meliputi :

1. Saldo Kas pada BUD
   Saldo Kas pada BUD yang merupakan kas pemerintah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berupa Saldo Rekening Kas Umum Daerah.
2. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
   Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan per tanggal neraca. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas daerah. Pendapatan diakui

pada saat kas diterima di Bendahara Penerimaan, sehingga Kas di Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari SiLPA.

3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
   Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca. Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka hal ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca merupakan bagian dari SAL/SiLPA.
4. Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan
   Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan disajikan di neraca apabila memenuhi kriteria definisi, pengakuan dan pengukuran sebagai kas. Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan dapat berbentuk bunga jasa giro atas pengelolaan rekening bendahara pengeluaran di bank yang belum disetorkan per tanggal neraca; atau Pungutan pajak atas pembayaran yang dilakukan pada pihak ketiga dan belum disetorkan per tanggal neraca; atau pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung di akun bank Bendahara Pengeluaran.
5. Kas di BLU
   Peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) merupakan bagian dari pemerintah dan tidak terpisahkan dari kekayaan daerah, termasuk didalamnya adalah saldo Kas yang menjadi tanggung jawab BLUD. Oleh karenanya, setelah proses konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
6. Setara kas.
   Setara kas yang merupakan hak pemerintah disajikan sebagai bagian dari kas dan setara kas yang merupakan bagian dari SAL/SiLPA.

Pengakuan

1. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat :
   a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
   b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
   c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.
2. Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.
3. Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali.
4. Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan.
5. Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

6. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

Pengukuran

1. Penerimaan kas dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau disahkan.
2. Pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
3. Apabila penerimaan/pengeluaran kas dalam mata uang asing dan diterima/dikeluarkan dalam rekening mata uang asing, transaksi tersebut dicatat dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
4. Penerimaan/pengeluaran kas dalam bentuk mata uang asing dan diterima/dikeluarkan dalam akun bank bermata uang rupiah, maka jumlah mata uang asing tersebut dikonversi menjadi jumlah dalam rupiah sesuai kurs transaksi.
5. Jika pada penerimaan transfer diketahui terdapat pemotongan karena lebih salur dari tahun anggaran sebelumnya, maka pendapatan transfer dicatat secara bruto, yaitu sejumlah yang diterima di kas daerah ditambah jumlah pemotongan.
6. Terhadap jumlah yang dipotong dicatat sebagai pengembalian pendapatan transfer tahun anggaran yang lalu.

Penyajian

Seluruh uang yang dikuasai pemerintah dilaporkan dalam Neraca dan dapat disajikan dalam kelompok aset lancar dan aset nonlancar berdasarkan dari karakteristik uang tersebut.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

A. Pengakuan Piutang Berdasarkan Pungutan

Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria :

1. Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau.
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) maka piutang tersebut tetap diakui oleh entitas yang memiliki piutang, yang berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan atas

piutang tersebut. Akuntansi menyisihkan 100% piutang yang diserahkan ke PUPN tersebut.

B. Pengukuran Piutang Berdasarkan Pungutan

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

C. Pengakuan Piutang Perikatan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan kredit dan kemitraan, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.

D. Pengukuran Piutang Perikatan

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

1. Piutang Pemberian Pinjaman
   Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) sampai dengan akhir periode pelaporan.
2. Piutang Penjualan Kredit
   Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
3. Piutang Kemitraan
   Besarnya nilai piutang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
4. Pemberian Fasilitas/Jasa
   Besarnya nilai piutang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

E. Pengakuan Piutang Yang Berasal Dari Transfer Antar Pemerintahan

Dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Lainnya.

F. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Bagi hasil ini diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, bagi hasil ditransfer berdasar hasil realisasi yang telah dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

Piutang DBH dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran.

G. Dana Alokasi Umum

Di antara bentuk dana transfer, dapat dikatakan DAU merupakan dana dengan kepastian penerimaan oleh daerah paling tinggi. Berdasarkan UU nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari rincian APBN, ditetapkan Peraturan Presiden tentang DAU Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menetapkan besarnya rincian alokasi DAU untuk masing-masing Provinsi/Kota/ Kabupaten dalam satu tahun anggaran.

H. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer DAK dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan.

I. Transfer Lainnya

Selain ketiga jenis transfer di atas, pemerintah dalam setiap tahunnya dapat mengeluarkan kebijakan transfer yang lain. Ada dua kemungkinan mekanisme penyaluran, pertama bertahap dalam periode/bulan tertentu tanpa persyaratan tambahan dan kedua bertahap dengan persyaratan tertentu.

Piutang transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Lainnya diakui berdasarkan pernyataan utang dari pemerintah pusat karena adanya hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang belum ditransfer.

Pernyataan piutang atau utang dari pemerintah pusat dapat berbentuk : surat pemberitahuan, peraturan menteri atau laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diaudit. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menunggu informasi dari pemerintah pusat apabila akan mengakui piutang atau utang transfer.

J. Bagi Hasil Dari Provinsi

Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran.

Piutang bagi hasil dari provinsi diakui berdasarkan pernyataan utang dari pemerintah provinsi karena adanya hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang belum ditransfer.

Pernyataan utang dari pemerintah provinsi dapat berbentuk : surat pemberitahuan, peraturan gubernur atau laporan keuangan pemerintah provinsi yang telah diaudit. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menunggu informasi dari pemerintah provinsi apabila akan mengakui piutang transfer.

K. Transfer Antar Daerah

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah yang bersangkutan atau aturan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah tersebut. Dalam hal demikian terjadi, besar kemungkinan pelaksanaan transfer didasarkan pada realisasi pendapatan yang dikumpulkan oleh daerah penghasil/pemungut. Mekanisme demikian sama dengan yang diterapkan untuk pelaksanaan transfer DBH oleh pemerintah pusat ke daerah.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi bagian daerah penerima yang belum ditransfer. Jika nilai definitif jumlah yang menjadi bagian daerah penerima belum ditransfer seluruhnya hingga akhir periode laporan keuangan, maka berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku atau syarat lainnya yang sah jumlah yang belum ditransfer tersebut diakui sebagai piutang transfer antar daerah.

L. Piutang Karena Kerugian Daerah

Kemungkinan terjadi adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundangan yang berlaku karena adanya kerugian daerah.

Secara umum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundangan yaitu Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).

M. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah oleh atasan langsung pegawai negeri kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dilakukan oleh atasan langsung (pimpinan) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

N. Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

O. Pengakuan Piutang Karena Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan dan telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

P. Nilai Bersih Piutang Yang Dapat Direalisasikan

Piutang yang tercatat di Neraca harus terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) (NRV). Untuk menyajikan piutang sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Q. Kualitas Piutang

Kualitas piutang adalah kemungkinan atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur. Debitur adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.

Kualitas piutang digolongkan sebagai berikut :

1. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;

3. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas macet apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan.

R. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*). Penyisihan piutang tidak tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang.

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada setiap akhir periode akuntansi ditentukan sebagai berikut:

1. 0% (nol per seratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;
2. 30% (tiga puluh per seratus) dari Piutang yang memiliki kualitas kurang lancar;
3. 70% (tujuh puluh per seratus) dari Piutang yang memiliki kualitas diragukan; dan
4. 100% (seratus per seratus) dari Piutang yang memiliki kualitas macet.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berlaku untuk piutang pokok dan bunga yang ditimbulkannya. OPD dan/atau SKPKD wajib membentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas piutang yang menjadi tanggungjawabnya.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar di muka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan

Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Apabila dalam proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pencatatan transaksi beban dibayar di muka menggunakan pendekatan beban dan pada akhir periode akuntansi dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun beban ke nilai beban yang merupakan kewajiban pada tahun berjalan. Atas beban yang telah diakui dari kas yang dikeluarkan tersebut dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun beban dibayar dimuka.

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan namun belum menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Penyajian

Beban Dibayar di Muka disajikan pada neraca sebagai bagian dari Aset Lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Pengakuan

Pengeluaran dana bergulir diakui jika telah terjadi pengeluaran definitif dari rekening Kas Umum Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D LS atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pengukuran

Investasi non permanen dana bergulir dinilai sebesar harga perolehan yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.

Penyajian

1. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas;
2. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Dana Bergulir;
3. Dana Bergulir yang tercatat di Neraca harus terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*);
4. Untuk menyajikan dana bergulir sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan dana bergulir tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir; dan
5. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir.

Kualitas Dana Bergulir

1. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
2. Debitur adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
3. Kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
   a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
   b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;

c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan; dan
d. Kualitas macet apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan.

4. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan.

Penentuan Besaran Penyisihan Dana Bergulir

1. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Dana Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas Dana Bergulir.
2. Penyisihan dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (outstanding).
3. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya dana bergulir.
4. Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan :
   a. 0% (nol perseratus) dari Piutang/Dana Bergulir yang memiliki kualitas lancar;
   b. 30% (tiga puluh perseratus) dari Piutang/Dana Bergulir yang memiliki kualitas kurang lancar;
   c. 70% (tujuh puluh perseratus) dari Piutang/Dana Bergulir yang memiliki kualitas diragukan; dan
   d. 100% (Seratus perseratus) dari Piutang/Dana Bergulir yang memiliki kualitas macet.

Pemberhentian Pengakuan Dana Bergulir

Dalam keadaan belum ada Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Penghapusan Piutang, maka pelaksanaan penghapusan Piutang Dana Bergulir berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

1. Persediaan diakui:
   a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
   b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

2. Pencatatan persediaan pada kartu persediaan dilakukan setiap kali terjadi perolehan dan pengeluaran persediaan;
3. Pada akhir periode pelaporan dilakukan inventarisasi/penghitungan fisik persediaan (*stock opname*) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Persediaan;
4. Kartu persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode pelaporan;
5. Jika terdapat selisih antara kartu persediaan dengan hasil *stock opname* yang disebabkan persediaan hilang, usang, kedaluwarsa atau rusak dan selisih tersebut dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban persediaan;
6. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah abnormal, maka selisih persediaan ini dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah;
7. Beban Persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan;
8. Persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*); dan
9. Persediaan dalam kondisi kedaluwarsa, rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK.\

Pengukuran

1. Persediaan disajikan sebesar :
   a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
   b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
   c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
3. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO);
4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir;
5. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
6. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar;
7. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*);
8. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*);
9. Pengukuran pemakaian persediaan (*use of goods*) dihitung dengan cara saldo awal persediaan ditambah dengan pembelian/perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik kemudian hasilnya dikalikan harga/nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO; dan

10. Pengukuran persediaan pada akhir periode pelaporan dihitung dengan cara saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dikalikan dengan harga/nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO.

Penyajian

1. Beban Persediaan disajikan pada Laporan Operasional dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Persediaan disajikan pada neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang;

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar; Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan; Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar; Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi jangka pendek menggunakan metode biaya; Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan; Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya;
2. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
3. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
4. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek- proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut;
6. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya;

7. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi;
8. Diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut;
9. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (carrying value) investasi tersebut;
10. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium;
11. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam Laporan Operasional; dan
12. Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau biaya perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan nilai wajar investasi tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Panjang

1. Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan tiga metode, yaitu :
   a. Metode biaya
      Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
   b. Metode ekuitas
      Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
   c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
      Investasi dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasikan:
      1) Dalam hal investasi yang akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan,
      2) Dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.
2. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
   a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
   b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
   c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
   d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
   a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
   b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
   c. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Panjang

1. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada Laporan Operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Realisasi Anggaran.
2. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca.

   Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan.
3. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
4. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.
6. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
7. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (investee) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai nilai investasi negatif.
8. Pengakuan bagian laba pada saat investasi disajikan sebesar nilai negatif akan menambah nilai investasi tersebut. Penambahan tersebut akan mengurangi nilai negatif investasi pada neraca. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Panjang

1. Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.

2. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

A. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

B. Aset Tetap

Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah :

1. Aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor;
2. Hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

C. Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;

3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.Nilai rupiah pengeluaran belanja aset tetap tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan (*capitalization threshold*).

Apabila salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15 tidak terpenuhi maka barang tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.
Pengadaan barang pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak diakui sebagai aset tetap, melainkan diakui sebagai persediaan.
Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak

kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Perolehan Aset Tetap pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca.

Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap melalui pembelian diakui sebagai belanja modal.

Perolehan Aset Tetap melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

E. Akuntansi Tanah

Pada praktiknya, dimungkinkan terdapat tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Atau pada kasus lain, dimungkinkan terdapat tanah milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, pernyataan kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
3. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah lain yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
   a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso,

maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Bondowoso belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

   Tanah wakaf bila digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca karena Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

   Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

   Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

F. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

G. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.

Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

H. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1. Biaya persiapan tempat;
2. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
3. Biaya pemasangan (*installation cost*);
4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
5. Biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

I. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

J. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan asset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan asset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

K. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Setelah aset diperoleh, Pemerintah masih melakukan pengeluaran- pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja disebut sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran modal (*capital expenditure*) harus ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan (*carrying amount*). Nilai buku aset ditambah dengan

pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp50.000.000,00 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama enam tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp12.200.000,00. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap tiga tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun keenam adalah sebesar Rp30.000.000,00 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000,00. Perbaikan sebesar Rp12.200.000,00 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp32.200.000,00 dan akan disusutkan selama tujuh tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama tujuh tahun berikutnya adalah sebesar Rp4.600.000,00.

Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan per tahun adalah empat tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset tahun adalah sebesar Rp8.050.000,00 per tahun.

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan maka diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan atau pada saat terjadinya (*revenue expenditure*).

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (*expense*).

Perbedaan antara *capital expenditure* dan *revenue expenditure* selain dari adanya penambahan manfaat aset atau tidak, juga dapat dilihat dari batasan minimal pengeluaran untuk memperoleh aset yang dapat disebut juga dengan *capitalization threshold* (nilai satuan minimum kapitalisasi aset).

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset dan akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat; dan/atau
2. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki; dan
3. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan (*capitalization threshold*).

Terkait dengan paragraf diatas, perlu diketahui tentang pengertian atau istilah berikut ini:

1. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis sepuluh tahun telah disusutkan selama enam tahun. Pada tahun ketujuh pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan tiga tahun lagi.

Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari sepuluh tahun menjadi tujuh tahun;

2. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW;
3. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal;
4. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m^2 menjadi 500 m^2.

Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama.

Pengembangan adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam paragraf diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan dan tanaman.

Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca (*on face*). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah sebagai barang *extracomptable*.

L. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

M. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.

Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut selain tanah, aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Dalam kebijakan ini yang menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap. Meskipun suatu aset tetap dapat ditentukan nilai sisanya tetapi nilai sisa/nilai residu diabaikan dalam menghitung penyusutan.

Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Perbaikan aset tetap yang dapat menambah masa manfaat atau kapasitas masa manfaat meliputi Renovasi, Restorasi dan Overhaul. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya. Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Dalam hal perbaikan aset tetap, OPD selaku pengguna barang dapat mengajukan usulan perubahan masa manfaat kepada pejabat pengelola aset daerah dengan tembusan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebelum melakukan perubahan masa manfaat aset tetap.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straigth line method*) dengan rumus :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun diperoleh satu atau dua bulan bahkan dua hari.

Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal terjadi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap pada Laporan Operasional.

N. Penerapan Penyusutan Untuk Pertama Kalinya

Perhitungan penyusutan aset untuk pertama kalinya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan;
2. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan.; dan
3. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal.

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
Misalnya penyusunan neraca awal per 31 Desember 2005, pada Tahun 2008 untuk pertama kalinya diterapkan penyusutan untuk aset tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil. Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan lima tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-1 Ilustrasi Penyusutan Aset Tetap Untuk Pertama Kalinya

Tahun Perolehan (Awal tahun)	Nilai di Neraca per 31 Desember 2008 (sebelum penyusutan)
2003	90.000.000,00
2005	125.000.000,00
2006	150.000.000,00
2007	160.000.000,00
2008	180.000.000,00

O. Aset Yang Diperoleh Pada tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk Tahun 2008 (1 tahun) saja, yaitu :

Tabel 4-2 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Diperoleh Pada tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan

Tahun Perolehan (Awal tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Umur (Masa Manfaat)	Penyusutan
1	2	3	4=(20% x 2)
2008	180.000.000,00	5	36.000.000,00

P. Aset Yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun- tahun sebelumnya, yaitu:

Tabel 4-3 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan

Tahun Awal (Awal tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Masa Manfaat yang sudah dilalui s.d 1 Januari 2008	Penyusutan Per tahun	Penyusutan Tahun 2008		
				Koreksi tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2008	Jumlah
1	2	3	4 = (20% x 2)	5=3x4	6=4	7=5+6
2005	125.000.000,00	3	25.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00

Tahun Awal (Awal tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Masa Manfaat yang sudah dilalui s.d 1 Januari 2008	Penyusutan Per tahun	Penyusutan Tahun 2008		
				Koreksi tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2008	Jumlah
1	2	3	4 = (20% x 2)	5=3x4	6=4	7=5+6
2006	150.000.000,00	2	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00
2007	160.000.000,00	1	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	64.000.000,00
Jumlah	**435.000.000,00**			**167.000.000,00**	**87.000.000,00**	**254.000.000,00**

Q. Aset Yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal

Berdasarkan Buletin teknis 01, untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari satu tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.

Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Misalnya Aset yang diperoleh pada Tahun 2003 tersebut sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada Tahun 2005. Nilai aset adalah sebesar Rp90.000.000,00 dengan sisa umur ditetapkan tiga tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4-4 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal

tahun Neraca Awal (Akhir tahun)	Nilai	Sisa Masa Manfaat Saat Neraca Awal (tahun)	Masa Manfaat antara Neraca awal s.d 1Januari 2008	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2008 (tahun Pertama)		
					Koreksi tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2008	Jumlah
1	2	3	4	5=(30% x 2)	6=4x5	7=5	8=6+7
2005	90.000.000,00	3	2	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00

R. Pemanfaatan Aset Tetap Yang Sudah Seluruh Nilainya Disusutkan

Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0,00 mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusbukuan dari Bupati.

S. Aset Yang Mengalami Perubahan Klasifikasi Sebagai Dampak Dari Perubahan Kebijakan Akuntansi

Aset yang mengalami perubahan golongan dari dampak perubahan kebijakan akuntansi dan masa manfaatnya telah habis, maka tidak ada perhitungan beban penyusutan di golongan aset yang baru.

Misalnya, harga perolehan aset tetap lainnya berupa peralatan olah raga pada tahun 2017 adalah sebesar Rp84.000.000,00 dengan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang lama tidak disusutkan. Pada tahun 2020 aset tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang baru direklasifikasi ke aset peralatan dan mesin dengan masa manfaat yang baru ditetapkan tiga tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4-5 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Mengalami Perubahan Golongan Dari Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Masa Manfaatnya Telah Habis

Nilai	Sisa Masa Manfaat saat Penyusutan awal (tahun)	Masa Pemakaian	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2020		
				Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	Beban Penyusutan Tahun 2020	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020
1	2	3	4	5	6	7
Hitungan Awal						
84.000.000	0	0	-	-	-	-
Hitungan Baru						
84.000.000	0	3	28.000.000,00	84.000.000,00	-	-
Koreksi Ekuitas				(84.000.000,00)		

Aset yang mengalami perubahan golongan dari dampak perubahan kebijakan akuntansi dan masa manfaatnya masih ada, tetapi lebih besar dari kebijakan akuntansi di golongan aset yang baru, maka masa manfaat disesuaikan di kebijakan golongan aset yang baru dan perhitungan penyusutan sesuai kebijakan yang baru.

Misalnya, harga perolehan aset gedung dan bangunan berupa rambu-rambu pada tahun 2017 adalah sebesar Rp84.000.000,00 dengan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang lama ditetapkan 50 tahun. Pada tahun 2020 aset tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang baru direklasifikasi ke aset peralatan dan mesin dengan masa manfaat yang baru ditetapkan tujuh tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut.

Tabel 4-6 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Mengalami Perubahan Golongan Dari Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Masa Manfaatnya Masih Ada, Tetapi Lebih Besar Dari Kebijakan Akuntansi Di Golongan Aset Yang Baru

Nilai	Sisa Masa Manfaat saat Penyusutan awal (tahun)	Masa Pemakaian	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2020		
				Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	Beban Penyusutan Tahun 2020	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020
1	2	3	4	5	6	7
Hitungan Awal						
84.000.000	5	45	1.680.000,00	75.600.000,00	-	-
Hitungan Baru						
84.000.000	0	5	16.800.000,00	84.000.000,00	-	-
Koreksi Ekuitas				(8.400.000,00)		

Aset yang mengalami perubahan golongan dari dampak perubahan kebijakan akuntansi dan masa manfaatnya masih ada, tetapi lebih kecil dari kebijakan akuntansi di golongan aset yang baru, maka masa manfaat sesuai sisa masa manfaat yang ada dan perhitungan penyusutan sesuai kebijakan yang baru.

Misalnya, harga perolehan aset gedung dan bangunan berupa rambu-rambu pada tahun 1975 adalah sebesar Rp84.000.000,00 dengan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang lama ditetapkan 50 tahun. Pada tahun 2020 aset tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang baru direklasifikasi ke aset peralatan dan mesin dengan masa manfaat yang baru ditetapkan tujuh tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4-7 Ilustrasi Penyusutan Aset Yang Mengalami Perubahan Golongan Dari Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Masa Manfaatnya Masih Ada, Tetapi Lebih Kecil Dari Kebijakan Akuntansi

Nilai	Sisa Masa Manfaat saat Penyusutan awal (tahun)	Masa Pemakaian	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2020		
				Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	Beban Penyusutan Tahun 2020	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020
1	2	3	4	5	6	7
Hitungan Awal						
84.000.000	47	3	1.680.000,00	5.040.000,00	-	-
Hitungan Baru						
84.000.000	4	3	12.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	48.000.000,00
Koreksi Ekuitas				(30.960.000,00)		

T. Tukar-Menukar Aset Tetap

Tukar menukar aset tetap dapat dilakukan antar unit pemerintah. Pertukaran dapat dilakukan atas aset tetap yang sejenis dan dapat juga antar atas aset tetap yang tidak sejenis.

Contoh barang yang sejenis adalah kendaraan dengan kendaraan, bangunan dengan bangunan dan seterusnya. Contoh pertukaran barang yang tidak sejenis misalnya komputer dengan mobil, gedung dengan tanah.

Pada pertukaran aset yang tidak sejenis, nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan. Artinya nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang diserahkan harus diketahui.

Misalkan sebuah kendaraan dengan harga perolehan Rp70.000.000,00 dan masa manfaat tujuh tahun telah disusutkan lima tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Nilai tercatatnya atau nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000,00 Aset tersebut ditukar dengan satu unit gedung. Diasumsikan bahwa masih terdapat penyerahan uang kas sebesar Rp2.500.000,00 maka nilai aset tetap yang diperoleh adalah sebesar Rp22.500.000,00. Manfaat aset tetap yang diterima ditentukan kembali agar dapat ditentukan perhitungan penyusutan untuk tahun berikutnya.

Pada pertukaran aset tetap yang sejenis tidak diakui adanya laba rugi. Dalam keadaan demikian, nilai aset tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan. Akan tetapi tetap masih ada penentuan masa manfaat agar dapat ditentukan penyusutan aset yang diperoleh.

U. Penyusutan Atas Aset Secara Berkelompok

Penghitungan penyusutan untuk aset yang jenisnya banyak tapi nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut.

Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil, misalnya mesin-mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya, sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Untuk itu diperlukan cara yang lebih praktis untuk menghitung besarnya penyusutan jenis aset yang nilainya relatif kecil.

Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut.

Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama.

Dengan adanya persamaan atribut maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.

Misalnya saldo awal perlengkapan kantor awal tahun Rp200.000.000,00 dan saldo akhir tahun Rp300.000,000,00. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp250.000.000,00. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 tahun maka besarnya persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp62.500.000,00.

V. Koreksi Kesalahan Pencatatan

Dalam hal setelah dilakukan penyusutan ditemukan adanya kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan nilai Aset Tetap, maka dilakukan penyesuaian terhadap:

1. Aset Tetap; dan/atau
2. Akumulasi Penyusutan; dan/atau
3. Beban Penyusutan; dan/atau
4. Ekuitas.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan pada tahun anggaran berjalan dan laporan keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Aset Tetap, akun Beban Penyusutan, akun Akumulasi Penyusutan, dan akun Ekuitas yang disajikan sebagai:

1. Beban Penyusutan dalam LO;
2. Aset Tetap dalam Neraca;
3. Akumulasi Penyusutan dalam Neraca; dan
4. Perubahan Ekuitas dalam LPE.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap laporan keuangan pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Beban Penyusutan dan akun Akumulasi Penyusutan yang disajikan sebagai:

1. Beban Penyusutan dalam LO; dan
2. Akumulasi Penyusutan dalam Neraca.

W. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas.

Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun Ekuitas.

X. Akuntansi Aset Tetap Lainnya-Renovasi

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan dan tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas.

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik adalah sebagai berikut:

1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya;
2. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku dan memenuhi butir di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari satu tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan;
3. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap–Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional; dan
4. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Y. Aset Bersejarah (*Heritage Asets*)

Aset bersejarah (*heritage asets*) tidak harus disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi dan karya seni (*works of art*). Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

1. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
4. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan

kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

Z. Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)

Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
2. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
3. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
4. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan dan jaringan komunikasi.

AA. Penghentian Dan Pelepasan (*Retirement And Disposal*)

Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset Tetap yang tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen yang dipindahkan ke Aset Lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain dan tetap disusutkan karena aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca setelah diusulkan untuk dihapus dan mendapat Surat Keputusan Penghapusan Aset Tetap dari Bupati.

Penyajian

Aset Tetap yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca.

Aset Tetap yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap disajikan pada Neraca berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
   a. Pelepasan;
   b. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
   c. Mutasi aset tetap lainnya; dan
   d. Penambahan.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
   a. Nilai penyusutan;
   b. Metode penyusutan yang digunakan;
   c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
   d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
   a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
   b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
   c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
   d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
   a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
   b. Tanggal efektif penilaian kembali;
   c. Jika ada, nama penilai independen;
   d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
   e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
6. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

BB. Tabel Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat yang terdiri dari Tabel 4.8 Masa Manfaat I dan Tabel 4.9 Masa Manfaat II sebagaimana tercantum pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pernyataan kebijakan akuntansi ini.

1. Tabel 4.8 Masa Manfaat I merupakan tabel masa manfaat atas aset tetap untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan dan berlaku untuk perolehan aset tetap pada tahun kedua dan selanjutnya.

Tabel 4-8 Masa Manfaat I

KODE					URAIAN	Masa Manfaat (tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Ked okteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi	10
					dan Instrumentasi	
1	3	2	9		Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	1	Sumur	10
1	3	2	13	2	Produksi	10
1	3	2	13	3	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	

KODE					URAIAN	Masa Manfaat (tahun)
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	3	Alat Sar	2
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1		Bangunan Gedung	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2		Monumen	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	3		Bangunan Menara	
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	4		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai &	10
					Penanggulangan Bencana Alam	
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	5
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30

2. Tabel 4.9 Masa Manfaat II merupakan tabel masa manfaat atas perbaikan yang menambah masa manfaat suatu aset tetap, yang mulai diberlakukan pada saat kebijakan akuntansi ini diterapkan.

Tabel 4-9 Masa Manfaat II

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Peralatan dan Mesin			

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	2
		> 45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	2
		> 45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	6
		> 50% s.d 75%	9
		> 75% s.d 100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
Alat Ukur	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	0% s.d 20%	1
		> 21% s.d 40%	2
		> 51% s.d 75%	3
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	0% s.d 25%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Overhaul	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Radiation Application & Non	Overhaul	0% s.d 25%	2
Destructive Testing Laboratory		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Overhaul	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Laboratorium Standarisasi	Overhaul	0% s.d 25%	2
Kalibrasi dan Instrumentasi		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	0% s.d 25%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	0
		> 75% s.d 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6
		> 75% s.d 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Overhaul	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Produksi	Renovasi	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6
		> 75% s.d 100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		> 75% s.d 100%	7
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Alat Sar	Renovasi	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	5
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	4
Rambu-Rambu			
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
		> 65% s.d 100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Tugu Titik Kontrol/Pasti			
Tugu/Tanda Batas	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Jalan, Irigasi, dan Jembatan			
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	5
		> 45% s.d 65%	10
Jembatan	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
		> 5% s.d 10%	5
		> 10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
		> 5% s.d 10%	5
		> 10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	3
		> 10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
Sumber Air dan Air Tanah		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih / Air Baku	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Instalasi Gas	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		> 45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1
		> 45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	5
		> 45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	Overhaul	> 0% s.d 100%	2
Gedung dan Bangunan Dalam	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
Renovasi		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan	Renovasi	> 0% s.d 100%	5
Dalam Renovasi	Overhaul		

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan.Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, pernyataan kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut :

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh OPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya;

2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh OPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya;
3. Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh OPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK;
4. Apabila sebagian dari Aset Tetap yang dibangun telah selesai dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP;
5. Apabila suatu asset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeur*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeur* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan; dan
6. Apabila Berita Acara Serah Terima (BAST) sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Penyajian

KDP disajikan sebagai bagian dari aset tetap pada neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.15 Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud

ATB adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Pengakuan

Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika :

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Batas minimal kapitalisasi Aktiva Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditetapkan sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Metode Amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus dan nilai sisa/nilai residu diabaikan dalam menghitung amortisasi.

Adapun tabel masa manfaat Aktiva Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4-10 Masa Manfaat Aktiva Tak Berwujud

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (tahun)
1	5			ASET LAINNYA	
1	5	3		Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	01	Goodwill	20
1	5	3	02	Lisensi dan Frenchise	10
1	5	3	03	Hak Cipta	20
1	5	3	04	Paten	20
1	5	3	05	Software	5

4.4.16 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Klasifikasi Kewajiban

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.
Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

1. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
2. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
Kewajiban dapat timbul dari :

1. Transaksi dengan pertukaran *(exchange transactions);*
2. Transaksi tanpa pertukaran *(non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events);* dan
4. Kejadian yang diakui pemerintah *(government-acknowledged events)*

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian

Kewajiban disajikan pada pos kewajiban di neraca yang rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.17 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.18 Kebijakan Akuntansi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima di muka adalah kas yang diterima dari pihak lain namun bukan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso, sehingga belum bisa diakui sebagai pendapatan daerah, karena belum ada penyerahan barang/jasa yang merupakan hak dari pihak lain.

Pengakuan

Pendapatan diterima dimuka diakui karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pencatatan transaksi pendapatan diterima di muka menggunakan pendekatan pendapatan dan pada akhir periode akuntansi dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun pendapatan ke nilai pendapatan yang merupakan hak pemda pada tahun berjalan. Atas pendapatan yang telah diakui dari kas yang diterima tersebut dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima di muka.

Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun pendapatan diterima dimuka adalah sebesar nilai barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian

Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4.19 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interprestasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

4.4.20 Laporan Keuangan Konsolidasian

1. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
2. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada paragraph 6, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
4. Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas Akuntansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bondowoso

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).

5. Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik *(reciprocal accounts)*. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.
7. Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas Akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

4.4.21 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
   a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
   b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
   c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
   d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
   e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
   f. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
   g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

4. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.
5. Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c. Neraca;
   d. Laporan Operasional;
   e. Laporan Arus Kas;
   f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g. Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.

4.4.22 Properti Investasi

1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
   a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
   b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
3. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
4. Berikut adalah contoh properti investasi:
   a. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
   b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai property yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
   c. Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;

d. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
e. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

5. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
   a. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
   b. Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
   c. Properti yang digunakan sendiri (lihat PKA 14: Akuntansi Aset Tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
   d. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
   e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan social yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
   f. Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PKA yang mengatur Aset Tetap.
   g. Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan dalam pengelolaan instansi pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Pada penjelasan tentang LRA berikut ini, memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu.

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan IPSAP 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, yang dimaksud dengan pendapatan LRA adalah:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD.
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.
3. Pendapatan kas yang diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan	**2.032.456.443.947,00**	**1.990.420.763.058,12**	**1.908.478.394.409,06**

Realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp1.990.420.763.058,12. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp81.942.368.649,06 atau 4,12% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp1.908.478.394.409,06. Adapun anggaran dan realisasi Pendapatan Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5-1 Rincian Pendapatan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	250.803.864.324,00	211.009.393.993,12	84,13	189.504.490.467,06

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
2	Pendapatan Transfer	1.739.325.133.208,00	1.743.448.656.008,00	100,24	1.678.782.423.998,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	42.327.446.415,00	35.962.713.057,00	84,96	40.191.479.944,00
	Jumlah	**2.032.456.443.947,00**	**1.990.420.763.058,12**	**97,93**	**1.908.478.394.409,06**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**250.803.864.324,00**	**211.009.393.993,12**	**189.504.490.467,06**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebesar Rp211.009.393.993,12 mengalami kenaikan sebesar Rp20.808.576.483,22 atau 10,98% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 yaitu sebesar Rp189.504.490.467,06. Kenaikan tersebut khususnya pada jenis Retribusi Daerah sebesar 27,75%.

Tabel 5-2 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Daerah	49.134.556.436,00	43.384.281.391,00	88,30	41.397.270.293,00
2	Retribusi Daerah	22.663.724.898,00	21.566.432.779,68	95,16	16.881.328.762,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.629.838.580,00	4.629.838.583,13	100,00	4.544.375.373,27
4	Lain-lain PAD yang Sah	174.375.744.410,00	141.428.841.239,31	81,11	126.681.516.038,79
	Jumlah	**250.803.864.324,00**	**211.009.393.993,12**	**84,13**	**189.504.490.467,06**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.1	**Pajak Daerah**	**49.134.556.436,00**	**43.384.281.391,00**	**41.397.270.293,00**

Pemungutan Pajak Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp43.384.281.391,00 atau 88,30% dari anggaran sebesar Rp49.134.556.436,00 dengan obyek pendapatan pajak sebagai berikut:

Tabel 5-3 Rincian Pajak Daerah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	1.515.629.890,00	1.209.059.528,00	79,77	1.074.779.497,00
2	Pajak Restoran	4.600.000.000,00	4.689.253.089,00	101,94	4.577.515.764,00
3	Pajak Hiburan	101.129.000,00	223.681.289,00	221,18	75.014.160,00
4	Pajak Reklame	1.250.000.000,00	1.150.978.778,00	92,08	1.242.045.833,00
5	Pajak Penerangan Jalan	16.500.000.000,00	16.340.793.517,00	99,04	14.896.328.061,00
6	Pajak Parkir	124.503.996,00	263.550.600,00	211,68	133.130.330,00
7	Pajak Air Tanah	436.292.190,00	542.294.045,00	124,30	226.185.251,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	17.001.360,00	950.000,00	5,59	2.193.500,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	16.340.000.000,00	13.242.684.424,00	81,04	13.371.289.634,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.250.000.000,00	5.721.036.121,00	69,35	5.798.788.263,00
	Jumlah	**49.134.556.436,00**	**43.384.281.391,00**	**88,30**	**41.397.270.293,00**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Pajak Hiburan merupakan obyek pajak dengan persentase realisasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu

221,18%. Sementara itu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan obyek pajak dengan persentase realisasi yang paling rendah jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu 5,59%.

Tabel 5-4 Dasar Hukum dan Metode Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah

No	Jenis Pendapatan	Dasar Hukum Pemungutan	Metode Perhitungan
1	Pajak Hotel	Peraturan Bupati Nomor 1F Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pajak hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	*Self Assessment*
2	Pajak Restoran	Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan pajak restoran di Kabupaten Bondowoso dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	*Self Assessment*
3	Pajak Hiburan	Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 1 H Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pajak hiburan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	*Self Assessment*
4	Pajak Reklame	Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 B Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pajak reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	*Official Assessment*
5	Pajak Penerangan Jalan	Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	*Self Assessment*
6	Pajak Parkir	Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 1 C Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pajak parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	*Self Assessment*
7	Pajak Air Tanah	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/80/430.6.2/2013 tentang nilai perolehan air untuk menghitung pajak air tanah di Kabupaten Bondowoso dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 D Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	*Official Assessment*
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/1003/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Bupati Nomor 1 E Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	*Self Assessment*
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	*Official Assessment*

No	Jenis Pendapatan	Dasar Hukum Pemungutan	Metode Perhitungan
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Peraturan sebagai dasar pemungutan adalah Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bondowoso dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.	*Self Assessment*

Penjelasan lebih rinci masing-masing jenis pendapatan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

   a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
   b. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel;
   c. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan;
   d. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan
   e. Realisasi Pajak Hotel Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.209.059.528,00 atau 79,77% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.515.629.890,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-5 Rincian Pajak Hotel

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	1.515.629.890,00	1.209.059.528,00	79,77	1.074.779.497,00
	Jumlah	**1.515.629.890,00**	**1.209.059.528,00**	**79,77**	**1.074.779.497,00**

Realisasi Pajak Hotel Tahun 2023 kurang dari target sebesar Rp306.570.362,00 atau 20,23% dari target yang telah ditetapkan karena tingkat kepatuhan pelaku industri perhotelan dalam membayar pajak belum maksimal, serta alat sinkronbox baru belum terpenuhi sesuai kebutuhan.

2. Pajak Restoran

   a. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
   b. Subjek Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang menikmati fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman;
   c. Objek pajak restoran adalah fasilitas penyewa makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/ food court, toko roti/ bakery, jasa boga katering, stand makanan dan minuman insidentil;
   d. Tarif Pajak Restoran untuk omset diatas Rp200.000,00 per hari sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai penjualan; dan
   e. Realisasi Pajak Restoran Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.689.253.089,00 atau 101,94% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.600.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-6 Rincian Pajak Restoran

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.600.000.000,00	4.689.253.089,00	101,94	4.577.515.764,00
	Jumlah	**4.600.000.000,00**	**4.689.253.089,00**	**101,94**	**4.577.515.764,00**

Realisasi Pajak Restoran Tahun 2023 melebihi dari target sebesar Rp89.253.089,00 atau 1,94% dari target yang telah ditetapkan karena karena tingkat kepatuhan wajib pajak restoran (Makan dan Minum) semakin meningkat dan lebih tertib.

3. Pajak Hiburan

a. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
b. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati fasilitas hiburan;
c. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan;
d. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah :
   1) Tontonan film;
   2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
   3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
   4) Pameran;
   5) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
   6) Sirkus, akrobat dan sulap;
   7) Permainan bilyar, golf, dan boling;
   8) Pacuan kuda/sapi, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
   9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
   10) Pertandingan olahraga.
e. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar :
   1) Tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
   2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
   3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
   4) Pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
   5) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
   6) Sirkus, akrobat dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
   7) Permainan bilyar, golf, dan boling ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
   8) Pacuan kuda/sapi, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
   9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
   10) Pertandingan olahraga. ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
   11) Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 adalah sebesar Rp223.681.289,00 atau 221,18% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp101.129.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-7 Rincian Pajak Hiburan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/ Busana	60.146.000,00	20.380.000,00	33,88	10.883.000,00
2	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	40.983.000,00	203.301.289,00	496,06	64.131.160,00
	Jumlah	**101.129.000,00**	**223.681.289,00**	**221,18**	**75.014.160,00**

Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 melebihi dari target sebesar Rp122.552.289,00 atau 121,18% dari target yang telah ditetapkan karena berbagai hiburan di masyarakat semakin menjamur pasca Covid 19.

4. Pajak Reklame

a. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
b. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
c. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame;
d. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
e. Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.150.978.778,00 atau 92,08% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.250.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-8 Rincian Pajak Reklame

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/ Megatron	1.250.000.000,00	1.150.978.778,00	92,08	1.242.045.833,00
	Jumlah	**1.250.000.000,00**	**1.150.978.778,00**	**92,08**	**1.242.045.833,00**

Realisasi Pajak Reklame Tahun 2023 kurang dari target sebesar Rp99.021.222,00 atau 7,92% dari target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan terdapat beberapa media yang masa pajaknya sudah habis dan tidak diperpanjang.

5. Pajak Penerangan Jalan

a. Pajak Penerangan Jalan adalah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik;
b. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik;
c. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain;
d. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud diatas meliputi seluruh pembangkit listrik; dan
e. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus); Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 adalah sebesar Rp16.340.793.517,00 atau 99,04% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp16.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-9 Rincian Pajak Penerangan Jalan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	16.500.000.000,00	16.340.793.517,00	99,04	14.896.328.061,00
	Jumlah	**16.500.000.000,00**	**16.340.793.517,00**	**99,04**	**14.896.328.061,00**

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 kurang dari target Rp159.206.483,00 atau 0,96% dari target yang telah ditetapkan dikarenakan kurangnya ekstensifikasi pemanfaatan tenaga listrik.

6. Pajak Parkir

a. Pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan;
b. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor;

c. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan penyedia tempat parkir gratis sebagai bentuk layanan kepada pelanggannya;
d. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
e. Realisasi Pajak Parkir Tahun 2023 adalah sebesar Rp263.550.600,00 atau 211,68% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp124.503.996,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-10 Rincian Pajak Parkir

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Parkir	124.503.996,00	263.550.600,00	211,68	133.130.330,00
	Jumlah	**124.503.996,00**	**263.550.600,00**	**211,68**	**133.130.330,00**

Realisasi Pajak Parkir Tahun 2023 melebihi dari target sebesar Rp139.046.604,00 atau 111,68% dari target yang telah ditetapkan karena adanya penambahan lokus parkir dan pemasangan alat sinkronbox.

7. Pajak Air Tanah

a. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
b. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
c. Objek pajak pajak air tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
d. Dikecualikan dari Obyek Pajak Air Tanah, adalah :
   1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
   2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
e. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
f. Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2023 adalah sebesar Rp542.294.045,00 atau 124,30% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp436.292.190,00.

Tabel 5-11 Rincian Pajak Air Tanah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Air Tanah	436.292.190,00	542.294.045,00	124,30	226.185.251,00
	Jumlah	**436.292.190,00**	**542.294.045,00**	**124,30**	**226.185.251,00**

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2023 melebihi target sebesar Rp106.001.855,00 atau 24,30% dari target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan adanya kenaikan tarif berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang harga dasar air sebagai dasar penghitungan nilai perolehan Air Tanah.

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

a. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
b. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan;
c. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan;

d. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
e. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 adalah sebesar Rp950.000,00 atau 5,59% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp17.001.360,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-12 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	17.001.360,00	950.000,00	5,59	2.193.500,00
	Jumlah	**17.001.360,00**	**950.000,00**	**5,59**	**2.193.500,00**

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 kurang dari target sebesar Rp16.051.360,00 atau 94,41% dari target yang telah ditetapkan dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak mineral masih rendah.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

a. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
b. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan;
c. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
d. digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
e. Tarif pajak pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebesar 0,13%dan 0,2%.
   NJOP <1 Milyar : 0,13% x (NJOP – NJOP TKP)
   NJOP > 1 Milyar : 0,2% x (NJOP – NJOP TKP)
   NJOP TKP sebesar Rp10.000.000,00; dan
f. Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah sebesar Rp13.242.684.424,00 atau 81,04% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp16.340.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-13 Rincian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	16.340.000.000,00	13.242.684.424,00	81,04	13.371.289.634,00
	Jumlah	**16.340.000.000,00**	**13.242.684.424,00**	**81,04**	**13.371.289.634,00**

Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2023 kurang dari target sebesar Rp3.097.315.576,00 atau 18,96% dikarenakan kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan atas tanah dan /atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak;
b. Subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan /atau bangunan;

c. Objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan;
d. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus); dan
e. Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.721.036.121,00 atau 69,35% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp8.250.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-14 Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	BPHTB - Pemindahan Hak	8.250.000.000,00	5.721.036.121,00	69,35	5.798.788.263,00
	Jumlah	**8.250.000.000,00**	**5.721.036.121,00**	**69,35**	**5.798.788.263,00**

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2023 kurang dari target sebesar Rp2.528.963.879,00 atau 30,65% dari target yang telah ditetapkan karena masih rendahnya harga pasar tanah sehingga sebagian nilai BPHTB terhitung nihil.

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2	**Retribusi Daerah**	**22.663.724.898,00**	**21.566.432.779,68**	**16.881.328.762,00**

Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp21.566.432.779,68 atau 95,16% dari anggaran sebesar Rp22.663.724.898,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-15 Retribusi Daerah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	20.066.321.250,00	19.441.464.804,68	96,89	15.196.510.182,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.222.403.648,00	1.104.062.975,00	49,68	1.035.935.530,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	375.000.000,00	1.020.905.000,00	272,24	648.883.050,00
	Jumlah	**22.663.724.898,00**	**21.566.432.779,68**	**95,16**	**16.881.328.762,00**

Dari tabel di atas, Retribusi Perizinan Tertentu merupakan obyek retribusi dengan persentase realisasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu 272,24%. Rincian Retribusi Daerah selama Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.1	**Retribusi Jasa Umum**	**20.066.321.250,00**	**19.441.464.804,68**	**15.196.510.182,00**

Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 sebesar Rp19.441.464.804,68 atau 96,89% dari anggaran sebesar Rp20.066.321.250,00 dengan obyek Retribusi Jasa Umum sebagai berikut :

Tabel 5-16 Obyek Retribusi Jasa Umum

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	14.000.000.000,00	13.909.263.512,68	99,35	9.737.318.237,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	125.063.400,00	154.604.586,00	123,62	152.546.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.078.275.000,00	3.867.605.000,00	94,83	3.770.358.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.317.719.850,00	1.196.210.090,00	90,78	1.165.619.645,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	372.638.000,00	187.959.500,00	50,44	223.730.600,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.625.000,00	1.750.000,00	66,67	1.500.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	21.240.000,00
8	Retribusi Pengawasan dan	170.000.000,00	124.072.116,00	72,98	124.197.700,00

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Pengendalian Menara Telekomunikasi				
	Jumlah	**20.066.321.250,00**	**19.441.464.804,68**	**96,89**	**15.196.510.182,00**

Tabel 5-17 Dasar Hukum dan Metode Perhitungan Retribusi Jasa Umum

No	Jenis Pendapatan	Dasar Hukum Pemungutan	Metode Perhitungan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.	Berdasarkan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.	Berdasarkan Tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.	Berdasarkan Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi Pelayanan Pasar (Pelataran, Los, dan Kios) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.	Tingkat penggunaan jasa untuk retribusi pelayanan pasar dihitung berdasarkan jenis pelayanan, luas, jangka waktu pemakaian tempat dan kelas pasar. Tingkat penggunaan jasa untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis pelayanan, jangka waktu, luas, lokasi dan tahun pembuatan dari pemakaian kekayaan daerah. Tingkat penggunaan jasa untuk retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan luas, lokasi, jangka waktu dan frekuensi penggunaan pasar grosir dan/atau pertokoan.
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.	Berdasarkan Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor.
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.	Tarif ke lokasi kakus sebesar Rp250.000,00. 50% dari hasil penarikan Retribusi dipergunakan untuk honor petugas. Jarak dari kota di daerah ke luar kota ditambah biaya transportasi sebesar Rp2.500,00 per kilometer, pulang pergi.
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.	

Penjelasan lebih rinci masing-masing jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

   a. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang ada di puskesmas, dan UPT Labkesda, yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/badan/penjamin pemakai jasa layanan, yang disusun berdasarkan biaya satuan (unit cost) serta dengan mempertimbangkan daya saing dan kemampuan masyarakat;
   b. Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi, penjamin atau institusi yang memperoleh manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh RSU, Puskesmas, UPT. Labkesda dan Rumah Sakit khusus Paru;
   c. Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan penelitian serta pelayanan penunjang lainnya di RSU, di puskesmas, UPT Labkesda dan rumah sakit khusus paru dikecualikan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
   d. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum; dan
   e. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp13.909.221.512,68 atau 99,35% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp14.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-18 Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	14.000.000.000,00	13.909.263.512,68	99,35	9.737.318.237,00
	Jumlah	**14.000.000.000,00**	**13.909.263.512,68**	**99,35**	**9.737.318.237,00**

Realisasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tahun 2023 kurang dari target sebesar Rp90.736.487,32 atau 0,65% dari target yang telah ditetapkan karena klaim pelayanan non kapitasi baik rawat inap, rujukan, persalinan, UGD dan pemeriksaan laboratorium kesehatan sampai dengan bulan Desember belum terserap maksimal dan diakui sebagai utang pelayanan yang akan dibayarkan pada tahun berikutnya.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

   a. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan di bidang Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
   b. Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengambilan, pengangkutan dan penyediaan lokasi pengolahan sampah;
   c. Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara dan pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah dan penyediaan lokasi

pembuangan/pemusnahan akhir sampah kecuali pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya;

d. Tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut :
   1) Perumahan/rumah tangga sebesar Rp1.000,00/bulan;
   2) Perusahaan Pemerintah/swasta sebesar Rp5.000,00/bulan;
   3) Hotel :
      - Hotel berbintang sebesar Rp50.000,00/bulan ;
      - Hotel melati sebesar Rp20.000,00/bulan;
   4) Restoran :
      - Restoran Talam Kencana sebesar Rp10.000,00/bulan;
      - Restoran Talam Selaka sebesar Rp7.500,00/bulan;
      - Restoran Talam Gangsa sebesar Rp5.000,00/bulan;
   5) Toko-toko, grosir, biro travel jasa angkutan Rp5.000,00/bulan ;
   6) Sekolah sebesar Rp3.000,00/bulan;
   7) Perguruan Tinggi sebesar Rp5.000,00/bulan;
   8) Toko dan Pedagang yang ada dalam pasar pemerintah daerah dan swasta sebesar Rp6.000,00/bulan;
   9) Toko-toko yang ada dalam pasar desa sebesar Rp6.000,00/bulan;
   10) Pedagang Kecil sebesar Rp1.000,00/hari;
   11) Pedagang Musiman Kecil sebesar Rp2.000,00/hari;
   12) Pedagang Musiman Besar sebesar Rp5.000,00/hari;
   13) Wilayah pemakaman sebesar Rp100.000,00/prosesi;
   14) Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tahun 2023 adalah sebesar Rp154.604.586,00 atau 123,62% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp125.063.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-19 Rincian Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	125.063.400,00	154.604.586,00	123,62	152.546.000,00
	Jumlah	**125.063.400,00**	**154.604.586,00**	**123,62**	**152.546.000,00**

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tahun 2023 melebihi dari target sebesar Rp29.541.186,00 atau 23,62% dari target yang telah ditetapkan dikarenakan kesadaran masyarakat semakin meningkat.

3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

a. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan di bidang pelayanan parkir di tepi jalan umum;

b. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;

c. Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :
   1) Parkir di tempat umum :
      - Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya ditetapkan Rp2000,00 sekali parkir;
      - Bus dan Truk Engkel ditetapkan Rp4.000,00 sekali parkir;

- Truk Gandengan dan sejenisnya ditetapkan Rp5.000,00 sekali parkir.; dan
- Sepeda Motor ditetapkan Rp1.000,00 sekali parkir.

2) Parkir tahunan berlangganan (khusus kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Bondowoso/Khusus Nomor Polisi Bondowoso) untuk satu jenis kendaraan setiap tahun adalah sebagai berikut:
   - Sepeda Motor ditetapkan Rp25.000,00/tahun;
   - Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya ditetapkan Rp50.000,00/tahun; dan
   - Bus dan Truk dan Tronton ditetapkan Rp75.000,00/tahun.

d. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.867.605.000,00 atau 94,83% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.078.275.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-20 Rincian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.078.275.000,00	3.867.605.000,00	94,83	3.770.358.000,00
	Jumlah	**4.078.275.000,00**	**3.867.605.000,00**	**94,83**	**3.770.358.000,00**

Realisasi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2023 kurang dari target sebesar Rp210.670.000,00 atau 5,17% dari target yang telah ditetapkan dikarenakan penerimaan dari sektor objek retribusi parkir tepi jalan umum belum mencapai target sesuai dengan banyaknya kendaraan bermotor bernomor polisi luar Bondowoso.

4. Retribusi Pelayanan Pasar

a. Retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan pertokoan yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan/dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta;

b. Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Subjek retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas pertokoan yang disediakan dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah;

c. Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dan khusus disediakan untuk pedagang, penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Objek retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali penyediaan pertokoan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta;

d. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019; dan

e. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.196.210.090,00 atau 90,78% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.317.719.850,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-21 Rincian Retribusi Pelayanan Pasar

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelataran	601.868.400,00	585.091.000,00	97,21	576.196.000,00
2	Retribusi Los	380.293.450,00	175.096.855,00	46,04	148.732.880,00
3	Retribusi Kios	335.558.000,00	436.022.235,00	129,94	440.690.765,00
	Jumlah	**1.317.719.850,00**	**1.196.210.090,00**	**90,78**	**1.165.619.645,00**

Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2023 kurang dari target sebesar Rp121.509.760,00 atau 9,22% dari target dikarenakan terdapat beberapa los yang tutup dan tidak bayar retribusi.

5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

a. Pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
b. Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
c. Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
d. Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :
Besarnya retribusi pengujian berkala (kendaraan lama) ;
1) Kendaraan bermotor dengan Jumlah Berat Bruto (JBB) kurang dari 3.500 kg sebesar Rp60.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Biaya jasa uji sebesar Rp30.000,00
- Biaya bukti lulus sebesar Rp30.000,00
2) Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp70.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Biaya jasa uji sebesar Rp40.000,00
- Biaya bukti lulus sebesar Rp30.000,00
3) Kendaraan gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp80.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Biaya jasa uji sebesar Rp50.000,00
- Biaya bukti lulus sebesar Rp30.000,00
4) Biaya numpang uji kendaraan bermotor.
- JBB kurang dari 3.500 kg sebesar Rp65.000,00
- JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp75.000,00
5) Biaya rekomendasi numpang uji kendaraan bermotor.
- JBB kurang dari 3.500 kg sebesar Rp40.000,00
- JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp50.000,00
- Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp60.000,00
6) Biaya rekomendasi mutasi keluar kendaraan bermotor.
- JBB kurang dari 3.500 kg sebesar Rp80.000,00
- JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp90.000,00
- Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp100.000,00
7) Biaya rekomendasi mutasi masuk kendaraan bermotor.
- JBB kurang dari 3.500 kg sebesar Rp20.000,00
- JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp30.000,00

- Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp40.000,00

8) Kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji dan tidak dapat memenuhi perbaikan-perbaikan sesuai waktu yang ditentukan, dikenakan biaya jasa uji dan biaya keterlambatan uji.
9) Kendaraan yang telah didaftarkan pengujiannya tetapi tidak datang dengan alasan yang sah, maka dikenakan biaya tambahan sebesar 5% (lima per seratus) dari biaya jasa uji dan biaya keterlambatan uji.

Besarnya retribusi uji pertama (kendaraan baru berdasarkan pasal 157 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi) kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1) Kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari 3.500 kg sebesar Rp70.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
   - Biaya jasa uji sebesar Rp40.000,00
   - Biaya bukti lulus sebesar Rp30.000,00
2) Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp80.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
   - Biaya jasa uji sebesar Rp50.000,00
   - Biaya bukti lulus sebesar Rp30.000,00
3) Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp90.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
   - Biaya jasa uji sebesar Rp60.000,00
   - Biaya bukti lulus sebesar Rp30.000,00

e. Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2023 adalah sebesar Rp187.959.500,00 atau 50,44% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp372.638.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-22 Rincian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	372.638.000,00	187.959.500,00	50,44	223.730.600,00
	Jumlah	**372.638.000,00**	**187.959.500,00**	**50,44**	**223.730.600,00**

Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2023 kurang dari target sebesar Rp184.678.500,00 atau 49,56% dari target yang telah ditetapkan dikarenakan berkurangnya pengguna jasa uji kelayakan kendaraan sehingga berpengaruh pada perolehan retribusi.

6. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

a. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
b. Subjek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memanfaatkan pelayanan fasilitas Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
c. Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
d. Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut:
   1) Besarnya tarif didasarkan atas tarif pasar pelayanan sejenis di wilayah daerah atau sekitarnya;

2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/ diperoleh, maka ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi:
   - Unsur biaya per satuan penyedian jasa; dan
   - Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
3) Struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:
   - Tarif ke lokasi kakus sebesar Rp250.000,00;
   - 50% dari hasil penarikan Retribusi dipergunakan untuk honor petugas; dan
   - Jarak dari kota di daerah ke luar kota ditambah biaya transportasi sebesar Rp2.500,00 per kilometer, pulang pergi.

e. Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.750.000,00 atau 66,67% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.625.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-23 Rincian Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.625.000,00	1.750.000,00	66,67	1.500.000,00
	Jumlah	**2.625.000,00**	**1.750.000,00**	**66,67**	**1.500.000,00**

Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Tahun 2023 kurang dari target sebesar Rp875.000,00 atau 33,33% dari target dikarenakan menurunnya jumlah obyek pengguna jasa sedot kakus.

7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun 2023 adalah sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-24 Rincian Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	21.240.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.240.000,00**

8. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

a. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi;
b. Subyek Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi;
c. Objek Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum;
d. Tarif Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh; dan
e. Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp124.072.116,00 atau 72,98% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp170.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-25 Rincian Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	170.000.000,00	124.072.116,00	72,98	124.197.700,00
	Jumlah	**170.000.000,00**	**124.072.116,00**	**72,98**	**124.197.700,00**

Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023 kurang dari target sebesar Rp45.927.884,00 atau 27,02% dari target dikarenakan 5 provider dari 10 provider belum membayar retribusi, diantaranya Tower Bersama Group, Permata Karya Perdana, XL, Protelindo dan Solusi Tunas Pratama.

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.2	**Retribusi Jasa Usaha**	**2.222.403.648,00**	**1.104.062.975,00**	**1.035.935.530,00**

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 sebesar Rp1.104.062.975,00 atau 49,68% dari anggaran sebesar Rp2.222.403.648,00 dengan obyek Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut:

Tabel 5-26 Obyek Retribusi Jasa Usaha

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.002.737.148,00	208.141.875,00	20,76	221.963.050,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	472.714.500,00	395.179.000,00	83,60	413.995.900,00
3	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	122.400.000,00	131.900.000,00	107,76	129.715.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	601.802.000,00	368.842.100,00	61,29	270.261.580,00
	Jumlah	**2.222.403.648,00**	**1.104.062.975,00**	**49,68**	**1.035.935.530,00**

Penjelasan lebih rinci masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

   a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan pemakaian ruangan pesta dan rapat pemakaian kendaraan/alat-alat milik daerah dan lain sebagainya;

   b. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan mendapatkan pelayanan pemakai kekayaan daerah, dikecualikan terhadap aparatur yang karena jabatannya mendapat fasilitas perumahan dari pemerintah daerah, setiap orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan daerah harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap pemakaian kekayaan daerah dilarang merubah bentuk dan fungsi kekayaan daerah tanpa izin tertulis dari bupati atau pejabat yang ditunjuk;

   c. Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi :
      1) Pemakaian tanah;
      2) Pemakaian rumah;
      3) Pemakaian bangunan atau gedung dan ruangan;
      4) Pemakaian alat berat; dan
      5) Laboratorium dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya;

d. Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
e. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp208.141.875,00 atau 20,76% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.002.737.148,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-27 Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	312.518.000,00	63.800.000,00	20,41	61.260.000,00
2	Retribusi Penyewaan Tanah	0,00	24.391.275,00	0,00	35.549.950,00
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	506.107.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
4	Retribusi Pemakaian Laboratorium	84.148.258,00	34.100.000,00	40,52	30.450.000,00
5	Retribusi Pemakaian Ruangan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	84.963.890,00	85.850.600,00	101,04	85.703.100,00
	Jumlah	**1.002.737.148,00**	**208.141.875,00**	**20,76**	**221.963.050,00**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2023 kurang dari target sebesar Rp794.595.273,00 atau 79,24% dari target.

2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

a. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan pertokoan yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan/dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta;
b. Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas pertokoan yang disediakan dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah;
c. Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali penyediaan pertokoan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
d. Tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
e. Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun 2023 adalah sebesar Rp395.179.000,00 atau 83,60% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp472.714.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-28 Rincian Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	472.714.500,00	395.179.000,00	83,60	413.995.900,00
	Jumlah	**472.714.500,00**	**395.179.000,00**	**83,60**	**413.995.900,00**

Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan Tahun 2023 kurang dari target sebesar Rp77.535.500,00 atau 16,40% dari target terdapat beberapa pengguna toko tutup dan tidak membayar retribusi.

3. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

a. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggarahan/villa yang dimiliki dan atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta;
b. Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan menggunakan penginapan/ pesanggarahan/villa;
c. Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat pesanggrahan Sumber Wringin yang dimiliki dan/atau di kelola oleh pemerintah daerah, yang tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan/pesanggarahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
d. Tarif retribusi tempat penginapan/ pesanggarahan/ villa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut;
   1) Kelas Arabica satu malam Rp250.000,00
   2) Kelas Robusta satu malam Rp150.000,00
   3) Kelas Mocca satu malam Rp125.000,00
   4) Aula Pesanggrahan satu hari Rp500.000,00
e. Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Tahun 2023 adalah sebesar nihil atau 0,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp22.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-29 Rincian Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**22.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Realisasi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa Tahun 2023 sebesar nihil atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp22.750.000,00 dikarenakan kurangnya kunjungan wisatawan.

4. Retribusi Rumah Potong Hewan

a. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
b. Subjek retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau di kelola oleh pemerintah daerah;
c. Objek retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasiltas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
d. Tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut;

1) Pemakaian Rumah Potong Hewan Rp10.000,00/ekor
2) Pemeriksaan Kesehatan Hewan Rp15.000,00/ekor

e. Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2023 adalah sebesar Rp131.900.000,00 atau 107,76% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp122.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-30 Rincian Retribusi Rumah Potong Hewan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	122.400.000,00	131.900.000,00	107,76	129.715.000,00
	Jumlah	**122.400.000,00**	**131.900.000,00**	**107,76**	**129.715.000,00**

Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2023 melebihi dari target sebesar Rp9.500.000,00 atau 7,76% dari target karena permintaan daging oleh masyarakat Bondowoso meningkat.

5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

a. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki atau di kelola oleh pemerintah daerah;

b. Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah setiap orang atau pribadi atau badan yang masuk dan atau menikmati dan menggunakan fasilitas di tempat rekreasi dan atau menggunakan tempat olahraga yang berada dilingkungan objek wisata yang menjadi milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

c. Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga :

1) Taman pemandian alam Tasnan Kecamatan Grujugan;
2) Wana Wisata Tasnan;
3) Wisata Kota;
4) Objek Wisata Sempol;
5) Arum Jeram Bosamba;
6) Gedung Gelora Pelita;
7) Stadion; dan
8) Tempat olah raga lainnya

Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga yang sediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah BUMN, BUMD dan pihak swasta;

d. Tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha. Khusus objek wisata pemandian tasnan, arung jeram Bosamba, kawah wurung dan bangunan untuk pengelolaan cafe dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak swasta dan Perum Perhutani; dan

e. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2023 adalah sebesar Rp368.842.100,00 atau 61,29% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp601.802.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-31 Rincian Retribusi Rekreasi dan Olahraga

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	601.802.000,00	368.842.100,00	61,29	270.261.580,00
	Jumlah	**601.802.000,00**	**368.842.100,00**	**61,29**	**270.261.580,00**

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2023 kurang dari target sebesar Rp232.959.900,00 atau 38,71% dikarenakan Puncak Megasari yang sudah masuk target PAD belum bisa melakukan penarikan karena PKS dengan Perhutani baru selesai pada akhir tahun, pemandian Tasnan yang dikelola oleh pihak ketiga tidak memenuhi target yang telah ditentukan, terjadinya bencana longsor dan kebakaran di beberapa lokasi wisata.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu	**375.000.000,00**	**1.020.905.000,00**	**648.883.050,00**

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.020.905.000,00 atau 272,24% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp375.000.000,00 dengan obyek Retribusi Perizinan Tertentu sebagai berikut:

Tabel 5-32 Obyek Retribusi Perizinan Tertentu

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	375.000.000,00	1.020.905.000,00	272,24	648.883.050,00
	Jumlah	**375.000.000,00**	**1.020.905.000,00**	**272,24**	**648.883.050,00**

Penjelasan lebih rinci masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

   a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
   b. Subjek retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
   c. Objek Izin Mendirikan Bangunan untuk kegiatan meliputi :
      1) Pembangunan bangunan baru, dan/atau prasarana bangunan;
      2) Rehabilitasi/Renovasi bangunan dan/atau prasarana bangunan, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan;
      3) Pelestarian/pemugaran;
      4) Pembuatan duplikat/kopi dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan keterangan hilang tertulis dari instansi yang berwenang (kepolisian setempat);
      5) Pemecahan dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecah dan dokumen IMB dan/atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya, atas permohonan yang bersangkutan;
      6) Bangunan yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB diwajibkan mengajukan permohonan IMB sesuai peraturan perundang-undangan; dan

7) Tidak termasuk didalamnya bangunan fungsi keagamaan (masjid, gereja, wihara, pura, kelenteng dll), bangunan fungsi sosial dan budaya (bangunan kantor milik negara), kecuali milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha dan bangunan fungsi khusus.

2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

a. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membanguna baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

b. Subjek retribusi Persetujuan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG.

c. Objek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah Penerbitan PBG, diberikan untuk permohonan persetujuan :

1) Pembangunan baru meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis dan penerbitan PBG;

2) Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, Inspeksi bangunan Gedung dan Penerbitan SLF;

3) PGB perubahan untuk ;

- Perubahan fungsi bangunan gedung;
- Perubahan lapis bangunan gedung;
- Perubahan luas bangunan gedung;
- Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
- Perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
- Perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
- Perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

d. Tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan

e. Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.020.905.000,00 atau 272,24% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp375.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-33 Rincian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	375.000.000,00	1.020.905.000,00	272,24	648.883.050,00
	Jumlah	**375.000.000,00**	**1.020.905.000,00**	**272,24**	**648.883.050,00**

Penerimaan retribusi perizinan tertentu (Izin Mendirikan Bangunan) sebesar Rp1.020.905.000,00 atau 272,24% dikarenakan semakin banyaknya pelaku usaha berinvestasi di Kabupaten Bondowoso, sehingga menyumbang retribusi yang cukup besar, kesadaran masyarakat sudah meningkat terhadap kewajiban pengurusan PBG dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan SOP dan didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana yang mencukupi.

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**4.629.838.580,00**	**4.629.838.583,13**	**4.544.375.373,27**

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.629.838.583,13 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp4.629.838.580,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2022 sebesar Rp4.544.375.373,27, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp4.629.838.583,13 mengalami kenaikan sebesar Rp85.463.209,86 atau sebesar 1,88% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-34 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.629.838.580,00	4.629.838.583,13	100,00	4.544.375.373,27
	Jumlah	**4.629.838.580,00**	**4.629.838.583,13**	**100,00**	**4.544.375.373,27**

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.629.838.583,13 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.629.838.580,00 dengan rincian obyek sebagai berikut :

Tabel 5-35 Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.629.838.580,00	4.629.838.583,13	100,00	4.544.375.373,27
	Jumlah	**4.629.838.580,00**	**4.629.838.583,13**	**100,00**	**4.544.375.373,27**

Penyetoran bagian laba tersebut, diperhitungkan dengan menggunakan metode biaya. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai diakui sebagai pendapatan hasil investasi. Pendapatan tersebut merupakan pembagian dividen PT Bank Jatim yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2022, sesuai Salinan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 25 tanggal 12 April 2023 oleh Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, SH., M.Kn.

Hasil keputusan RUPS Tahun Buku 2022 ditindaklanjuti dengan Surat Bank Jatim kepada Bupati Bondowoso Nomor : 062/225/DIR/OPR/SRT tanggal 10 Mei 2023 perihal Pembagian Deviden PT. Bank Jatim Tahun Buku 2022.

Bagian dividen Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebesar Rp4.629.838.583,13 disetorkan ke Rekening 0311000011 Kas Umum Daerah melalui Nota Kredit Nomor 1351 tanggal 12 Mei 2023.

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.1.4	**Lain-lain PAD Yang Sah**	**174.375.744.410,00**	**141.428.841.239,31**	**126.681.516.038,79**

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2023 adalah sebesar Rp141.428.841.239,31 atau 81,11% dari anggarannya sebesar Rp174.375.744.410,00. Jika dibandingkan dengan realisasi

Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp126.681.516.038,79 realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp141.428.841.239,31 mengalami kenaikan sebesar Rp14.747.325.200,52 atau 11,64% dengan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 5-36 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	799.011.070,00	572.753.447,00	71,68	488.536.336,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.926.595,00	457.705.595,00	898,76	1.422.350.000,00
3	Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.944.311.326,04	194,43	1.417.971.685,28
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	38.133.113,00	2.400.000,00	6,29	12.887.500,00
5	Pendapatan Bunga	3.000.000.000,00	4.105.935.258,81	136,86	5.441.719.547,94
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	56.184.972,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17.992.427.390,00	307.903.283,44	1,71	362.808.446,49
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	86.468.270,00	149.874.327,00	173,33	12.878.434,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	450.000,00	44.700.000,00	9.933,33	84.165.500,00
10	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	15.846.536,00
11	Pendapatan dari Pengembalian	27.512.176.260,00	658.713.490,49	2,39	1.435.583.169,96
12	Pendapatan BLUD	123.896.151.712,00	133.184.544.511,53	107,50	115.930.583.911,12
	Jumlah	**174.375.744.410,00**	**141.428.841.239,31**	**81,11**	**126.681.516.038,79**

1. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 adalah sebesar Rp572.753.447,00 atau 71,68% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp799.011.070,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-37 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	550.096.070,00	329.108.175,00	59,83	227.778.421,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	248.915.000,00	239.995.272,00	96,42	260.757.915,00
4	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**799.011.070,00**	**572.753.447,00**	**71,68**	**488.536.336,00**

a. Rincian Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5-38 Rincian Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	227.778.421,00
2	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	550.096.070,00	329.108.175,00	59,83	0,00
	Jumlah	**550.096.070,00**	**329.108.175,00**	**59,83**	**227.778.421,00**

b. Rincian Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5-39 Rincian Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**

c. Rincian Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5-40 Rincian Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan Hewan	36.000.000,00	27.000.000,00	75,00	47.751.000,00
2	Hasil Penjualan Tanaman	212.915.000,00	212.995.272,00	100,04	213.006.915,00
	Jumlah	**248.915.000,00**	**239.995.272,00**	**96,42**	**260.757.915,00**

d. Rincian Hasil Penjualan Aset Lainnya Tahun 2023 merupakan penjualan bongkaran bekas bangunan terdiri dari:

Tabel 5-41 Rincian Hasil Penjualan Aset Lainnya

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

2. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 adalah sebesar Rp457.705.595,00 atau 898,76% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp50.926.595,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-42 Rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil Sewa BMD	50.926.595,00	457.705.595,00	898,76	1.422.350.000,00
	Jumlah	**50.926.595,00**	**457.705.595,00**	**898,76**	**1.422.350.000,00**

3. Realisasi Jasa Giro Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.944.311.326,04 atau 194,43% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-43 Rincian Jasa Giro

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.288.295.407,89	128,83	1.417.971.685,28
2	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	656.015.918,15	0,00	0,00
	Jumlah	**1.000.000.000,00**	**1.944.311.326,04**	**194,43**	**1.417.971.685,28**

4. Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.400.000,00 atau 6,29% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp38.133.113,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-44 Rincian Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	38.133.113,00	2.400.000,00	6,29	12.887.500,00
	Jumlah	**38.133.113,00**	**2.400.000,00**	**6,29**	**12.887.500,00**

5. Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.105.935.258,81 atau 136,86% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-45 Rincian Pendapatan Bunga

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	4.105.935.258,81	136,86	5.441.719.547,94
	Jumlah	**3.000.000.000,00**	**4.105.935.258,81**	**136,86**	**5.441.719.547,94**

6. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2023 adalah sebesar nihil rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5-46 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00	56.184.972,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.184.972,00**

7. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp307.903.283,44 atau 1,71% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp17.992.427.390,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5-47 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17.992.427.390,00	307.903.283,44	1,71	362.808.446,49
	Jumlah	**17.992.427.390,00**	**307.903.283,44**	**1,71**	**362.808.446,49**

8. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp149.874.327,00 atau 173,33% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp86.468.270,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5-48 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	86.468.270,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Denda PBBP2	0,00	18.874.327,00	0,00	12.878.434,00
3	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	91.000.000,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**86.468.270,00**	**149.874.327,00**	**173,33**	**12.878.434,00**

9. Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun 2023 adalah sebesar Rp44.700.000,00 atau 9.933,33% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp450.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-49 Rincian Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	44.700.000,00	9.933,33	84.165.500,00
	Jumlah	**450.000,00**	**44.700.000,00**	**9.933,33**	**84.165.500,00**

10. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2023 adalah sebesar nihil dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-50 Rincian Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	15.846.536,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.846.536,00**

11. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2023 adalah sebesar Rp658.713.490,49 atau 2,39% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp 27.512.176.260,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5-51 Rincian Pendapatan dari Pengembalian

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	534.333.795,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	26.977.842.465,00	70.752.377,00	0,26	39.471.562,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	10.305.848,69	0,00	820.000,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,00	0,00	0,00	7.611,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	0,00	0,00	0,00	22.834,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0,00	0,00	0,00	5.820.000,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	89.675.938,00	0,00	454.410.475,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	45.063.187,00	0,00	2.469.988,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	5.529.322,35	0,00	14.134.764,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	381.600.000,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	13.640.593,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	14.537.626,25	0,00	51.900.320,66
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	9.653.500,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial kepada Lembaga	0,00	0,00	0,00	18.160.000,00

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
15	endapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	12.526.575,00	0,00	0,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	0,00	0,00	0,00	3.308.182,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	2.015.000,00	0,00	0,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	12.344.000,00	0,00	0,00
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	0,00	5.874.364,00	0,00	0,00
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	1.997.647,00
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	112.587.941,37	0,00	51.610.504,49
22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	247.871.369,35	0,00	386.555.188,81
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	0,00	29.629.941,48	0,00	0,00
	Jumlah	**27.512.176.260,00**	**658.713.490,49**	**2,39**	**1.435.583.169,96**

12. Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2023 adalah sebesar Rp133.184.544.511,53 atau 107,50% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp123.896.151.712,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5-52 Rincian Pendapatan BLUD

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan BLUD	123.896.151.712,00	133.184.544.511,53	107,50	115.930.583.911,12
	Jumlah	**123.896.151.712,00**	**133.184.544.511,53**	**107,50**	**115.930.583.911,12**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2 Pendapatan Transfer	**1.739.325.133.208,00**	**1.743.448.656.008,00**	**1.678.782.423.998,00**

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang secara penganggaran dan realisasi hanya terdapat pada BPKAD selaku PPKD. Proses transfer dari Pemerintah Pusat juga langsung ke Rekening Kas Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.743.448.656.008,00 dan anggarannya sebesar Rp1.739.325.133.208,00 atau 100,24%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp1.678.782.423.998,00 realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun 2023 sebesar Rp1.743.448.656.008,00 mengalami kenaikan

sebesar Rp64.666.232.010,00 atau sebesar 3,85%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening Pendapatan Transfer Tahun 2023 :

Tabel 5-53 Rincian Pendapatan Transfer

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.389.056.385.732,00	1.364.855.214.487,00	98,26	1.297.910.080.036,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	224.397.404.000,00	224.397.404.000,00	100,00	239.393.195.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.871.343.476,00	154.196.037.521,00	122,50	141.479.148.962,00
	Jumlah	**1.739.325.133.208,00**	**1.743.448.656.008,00**	**100,24**	**1.678.782.423.998,00**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**1.389.056.385.732,00**	**1.364.855.214.487,00**	**1.297.910.080.036,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.364.855.214.487,00 dengan anggaran sebesar Rp1.389.056.385.732,00 atau 98,26%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2022 sebesar Rp1.297.910.080.036,00 realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2023 sebesar Rp1.364.855.214.487,00 mengalami kenaikan sebesar Rp66.945.134.451,00 atau sebesar 5,16%. Obyek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-54 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	148.777.849.245,00	137.443.488.069,00	92,38	163.050.876.593,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	872.817.215.000,00	881.906.003.493,00	101,04	829.591.176.619,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	109.380.471.000,00	100.481.994.423,00	91,86	95.866.127.142,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	258.080.850.487,00	245.023.728.502,00	94,94	209.401.899.682,00
	Jumlah	**1.389.056.385.732,00**	**1.364.855.214.487,00**	**98,26**	**1.297.910.080.036,00**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.1	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**	**148.777.849.245,00**	**137.443.488.069,00**	**163.050.876.593,00**

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 adalah sebesar Rp137.443.488.069,00 atau 92,38% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp148.777.849.245,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-55 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.589.551.494,00	6.589.551.494,00	100,00	11.959.221.377,00

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
2	DBH PPh Pasal 21	12.837.099.476,00	12.610.077.252,00	98,23	13.241.816.304,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.836.714.059,00	1.569.017.996,00	85,43	3.213.932.805,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	71.133.888.706,00	71.133.888.706,00	100,00	51.881.521.749,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	42.639.172.499,00	33.912.726.005,00	79,53	72.522.081.005,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	5.096.897.434,00	2.484.734.246,00	48,75	4.175.690.966,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	340.526.129,00	318.802.552,00	93,62	383.745.307,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	6.170.311.086,00	6.421.011.591,00	104,06	3.049.142.985,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	846.939.362,00	905.176.016,00	106,88	665.413.095,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.286.749.000,00	1.498.502.211,00	116,46	1.958.311.000,00
	Jumlah	**148.777.849.245,00**	**137.443.488.069,00**	**92,38**	**163.050.876.593,00**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.2	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**	**872.817.215.000,00**	**881.906.003.493,00**	**829.591.176.619,00**

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023 adalah sebesar Rp881.906.003.493,00 atau 101,04% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp872.817.215.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-56 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DAU	872.817.215.000,00	881.906.003.493,00	101,04	829.591.176.619,00
	Jumlah	**872.817.215.000,00**	**881.906.003.493,00**	**101,04**	**829.591.176.619,00**

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.3	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**109.380.471.000,00**	**100.481.994.423,00**	**95.866.127.142,00**

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penganggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2023 berdasarkan pada Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 adalah sebesar Rp100.481.994.423,00 atau 91,86% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp109.380.471.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-57 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	944.596.000,00	940.102.250,00	99,52	2.583.120.620,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.888.736.000,00	7.156.923.755,00	90,72	16.626.186.147,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.039.689.000,00	4.227.457.940,00	83,88	8.195.534.772,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	1.139.800.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	4.882.885.853,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	9.505.375.000,00	6.886.250.000,00	72,45	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	2.720.532.000,00	0,00	0,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	1.990.780.000,00	1.643.709.164,00	82,57	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	2.179.621.770,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	7.587.281.115,00
12	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	4.140.871.761,00
13	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	5.428.805.830,00
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	5.011.666.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	30.705.283.000,00	29.590.763.182,00	96,37	11.832.644.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	2.571.982.000,00
17	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	7.483.313.000,00
18	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	10.963.279.000,00	8.565.921.357,00	78,13	0,00
19	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	11.355.378.000,00	11.355.378.000,00	100,00	0,00
20	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	5.189.881.000,00
21	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan-Lingkungan Hidup	713.740.000,00	710.000.000,00	99,48	851.390.750,00
22	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	534.139.000,00	530.778.000,00	99,37	0,00
23	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	2.685.500.000,00	0,00	0,00

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
24	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	27.018.944.000,00	26.189.210.775,00	96,93	0,00
25	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	5.785.508.149,00
26	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	3.193.684.375,00
27	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	1.181.950.000,00
	Jumlah	**109.380.471.000,00**	**100.481.994.423,00**	**91,86**	**95.866.127.142,00**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.1.4	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**258.080.850.487,00**	**245.023.728.502,00**	**209.401.899.682,00**

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penganggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2023 adalah sebesar Rp245.023.728.502,00 atau 94,94% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp258.080.850.487,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-58 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	70.167.820.000,00	70.093.106.796,00	99,89	58.688.650.397,00
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD	117.429.807.000,00	113.034.486.820,00	96,26	105.749.456.785,00
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.372.750.000,00	535.874.999,00	9,97	3.669.499.500,00
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD	610.419.000,00	557.793.900,00	91,38	0,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	21.409.200.000,00	21.327.939.000,00	99,62	20.026.780.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	5.899.300.000,00	5.899.299.500,00	100,00	2.913.700.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.822.138.000,00	0,00	0,00	10.720.314.642,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	410.496.000,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	17.194.983.000,00	20.811.300.000,00	121,03	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	4.101.357.645,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	401.665.000,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.964.144.000,00	1.964.144.000,00	100,00	1.152.890.100,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	381.758.100,00	381.758.100,00	100,00	344.000.113,00
14	DAK Non Fisik-BOKB-KB	7.082.454.031,00	7.082.454.031,00	100,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	936.914.078,00	936.914.078,00	100,00	299.098.500,00
16	DAK Non Fisik-Dana Penguatan	1.946.846.678,00	1.946.836.678,00	100,00	1.334.487.000,00

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM				
17	DAK Non Fisik-PK2UMK	451.820.600,00	451.820.600,00	100,00	0,00
	Jumlah	**258.080.850.487,00**	**245.023.728.502,00**	**94,94**	**209.401.899.682,00**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**224.397.404.000,00**	**224.397.404.000,00**	**239.393.195.000,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2023 adalah sebesar Rp224.397.404.000,00 dengan anggaran sebesar Rp224.397.404.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp239.393.195.000,00, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp224.397.404.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.995.791.000,00 atau sebesar 6,26%. Obyek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5-59 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	7.725.363.000,00
2	Dana Desa	224.397.404.000,00	224.397.404.000,00	100,00	231.667.832.000,00
	Jumlah	**224.397.404.000,00**	**224.397.404.000,00**	**100,00**	**239.393.195.000,00**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID)	**0,00**	**0,00**	**7.725.363.000,00**

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2023 adalah sebesar nihil dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-60 Rincian Dana Insentif Daerah (DID)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	7.725.363.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.725.363.000,00**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.2.2 Dana Desa	**224.397.404.000,00**	**224.397.404.000,00**	**231.667.832.000,00**

Realisasi Dana Desa Tahun 2023 adalah sebesar Rp224.397.404.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp224.397.404.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-61 Rincian Dana Desa

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Desa	224.397.404.000,00	224.397.404.000,00	100,00	231.667.832.000,00
	Jumlah	**224.397.404.000,00**	**224.397.404.000,00**	**100,00**	**231.667.832.000,00**

Penganggaran Dana Desa Tahun 2023 sebesar Rp224.397.404.000,00 berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebesar Rp218.497.440,00 dan tambahan anggaran Dana Desa Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 sebesar Rp5.899.964.000,00.

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tiga tahap yaitu penyaluran tahap pertama dengan total sebesar Rp102.218.396.550,00, tahap kedua dengan total sebesar Rp66.980.106.250,00 dan penyaluran tahap tiga dengan total sebesar Rp55.198.901.200,00.

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.3	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**125.871.343.476,00**	**154.196.037.521,00**	**141.479.148.962,00**

Realisasi Pendapatan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp154.196.037.521,00 dengan anggaran sebesar Rp125.871.343.476,00 atau 122,50%. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 sebesar Rp141.479.148.962,00, realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 sebesar Rp154.196.037.521,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.716.888.559,00 atau sebesar 8,99%. Obyek Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-62 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	114.025.948.000,00	142.351.187.500,00	124,84	120.622.425.962,00
2	Bantuan Keuangan	11.845.395.476,00	11.844.850.021,00	100,00	20.856.723.000,00
	Jumlah	**125.871.343.476,00**	**154.196.037.521,00**	**122,50**	**141.479.148.962,00**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.3.1	**Pendapatan Bagi Hasil**	**114.025.948.000,00**	**142.351.187.500,00**	**120.622.425.962,00**

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2023 adalah sebesar Rp142.351.187.500,00 atau 124,84% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp114.025.948.000,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-63 Rincian Pendapatan Bagi Hasil

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	27.550.736.000,00	32.405.958.600,00	117,62	31.777.340.120,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.346.947.000,00	15.085.586.000,00	132,95	13.566.007.720,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.128.991.000,00	34.738.038.500,00	172,58	24.319.400.920,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	351.250.000,00	540.999.000,00	154,02	431.748.240,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	54.648.024.000,00	59.580.605.400,00	109,03	50.527.928.962,00
	Jumlah	**114.025.948.000,00**	**142.351.187.500,00**	**124,84**	**120.622.425.962,00**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.2.3.2	**Bantuan Keuangan**	**11.845.395.476,00**	**11.844.850.021,00**	**20.856.723.000,00**

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp11.844.850.021,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp11.845.395.476,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-64 Rincian Bantuan Keuangan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	11.845.395.476,00	11.844.850.021,00	100,00	20.856.723.000,00
	Jumlah	**11.845.395.476,00**	**11.844.850.021,00**	**100,00**	**20.856.723.000,00**

Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur berupa bantuan langsung yang menyentuh masyarakat dalam skala prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Timur dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif dan infrastruktur di Jawa Timur.

Bantuan Keuangan tersebut disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan dokumen sebagai berikut :

1. Surat Gubenur Jawa Timur Nomor : 045.2/1010/201.4/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.
2. Keputusan Gubenur Jawa Timur Nomor : 188/692/KPTS/013/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Untuk Honorarium Kinerja Guru Non Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023.
3. Keputusan Gubenur Jawa Timur Nomor : 188/693/KPTS/013/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Untuk Honorarium Kinerja Kepala/Guru Taman Kanak-Kanak/ Pendidikan Anak Usia Dini Non Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023.
4. Surat Gubenur Jawa Timur Nomor : 440/789/102.1/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.
5. Keputusan Gubenur Jawa Timur Nomor : 188/702/KPTS/013/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Untuk Honorarium Perawat Ponkesdes Tahun Anggaran 2023.
6. Surat Gubenur Jawa Timur Nomor : 412.2/304/112.3/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota pada APBD Prov. Jatim T.A 2023.

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2023 adalah sebesar Rp11.844.850.021,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp11.845.395.476,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-65 Rincian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	5.611.200.000,00	5.611.200.000,00	100,00	5.611.200.000,00
2	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	204.000.000,00	204.000.000,00	100,00	136.000.000,00
3	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/SMP	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	84.000.000,00
4	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Vokasi/Kejar Paket	454.545.455,00	454.000.000,00	99,88	0,00
5	Honorarium Kinerja Guru Non PNS	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00	12.000.000,00
6	Honorarium Kinerja Kepala/Guru Taman Kanak-Kanak/ Pendidikan Anak Usia Dini Non PNS	204.000.000,00	204.000.000,00	100,00	0,00
7	Pemenuhan Honor 157 orang Perawat Ponkesdes	2.433.500.000,00	2.433.500.000,00	100,00	2.920.200.000,00
8	Pemenuhan Honor 5 orang Dokter Umum di Puskesmas Sesuai Standar	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	225.000.000,00
9	Bantuan Transport Kunjungan Konseling Kesehatan pada Keluarga dengan Masalah Kesehatan	157.000.000,00	157.000.000,00	100,00	314.000.000,00
10	Pendamping Kegiatan Kunjungan Konseling Kesehatan pada Keluarga dengan Masalah Kesehatan	30.724.900,00	30.724.900,00	100,00	10.161.000,00
11	Pendampingan Penyelenggaraan Pesantren Sehat (Santri Jatim Sehat dan Berkah/ SAJADAH)	35.383.621,00	35.383.621,00	100,00	0,00
12	Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi oleh Kader (Bunda Anak Impian/ BUAIAN)	119.564.500,00	119.564.500,00	100,00	0,00
13	Pendampingan Ibu Hamil KEK oleh Kader dalam Pencegahan Stunting (Bunda Anak Impian/ BUAIAN)	119.477.000,00	119.477.000,00	100,00	0,00
14	Honorarium Perawat Ponkesdes	246.450.000,00	246.450.000,00	100,00	0,00
15	Bantuan Keuangan Definitif Penghasilan Aparatur Perangkat Desa	1.740.550.000,00	1.740.550.000,00	100,00	0,00
16	Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim PUSPA)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100.000.000,00
17	Pendampingan Ponkestren	0,00	0,00	0,00	72.733.000,00
18	Pendampingan Pencegahan Stunting	0,00	0,00	0,00	238.954.000,00
19	Bantuan keuangan tambahan penghasilan aparatur perangkat desa	0,00	0,00	0,00	828.475.000,00
20	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/ Guru TK/ PAUD Non PNS untuk 1 bulan sebanyak 170 orang	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00
21	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS (jenjang TK SD dan SMP) selama 3 bulan	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00
22	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/ Guru TK/ PAUD Non PNS untuk 3 bulan sebanyak 170 orang	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00
23	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS (jenjang TK SD dan SMP) selama 5 bulan	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00
24	Sarana dan Prasarana Peralatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) SD	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
	Jumlah	**11.845.395.476,00**	**11.844.850.021,00**	**100,00**	**20.856.723.000,00**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**42.327.446.415,00**	**35.962.713.057,00**	**40.191.479.944,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 adalah sebesar Rp35.962.713.057,00 atau 84,96% dari anggarannya sebesar Rp42.327.446.415,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp40.191.479.944,00, realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2023 sebesar Rp35.962.713.057,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.228.766.887,00 atau 10,52%.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 tersebut merupakan pendapatan dengan jenis pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-66 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	11.601.665.000,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	42.327.446.415,00	35.962.713.057,00	84,96	28.589.814.944,00
	Jumlah	**42.327.446.415,00**	**35.962.713.057,00**	**84,96**	**40.191.479.944,00**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah	**0,00**	**0,00**	**11.601.665.000,00**

Pendapatan Hibah digunakan untuk mencatat pendapatan hibah, antara lain Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, dan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan. Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2023 adalah nihil rincian sebagai berikut :

Tabel 5-67 Rincian Pendapatan Hibah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	11.601.665.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.601.665.000,00**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**42.327.446.415,00**	**35.962.713.057,00**	**28.589.814.944,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp35.962.713.057,00 atau 84,96% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp42.327.446.415,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5-68 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi	42.327.446.415,00	35.962.713.057,00	84,96	28.589.814.944,00

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)				
	Jumlah	**42.327.446.415,00**	**35.962.713.057,00**	**84,96**	**28.589.814.944,00**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.1.3.2.2	**Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP**	**42.327.446.415,00**	**35.962.713.057,00**	**28.589.814.944,00**

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP Tahun 2023 adalah sebesar Rp35.962.713.057,00 atau 84,96% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp42.327.446.415,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-69 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	42.327.446.415,00	35.962.713.057,00	84,96	28.589.814.944,00
	Jumlah	**42.327.446.415,00**	**35.962.713.057,00**	**84,96**	**28.589.814.944,00**

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD Tahun 2023 adalah sebesar Rp35.962.713.057,00 atau 84,96% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp42.327.446.415,00 dengan rincian obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5-70 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Kapitasi JKN FKTP Curahdami	1.869.795.483,00	1.567.784.381,00	83,85	1.287.478.630,00
2	Dana Kapitasi JKN FKTP Binakal	1.103.547.136,00	908.950.251,00	82,37	727.370.910,00
3	Dana Kapitasi JKN FKTP Grujugan	2.437.512.895,00	2.040.711.375,00	83,72	1.800.078.890,00
4	Dana Kapitasi JKN FKTP Maesan	2.486.962.411,00	2.100.109.127,00	84,44	1.803.734.613,00
5	Dana Kapitasi JKN FKTP Tamanan	2.383.970.646,00	1.961.259.526,00	82,27	1.643.830.342,00
6	Dana Kapitasi JKN FKTP Jambesari	1.962.716.347,00	1.648.997.134,00	84,02	1.353.122.978,00
7	Dana Kapitasi JKN FKTP Pujer	2.281.065.680,00	1.940.208.261,00	85,06	1.449.346.856,00
8	Dana Kapitasi JKN FKTP Tlogosari	2.772.318.563,00	2.356.386.627,00	85,00	1.342.261.661,00
9	Dana Kapitasi JKN FKTP Wonosari	2.227.218.277,00	1.873.555.735,00	84,12	1.460.312.030,00
10	Dana Kapitasi JKN FKTP Tapen	1.680.061.584,00	1.359.597.838,00	80,93	965.658.169,00
11	Dana Kapitasi JKN FKTP Nangkaan	1.606.865.950,00	1.491.520.143,00	92,82	1.108.627.985,00
12	Dana Kapitasi JKN FKTP Sukosari	988.324.606,00	864.316.458,00	87,45	617.163.201,00
13	Dana Kapitasi JKN FKTP Sumber Wringin	1.946.688.028,00	1.638.964.116,00	84,19	1.284.914.943,00
14	Dana Kapitasi JKN FKTP Klabang	850.197.742,00	676.598.441,00	79,58	596.613.331,00
15	Dana Kapitasi JKN FKTP Sempol	970.502.943,00	966.740.103,00	99,61	910.960.575,00
16	Dana Kapitasi JKN FKTP Prajekan	1.253.682.867,00	1.066.759.305,00	85,09	954.576.885,00
17	Dana Kapitasi JKN FKTP Botolinggo	1.446.567.812,00	1.261.447.461,00	87,20	942.792.058,00
18	Dana Kapitasi JKN FKTP Cermee	2.585.844.170,00	2.255.130.339,00	87,21	1.848.648.842,00
19	Dana Kapitasi JKN FKTP Kotakulon	861.316.376,00	730.545.346,00	84,82	533.058.968,00

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
20	Dana Kapitasi JKN FKTP Kademangan	829.737.165,00	694.083.909,00	83,65	555.167.757,00
21	Dana Kapitasi JKN FKTP Tenggarang	2.111.955.337,00	1.737.116.842,00	82,25	1.680.406.966,00
22	Dana Kapitasi JKN FKTP Tegalampel	1.283.018.054,00	1.168.429.273,00	91,07	901.420.576,00
23	Dana Kapitasi JKN FKTP Taman Krocok	830.012.699,00	661.017.889,00	79,64	538.565.401,00
24	Dana Kapitasi JKN FKTP Wringin	2.233.900.167,00	1.905.357.547,00	85,29	1.413.555.472,00
25	Dana Kapitasi JKN FKTP Pakem	1.323.663.477,00	1.087.125.630,00	82,13	870.146.905,00
	Jumlah	**42.327.446.415,00**	**35.962.713.057,00**	**84,96**	**28.589.814.944,00**

5.1.2 Belanja Daerah

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Daerah dan Belanja Transfer	**2.237.751.755.488,00**	**2.018.531.931.985,06**	**1.900.909.432.084,66**

Realisasi Belanja Daerah dan Belanja Transfer Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.018.531.931.985,06 atau 90,20% dari anggarannya sebesar Rp2.237.751.755.488,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Belanja Transfer Tahun 2022 sebesar Rp1.900.909.432.084,66, realisasi Belanja Daerah dan Belanja Transfer pada Tahun 2023 sebesar Rp2.018.531.931.985,06 mengalami kenaikan sebesar Rp119.882.359.953,40 atau 7,64% dengan jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 5-71 Rincian Belanja Daerah dan Belanja Transfer

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Daerah	1.908.446.163.254,00	1.689.226.339.751,06	88,51	1.569.343.979.797,66
2	Belanja Transfer	329.305.592.234,00	329.305.592.234,00	100,00	331.565.452.287,00
	Jumlah	**2.237.751.755.488,00**	**2.018.531.931.985,06**	**90,20**	**1.900.909.432.084,66**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Daerah	**1.908.446.163.254,00**	**1.689.226.339.751,06**	**1.569.343.979.797,66**

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.689.226.339.751,06 atau 88,51% dari anggarannya sebesar Rp1.908.446.163.254,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp1.569.343.979.797,66 realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp1.689.226.339.751,06 mengalami kenaikan sebesar Rp119.882.359.953,40 atau 7,64% dengan jenis belanja daerah sebagai berikut :

Tabel 5-72 Rincian Belanja Daerah

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.665.134.077.426,00	1.518.643.228.947,03	91,20	1.377.797.615.369,66
2	Belanja Modal	223.286.778.648,00	169.833.845.333,03	76,06	190.396.577.000,00
3	Belanja Tidak Terduga	20.025.307.180,00	749.265.471,00	3,74	1.149.787.428,00
	Jumlah	**1.908.446.163.254,00**	**1.689.226.339.751,06**	**88,51**	**1.569.343.979.797,66**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	**1.665.134.077.426,00**	**1.518.643.228.947,03**	**1.377.797.615.369,66**

Belanja Operasi merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kegiatan

operasional urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.518.643.228.947,03 atau 91,20% dari anggarannya sebesar Rp1.665.134.077.426,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2022 sebesar Rp1.377.797.615.369,66, realisasi Belanja Operasi pada Tahun 2023 sebesar Rp1.518.643.228.947,03 mengalami kenaikan sebesar Rp140.845.613.577,37 atau 10,22% dengan obyek belanja sebagai berikut :

Tabel 5-73 Rincian Belanja Operasi

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	888.555.037.995,00	806.488.789.870,40	90,76	787.984.360.335,00
2	Belanja Barang dan Jasa	639.964.409.788,00	582.713.480.289,63	91,05	475.352.226.339,66
3	Belanja Subsidi	1.781.923.800,00	1.781.923.800,00	100,00	2.183.163.800,00
4	Belanja Hibah	130.888.705.843,00	124.626.774.987,00	95,22	93.266.283.855,00
5	Belanja Bantuan Sosial	3.944.000.000,00	3.032.260.000,00	76,88	19.011.581.040,00
	Jumlah	**1.665.134.077.426,00**	**1.518.643.228.947,03**	**91,20**	**1.377.797.615.369,66**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1.1	**Belanja Pegawai**	**888.555.037.995,00**	**806.488.789.870,40**	**787.984.360.335,00**

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp806.488.789.870,40 atau 90,76% dari anggaran sebesar Rp888.555.037.995,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2022 sebesar Rp787.984.360.335,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.504.429.535,40 atau 2,35% dengan obyek belanja sebagai berikut :

Tabel 5-74 Rincian Belanja Pegawai

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	617.116.268.346,00	560.320.881.394,00	90,80	541.820.446.629,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	79.040.554.438,00	72.286.859.908,00	91,46	73.252.696.823,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	158.521.777.829,00	141.192.395.177,40	89,07	140.729.088.678,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.017.953.150,00	19.384.448.050,00	96,84	18.824.978.362,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	463.434.232,00	322.105.644,00	69,50	345.738.286,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	851.865.000,00	99,98	876.650.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	12.543.050.000,00	12.130.234.697,00	96,71	12.134.761.557,00
	Jumlah	**888.555.037.995,00**	**806.488.789.870,40**	**90,76**	**787.984.360.335,00**

Penjelasan lebih rinci atas masing-masing obyek Belanja Pegawai Tahun 2023 dengan anggarannya sebesar Rp888.555.037.995,00 dan realisasi sebesar Rp806.488.789.870,40 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023 adalah sebesar Rp560.320.881.394,00 atau 90,80% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp617.116.268.346,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-75 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	460.669.229.746,00	424.451.347.370,00	92,14	405.506.419.329,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	47.344.088.162,00	39.990.445.466,00	84,47	37.923.979.452,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.480.238.300,00	5.074.996.500,00	92,61	5.444.899.750,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	24.840.855.200,00	24.305.569.200,00	97,85	24.765.824.780,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.684.442.800,00	10.500.879.248,00	82,79	8.716.041.750,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	29.803.683.900,00	24.953.940.150,00	83,73	23.279.674.097,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.168.810.700,00	2.021.245.396,00	93,20	2.171.151.545,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.638.538,00	5.953.628,00	51,15	5.719.552,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	29.833.826.400,00	25.520.841.595,00	85,54	30.658.272.435,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.086.940.100,00	873.919.289,00	80,40	837.117.679,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.192.514.500,00	2.621.743.552,00	82,12	2.511.346.260,00
	Jumlah	**617.116.268.346,00**	**560.320.881.394,00**	**90,80**	**541.820.446.629,00**

a. Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN Tahun 2023 adalah sebesar Rp424.451.347.370,00 atau 92,14% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp460.669.229.746,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-76 Rincian Belanja Gaji Pokok ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	362.333.293.694,00	356.170.367.770,00	98,30	375.641.019.229,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	98.335.936.052,00	68.280.979.600,00	69,44	29.865.400.100,00
	Jumlah	**460.669.229.746,00**	**424.451.347.370,00**	**92,14**	**405.506.419.329,00**

b. Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN Tahun 2023 adalah sebesar Rp39.990.445.466,00 atau 84,47% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp47.344.088.162,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-77 Rincian Belanja Tunjangan Keluarga ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	34.270.802.662,00	33.454.782.630,00	97,62	35.123.656.608,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	13.073.285.500,00	6.535.662.836,00	49,99	2.800.322.844,00
	Jumlah	**47.344.088.162,00**	**39.990.445.466,00**	**84,47**	**37.923.979.452,00**

c. Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.074.996.500,00 atau 92,61% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.480.238.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-78 Rincian Belanja Tunjangan Jabatan ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.480.238.300,00	5.074.996.500,00	92,61	5.444.899.750,00
	Jumlah	**5.480.238.300,00**	**5.074.996.500,00**	**92,61**	**5.444.899.750,00**

d. Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN Tahun 2023 adalah sebesar Rp24.305.569.200,00 atau 97,85% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp24.840.855.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-79 Rincian Belanja Tunjangan Fungsional ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	24.840.855.200,00	24.305.569.200,00	97,85	24.765.824.780,00
	Jumlah	**24.840.855.200,00**	**24.305.569.200,00**	**97,85**	**24.765.824.780,00**

e. Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun 2023 adalah sebesar Rp10.500.879.248,00 atau 82,79% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp12.684.442.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-80 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.568.263.800,00	6.227.214.248,00	94,81	6.843.426.750,00
2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.116.179.000,00	4.273.665.000,00	69,87	1.872.615.000,00
	Jumlah	**12.684.442.800,00**	**10.500.879.248,00**	**82,79**	**8.716.041.750,00**

f. Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN Tahun 2023 adalah sebesar Rp24.953.940.150,00 atau 83,73% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp29.803.683.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-81 Rincian Belanja Tunjangan Beras ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.595.681.200,00	20.107.376.490,00	97,63	21.176.959.397,00
2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.208.002.700,00	4.846.563.660,00	52,63	2.102.714.700,00
	Jumlah	**29.803.683.900,00**	**24.953.940.150,00**	**83,73**	**23.279.674.097,00**

g. Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.021.245.396,00 atau 93,20% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.168.810.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-82 Rincian Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	2.168.810.700,00	2.021.245.396,00	93,20	2.171.151.545,00
	Jumlah	**2.168.810.700,00**	**2.021.245.396,00**	**93,20**	**2.171.151.545,00**

h. Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.953.628,00 atau 51,15% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp11.638.538,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-83 Rincian Belanja Pembulatan Gaji ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.574.638,00	4.838.748,00	56,43	5.231.278,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.063.900,00	1.114.880,00	36,39	488.274,00
	Jumlah	**11.638.538,00**	**5.953.628,00**	**51,15**	**5.719.552,00**

i. Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun 2023 adalah sebesar Rp25.520.841.595,00 atau 85,54% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp29.833.826.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-84 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	25.150.079.300,00	22.955.332.646,00	91,27	29.504.578.911,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.683.747.100,00	2.565.508.949,00	54,77	1.153.693.524,00
	Jumlah	**29.833.826.400,00**	**25.520.841.595,00**	**85,54**	**30.658.272.435,00**

j. Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Tahun 2023 adalah sebesar Rp873.919.289,00 atau 80,40% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.086.940.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-85 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	851.969.500,00	729.292.788,00	85,60	769.735.329,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	234.970.600,00	144.626.501,00	61,55	67.382.350,00
	Jumlah	**1.086.940.100,00**	**873.919.289,00**	**80,40**	**837.117.679,00**

k. Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.621.743.552,00 atau 82,12% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.192.514.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-86 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.487.603.800,00	2.190.632.785,00	88,06	2.331.763.278,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	704.910.700,00	431.110.767,00	61,16	179.582.982,00
	Jumlah	**3.192.514.500,00**	**2.621.743.552,00**	**82,12**	**2.511.346.260,00**

2. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2023 adalah sebesar Rp72.286.859.908,00 atau 91,46% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp79.040.554.438,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-87 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	77.445.554.438,00	70.701.859.908,00	91,29	71.706.896.823,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.595.000.000,00	1.585.000.000,00	99,37	1.545.800.000,00
	Jumlah	**79.040.554.438,00**	**72.286.859.908,00**	**91,46**	**73.252.696.823,00**

a. Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun 2023 adalah sebesar Rp70.701.859.908,00 atau 91,29% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp77.445.554.438,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-88 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	77.445.554.438,00	70.701.859.908,00	91,29	71.706.896.823,00
	Jumlah	**77.445.554.438,00**	**70.701.859.908,00**	**91,29**	**71.706.896.823,00**

b. Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.585.000.000,00 atau 99,37% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.595.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-89 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.595.000.000,00	1.585.000.000,00	99,37	1.545.800.000,00
	Jumlah	**1.595.000.000,00**	**1.585.000.000,00**	**99,37**	**1.545.800.000,00**

3. Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2023 adalah sebesar Rp141.192.395.177,40 atau 89,07% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp158.521.777.829,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-90 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	450,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	117.429.807.000,00	109.360.714.720,00	93,13	116.109.500.220,00
3	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	610.419.000,00	342.998.900,00	56,19	0,00
4	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.372.750.000,00	1.272.250.000,00	23,68	1.265.250.000,00
5	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	35.052.831.379,00	30.160.461.557,40	86,04	23.264.585.847,00
6	Belanja Honorarium	55.970.000,00	55.970.000,00	100,00	89.752.611,00
	Jumlah	**158.521.777.829,00**	**141.192.395.177,40**	**89,07**	**140.729.088.678,00**

a. Realisasi Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2023 adalah nihil atau 0% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp450,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-91 Rincian Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	450,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

b. Realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Tahun 2023 adalah sebesar Rp109.360.714.720,00 atau 93,13% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp117.429.807.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-92 Rincian Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja TPG PNSD	117.429.807.000,00	109.360.714.720,00	93,13	116.109.500.220,00
	Jumlah	**117.429.807.000,00**	**109.360.714.720,00**	**93,13**	**116.109.500.220,00**

c. Realisasi Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Tahun 2023 adalah sebesar Rp342.998.900,00 atau 56,19% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp610.419.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-93 Rincian Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja TKG PNSD	610.419.000,00	342.998.900,00	56,19	0,00
	Jumlah	**610.419.000,00**	**342.998.900,00**	**56,19**	**0,00**

d. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.272.250.000,00 atau 23,68% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.372.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-94 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tamsil Guru PNSD	5.372.750.000,00	1.272.250.000,00	23,68	1.265.250.000,00
	Jumlah	**5.372.750.000,00**	**1.272.250.000,00**	**23,68**	**1.265.250.000,00**

e. Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Tahun 2023 adalah sebesar Rp30.160.461.557,40 atau 86,04% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp35.052.831.379,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-95 Rincian Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	35.052.831.379,00	30.160.461.557,40	86,04	23.264.585.847,00
	Jumlah	**35.052.831.379,00**	**30.160.461.557,40**	**86,04**	**23.264.585.847,00**

f. Realisasi Belanja Honorarium Tahun 2023 adalah sebesar Rp55.970.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp55.970.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-96 Rincian Belanja Honorarium

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	13.882.611,00
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	21.470.000,00	21.470.000,00	100,00	39.870.000,00
3	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	36.000.000,00
	Jumlah	**55.970.000,00**	**55.970.000,00**	**100,00**	**89.752.611,00**

4. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2023 adalah sebesar Rp19.384.448.050,00 atau 96,84% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp20.017.953.150,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-97 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.002.435.000,00	99,84	1.004.010.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	131.521.300,00	121.552.200,00	92,42	121.522.800,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.427.200,00	123.041.580,00	94,34	122.896.740,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.900.500,00	99,82	86.058.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.456.827.750,00	1.453.530.750,00	99,77	1.455.814.500,00
6	Belanja Tunjangan Alat	159.822.900,00	136.111.500,00	85,16	136.416.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Kelengkapan DPRD				
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	132.966.000,00	60.428.025,00	45,45	39.021.675,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.659.500.000,00	99,81	5.670.000.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.407.000.000,00	99,26	1.375.500.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.420.000,00	865.953,00	60,98	646.063,00
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.526.300.000,00	4.466.882.542,00	98,69	4.139.092.584,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.870.800.000,00	4.860.900.000,00	99,80	4.674.000.000,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.300.000,00	6.300.000,00	1,46	0,00
	Jumlah	**20.017.953.150,00**	**19.384.448.050,00**	**96,84**	**18.824.978.362,00**

a. Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.002.435.000,00 atau 99,84% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.004.010.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-98 Rincian Belanja Uang Representasi DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.002.435.000,00	99,84	1.004.010.000,00
	Jumlah	**1.004.010.000,00**	**1.002.435.000,00**	**99,84**	**1.004.010.000,00**

b. Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Tahun 2023 adalah sebesar Rp121.552.200,00 atau 92,42% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp131.521.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-99 Rincian Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	131.521.300,00	121.552.200,00	92,42	121.522.800,00
	Jumlah	**131.521.300,00**	**121.552.200,00**	**92,42**	**121.522.800,00**

c. Realisasi Belanja Tunjangan Beras DPRD Tahun 2023 adalah sebesar Rp123.041.580,00 atau 94,34% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp130.427.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-100 Rincian Belanja Tunjangan Beras DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.427.200,00	123.041.580,00	94,34	122.896.740,00
	Jumlah	**130.427.200,00**	**123.041.580,00**	**94,34**	**122.896.740,00**

d. Realisasi Belanja Uang Paket DPRD Tahun 2023 adalah sebesar Rp85.900.500,00 atau 99,82% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp86.058.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-101 Rincian Belanja Uang Paket DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.900.500,00	0,00	86.058.000,00
	Jumlah	**86.058.000,00**	**85.900.500,00**	**99,82**	**86.058.000,00**

e. Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.453.530.750,00 atau 99,77% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.456.827.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-102 Rincian Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.456.827.750,00	1.453.530.750,00	99,77	1.455.814.500,00
	Jumlah	**1.456.827.750,00**	**1.453.530.750,00**	**99,77**	**1.455.814.500,00**

f. Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2023 adalah sebesar Rp136.111.500,00 atau 85,16% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp159.822.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-103 Rincian Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	159.822.900,00	136.111.500,00	85,16	136.416.000,00
	Jumlah	**159.822.900,00**	**136.111.500,00**	**85,16**	**136.416.000,00**

g. Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Tahun 2023 adalah sebesar Rp60.428.025,00 atau 45,45% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp132.966.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-104 Rincian Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	132.966.000,00	60.428.025,00	45,45	39.021.675,00
	Jumlah	**132.966.000,00**	**60.428.025,00**	**45,45**	**39.021.675,00**

h. Realisasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.659.500.000,00 atau 99,81% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.670.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-105 Rincian Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.659.500.000,00	99,81	5.670.000.000,00
	Jumlah	**5.670.000.000,00**	**5.659.500.000,00**	**99,81**	**5.670.000.000,00**

i. Realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.407.000.000,00 atau 99,26% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.417.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-106 Rincian Belanja Tunjangan Reses DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.407.000.000,00	99,26	1.375.500.000,00
	Jumlah	**1.417.500.000,00**	**1.407.000.000,00**	**99,26**	**1.375.500.000,00**

j. Realisasi Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2023 adalah sebesar Rp865.953,00 atau 60,98% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.420.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-107 Rincian Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.420.000,00	865.953,00	60,98	646.063,00
	Jumlah	**1.420.000,00**	**865.953,00**	**60,98**	**646.063,00**

k. Realisasi Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.466.882.542,00 atau 98,69% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.526.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-108 Rincian Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	94.750.000,00	80.636.094,00	85,10	80.831.016,00
2	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	20.000.000,00	2.061.612,00	10,31	2.065.392,00
3	Belanja Jaminan Kematian DPRD	24.550.000,00	6.184.836,00	25,19	6.196.176,00
4	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.387.000.000,00	4.378.000.000,00	99,79	4.050.000.000,00
	Jumlah	**4.526.300.000,00**	**4.466.882.542,00**	**98,69**	**4.139.092.584,00**

l. Realisasi Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.860.900.000,00 atau 99,80% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.870.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-109 Rincian Belanja Tunjangan Transportasi DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.870.800.000,00	4.860.900.000,00	99,80	4.674.000.000,00
	Jumlah	**4.870.800.000,00**	**4.860.900.000,00**	**99,80**	**4.674.000.000,00**

m. Realisasi Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Tahun 2023 adalah sebesar Rp6.300.000,00 atau 1,46% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp430.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-110 Rincian Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.300.000,00	6.300.000,00	1,46	0,00
	Jumlah	**430.300.000,00**	**6.300.000,00**	**1,46**	**0,00**

5. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebesar Rp322.105.644,00 atau 69,50% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp463.434.232,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-111 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.392.000,00	42.900.000,00	77,45	54.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.083.300,00	4.686.000,00	77,03	6.288.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.245.600,00	81.000.000,00	80,80	98.280.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.540.200,00	3.983.100,00	71,89	4.852.140,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.729.500,00	1.534.453,00	88,72	1.401.404,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	1.460,00	73,00	1.120,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.480.900,00	4.235.760,00	65,36	5.456.160,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	133.700,00	84.240,00	63,01	112.320,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	401.000,00	252.720,00	63,02	336.960,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	272.562.858,00	183.427.911,00	67,30	174.410.182,00
11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	14.863.174,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**463.434.232,00**	**322.105.644,00**	**69,50**	**345.738.286,00**

a. Realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebesar Rp42.900.000,00 atau 77,45% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp55.392.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-112 Rincian Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.392.000,00	42.900.000,00	77,45	54.600.000,00
	Jumlah	**55.392.000,00**	**42.900.000,00**	**77,45**	**54.600.000,00**

b. Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.686.000,00 atau 77,03% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp6.083.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-113 Rincian Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.083.300,00	4.686.000,00	77,03	6.288.000,00
	Jumlah	**6.083.300,00**	**4.686.000,00**	**77,03**	**6.288.000,00**

c. Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebesar Rp81.000.000,00 atau 80,80% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp100.245.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-114 Rincian Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.245.600,00	81.000.000,00	80,80	98.280.000,00
	Jumlah	**100.245.600,00**	**81.000.000,00**	**80,80**	**98.280.000,00**

d. Realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.983.100,00 atau 71,89% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.540.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-115 Rincian Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.540.200,00	3.983.100,00	71,89	4.852.140,00
	Jumlah	**5.540.200,00**	**3.983.100,00**	**71,89**	**4.852.140,00**

e. Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.534.453,00 atau 88,72% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.729.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-116 Rincian Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus KDH/ WKDH	1.729.500,00	1.534.453,00	88,72	1.401.404,00
	Jumlah	**1.729.500,00**	**1.534.453,00**	**88,72**	**1.401.404,00**

f. Realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.460,00 atau 73,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-117 Rincian Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	1.460,00	73,00	1.120,00
	Jumlah	**2.000,00**	**1.460,00**	**73,00**	**1.120,00**

g. Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.235.760,00 atau 65,36% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp6.480.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-118 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.480.900,00	4.235.760,00	65,36	5.456.160,00
	Jumlah	**6.480.900,00**	**4.235.760,00**	**65,36**	**5.456.160,00**

h. Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebesar Rp84.240,00 atau 63,01% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp133.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-119 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	133.700,00	84.240,00	63,01	112.320,00
	Jumlah	**133.700,00**	**84.240,00**	**63,01**	**112.320,00**

i. Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebesar Rp252.720,00 atau 63,02% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp401.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-120 Rincian Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	401.000,00	252.720,00	63,02	336.960,00
	Jumlah	**401.000,00**	**252.720,00**	**63,02**	**336.960,00**

j. Realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp183.427.911,00 atau 67,30% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp272.562.858,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-121 Rincian Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	9.093.780,00	9.093.780,00	100,00	3.637.511,00
2	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	19.805.501,00	8.640.000,00	43,62	15.272.196,00
3	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	606.775,00	543.568,00	89,58	242.709,00
4	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	6.100.017,00	4.531.250,00	74,28	4.575.013,00
5	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	84.000.000,00	59.812.500,00	71,21	63.000.000,00
6	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	747.024,00	706.560,00	94,58	360.000,00
7	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.117.753,00	1.117.753,00	100,00	1.117.753,00
8	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	102.008,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	96.540.000,00	59.232.500,00	61,36	72.405.000,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	54.450.000,00	39.750.000,00	73,00	13.800.000,00
	Jumlah	**272.562.858,00**	**183.427.911,00**	**67,30**	**174.410.182,00**

k. Realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebesar nihil dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp14.863.174,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-122 Rincian Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	714.648,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	6.674.169,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.578.785,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	2.133.705,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.823.064,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa	734.400,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Usaha-Rumah Potong Hewan				
7	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	1.204.403,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**14.863.174,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6. Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebesar Rp851.865.000,00 atau 99,98% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp852.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-123 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	252.000.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	599.865.000,00	99,98	624.650.000,00
	Jumlah	**852.000.000,00**	**851.865.000,00**	**99,98**	**876.650.000,00**

a. Realisasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2023 adalah sebesar Rp252.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp252.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-124 Rincian Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	252.000.000,00
	Jumlah	**252.000.000,00**	**252.000.000,00**	**100,00**	**252.000.000,00**

b. Realisasi Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebesar Rp599.865.000,00 atau 99,98% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp600.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-125 Rincian Belanja Dana Operasional KDH/WKDH

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	599.865.000,00	99,98	624.650.000,00
	Jumlah	**600.000.000,00**	**599.865.000,00**	**99,98**	**624.650.000,00**

7. Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun 2023 adalah sebesar Rp12.130.234.697,00 atau 96,71% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp12.543.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-126 Rincian Belanja Pegawai BLUD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai BLUD	12.543.050.000,00	12.130.234.697,00	96,71	12.134.761.557,00
	Jumlah	**12.543.050.000,00**	**12.130.234.697,00**	**96,71**	**12.134.761.557,00**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1.2	**Belanja Barang dan Jasa**	**639.964.409.788,00**	**582.713.480.289,63**	**475.352.226.339,66**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebelum mapping sebesar Rp582.713.480.289,63 atau 91,05% dari anggarannya sebesar Rp639.964.409.788,00 merupakan Belanja Barang dan Jasa yang termasuk kelompok Belanja Operasi. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2022 sebelum mapping sebesar Rp475.352.226.339,66 realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebelum mapping sebesar Rp582.713.480.289,63 mengalami kenaikan sebesar Rp107.361.253.949,97 atau 22,59% dengan obyek belanja sebagai berikut :

Tabel 5-127 Rincian Belanja Barang dan Jasa Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang	183.707.535.611,00	161.653.846.833,00	88,00	106.769.339.192,00
2	Belanja Jasa	206.432.387.309,00	188.247.294.360,00	91,19	157.837.013.034,96
3	Belanja Pemeliharaan	5.753.530.000,00	5.531.991.760,00	96,15	4.780.461.309,00
4	Belana Perjalanan Dinas	51.018.755.500,00	39.543.023.979,00	77,51	36.622.421.685,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	33.699.600.000,00	31.334.566.500,00	92,98	19.166.914.928,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	45.489.414.244,00	45.359.138.393,00	99,71	42.788.897.743,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	113.863.187.124,00	111.043.618.464,63	97,52	107.387.178.447,70
	Jumlah	**639.964.409.788,00**	**582.713.480.289,63**	**91,05**	**475.352.226.339,66**

Pada realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebelum mapping sebesar Rp582.713.480.289,63 didalamnya terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa yang belum dimapping yaitu realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp45.359.138.393,00 dan realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp111.043.618.464,63. Selanjutnya dilakukan reklasifikasi/ mapping atas belanja barang dan jasa tersebut. Penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5-128 Mapping Belanja Barang dan Jasa BOS

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
I. Belanja Barang		**15.230.942.720,00**	**15.210.710.183,00**	**99,87**	**13.092.257.285,00**
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.306.650,00	2.306.650,00	100,00	0,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.142.650,00	9.142.650,00	100,00	10.592.000,00
3	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	78.103.715,00	78.103.602,00	100,00	93.733.951,00
4	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	348.000,00	328.000,00	94,25	20.000,00
5	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	108.801.562,00	108.801.412,00	100,00	250.303.247,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.523.439.506,00	6.517.310.911,00	99,91	5.783.983.755,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.901.396.169,00	1.895.244.332,00	99,68	1.561.555.349,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	118.080.000,00	117.730.000,00	99,70	123.580.000,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.294.086.745,00	1.292.979.028,00	99,91	984.913.383,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.553.447.599,00	1.552.599.343,00	99,95	1.709.155.092,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	317.586.010,00	316.807.826,00	99,75	306.768.804,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk	89.774.790,00	89.774.790,00	100,00	74.958.502,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	447.415.443,00	447.294.443,00	99,97	9.457.600,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	19.853.050,00	19.853.050,00	100,00	10.915.510,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.328.550,00	10.328.550,00	100,00	0,00
16	Belanja Obat-Obat-Obatan	284.912.041,00	283.707.356,00	99,58	606.670.832,00
17	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	706.175.290,00	703.797.290,00	99,66	582.914.500,00
18	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.504.532.700,00	1.503.388.700,00	99,92	951.964.680,00
19	Belanja Pakaian Olahraga	41.672.250,00	41.672.250,00	100,00	15.577.080,00
20	Belanja Pakaian Paskibraka	219.540.000,00	219.540.000,00	100,00	15.193.000,00
II. Belanja Jasa		**24.281.370.114,00**	**24.246.331.946,00**	**99,86**	**21.032.727.271,00**
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	314.020.000,00	314.020.000,00	100,00	18.730.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	0,00	0,00	11.985.000,00
4	Honorarium Rohaniwan	950.000,00	950.000,00	100,00	0,00
5	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	7.562.447.300,00	7.558.096.300,00	99,94	8.540.273.700,00
9	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang	1.187.398.281,00	1.187.353.281,00	100,00	52.681.950,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.735.257.900,00	6.731.430.925,00	99,94	4.164.462.680,00
13	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.945.364.655,00	3.938.770.403,00	99,83	1.808.990.500,00
15	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	75.150.000,00	74.850.000,00	99,60	1.652.461.800,00
16	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	819.212.600,00
17	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	4.975.510,00	4.975.000,00	99,99	6.137.000,00
18	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	136.200.000,00	136.200.000,00	100,00	66.955.000,00
19	Belanja Jasa Tata Rias	82.545.000,00	82.545.000,00	100,00	56.770.000,00
20	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	47.620.699,00	47.462.796,00	99,67	77.464.750,00
21	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan	1.897.500,00	1.897.500,00	100,00	2.797.400,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga				
22	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	22.955.000,00	22.955.000,00	100,00	25.600.000,00
23	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00	24.650.000,00
24	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	433.400,00	433.400,00	100,00	0,00
25	Belanja Tagihan Telepon	6.682.339,00	6.682.335,00	100,00	23.967.824,00
26	Belanja Tagihan Air	232.305.240,00	231.456.657,00	99,63	191.648.550,00
27	Belanja Tagihan Listrik	901.110.097,00	889.856.306,00	98,75	853.291.624,00
28	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	179.355.000,00	178.125.000,00	99,31	118.001.000,00
29	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.736.212.477,00	1.731.278.429,00	99,72	1.695.443.243,00
30	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Belanja Penambahan Daya	28.846.114,00	28.846.114,00	100,00	52.085.650,00
32	Belanja Pembayaran Bea, dan Perizinan	0,00	0,00	0,00	435.000,00
33	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Sewa Electric Generating Set	162.995.000,00	162.995.000,00	100,00	87.691.000,00
36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	560.968.102,00	559.672.000,00	99,77	505.075.000,00
37	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	46.400.000,00	46.400.000,00	100,00	20.850.000,00
38	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Belanja Sewa Mebel	12.310.000,00	12.310.000,00	100,00	9.550.000,00
40	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	0,00
41	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	89.114.000,00	89.114.000,00	100,00	34.250.000,00
42	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	14.600.000,00	14.600.000,00	100,00	18.550.000,00
43	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	121.196.500,00	121.196.500,00	100,00	81.366.000,00
45	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	1.860.000,00	1.860.000,00	100,00	0,00
46	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	0,00
48	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	24.050.000,00	23.850.000,00	99,17	9.350.000,00
III. Belanja Pemeliharaan		**5.618.632.480,00**	**5.544.610.514,00**	**98,68**	**8.519.481.837,00**
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan	3.631.500,00	3.631.500,00	100,00	9.059.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Perlengkapan Kantor				
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	88.659.700,00	88.044.700,00	99,31	60.224.950,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	134.294.500,00	134.294.500,00	100,00	203.385.900,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	22.175.000,00	22.175.000,00	100,00	14.692.400,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.048.000,00	9.048.000,00	100,00	10.961.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	1.216.350,00	1.216.350,00	100,00	20.257.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	43.735.000,00	43.735.000,00	100,00	1.329.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	14.104.400,00	14.104.400,00	100,00	20.078.100,00
14	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	13.040.000,00	13.040.000,00	100,00	25.535.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	266.539.561,00	265.615.613,00	99,65	300.690.914,00
16	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	68.539.398,00	67.802.550,00	98,92	66.045.086,00
19	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	45.485.700,00	45.485.700,00	100,00	16.580.000,00
20	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	30.111.750,00	30.111.750,00	100,00	32.971.314,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
21	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	287.201.255,00	287.181.955,00	99,99	507.905.767,00
27	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	64.380.200,00	64.380.200,00	100,00	75.243.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	75.605.000,00	75.605.000,00	100,00	143.340.553,00
29	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	24.042.250,00	24.042.250,00	100,00	56.840.000,00
30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	317.449.100,00	317.448.850,00	100,00	369.176.130,00
31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	70.614.500,00	70.614.500,00	100,00	51.606.100,00
32	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.240.169.272,00	1.178.564.050,00	95,03	1.866.046.404,00
33	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	108.086.200,00	108.086.200,00	100,00	29.749.000,00
34	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	35.628.000,00	35.628.000,00	100,00	34.927.000,00
35	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	146.420.550,00	146.329.550,00	99,94	204.285.000,00
36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	1.570.401.771,00	1.560.634.478,00	99,38	2.702.850.226,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				
37	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	301.980.400,00	301.980.400,00	100,00	401.806.350,00
38	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	445.075.523,00	444.812.868,00	99,94	998.522.000,00
39	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	90.986.050,00	90.986.050,00	100,00	140.862.050,00
40	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	98.631.550,00	98.631.100,00	100,00	138.797.593,00
41	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	4.695.000,00
42	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	0,00	0,00	0,00	6.020.000,00
44	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
IV. Belanja Perjalanan Dinas		**358.468.930,00**	**357.485.750,00**	**99,73**	**144.431.350,00**
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.030.000,00	8.015.000,00	99,81	4.660.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	350.438.930,00	349.470.750,00	99,72	139.771.350,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**45.489.414.244,00**	**45.359.138.393,00**	**99,71**	**42.788.897.743,00**

Penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-129 Mapping Belanja Barang dan Jasa BLUD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
I. Belanja Barang		**49.204.162.912,00**	**46.529.496.708,63**	**94,56**	**40.051.234.309,70**
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	40.000.000,00	39.648.090,00	99,12	113.905.148,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	8.470.128.252,00	8.058.289.080,87	95,14	10.023.901.132,89
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	429.902.950,00	406.654.750,00	94,59	469.726.300,00
4	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	141.084.394,00
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	93.000.000,00	92.925.000,00	99,92	89.006.000,00
6	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12.430.237.750,00	11.914.991.449,63	95,85	7.303.840.197,99
7	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.395.000,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk	1.465.293.485,00	1.398.071.495,00	95,41	1.716.564.864,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor				
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	275.000.000,00	273.982.872,00	99,63	329.511.250,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	21.500.000,00	21.429.554,00	99,67	21.440.608,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	330.000.000,00	329.258.260,00	99,78	461.078.200,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.029.566.400,00	1.024.343.517,00	99,49	1.169.320.222,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	220.850.000,00	220.811.745,00	99,98	521.927.981,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	385.895.000,00	385.895.000,00	100,00	376.157.355,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	5.994.000,00	5.994.000,00	100,00	27.932.000,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.200.000,00	1.932.500,00	87,84	55.431.163,00
17	Belanja Obat-Obatan-Obat	20.478.050.730,00	18.952.279.200,13	92,55	11.422.732.644,82
18	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.593.720.000,00
19	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	197.644.380,00
20	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	96.632.000,00	96.182.000,00	99,53	199.617.000,00
21	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	29.960.000,00	29.960.000,00	100,00	50.583.000,00
22	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.384.897.945,00	2.279.803.615,00	95,59	1.680.799.221,00
23	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	726.648.500,00	709.745.500,00	97,67	1.451.328.388,00
24	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	288.405.900,00	287.299.080,00	99,62	584.587.860,00
II. Belanja Jasa		**59.558.952.912,00**	**59.468.132.458,00**	**99,85**	**54.934.571.495,00**
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	156.594.260,00	156.594.260,00	100,00	323.921.040,00
2	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	65.481.740,00	65.481.740,00	100,00	76.597.960,00
3	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	52.934.141.727,00	52.892.088.359,00	99,92	47.246.511.739,00
4	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	108.624.000,00	103.624.000,00	95,40	99.359.000,00
5	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	800.000,00	500.000,00	62,50	149.740.000,00
6	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
7	Belanja Jasa Tenaga Ahli	218.370.000,00	218.370.000,00	100,00	154.626.500,00
8	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	64.100.000,00	64.002.600,00	99,85	63.064.650,00
9	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.100.000,00	2.002.168,00	95,34	2.107.668,00
10	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	0,00	0,00	0,00	15.433.200,00
11	Belanja Jasa Kalibrasi	298.906.000,00	298.906.000,00	100,00	292.810.000,00
12	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	791.600.975,00	790.700.975,00	99,89	672.588.815,00
13	Belanja Tagihan Telepon	27.839.843,00	27.839.843,00	100,00	28.436.905,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
14	Belanja Tagihan Air	43.800.000,00	43.796.410,00	99,99	54.021.000,00
15	Belanja Tagihan Listrik	1.932.413.674,00	1.932.413.674,00	100,00	1.721.581.648,00
16	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	32.400.000,00
17	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	369.480.000,00	368.896.200,00	99,84	451.782.891,00
18	Belanja Registrasi/Keanggotaan	7.760.000,00	7.760.000,00	100,00	7.100.000,00
19	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	33.850.000,00	20.301.316,00	59,97	54.589.289,00
20	Belanja Lembur	11.611.000,00	10.611.000,00	91,39	12.323.000,00
21	Belanja Medical Check Up	141.452.000,00	141.452.000,00	100,00	60.697.088,00
22	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non PNS	297.344.460,00	294.731.420,00	99,12	433.531.030,00
23	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	50.794.606,00	50.387.381,00	99,20	38.877.129,00
24	Belanja Jaminan Hari Tua PPPK	500.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	500.000,00	0,00	0,00	3.390.000,00
26	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.862.997.285,00	1.862.986.417,00	100,00	1.466.650.712,00
27	Belanja Sosialisasi	89.163.195,00	83.686.695,00	93,86	26.404.650,00
28	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	500.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	17.228.147,00	0,00	0,00	1.443.325.581,00
III. Belanja Pemeliharaan		**4.594.071.300,00**	**4.543.454.998,00**	**98,90**	**11.630.553.631,00**
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	48.100.000,00	48.055.230,00	99,91	129.659.400,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	395.300.000,00	394.809.684,00	99,88	263.969.700,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	42.107.850,00	42.107.850,00	100,00	62.500.750,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	94.175.000,00	94.174.620,00	100,00	74.332.050,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Bengkel dan Alat Ukur -Alat bengkel Bermain perkakas Bengkel listrik	36.280.600,00	34.280.600,00	94,49	139.202.450,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	47.950.000,00	47.950.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	79.000.000,00	62.587.350,00	79,22	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.287.727.250,00	1.275.819.990,00	99,08	772.816.400,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	950.000.000,00	948.936.074,00	99,89	1.496.697.671,00
11	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	193.587.600,00	193.587.600,00	100,00	41.450.000,00
12	Belanja Pemeliharaan	89.000.000,00	87.401.400,00	98,20	118.251.650,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.156.343.000,00	1.140.333.000,00	98,62	7.659.266.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00	636.800.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	100.000.000,00	99.411.600,00	99,41	136.546.650,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	0,00	0,00	0,00	610.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	98.450.910,00
IV. Belanja Perjalanan Dinas		**506.000.000,00**	**502.534.300,00**	**99,32**	**770.819.012,00**
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	505.500.000,00	502.534.300,00	99,41	770.819.012,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**113.863.187.124,00**	**111.043.618.464,63**	**97,52**	**107.387.178.447,70**

Penjelasan lebih rinci atas masing-masing mapping Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dengan anggarannya sebesar Rp639.964.409.788,00 dan realisasi sebesar Rp582.713.480.289,63 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 sebelum mapping adalah sebesar Rp161.653.846.833,00 atau 88,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp183.707.535.611,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-130 Rincian Belanja Barang Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	183.697.480.911,00	161.645.553.333,00	88,00	106.754.735.192,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	10.054.700,00	8.293.500,00	82,48	14.604.000,00
	Jumlah	**183.707.535.611,00**	**161.653.846.833,00**	**88,00**	**106.769.339.192,00**

a. Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2023 sebelum mapping adalah sebesar Rp161.645.553.333,00 atau 88,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp183.697.480.911,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-131 Rincian Belanja Barang Pakai Habis Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.327.163.286,00	2.144.669.450,00	92,16	2.577.504.377,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.512.171.185,00	2.336.685.784,00	93,01	5.577.964.734,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.664.347.930,00	8.082.435.098,00	83,63	6.434.690.040,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	64.124.500,00	59.915.417,00	93,44	365.966.327,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	68.017.200,00	65.616.700,00	96,47	157.582.425,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam	38.897.160,00	31.726.540,00	81,57	15.698.057,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Kebakaran				
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	63.480.000,00	46.491.000,00	73,24	53.836.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	31.392.000,00	31.300.000,00	99,71	36.650.000,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.768.548.275,00	8.352.811.888,00	95,26	6.850.350.175,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.244.840.900,00	3.126.107.258,00	96,34	2.106.101.645,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	200.000.000,00	198.172.700,00	99,09	292.413.050,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	240.000,00	240.000,00	100,00	5.680.000,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	28.000.000,00	15.100.000,00	53,93	975.869.111,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.544.594.756,00	8.417.278.877,00	88,19	7.597.540.301,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.869.505.464,00	2.719.415.104,00	94,77	1.696.047.981,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	33.535.300,00	33.153.120,00	98,86	3.066.814.395,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	154.180.000,00	139.331.000,00	90,37	174.000.170,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	10.997.800,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.858.489.794,00	2.619.404.020,00	91,64	2.539.446.255,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.123.441.395,00	993.590.023,00	88,44	767.661.658,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.406.975.139,00	1.333.952.956,00	94,81	885.896.200,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	775.602.700,00	770.560.300,00	99,35	148.733.350,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	33.000.000,00	32.985.000,00	99,95	0,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.805.400.000,00	1.758.224.300,00	97,39	216.509.800,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	70.688.350,00	67.948.315,00	96,12	286.495.132,00
26	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.665.933.213,00	5.445.457.669,00	96,11	4.626.500.405,00
27	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	200.000.000,00	197.865.000,00	98,93	15.570.000,00
28	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk	73.264.747.680,00	61.679.248.162,00	84,19	32.546.285.398,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
29	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	24.099.028.184,00	22.437.873.407,00	93,11	698.473.803,00
30	Belanja Natura dan Pakan-Natura	264.713.000,00	243.994.500,00	92,17	0,00
31	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	47.500.000,00	47.200.000,00	99,37	112.335.000,00
32	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	30.240.000,00	30.240.000,00	100,00	9.342.000,00
33	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.513.455.500,00	19.643.283.701,00	87,25	20.301.824.819,00
34	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	550.164.000,00	477.447.500,00	86,78	559.096.118,00
35	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	7.200.000,00	6.030.000,00	83,75	0,00
36	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	20.160.000,00
37	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	7.324.226.000,00	6.197.548.400,00	84,62	2.734.698.920,00
38	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	64.260.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
39	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	265.798.000,00	237.111.600,00	89,21	790.807.000,00
40	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	88.000.000,00	84.174.500,00	95,65	41.958.000,00
41	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	25.650.000,00	25.200.000,00	98,25	26.506.250,00
42	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	130.000.000,00	127.750.000,00	98,27	123.321.000,00
43	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	143.250.000,00	102.125.000,00	71,29	18.315.000,00
44	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	73.750.000,00	72.485.000,00	98,28	69.624.750,00
45	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	280.200.000,00	276.216.500,00	98,58	105.051.350,00
46	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	70.850.000,00	69.725.000,00	98,41	56.193.750,00
47	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	12.000.000,00	11.300.000,00	94,17	8.658.000,00
48	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	117.000.000,00	116.436.544,00	99,52	56.380.896,00
49	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	1.555.000,00	1.200.000,00	77,17	0,00
50	Belanja Pakaian KORPRI	8.000.000,00	7.992.000,00	99,90	5.661.000,00
51	Belanja Pakaian Adat Daerah	46.250.000,00	45.130.000,00	97,58	65.555.000,00
52	Belanja Pakaian Batik Tradisional	271.700.000,00	246.385.000,00	90,68	183.954.500,00
53	Belanja Pakaian Olahraga	445.375.000,00	439.019.000,00	98,57	731.913.250,00
54	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**183.697.480.911,00**	**161.645.553.333,00**	**88,00**	**106.754.735.192,00**

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2023 setelah mapping adalah sebesar Rp223.385.760.224,63 atau 90,03% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp248.132.586.543,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-132 Rincian Belanja Barang Pakai Habis Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.367.163.286,00	2.184.317.540,00	92,28	2.691.409.525,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	10.984.606.087,00	10.397.281.514,87	94,65	15.601.865.866,89
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.103.393.530,00	8.498.232.498,00	84,11	6.915.008.340,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	64.124.500,00	59.915.417,00	93,44	365.966.327,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	146.120.915,00	143.720.302,00	98,36	251.316.376,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	38.897.160,00	31.726.540,00	81,57	156.782.451,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	156.828.000,00	139.744.000,00	89,11	142.862.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	31.392.000,00	31.300.000,00	99,71	36.650.000,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	21.307.587.587,00	20.376.604.749,63	95,63	14.404.493.619,99
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.244.840.900,00	3.126.107.258,00	96,34	2.106.101.645,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	200.000.000,00	198.172.700,00	99,09	292.413.050,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	240.000,00	240.000,00	100,00	5.680.000,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	28.000.000,00	15.100.000,00	53,93	1.025.264.111,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	17.533.327.747,00	16.332.661.283,00	93,15	15.098.088.920,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.045.901.633,00	4.888.642.308,00	96,88	3.587.114.580,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.535.300,00	33.153.120,00	98,86	3.066.814.395,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	293.760.000,00	278.490.554,00	94,80	319.020.778,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	10.997.800,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.482.576.539,00	4.241.641.308,00	94,63	3.985.437.838,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	3.706.455.394,00	3.570.532.883,00	96,33	3.646.136.972,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.945.411.149,00	1.871.572.527,00	96,20	1.714.592.985,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.251.272.490,00	1.246.230.090,00	99,60	599.849.207,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	480.415.443,00	480.279.443,00	99,97	9.457.600,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.831.247.050,00	1.784.071.350,00	97,42	255.357.310,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	83.216.900,00	80.209.365,00	96,39	341.926.295,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
26	Belanja Obat-Obatan-Obat	26.428.895.984,00	24.681.444.225,13	93,39	16.655.903.881,82
27	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	200.000.000,00	197.865.000,00	98,93	1.609.290.000,00
28	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	73.264.747.680,00	61.679.248.162,00	84,19	32.743.929.778,00
29	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	24.099.028.184,00	22.437.873.407,00	93,11	698.473.803,00
30	Belanja Natura dan Pakan-Natura	264.713.000,00	243.994.500,00	92,17	0,00
31	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	47.500.000,00	47.200.000,00	99,37	112.335.000,00
32	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	30.240.000,00	30.240.000,00	100,00	9.342.000,00
33	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.316.262.790,00	20.443.262.991,00	87,68	21.084.356.319,00
34	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	580.124.000,00	507.407.500,00	87,47	609.679.118,00
35	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	7.200.000,00	6.030.000,00	83,75	0,00
36	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.504.532.700,00	1.503.388.700,00	99,92	972.124.680,00
37	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	9.709.123.945,00	8.477.352.015,00	87,31	4.415.498.141,00
38	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	64.260.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
39	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	992.446.500,00	946.857.100,00	95,41	2.242.135.388,00
40	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	88.000.000,00	84.174.500,00	95,65	41.958.000,00
41	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	25.650.000,00	25.200.000,00	98,25	26.506.250,00
42	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	130.000.000,00	127.750.000,00	98,27	123.321.000,00
43	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	143.250.000,00	102.125.000,00	71,29	18.315.000,00
44	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	73.750.000,00	72.485.000,00	98,28	69.624.750,00
45	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	568.605.900,00	563.515.580,00	99,10	689.639.210,00
46	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	70.850.000,00	69.725.000,00	98,41	56.193.750,00
47	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	12.000.000,00	11.300.000,00	94,17	8.658.000,00
48	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	117.000.000,00	116.436.544,00	99,52	56.380.896,00
49	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	1.555.000,00	1.200.000,00	77,17	0,00
50	Belanja Pakaian KORPRI	8.000.000,00	7.992.000,00	99,90	5.661.000,00
51	Belanja Pakaian Adat Daerah	46.250.000,00	45.130.000,00	97,58	65.555.000,00
52	Belanja Pakaian Batik Tradisional	271.700.000,00	246.385.000,00	90,68	183.954.500,00
53	Belanja Pakaian Olahraga	487.047.250,00	480.691.250,00	98,69	747.490.330,00
54	Belanja Pakaian Paskibraka	219.540.000,00	219.540.000,00	100,00	15.193.000,00
	Jumlah	**248.132.586.543,00**	**223.385.760.224,63**	**90,03**	**159.898.226.786,70**

b. Realisasi Belanja Barang Tak Pakai Habis Tahun 2023 adalah sebesar Rp8.293.500,00 atau 82,48% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp10.054.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-133 Rincian Belanja Barang Tak Pakai Habis

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	10.054.700,00	8.293.500,00	82,48	4.424.000,00
2	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.180.000,00
3	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**10.054.700,00**	**8.293.500,00**	**82,48**	**14.604.000,00**

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 setelah mapping adalah sebesar Rp223.394.053.724,63 atau 90,03% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp248.142.641.243,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-134 Rincian Belanja Barang Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	248.132.586.543,00	223.385.760.224,63	90,03	159.898.226.786,70
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	10.054.700,00	8.293.500,00	82,48	14.604.000,00
	Jumlah	**248.142.641.243,00**	**223.394.053.724,63**	**90,03**	**159.912.830.786,70**

2. Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023 sebelum mapping adalah sebesar Rp188.247.294.360,00 atau 91,19% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp206.432.387.309,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-135 Rincian Belanja Jasa Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	138.168.858.514,00	128.027.483.062,00	92,66	113.920.526.227,00
2	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	53.794.753.795,00	49.666.806.330,00	92,33	33.781.596.019,96
3	Belanja Sewa Tanah	79.800.000,00	79.800.000,00	100,00	18.845.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.922.900.000,00	3.066.031.680,00	62,28	2.215.429.309,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	342.590.000,00	332.090.000,00	96,94	1.381.481.000,00
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	24.500.000,00	21.396.622,00	87,33	427.841.333,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.659.700.000,00	2.703.126.080,00	73,86	1.638.129.009,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.029.700.000,00	953.068.264,00	92,56	1.259.009.647,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	136.500.000,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.357.985.000,00	3.345.892.322,00	76,78	3.057.655.490,00
	Jumlah	**206.432.387.309,00**	**188.247.294.360,00**	**91,19**	**157.837.013.034,96**

a. Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2023 sebelum mapping adalah sebesar Rp128.027.483.062,00 atau 92,66% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp138.168.858.514,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-136 Rincian Belanja Jasa Kantor Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.243.900.000,00	7.049.327.576,00	85,51	5.909.875.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.756.600.000,00	4.036.360.000,00	84,86	3.072.020.000,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	189.000.000,00	0,00	0,00	168.000.000,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.401.976.250,00	3.273.681.350,00	74,37	3.399.700.000,00
5	Honorarium Rohaniwan	64.200.000,00	49.700.000,00	77,41	48.300.000,00
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	127.700.000,00	113.600.000,00	88,96	104.800.000,00
7	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00	115.600.000,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	168.700.000,00	116.300.000,00	68,94	714.785.816,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	611.500.000,00	563.600.000,00	92,17	596.000.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	24.988.100.000,00	24.847.100.000,00	99,44	12.287.080.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.139.803.000,00	5.754.635.862,00	93,73	7.743.636.366,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	509.002.250,00	446.421.320,00	87,71	133.354.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	9.664.094.025,00	8.267.692.225,00	85,55	7.523.825.745,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	728.000.000,00	726.850.000,00	99,84	317.700.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	432.000.000,00	413.800.000,00	95,79	443.700.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	76.250.000,00	40.600.000,00	53,25	403.310.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	3.000.000,00	2.615.000,00	87,17	16.963.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	49.980.000,00	49.950.000,00	99,94	139.360.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	117.000.000,00	117.000.000,00	100,00	78.000.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.295.000.000,00	1.169.000.000,00	90,27	1.059.810.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.003.300.000,00	15.253.930.000,00	95,32	13.140.560.400,00
22	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	979.900.000,00	978.150.000,00	99,82	585.000.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	258.000.000,00	256.500.000,00	99,42	522.400.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.736.600.000,00	1.508.579.000,00	86,87	1.326.463.500,00
25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.544.250.000,00	2.502.850.000,00	98,37	2.302.675.000,00
26	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.696.100.000,00	1.618.625.000,00	95,43	1.326.450.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Supir	659.453.000,00	591.016.250,00	89,62	492.565.250,00
28	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	129.082.500,00	103.269.875,00	80,00	3.600.000,00
29	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.682.442.056,00	1.476.868.826,00	87,78	986.376.439,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
30	Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO	447.480.000,00	447.480.000,00	100,00	0,00
31	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	57.100.000,00	55.700.000,00	97,55	83.100.000,00
32	Belanja Jasa Tata Rias	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.325.778.800,00	1.222.922.671,00	92,24	1.635.570.720,00
34	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	64.600.000,00	56.410.000,00	87,32	27.120.000,00
35	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	406.420.000,00	356.146.000,00	87,63	0,00
36	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	110.400.000,00	110.400.000,00	100,00	170.400.000,00
37	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	0,00
38	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	935.460.000,00	891.217.661,00	95,27	396.123.650,00
39	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.380.240.000,00	7.985.714.745,00	95,29	4.514.046.460,00
40	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	106.500.000,00	54.701.474,00	51,36	19.605.600,00
41	Belanja Jasa Kalibrasi	500.712.000,00	470.194.250,00	93,91	16.095.000,00
42	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	717.849.350,00	439.587.295,00	61,24	518.036.561,00
43	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	20.000.000,00	14.392.500,00	71,96	0,00
44	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	35.000.000,00	3.203.300,00	9,15	11.982.800,00
45	Belanja Jasa Jalan/Tol	20.217.400,00	11.517.500,00	56,97	0,00
46	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.784.220.000,00	1.634.604.250,00	91,61	1.475.960.812,00
47	Belanja Tagihan Telepon	639.711.507,00	522.310.925,00	81,65	797.212.743,00
48	Belanja Tagihan Air	531.506.840,00	355.443.898,00	66,87	296.946.152,00
49	Belanja Tagihan Listrik	4.130.333.969,00	3.788.971.566,00	91,74	3.250.527.384,00
50	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	217.760.000,00	125.480.000,00	57,62	129.565.000,00
51	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.272.267.320,00	5.658.749.223,00	90,22	11.113.359.739,00
52	Belanja Paket/Pengiriman	2.014.217.000,00	1.862.616.500,00	92,47	198.051.712,00
53	Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Belanja Registrasi/Keanggotaan	180.000.000,00	148.199.186,00	82,33	100.617.923,00
55	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	876.276.847,00	737.083.550,00	84,12	698.648.800,00
56	Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	17.801.774.400,00	17.488.715.034,00	98,24	16.276.378.655,00
58	Belanja Lembur	2.295.600.000,00	2.245.199.250,00	97,80	2.039.551.000,00
59	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	0,00	0,00	2.630.450.000,00
60	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	0,00	0,00	2.559.265.000,00
61	Belanja Medical Check Up	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**138.168.858.514,00**	**128.027.483.062,00**	**92,66**	**113.920.526.227,00**

Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2023 setelah mapping adalah sebesar Rp208.408.808.053,00 atau 95,32% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp218.647.310.245,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-137 Rincian Belanja Jasa Kantor Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.714.514.260,00	7.519.941.836,00	86,29	6.252.526.040,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.756.600.000,00	4.036.360.000,00	84,86	3.072.020.000,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	189.000.000,00	0,00	0,00	168.000.000,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.401.976.250,00	3.273.681.350,00	74,37	3.411.685.000,00
5	Honorarium Rohaniwan	65.150.000,00	50.650.000,00	77,74	48.300.000,00
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	127.700.000,00	113.600.000,00	88,96	104.800.000,00
7	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00	115.600.000,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	234.181.740,00	181.781.740,00	77,62	791.383.776,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	611.500.000,00	563.600.000,00	92,17	596.000.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	32.550.547.300,00	32.405.196.300,00	99,55	20.827.353.700,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	59.073.944.727,00	58.646.724.221,00	99,28	54.990.148.105,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	617.626.250,00	550.045.320,00	89,06	234.713.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.852.292.306,00	9.455.545.506,00	87,13	7.726.247.695,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	728.000.000,00	726.850.000,00	99,84	317.700.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	432.000.000,00	413.800.000,00	95,79	443.700.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	76.250.000,00	40.600.000,00	53,25	403.310.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	3.000.000,00	2.615.000,00	87,17	16.963.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	49.980.000,00	49.950.000,00	99,94	139.360.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	117.000.000,00	117.000.000,00	100,00	78.000.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.295.000.000,00	1.169.000.000,00	90,27	1.062.510.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.738.557.900,00	21.985.360.925,00	96,69	17.305.023.080,00
22	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	979.900.000,00	978.150.000,00	99,82	585.000.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	258.000.000,00	256.500.000,00	99,42	522.400.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.900.334.655,00	5.665.719.403,00	96,02	3.290.080.500,00
25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.619.400.000,00	2.577.700.000,00	98,41	3.955.136.800,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
26	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.724.100.000,00	1.646.625.000,00	95,51	2.145.662.600,00
27	Belanja Jasa Tenaga Supir	659.453.000,00	591.016.250,00	89,62	492.565.250,00
28	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	129.082.500,00	103.269.875,00	80,00	3.600.000,00
29	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.687.417.566,00	1.481.843.826,00	87,82	992.513.439,00
30	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	511.580.000,00	511.482.600,00	99,98	63.064.650,00
31	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	193.300.000,00	191.900.000,00	99,28	150.055.000,00
32	Belanja Jasa Tata Rias	112.545.000,00	82.545.000,00	73,34	56.770.000,00
33	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.327.878.800,00	1.224.924.839,00	92,25	1.637.678.388,00
34	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	112.220.699,00	103.872.796,00	92,56	120.017.950,00
35	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	406.853.400,00	356.579.400,00	87,64	0,00
36	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	110.400.000,00	110.400.000,00	100,00	170.400.000,00
37	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	0,00
38	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	935.460.000,00	891.217.661,00	95,27	396.123.650,00
39	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.380.240.000,00	7.985.714.745,00	95,29	4.514.046.460,00
40	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	108.397.500,00	56.598.974,00	52,21	22.403.000,00
41	Belanja Jasa Kalibrasi	799.618.000,00	769.100.250,00	96,18	308.905.000,00
42	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.532.405.325,00	1.253.243.270,00	81,78	1.216.225.376,00
43	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	28.800.000,00	23.192.500,00	80,53	24.650.000,00
44	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	35.000.000,00	3.203.300,00	9,15	11.982.800,00
45	Belanja Jasa Jalan/Tol	20.217.400,00	11.517.500,00	56,97	0,00
46	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.784.220.000,00	1.634.604.250,00	91,61	1.475.960.812,00
47	Belanja Tagihan Telepon	674.233.689,00	556.833.103,00	82,59	849.617.472,00
48	Belanja Tagihan Air	807.612.080,00	630.696.965,00	78,09	542.615.702,00
49	Belanja Tagihan Listrik	6.963.857.740,00	6.611.241.546,00	94,94	5.825.400.656,00
50	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	428.115.000,00	334.605.000,00	78,16	279.966.000,00
51	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.377.959.797,00	7.758.923.852,00	92,61	13.260.585.873,00
52	Belanja Paket/Pengiriman	2.014.217.000,00	1.862.616.500,00	92,47	198.051.712,00
53	Belanja Penambahan Daya	28.846.114,00	28.846.114,00	100,00	52.085.650,00
54	Belanja Registrasi/Keanggotaan	187.760.000,00	155.959.186,00	83,06	107.717.923,00
55	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	910.126.847,00	757.384.866,00	83,22	753.673.089,00
56	Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	17.801.774.400,00	17.488.715.034,00	98,24	16.276.378.655,00
58	Belanja Lembur	2.307.211.000,00	2.255.810.250,00	97,77	2.051.874.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
59	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	0,00	0,00	2.630.450.000,00
60	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	0,00	0,00	2.559.265.000,00
61	Belanja Medical Check Up	141.452.000,00	141.452.000,00	100,00	60.697.088,00
	Jumlah	**218.647.310.245,00**	**208.408.808.053,00**	**95,32**	**185.708.963.891,00**

b. Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2023 sebelum mapping adalah sebesar Rp49.666.806.330,00 atau 92,33% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp53.794.753.795,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-138 Rincian Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.178.850.000,00	3.132.739.620,00	98,55	2.695.445.200,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	47.132.064.000,00	43.770.066.500,00	92,87	26.249.227.800,00
3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	505.176.000,00	409.351.600,00	81,03	426.543.600,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.625.435.200,00	1.401.983.598,00	86,25	1.221.367.948,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	248.731.395,00	213.335.953,00	85,77	103.170.921,96
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.497.200,00	3.608.600,00	65,64	0,00
7	Belanja Jaminan Hari Tua PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	1.099.000.000,00	735.720.459,00	66,94	3.085.840.550,00
	Jumlah	**53.794.753.795,00**	**49.666.806.330,00**	**92,33**	**33.781.596.019,96**

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN diperuntukan bagi tenaga kontrak yang bekerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dibiayai oleh APBD dan pembayaran iurannya dibayarkan secara langsung kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2023 setelah mapping adalah sebesar Rp50.011.925.131,00 atau 92,37% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp54.143.392.861,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-139 Rincian Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.178.850.000,00	3.132.739.620,00	98,55	2.695.445.200,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	47.132.064.000,00	43.770.066.500,00	92,87	26.249.227.800,00
3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	505.176.000,00	409.351.600,00	81,03	426.543.600,00
4	Belanja Iuran Jaminan	1.922.779.660,00	1.696.715.018,00	88,24	1.654.898.978,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Kesehatan bagi Non ASN				
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	299.526.001,00	263.723.334,00	88,05	142.048.050,96
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.497.200,00	3.608.600,00	65,64	0,00
7	Belanja Jaminan Hari Tua PPPK	500.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	1.099.000.000,00	735.720.459,00	66,94	3.085.840.550,00
	Jumlah	**54.143.392.861,00**	**50.011.925.131,00**	**92,37**	**34.254.004.178,96**

c. Realisasi Belanja Sewa Tanah Tahun 2023 adalah sebesar Rp79.800.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp79.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-140 Rincian Belanja Sewa Tanah

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	14.045.000,00
2	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00
4	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00
5	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**79.800.000,00**	**79.800.000,00**	**100,00**	**18.845.000,00**

d. Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebelum mapping adalah sebesar Rp3.066.031.680,00 atau 62,28% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.922.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-141 Rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Sewa Excavator	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	15.797.800,00
3	Belanja Sewa Electric Generating Set	132.000.000,00	85.500.000,00	64,77	0,00
4	Belanja Sewa Peralatan SAR Mountenering	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	37.500.000,00	30.000.000,00	80,00	800.000,00
6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.037.200.000,00	107.600.000,00	10,37	920.443.188,00
7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
8	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.521.700.000,00	1.115.360.000,00	73,30	28.200.000,00
10	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.114.350.000,00	820.211.680,00	73,60	1.076.446.820,00
11	Belanja Sewa Mebel	274.110.000,00	254.170.000,00	92,73	10.500.000,00
12	Belanja Sewa Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	57.970.501,00
13	Belanja Sewa Alat Pendingin	125.400.000,00	125.400.000,00	100,00	0,00
14	Belanja Sewa Alat Rumah	11.840.000,00	5.440.000,00	45,95	10.902.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Tangga Lainnya (Home Use)				
15	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	468.500.000,00	350.450.000,00	74,80	11.379.000,00
16	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
18	Belanja Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00
20	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	80.000.000,00	66.600.000,00	83,25	0,00
21	Belanja Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00	0,00
22	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	13.990.000,00
23	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**4.922.900.000,00**	**3.066.031.680,00**	**62,28**	**2.215.429.309,00**

Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2023 setelah mapping adalah sebesar Rp4.082.279.180,00 atau 68,71% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.940.943.602,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-142 Rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Sewa Excavator	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	15.797.800,00
3	Belanja Sewa Electric Generating Set	294.995.000,00	248.495.000,00	84,24	87.691.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan SAR Mountenering	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	37.500.000,00	30.000.000,00	80,00	800.000,00
6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.598.168.102,00	667.272.000,00	41,75	1.425.518.188,00
7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	46.400.000,00	46.400.000,00	100,00	32.850.000,00
8	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.521.700.000,00	1.115.360.000,00	73,30	28.200.000,00
10	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.114.350.000,00	820.211.680,00	73,60	1.076.446.820,00
11	Belanja Sewa Mebel	286.420.000,00	266.480.000,00	93,04	20.050.000,00
12	Belanja Sewa Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	57.970.501,00
13	Belanja Sewa Alat Pendingin	125.400.000,00	125.400.000,00	100,00	0,00
14	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.440.000,00	13.540.000,00	66,24	14.292.000,00
15	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	557.614.000,00	439.564.000,00	78,83	45.629.000,00
16	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	14.600.000,00	14.600.000,00	100,00	18.550.000,00
17	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
18	Belanja Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
20	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	80.000.000,00	66.600.000,00	83,25	0,00
21	Belanja Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00	0,00
22	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	13.990.000,00
23	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	121.196.500,00	121.196.500,00	100,00	81.366.000,00
24	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	1.860.000,00	1.860.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**5.940.943.602,00**	**4.082.279.180,00**	**68,71**	**2.976.151.309,00**

e. Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebelum mapping adalah sebesar Rp332.090.000,00 atau 96,94% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp342.590.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-143 Rincian Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	117.600.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	20.000.000,00	19.500.000,00	97,50	78.750.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	148.000.000,00
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	88.000.000,00	80.800.000,00	91,82	775.859.500,00
5	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
6	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	148.200.000,00	98,80	91.500.000,00
8	Belanja Sewa Hotel	17.750.000,00	16.750.000,00	94,37	94.371.500,00
9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	49.440.000,00	49.440.000,00	100,00	48.000.000,00
10	Belanja Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00
	Jumlah	**342.590.000,00**	**332.090.000,00**	**96,94**	**1.381.481.000,00**

Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2023 setelah mapping adalah sebesar Rp333.340.000,00 atau 96,95% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp343.840.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-144 Rincian Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	117.600.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	20.000.000,00	19.500.000,00	97,50	78.750.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	148.000.000,00
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	88.000.000,00	80.800.000,00	91,82	775.859.500,00
5	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
6	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	148.200.000,00	98,80	91.500.000,00
8	Belanja Sewa Hotel	17.750.000,00	16.750.000,00	94,37	94.371.500,00
9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	49.440.000,00	49.440.000,00	100,00	48.000.000,00
10	Belanja Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00
	Jumlah	**343.840.000,00**	**333.340.000,00**	**96,95**	**1.381.481.000,00**

f. Realisasi Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp21.396.622,00 atau 87,33% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp24.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-145 Rincian Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.200,00
2	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara	24.500.000,00	21.396.622,00	87,33	427.829.133,00
	Jumlah	**24.500.000,00**	**21.396.622,00**	**87,33**	**427.841.333,00**

g. Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 adalah sebesar Rp6.600.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp6.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-146 Rincian Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**100,00**	**0,00**

h. Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.703.126.080,00 atau 73,86% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.659.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-147 Rincian Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	5.065.840,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	37.539.090,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	147.135.500,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.079.700.000,00	639.831.400,00	59,26	665.172.500,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	650.000.000,00	293.699.000,00	45,18	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	200.000.000,00	166.202.520,00	83,10	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	150.000.000,00	148.486.000,00	98,99	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	99.800.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang				
10	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	3.693.000,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	5.201.776,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	60.000.000,00	59.211.000,00	98,69	58.335.059,00
13	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	435.000.000,00	428.658.000,00	98,54	349.429.000,00
14	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	985.000.000,00	967.038.160,00	98,18	266.757.244,00
	Jumlah	**3.659.700.000,00**	**2.703.126.080,00**	**73,86**	**1.638.129.009,00**

i. Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2023 adalah sebesar Rp953.068.264,00 atau 92,56% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.029.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-148 Rincian Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	100.000.000,00	99.331.000,00	99,33	48.784.500,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	394.637.900,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	210.000.000,00	157.232.610,00	74,87	159.056.340,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	349.500.000,00	347.140.890,00	99,33	32.263.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	200.000.000,00	180.465.720,00	90,23	118.624.257,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	170.200.000,00	168.898.044,00	99,24	338.748.450,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00	86.895.200,00
	Jumlah	**1.029.700.000,00**	**953.068.264,00**	**92,56**	**1.259.009.647,00**

j. Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment)* Tahun 2023 adalah sebesar Rp45.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp45.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-149 Rincian Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)*

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	115.500.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Informatika				
2	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Pariwisata	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	Jumlah	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**100,00**	**136.500.000,00**

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) merupakan belanja jasa atas ketersediaan layanan jasa publikasi informasi pariwisata melalui media TV, media cetak dan media online, pemasangan banner dan bando promosi pariwisata serta pembuatan dan pemasangan baliho informasi nasional dan informasi daerah.

k. Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023 sebelum mapping adalah sebesar Rp3.345.892.322,00 atau 76,78% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp4.357.985.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-150 Rincian Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.308.225.000,00	1.187.624.152,00	90,78	1.082.078.190,00
2	Belanja Sosialisasi	159.860.000,00	27.360.000,00	17,11	0,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	2.819.500.000,00	2.060.708.170,00	73,09	1.871.577.300,00
4	Belanja Diklat Kepemimpinan	70.400.000,00	70.200.000,00	99,72	104.000.000,00
5	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**4.357.985.000,00**	**3.345.892.322,00**	**76,78**	**3.057.655.490,00**

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023 setelah mapping adalah sebesar Rp5.316.415.434,00 atau 83,70% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp6.351.923.627,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-151 Rincian Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan	3.195.272.285,00	3.074.460.569,00	96,22	2.558.078.902,00
2	Belanja Sosialisasi	249.023.195,00	111.046.695,00	44,59	26.404.650,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	2.819.500.000,00	2.060.708.170,00	73,09	1.871.577.300,00
4	Belanja Diklat Kepemimpinan	70.400.000,00	70.200.000,00	99,72	104.000.000,00
5	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	500.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	17.228.147,00	0,00	0,00	1.443.325.581,00
	Jumlah	**6.351.923.627,00**	**5.316.415.434,00**	**83,70**	**6.003.386.433,00**

Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023 setelah mapping adalah sebesar Rp271.961.758.764,00 atau 93,69% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp290.272.710.335,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-152 Rincian Belanja Jasa Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	218.647.310.245,00	208.408.808.053,00	95,32	185.708.963.891,00
2	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	54.143.392.861,00	50.011.925.131,00	92,37	34.254.004.178,96
3	Belanja Sewa Tanah	79.800.000,00	79.800.000,00	100,00	18.845.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.940.943.602,00	4.082.279.180,00	68,71	2.976.151.309,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	343.840.000,00	333.340.000,00	96,95	1.381.481.000,00
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	24.500.000,00	21.396.622,00	87,33	427.841.333,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.659.700.000,00	2.703.126.080,00	73,86	1.638.129.009,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.029.700.000,00	953.068.264,00	92,56	1.259.009.647,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	136.500.000,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.351.923.627,00	5.316.415.434,00	83,70	6.003.386.433,00
	Jumlah	**290.272.710.335,00**	**271.961.758.764,00**	**93,69**	**233.804.311.800,96**

3. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 sebelum mapping adalah sebesar Rp5.531.991.760,00 atau 96,15% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.753.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-153 Rincian Belanja Pemeliharaan Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	47.250.000,00	46.541.190,00	98,50	24.988.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.472.269.000,00	1.398.405.225,00	94,98	2.016.924.967,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.421.261.000,00	3.298.186.785,00	96,40	1.854.007.043,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	672.750.000,00	649.590.900,00	96,56	497.141.299,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	387.400.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	140.000.000,00	139.267.660,00	99,48	0,00
	Jumlah	**5.753.530.000,00**	**5.531.991.760,00**	**96,15**	**4.780.461.309,00**

a. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah Tahun 2023 adalah sebesar Rp46.541.190,00 atau 98,50% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp47.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-154 Rincian Belanja Pemeliharaan Tanah

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	47.250.000,00	46.541.190,00	98,50	24.988.000,00
	Jumlah	**47.250.000,00**	**46.541.190,00**	**98,50**	**24.988.000,00**

b. Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebelum mapping adalah sebesar Rp1.398.405.225,00 atau 94,98% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.472.269.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-155 Rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	181.500.000,00	181.423.950,00	99,96	59.984.400,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	125.443.850,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	35.480.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.000.000,00	5.000.000,00	50,00	72.547.250,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	195.200.000,00	188.138.630,00	96,38	325.530.673,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	44.998.500,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	20.187.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	364.081.644,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	0,00	0,00	0,00	8.073.700,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	0,00	0,00	0,00	285.800,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat	150.000.000,00	148.928.000,00	99,29	148.895.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi				
20	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Bengkel dan Alat Ukur -Alat bengkel Bermain perkakas Bengkel listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	18.087.500,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	8.350.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	895.800,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	10.050.000,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	53.500.000,00	38.678.850,00	72,30	185.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	75.000.000,00	74.500.000,00	99,33	0,00
29	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	6.040.000,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	11.823.400,00
31	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	18.811.700,00
32	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	1.488.000,00
33	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	16.863.000,00
34	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00
35	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000,00	9.996.660,00	99,97	0,00
36	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher Antena	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	15.000.000,00	14.307.000,00	95,38	14.130.000,00
38	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	219.369.000,00	219.363.750,00	100,00	194.999.250,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
39	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	11.100.000,00	2.293.000,00	20,66	78.000,00
40	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	7.057.100,00
49	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.886.000,00
50	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	166.500.000,00	160.750.000,00	96,55	30.000.000,00
51	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00	38.890.000,00
52	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.440.000,00
53	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	60.000.000,00	52.999.725,00	88,33	102.234.800,00
54	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	11.500.000,00	11.410.000,00	99,22	1.700.000,00
56	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	150.000.000,00	148.950.000,00	99,30	100.621.500,00
57	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	39.285.600,00
58	Belanja Pemeliharaan Alat	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air				
59	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR- Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
60	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	133.400.000,00	131.465.660,00	98,55	163.780.500,00
	Jumlah	**1.472.269.000,00**	**1.398.405.225,00**	**94,98**	**2.016.924.967,00**

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 setelah mapping adalah sebesar Rp5.366.420.686,00 atau 97,99% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp5.476.578.159,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-156 Rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	181.500.000,00	181.423.950,00	99,96	59.984.400,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	48.100.000,00	48.055.230,00	99,91	129.659.400,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	395.300.000,00	394.809.684,00	99,88	263.969.700,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	125.443.850,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	35.480.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	52.107.850,00	47.107.850,00	90,40	135.048.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	195.200.000,00	188.138.630,00	96,38	325.530.673,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	44.998.500,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	20.187.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	500.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	103.175.000,00	103.174.620,00	100,00	438.413.694,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
15	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	0,00	0,00	0,00	8.073.700,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	0,00	0,00	0,00	285.800,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	150.000.000,00	148.928.000,00	99,29	148.895.000,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Bengkel dan Alat Ukur -Alat bengkel Bermain perkakas Bengkel listrik	36.280.600,00	34.280.600,00	94,49	139.202.450,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	18.087.500,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	8.350.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	895.800,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	10.050.000,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.631.500,00	3.631.500,00	100,00	9.059.000,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	190.109.700,00	174.673.550,00	91,88	60.409.950,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	209.294.500,00	208.794.500,00	99,76	203.385.900,00
29	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	79.000.000,00	62.587.350,00	79,22	6.040.000,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.309.902.250,00	1.297.994.990,00	99,09	799.332.200,00
31	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.048.000,00	9.048.000,00	100,00	29.772.700,00
32	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	1.488.000,00
33	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	16.863.000,00
34	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00
35	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan	10.000.000,00	9.996.660,00	99,97	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Film				
36	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher Antena	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	15.000.000,00	14.307.000,00	95,38	14.130.000,00
38	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	219.369.000,00	219.363.750,00	100,00	194.999.250,00
39	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	11.100.000,00	2.293.000,00	20,66	78.000,00
40	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	950.000.000,00	948.936.074,00	99,89	1.496.697.671,00
43	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	1.216.350,00	1.216.350,00	100,00	20.257.000,00
46	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	43.735.000,00	43.735.000,00	100,00	1.329.000,00
47	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	14.104.400,00	14.104.400,00	100,00	20.078.100,00
48	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	7.057.100,00
49	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.886.000,00
50	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	373.127.600,00	367.377.600,00	98,46	96.985.000,00
51	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	355.539.561,00	353.017.013,00	99,29	457.832.564,00
52	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.440.000,00
53	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	60.000.000,00	52.999.725,00	88,33	102.234.800,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
54	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	80.039.398,00	79.212.550,00	98,97	67.745.086,00
56	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	195.485.700,00	194.435.700,00	99,46	117.201.500,00
57	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	30.111.750,00	30.111.750,00	100,00	72.256.914,00
58	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	0,00	0,00	0,00	610.000,00
59	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR- Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
60	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	133.400.000,00	131.465.660,00	98,55	163.780.500,00
	Jumlah	**5.476.578.159,00**	**5.366.420.686,00**	**97,99**	**5.898.224.702,00**

c. Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebelum mapping adalah sebesar Rp3.298.186.785,00 atau 96,40% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.421.261.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-157 Rincian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.199.122.000,00	1.163.299.096,00	97,01	1.474.961.868,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	40.789.000,00	39.504.000,00	96,85	19.904.175,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	98.600.000,00	90.427.762,00	91,71	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	185.600.000,00	168.630.715,00	90,86	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	25.650.000,00	25.582.500,00	99,74	127.228.200,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	170.000.000,00	167.352.555,00	98,44	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan				
11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	225.250.000,00	214.897.857,00	95,40	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	60.000.000,00	59.588.280,00	99,31	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	664.880.000,00	630.962.234,00	94,90	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	216.140.000,00	214.620.565,00	99,30	141.352.900,00
20	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	108.070.000,00	106.916.749,00	98,93	74.809.900,00
21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	104.400.000,00	97.187.519,00	93,09	0,00
22	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	322.760.000,00	319.216.953,00	98,90	0,00
23	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**3.421.261.000,00**	**3.298.186.785,00**	**96,40**	**1.854.007.043,00**

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 setelah mapping adalah sebesar Rp9.127.828.086,00 atau 97,74% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp9.338.658.021,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-158 Rincian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.486.323.255,00	1.450.481.051,00	97,59	1.982.867.635,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	64.380.200,00	64.380.200,00	100,00	75.243.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	40.789.000,00	39.504.000,00	96,85	19.904.175,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	98.600.000,00	90.427.762,00	91,71	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	185.600.000,00	168.630.715,00	90,86	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	25.650.000,00	25.582.500,00	99,74	127.228.200,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	170.000.000,00	167.352.555,00	98,44	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.240.169.272,00	1.178.564.050,00	95,03	1.866.046.404,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.180.385.250,00	1.164.375.250,00	98,64	7.716.106.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	670.325.523,00	659.710.725,00	98,42	1.096.972.910,00
12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.630.401.771,00	1.620.222.758,00	99,38	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	70.614.500,00	70.614.500,00	100,00	51.606.100,00
14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	35.628.000,00	35.628.000,00	100,00	34.927.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	146.420.550,00	146.329.550,00	99,94	204.285.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	301.980.400,00	301.980.400,00	100,00	401.806.350,00
17	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00	3.339.650.226,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
18	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	664.880.000,00	630.962.234,00	94,90	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	216.140.000,00	214.620.565,00	99,30	141.352.900,00
20	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	108.070.000,00	106.916.749,00	98,93	74.809.900,00
21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	104.400.000,00	97.187.519,00	93,09	0,00
22	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	322.760.000,00	319.216.953,00	98,90	0,00
23	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	317.449.100,00	317.448.850,00	100,00	369.176.130,00
24	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	75.605.000,00	75.605.000,00	100,00	143.340.553,00
25	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	108.086.200,00	108.086.200,00	100,00	29.749.000,00
	Jumlah	**9.338.658.021,00**	**9.127.828.086,00**	**97,74**	**17.690.821.483,00**

d. Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 sebelum mapping adalah sebesar Rp649.590.900,00 atau 96,56% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp672.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-159 Rincian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	478.000.000,00	462.815.500,00	96,82	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	182.750.000,00	174.775.400,00	95,64	97.841.299,00
3	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	399.300.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**672.750.000,00**	**649.590.900,00**	**96,56**	**497.141.299,00**

Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 setelah mapping adalah sebesar Rp938.619.650,00 atau 97,53% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp962.367.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-160 Rincian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	478.000.000,00	462.815.500,00	96,82	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	182.750.000,00	174.775.400,00	95,64	97.841.299,00
3	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	399.300.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	90.986.050,00	90.986.050,00	100,00	140.862.050,00
5	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	98.631.550,00	98.631.100,00	100,00	138.797.593,00
6	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	100.000.000,00	99.411.600,00	99,41	136.546.650,00
	Jumlah	**962.367.600,00**	**938.619.650,00**	**97,53**	**913.347.592,00**

e. Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebelum mapping adalah sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-161 Rincian Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah	0,00	0,00	0,00	387.400.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387.400.000,00**

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 setelah mapping adalah sebesar Rp1.380.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.380.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-162 Rincian Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	4.695.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah	0,00	0,00	0,00	387.400.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	0,00	0,00	0,00	6.020.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian				
	Jumlah	**1.380.000,00**	**1.380.000,00**	**100,00**	**403.115.000,00**

f. Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 adalah sebesar Rp139.267.660,00 atau 99,48% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp140.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-163 Rincian Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	140.000.000,00	139.267.660,00	99,48	0,00
	Jumlah	**140.000.000,00**	**139.267.660,00**	**99,48**	**0,00**

4. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023 sebelum mapping adalah sebesar Rp39.543.023.979,00 atau 77,51% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp51.018.755.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-164 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.618.755.500,00	39.207.136.474,00	77,46	36.622.421.685,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	400.000.000,00	335.887.505,00	83,97	0,00
	Jumlah	**51.018.755.500,00**	**39.543.023.979,00**	**77,51**	**36.622.421.685,00**

a. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2023 sebelum mapping adalah sebesar Rp39.207.136.474,00 atau 77,46% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp50.618.755.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-165 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	244.270.000,00	235.830.000,00	96,54	83.300.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	410.690.000,00	245.965.000,00	59,89	14.543.808.500,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.856.226.000,00	14.866.850.112,00	83,26	808.778.550,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.107.569.500,00	23.858.491.362,00	74,31	21.186.534.635,00
	Jumlah	**50.618.755.500,00**	**39.207.136.474,00**	**77,46**	**36.622.421.685,00**

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2023 setelah mapping adalah sebesar Rp40.067.156.524,00 atau 77,83% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp51.483.224.430,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-166 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	757.800.000,00	746.379.300,00	98,49	858.779.012,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	761.628.930,00	595.435.750,00	78,18	14.683.579.850,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.856.226.000,00	14.866.850.112,00	83,26	808.778.550,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.107.569.500,00	23.858.491.362,00	74,31	21.186.534.635,00
	Jumlah	**51.483.224.430,00**	**40.067.156.524,00**	**77,83**	**37.537.672.047,00**

b. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Tanah Tahun 2023 adalah sebesar Rp335.887.505,00 atau 83,97% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp400.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-167 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	400.000.000,00	335.887.505,00	83,97	0,00
	Jumlah	**400.000.000,00**	**335.887.505,00**	**83,97**	**0,00**

5. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 adalah sebesar Rp31.334.566.500,00 atau 92,98% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp33.699.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-168 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	32.868.200.000,00	30.536.600.000,00	92,91	17.780.681.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	831.400.000,00	797.966.500,00	95,98	1.386.233.928,00
	Jumlah	**33.699.600.000,00**	**31.334.566.500,00**	**92,98**	**19.166.914.928,00**

a. Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 adalah sebesar Rp30.536.600.000,00 atau 92,91% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp32.868.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-169 Rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	178.200.000,00	128.200.000,00	71,94	149.131.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	327.000.000,00	217.500.000,00	66,51	641.350.000,00
3	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	14.945.000.000,00	14.927.500.000,00	99,88	1.995.000.000,00
4	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	17.418.000.000,00	15.263.400.000,00	87,63	14.995.200.000,00
	Jumlah	**32.868.200.000,00**	**30.536.600.000,00**	**92,91**	**17.780.681.000,00**

b. Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 adalah sebesar Rp797.966.500,00 atau 95,98% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp831.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-170 Rincian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Jasa yang Diberikan	790.000.000,00	756.566.500,00	95,77	1.232.625.350,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	41.400.000,00	41.400.000,00	100,00	153.608.578,00
	Jumlah	**831.400.000,00**	**797.966.500,00**	**95,98**	**1.386.233.928,00**

6. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 sebelum mapping adalah sebesar Rp45.359.138.393,00 atau 99,71% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp45.489.414.244,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-171 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	45.489.414.244,00	45.359.138.393,00	99,71	42.788.897.743,00
	Jumlah	**45.489.414.244,00**	**45.359.138.393,00**	**99,71**	**42.788.897.743,00**

Realisasi Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 setelah mapping adalah sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-172 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 sebelum mapping adalah sebesar Rp111.043.618.464,63 atau 97,52% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp113.863.187.124,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-173 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	113.863.187.124,00	111.043.618.464,63	97,52	107.387.178.447,70
	Jumlah	**113.863.187.124,00**	**111.043.618.464,63**	**97,52**	**107.387.178.447,70**

Realisasi Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 setelah mapping adalah sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-174 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 setelah mapping sebesar Rp582.713.480.289,63 atau 91,05% dari anggarannya sebesar Rp639.964.409.788,00 dengan obyek sebagai berikut :

Tabel 5-175 Rincian Belanja Barang dan Jasa Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang	248.142.641.243,00	223.394.053.724,63	90,03	159.912.830.786,70
2	Belanja Jasa	290.272.710.335,00	271.961.758.764,00	93,69	233.804.311.800,96
3	Belanja Pemeliharaan	15.966.233.780,00	15.620.057.272,00	97,83	24.930.496.777,00
4	Belana Perjalanan Dinas	51.883.224.430,00	40.403.044.029,00	77,87	37.537.672.047,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada	33.699.600.000,00	31.334.566.500,00	92,98	19.166.914.928,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**639.964.409.788,00**	**582.713.480.289,63**	**91,05**	**475.352.226.339,66**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1.3 Belanja Subsidi	**1.781.923.800,00**	**1.781.923.800,00**	**2.183.163.800,00**

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.781.923.800,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.781.923.800,00. Belanja Subsidi ini merupakan pemberian subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 yang direalisasikan dua tahap. Tahap pertama sesuai Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/296/430.4.2/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Pemberian Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 melalui SP2D tanggal 11 Juli 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00. Tahap kedua sesuai Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/735/430.4.2/2023 tanggal 3 November 2023 tentang Pemberian Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 melalui SP2D tanggal 15 Desember 2023 sebesar Rp781.923.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-176 Rincian Belanja Subsidi

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.781.923.800,00	1.781.923.800,00	100,00	2.183.163.800,00
	Jumlah	**1.781.923.800,00**	**1.781.923.800,00**	**100,00**	**2.183.163.800,00**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1.4 Belanja Hibah	**130.888.705.843,00**	**124.626.774.987,00**	**93.266.283.855,00**

Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pelaksanaan Belanja Hibah berpedoman pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 adalah sebesar Rp124.626.774.987,00 atau 95,22% dari anggarannya sebesar Rp130.888.705.843,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 sebesar Rp93.266.283.855,00, realisasi belanja Hibah pada Tahun 2023 sebesar Rp124.626.774.987,00 mengalami penurunan sebesar Rp31.360.491.132,00 atau sebesar 74,84% dengan obyek belanja sebagai berikut :

Tabel 5-177 Rincian Belanja Hibah

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.260.000.000,00	2.206.402.291,00	97,63	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang	117.872.653.843,00	111.669.935.217,00	94,74	91.490.831.855,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Berbadan Hukum Indonesia				
3	Belanja Hibah Dana BOS	8.980.600.000,00	8.974.985.479,00	99,94	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.775.452.000,00	1.775.452.000,00	100,00	1.775.452.000,00
	Jumlah	**130.888.705.843,00**	**124.626.774.987,00**	**95,22**	**93.266.283.855,00**

Penjelasan lebih rinci atas masing-masing obyek Belanja Hibah Tahun 2023 dengan anggarannya sebesar Rp130.888.705.843,00 dan realisasi sebesar Rp124.626.774.987,00 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.206.402.291,00 atau 97,63% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.260.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-178 Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.260.000.000,00	2.206.402.291,00	97,63	0,00
	Jumlah	**2.260.000.000,00**	**2.206.402.291,00**	**97,63**	**0,00**

2. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 adalah sebesar Rp111.669.935.217,00 atau 94,74% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp117.872.653.843,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-179 Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	47.545.961.000,00	42.305.174.000,00	88,98	34.256.931.933,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	43.431.468.955,00	42.882.821.240,00	98,74	21.421.184.900,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	26.895.223.888,00	26.481.939.977,00	98,46	35.812.715.022,00
	Jumlah	**117.872.653.843,00**	**111.669.935.217,00**	**94,74**	**91.490.831.855,00**

a. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp42.305.174.000,00 atau 88,98% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp47.545.961.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-180 Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	47.370.461.000,00	42.129.774.000,00	88,94	31.410.282.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	175.500.000,00	175.400.000,00	99,94	2.846.649.933,00
	Jumlah	**47.545.961.000,00**	**42.305.174.000,00**	**88,98**	**34.256.931.933,00**

b. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2023 adalah sebesar Rp42.882.821.240,00 atau 98,74% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp43.431.468.955,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-181 Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	39.668.045.555,00	39.586.238.500,00	99,79	20.456.780.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.763.423.400,00	3.296.582.740,00	87,60	964.404.900,00
	Jumlah	**43.431.468.955,00**	**42.882.821.240,00**	**98,74**	**21.421.184.900,00**

c. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp26.481.939.977,00 atau 98,46% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp26.895.223.888,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-182 Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.245.295.388,00	1.245.295.100,00	100,00	11.773.156.600,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.649.928.500,00	25.236.644.877,00	98,39	24.039.558.422,00
	Jumlah	**26.895.223.888,00**	**26.481.939.977,00**	**98,46**	**35.812.715.022,00**

3. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2023 adalah sebesar Rp8.974.985.479,00 atau 99,94% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp8.980.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-183 Rincian Belanja Hibah Dana BOS

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	8.980.600.000,00	8.974.985.479,00	99,94	0,00
	Jumlah	**8.980.600.000,00**	**8.974.985.479,00**	**99,94**	**0,00**

4. Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.775.452.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.775.452.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-184 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.775.452.000,00	1.775.452.000,00	100,00	1.775.452.000,00
	Jumlah	**1.775.452.000,00**	**1.775.452.000,00**	**100,00**	**1.775.452.000,00**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.1.5	**Belanja Bantuan Sosial**	**3.944.000.000,00**	**3.032.260.000,00**	**19.011.581.040,00**

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran pemerintah daerah berupa uang atau barang serta jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.032.260.000,00 atau 76,88% dari anggarannya sebesar Rp3.944.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar Rp19.011.581.040,00 realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2023 sebesar Rp3.032.260.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.979.321.040,00 atau sebesar 84,05% dengan obyek belanja sebagai berikut :

Tabel 5-185 Rincian Belanja Bantuan Sosial

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.219.000.000,00	1.202.500.000,00	98,65	4.833.823.540,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	505.000.000,00	207.500.000,00	41,09	306.897.500,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.220.000.000,00	1.622.260.000,00	73,07	13.870.860.000,00
	Jumlah	**3.944.000.000,00**	**3.032.260.000,00**	**76,88**	**19.011.581.040,00**

Penjelasan lebih rinci atas masing-masing obyek Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dengan anggarannya sebesar Rp3.944.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.032.260.000,00 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.202.500.000,00 atau 98,65% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.219.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-186 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.219.000.000,00	1.202.500.000,00	98,65	3.437.200.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	1.396.623.540,00
	Jumlah	**1.219.000.000,00**	**1.202.500.000,00**	**98,65**	**4.833.823.540,00**

a. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.202.500.000,00 atau 98,65% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.219.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-187 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.219.000.000,00	1.202.500.000,00	98,65	3.437.200.000,00
	Jumlah	**1.219.000.000,00**	**1.202.500.000,00**	**98,65**	**3.437.200.000,00**

b. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Tahun 2023 adalah nihil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-188 Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	1.396.623.540,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.396.623.540,00**

2. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2023 adalah sebesar Rp207.500.000,00 atau 41,09% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp505.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-189 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	505.000.000,00	207.500.000,00	41,09	260.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	46.897.500,00
	Jumlah	**505.000.000,00**	**207.500.000,00**	**41,09**	**306.897.500,00**

a. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2023 adalah sebesar Rp207.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-190 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	505.000.000,00	207.500.000,00	41,09	260.000.000,00
	Jumlah	**505.000.000,00**	**207.500.000,00**	**41,09**	**260.000.000,00**

b. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2023 adalah sebesar nihil rincian sebagai berikut:

Tabel 5-191 Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	46.897.500,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.897.500,00**

3. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.622.260.000,00 atau 73,07% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.220.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-192 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.020.000.000,00	1.422.500.000,00	70,42	13.671.100.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000,00	199.760.000,00	99,88	199.760.000,00
	Jumlah	**2.220.000.000,00**	**1.622.260.000,00**	**73,07**	**13.870.860.000,00**

a. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.422.500.000,00 atau 70,42% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.020.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-193 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.020.000.000,00	1.422.500.000,00	70,42	13.671.100.000,00
	Jumlah	**2.020.000.000,00**	**1.422.500.000,00**	**70,42**	**13.671.100.000,00**

b. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun 2023 adalah sebesar Rp199.760.000,00 atau 99,88% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-194 Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000,00	199.760.000,00	99,88	199.760.000,00
	Jumlah	**200.000.000,00**	**199.760.000,00**	**99,88**	**199.760.000,00**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.2	**Belanja Modal**	**223.286.778.648,00**	**169.833.845.333,03**	**190.396.577.000,00**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode

akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 adalah sebesar Rp169.833.845.333,03 atau 76,06% dari anggarannya sebesar Rp223.286.778.648,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp190.396.577.000,00, realisasi Belanja Modal pada Tahun 2023 sebesar Rp169.833.845.333,03 mengalami penurunan sebesar Rp20.562.731.666,97 atau sebesar 10,80% dengan jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 5-195 Jenis Belanja Modal

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	1.893.088.000,00	94.915.970,00	5,01	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.603.399.436,00	82.098.298.764,00	83,26	86.205.466.900,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.797.199.662,00	20.570.157.238,30	43,04	48.977.092.155,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.805.593.910,00	58.084.684.454,73	88,27	48.386.382.840,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.542.497.640,00	8.469.163.161,00	99,14	6.802.635.105,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	645.000.000,00	516.625.745,00	80,10	25.000.000,00
	Jumlah	**223.286.778.648,00**	**169.833.845.333,03**	**76,06**	**190.396.577.000,00**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.2.1	**Belanja Modal Tanah**	**1.893.088.000,00**	**94.915.970,00**	**0,00**

Realisasi Belanja Tanah Tahun 2023 sebelum mapping sebesar Rp94.915.970,00 atau 5,01% dari anggaran sebesar Rp1.893.088.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2022 sebesar Rp0,00 realisasi Belanja Tanah pada Tahun 2023 sebesar Rp94.915.970,00 mengalami kenaikan sebesar Rp94.915.970,00 dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5-196 Rincian Belanja Modal Tanah

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Lapangan	1.893.088.000,00	94.915.970,00	5,01	0,00
	Jumlah	**1.893.088.000,00**	**94.915.970,00**	**5,01**	**0,00**

Realisasi Belanja Modal Lapangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp94.915.970,00 atau 5,01% dari anggarannya sebesar Rp1.893.088.000,00 dengan obyek belanja sebagai berikut :

Tabel 5-197 Rincian Belanja Modal Lapangan

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	1.893.088.000,00	94.915.970,00	5,01	0,00
	Jumlah	**1.893.088.000,00**	**94.915.970,00**	**5,01**	**0,00**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.2.1	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**98.603.399.436,00**	**82.098.298.764,00**	**86.205.466.900,00**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebelum mapping sebesar Rp82.098.298.764,00 atau 83,26% dari anggaran sebesar Rp98.603.399.436,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2022 sebesar Rp86.205.466.900,00 realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 sebesar Rp82.098.298.764,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.107.168.136,00 atau 4,76% dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5-198 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
A	**Belanja Modal Alat Besar**	**2.014.622.200,00**	**802.990.049,00**	**39,86**	**2.711.435.300,00**
1	Belanja Modal Tractor	0,00	0,00	0,00	22.444.300,00
2	Belanja Modal Excavator	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.982.460.000,00
3	Belanja Modal Hauler	0,00	0,00	0,00	505.561.000,00
4	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	132.329.000,00
5	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	729.740.000,00	725.984.000,00	99,49	48.022.500,00
6	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Pompa	36.082.200,00	34.848.749,00	96,58	20.618.500,00
8	Belanja Modal Mesin Bor	17.800.000,00	11.299.300,00	63,48	0,00
9	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Peralatan Selam	31.000.000,00	30.858.000,00	99,54	0,00
11	Belanja Modal Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**Belanja Modal Alat Angkutan**	**8.056.097.800,00**	**7.869.187.000,00**	**97,68**	**6.505.974.200,00**
1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.048.600.000,00	1.952.900.000,00	95,33	3.452.900.000,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	600.000.000,00	560.000.000,00	93,33	560.000.000,00
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	222.240.350,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	577.367.600,00	552.260.000,00	95,65	533.743.000,00
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	141.000.000,00	131.803.000,00	93,48	154.358.250,00
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	4.674.544.200,00	4.660.840.000,00	99,71	604.690.000,00
7	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	596.756.000,00
8	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	381.286.600,00
9	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	14.586.000,00	11.384.000,00	78,05	0,00
C	**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**86.069.168,00**	**79.916.880,00**	**92,85**	**34.071.460,00**
1	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0,00	0,00	0,00	2.248.860,00
2	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	4.300.000,00	4.284.600,00	99,64	0,00
3	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	38.823.900,00	36.335.000,00	93,59	0,00
5	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	0,00	0,00	0,00	1.998.000,00
6	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	2.400.000,00	2.310.000,00	96,25	0,00
7	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	24.132.800,00	23.510.580,00	97,42	19.824.600,00
8	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	2.100.000,00	2.020.200,00	96,20	0,00
10	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal Alat Ukur Universal	6.631.868,00	6.535.000,00	98,54	0,00
12	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	3.500.000,00	3.121.500,00	89,19	0,00
13	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	4.180.600,00	1.800.000,00	43,06	0,00
14	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Modal Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
17	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
D	**Belanja Modal Alat Pertanian**	**366.049.100,00**	**361.690.300,00**	**98,81**	**68.630.000,00**
1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4.950.000,00	4.944.000,00	99,88	0,00
2	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	10.877.000,00	8.631.000,00	79,35	30.890.000,00
3	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	195.472.800,00	195.115.800,00	99,82	0,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	31.749.300,00	30.400.000,00	95,75	0,00
5	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	123.000.000,00	122.599.500,00	99,67	37.740.000,00
E	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**10.632.364.377,00**	**9.894.341.455,00**	**93,06**	**8.712.910.286,00**
1	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.772.600,00	1.575.000,00	88,85	724.000,00
2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	371.826.987,00	312.773.520,00	84,12	723.517.680,00
3	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.113.003.260,00	598.495.956,00	53,77	3.147.719.451,00
4	Belanja Modal Meubelair	2.014.070.285,00	1.945.590.925,00	96,60	2.628.043.275,00
5	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Pembersih	84.496.800,00	81.684.500,00	96,67	1.100.000,00
7	Belanja Modal Alat Pendingin	490.448.300,00	477.689.500,00	97,40	324.391.440,00
8	Belanja Modal Alat Dapur	36.815.164,00	29.637.000,00	80,50	332.772.780,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.255.751.641,00	6.214.845.354,00	99,35	1.408.979.890,00
10	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	110.777.340,00	84.269.550,00	76,07	66.533.770,00
11	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	31.751.600,00	30.580.500,00	96,31	0,00
12	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	54.645.000,00
13	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	28.500.000,00	28.321.650,00	99,37	0,00
14	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	51.650.400,00	50.616.000,00	98,00	11.183.000,00
15	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	40.000.000,00	38.262.000,00	95,66	13.300.000,00
16	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00
F	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**655.074.600,00**	**619.040.308,00**	**94,50**	**1.545.323.950,00**
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	103.938.700,00	102.193.750,00	98,32	62.718.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	202.708.400,00	182.153.250,00	89,86	613.218.570,00
3	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	6.702.180,00
4	Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	20.000.000,00	19.975.000,00	99,88	9.990.000,00
6	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	0,00	3.964.200,00
7	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	94.677.500,00	92.314.000,00	97,50	77.341.000,00
8	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF	3.750.000,00	3.550.000,00	94,67	0,00
11	Belanja Modal Sumber Tenaga	230.000.000,00	218.854.308,00	95,15	771.390.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00
G	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**53.753.984.294,00**	**40.972.104.822,00**	**76,22**	**12.020.899.528,00**
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	14.815.582.540,00	3.464.826.567,00	23,39	3.952.599.012,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	2.397.604.012,00	2.386.589.849,00	99,54	44.342.271,00
3	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	18.651.978.464,00	18.485.891.966,00	99,11	1.620.899.800,00
5	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	604.803.863,00	537.039.600,00	88,80	3.322.761.900,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
6	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	84.200.000,00	73.965.300,00	87,84	12.143.248,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	974.000.000,00	973.000.000,00	99,90	1.158.753.965,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	5.755.393.526,00	5.445.152.600,00	94,61	94.434.980,00
9	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	370.000.000,00	197.457.750,00	53,37	0,00
10	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.708.792.800,00	1.666.836.500,00	97,54	837.042.893,00
11	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	2.454.900,00	2.430.000,00	98,99	0,00
12	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	905.943.939,00	882.919.660,00	97,46	0,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	397.696.000,00	381.869.435,00	96,02	33.874.000,00
14	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.889.861.500,00	2.511.119.275,00	86,89	0,00
15	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	1.150.000.000,00	1.119.683.000,00	97,36	0,00
16	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	451.564.000,00	439.025.000,00	97,22	277.493.432,00
17	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung	300.000,00	285.000,00	95,00	0,00
18	Belanja Modal Alat Kedokteran Traditional Medicine	6.770.000,00	6.020.000,00	88,92	0,00
19	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	0,00	0,00	0,00	445.000.000,00
20	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	2.537.775.000,00	2.374.298.858,00	93,56	150.082.000,00
21	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	49.263.750,00	23.694.462,00	48,10	70.722.027,00
22	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	0,00	0,00	0,00	0,00
H	**Belanja Modal Alat Laboratorium**	**3.513.891.522,00**	**3.110.733.198,00**	**88,53**	**4.875.253.347,00**
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	3.000.000,00	2.655.000,00	88,50	0,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	13.500.000,00	12.490.200,00	92,52	0,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	137.219.396,00	111.180.998,00	81,02	2.334.491.134,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	2.812.570.326,00	2.513.243.900,00	89,36	691.795.400,00
5	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	333.582.000,00	309.500.000,00	92,78	127.696.633,00
6	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	185.073.300,00	133.935.000,00	72,37	6.704.400,00
7	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	23.670.000,00	22.500.000,00	95,06	907.980,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	0,00	0,00	0,00	31.530.000,00
9	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	0,00	0,00	0,00	799.476.000,00
10	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal Analytical Instrument	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00	679.853.600,00
13	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	1.276.500,00	1.232.100,00	96,52	157.626.000,00
16	Alat Kesehatan Kerja	0,00	0,00	0,00	750.000,00
17	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	0,00	0,00	0,00	44.422.200,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
19	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	4.000.000,00	3.996.000,00	99,90	0,00
20	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	0,00	0,00	0,00	0,00
I	**Belanja Modal Komputer**	**6.355.851.777,00**	**6.003.364.150,00**	**94,45**	**16.695.349.229,00**
1	Belanja Modal Komputer Jaringan	807.042.300,00	799.500.000,00	99,07	0,00
2	Belanja Modal Personal Computer	2.680.735.797,00	2.491.660.950,00	92,95	15.004.126.348,00
3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.303.599.700,00	1.295.370.000,00	99,37	365.772.130,00
4	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	240.000,00
5	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	68.577.450,00
6	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.099.480.400,00	985.380.000,00	89,62	552.636.701,00
7	Belanja Modal Peralatan Jaringan	416.033.780,00	385.690.900,00	92,71	524.306.000,00
8	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	48.959.800,00	45.762.300,00	93,47	179.690.600,00
J	**Belanja Modal Alat Eksplorasi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.879.000,00**
1	Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00	9.879.000,00
K	**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**	**28.859.000,00**	**26.122.800,00**	**90,52**	**141.099.700,00**
1	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	17.460.300,00
3	Belanja Modal Masker	0,00	0,00	0,00	3.374.400,00
4	Belanja Modal Topi Kerja	2.000.000,00	577.200,00	28,86	1.200.000,00
5	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	16.459.000,00	15.600.000,00	94,78	33.744.000,00
7	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	10.400.000,00	9.945.600,00	95,63	0,00
8	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	82.321.000,00
L	**Belanja Modal Alat Peraga**	**373.000.000,00**	**359.851.500,00**	**96,47**	**152.389.500,00**
1	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	38.337.000,00
2	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	373.000.000,00	359.851.500,00	96,47	114.052.500,00
4	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Agama	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Agama	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	0,00	0,00	0,00	0,00
M	**Belanja Modal Rambu-Rambu**	**398.057.200,00**	**379.554.150,00**	**95,35**	**100.403.000,00**
1	Belanja Modal Rambu Bersuar	88.700.000,00	77.352.000,00	87,21	0,00
2	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	289.357.200,00	282.466.350,00	97,62	38.184.000,00
3	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	20.000.000,00	19.735.800,00	98,68	62.219.000,00
N	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**13.039.900,00**	**12.981.450,00**	**99,55**	**0,00**
1	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	2.637.500,00	2.636.250,00	99,95	0,00
2	Belanja Modal Peralatan Permainan	6.802.400,00	6.748.800,00	99,21	0,00
3	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	3.600.000,00	3.596.400,00	99,90	0,00
4	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Lainnya				
5	Belanja Modal Peralatan Senam	0,00	0,00	0,00	0,00
O	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**8.041.504.498,00**	**8.040.463.528,00**	**99,99**	**9.548.074.116,00**
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.041.504.498,00	8.040.463.528,00	99,99	9.548.074.116,00
P	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**4.314.934.000,00**	**3.565.957.174,00**	**82,64**	**23.083.774.284,00**
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.314.934.000,00	3.565.957.174,00	82,64	23.083.774.284,00
	Jumlah	**98.603.399.436,00**	**82.098.298.764,00**	**83,26**	**86.205.466.900,00**

Pada realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebelum mapping sebesar Rp82.098.298.764,00 didalamnya terdapat realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang belum dimapping yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp8.040.463.528,00 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp3.565.957.174,00. Selanjutnya dilakukan reklasifikasi/ mapping atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dicatat tidak rinci tersebut.

Penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-199 Rincian Mapping Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Pompa	13.694.500,00	13.694.500,00	100,00	17.122.900,00
3	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	2.999.943,00	2.999.943,00	100,00	4.047.350,00
4	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	23.921.100,00	23.919.900,00	99,99	21.392.500,00
5	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	9.058,00	7.500,00	82,80	105.000,00
6	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	2.575.800,00	2.575.800,00	100,00	15.747.500,00
7	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.127.000,00	3.127.000,00	100,00	5.425.000,00
8	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.685.140,00	3.685.140,00	100,00	5.147.000,00
9	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	909.630.965,00	908.767.865,00	99,91	1.069.456.550,00
11	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.089.287.427,00	1.089.276.881,00	100,00	1.243.413.772,00
12	Belanja Modal Mebel	1.614.867.489,00	1.614.817.489,00	100,00	2.080.338.227,00
13	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	47.106.866,00	47.105.466,00	100,00	54.929.546,00
14	Belanja Modal Alat Pembersih	10.919.500,00	10.919.500,00	100,00	25.668.110,00
15	Belanja Modal Alat Pendingin	202.980.950,00	202.968.750,00	99,99	288.617.390,00
16	Belanja Modal Alat Dapur	5.228,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	687.520.156,00	687.518.641,00	100,00	642.425.560,00
18	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	10.770.000,00	10.770.000,00	100,00	4.700.000,00
19	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	188.543.154,00	188.541.109,00	100,00	185.849.816,00
20	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	144.159.820,00	144.159.820,00	100,00	175.691.800,00
21	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Modal Sumber Tenaga	73.684.800,00	73.684.800,00	100,00	136.814.000,00
23	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	5.526.300,00	5.526.300,00	100,00	3.833.280,00
24	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	6.887.949,00	6.887.449,00	99,99	7.559.500,00
26	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang	6.710.500,00	6.710.500,00	100,00	18.408.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Studi:Agama				
27	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	2.949.998,00	2.949.998,00	100,00	2.370.600,00
28	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	243.938.603,00	243.938.603,00	100,00	187.818.000,00
29	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	352.600,00	352.600,00	100,00	2.332.500,00
30	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	9.141.200,00	9.141.200,00	100,00	10.793.000,00
31	Belanja Modal Personal Computer	1.732.193.313,00	1.732.193.025,00	100,00	1.945.913.090,00
32	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	776.836.143,00	776.744.753,00	99,99	795.423.794,00
33	Belanja Modal Peralatan Jaringan	71.198.710,00	71.198.710,00	100,00	166.954.327,00
34	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.505.350,00	6.505.350,00	100,00	18.861.900,00
37	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	107.073.500,00	107.073.500,00	100,00	51.581.250,00
38	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.938.950,00	2.938.950,00	100,00	2.883.800,00
39	Belanja Modal Peralatan Permainan	25.961.486,00	25.961.486,00	100,00	336.639.054,00
40	Belanja Modal Peralatan Senam	13.801.000,00	13.801.000,00	100,00	19.810.000,00
	Jumlah	**8.041.504.498,00**	**8.040.463.528,00**	**99,99**	**9.548.074.116,00**

Sedangkan penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD adalah sebagai berikut :

Tabel 5-200 Rincian Mapping Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Feeder	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Compressor	0,00	0,00	0,00	671.550.000,00
3	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	54.317.500,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	26.818.000,00	1.800.000,00	6,71	52.920.000,00
6	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	5.081.000,00	5.018.000,00	98,76	0,00
7	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00	999.000,00
8	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	0,00	0,00	0,00	132.645.000,00
9	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	1.100.000,00	1.096.000,00	99,64	17.880.000,00
10	Belanja Modal Alat Ukur Universal	153.600.000,00	31.668.330,00	20,62	0,00
11	Belanja Modal Analytical Instrument	0,00	0,00	0,00	73.126.800,00
12	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	6.080.000,00	4.000.000,00	65,79	0,00
14	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	7.720.000,00	5.640.000,00	73,06	35.726.460,00
15	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	28.600.000,00	18.890.000,00	66,05	132.143.100,00
17	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	155.200.000,00	154.829.000,00	99,76	499.725.000,00
18	Belanja Modal Meubelair	257.763.000,00	225.720.000,00	87,57	1.290.489.500,00
19	Belanja Modal Alat Pembersih	12.300.000,00	12.269.940,00	99,76	764.647.000,00
20	Belanja Modal Alat Pendingin	1.311.965.000,00	1.222.776.000,00	93,20	3.154.874.250,00
21	Belanja Modal Alat Pengukur	0,00	0,00	0,00	7.659.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Waktu				
22	Belanja Modal Alat Dapur	750.000,00	750.000,00	100,00	19.657.000,00
23	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	159.000.000,00	84.228.000,00	52,97	455.523.472,00
24	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	10.496.493,00
25	Belanja Modal Personal Computer	460.000.000,00	181.131.000,00	39,38	593.875.000,00
26	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	97.448.000,00	97.448.000,00	100,00	0,00
26	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	260.190.000,00	223.810.547,00	86,02	254.160.000,00
27	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
28	Belanja Modal Peralatan Jaringan	91.000.000,00	90.903.450,00	99,89	513.892.750,00
29	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	74.331.250,00
30	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	267.000.000,00	224.763.250,00	84,18	196.700.880,00
32	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00	832.703.530,00
33	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	32.000.000,00	30.700.000,00	95,94	472.706.960,00
35	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	248.702.764,00	248.702.764,00	100,00	311.873.176,00
36	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	188.366.749,00	188.366.749,00	100,00	10.847.142,00
37	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	3.404.000,00	3.404.000,00	100,00	3.008.800.000,00
38	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	0,00	0,00	311.873.176,00
39	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	326.171.440,00
40	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00	2.796.704.040,00
42	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	0,00	0,00	0,00	828.880.000,00
43	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	53.744.000,00	53.744.000,00	100,00	0,00
44	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	266.101.487,00	258.300.000,00	97,07	3.277.650.000,00
45	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00
46	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	10.000.000,00	8.824.500,00	88,25	0,00
47	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Belanja Modal Alat Laboratorium Microbiologi	0,00	0,00	0,00	34.218.000,00
50	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	0,00	0,00	0,00	380.841.880,00
51	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	0,00	0,00	0,00	825.840.000,00
52	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	50.000.000,00	46.971.644,00	93,94	776.935.661,00
53	Belanja Modal Analytical Instrument	50.000.000,00	44.622.000,00	89,24	0,00
54	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00	40.263.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
56	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	15.000.000,00	14.580.000,00	97,20	0,00
57	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**4.314.934.000,00**	**3.565.957.174,00**	**82,64**	**23.395.647.460,00**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah mapping Tahun 2023 sebesar Rp82.098.298.764,00 atau 83,26% dari anggaran sebesar Rp98.603.399.436,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2022 setelah mapping sebesar Rp86.205.466.900,00, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 setelah mapping sebesar Rp82.098.298.764,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.107.168.136,00 atau 4,76% dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5-201 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
A	Belanja Modal Alat Besar	2.031.316.643,00	819.684.492,00	40,35	3.454.425.700,00
1	Belanja Modal Tractor	0,00	0,00	0,00	22.444.300,00
2	Belanja Modal Excavator	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.982.460.000,00
3	Belanja Modal Hauler	0,00	0,00	0,00	505.561.000,00
4	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	132.329.000,00
5	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	729.740.000,00	725.984.000,00	99,49	48.022.500,00
6	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Pompa	49.776.700,00	48.543.249,00	97,52	92.058.900,00
8	Belanja Modal Mesin Bor	17.800.000,00	11.299.300,00	63,48	0,00
9	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	2.999.943,00	2.999.943,00	100,00	0,00
10	Belanja Modal Peralatan Selam	31.000.000,00	30.858.000,00	99,54	0,00
11	Belanja Modal Compressor	0,00	0,00	0,00	671.550.000,00
B	Belanja Modal Alat Angkutan	8.106.836.900,00	7.894.906.900,00	97,39	6.580.286.700,00
1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.048.600.000,00	1.952.900.000,00	95,33	3.452.900.000,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	600.000.000,00	560.000.000,00	93,33	560.000.000,00
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	222.240.350,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	577.367.600,00	552.260.000,00	95,65	533.743.000,00
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	141.000.000,00	131.803.000,00	93,48	154.358.250,00
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	4.674.544.200,00	4.660.840.000,00	99,71	604.690.000,00
7	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	596.756.000,00
8	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	50.739.100,00	25.719.900,00	50,69	455.599.100,00
9	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	14.586.000,00	11.384.000,00	78,05	0,00
C	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	262.235.026,00	129.922.510,00	49,54	237.174.420,00
1	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0,00	0,00	0,00	2.248.860,00
2	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	4.300.000,00	4.284.600,00	99,64	999.000,00
3	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	38.823.900,00	36.335.000,00	93,59	0,00
5	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	0,00	0,00	0,00	134.643.000,00
6	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	2.400.000,00	2.310.000,00	96,25	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
7	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	29.213.800,00	28.528.580,00	97,65	19.824.600,00
8	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	2.109.058,00	2.027.700,00	96,14	105.000,00
10	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	1.100.000,00	1.096.000,00	99,64	17.880.000,00
11	Belanja Modal Alat Ukur Universal	160.231.868,00	38.203.330,00	23,84	0,00
12	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	3.500.000,00	3.121.500,00	89,19	0,00
13	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	11.900.600,00	7.440.000,00	62,52	35.726.460,00
14	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Modal Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	8.655.800,00	6.575.800,00	75,97	15.747.500,00
17	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Belanja Modal Alat Pertanian	369.176.100,00	364.817.300,00	98,82	74.055.000,00
1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4.950.000,00	4.944.000,00	99,88	0,00
2	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	14.004.000,00	11.758.000,00	83,96	36.315.000,00
3	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	195.472.800,00	195.115.800,00	99,82	0,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	31.749.300,00	30.400.000,00	95,75	0,00
5	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	123.000.000,00	122.599.500,00	99,67	37.740.000,00
E	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.134.716.098,00	16.189.634.127,00	94,48	20.462.821.256,00
1	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5.457.740,00	5.260.140,00	96,38	5.871.000,00
2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.310.057.952,00	1.240.431.385,00	94,69	1.925.117.330,00
3	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.357.490.687,00	1.842.601.837,00	78,16	4.890.858.223,00
4	Belanja Modal Meubelair	3.886.700.774,00	3.786.128.414,00	97,41	5.998.871.002,00
5	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	48.606.866,00	47.105.466,00	96,91	62.588.546,00
6	Belanja Modal Alat Pembersih	107.716.300,00	104.873.940,00	97,36	791.415.110,00
7	Belanja Modal Alat Pendingin	2.005.394.250,00	1.903.434.250,00	94,92	3.767.883.080,00
8	Belanja Modal Alat Dapur	37.570.392,00	30.387.000,00	80,88	352.429.780,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.102.271.797,00	6.986.591.995,00	98,37	2.506.928.922,00
10	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	121.547.340,00	95.039.550,00	78,19	81.730.263,00
11	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	31.751.600,00	30.580.500,00	96,31	0,00
12	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	54.645.000,00
13	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	28.500.000,00	28.321.650,00	99,37	0,00
14	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	51.650.400,00	50.616.000,00	98,00	11.183.000,00
15	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	40.000.000,00	38.262.000,00	95,66	13.300.000,00
16	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
F	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.328.462.374,00	1.250.189.287,00	94,11	2.314.711.696,00
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	292.481.854,00	290.734.859,00	99,40	322.899.066,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	346.868.220,00	326.313.070,00	94,07	788.910.370,00
3	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	6.702.180,00
4	Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	20.000.000,00	19.975.000,00	99,88	9.990.000,00
6	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	0,00	3.964.200,00
7	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	361.677.500,00	317.077.250,00	87,67	274.041.880,00
8	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF	3.750.000,00	3.550.000,00	94,67	0,00
11	Belanja Modal Sumber Tenaga	303.684.800,00	292.539.108,00	96,33	908.204.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	54.642.829.594,00	41.850.673.135,00	76,59	24.031.069.096,00
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	14.902.108.840,00	3.551.352.867,00	23,83	4.789.135.822,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	2.397.604.012,00	2.386.589.849,00	99,54	44.342.271,00
3	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	18.683.978.464,00	18.516.591.966,00	99,10	2.093.606.760,00
5	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	604.803.863,00	537.039.600,00	88,80	3.648.933.340,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	332.902.764,00	322.668.064,00	96,93	12.143.248,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	1.162.366.749,00	1.161.366.749,00	99,91	1.169.601.107,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	5.758.797.526,00	5.448.556.600,00	94,61	3.103.234.980,00
9	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	370.000.000,00	197.457.750,00	53,37	0,00
10	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.708.792.800,00	1.666.836.500,00	97,54	3.633.746.933,00
11	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	2.454.900,00	2.430.000,00	98,99	0,00
12	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	915.943.939,00	891.744.160,00	97,36	0,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	451.440.000,00	435.613.435,00	96,49	33.874.000,00
14	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	3.155.962.987,00	2.769.419.275,00	87,75	3.277.650.000,00
15	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	1.150.000.000,00	1.119.683.000,00	97,36	140.000.000,00
16	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	451.564.000,00	439.025.000,00	97,22	589.366.608,00
17	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung	300.000,00	285.000,00	95,00	828.880.000,00
18	Belanja Modal Alat Kedokteran Traditional Medicine	6.770.000,00	6.020.000,00	88,92	0,00
19	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	0,00	0,00	0,00	445.000.000,00
20	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	2.537.775.000,00	2.374.298.858,00	93,56	150.082.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
21	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	49.263.750,00	23.694.462,00	48,10	70.722.027,00
22	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.613.891.522,00	3.202.326.842,00	88,61	6.966.215.688,00
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	3.000.000,00	2.655.000,00	88,50	0,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	13.500.000,00	12.490.200,00	92,52	0,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	187.219.396,00	158.152.642,00	84,47	3.111.426.795,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	2.812.570.326,00	2.513.243.900,00	89,36	726.013.400,00
5	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	333.582.000,00	309.500.000,00	92,78	127.696.633,00
6	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	185.073.300,00	133.935.000,00	72,37	6.704.400,00
7	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	23.670.000,00	22.500.000,00	95,06	907.980,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	0,00	0,00	0,00	412.371.880,00
9	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	0,00	0,00	0,00	799.476.000,00
10	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	0,00	0,00	0,00	825.840.000,00
11	Belanja Modal Analytical Instrument	50.000.000,00	44.622.000,00	89,24	73.126.800,00
12	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00	679.853.600,00
13	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	1.276.500,00	1.232.100,00	96,52	157.626.000,00
16	Alat Kesehatan Kerja	0,00	0,00	0,00	750.000,00
17	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	0,00	0,00	0,00	44.422.200,00
19	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	4.000.000,00	3.996.000,00	99,90	0,00
20	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Belanja Modal Komputer	9.851.223.293,00	9.183.298.985,00	93,22	20.996.430.090,00
1	Belanja Modal Komputer	807.042.300,00	799.500.000,00	99,07	166.954.327,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Jaringan				
2	Belanja Modal Personal Computer	4.872.929.110,00	4.404.984.975,00	90,40	17.543.914.438,00
3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.303.599.700,00	1.295.370.000,00	99,37	365.772.130,00
4	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	240.000,00
5	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	97.448.000,00	97.448.000,00	100,00	68.577.450,00
6	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.136.506.543,00	1.985.935.300,00	92,95	1.602.220.495,00
7	Belanja Modal Peralatan Jaringan	578.232.490,00	547.793.060,00	94,74	1.038.198.750,00
8	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	55.465.150,00	52.267.650,00	94,24	210.552.500,00
J	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	9.879.000,00
1	Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00	9.879.000,00
K	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	150.932.500,00	133.196.300,00	88,25	236.991.300,00
1	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	17.460.300,00
3	Belanja Modal Masker	0,00	0,00	0,00	3.374.400,00
4	Belanja Modal Topi Kerja	2.000.000,00	577.200,00	28,86	1.200.000,00
5	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	31.459.000,00	15.600.000,00	49,59	74.007.000,00
7	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	10.400.000,00	9.945.600,00	95,63	0,00
8	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	0,00	0,00	0,00	4.047.350,00
9	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	107.073.500,00	107.073.500,00	100,00	51.581.250,00
10	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	82.321.000,00
L	Belanja Modal Alat Peraga	657.980.850,00	644.411.850,00	97,94	381.671.100,00
1	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	38.337.000,00
2	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	15.000.000,00	14.580.000,00	97,20	0,00
3	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	373.000.000,00	359.851.500,00	96,47	114.052.500,00
4	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Agama	0,00	0,00	0,00	18.408.000,00
5	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	6.887.949,00	6.887.449,00	99,99	7.559.500,00
7	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Agama	6.710.500,00	6.710.500,00	100,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	2.949.998,00	2.949.998,00	100,00	2.370.600,00
9	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	243.938.603,00	243.938.603,00	100,00	187.818.000,00
10	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	352.600,00	352.600,00	100,00	2.332.500,00
11	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	9.141.200,00	9.141.200,00	100,00	10.793.000,00
M	Belanja Modal Rambu-Rambu	400.996.150,00	382.493.100,00	95,39	103.286.800,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Rambu Bersuar	88.700.000,00	77.352.000,00	87,21	0,00
2	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	289.357.200,00	282.466.350,00	97,62	38.184.000,00
3	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	22.938.950,00	22.674.750,00	98,85	65.102.800,00
N	Belanja Modal Peralatan Olahraga	52.802.386,00	52.743.936,00	99,89	356.449.054,00
1	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	2.637.500,00	2.636.250,00	99,95	0,00
2	Belanja Modal Peralatan Permainan	32.763.886,00	32.710.286,00	99,84	336.639.054,00
3	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	3.600.000,00	3.596.400,00	99,90	0,00
4	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Peralatan Senam	13.801.000,00	13.801.000,00	100,00	19.810.000,00
O	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**98.603.399.436,00**	**82.098.298.764,00**	**83,26**	**86.205.466.900,00**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.2.2	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**47.797.199.662,00**	**20.570.157.238,30**	**48.977.092.155,00**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebelum mapping sebesar Rp20.570.157.238,30 atau 43,04% dari anggaran sebesar Rp47.797.199.662,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2022 sebesar Rp48.977.092.155,00, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 sebesar Rp20.570.157.238,30 mengalami penurunan sebesar Rp28.406.934.916,70 atau 58,00% dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5-202 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
A	Belanja Modal Bangunan Gedung	43.872.750.786,00	17.769.423.104,78	40,50	42.277.478.498,00
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	21.380.979.586,00	15.566.250.064,78	72,80	33.596.816.546,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	13.792.200,00	11.999.000,00	87,00	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Bangunan Laboratorium Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	850.000.000,00	651.946.200,00	76,70	1.222.510.370,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	389.810.731,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	9.635.000,00
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.752.688.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	8.150.000.000,00	544.746.620,00	6,68	2.058.206.044,00
10	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	999.807.589,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Pertokoan/Koperasi/Pasar				
11	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.165.751.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	370.000.000,00	365.140.160,00	98,69	0,00
13	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	159.772.153,00
14	Belanja Modal Bangunan Industri	0,00	0,00	0,00	98.791.000,00
15	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	58.000.000,00	55.637.000,00	95,93	216.632.000,00
16	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.980.000.000,00	573.704.060,00	19,25	2.573.493.884,00
17	Belanja Modal Bangunan Parkir	151.540.000,00	0,00	0,00	540.853.619,00
18	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	391.879.562,00
22	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.270.000,00
23	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Belanja Modal Monumen	1.200.000.000,00	197.539.070,00	16,46	207.182.538,00
1	Belanja Modal Tugu	1.200.000.000,00	197.539.070,00	16,46	207.182.538,00
C	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	574.632.381,00
1	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas	0,00	0,00	0,00	574.632.381,00
D	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	15.000.000,00	14.760.000,00	98,40	604.551.583,00
1	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	15.000.000,00	14.760.000,00	98,40	157.851.960,00
2	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	446.699.623,00
E	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.709.448.876,00	2.588.435.063,52	95,53	5.313.247.155,00
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.709.448.876,00	2.588.435.063,52	95,53	5.313.247.155,00
	Jumlah	**47.797.199.662,00**	**20.570.157.238,30**	**43,04**	**48.977.092.155,00**

Pada realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebelum mapping sebesar Rp20.570.157.238,30 didalamnya terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang belum dimapping yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp2.588.435.063,52. Selanjutnya dilakukan reklasifikasi/ mapping atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD tersebut.

Penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD adalah sebagai berikut :

Tabel 5-203 Rincian Mapping Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	363.700.000,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	31.400.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Laboratorium Permanen	238.100.000,00	238.100.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.093.848.876,00	1.973.648.484,52	94,26	3.866.207.155,00
5	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	109.400.000,00	108.783.591,00	99,44	1.051.940.000,00
6	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Pagar	268.100.000,00	267.902.988,00	99,93	0,00
	Jumlah	**2.709.448.876,00**	**2.588.435.063,52**	**95,53**	**5.313.247.155,00**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah mapping Tahun 2023 sebesar Rp20.570.157.238,30 atau 43,04% dari anggaran sebesar Rp47.797.199.662,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2022 setelah mapping sebesar Rp48.977.092.155,00 realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 setelah mapping sebesar Rp20.570.157.238,30 mengalami penurunan sebesar Rp28.406.934.916,70 atau 58,00% dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5-204 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
A	Belanja Modal Bangunan Gedung	46.314.099.662,00	20.089.955.180,30	43,38	47.590.725.653,00
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	21.380.979.586,00	15.566.250.064,78	72,80	33.960.516.546,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	13.792.200,00	11.999.000,00	87,00	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	31.400.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Laboratorium Permanen	238.100.000,00	238.100.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.943.848.876,00	2.625.594.684,52	89,19	5.088.717.525,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	389.810.731,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	9.635.000,00
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.752.688.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	8.150.000.000,00	544.746.620,00	6,68	2.058.206.044,00
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	999.807.589,00
11	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.165.751.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	370.000.000,00	365.140.160,00	98,69	0,00
13	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	159.772.153,00
14	Belanja Modal Bangunan Industri	0,00	0,00	0,00	98.791.000,00
15	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	58.000.000,00	55.637.000,00	95,93	216.632.000,00
16	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.089.400.000,00	682.487.651,00	22,09	3.625.433.884,00
17	Belanja Modal Bangunan Parkir	151.540.000,00	0,00	0,00	540.853.619,00
18	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
19	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	391.879.562,00
22	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.270.000,00
23	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Belanja Modal Monumen	1.200.000.000,00	197.539.070,00	16,46	207.182.538,00
1	Belanja Modal Tugu	1.200.000.000,00	197.539.070,00	16,46	207.182.538,00
C	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	574.632.381,00
1	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas	0,00	0,00	0,00	574.632.381,00
D	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	283.100.000,00	282.662.988,00	99,85	604.551.583,00
1	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	15.000.000,00	14.760.000,00	98,40	157.851.960,00
2	Belanja Modal Pagar	268.100.000,00	267.902.988,00	99,93	446.699.623,00
E	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**47.797.199.662,00**	**20.570.157.238,30**	**43,04**	**48.977.092.155,00**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**65.805.593.910,00**	**58.084.684.454,73**	**48.386.382.840,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 sebelum mapping sebesar Rp58.084.684.454,73 atau 88,27% dari anggaran sebesar Rp65.805.593.910,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2022 sebelum mapping sebesar Rp48.386.382.840,00 realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Tahun 2023 sebelum mapping sebesar Rp65.805.593.910,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.698.301.614,73 atau 20,04% dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5-205 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
A	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	54.984.968.510,00	47.424.506.103,33	86,25	39.527.121.350,00
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	54.784.968.510,00	47.226.740.203,33	86,20	39.067.199.570,00
2	Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	459.921.780,00
3	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	200.000.000,00	197.765.900,00	98,88	0,00
B	Belanja Modal Bangunan Air	10.367.800.000,00	10.239.579.071,40	98,76	7.908.422.860,00
1	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	1.597.500.000,00	1.577.402.300,00	98,74	559.403.900,00
2	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	8.022.300.000,00	7.920.490.821,40	98,73	7.334.153.960,00
3	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	748.000.000,00	741.685.950,00	99,16	0,00
4	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	14.865.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
6	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Belanja Modal Instalasi	10.195.000,00	9.962.250,00	97,72	0,00
1	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	10.195.000,00	9.962.250,00	97,72	0,00
2	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Belanja Modal Jaringan	292.630.400,00	263.614.200,00	90,08	218.838.630,00
1	Belanja Modal Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	266.130.400,00	263.614.200,00	99,05	218.838.630,00
3	Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00
E	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	150.000.000,00	147.022.830,00	98,02	732.000.000,00
1	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	150.000.000,00	147.022.830,00	98,02	732.000.000,00
	Jumlah	**65.805.593.910,00**	**58.084.684.454,73**	**88,27**	**48.386.382.840,00**

Pada realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD Tahun 2023 sebelum mapping sebesar Rp147.022.830,00 dilakukan reklasifikasi/mapping dari Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD menjadi Belanja Modal Jaringan Distribusi sebesar Rp147.022.830,00 sebagai berikut :

Tabel 5-206 Rincian Mapping Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Jaringan Distribusi	150.000.000,00	147.022.830,00	98,02	732.000.000,00
	Jumlah	**150.000.000,00**	**147.022.830,00**	**98,02**	**732.000.000,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah mapping Tahun 2023 sebesar Rp58.084.684.454,73 atau 88,27% dari anggaran sebesar Rp65.805.593.910,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2022 setelah mapping sebesar Rp48.386.382.840,00 realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Tahun 2023 setelah mapping sebesar Rp58.084.684.454,73 mengalami kenaikan sebesar Rp9.698.301.614,73 atau 20,04% dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5-207 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
A	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	54.984.968.510,00	47.424.506.103,33	86,25	39.527.121.350,00
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	54.784.968.510,00	47.226.740.203,33	86,20	39.067.199.570,00
2	Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	459.921.780,00
3	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	200.000.000,00	197.765.900,00	98,88	0,00
B	Belanja Modal Bangunan Air	10.367.800.000,00	10.239.579.071,40	98,76	7.908.422.860,00
1	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	1.597.500.000,00	1.577.402.300,00	98,74	559.403.900,00
2	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	8.022.300.000,00	7.920.490.821,40	98,73	7.334.153.960,00
3	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	748.000.000,00	741.685.950,00	99,16	0,00
4	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	14.865.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
C	Belanja Modal Instalasi	10.195.000,00	9.962.250,00	97,72	0,00
1	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	10.195.000,00	9.962.250,00	97,72	0,00
2	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Belanja Modal Jaringan	442.630.400,00	410.637.030,00	92,77	950.838.630,00
1	Belanja Modal Jaringan Distribusi	150.000.000,00	147.022.830,00	98,02	732.000.000,00
2	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	266.130.400,00	263.614.200,00	99,05	218.838.630,00
3	Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00
E	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**65.805.593.910,00**	**58.084.684.454,73**	**88,27**	**48.386.382.840,00**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**8.542.497.640,00**	**8.469.163.161,00**	**6.802.635.105,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebelum mapping sebesar Rp8.469.163.161,00 atau 99,14% dari anggaran sebesar Rp8.542.497.640,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2022 sebelum mapping sebesar Rp6.802.635.105,00, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 sebelum mapping sebesar Rp8.469.163.161,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.666.528.056,00 atau 24,50% dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5-208 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
A	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	178.245.000,00	177.327.200,00	99,49	171.644.910,00
1	Belanja Modal Buku Umum	178.245.000,00	177.327.200,00	99,49	133.345.000,00
2	Belanja Modal Buku Filsafat	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3	Belanja Modal Buku Agama	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
4	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00
5	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
6	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00
7	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00
8	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Audio Visual	0,00	0,00	0,00	7.099.910,00
B	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	250.000.000,00	180.571.271,00	72,23	469.707.405,00
1	Belanja Modal Software	250.000.000,00	180.571.271,00	72,23	469.707.405,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.114.252.640,00	8.111.264.690,00	99,96	6.152.156.300,00
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.114.252.640,00	8.111.264.690,00	99,96	6.152.156.300,00
E	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	9.126.490,00
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.126.490,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	BLUD				
	Jumlah	**8.542.497.640,00**	**8.469.163.161,00**	**99,14**	**6.802.635.105,00**

Pada realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebelum mapping sebesar Rp8.469.163.161,00 didalamnya terdapat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang belum dimapping yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp8.111.264.690,00. Selanjutnya dilakukan reklasifikasi/ mapping atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS tersebut.

Penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-209 Rincian Mapping Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	2.714.518.025,00	2.714.209.975,00	99,99	2.448.417.407,00
2	Belanja Modal Buku Filsafat	151.000,00	131.000,00	86,75	0,00
3	Belanja Modal Buku Agama	1.005.587.600,00	1.004.956.700,00	99,94	1.644.845.841,00
4	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	190.972.100,00	190.972.100,00	100,00	117.920.891,00
5	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	1.815.624.100,00	1.814.521.200,00	99,94	1.064.516.604,00
6	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	1.318.694.640,00	1.317.772.040,00	99,93	556.586.679,00
7	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	124.841.700,00	124.841.700,00	100,00	42.658.225,00
8	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	943.863.475,00	943.859.975,00	100,00	277.210.653,00
9	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi dan Sejarah	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**8.114.252.640,00**	**8.111.264.690,00**	**99,96**	**6.152.156.300,00**

Penjelasan rincian mapping masing-masing Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-210 Rincian Mapping Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	0,00	951.000,00
2	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00	0,00	0,00	8.175.490,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.126.490,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Mapping Tahun 2023 sebesar Rp8.469.163.161,00 atau 99,14% dari anggaran sebesar Rp8.542.497.640,00 dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5-211 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
A	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	8.292.497.640,00	8.288.591.890,00	99,95	6.332.927.700,00
1	Belanja Modal Buku Umum	2.892.763.025,00	2.891.537.175,00	99,96	2.582.713.407,00
2	Belanja Modal Buku Filsafat	151.000,00	131.000,00	86,75	800.000,00
3	Belanja Modal Buku Agama	1.005.587.600,00	1.004.956.700,00	99,94	1.649.645.841,00
4	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	190.972.100,00	190.972.100,00	100,00	122.970.891,00
5	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	1.815.624.100,00	1.814.521.200,00	99,94	1.077.116.604,00
6	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	124.841.700,00	124.841.700,00	100,00	53.023.715,00
7	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00
8	Belanja Modal Buku Matematika	1.318.694.640,00	1.317.772.040,00	99,93	556.586.679,00

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	dan Pengetahuan Alam				
9	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	943.863.475,00	943.859.975,00	100,00	277.210.653,00
10	Belanja Modal Audio Visual	0,00	0,00	0,00	7.099.910,00
B	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	250.000.000,00	180.571.271,00	72,23	469.707.405,00
1	Belanja Modal Software	250.000.000,00	180.571.271,00	72,23	469.707.405,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**8.542.497.640,00**	**8.469.163.161,00**	**99,14**	**6.802.635.105,00**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Lainnya	**645.000.000,00**	**516.625.745,00**	**25.000.000,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2023 sebelum mapping sebesar Rp516.625.745,00 atau 80,10% dari anggaran sebesar Rp645.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2022 sebelum mapping sebesar Rp25.000.000,00, realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun 2023 sebelum mapping sebesar Rp516.625.745,00 mengalami kenaikan sebesar Rp491.625.745,00 atau 1966,50% dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5-212 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Sebelum Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
A	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	645.000.000,00	516.625.745,00	80,10	25.000.000,00
1	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	645.000.000,00	516.625.745,00	80,10	25.000.000,00
2	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**645.000.000,00**	**516.625.745,00**	**80,10**	**25.000.000,00**

Pada realisasi Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Tahun 2023 sebesar Rp516.625.745,00 belum dimapping, selanjutnya dilakukan reklasifikasi/mapping dari Belanja Modal Aset Lainnya BLUD menjadi Belanja Modal Software sebesar Rp516.625.745,00.

Tabel 5-213 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Mapping

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
A	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	645.000.000,00	516.625.745,00	80,10	25.000.000,00
1	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Software	645.000.000,00	516.625.745,00	80,10	25.000.000,00
	Jumlah	**645.000.000,00**	**516.625.745,00**	**80,10**	**25.000.000,00**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**20.025.307.180,00**	**749.265.471,00**	**1.149.787.428,00**

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran/belanja pemerintah daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis belanja diatas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang yang dikategorikan untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, wabah penyakit dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 adalah sebesar Rp749.265.471,00 atau 3,74% dari anggarannya sebesar Rp20.025.307.180,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 sebesar Rp1.149.787.428,00 realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2023 sebesar Rp749.265.471,00 mengalami penurunan sebesar Rp400.521.957,00 atau 34,83% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-214 Rincian Belanja Tidak Terduga

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	20.025.307.180,00	749.265.471,00	3,74	1.149.787.428,00
	Jumlah	**20.025.307.180,00**	**749.265.471,00**	**3,74**	**1.149.787.428,00**

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 sebesar Rp749.265.471,00 terdiri dari:

1. Pengembalian Silpa Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 ke rekening BPKAD Provinsi Jawa Timur sesuai surat BPKAD Kabupaten Bondowoso Nomor 900/1217/430.10.3/2023 tanggal 7 Desember 2022 sebesar Rp164.232.771,00.
2. Pembayaran Belanja Tidak Terduga sesuai Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/221/430.4.2/2023 tanggal 16 Pebruari 2023 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana Banjir Bandang di Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 sebesar Rp585.032.700,00.

5.1.3 Belanja Transfer

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Transfer	**329.305.592.234,00**	**329.305.592.234,00**	**331.565.452.287,00**

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 adalah sebesar Rp329.305.592.234,00 atau 100,00% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun 2022 sebesar Rp331.565.452.287,00, maka realisasi Belanja Transfer pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.259.860.053,00 atau 0,69% dengan jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 5-215 Rincian Belanja Transfer

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	7.179.828.134,00	7.179.828.134,00	100,00	4.527.376.025,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	322.125.764.100,00	322.125.764.100,00	100,00	327.038.076.262,00
	Jumlah	**329.305.592.234,00**	**329.305.592.234,00**	**100,00**	**331.565.452.287,00**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.3.1	**Belanja Bagi Hasil**	**7.179.828.134,00**	**7.179.828.134,00**	**4.527.376.025,00**

Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.179.828.134,00 atau 100,00% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2022 sebesar Rp4.527.376.025,00, maka realisasi Belanja Bagi Hasil pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.652.452.109,00 atau 58,59% dengan jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 5-216 Rincian Belanja Bagi Hasil

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.913.455.644,00	4.913.455.644,00	100,00	4.527.376.025,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.266.372.490,00	2.266.372.490,00	100,00	0,00
	Jumlah	**7.179.828.134,00**	**7.179.828.134,00**	**100,00**	**4.527.376.025,00**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.3.1.1	**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa**	**4.913.455.644,00**	**4.913.455.644,00**	**4.527.376.025,00**

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Tahun 2023 sebesar Rp4.913.455.644,00 atau 100,00% dari anggaran dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5-217 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa	4.913.455.644,00	4.913.455.644,00	100,00	4.527.376.025,00
	Jumlah	**4.913.455.644,00**	**4.913.455.644,00**	**100,00**	**4.527.376.025,00**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.3.1.2	**Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa**	**2.266.372.490,00**	**2.266.372.490,00**	**0,00**

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 sebesar Rp2.266.372.490,00 atau 100,00% dari anggaran dengan obyek belanja sebagai berikut:

Tabel 5-218 Rincian Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.266.372.490,00	2.266.372.490,00	100,00	0,00
	Jumlah	**2.266.372.490,00**	**2.266.372.490,00**	**100,00**	**0,00**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.3.2	**Belanja Bantuan Keuangan**	**322.125.764.100,00**	**322.125.764.100,00**	**327.038.076.262,00**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp322.125.764.100,00 atau 100,00% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2022 sebesar Rp327.038.076.262,00, maka realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.912.312.162,00 atau 1,50% dengan rincian belanja sebagai berikut:

Tabel 5-219 Rincian Belanja Bantuan Keuangan

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	322.125.764.100,00	322.125.764.100,00	100,00	327.038.076.262,00
	Jumlah	**322.125.764.100,00**	**322.125.764.100,00**	**100,00**	**327.038.076.262,00**

5.1.4 Surplus/Defisit

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Surplus/ (Defisit)	**(205.295.311.541,00)**	**(28.111.168.926,94)**	**7.568.962.324,40**

Realisasi Surplus/(Defisit) Tahun 2023 adalah sebesar defisit Rp28.111.168.926,94 atau 86,31% dari anggarannya sebesar defisit Rp205.295.311.541,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Surplus/(Defisit) Tahun 2022 sebesar surplus Rp7.568.962.324,40, maka realisasi Surplus/(Defisit) pada Tahun 2023 sebesar mengalami penurunan sebesar Rp35.680.131.251,34 atau sebesar 471,40%. Surplus/(Defisit) Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-220 Rincian Surplus/(Defisit)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	2.032.456.443.947,00	1.990.420.763.058,12	97,93	1.908.478.394.409,06
2	Belanja Daerah	1.908.446.163.254,00	1.689.226.339.751,06	88,51	1.569.343.979.797,66
3	Belanja Transfer	329.305.592.234,00	329.305.592.234,00	100,00	331.565.452.287,00
	Jumlah	**(205.295.311.541,00)**	**(28.111.168.926,94)**	**86,31**	**7.568.962.324,40**

5.1.5 Pembiayaan

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.5.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**220.295.311.541,00**	**220.340.427.541,33**	**227.726.349.216,93**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp220.340.427.541,33 atau 100,02% dari anggarannya sebesar Rp220.295.311.541,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp227.726.349.216,93, realisasi Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp7.385.921.675,60 atau sebesar 3,24% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-221 Rincian Penerimaan Pembiayaan

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan	220.295.311.541,00	220.295.311.541,33	100,00	227.595.111.216,93

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran Tahun Sebelumnya				
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	45.116.000,00	0,00	131.238.000,00
	Jumlah	**220.295.311.541,00**	**220.340.427.541,33**	**100,02**	**227.726.349.216,93**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.5.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran **(SiLPA)**	**220.295.311.541,00**	**220.295.311.541,33**	**227.595.111.216,93**

Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya Tahun 2023 sebesar Rp220.295.311.541,33 atau 100,00% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2022 sebesar Rp227.595.111.216,93, maka realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp7.299.799.675,60 atau 3,21% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-222 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan PAD	(2.793.717.246,00)	0,00	0,00	(13.595.856.680,02)
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	16.045.788.601,00	3.806.290.992,00	23,72	53.419.867.476,14
3	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(2.600.171.386,00)	0,00	0,00	(1.712.939.222,55)
4	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	131.238.000,00	0,00	0,00	139.318.500,00
5	Penghematan Belanja	198.745.798.682,00	216.489.020.549,33	108,93	146.002.319.687,80
6	Sisa Belanja Lainnya	10.766.374.890,00	0,00	0,00	43.342.401.455,56
	Jumlah	**220.295.311.541,00**	**220.295.311.541,33**	**100,00**	**227.595.111.216,93**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.5.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	**0,00**	**45.116.000,00**	**131.238.000,00**

Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp45.116.000,00 sedangkan realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp131.238.000,00. Sehingga realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp86.122.000,00 atau 65,62% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-223 Rincian Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	45.116.000,00	0,00	131.238.000,00
	Jumlah	**0,00**	**45.116.000,00**	**0,00**	**131.238.000,00**

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.5.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**15.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Perbandingan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 dengan realisasi Tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5-224 Rincian Pengeluaran Pembiayaan

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
	Jumlah	**15.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**	**100,00**	**15.000.000.000,00**

Realisasi Pembentukan Dana Cadangan Tahun 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00 merupakan pembentukan dana cadangan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5.1.5.3	**Pembiayaan Netto**	**205.295.311.541,00**	**205.340.427.541,33**	**212.726.349.216,93**

Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2023 sebesar Rp205.340.427.541,33 atau 100,02% dari anggaran sebesar Rp205.295.311.541,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2022 sebesar Rp212.726.349.216,93 realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2023 sebesar Rp205.340.427.541,33 mengalami penurunan sebesar Rp7.385.921.675,60 atau 3,47% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-225 Rincian Pembiayaan Netto

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	220.295.311.541,00	220.340.427.541,33	100,02	227.726.349.216,93
2	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
	Jumlah	**205.295.311.541,00**	**205.340.427.541,33**	**100,02**	**212.726.349.216,93**

5.1.6 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA)

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA)	**0,00**	**177.229.258.614,39**	**220.295.311.541,33**

Realisasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun 2023 sebesar Rp177.229.258.614,39. Jika dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun 2022 sebesar Rp220.295.311.541,33, maka realisasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA) pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp43.066.052.926,94 atau 19,55% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-226 Rincian Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Surplus/ (Defisit)	(205.295.311.541,00)	(28.111.168.926,94)	13,69	7.568.962.324,40
2	Pembiayaan Netto	205.295.311.541,00	205.340.427.541,33	100,02	212.726.349.216,93
	Jumlah	**0,00**	**177.229.258.614,39**	**0,00**	**220.295.311.541,33**

SiLPA per 31 Desember 2023 sebesar Rp177.229.258.614,39 merupakan saldo kas pada Rekening Bendahara, RKUD, dan Non RKUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-227 Rincian Kas pada Rekening Bendahara, RKUD, dan Non RKUD

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	158.334.059.191,91
2	Kas di Bendahara Penerimaan	42.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
4	Kas di BLUD	13.522.118.826,27
5	Kas di Bendahara FKTP	5.307.832.508,12
6	Kas di Bendahara BOS	65.206.088,09
	Jumlah	**177.229.258.614,39**

Kas di Kas Daerah sebesar Rp158.334.059.191,91 terdiri dari kas di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp157.637.732.149,07 dan Kas Rekening Dana Cadangan sebesar Rp696.327.042,84. Kas Rekening Dana Cadangan sebesar Rp696.327.042,84 merupakan bunga deposito dana cadangan bagian Tahun 2022 sebesar Rp40.311.124,69 dan bunga deposito dana cadangan bagian Tahun 2023 sebesar Rp656.015.918,15. Perlakuan akuntansi untuk mengakui bunga deposito dana cadangan sebagai bagian dari SiLPA mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan Tahun 2024-2029 bahwa penerimaan hasil bunga/bagi hasil/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio menambah jumlah dana cadangan tanpa dipindahbukukan ke rekening kas daerah. Selanjutnya berdasarkan Pernyataan Nomor 4 tentang Akuntansi Pembiayaan dalam Kebijakan Akuntansi Pemkab Bondowoso disebutkan bahwa hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya sehingga menambah besaran SiLPA.

Kas di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp157.637.732.149,07 merupakan sisa kas per sumber dana yang terdiri dari :

Tabel 5-228 Rincian Kas pada Rekening Kas Umum Daerah

Uraian	Jumlah	
I. DANA SPESIFIK GRAND		
A. DAK FISIK 2023		
1. DAK FISIK PENUGASAN	4.354.090.255,00	
JUMLAH SISA DAK FISIK 2023		4.354.090.255,00
B. DAK NON FISIK 2023		
1. BOP PAUD	0,00	
2. BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	0,00	
3. TPG	4.695.715.780,00	
4. TAMSIL	2.130.624.999,00	
5. TUNJANGAN KHUSUS GURU	224.292.700,00	
6. BOK/ JAMPERSAL/ AKREDITASI PUSKESMAS	2.104.148.164,00	
7. BO KB	368.511.969,00	
8. PK2UMKM	13.020.743,00	
9. PK2SIKM	154.209.440,00	
10. DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	43.694.750,00	
11. DANA FASILITAS PENANAMAN MODAL	61.618.800,00	
12. DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	72.809.789,00	
JUMLAH SISA DAK NON FISIK 2023		9.868.647.134,00

Uraian	Jumlah	
C. DANA SPESIFIK GRAND LAINNYA		
1. BK 2023	312.452.521,00	
2. DBHCT/ CUKAI	4.997.356.181,00	
3. PAJAK ROKOK	9.813.049.420,07	
4. DID	759.354.760,00	
5. SISA DID TAHUN 2021	110.207.672,00	
JUMLAH DANA SPESIFIK GRAND LAINNYA		15.992.420.554,07
D. SISA DAK FISIK TA. 2021 MURNI		
1. DAK FISIK REGULER	37.748.395,00	
2. DAK FISIK PENUGASAN	7.392.000,00	
JUMLAH SISA DAK FISIK TA. 2021 MURNI		45.140.395,00
E. SISA DAK FISIK TA. 2020 MURNI		
1. DAK FISIK REGULER	50.616,00	
2. DAK FISIK PENUGASAN	1.929.502,00	
3. DAK FISIK AFFIRMASI	19.500.000,00	
JUMLAH SISA DAK FISIK TA. 2020 MURNI		21.480.118,00
F. SISA DAK FISIK CADANGAN TA. 2020		
1. DAK REGULER	14.000,00	
2. DAK PENUGASAN	146.957.247,00	
3. DAK AFFIRMASI	110.030.000,00	
JUMLAH SISA DAK FISIK CADANGAN TA. 2020		257.001.247,00
G. SISA DAU SG		
1. DAU KELURAHAN	84.989.050,00	
2. DAU PENDIDIKAN	37.532.150.460,00	
3. DAU KESEHATAN	20.741.286.627,00	
4. DAU PU	14.287.434.106,00	
5. DAU PPPK	45.235.606.203,00	
JUMLAH SISA DAU SG		117.881.466.446,00
H. SISA DAU Tambahan		9.217.486.000,00
TOTAL DANA SPESIFIK GRAND		157.637.732.149,07
II. DANA NON SPESIFIK GRAND		
- DANA UMUM		0,00
III. JUMLAH DANA SPESIFIK GRAND DAN DANA NON SPESIFIK GRAND		157.637.732.149,07

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih - Awal	**220.295.311.541,33**	**227.595.111.216,93**

Nilai SAL-Awal Tahun 2023 sebesar Rp220.295.311.541,33 merupakan SAL – Akhir Tahun 2022. Saldo tersebut menjadi Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran Tahun 2023.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.2	**Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**	**220.295.311.541,33**	**227.595.111.216,93**

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2023 yang digunakan untuk menutup defisit pada APBD Tahun 2023, yaitu sebesar Rp220.295.311.541,33.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.3	**Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)**	**177.229.258.614,39**	**220.295.311.541,33**

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir Tahun 2023 adalah sebesar Rp177.229.258.614,39.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.4	**Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya**	**0,00**	**0,00**

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar nihil.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.5	**Saldo Anggaran Lebih - Akhir**	**177.229.258.614,39**	**220.295.311.541,33**

SAL-Akhir merupakan akumulasi SiLPA Tahun Anggaran lalu dan Tahun Anggaran berjalan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif Saldo Anggaran Lebih-Akhir sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp177.229.258.614,39.

5.3 Neraca

5.3.1 Aset

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1 Aset lancar	**242.199.670.965,25**	**283.906.656.918,43**

Aset Lancar Tahun 2023 adalah sebesar Rp242.199.670.965,25 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp283.906.656.918,43, maka realisasi Aset Lancar pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp41.706.985.953,18 atau sebesar 14,69% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-229 Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	%
1	Kas dan Bank	177.277.057.435,39	220.378.213.551,33	(19,56)
2	Piutang	58.502.511.720,49	57.542.768.237,52	1,67

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	%
3	Penyisihan Piutang	(39.326.108.526,74)	(32.523.447.778,30)	20,92
4	Beban Dibayar Dimuka	4.120.000,00	54.000.000,00	(92,37)
5	Persediaan	45.742.090.336,11	38.455.122.907,88	18,95
	Jumlah	**242.199.670.965,25**	**283.906.656.918,43**	**(14,69)**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1 Kas dan Bank	**177.277.057.435,39**	**220.378.213.551,33**

Kas dan Bank Tahun 2023 adalah sebesar Rp177.277.057.435,39 jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2022 sebesar Rp220.378.213.551,33, maka saldo Kas dan Bank mengalami penurunan sebesar Rp43.101.156.115,94 atau sebesar 19,56% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-230 Kas dan Bank

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren %
1	Kas di Kas Daerah	158.334.059.191,91	207.708.972.841,60	(23,77)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	42.000,00	1.001.111,23	(95,80)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	30.000.000,00	(100,00)
4	Kas di BLUD	13.522.118.826,27	10.329.468.288,89	30,91
5	Kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - FKTP	579.740.166,12	1.767.917.917,52	(67,21)
6	Kas di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - FKTP	4.728.092.342,00	0,00	0,00
7	Kas di Bendahara BOS	65.206.088,09	457.951.382,09	(85,76)
8	Kas Lainnya	47.798.821,00	82.902.010,00	(42,34)
	Jumlah	**177.277.057.435,39**	**220.378.213.551,33**	**(19,56)**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	**158.334.059.191,91**	**207.708.972.841,60**

Kas di Kas Daerah sebesar Rp158.334.059.191,91 terdiri dari kas di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp157.637.732.149,07 dan Kas Rekening Dana Cadangan sebesar Rp696.327.042,84. Jika dibandingkan dengan saldo kas Tahun 2022 sebesar Rp207.708.972.841,60, maka saldo kas di Kas Daerah mengalami penurunan sebesar Rp49.374.913.649,69 atau sebesar 23,77% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-231 Kas Daerah

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren %
1	Giro Kas Umum Daerah	157.637.732.149,07	207.708.972.841,60	(24,11)
2	Bunga Deposito Rekening Dana Cadangan	696.327.042,84	0,00	0,00
	Jumlah	**158.334.059.191,91**	**207.708.972.841,60**	**(23,77)**

Giro Kas Umum Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp157.637.732.149,07 merupakan saldo kas daerah yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam bentuk giro pada Bank Jatim Cabang Bondowoso dengan nomor rekening 311000011.

Bunga Deposito Rekening Dana Cadangan sebesar Rp696.327.042,84 merupakan bunga dari Deposito Dana Cadangan Nomor DB 0491573 dengan nominal deposito Rp15.000.000.000,00 dan Deposito Dana Cadangan Nomor DB 555037 dengan nominal deposito Rp15.000.000.000,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	**42.000,00**	**1.001.111,23**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada bendahara penerimaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp42.000,00 dan Rp1.001.111.23 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-232 Kas Bendahara Penerimaan

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren %
1	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	0,00	4.000,00	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	997.111,23	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan	42.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**42.000,00**	**1.001.111,23**	**(94,80)**

Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Tahun 2023 sebesar Rp42.000,00 merupakan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas pada rekening giro bendahara penerimaan Dinas Kesehatan yang belum disetorkan ke Rekening Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**30.000.000,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp30.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-233 Kas Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren %
1	Kas Bendahara Pengeluaran	0,00	30.000.000,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**30.000.000,00**	**0,00**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.4 Kas di BLUD	**13.522.118.826,27**	**10.329.468.288,89**

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan saldo kas untuk keperluan operasional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso. Kas di BLUD Tahun 2023 adalah sebesar Rp13.522.118.826,27 jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2022 sebesar Rp10.329.468.288,89, maka saldo Kas di BLUD pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.192.650.537,38 atau sebesar 30,91% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-234 Kas di BLUD RSUD

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren %
1	Kas di BLUD RSUD dr H Koesnadi	13.484.765.230,27	10.317.291.823,89	30,70

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren %
2	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dr H Koesnadi	37.353.596,00	12.176.465,00	206,77
	Jumlah	**13.522.118.826,27**	**10.329.468.288,89**	**30,91**

1. Kas di BLUD RSUD dr H Koesnadi sebesar Rp13.484.765.230,27 merupakan saldo kas dalam bentuk giro pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Cabang Bondowoso dengan nomor rekening 0311003733.
2. Saldo Kas pada Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dr. H. Koesnadi per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.353.596,00 merupakan pendapatan BLUD yang belum disetor pada rekening Giro Kas BLUD sampai dengan 31 Desember 2023.

		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.5	**Kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - FKTP**	**579.740.166,12**	**1.767.917.917,52**

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan langsung ke rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP. Sisa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaran 2023 pada FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp579.740.166,12 dan Rp1.767.917.917,52 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-235 Kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - FKTP

No	Nama FKTP	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren %
1	Curahdami	2.515.462,00	87.649.652,00	(97,13)
2	Binakal	7.935.875,00	29.672.453,00	(73,26)
3	Grujugan	32.873.000,00	86.517.606,00	(62,00)
4	Maesan	24.018.710,00	187.116.319,00	(87,16)
5	Tamanan	5.212.614,00	148.117.908,00	(96,48)
6	Jambesari	10.547.363,00	55.741.806,00	(81,08)
7	Pujer	731.834,48	100.756.434,48	(99,27)
8	Tlogosari	120.165.578,00	38.175.785,00	214,77
9	Wonosari	1.997.856,00	83.336.129,00	(97,60)
10	Tapen	39.199.263,00	179.234.301,00	(78,13)
11	Nangkaan	148.091.955,04	108.248.126,04	36,81
12	Sukosari	7.316.411,00	79.080.972,00	(90,75)
13	Sumber Wringin	29.708.908,00	71.197.734,00	(58,27)
14	Klabang	1.081.373,00	14.368.494,00	(92,47)
15	Sempol	43.270.212,04	49.997.997,04	(13,46)
16	Prajekan	3.898.678,60	22.387.392,60	(82,59)
17	Botolinggo	736.291,00	9.731.647,00	(92,43)
18	Cermee	482.773,35	94.315.358,35	(99,49)
19	Kotakulon	6.811.698,70	13.434.215,70	(49,30)
20	Kademangan	3.481.824,80	43.737.123,00	(92,04)
21	Tenggarang	34.804,80	92.688.293,00	(99,96)
22	Tegalampel	48.073.536,27	59.452.742,27	(19,14)
23	Tamankrocok	11.880.655,00	1.420.986,00	736,09
24	Wringin	13.623.807,00	28.105.188,00	(51,53)
25	Pakem	16.049.682,04	83.433.255,04	(80,76)
	Jumlah	**579.740.166,12**	**1.767.917.917,52**	**(67,21)**

		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.6	**Kas di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - FKTP**	**4.728.092.342,00**	**0,00**

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan yang disalurkan langsung kepada masing-masing FKTP. Sisa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2023 pada FKTP Rp4.728.092.342,00 terdiri dari :

Tabel 5-236 Kas di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - FKTP

No	Nama FKTP	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren %
1	Curahdami	139.721.459,00	0,00	0,00
2	Binakal	82.174.296,00	0,00	0,00
3	Grujugan	208.904.429,00	0,00	0,00
4	Maesan	177.838.651,00	0,00	0,00
5	Tamanan	120.042.895,00	0,00	0,00
6	Jambesari	185.637.553,00	0,00	0,00
7	Pujer	99.357.158,00	0,00	0,00
8	Tlogosari	326.709.230,00	0,00	0,00
9	Wonosari	117.876.093,00	0,00	0,00
10	Tapen	135.499.688,00	0,00	0,00
11	Nangkaan	96.154.607,00	0,00	0,00
12	Sukosari	99.241.050,00	0,00	0,00
13	Sumber Wringin	100.448.803,00	0,00	0,00
14	Klabang	182.726.909,00	0,00	0,00
15	Sempol	244.903.409,00	0,00	0,00
16	Prajekan	259.970.821,00	0,00	0,00
17	Botolinggo	412.824.855,00	0,00	0,00
18	Cermee	506.022.206,00	0,00	0,00
19	Kotakulon	150.184.331,00	0,00	0,00
20	Kademangan	131.525.016,00	0,00	0,00
21	Tenggarang	362.600.537,00	0,00	0,00
22	Tegalampel	111.083.410,00	0,00	0,00
23	Tamankrocok	127.390.311,00	0,00	0,00
24	Wringin	253.837.133,00	0,00	0,00
25	Pakem	95.417.492,00	0,00	0,00
	Jumlah	**4.728.092.342,00**	**0,00**	**0,00**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.7 Kas di Bendahara BOS	**65.206.088,09**	**457.951.382,09**

Kas pada Bendahara BOS merupakan sisa kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing sekolah oleh Pemerintah Pusat. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp65.206.088,09 dan Rp457.951.382,09 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-237 Kas pada Bendahara BOS

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren %
1	Kas di Dana BOS - SD	62.756.885,80	85.317.247,80	(26,44)
2	Kas di Dana BOS - SMP	2.449.202,29	372.634.134,29	(99,34)
	Jumlah	**65.206.088,09**	**457.951.382,09**	**(85,76)**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.8 Kas Lainnya	**47.798.821,00**	**82.902.010,00**

Kas Lainnya merupakan pungutan pajak yang belum disetor/utang PFK. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp47.798.821,00 dan Rp82.902.020,00 dengan rincian sebagai beikut :

Tabel 5-238 Kas Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren %
1	Utang PFK Dana BOS - SD	35.991.684,00	79.076.686,00	(54,49)
2	Utang PFK Dana BOS - SMP	9.601.894,00	3.825.324,00	151,01
3	Utang PFK Dana BOK - FKTP	2.205.243,00	0,00	0,00
	Jumlah	**47.798.821,00**	**82.902.010,00**	**(42,34)**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.9 Piutang Pendapatan	**49.725.883.331,63**	**39.285.468.248,66**

Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp49.725.883.331,63 dan Rp39.285.468.248,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-239 Rincian Piutang Pendapatan

No	Jenis Piutang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Pajak	30.596.668.269,20	25.037.501.849,20
2	Piutang Retribusi	3.370.516.952,34	3.981.024.804,34
3	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	15.758.698.110,09	10.266.941.595,12
	Jumlah Piutang	**49.725.883.331,63**	**39.285.468.248,66**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.9.1 Piutang Pajak	**30.596.668.269,20**	**25.037.501.849,20**

Piutang Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang belum diterima kasnya oleh Badan Pendapatan Daerah.

Saldo piutang pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp30.596.668.269,20 dan Rp25.037.501.849,20 merupakan jumlah tagihan pajak daerah berdasarkan Ketetapan Pajak yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-240 Rincian Piutang Pajak

No	Jenis Pajak	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pajak Reklame	568.064.451,00	1.260.730.027,00	1.150.978.778,00	677.815.700,00
2	Pajak Penerangan Jalan	2.463.640.923,20	16.434.354.493,00	16.340.793.517,00	2.557.201.899,20
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.321.393,00	950.000,00	950.000,00	6.321.393,00
4	Pajak Hotel	0,00	1.213.317.298,00	1.209.059.528,00	4.257.770,00
5	Pajak Restoran	24.727.013,00	4.940.030.680,00	4.689.253.089,00	275.504.604,00
6	Pajak Air Tanah	635.392,00	542.457.455,00	542.294.045,00	798.802,00
7	Pajak Hiburan	5.854.540,00	231.361.689,00	223.681.289,00	13.534.940,00
8	Pajak Parkir	0,00	264.705.600,00	263.550.600,00	1.155.000,00
9	PBB Perdesaan dan Perkotaan	21.952.021.288,00	18.448.032.796,00	13.356.212.772,00	27.043.841.312,00
10	BPHTB	16.236.849,00	5.721.036.121,00	5.721.036.121,00	16.236.849,00
	Total	**25.037.501.849,20**	**49.056.976.159,00**	**43.497.809.739,00**	**30.596.668.269,20**

Total piutang yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.596.668.269,20 di atas terdiri dari :

1. Piutang Pajak Reklame adalah piutang pajak atas penyelenggaraan reklame yang belum diterima kasnya. Nilai Piutang Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp677.815.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-241 Rincian Piutang Pajak Reklame

No	Tahun SKP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2012	138.523.340,00	0,00	0,00	138.523.340,00
2	2013	34.567.603,00	0,00	0,00	34.567.603,00
3	2014	41.065.605,00	0,00	0,00	41.065.605,00
4	2015	8.310.115,00	0,00	0,00	8.310.115,00
5	2017	34.267.525,00	0,00	0,00	34.267.525,00
6	2018	3.293.750,00	0,00	0,00	3.293.750,00
7	2019	7.453.125,00	0,00	0,00	7.453.125,00
8	2020	82.116.850,00	0,00	0,00	82.116.850,00
9	2021	48.093.119,00	0,00	0,00	48.093.119,00
10	2022	170.373.419,00	0,00	39.428.188,00	130.945.231,00
11	2023	0,00	1.260.730.027,00	1.111.550.590,00	149.179.437,00
	Jumlah	**568.064.451,00**	**1.260.730.027,00**	**1.150.978.778,00**	**677.815.700,00**

2. Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah piutang pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain yang belum diterima kasnya. Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.557.201.899,20 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-242 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan

No	Tahun SKP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	1998 s.d April 2010	1.101.408.541,20	0,00	0,00	1.101.408.541,20
2	2022	1.362.232.382,00	0,00	1.362.232.382,00	0,00
3	2023	0,00	16.434.354.493,00	14.978.561.135,00	1.455.793.358,00
	Jumlah	**2.463.640.923,20**	**16.434.354.493,00**	**16.340.793.517,00**	**2.557.201.899,20**

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2023 untuk tahun SKP 2023 sebesar Rp1.455.793.358,00 merupakan piutang Pajak Penerangan Jalan bagian bulan Desember 2023 kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Situbondo yang telah diterima kasnya pada bulan Januari 2023.

Tabel 5-243 Rincian Piutang PPJ PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Situbondo

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Desember 2022	1.362.232.382,00	0,00	1.362.232.382,00	0,00
2	Januari 2023	0,00	1.312.594.333,00	1.312.594.333,00	0,00
3	Februari 2023	0,00	1.244.588.534,00	1.244.588.534,00	0,00
4	Maret 2023	0,00	1.291.195.509,00	1.291.195.509,00	0,00
5	April 2023	0,00	1.369.597.740,00	1.369.597.740,00	0,00
6	Mei 2023	0,00	1.365.350.779,00	1.365.350.779,00	0,00
7	Juni 2023	0,00	1.382.874.994,00	1.382.874.994,00	0,00
8	Juli 2023	0,00	1.359.628.671,00	1.359.628.671,00	0,00
9	Agustus 2023	0,00	1.378.054.757,00	1.378.054.757,00	0,00
10	September 2023	0,00	1.389.471.098,00	1.389.471.098,00	0,00
11	Oktober 2023	0,00	1.436.211.405,00	1.436.211.405,00	0,00
12	November 2023	0,00	1.448.993.315,00	1.448.993.315,00	0,00
13	Desember 2023	0,00	1.455.793.358,00	0,00	1.455.793.358,00
	Jumlah	**1.362.232.382,00**	**16.434.354.493,00**	**16.340.793.517,00**	**1.455.793.358,00**

Saldo piutang PPJ per 31 Desember 2022 untuk tahun SKP 1998 s.d April 2010 sebesar Rp1.101.408.541,20 merupakan piutang PPJ kepada PT. Bonindo Abadi sejak tahun 1998 sampai dengan bulan April 2010 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-244 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan PT Bonindo

No	Uraian	Pokok	Denda	Jumlah
1	Tahun 1998 s/d 2001	249.163.335,00	24.916.333,50	274.079.668,50
2	Tahun 2002	104.946.900,00	10.494.690,00	115.441.590,00
3	Tahun 2003	68.484.515,00	6.848.451,50	75.332.966,50
4	Tahun 2004	82.930.905,00	8.293.090,50	91.223.995,50
5	Tahun 2005	87.982.355,00	8.798.235,50	96.780.590,50
6	Tahun 2006	111.799.190,00	11.179.919,00	122.979.109,00
7	Tahun 2007	102.369.706,00	10.236.970,60	112.606.676,60
8	Tahun 2008	88.507.438,00	8.850.743,80	97.358.181,80
9	Tahun 2009	74.160.403,00	7.416.040,30	81.576.443,30
10	Januari s/d April 2010	30.935.745,00	3.093.574,50	34.029.319,50
	Jumlah	**1.001.280.492,00**	**100.128.049,20**	**1.101.408.541,20**

PT Bonindo Abadi adalah perusahaan yang berkedudukan di Jalan Raya Jember Km 9 Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso. Perusahaan berdiri tahun 1994 berdasarkan Akta Notaris Mahdalina S. Gandawi Djaja, SH dengan akta Nomor 52, tanggal 25 Agustus 1994. PT Bonindo Abadi bergerak di bidang produksi kertas budaya, *chopstik* dan industri batu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur di Surabaya, dengan laporan Nomor : 62/R/XVIII/SBY/04/2008 tanggal 15 April Tahun 2008 terdapat tunggakan piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp888.444.596,00 oleh PT Bonindo Abadi. Terhadap tunggakan piutang tersebut BPK memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk segera menindaklanjuti dan menagih kepada PT Bonindo. Bupati telah melaksanakan rekomendasi tersebut dengan melayangkan surat teguran Nomor : 700/079430.99/2008 kepada PT Bonindo. Namun demikian PT Bonindo tidak pernah membayar tunggakan tersebut, bahkan jumlah tersebut semakin berkembang karena sampai dengan April 2010 PT Bonindo tidak pernah membayar PPJ sehingga jumlah tunggakan piutang PPJ bersama dendanya menjadi Rp1.101.408.541,20. Piutang tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selalu menjadi catatan dan merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk melakukan penagihan.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melakukan upaya-upaya penagihan piutang PPJ kepada PT. Bonindo Abadi yaitu:

a. Memberi peringatan/penagihan tertulis kepada PT. Bonindo Abadi untuk melunasi piutangnya dengan nomor dan tanggal surat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-245 Tabel Surat Tagihan PPJ PT Bonindo

NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
No.700/078/430.99/2008	Tgl.13/06/2008	Teguran
No.503/346/430.42/2008	Tgl.15/12/2008	Permintaan Mematuhi Putusan MA
No.973/382/430.814/2010	Tgl.17/05/2010	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/25/430.42/2011	Tgl.05/01/2011	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/1009/430.42/2011	Tgl.05/04/2011	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.700/134/430.99/2011	Tgl.19/07/2011	Peringatan
No.973/1365/430.6.1/2013	Tgl.20/12/2013	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/615/430.6.1/2014	Tgl.20/05/2014	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/382/430.6.1/2014	Tgl.26/11/2014	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/1612/430.10.13/2015	Tgl.26/08/2015	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/629/430.10.13/2016	Tgl.30/08/2016	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan

NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
No.973/610/430.10.2/2017	Tgl.24/08/2017	Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan
No.973/1615/430.10.2/2020	Tgl.06/10/2020	Koordinasi Rekomendasi BPK-RI

b. Melakukan upaya koordinasi dengan pihak terkait. Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melakukan upaya koordinasi dengan Kepala PLN Distribusi Jawa Timur UPJ. Bondowoso pada tanggal 23 Maret 2010 mengenai piutang Pajak Penerangan Jalan PT.Bonindo Abadi Bondowoso. Sebagai hasil dari upaya koordinasi tersebut maka Pajak Penerangan Jalan PT Bonindo Abadi terhitung mulai bulan Mei tahun 2010 sampai saat ini telah dapat dipungut dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.

c. Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah meminta asistensi dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur yang kemudian ditindaklajuti dengan menugaskan tim asistensi ke Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk memberikan bimbingan, saran, dan rekomendasi terhadap permasalahan tunggakan PPJ PT Bonindo dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Asistensi Penyelesaian Tunggakan Pajak Penerangan Jalan Pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso Nomor : LBA-101/PW13/3/2015 Tanggal 3 Maret 2015. BPKP menyarankan kepada Bupati Bondowoso sebagai berikut :
   - Sepanjang bukti dasar atau dokumen sumber yaitu tagihan listrik dari PLN yang memuat adanya tagihan PPJ atas PT Bonindo Abadi belum diperoleh maka Piutang PPJ atas PT. Bonindo sebesar Rp1.101.408.541,20 dapat dikoreksi dari pembukuan, namun tetap dijelaskan (*disclosure*) dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   - Melakukan koordinasi dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Jawa Timur untuk meminta PT. PLN Distribusi Situbondo menerbitkan rekening listrik yang memuat tagihan PPJ PT. Bonindo Abadi pada tahun terjadinya tunggakan PPJ, yang juga berfungsi sebagai SKPD.
   - Melakukan koordinasi kepada Kejaksaan setempat sebagai Pengacara Negara untuk mendapatkan pertimbangan hukum mengenai status tunggakan PPJ PT. Bonindo Abadi.

3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah piutang pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan yang belum diterima kasnya. Nilai piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.321.393,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-246 Rincian Piutang Pajak Mineral

No	Tahun SKP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2014	300.060,00	0,00	0,00	300.060,00
2	2015	2.300.940,00	0,00	0,00	2.300.940,00
3	2016	100.080,00	0,00	0,00	100.080,00
4	2017	450.113,00	0,00	0,00	450.113,00
5	2019	2.510.200,00	0,00	0,00	2.510.200,00
6	2020	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
7	2023	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
	Jumlah	**6.321.393,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**6.321.393,00**

4. Piutang Pajak Hotel adalah piutang pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang belum diterima kasnya. Nilai piutang Pajak Hotel sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.257.770,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-247 Rincian Piutang Pajak Hotel

No	Tahun SKP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2023	0,00	1.213.317.298,00	1.209.059.528,00	4.257.770,00
	Jumlah	**0,00**	**1.213.317.298,00**	**1.209.059.528,00**	**4.257.770,00**

5. Piutang Pajak Restoran adalah piutang pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang belum diterima kasnya. Piutang Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp275.504.604,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-248 Rincian Piutang Pajak Restoran

No	Tahun SKP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2013	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
2	2014	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3	2015	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
4	2016	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
5	2017	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
6	2018	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
7	2019	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00
8	2020	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
9	2021	3.822.273,00	0,00	0,00	3.822.273,00
10	2022	15.304.740,00	0,00	0,00	15.304.740,00
11	2023	0,00	4.940.030.680,00	4.689.253.089,00	250.777.591,00
	Jumlah	**24.727.013,00**	**4.940.030.680,00**	**4.689.253.089,00**	**275.504.604,00**

6. Piutang Pajak Air Tanah adalah piutang pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang belum diterima kasnya. Piutang Pajak Air Tanah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp798.802,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-249 Rincian Piutang Pajak Air Tanah

No	Tahun SKP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2019	114.480,00	0,00	0,00	114.480,00
2	2021	260.362,00	0,00	0,00	260.362,00
3	2022	260.550,00	0,00	0,00	260.550,00
4	2023	0,00	542.457.455,00	542.294.045,00	163.410,00
	Jumlah	**635.392,00**	**542.457.455,00**	**542.294.045,00**	**798.802,00**

7. Piutang Pajak Hiburan adalah piutang pajak atas penyelenggaraan hiburan yang belum diterima kasnya. Nilai Piutang Pajak Hiburan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.534.940,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-250 Rincian Piutang Pajak Hiburan

No	Tahun SKP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2012	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2	2013	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
3	2017	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	2018	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5	2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6	2020	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
7	2021	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
8	2022	3.915.540,00	0,00	0,00	3.915.540,00
9	2023	0,00	231.361.689,00	223.681.289,00	7.680.400,00
	Jumlah	**5.854.540,00**	**231.361.689,00**	**223.681.289,00**	**13.534.940,00**

8. Piutang Pajak Parkir adalah piutang pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang belum diterima kasnya. Saldo Piutang Pajak Parkir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.155.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-251 Rincian Piutang Pajak Parkir

No	Tahun SKP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2023	0,00	264.705.600,00	263.550.600,00	1.155.000,00
Jumlah		**0,00**	**264.705.600,00**	**263.550.600,00**	**1.155.000,00**

9. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (P2) adalah piutang pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang belum diterima kasnya. Nilai piutang pajak bumi dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp27.043.841.312,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-252 Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2

No	Tahun SKP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2012	511.983.583,00	0,00	2.575.683,00	509.407.900,00
2	2013	892.400.416,00	0,00	5.439.902,00	886.960.514,00
3	2014	109.782.178,00	0,00	2.294.041,00	107.488.137,00
4	2015	79.960.046,00	0,00	2.151.004,00	77.809.042,00
5	2016	5.765.114,00	0,00	846.177,00	4.918.937,00
6	2017	20.494.480,00	0,00	832.763,00	19.661.717,00
7	2018	4.147.654.919,00	0,00	31.463.303,00	4.116.191.616,00
8	2019	4.528.726.852,00	0,00	51.904.694,00	4.476.822.158,00
9	2020	1.867.679.744,00	0,00	21.282.163,00	1.846.397.581,00
10	2021	5.479.696.907,00	0,00	72.080.123,00	5.407.616.784,00
11	2022	4.307.877.049,00	0,00	109.699.452,00	4.198.177.597,00
12	2023	0,00	18.448.032.796,00	13.055.643.467,00	5.392.389.329,00
Jumlah		**21.952.021.288,00**	**18.448.032.796,00**	**13.356.212.772,00**	**27.043.841.312,00**

Nilai pengurang piutang sebesar Rp13.356.212.772,00 merupakan nilai bruto sebelum dikurangi dengan penghapusan denda dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Pengurang Piutang PBB-P2 bruto	Rp	13.356.212.772,00
Dikurangi/dikompensasi pembebasan denda	Rp	113.528.348,00
Nilai Pengurang Piutang PBB-P2 netto	Rp	13.242.684.424,00

Selanjutnya nilai Pengurang Piutang PBB-P2 netto dicatat di LRA sebagai pendapatan Pajak – PBBP2 sebesar Rp13.242.684.424,00.

10. Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah piutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum diterima kasnya. Saldo piutang Pajak BPHTB sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.236.849,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-253 Rincian Piutang Pajak BPHTB

No	Tahun SKP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2014	16.236.849,00	0,00	0,00	16.236.849,00
2	2023	0,00	5.721.036.121,00	5.721.036.121,00	0,00
Jumlah		**16.236.849,00**	**5.721.036.121,00**	**5.721.036.121,00**	**16.236.849,00**

	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.9.2 Piutang Retribusi	**3.370.516.952,34**	**3.981.024.804,34**

Piutang Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang belum diterima kasnya. Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.370.516.952,34 dan Rp3.981.024.804,34 merupakan jumlah tunggakan retribusi yang belum dilunasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-254 Jenis Piutang Retribusi

No	Jenis Piutang Retribusi	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	2.879.460.807,34	10.227.611.254,00	10.898.149.106,00	2.208.922.955,34
2	Retribusi Jasa Usaha	433.841.653,00	444.419.000,00	384.389.000,00	493.871.653,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	667.722.344,00	1.020.905.000,00	1.020.905.000,00	667.722.344,00
	Jumlah	**3.981.024.804,34**	**11.692.935.254,00**	**12.303.443.106,00**	**3.370.516.952,34**

Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.370.516.952,34 terdiri dari :

1. Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.208.922.955,34 terdiri dari :

Tabel 5-255 Tabel Piutang Retribusi Jasa Umum

No	Jenis Piutang Retribusi Umum	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a	Sewa Kios Pasar	992.611.343,00	593.657.280,00	412.010.235,00	1.174.258.388,00
b	Sewa Los Pasar	172.022.652,00	142.947.000,00	141.443.855,00	173.525.797,00
c	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	355.499.312,34	204.326.974,00	124.072.116,00	435.754.170,34
d	Piutang Klaim Non Kapitasi BPJS	1.359.327.500,00	9.286.680.000,00	10.220.622.900,00	425.384.600,00
	Jumlah	**2.879.460.807,34**	**10.227.611.254,00**	**10.898.149.106,00**	**2.208.922.955,34**

a. Sewa Kios Pasar

Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan piutang retribusi kepada para penyewa kios milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso di pasar yang belum diterima kasnya. Jumlah kios yang di miliki oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso berjumlah 1.512 kios yang tersebar pada 14 pasar. Nilai Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.174.258.388,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-256 Rincian Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar

No	Tahun SKP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2008	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
2	2009	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00
3	2010	1.953.900,00	0,00	0,00	1.953.900,00
4	2011	6.753.075,00	0,00	0,00	6.753.075,00
5	2012	8.071.350,00	0,00	0,00	8.071.350,00
6	2013	6.497.200,00	0,00	0,00	6.497.200,00
8	2014	5.787.845,00	0,00	0,00	5.787.845,00
9	2015	6.155.875,00	0,00	0,00	6.155.875,00
10	2016	5.589.875,00	0,00	(130.000,00)	5.719.875,00
11	2017	23.241.875,00	0,00	1.337.500,00	21.904.375,00
12	2018	76.219.475,00	0,00	6.404.000,00	69.815.475,00
13	2019	93.263.354,00	0,00	8.719.500,00	84.543.854,00
14	2020	217.916.961,00	0,00	22.843.000,00	195.073.961,00
15	2021	214.151.188,00	0,00	30.109.000,00	184.042.188,00
16	2022	326.829.370,00	0,00	48.393.500,00	278.435.870,00
17	2023	0,00	593.657.280,00	294.333.735,00	299.323.545,00
	Jumlah	**992.611.343,00**	**593.657.280,00**	**412.010.235,00**	**1.174.258.388,00**

b. Sewa Los Pasar

Piutang Sewa Los Pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan piutang retribusi kepada para penyewa los milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso di pasar yang belum diterima kasnya. Jumlah los yang di miliki oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso berjumlah 1.463 los yang tersebar pada 11 pasar. Nilai Piutang Retribusi Sewa Los Pasar sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp173.525.797,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-257 Rincian Piutang Retribusi Sewa Los Pasar

No	Tahun SKP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2017	5.587.335,00	0,00	1.172.360,00	4.414.975,00
2	2018	13.317.750,00	0,00	4.755.000,00	8.562.750,00
3	2019	20.728.525,00	0,00	6.086.420,00	14.642.105,00
4	2020	49.571.365,00	0,00	4.784.720,00	44.786.645,00
5	2021	47.929.765,00	0,00	6.711.380,00	41.218.385,00
6	2022	34.887.912,00	0,00	2.076.100,00	32.811.812,00
7	2023	0,00	142.947.000,00	115.857.875,00	27.089.125,00
Jumlah		**172.022.652,00**	**142.947.000,00**	**141.443.855,00**	**173.525.797,00**

c. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan piutang retribusi atas penerbitan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang belum diterima kasnya. Nilai piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp435.754.170,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-258 Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

No	Tahun SKP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2015	117.313.107,00	0,00	0,00	117.313.107,00
2	2018	21.121.501,00	0,00	0,00	21.121.501,00
3	2019	11.603.688,48	0,00	0,00	11.603.688,48
4	2020	28.864.622,34	0,00	0,00	28.864.622,34
5	2021	73.296.801,28	0,00	0,00	73.296.801,28
6	2022	103.299.592,24	0,00	19.990.726,00	83.308.866,24
7	2023	0,00	204.326.974,00	104.081.390,00	100.245.584,00
Jumlah		**355.499.312,34**	**204.326.974,00**	**124.072.116,00**	**435.754.170,34**

d. Piutang Klaim Non Kapitasi BPJS

Piutang Klaim Non Kapitasi BPJS yang dikelola oleh Dinas Kesehatan merupakan piutang retribusi atas jasa klaim non kapitasi yang belum diterima kasnya. Nilai piutang Klaim Non Kapitasi BPJS sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp425.384.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-259 Rincian Piutang Klaim Non Kapitasi BPJS

No	Tahun SKP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2017	8.404.500,00	0,00	0,00	8.404.500,00
2	2018	141.536.000,00	0,00	0,00	141.536.000,00
3	2019	132.917.000,00	0,00	0,00	132.917.000,00
4	2022	1.076.470.000,00	0,00	1.076.470.000,00	0,00
5	2023	0,00	9.286.680.000,00	9.144.152.900,00	142.527.100,00
Jumlah		**1.359.327.500,00**	**9.286.680.000,00**	**10.220.622.900,00**	**425.384.600,00**

Nilai pengurang piutang sebesar Rp10.220.622.900,00 merupakan nilai transfer bruto dari BPJS sebelum dikurangi dengan biaya administrasi bank dan berita acara hasil audit klaim B.P dengan rincian sebagai berikut :

Nilai transfer BPJS bruto :	Rp	10.220.622.900,00
Dikurangi/dikompensasi :		
- Biaya Admin Bank	Rp	872.900,00
- BA. Hasil Audit Klaim B.P	Rp	725.000,00
Nilai transfer BPJS netto	Rp	10.219.025.000,00

Selanjutnya nilai tranfer BPJS netto dicatat di LRA sebagai pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan – Puskesmas sebesar Rp10.219.025.000,00.

2. Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp 493.871.653,00 terdiri dari :

Tabel 5-260 Tabel Piutang Retribusi Jasa Usaha

No	Jenis Piutang Retribusi Jasa Usaha	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a	Sewa Tanah Trotoar	1.688.400,00	0,00	0,00	1.688.400,00
b	Sewa Kios Terminal	5.282.200,00	0,00	0,00	5.282.200,00
c	Sewa Toko Pasar	371.871.053,00	424.419.000,00	384.389.000,00	411.901.053,00
d	Piutang Kemitraan	55.000.000,00	20.000.000,00	0,00	75.000.000,00
	Jumlah	**433.841.653,00**	**444.419.000,00**	**384.389.000,00**	**493.871.653,00**

a. Sewa Tanah Trotoar

Piutang retribusi Sewa Tanah Trotoar yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah merupakan piutang retribusi yang sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak dipungut lagi yang belum diterima kasnya. Nilai piutang retribusi Sewa Tanah Trotoar sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.688.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-261 Rincian Piutang Sewa Tanah Trotoar

No	Tahun SKP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2011	1.688.400,00	0,00	0,00	1.688.400,00
	Jumlah	**1.688.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.688.400,00**

b. Sewa Kios Terminal

Piutang retribusi Sewa Kios Terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan merupakan piutang retribusi kepada para penyewa kios milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso di Terminal Bus yang belum diterima kasnya. Nilai piutang retribusi Sewa Kios Terminal sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.282.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-262 Rincian Piutang Retribusi Sewa Kios Terminal

No	Tahun SKP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2000	2.646.000,00	0,00	0,00	2.646.000,00
2	2006	263.200,00	0,00	0,00	263.200,00
3	2011	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00
4	2016	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
	Jumlah	**5.282.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.282.200,00**

Mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang tidak ada mutasi tambah/kurang piutang dikarenakan terminal Kabupaten Bondowoso telah berubah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk kawasan pertokoan yang berada di dalamnya.

c. Sewa Toko Pasar

Piutang retribusi Sewa Toko Pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan piutang retribusi kepada para penyewa toko milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso di pasar yang belum diterima kasnya. Jumlah toko pasar yang dimiliki oleh Pemkab Bondowoso berjumlah 179 toko pasar yang tersebar pada 7 pasar. Nilai piutang retribusi Sewa Toko Pasar sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp411.901.053,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-263 Rincian Piutang Retribusi Sewa Toko Pasar

No	Tahun SKP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2011	398.200,00	0,00	204.000,00	194.200,00
2	2012	1.124.275,00	0,00	400.500,00	723.775,00
3	2013	4.027.250,00	0,00	1.416.000,00	2.611.250,00
4	2014	3.197.050,00	0,00	0,00	3.197.050,00
5	2015	12.606.600,00	0,00	5.494.000,00	7.112.600,00
6	2016	25.153.600,00	0,00	16.159.500,00	8.994.100,00
7	2017	134.000,00	0,00	(12.684.000,00)	12.818.000,00
8	2018	8.226.000,00	0,00	1.651.000,00	6.575.000,00
9	2019	19.407.829,00	0,00	6.007.000,00	13.400.829,00
10	2020	78.016.999,00	0,00	25.645.000,00	52.371.999,00
11	2021	79.388.250,00	0,00	26.191.750,00	53.196.500,00
12	2022	140.191.000,00	0,00	63.420.500,00	76.770.500,00
13	2023	0,00	424.419.000,00	250.483.750,00	173.935.250,00
Jumlah		**371.871.053,00**	**424.419.000,00**	**384.389.000,00**	**411.901.053,00**

d. Piutang Kemitraan

Piutang Kemitraan yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan piutang retribusi atas kerjasama pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Bondowoso berupa tanah dan bangunan dikomplek Pemandian Tasnan Baru Bondowoso dengan PT. Dian Graha Utama sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp75.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-264 Rincian Piutang Kemitraan

No	Tahun SKP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2019	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
2	2020	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3	2021	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
4	2022	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5	2023	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Jumlah		**55.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**75.000.000,00**

3. Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp667.722.344,00 terdiri dari :

Tabel 5-265 Tabel Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

No	Jenis Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	667.722.344,00	1.020.905.000,00	1.020.905.000,00	667.722.344,00
Jumlah		**667.722.344,00**	**1.020.905.000,00**	**1.020.905.000,00**	**667.722.344,00**

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Piutang retribusi IMB yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan piutang retribusi atas penerbitan IMB yang belum diterima kasnya. Nilai piutang retribusi IMB sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp667.722.344,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-266 Rincian Piutang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No	Tahun SKP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2010	667.722.344,00	0,00	0,00	667.722.344,00
2	2022	0,00	1.020.905.000,00	1.020.905.000,00	0,00
Jumlah		**667.722.344,00**	**1.020.905.000,00**	**1.020.905.000,00**	**667.722.344,00**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.9.3 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	**15.758.698.110,09**	**10.266.941.595,12**

Jumlah piutang lain-lain PAD yang sah merupakan piutang yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis piutang pajak dan retribusi sebagaimana tersebut di atas. Saldo piutang piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp15.758.698.110,09 dan Rp10.266.941.595,12 yang terdiri dari:

Tabel 5-267 Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No	Piutang Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Bunga Jasa Giro BUD	175.985.733,31	126.734.950,20	175.985.733,31	126.734.950,20
2	Piutang Jasa Giro BLUD	12.900.443,07	7.077.008,32	12.900.443,07	7.077.008,32
3	Klaim BPJS	8.362.739.202,00	124.595.183.034,00	120.112.910.864,00	12.845.011.372,00
4	Klaim Pelayanan Kesehatan kpd Pihak III Lainnya	1.322.378.804,00	4.241.653.663,00	4.207.569.725,00	1.356.462.742,00
5	Piutang Bantuan Keuangan Parpol	94.640.604,00	0,00	0,00	94.640.604,00
6	Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	223.125.295,00	1.090.880.276,00	329.108.175,00	984.897.396,00
7	Piutang Denda Keterlambatan Proyek	33.990.040,00	0,00	0,00	33.990.040,00
8	Piutang Remunerasi	3.537.973,74	0,00	3.537.973,74	0,00
9	Piutang sewa ATM BNI	0,00	59.202.000,00	0,00	59.202.000,00
10	Piutang sewa ATM BRI	0,00	11.818.800,00	0,00	11.818.800,00
11	Piutang Lain-Lain	37.643.500,00	238.863.197,57	37.643.500,00	238.863.197,57
Jumlah		**10.266.941.595,12**	**130.371.412.929,09**	**124.879.656.414,12**	**15.758.698.110,09**

1. Piutang Bunga Jasa Giro BUD merupakan Piutang Bunga Jasa Giro BUD yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Piutang Bunga Jasa Giro BUD

Tabel 5-268 Rincian Piutang Bunga Jasa Giro BUD

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	175.541.212,81	0,00	175.541.212,81	0,00
2	2023	0,00	126.619.154,97	0,00	126.619.154,97
Jumlah		**175.541.212,81**	**126.619.154,97**	**175.541.212,81**	**126.619.154,97**

b. Piutang Bunga Tabungan/Jasa Giro Dana BOS

Tabel 5-269 Rincian Piutang Bunga Tabungan/Jasa Giro Dana BOS

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	277.521,50	0,00	277.521,50	0,00
2	2023	0,00	115.795,23	0,00	115.795,23
Jumlah		**277.521,50**	**115.795,23**	**277.521,50**	**115.795,23**

c. Piutang Jasa Giro SKPD (Dishub)

Tabel 5-270 Rincian Piutang Bunga Tabungan/Jasa Giro Dana SKPD (Dishub)

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2023	166.999,00	0,00	166.999,00	0,00
Jumlah		**166.999,00**	**0,00**	**166.999,00**	**0,00**

2. Piutang Bunga Jasa Giro BLUD merupakan Piutang Bunga Jasa Giro BLUD RSU dr H Koesnadi yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-271 Rincian Piutang Bunga Tabungan/Jasa Giro Dana BLUD

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	12.900.443,07	0,00	12.900.443,07	0,00
2	2023	0,00	7.077.008,32	0,00	7.077.008,32
Jumlah		**12.900.443,07**	**7.077.008,32**	**12.900.443,07**	**7.077.008,32**

3. Piutang klaim BPJS merupakan klaim non kapitasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta program jaminan kesehatan meliputi : Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Obat, Pelayanan Alat Kesehatan, Pelayanan Ambulan, Pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD), Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso yang nilainya telah diverifikasi yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-272 Rincian Piutang Klaim BPJS

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	8.362.739.202,00	0,00	8.362.739.202,00	0,00
2	2023	0,00	124.595.183.034,00	111.750.171.662,00	12.845.011.372,00
Jumlah		**8.362.739.202,00**	**124.595.183.034,00**	**120.112.910.864,00**	**12.845.011.372,00**

Nilai pengurang piutang sebesar Rp120.112.910.864,00 merupakan nilai transfer bruto dari BPJS sebelum dikurangi dengan biaya administrasi bank dan berita acara hasil verifikasi paska klaim dengan rincian sebagai berikut :

Nilai transfer BPJS bruto :	Rp	120.112.910.864,00
Dikurangi/dikompensasi :		
- Biaya Admin Bank	Rp	768.300,00
- BA. Hasil Verifikasi Paska Klaim Tahun 2022	Rp	4.287.000,00
- BA. Hasil Verifikasi Paska Klaim Tahun 2023	Rp	183.231.845,00
Nilai transfer BPJS netto	Rp	119.924.623.719,00

Selanjutnya nilai tranfer BPJS netto dicatat di LRA sebagai pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah – Pendapatan BLUD sebesar Rp119.924.623.719,00.

4. Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya merupakan klaim atas layanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD RSUD dr. H. Koesnadi kepada pasien

dari pihak tertanggung yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-273 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya

No	Piutang Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a	PT Kereta Api Indonesia (KAI)	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00
b	PT Jasa Raharja	744.819.433,00	1.607.271.517,00	1.745.546.395,00	606.544.555,00
c	BPJS Tenaga Kerja	422.271.211,00	99.506.250,00	0,00	521.777.461,00
d	Perhutani	0,00	2.110.429,00	2.110.429,00	0,00
e	Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia (PPBRI)	0,00	25.931.837,00	22.274.687,00	3.657.150,00
f	Yayasan Kesehatan Pegawai TELKOM	14.174.269,00	45.770.530,00	49.818.823,00	10.125.976,00
g	RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo	15.300.000,00	279.437.000,00	192.685.000,00	102.052.000,00
h	Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso	106.018.500,00	203.466.500,00	280.886.000,00	28.599.000,00
i	Dinkes Situbondo	19.628.391,00	313.692.800,00	318.935.491,00	14.385.700,00
j	Kemenkes	0,00	1.458.265.000,00	1.414.858.000,00	43.407.000,00
k	Biakes Maskin Provinsi Jawa Timur	0,00	206.201.800,00	180.287.900,00	25.913.900,00
	Jumlah	**1.322.378.804,00**	**4.241.653.663,00**	**4.207.569.725,00**	**1.356.462.742,00**

a. PT Kereta Api Indonesia (KAI)

Tabel 5-274 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (PT KAI)

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2017	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00
Jumlah		**167.000,00**	**0,00**	**167.000,00**	**0,00**

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada PT KAI merupakan piutang atas pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Perusahaan (JKP) PT KAI meliputi : Administrasi Pelayanan, Pelayanan Gawat Darurat, Pemeriksaan, Pengobatan, dan Konsultasi Spesialistik/subspesialistik, Pelayanan Tindakan Medis, Pelayanan Obat, Alat Kesehatan, dan BahanMedis Pakai, Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Lanjutan, Rehabilitasi Medis, Pelayanan Darah, Pemulasaran Jenazah, Perawatan Satu Hari, Perawatan Inap Non Intensif, Perawatan Inap di Ruang Intensif, Pelayanan Kehamilan (Antenatal), Persalinan dan Neonatal, Pelayanan Kedokteran Forensik, Pelayanan Hemodialisis, Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 705/III/6/DO.9-2023 - 445/450/430.10.7/2023.

b. PT Jasa Raharja

Tabel 5-275 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (PT Jasa Raharja)

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2017	39.419.436,00	0,00	0,00	39.419.436,00
2	2018	28.251.831,00	0,00	0,00	28.251.831,00
3	2019	7.345.411,00	0,00	0,00	7.345.411,00

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4	2020	28.487.034,00	0,00	0,00	28.487.034,00
5	2021	59.373.927,00	0,00	0,00	59.373.927,00
6	2022	581.941.794,00	0,00	471.663.957,00	110.277.837,00
7	2023	0,00	1.607.271.517,00	1.273.882.438,00	333.389.079,00
Jumlah		**744.819.433,00**	**1.607.271.517,00**	**1.745.546.395,00**	**606.544.555,00**

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada PT Jasa Raharja merupakan piutang atas pelayanan penanganan korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum meliputi Pelayanan Gawat Darurat di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : P/8/SP/2023-134.4/940.1/430.10.7/2023.

c. BPJS Tenaga Kerja

Tabel 5-276 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (BPJS Tenaga Kerja)

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2018	348.700,00	0,00	0,00	348.700,00
2	2019	44.718.776,00	0,00	0,00	44.718.776,00
3	2020	54.855.596,00	0,00	0,00	54.855.596,00
4	2022	322.348.139,00	0,00	0,00	322.348.139,00
5	2023	0,00	99.506.250,00	0,00	99.506.250,00
Jumlah		**422.271.211,00**	**99.506.250,00**	**0,00**	**521.777.461,00**

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada BPJS Tenaga Kerja merupakan piutang atas pelayanan kesehatan program jaminan kecelakaan kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi : Pelayanan Gawat Darurat, Pemeriksaan Dasar dan Penunjang, Perawatan lanjutan, Rawat Inap, Penunjang Diagnostik, Perawatan Intensif, Pengobatan, Pelayanan Khusus, Alat Kesehatan dan Implan, Jasa Dokter/Medis, Operasi, Pelayanan Darah, dan Rehabilitasi Medik di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : PER/43/112018-134.4/1330.1/430.10.7/2022.

d. Perhutani

Tabel 5-277 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kpd Pihak III Lainnya (Perhutani)

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2023	0,00	2.110.429,00	2.110.429,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**2.110.429,00**	**2.110.429,00**	**0,00**

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Perhutani merupakan piutang atas pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarga Perum Perhutani KPH Bondowoso meliputi : Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Persalinan, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Kecelakaan Kerja di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 01/PKS/SDM/BDW/DIVRE-JATIM/2020 - 134.4/1353.1/430.10.7/2020.

e. Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia (PPBRI)

Tabel 5-278 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (PPBRI)

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2023	0,00	25.931.837,00	22.274.687,00	3.657.150,00
Jumlah		**0,00**	**25.931.837,00**	**22.274.687,00**	**3.657.150,00**

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada PPBRI merupakan piutang atas pelayanan kesehatan bagi anggota/pensiunan BRI Cabang Bondowoso beserta Keluarganya meliputi; Pelayanan Rawat Jalan, Perawatan Melahirkan, Perawatan Rawat Inap di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 134.4/284.1/430.10.7/2023- B.014/CB/III/2023.

f. Yayasan Kesehatan Pegawai TELKOM

Tabel 5-279 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (Yayasan Kesehatan Pegawai TELKOM)

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2017	2.477.150,00	0,00	0,00	2.477.150,00
2	2018	1.592.630,00	0,00	0,00	1.592.630,00
3	2021	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4	2022	10.024.489,00	0,00	10.024.489,00	0,00
5	2023	0,00	45.770.530,00	39.794.334,00	5.976.196,00
Jumlah		**14.174.269,00**	**45.770.530,00**	**49.818.823,00**	**10.125.976,00**

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom merupakan piutang atas pelayanan kesehatan dan perawatan bagi peserta Yayasan Kesehatan Telkom di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 152/HK.620/YAKES-053/2022 - 134.4/1864.1/430.10.7/2022.

Nilai pengurang piutang sebesar Rp49.818.823,00 merupakan nilai transfer bruto dari Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom sebelum dikurangi dengan biaya administrasi bank dan Resume Hasil Verifikasi dengan rincian sebagai berikut :

Nilai transfer Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom bruto :	Rp	49.818.823,00
Dikurangi/dikompensasi :		
- Biaya Admin Bank	Rp	34.800,00
- Resume Hasil Verifikasi	Rp	54.846,00
Nilai transfer Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom netto	Rp	49.729.177,00

Selanjutnya nilai tranfer Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom netto dicatat di LRA sebagai pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah – Pendapatan BLUD sebesar Rp49.729.177,00.

g. RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo

Tabel 5-280 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo)

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	0,00
2	2023	0,00	279.437.000,00	177.385.000,00	102.052.000,00
Jumlah		**15.300.000,00**	**279.437.000,00**	**192.685.000,00**	**102.052.000,00**

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo merupakan pelayanan rujukan pasien UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo meliputi : Pelayanan Rujukan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Tindakan Pembedahan, Perawatan Penunjang, Pelayanan HIV/AIDS, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK), Rujukan Parsial Untuk Pemeriksaan Diagnostik, Onkologi/Kemoterapi di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 445/2172.6/430.302.7.4/2022.

h. Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso

Tabel 5-281 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso)

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	106.018.500,00	0,00	106.018.500,00	0,00
2	2023	0,00	203.466.500,00	174.867.500,00	28.599.000,00
Jumlah		**106.018.500,00**	**203.466.500,00**	**280.886.000,00**	**28.599.000,00**

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Lab RS Bhayangkara merupakan piutang atas pelayanan Laboratorium Klinik dan Radiologi RS Bhayangkara Bondowoso meliputi : Pelayanan Rujukan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Tindakan Pembedahan, Multi Drug Resistance (MDR), Pelayanan HIV/AIDS, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK), TB-DOTS, Diagnostic, Onkologi/Kemoterapi dan Specimen di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : MOU/8/I/HUK.8.1/2022/Rumkit - 134.4/ 2.3/430.10.7/2022.

i. Dinas Kesehatan Situbondo

Tabel 5-282 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (Dinas Kesehatan Situbondo)

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	19.628.391,00	0,00	19.628.391,00	0,00
2	2023	0,00	313.692.800,00	299.307.100,00	14.385.700,00
Jumlah		**19.628.391,00**	**313.692.800,00**	**318.935.491,00**	**14.385.700,00**

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Dinkes Situbondo merupakan piutang atas pelayanan kesehatan bagi peserta program Jampersal, Pelayanan Penduduk Masyarakat Miskin dengan Identitas Surat Pernyataan Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dan Terduga Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kabupaten Situbondo di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 440/7399.1/431.202.5.2/2020 - 134.4/177/430.10.7/2020.

j. Kemenkes

Tabel 5-283 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (Kemenkes)

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2023	0,00	1.458.265.000,00	1.414.858.000,00	43.407.000,00
Jumlah		**0,00**	**1.458.265.000,00**	**1.414.858.000,00**	**43.407.000,00**

Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Kemenkes merupakan piutang atas pelayanan pasien rujukan penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/218/KPTS/013/2020.

Nilai pengurang piutang sebesar Rp1.414.858.000,00 merupakan nilai transfer bruto dari Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Kemenkes sebelum dikurangi dengan Berita Acara Rekonsiliasi dengan rincian sebagai berikut :

Nilai transfer Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Kemenkes bruto:	Rp	1.414.858.000,00
Dikurangi/dikompensasi :		
- Berita Acara Rekonsiliasi	Rp	41.866.000,00
Nilai transfer Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Kemenkes netto	Rp	1.372.992.000,00

Selanjutnya nilai tranfer Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Kemenkes netto dicatat di LRA sebagai pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah – Pendapatan BLUD sebesar Rp1.372.992.000,00.

k. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Biakes Maskin)

Tabel 5-284 Rincian Piutang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada Pihak III Lainnya (Biakes Maskin)

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2023	0,00	206.201.800,00	180.287.900,00	25.913.900,00
Jumlah		**0,00**	**206.201.800,00**	**180.287.900,00**	**25.913.900,00**

Piutang Klaim Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Biakes Maskin) Provinsi Jawa Timur merupakan piutang atas pelayanan kesehatan bagi peserta program pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Jawa Timur yang tidak mempunyai Jaminan Pelayanan Kesehatan dan/atau manfaat pelayanan kesehatannya tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdiri atas : Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum memiliki NIK, peserta JKN tetapi manfaat pelayan kesehatannya tidak ditanggung, memiliki NIK tetapi masih dalam proses integrasi ke JKN, dan penerima Biakes Maskin atas Persetujuan Gubernur di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 440/10112/102.4/2023 - 440/1018.1/430.10.7/2023.

5. Piutang Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan piutang atas kelebihan pembayaran bantuan keuangan kepada Partai Politik pada tahun 2014 yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-285 Rincian Piutang Bantuan Keuangan Partai Politik

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	HANURA	9.240.634,00	0,00	0,00	9.240.634,00
2	P K P B	3.353.501,00	0,00	0,00	3.353.501,00
3	P P R N	3.477.701,00	0,00	0,00	3.477.701,00
4	P-BARNAS	4.077.134,00	0,00	0,00	4.077.134,00
5	P K N U	74.491.634,00	0,00	0,00	74.491.634,00
Jumlah		**94.640.604,00**	**0,00**	**0,00**	**94.640.604,00**

6. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan piutang hasil penjualan kendaraan darat bermotor yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-286 Rincian Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2013	35.350.000,00	0,00	0,00	35.350.000,00
2	2016	8.210.000,00	0,00	0,00	8.210.000,00
3	2020	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00
4	2021	57.338.400,00	0,00	0,00	57.338.400,00
5	2022	121.421.895,00	0,00	121.421.745,00	150,00
6	2023	0,00	1.090.880.276,00	207.686.430,00	883.193.846,00
Jumlah		**223.125.295,00**	**1.090.880.276,00**	**329.108.175,00**	**984.897.396,00**

Penambahan sebesar Rp1.090.880.276,00 berdasarkan :

a. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat Tahun 2023 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/545/430.4.2/2023 Tanggal 26 Juli 2023 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/19/430.4.2/2023 Tanggal 14 September 2023 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
b. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2023 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/615/430.4.2/2023 Tanggal 6 September 2023 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/22/430.4.2/2023 Tanggal 14 September 2023 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
c. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat Tahun 2023 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/616/430.4.2/2023 Tanggal 6 September 2023 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/23/430.4.2/2023 Tanggal 14 September 2023 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
d. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2023 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/617/430.4.2/2023 Tanggal 6 September 2023 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/26/430.4.2/2023 Tanggal 14 September 2023 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
e. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2023 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/618/430.4.2/2023 Tanggal 6 September 2023 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/32/430.4.2/2023 Tanggal 29 November 2023 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola OlehDinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.

f. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2023 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/619/430.4.2/2023 Tanggal 6 September 2023 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/24/430.4.2/2023 Tanggal 14 September 2023 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
g. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat Tahun 2023 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/620/430.4.2/2023 Tanggal 6 September 2023 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/27/430.4.2/2023 Tanggal 14 September 2023 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
h. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat dan Roda DuaTahun 2023 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/621/430.4.2/2023 Tanggal 6 September 2023 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/25/430.4.2/2023 Tanggal 14 September 2023 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
i. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat Tahun 2023 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/653/430.4.2/2023 Tanggal 6 September 2023 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/33/430.4.2/2023 Tanggal 29 November 2023 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
j. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2023 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/697/430.4.2/2023 Tanggal 19 Oktober 2023 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/34/430.4.2/2023 Tanggal 29 November 2023 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.

k. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2023 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/698/430.4.2/2023 Tanggal 19 Oktober 2023 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/35/430.4.2/2023 Tanggal 29 November 2023 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
l. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2023 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/748/430.4.2/2023 Tanggal 13 November 2023 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/39/430.4.2/2023 Tanggal 29 November 2023 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
m. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat Tahun 2023 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/749/430.4.2/2023 Tanggal 13 November 2023 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/40/430.4.2/2023 Tanggal 29 November 2023 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
n. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat Tahun 2023 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/805/430.4.2/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/50/430.4.2/2023 Tanggal 27 Desember 2023 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.
o. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat Tahun 2023 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/806/430.4.2/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/52/430.4.2/2023 Tanggal 27 Desember 2023 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.

p. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2023 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/832/430.4.2/2023 Tanggal 15 Desember 2023 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/54/430.4.2/2023 Tanggal 27 Desember 2023 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.

q. Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua Tahun 2023 sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/834/430.4.2/2023 Tanggal 15 Desember 2023 Tentang Persetujuan Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan dan SK Sekretaris Daerah Nomor : 188/56/430.4.2/2023 Tanggal 27 Desember 2023 Tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan.

Pengurangan dari realisasi pendapatan sebesar Rp329.108.325,00 merupakan pendapatan penjualan kendaraan dinas bermotor roda empat dan roda dua Tahun 2023.

7. Piutang Denda Keterlambatan Proyek yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan merupakan piutang denda keterlambatan penyelesaian kegiatan/proyek yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-287 Rincian Piutang Denda Keterlambatan Proyek

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2011	33.990.040,00	0,00	0,00	33.990.040,00
Jumlah		**33.990.040,00**	**0,00**	**0,00**	**33.990.040,00**

8. Piutang Remunerasi Treasury Deposit Fasility (TDF) yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan piutang atas bagian prosentase remunerasi penyimpanan TDF pada Bank Indonesia yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-288 Rincian Remunerasi Treasury Deposit Fasility

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	3.537.973,74	0,00	3.537.973,74	0,00
Jumlah		**3.537.973,74**	**0,00**	**3.537.973,74**	**0,00**

9. Piutang Sewa ATM BNI merupakan sewa aset BLUD RSUD dr. H. Koesnadi kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-289 Rincian Piutang Sewa ATM BNI

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2023	0,00	59.202.000,00	0,00	59.202.000,00
Jumlah		**0,00**	**59.202.000,00**	**0,00**	**59.202.000,00**

10. Piutang Sewa ATM BRI merupakan sewa aset BLUD RSUD dr. H. Koesnadi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-290 Rincian Piutang Sewa ATM BRI

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2023	0,00	11.818.800,00	0,00	11.818.800,00
Jumlah		**0,00**	**11.818.800,00**	**0,00**	**11.818.800,00**

11. Piutang Lain-Lain merupakan piutang kelebihan pembayaran belanja pegawai, pengadaan barang dan jasa, aset tetap serta kekurangan volume pekerjaan kepada pihak ketiga yang belum diterima kasnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-291 Rincian Piutang Lain-Lain

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	37.643.500,00	0,00	37.643.500,00	0,00
2	2023	0,00	238.863.197,57	0,00	238.863.197,57
Jumlah		**37.643.500,00**	**238.863.197,57**	**37.643.500,00**	**238.863.197,57**

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah belum termasuk piutang klaim Jamkesda BLUD RSUD dr. H. Koesnadi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sebesar Rp347.597.386,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Klaim Otopsi/Visum - Dinkes	Rp	3.300.000,00
- Klaim Penjamin-Dinkes	Rp	319.767.386,00
- Klaim Pelayanan Ambulance - Dinkes	Rp	24.530.000,00
Jumlah	Rp	**347.597.386,00**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.9.4 Piutang Transfer	**0,00**	**9.433.155.600,00**

Piutang transfer merupakan piutang dana bagi hasil atas saldo piutang bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang belum diterima kasnya oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Saldo piutang transfer per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp9.433.155.600,00 rincian sebagaimana tabel berikut:

1. Piutang Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Dari Pemerintah Pusat

Tabel 5-292 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No	Piutang Transfer	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a.	Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
b.	Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	0,00	9.422.377.000,00	9.422.377.000,00	0,00
c.	Bagi Hasil SDA Gas Bumi	0,00	2.612.162.000,00	2.612.162.000,00	0,00
d.	Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi	0,00	50.061.000,00	50.061.000,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**12.084.892.000,00**	**12.084.892.000,00**	**0,00**

Penambahan pengurangan sebesar Rp12.084.892.000,00 merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 90 Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 dan Nomor : 108 Tahun 2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

Pengurangan sebesar Rp12.084.892.000,00 merupakan pendapatan transfer dana bagi hasil dari pemerintah pusat pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 38/KM.7/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023.

Nilai Piutang Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Dari Pemerintah Pusat sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Royalty

Tabel 5-293 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Royalty

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**292.000,00**	**292.000,00**	**0,00**

b. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil SDA Minyak Bumi

Tabel 5-294 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil SDA Minyak Bumi

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	0,00	9.422.377.000,00	9.422.377.000,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**9.422.377.000,00**	**9.422.377.000,00**	**0,00**

c. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil SDA Gas Bumi

Tabel 5-295 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil SDA Gas Bumi

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	0,00	2.612.162.000,00	2.612.162.000,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**2.612.162.000,00**	**2.612.162.000,00**	**0,00**

d. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi

Tabel 5-296 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	0,00	50.061.000,00	50.061.000,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**50.061.000,00**	**50.061.000,00**	**0,00**

2. Piutang Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Dari Pemerintah Provinsi

Tabel 5-297 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Provinsi

No	Piutang Transfer	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	32.405.958.600,00	32.405.958.600,00	0,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	15.085.586.000,00	15.085.586.000,00	0,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	34.738.038.500,00	34.738.038.500,00	0,00
4	Pajak Air Permukaan (P-AP)	0,00	540.999.000,00	540.999.000,00	0,00
5	Pajak Rokok	9.433.155.600,00	50.147.449.800,00	59.580.605.400,00	0,00
Jumlah		**9.433.155.600,00**	**132.918.031.900,00**	**142.351.187.500,00**	**0,00**

Penambahan sebesar Rp132.918.031.900,00 merupakan bagian Pemkab Bondowoso atas dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi berdasarkan:

a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/293/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022;
b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/181/KPTS/013/2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Desember Tahun Anggaran 2022;

c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/180/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2023;
d. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/182/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2023;
e. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/288/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2023;
f. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/443/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2023;
g. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/292/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2023;
h. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/525/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2023;
i. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/556/KPTS/013/2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2023;
j. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/568/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2023;
k. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/688/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Bulan Oktober Dan November Tahun Anggaran 2023; dan
l. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/743/KPTS/013/2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Bulan Oktober Dan November Tahun Anggaran 2023.

Pengurangan sebesar Rp142.351.187.500,00 merupakan pendapatan transfer dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi dana bagi hasil tahun anggaran 2022	Rp	29.017.907.400,00
- Realisasi dana bagi hasil tahun anggaran 2023	Rp	113.333.280.100,00
Jumlah	**Rp**	**142.351.187.500,00**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.9.5 Piutang Lainnya	**8.776.628.388,86**	**8.824.144.388,86**

Jumlah piutang lainnya merupakan piutang yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis piutang pajak, retribusi, lain-lain PAD yang sah dan transfer. Piutang yang timbul dari perjanjian/perikatan merupakan kredit yang disalurkan kepada masyarakat dalam jangka waktu dan tingkat bunga tertentu sesuai perjanjian selama tahun 2000 sampai dengan tahun

2008. Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp8.776.628.388,86 dan Rp8.824.144.388,86 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-298 Rincian Piutang Yang Timbul Dari Perjanjian/Perikatan

No	Piutang Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a	Kredit Sapi Kereman	881.576.257,00	0,00	0,00	881.576.257,00
b	Kredit Usaha Kecil Menengah (Feeder Point)	2.365.214.118,92	0,00	0,00	2.365.214.118,92
c	Kredit Pembelian Gabah Petani	1.317.731.736,94	0,00	0,00	1.317.731.736,94
d	Kredit Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.241.513.026,00	0,00	47.516.000,00	4.193.997.026,00
e	Kredit Penguatan Modal Usaha Perikanan	18.109.250,00	0,00	0,00	18.109.250,00
	Jumlah	**8.824.144.388,86**	**0,00**	**47.516.000,00**	**8.776.628.388,86**

Saldo Piutang per 31 Desember 2023 senilai Rp8.776.628.388,86 seluruhnya merupakan piutang yang lebih dari 3 tahun terhitung dari tanggal jatuh temponya tidak dilakukan pelunasan (kualitas kredit macet). Untuk menindaklanjuti permasalahan besarnya kredit macet selain melakukan upaya penagihan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2015 telah melakukan inventarisasi piutang yang timbul dari perjanjian/perikatan untuk mengklasifikasikan permasalahan piutang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan penyelesaian piutang.

Kegiatan Inventarisasi piutang dilaksanakan oleh masing-masing OPD yang membidangi (*leading sector*) dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1) Inventarisasi Intern

   Berupa kegiatan pengumpulan data dan informasi berdasarkan dokumen pendukung piutang berupa dokumen perjanjian, dokumen agunan, catatan pembukuan dan bukti-bukti lainnya yang sah serta wawancara kepada pegawai/ petugas yang membidangi.

2) Inventarisasi Ekstern

   Melakukan klarifikasi nilai piutang kepada debitur dan pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil inventarisasi piutang kemudian OPD melakukan pengelompokan/ klasifikasi piutang ke dalam 3 kategori dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-299 Pengelompokan/Klasifikasi Piutang Dari Perjanjian/Perikatan

No	Kategori	Kriteria
1	Sesuai	Apabila debitur mengakui besarnya nilai piutang sesuai dengan yang tercatat pada neraca, atau
		OPD mempunyai keyakinan yang sangat memadai berupa dokumen perjanjian kredit, dokumen agunan, catatan pembukuan, keterangan petugas, atau bukti-bukti lainnya yang sah bahwa debitur memiliki piutang yang besarnya sesuai dengan yang tercatat pada neraca.
2	Tidak Sesuai	Apabila debitur mengakui memiliki hutang yang sama dengan nilai piutang yang tercatat pada neraca namun menyatakan telah lunas, atau
		Apabila debitur mengakui memiliki hutang namun nilainya tidak sama dengan nilai piutang yang tercatat pada neraca dan menyatakan telah lunas, atau
		Apabila debitur mengakui memiliki hutang namun nilainya tidak sama dengan nilai piutang yang tercatat pada neraca dan menyatakan belum lunas, atau
		Debitur menyatakan tidak memiliki hutang kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3	Tidak terkonfirmasi	Apabila tidak ada konfimasi/informasi dari debitur, atau
		OPD belum dapat melengkapi dokumen perjanjian kredit/catatan pembukuan/dokumen agunan/bukti-bukti lainnya yang sah sebagai pendukung nilai piutang yang tercatat pada neraca.

Hasil inventarisasi terhadap piutang per 31 Desember 2023 diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut :

Tabel 5-300 Rincian Piutang Yang Timbul Dari Perjanjian/Perikatan

No	Jenis	Sesuai (Rp)	Tidak Sesuai (Rp)	Tidak Terkonfirmasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kredit Sapi Kereman	32.117.530,00	355.459.975,00	493.998.752,00	881.576.257,00
2	Kredit Usaha Kecil Menengah (Feeder Point)	0,00	0,00	2.365.214.118,92	2.365.214.118,92
3	Kredit Pembelian Gabah Petani	0,00	502.894.715,00	814.837.021,94	1.317.731.736,94
4	Kredit Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.759.438.893,00	156.863.933,00	277.694.200,00	4.193.997.026,00
5	Kredit Penguatan Modal Usaha Perikanan	16.456.250,00	0,00	1.653.000,00	18.109.250,00
	Jumlah	**3.808.012.673,00**	**1.015.218.623,00**	**3.953.397.092,86**	**8.776.628.388,86**

1. Saldo Kredit Sapi Kereman per 31 Desember 2023 merupakan piutang atas kredit sapi kereman kepada Petani Peternak yang disalurkan dari tahun 2000 sampai dengan 2003 dan saat ini dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-301 Rincian Piutang Kredit Sapi Kereman

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2000	47.573.746,00	0,00	0,00	47.573.746,00
2	2001 (APBD)	139.415.011,00	0,00	0,00	139.415.011,00
3	2002 (APBD)	258.728.300,00	0,00	0,00	258.728.300,00
4	2002 (PAK)	344.308.200,00	0,00	0,00	344.308.200,00
5	2003	91.551.000,00	0,00	0,00	91.551.000,00
	Jumlah	**881.576.257,00**	**0,00**	**0,00**	**881.576.257,00**

2. Saldo Kredit Usaha Kecil dan Menengah (*feeder point*) per 31 Desember 2023 merupakan piutang kredit kepada pengusaha kecil dan menengah /UKM yang disalurkan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 yang saat ini dikelola oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-302 Rincian Piutang Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (*Feeder Point*)

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	APBD 2001	9.751.110,00	0,00	0,00	9.751.110,00
2	PAK 2001	50.197.718,00	0,00	0,00	50.197.718,00
3	APBD 2002	285.730.850,00	0,00	0,00	285.730.850,00
4	PAK 2002	321.633.150,00	0,00	0,00	321.633.150,00
5	MEKANISASI 2002	166.996.990,00	0,00	0,00	166.996.990,00
6	SENTRA PAK 2002	19.931.200,00	0,00	0,00	19.931.200,00
7	APBD 2003	797.956.700,00	0,00	0,00	797.956.700,00
8	APBD 2004	306.171.800,00	0,00	0,00	306.171.800,00
9	APBD 2005	285.137.500,92	0,00	0,00	285.137.500,92
10	APBD 2006	88.548.100,00	0,00	0,00	88.548.100,00
11	APBD 2007	14.599.000,00	0,00	0,00	14.599.000,00
12	APBD 2008	18.560.000,00	0,00	0,00	18.560.000,00
	Jumlah	**2.365.214.118,92**	**0,00**	**0,00**	**2.365.214.118,92**

3. Saldo Kredit Pembelian Gabah Petani per 31 Desember 2023 merupakan piutang kredit untuk penyangga stock pangan dan kelompok lumbung pangan yang disalurkan dari tahun 2002 sampai dengan 2007 dan saat ini dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-303 Rincian Piutang Kredit Pembelian Gabah Petani

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	GABAH 2002	649.138.872,64	0,00	0,00	649.138.872,64
2	GABAH 2003	295.425,00	0,00	0,00	295.425,00
3	GABAH 2004	29.159.750,00	0,00	0,00	29.159.750,00
4	GABAH 2006	59.500.000,00	0,00	0,00	59.500.000,00
5	GABAH 2007	350.086.000,00	0,00	0,00	350.086.000,00
6	LUMBUNG 2002	99.362.289,30	0,00	0,00	99.362.289,30
7	LUMBUNG PAK 2002	26.598.000,00	0,00	0,00	26.598.000,00
8	LUMBUNG 2003	103.591.400,00	0,00	0,00	103.591.400,00
	Jumlah	**1.317.731.736,94**	**0,00**	**0,00**	**1.317.731.736,94**

4. Saldo Kredit kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2023 merupakan piutang kredit kepada Koperasi dan UKM yang disalurkan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 dan saat ini dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-304 Rincian Piutang Kredit kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	KSP/USP (APBD 2002)	13.150.000,00	0,00	0,00	13.150.000,00
2	KSP/USP (PAK 2002)	201.884.160,00	0,00	0,00	201.884.160,00
3	PKM (PAK 2002)	31.495.000,00	0,00	0,00	31.495.000,00
4	KSP/USP (APBD 2003)	732.660.700,00	0,00	41.716.000,00	690.944.700,00
5	PKM (APBD 2003)	283.420.500,00	0,00	0,00	283.420.500,00
6	KSP/USP (APBD 2004)	74.563.000,00	0,00	0,00	74.563.000,00
7	PKM (APBD 2004)	398.936.000,00	0,00	0,00	398.936.000,00
8	KSP/USP (PAK 2004)	46.027.800,00	0,00	0,00	46.027.800,00
9	PKM (PAK 2004)	246.169.100,00	0,00	5.800.000,00	240.369.100,00
10	KSP/USP (APBD 2005)	280.481.933,00	0,00	0,00	280.481.933,00
11	PKM (APBD 2005)	211.290.500,00	0,00	0,00	211.290.500,00
12	KSP/USP (PAK 2005)	460.605.000,00	0,00	0,00	460.605.000,00
13	PKM (PAK 2005)	535.335.000,00	0,00	0,00	535.335.000,00
14	KSP/USP (APBD 2006)	27.049.000,00	0,00	0,00	27.049.000,00
15	PKM (APBD 2006)	437.215.833,00	0,00	0,00	437.215.833,00
16	PKM (APBD 2007)	172.316.500,00	0,00	0,00	172.316.500,00
17	PKM (APBD 2008)	88.913.000,00	0,00	0,00	88.913.000,00
	Jumlah	**4.241.513.026,00**	**0,00**	**47.516.000,00**	**4.193.997.026,00**

Pengurangan piutang sebesar Rp47.516.000,00 terdiri dari :

- Pokok piutang yang dicatat pada Penerimaan Pembiayaan	Rp	45.116.000,00
- Bunga piutang yang dicatat sebagai Lain-Lain PAD yang Sah-hasil pengelolaan Dana Bergulir	Rp	2.400.000,00
Jumlah	**Rp**	**47.516.000,00**

5. Saldo Kredit Penguatan Modal Usaha Perikanan per 31 Desember 2023 merupakan piutang kepada petani ikan penerima bantuan *feeder point* yang disalurkan pada tahun 2005 yang saat ini dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-305 Rincian Piutang Kredit Penguatan Modal Usaha Perikanan

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2005	18.109.250,00	0,00	0,00	18.109.250,00
	Jumlah	**18.109.250,00**	**0,00**	**0,00**	**18.109.250,00**

Terhadap hasil inventarisasi piutang, sampai dengan penyusunan laporan keuangan ini tidak diketahui upaya apa yang telah dilakukan oleh OPD terkait.

	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.10 Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**39.326.108.526,74**	**32.523.447.778,30**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Prosentase penyisihan piutang dibagi menjadi kualitas lancar dengan prosentase penyisihan 0%, kualitas kurang lancar dengan prosentase penyisihan 30%, kualitas diragukan dengan prosentase penyisihan 70%, dan kualitas macet dengan prosentase penyisihan 100%. Piutang yang disajikan sudah berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan/*Net Realizable Value* (NRV) dengan memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin teknis Nomor 6 Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa nilai piutang disajikan setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Saldo penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp39.326.108.526,74 dan Rp32.523.447.778,30. Mutasi penambahan dan pengurangan penyisihan piutang 2023 sebagai berikut

Tabel 5-306 Mutasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Penyisihan Piutang	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a	**Penyisihan Piutang Pendapatan**	**23.699.303.389,44**	**7.136.065.613,64**	**285.888.865,20**	**30.549.480.137,88**
1	Piutang Pajak	17.953.492.986,70	5.017.753.898,30	0,00	22.971.246.885,00
2	Piutang Retribusi	2.462.433.387,94	277.754.416,64	259.708.720,00	2.480.479.084,58
3	Piutang Lain-Lain PAD	3.283.377.014,80	1.840.557.298,70	26.180.145,20	5.097.754.168,30
b	**Penyisihan Piutang Lainnya**	**8.824.144.388,86**	**0,00**	**47.516.000,00**	**8.776.628.388,86**
1	Piutang Lainnya	8.824.144.388,86	0,00	47.516.000,00	8.776.628.388,86
	Jumlah Penyisihan Piutang	**32.523.447.778,30**	**7.136.065.613,64**	**333.404.865,20**	**39.326.108.526,74**

Rincian lebih lanjut mutasi penyisihan piutang tidak tertagih dapat dijelaskan sebagaimana Lampiran 2.

Berdasarkan daftar umur piutang, berikut tabel penyisihan piutang tak tertagih :

Tabel 5-307 Rincian Penyisihan Piutang

No.	Umur Piutang	Saldo Piutang 31 Desember 2023 (Rp)	% Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2022
1	Lancar (Belum Jatuh Tempo)	1.990.479.114,09	0%	0,00	0,00
2	Kurang Lancar (s.d 1 tahun)	19.143.796.345,00	30%	5.743.138.903,50	4.391.467.642,57
3	Diragukan (Lebih dari 1 s.d 3 tahun)	12.617.563.923,86	70%	8.832.294.746,70	8.743.249.653,67
4	Macet (Lebih dari 3 tahun)	24.750.674.876,54	100%	24.750.674.876,54	19.388.730.482,06
	Jumlah	**58.502.514.259,49**		**39.326.108.526,74**	**32.523.447.778,30**

	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.11 Beban Dibayar Dimuka	**4.120.000,00**	**54.000.000,00**

Beban dibayar di muka merupakan pengeluaran OPD yang telah dikeluarkan dari rekening kas umum daerah dan membebani pagu anggaran, namun fasilitas/barang/jasa dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati oleh OPD. Beban dibayar di muka inilah yang menyebabkan pengakuan belanja dengan pengakuan beban selain terjadinya utang belanja/utang jangka pendek lainnya.

Saldo beban dibayar di muka tahun 2023 sebesar Rp4.120.000,00 sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp54.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-308 Rincian Beban Dibayar Dimuka

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Sewa Rumah Singgah Tenaga Kerja	4.000.000,00	49.440.000,00	49.320.000,00	4.120.000,00
2	Sewa Rumah Singgah Pasien	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
	Jumlah	**54.000.000,00**	**49.440.000,00**	**99.320.000,00**	**4.120.000,00**

Nilai beban dibayar dimuka sebesar Rp4.120.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Sewa rumah singgah tenaga kerja oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan tempat singgah/tinggal sementara bagi tenaga kerja asal Kabupaten Bondowoso yang bekerja di Kota Batam. Masa sewa terhitung mulai 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Kode Rekening 5.1.02.02.05.0050 tanggal 9 Maret 2023 dengan nilai sewa sebesar Rp49.440.000,00. Penambahan beban dibayar dimuka sebesar Rp4.120.000,00 merupakan nilai sewa untuk bagian bulan Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-309 Rincian Perhitungan Beban Dibayar Dimuka Rumah Singgah Tenaga Kerja

No	Masa Sewa (Bulan)	Nilai Sewa (Rp)	Sudah Jatuh Tempo (11/12 x Nilai Sewa) (Rp)	Belum Jatuh Tempo (1/12 x Nilai Sewa) (Rp)
1	12	49.440.000,00	45.320.000,00	4.120.000,00
	Jumlah	**49.440.000,00**	**45.320.000,00**	**4.120.000,00**

b. Sewa rumah singgah pasien oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan tempat singgah/tinggal sementara bagi pasien asal Kabupaten Bondowoso yang berobat di Kota Surabaya. Masa sewa terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 4 tanggal 31 Mei 2022 dengan nilai sewa sebesar Rp100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-310 Rincian Perhitungan Beban Dibayar Dimuka Rumah Singgah Tenaga Kerja

No	Masa Sewa (Bulan)	Nilai Sewa (Rp)	Sudah Jatuh Tempo (24/24 x Nilai Sewa) (Rp)	Belum Jatuh Tempo (Nilai Sewa – Jatuh Tempo) (Rp)
1	24	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	Jumlah	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.1.12 Persediaan	**45.742.090.336,11**	**38.455.122.907,88**

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp45.742.090.336,11 dan Rp38.455.122.907,88 terdiri dari :

Tabel 5-311 Mutasi Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Barang Pakai Habis	38.454.618.907,88	245.187.093.484,93	237.899.622.056,70	45.742.090.336,11
2	Barang Tak Habis Pakai	504.000,00	312.011.200,00	312.515.200,00	0,00
3	Barang Bekas Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**38.455.122.907,88**	**245.499.104.684,93**	**238.212.137.256,70**	**45.742.090.336,11**

Persediaan per 31 Desember 2023 dinilai berdasarkan inventarisasi fisik (sesuai SAP Pernyataan Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan) dan laporan mutasi persediaan per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	38.455.122.907,88
Penambahan Tahun 2023	Rp	245.499.104.684,93
Pengurangan Tahun 2023	Rp	238.212.137.256,70
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**45.742.090.336,11**

Penjelasan untuk masing-masing penambahan persediaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan persediaan sebesar Rp245.499.104.684,93 terdiri dari :

a. Belanja barang persediaan	Rp	222.106.083.095,50
b. Penerimaan dari hibah	Rp	16.999.109.789,29
c. Belanja non barang persediaan	Rp	1.509.858.665,00
d. Mutasi masuk	Rp	1.410.068.260,30
e. Persediaan diterima dimuka	Rp	3.132.656.710,84
f. Reklasifikasi	Rp	316.433.264,00
g. Koreksi nilai saldo awal persediaan	Rp	24.894.900,00
Jumlah	**Rp**	**245.499.104.684,93**

Penjelasan untuk masing-masing penambahan persediaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Barang Persediaan sebesar Rp222.106.083.095,50;
   Jumlah tersebut merupakan penambahan persediaan yang berasal dari realisasi belanja barang dan jasa yang dianggarkan pada APBD. Dalam pelaksanaannya, realisasi belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2023 tidak seluruhnya menambah persediaan karena didalamnya terdapat barang yang bukan persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-312 Belanja Barang Dan Jasa Yang Menjadi Persediaan

No	Uraian	Realisasi Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Pengurangan (Rp)	Belanja Barang Persediaan (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	223.385.760.224,63	1.287.970.629,13	222.097.789.595,50

No	Uraian	Realisasi Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Pengurangan (Rp)	Belanja Barang Persediaan (Rp)
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	8.293.500,00	0,00	8.293.500,00
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**223.394.053.724,63**	**1.287.970.629,13**	**222.106.083.095,50**

Selisih antara realisasi belanja barang persediaan LRA dengan persediaan yang diakui dari belanja barang dan jasa disebabkan adanya belanja barang non persediaan, pembayaran utang dan kelebihan pembayaran (piutang) yang bersumber dana dari realisasi belanja barang dan jasa 2023 sebesar Rp1.287.970.629,13 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-313 Rincian Belanja Barang Persediaan Yang Tidak Diakui sebagai Persediaan

No	Uraian	Belanja Barang Non Persediaan (Rp)	Pengurangan		
			Utang (Rp)	Piutang (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	323.341.445,00	926.840.774,56	37.788.409,57	1.287.970.629,13
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**323.341.445,00**	**926.840.774,56**	**37.788.409,57**	**1.287.970.629,13**

Pencatatan penambahan persediaan dari belanja barang persediaan sebesar Rp222.106.083.095,50 pada Laporan Mutasi Persediaan Pemerintah Kabupaten Bondowoso disesuaikan dengan klasifikasi persediaan riilnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-314 Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Belanja Barang Persediaan (Rp)	Reklasifikasi		Belanja Barang Persediaan Setelah Reklasifikasi (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Belanja Barang Pakai Habis	222.097.789.595,50	4.495.074.864,00	4.798.792.564,00	221.794.071.895,50
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	8.293.500,00	303.717.700,00	0,00	312.011.200,00
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**222.106.083.095,50**	**4.798.792.564,00**	**4.798.792.564,00**	**222.106.083.095,50**

b. Penerimaan dari Hibah sebesar Rp16.999.109.789,29;

Jumlah tersebut merupakan penambahan persediaan karena adanya hibah barang persediaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

- Bahan	Rp	1.220.490.587,20
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp	591.910.689,75
- Obat-Obatan	Rp	11.540.132.900,34
- Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan	Rp	3.645.791.822,00
- Natura dan Pakan	Rp	783.790,00
Jumlah	Rp	**16.999.109.789,29**

Penerimaan hibah sebesar Rp16.999.109.789,29 tersebar pada beberapa OPD sebagai berikut:

Tabel 5-315 Rincian Penerimaan Hibah

No	OPD	Nilai (Rp)	Instansi Pemberi
1	Dinas Kesehatan	11.214.795.240,29	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2	Badan Penanggulangan Bencana	842.090.370,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	1.636.226.442,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	463.281.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Dinas Peternakan Dan Perikanan	2.842.716.737,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
	Jumlah	**16.999.109.789,29**	

Rincian lebih lanjut terkait hibah ini terdapat pada lampiran 3 s.d 6

c. Belanja Non Barang Persediaan sebesar Rp1.509.858.665,00;

Jumlah tersebut merupakan perolehan persediaan yang berasal dari belanja non persediaan namun memenuhi kriteria sebagai persediaan sehingga direklasifikasi ke persediaan sebagai berikut:

- Bahan	Rp	10.100.000,00
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp	22.800.000,00
- Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan	Rp	750.285.895,00
- Persediaan Dalam Proses	Rp	726.672.770,00
Jumlah	Rp	**1.509.858.665,00**

d. Mutasi masuk sebesar Rp1.410.068.260,30;

Jumlah tersebut merupakan penambah persediaan karena adanya perpindahan persediaan antar perangkat daerah (mutasi masuk) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahan	Rp	320.390.050,00
- Obat-Obatan	Rp	1.089.678.210,30
Jumlah	Rp	**1.410.068.260,30**

Mutasi masuk persediaan tersebut merupakan penerimaan persediaan berupa bahan lainnya dan obat-obatan oleh RSUD dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dengan berita acara serah terima nomor:050/11/430.9.3.26/2023 tanggal 31 Desember 2023.

e. Persediaan diterima dimuka sebesar Rp3.132.656.710,84;

Jumlah tersebut merupakan penambah persediaan karena pengakuan utang persediaan Tahun 2023. Persediaan yang telah diterima oleh OPD tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum dilakukan pembayaran kepada penyedia barang dengan rincian sebagai berikut :

- Bahan	Rp	1.664.202.709,95
- Obat-Obatan	Rp	1.279.192.000,89
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	Rp	36.937.000,00
- Natura dan Pakan	Rp	152.325.000,00
Jumlah	Rp	**3.132.656.710,84**

f. Reklasifikasi sebesar Rp316.433.264,00
Jumlah tersebut merupakan reklasifikasi persediaan dalam proses pada Badan Penanggulangan Bencana yang telah selesai pengerjaannya sehingga direklasifikasi ke persediaan untuk dijual/diserahkan dan sudah diserahkan kepada masyarakat/Pihak Lainnya.

g. Koreksi nilai saldo awal persediaan sebesar Rp24.894.900,00
Jumlah tersebut merupakan penambah persediaan karena adanya koreksi nilai saldo awal Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Tahun 2023 berupa berupa hasil pemijahan ikan yang belum dicatat dalam laporan persediaan pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp23.423.850 dan kekurangan pencatatan masker gas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.471.050,00.

2. Pengurangan persediaan sebesar Rp238.212.137.256,70terdiri dari :

a.	Pemakaian barang persediaan	Rp	236.254.201.630,60
b.	Mutasi keluar	Rp	1.410.068.260,30
c.	Kedaluwarsa tahun berjalan	Rp	213.903.401,80
d.	Reklasifikasi	Rp	316.433.264,00
e.	Koreksi nilai saldo awal persediaan	Rp	17.530.700,00
	Jumlah	Rp	**238.212.137.256,70**

Penjelasan untuk masing-masing pengurangan persediaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pemakaian barang persediaan sebesar Rp236.254.201.630,60;
Jumlah tersebut merupakan pemakaian/penggunaan persediaan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang telah dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat selama tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-316 Rincian Pemakaian Persediaan Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bahan	43.124.983.969,41
2	Suku Cadang	3.346.564.647,00
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	38.499.333.959,64
4	Obat-Obatan	34.746.122.562,22
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	84.120.155.695,43
6	Natura dan Pakan	32.104.525.596,90
7	Pipa	312.515.200,00
	Jumlah	**236.254.201.630,60**

b. Mutasi keluar sebesar Rp1.410.068.260,30;
Jumlah tersebut merupakan pengurangan persediaan karena adanya perpindahan persediaan antar perangkat daerah (mutasi keluar) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahan	Rp	320.390.050,00
- Obat-Obatan	Rp	1.089.678.210,30
Jumlah	Rp	**1.410.068.260,30**

Mutasi masuk persediaan tersebut merupakan pemberian persediaan berupa bahan lainnya dan obat-obatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso kepada RSUD dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso dengan berita acara serah terima nomor:050/11/430.9.3.26/2023 tanggal 31 Desember 2023.

c. Kedaluwarsa tahun berjalan sebesar Rp213.903.401,80;

Jumlah tersebut merupakan persediaan yang kedaluwarsa/*expired* Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-317 Rincian Persediaan Yang Kedaluwarsa/*Expired* Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bahan	5.847.369,60
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	127.244.246,01
3	Obat-Obatan	80.811.786,19
	Jumlah	**213.903.401,80**

d. Reklasifikasi sebesar Rp316.433.264,00

Jumlah tersebut merupakan reklasifikasi persediaan dalam proses pada Badan Penanggulangan Bencana yang telah selesai pengerjaannya sehingga direklasifikasi ke persediaan untuk dijual/diserahkan dan sudah diserahkan kepada masyarakat/Pihak Lainnya.

e. Koreksi nilai saldo awal persediaan sebesar Rp17.530.700,00

Jumlah tersebut merupakan pengurang persediaan karena adanya koreksi nilai persediaan Tahun 2022 berupa Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5.3.1.1.11.1 Barang Pakai Habis

Mutasi atas saldo Barang Pakai Habis per 31 Desember 2023 sebesar Rp45.742.090.336,11 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5-318 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Bahan Habis Pakai

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Bahan	16.735.988.467,07	44.247.960.929,49	43.451.221.389,01	17.532.728.007,55
2	Suku Cadang	5.000.000,00	3.344.014.647,00	3.346.564.647,00	2.450.000,00
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	6.945.554.062,82	37.388.238.207,75	38.626.578.205,65	5.707.214.064,92
4	Obat-Obatan	12.955.725.387,59	38.536.311.294,26	35.916.612.558,71	15.575.424.123,14
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	1.128.119.520,00	84.452.548.488,43	84.137.686.395,43	1.442.981.613,00
6	Natura dan Pakan	367.798.206,40	32.210.589.596,00	32.104.525.596,90	473.862.205,50
7	Persediaan Dalam Proses	316.433.264,00	5.007.430.322,00	316.433.264,00	5.007.430.322,00
	Jumlah	**38.454.618.907,88**	**245.187.093.484,93**	**237.899.622.056,70**	**45.742.090.336,11**

Mutasi penambahan barang pakai habis selama Tahun 2023 sebesar Rp245.187.093.484,93 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penambahan bahan tahun berjalan sebesar Rp44.247.960.929,49 berasal dari :
   a. Realisasi belanja barang pakai habis-bahan sebesar Rp41.032.777.582,34;
   b. Penerimaan hibah bahan sebesar Rp1.220.490.587,20 dengan rincian sebagaimana Lampiran 3;
   c. Belanja non barang persediaan sebesar Rp10.100.000,00 merupakan perolehan bahan yang direalisasikan sebagai belanja non persediaan;
   d. Mutasi masuk bahan sebesar Rp320.390.050,00 merupakan penambah persediaan karena adanya perpindahan persediaan antar perangkat daerah; dan
   e. Persediaan diterima dimuka sebesar Rp1.664.202.709,95 merupakan penambah bahan karena pengakuan utang persediaan Tahun 2023.

2. Penambahan suku cadang tahun berjalan sebesar Rp3.344.014.647,00 berasal dari realisasi belanja barang pakai habis-suku cadang.
3. Penambahan alat/bahan untuk kegiatan kantor tahun berjalan sebesar Rp37.388.238.207,75 berasal dari:
   a. Realisasi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp36.773.527.518,00;
   b. Penerimaan hibah alat/bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp591.910.689,75 sebagaimana Lampiran 4; dan
   c. Belanja non barang persediaan sebesar Rp22.800.000,00 merupakan perolehan alat/bahan untuk kegiatan kantor yang direalisasikan sebagai belanja non persediaan;
4. Penambahan obat-obatan tahun berjalan sebesar Rp38.536.311.294,26 berasal dari:
   a. Realisasi belanja barang pakai habis – obat-obatan sebesar Rp24.627.308.182,73;
   b. Penerimaan hibah obat-obatan sebesar Rp11.540.132.900,34 dengan rincian sebagaimana Lampiran 5;
   c. Mutasi masuk obat-obatan sebesar Rp1.089.678.210,30 merupakan penambah persediaan karena adanya perpindahan persediaan antar perangkat daerah; dan
   d. Persediaan diterima dimuka sebesar Rp1.279.192.000,89 merupakan penambah obat-obatan karena pengakuan utang persediaan Tahun 2023.
5. Penambahan persediaan untuk dijual/diserahkan tahun berjalan sebesar Rp84.452.548.488,43 terdiri dari :
   a. Realisasi belanja barang pakai habis – persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp79.678.205.607,43;
   b. Penerimaan hibah persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp3.645.791.822,00 dengan rincian sebagaimana Lampiran 6;
   c. Belanja non barang persediaan sebesar Rp750.285.895,00 merupakan perolehan persediaan untuk dijual/diserahkan yang direalisasikan sebagai belanja non persediaan;
   d. Persediaan diterima dimuka sebesar Rp36.937.000,00 merupakan penambah persediaan untuk dijual/diserahkan karena pengakuan utang persediaan Tahun 2023; dan
   e. Reklasifikasi sebesar Rp316.433.264,00 merupakan reklasifikasi persediaan dalam proses yang telah selesai menjadi persediaan untuk dijual/diserahkan.
   f. Koreksi nilai saldo awal persediaan sebesar Rp24.894.900,00 merupakan penambah persediaan karena adanya koreksi nilai saldo awal Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Tahun 2023 berupa hasil pemijahan ikan yang belum dicatat dalam laporan persediaan sebesar Rp23.423.850 dan kekurangan pencatatan masker gas sebesar Rp1.471.050,0 .
6. Penambahan natura dan pakan tahun berjalan sebesar Rp32.210.589.596,00 terdiri dari:
   a. Realisasi belanja barang pakai habis – natura dan pakan sebesar Rp 32.057.480.806,00;
   b. Penerimaan hibah natura dan pakan sebesar Rp783.790,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-319 Rincian Hibah Natura dan Pakan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
1	Biskuit MT- Balita	641.900,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	85/APBN/P/VII/2023	Dinas Kesehatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
2	Biskuit MT- Ibu Hamil	141.890,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	85/APBN/P/VII/2023	Dinas Kesehatan
	JUMLAH	**783.790,00**			

c. Persediaan diterima dimuka sebesar Rp152.325.000,00 merupakan penambah Natura dan Pakan karena pengakuan utang persediaan Tahun 2023.

7. Penambahan persediaan dalam proses tahun berjalan sebesar Rp5.007.430.322,00 terdiri dari:
   a. Realisasi belanja barang pakai habis-persediaan dalam proses sebesar Rp4.280.757.552,00; dan
   b. Belanja non barang persediaan sebesar Rp726.672.770,00 merupakan perolehan persediaan dalam proses yang direalisasikan sebagai belanja non persediaan;

Sedangkan mutasi pengurangan barang pakai habis selama Tahun 2023 sebesar Rp237.899.622.056,70 terdiri dari:

1. Pengurangan bahan tahun berjalan sebesar Rp43.451.221.389,01 terdiri dari:
   a. Pemakaian persediaan bahan sebesar Rp43.124.983.969,41;
   b. Mutasi keluar bahan sebesar Rp320.390.050,00 merupakan pengurangan persediaan karena adanya perpindahan persediaan antar perangkat daerah; dan
   c. Kedaluwarsa tahun berjalan sebesar Rp5.847.369,60 merupakan bahan yang kedaluwarsa/*expired* Tahun 2022.
2. Pengurangan suku cadang tahun berjalan sebesar Rp3.346.564.647,00 merupakan pemakaian suku cadang Tahun 2023.
3. Pengurangan alat/bahan untuk kegiatan kantor tahun berjalan sebesar Rp38.626.578.205,65 terdiri dari:
   a. Pemakaian persediaan bahan sebesar Rp38.499.333.959,64; dan
   b. Kedaluwarsa tahun berjalan sebesar Rp127.244.246,01 merupakan alat/bahan untuk kegiatan kantor yang kedaluwarsa/expired Tahun 2023.
4. Pengurangan obat-obatan tahun berjalan sebesar Rp35.916.612.558,71 terdiri dari:
   a. Pemakaian persediaan obat-obatan sebesar Rp34.746.122.562,22;
   b. Mutasi keluar obat-obatan sebesar Rp1.089.678.210,30 merupakan pengurangan persediaan karena adanya perpindahan persediaan antar perangkat daerah; dan
   c. Kedaluwarsa tahun berjalan sebesar Rp80.811.786,19 merupakan obat-obatan yang kedaluwarsa/expired Tahun 2023; dan
5. Pengurangan persediaan untuk dijual/diserahkan tahun berjalan sebesar Rp84.137.686.395,43 terdiri dari:
   a. Penyerahan persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat dan Lainnya sebesar Rp84.120.155.695,43; dan
   b. Koreksi nilai persediaan Tahun 2022 berupa Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp17.530.700,00.
8. Pengurangan natura dan pakan tahun berjalan sebesar Rp32.104.525.596,90 merupakan pemakaian natura dan pakan Tahun 2023.

9. Pengurangan persediaan dalam proses tahun berjalan sebesar Rp316.433.264,00 merupakan reklasifikasi persediaan dalam proses yang telah selesai menjadi persediaan untuk dijual/diserahkan.

Selain barang pakai habis di atas, terdapat barang pakai habis yang sudah *expired* dan telah dikeluarkan dari penyajian neraca per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-320 Barang Pakai Habis Yang Sudah Kedaluwarsa/*Expired*

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Bahan	240.803.053,56	5.847.369,60	240.803.053,56	5.847.369,60
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	138.553.370,45	127.244.246,01	138.553.370,45	127.244.246,01
3	Obat-Obatan	99.500.504,11	80.811.786,19	99.500.504,11	80.811.786,19
4	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	12.353.000,00	0,00	12.353.000,00	0,00
	Jumlah	**491.209.928,12**	**213.903.401,80**	**491.209.928,12**	**213.903.401,80**

Tabel 5-321 Rincian Persediaan Yang Kedaluwarsa/*Expired* Per SKPD

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	79.890.530,31
2	RSUD dr. H. Koesnadi	19.897.388,59
3	Dinas Lingkungan Hidup	14.154.000,00
4	Dinas Perhubungan	85.198.363,20
5	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	6.018.719,70
6	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga	6.992.400,00
7	Dinas Peternakan Dan Perikanan	1.752.000,00
	Jumlah	**213.903.401,80**

5.3.1.1.11.2 Barang Tak Habis Pakai

Mutasi atas saldo Barang Tak Habis Pakai per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5-322 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Bahan Habis Pakai

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pipa	504.000,00	312.011.200,00	312.515.200,00	0,00
	Jumlah	504.000,00	312.011.200,00	312.515.200,00	0,00

Mutasi penambahan barang tak pakai habis selama Tahun 2023 sebesar Rp312.011.200,00 merupakan realisasi belanja barang tak habis pakai – pipa Tahun 2023. Sedangkan mutasi pengurangan barang tak pakai habis selama Tahun 2023 sebesar Rp312.515.200,00 merupakan pemakaian barang tak pakai habis – pipa selama Tahun 2023.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang	**67.462.016.512,76**	**40.039.713.370,76**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen	**0,00**	**0,00**

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 adalah sebesar nihil.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.2.2 Investasi Permanen	**67.462.016.512,76**	**40.039.713.370,76**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemda	**67.462.016.512,76**	**40.039.713.370,76**

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp67.462.016.512,76. Nilai tersebut berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada beberapa perusahaan, yang terdiri dari:

Tabel 5-323 Rincian Penyertaan Modal Pemda

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Penyertaan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim	21.801.839.250,00	0,00	0,00	21.801.839.250,00
2	Penyertaan pada PDAM Kabupaten Bondowoso	16.567.696.257,00	27.422.303.142,00	0,00	43.989.999.399,00
3	Penyertaan pada PT Bondowoso Gemilang	1.670.177.863,76	0,00	0,00	1.670.177.863,76
	Jumlah	**40.039.713.370,76**	**27.422.303.142,00**	**0,00**	**67.462.016.512,76**

Dasar hukum penyertaan Modal Pemda pada Penyertaan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim, penyertaan pada PDAM dan PT Bondowoso Gemilang Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

Tabel 5-324 Dasar Hukum Penyertaan Modal Pemda

No	Penyertaan Modal	31 Desember 2022 (Rp)	Dasar Hukum	Metode Penilaian
1	Penyertaan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim	21.801.839.250,00	Perda No 10 Th 2011	Biaya
2	Penyertaan pada PDAM Kabupaten Bondowoso	43.989.999.399,00	Perda No 3 Th 2015	Ekuitas
3	Penyertaan pada PT Bondowoso Gemilang	1.670.177.863,76	Perda No 1 Th 2017	Ekuitas
	Jumlah	**67.462.016.512,76**		

Penjelasan untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada masing-masing perusahaan dan BUMD adalah sebagai berikut :

1. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tidak mengalami perubahan dengan jumlah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.801.839.250,00 dalam bentuk surat kolektif saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. seri A Nomor 30 Tanggal 10 Juli 2012 yang mewakili 87.207.357 lembar saham biasa atas nama Pemda Tingkat II Kabupaten Bondowoso dari nomor 10894959490 s/d 10982166846.

2. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada PDAM per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp43.989.999.399,00 yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp27.422.303.142,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp16.567.696.257,00. Perhitungan nilai investasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan pada laporan keuangan PDAM Tahun 2023 yang sudah diaudit (*Audited*), yaitu dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5-325 Perhitungan Penyertaan Modal Pada PDAM

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Saldo Awal Penyertaan Modal	16.567.696.257,00	19.937.782.363,00
2	Koreksi Saldo Awal	27.213.359.543,00	0,00
3	Bagian Laba	1.483.707.310,00	1.698.293.100,00
4	Koreksi Penyertaan Modal 2023	(1.274.763.711,00)	0,00
	Jumlah	**43.989.999.399,00**	**21.636.075.463,00**
3	Akumulasi Kerugian	0,00	(5.068.379.206,00)
	Saldo	**43.989.999.399,00**	**16.567.696.257,00**

3. Penyertaan pada PT Bondowoso Gemilang merupakan penyertaan modal/investasi kepada BUMD PT Bondowoso Gemilang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang dan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/625/430.4.2/2018 tentang Realisasi Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang (Perseroda) Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah merealisasikan penyertaan modal kepada PT Bondowoso Gemilang melalui SP2D Nomor : 1.01638/SP2D/2018 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp2.961.849.000,00.

   Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada PT Bondowoso Gemilang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.670.177.863,76 sedangkan Laporan Keuangan PT Bondowoso Gemilang Tahun 2023 sampai dengan penyusunan laporan keuangan Tahun 2023 belum diperoleh.

   Penjelasan atas jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada PT Bondowoso Gemilang 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-326 Rincian Penyertaan Modal Pemda Pada PT Bondowoso Gemilang

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Penyertaan Pemerintah Daerah	**2.964.665.659,17**	**2.964.665.659,17**
	a. SP2D Nomor : 1.01638/SP2D/2018 tanggal 23 Oktober 2018	2.961.849.000,00	2.961.849.000,00
	b. Koreksi atas laba thn 2018	2.816.659,17	2.816.659,17
	c. Koreksi saldo awal 2020	(0,76)	(0,76)
	d. Koreksi saldo awal 2021	0,76	0,76
2.	Akumulasi Kerugian	**(1.294.487.795,41)**	**(1.294.487.795,41)**
	a. Rugi thn 2019	(277.933.093,41)	(277.933.093,41)
	b. Rugi thn 2020	(187.012.320,00)	(187.012.320,00)
	c. Rugi thn 2021	(622.266.485,00)	(622.266.485,00)
	d. Rugi thn 2022	(207.275.897,00)	(207.275.897,00)
	Jumlah Penyertaan Modal Pemda	**1.670.177.863,76**	**1.670.177.863,76**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.3 Aset Tetap	**4.831.913.335.015,59**	**4.649.074.510.672,56**

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bondowoso per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.831.913.335.015,59 bila dibandingkan dengan aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.649.074.510.672,56 mengalami kenaikan sebesar Rp182.838.824.343,03. Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Tahun 2023 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	4.649.074.510.672,56
Penambahan Tahun 2023	Rp	198.052.270.401,03
Jumlah	**Rp**	**4.847.126.781.073,59**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	15.213.446.058,00
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**4.831.913.335.015,59**

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bondowoso per 31 Desember 2023 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-327 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	356.992.452.776,00	14.568.384.970,00	4.075.706.400,00	367.485.131.346,00
2	Peralatan dan Mesin	882.762.175.492,04	82.280.691.793,00	10.068.304.013,00	954.974.563.272,04
3	Gedung dan Bangunan	1.065.048.895.661,77	28.228.871.483,30	1.069.435.645,00	1.092.208.331.500,07
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.257.980.446.596,54	54.871.573.111,73	0,00	2.312.852.019.708,27
5	Aset Tetap Lainnya	85.745.196.946,21	8.288.591.890,00	0,00	94.033.788.836,21
6	Konstruksi dlm Pengerjaan	545.343.200,00	9.814.157.153,00	0,00	10.359.500.353,00
Jumlah Aset Tetap		**4.649.074.510.672,56**	**198.052.270.401,03**	**15.213.446.058,00**	**4.831.913.335.015,59**

Penjelasan mutasi penambahan aset tetap Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan aset tetap sebesar Rp198.052.270.401,03 terdiri dari :

a. Belanja modal *netto*	Rp	157.320.648.167,03
b. Penerimaan dari hibah	Rp	30.489.600.511,00
c. Belanja barang dan jasa	Rp	23.246.725,00
d. Koreksi aset tetap	Rp	16.337.200,00
e. Reklasifikasi	Rp	9.814.157.153,00
f. Mutasi masuk	Rp	388.280.645,00
Jumlah	**Rp**	**198.052.270.401,03**

a. Belanja Modal *netto* sebesar Rp157.320.648.167,03;

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal yang mengakibatkan adanya penambahan aset tetap. Dalam pelaksanaannya, realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2023 (*bruto*) tidak seluruhnya menambah aset tetap karena didalamnya terdapat barang-barang yang tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset tetap misalnya barang tersebut dihibahkan kepada pihak ketiga, nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi dan tergolong sebagai barang dan jasa. Perbedaan antara realisasi belanja modal *bruto* dan belanja modal *netto* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-328 Perbedaan Realisasi Belanja Modal *Bruto* dan *Netto*

No	Uraian	Realisasi Belanja Modal *Bruto* (Rp)	Realisasi Belanja Modal *Netto* (Rp)	Selisih (Rp)
1	Tanah	94.915.970,00	94.915.970,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	82.098.298.764,00	81.021.072.443,00	1.077.226.321,00
3	Gedung dan Bangunan	20.570.157.238,30	20.558.158.238,30	11.999.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	58.084.684.454,73	47.357.909.625,73	10.726.774.829,00
5	Aset Tetap Lainnya	8.469.163.161,00	8.288.591.890,00	180.571.271,00
Jumlah		**169.317.219.588,03**	**157.320.648.167,03**	**11.996.571.421,00**

Selisih antara realisasi belanja modal *bruto* dan *netto* sebesar Rp11.996.571.421,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-329 Rincian Selisih Realisasi Belanja Modal *Bruto* dan *Netto*

No	Uraian	Rincian Selisih				
		Extracomptable	**Piutang**	**Belanja Barjas**	**Lainnya**	**Jumlah**
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.042.826.321,00	0,00	34.400.000,00	0,00	1.077.226.321,00
3	Gedung dan Bangunan	11.999.000,00	0,00	0,00	0,00	11.999.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	183.918.456,00	728.699.220,00	9.814.157.153,00	10.726.774.829,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	180.571.271,00	180.571.271,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.054.825.321,00**	**183.918.456,00**	**763.099.220,00**	**9.994.728.424,00**	**11.996.571.421,00**

Pencatatan penambahan aset tetap dari belanja modal sebesar Rp157.320.648.167,03 pada Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Kabupaten Bondowoso disesuaikan dengan klasifikasi aset riilnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-330 Tabel Reklasifikasi Belanja Modal

No	Uraian	Belanja Modal Aset Tetap (Rp)	Reklasifikasi		Belanja Aset Tetap Setelah Reklasifikasi
			Tambah	**Kurang**	
1	Tanah	94.915.970,00	0,00	0,00	94.915.970,00
2	Peralatan dan Mesin	81.021.072.443,00	273.874.400,00	263.912.150,00	81.031.034.693,00
3	Gedung dan Bangunan	20.558.158.238,30	186.193.717,00	186.193.717,00	20.558.158.238,30
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.357.909.625,73	0,00	9.962.250,00	47.347.947.375,73
5	Aset Tetap Lainnya	8.288.591.890,00	0,00	0,00	8.288.591.890,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**157.320.648.167,03**	**460.068.117,00**	**460.068.117,00**	**157.320.648.167,03**

b. Penerimaan aset tetap bersumber dari hibah sebesar Rp30.489.600.511,00.

Jumlah tersebut merupakan penambahan aset tetap karena adanya hibah pemerintah pusat dan pihak pengembang perumahan dalam rangka penyerahan PSU. Prasarana, sarana, dan utilitas selanjutnya disingkat PSU adalah fasilitas yang disediakan oleh setiap pengembang perumahan dan permukiman. Adapun rincian aset dari hibah adalah sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Pemerintah Pusat (Rp)	PSU (Rp)	Total (Rp)
1.	Tanah	0,00	14.473.469.000,00	14.473.469.000,00
2.	Alat Besar	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
3.	Alat Angkutan	521.525.000,00	0,00	521.525.000,00
4.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.599.730,00	0,00	3.599.730,00
5.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	443.000.000,00	0,00	443.000.000,00
6.	Alat Laboratorium	42.468.265,00	0,00	42.468.265,00
7.	Alat Keselamatan Kerja	100.905.405,00	0,00	100.905.405,00
8.	Bangunan Gedung	4.686.869.600,00	2.595.563.000,00	7.282.432.600,00
9.	Jalan dan Jembatan	0,00	5.000.293.900,00	5.000.293.900,00
10.	Bangunan Air	0,00	343.278.000,00	343.278.000,00
11.	Jaringan	2.178.628.611,00	0,00	2.178.628.611,00
	Jumlah	**8.076.996.611,00**	**22.412.603.900,00**	**30.489.600.511,00**

c. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp23.246.725,00.

Jumlah tersebut merupakan perolehan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa namun memenuhi kriteria sebagai aset tetap sehingga direklasifikasi ke aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

a. Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	12.025.000,00
b. Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	6.000.000,00
c. Komputer	Rp	2.574.900,00
d. Alat Keselamatan Kerja	Rp	1.221.600,00
e. Jaringan	Rp	1.425.225,00
Jumlah	Rp	**23.246.725,00**

d. Koreksi aset tetap sebesar Rp16.337.200,00

Jumlah tersebut merupakan penambahan aset tetap yang berasal dari reklasifikasi barang persediaan (koreksi saldo awal) berupa alat pertanian.

e. Reklasifikasi sebesar Rp9.814.157.153,00

Jumlah tersebut merupakan reklasifikasi dari Jalan dan Jembatan menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

f. Mutasi Masuk sebesar Rp388.280.645,00.

Jumlah tersebut merupakan penambah aset tetap karena adanya perpindahan aset tetap antar (mutasi masuk) berupa bangunan gedung yang dibangun/dipelihara oleh Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang dimana bangunan gedung tersebut tercatat pada Kecamatan Bondowoso sebesar Rp191.783.045,00 dan Kecamatan Cermee sebesar Rp196.497.600,00 sehingga direklasifikasi pada kedua OPD tersebut.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menerima bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp5.776.489.992,00 dan *Block Grand* senilai Rp7.488.612.672,00 pada tahun 2018. Seluruh barang tersebut belum dicatat sebagai barang milik daerah karena belum ada dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

Tabel 5-331 Hibah/Bantuan Yang Belum Mendapatkan BAST

No	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Persediaan	1.356.983.000,00	0,00	1.356.983.000,00
2	Aset Tetap	3.781.346.992,00	3.605.748.672,00	7.387.095.664,00
3	Ekstracomptable	90.796.500,00	183.660.000,00	274.456.500,00
4	Bukan Aset	547.363.500,00	3.699.204.000,00	4.246.567.500,00
	Jumlah	**5.776.489.992,00**	**7.488.612.672,00**	**13.265.102.664,00**

2. Pengurangan aset tetap sebesar Rp15.213.446.058,00 terdiri dari :

a. Koreksi Aset Tetap	Rp	64.000.000,00
b. Dimusnahkan	Rp	4.085.595.374,00
c. Dijual	Rp	4.680.842.910,00
d. Hibah Keluar	Rp	1.247.769.549,00
e. Mutasi Keluar	Rp	388.280.645,00
f. Reklasifikasi ke Properti Investasi	Rp	4.746.957.580,00
Jumlah	Rp	**15.213.446.058,00**

Penjelasan mutasi pengurangan aset tetap Tahun 2023 sebesar Rp15.213.446.058,00 adalah sebagai berikut:

a. Koreksi Aset Tetap sebesar Rp64.000.000,00;

Jumlah tersebut merupakan pengurangan aset tetap yang berasal dari aset tetap milik daerah dengan tindak lanjut koreksi berupa alat angkutan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

b. Dimusnahkan sebesar Rp4.085.595.374,00;

Jumlah tersebut merupakan pengurangan aset tetap yang berasal dari aset tetap milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dengan rincian sebagai berikut:

1.	Alat Besar	Rp	6.000.000,00
2.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	1.294.450.671,00
3.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp	996.857.479,00
4.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	1.065.000,00
5.	Komputer	Rp	1.780.787.224,00
6.	Peralatan Olah Raga	Rp	5.835.000,00
7.	Monumen	Rp	600.000,00
	Jumlah	**Rp**	**4.085.595.374,00**

c. Dijual sebesar Rp4.680.842.910,00;

Jumlah tersebut merupakan pengurangan aset tetap yang berasal dari aset tetap milik daerah dengan tindak lanjut penjualan berupa alat angkutan.

d. Hibah Keluar sebesar Rp1.247.769.549,00;

Jumlah tersebut merupakan pengurangan aset tetap yang berasal dari aset tetap milik daerah dengan tindak lanjut hibah berupa tanah sebesar Rp9.303.820,00 dan alat angkutan sebesar Rp1.238.465.729,00.

e. Mutasi Keluar sebesar Rp388.280.645,00;

Jumlah tersebut merupakan pengurang aset tetap karena adanya perpindahan aset tetap antar perangkat daerah (mutasi keluar) berupa bangunan gedung yang dibangun/dipelihara oleh Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang dimana bangunan gedung tersebut tercatat pada Kecamatan Bondowoso sebesar Rp191.783.045,00 dan Kecamatan Cermee sebesar Rp196.497.600,00 sehingga direklasifikasi pada kedua OPD tersebut.

f. Reklasifikasi ke Properti Investasi sebesar Rp4.746.957.580,00;

Jumlah tersebut merupakan pengurang aset tetap karena aset tersebut berdasarkan kebijakan akuntansi memenuhi kriteria menjadi properti investasi sehingga direklasifikasi ke Properti Investasi dengan rincian sebagai berikut :

1.	Tanah	Rp	4.066.402.580,00
2.	Bangunan Gedung	Rp	680.555.000,00
	Jumlah	**Rp**	**4.746.957.580,00**

	31 Desember 2023 (Rp)	**31 Desember 2022 (Rp)**
5.3.1.3.1 Tanah	**367.485.131.346,00**	**356.992.452.776,00**

Mutasi penambahan dan pengurangan tanah Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	356.992.452.776,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	14.568.384.970,00
Jumlah	**Rp**	**371.560.837.746,00**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	4.075.706.400,00
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**367.485.131.346,00**

1. Penambahan Tanah sebesar Rp14.568.384.970,00 terdiri dari :

a. Belanja modal *netto*	Rp	94.915.970,00
b. Penerimaan dari hibah	Rp	14.473.469.000,00
Jumlah	**Rp**	**14.568.384.970,00**

Penjelasan untuk masing-masing penambahan tanah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal *netto* sebesar Rp94.915.970,00;

Jumlah tersebut merupakan penambahan tanah dari realisasi belanja modal yang dianggarkan pada APBD.

b. Penerimaan dari hibah sebesar Rp14.473.469.000,00;

Jumlah tersebut merupakan penambahan aset tetap karena adanya hibah Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) dari pengembang perumahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-332 Rincian Hibah Tanah Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	Lokasi	Nomor BAST
1.	Tanah Untuk Jalan	1.001.800.000,00	PT. Bakti Gumilang Livena	River Side Garden	050/1421/430.9.12/2023
2.	Tanah Untuk Jalan	287.000.000,00	PT. Griya Bumi Asri	Cluster Wijaya Kusuma	050/1419/430.9.12/2023
3.	Tanah Untuk Jalan	89.474.000,00	PT. Arya Radja Raharja	Griya Diponegoro Regency	050/1422/430.9.12/2023
4.	Tanah Untuk Jalan	240.588.000,00	PT. Berkah Utama Abadi	Kademangan Utama Residence	050/1423/430.9.12/2023
5.	Tanah Untuk Jalan	230.400.000,00	PT. Graha Permata Gemilang	Permata Bataan	050/1420/430.9.12/2023
6.	Tanah Untuk Jalan	374.720.000,00	PT. Kharisma Penanggungan Raya	Kharisma Regency	050/498/430.9.12/2022
7.	Tanah Untuk Jalan	97.216.000,00	PT. Gemilang Citra Persada	New Taman Safira	050/497/430.9.12/2022
8.	Tanah Untuk Jalan	90.672.000,00	PT. Joyo Moro Land	Dewata Land	050/496/430.9.12/2022
9.	Tanah Untuk Jalan	286.754.000,00	PT. Griya Bumi Asri	Cluster Wijaya Kusuma	050/495/430.9.12/2022
10.	Tanah Untuk Jalan	191.214.000,00	PT. Lintang Jaya Properti	Tata Residence	050/494/430.9.12/2022
11.	Tanah Untuk Jalan	2.176.998.000,00	PT. Adhi Prima Multiguna	Graha Pelita Regency	050/659/430.9.12/2021
12.	Tanah Untuk Jalan	406.438.000,00	PT. Kharisma Istana Persada	Istana Bondowoso	050/661/430.9.12/2021
13.	Tanah Untuk Jalan	359.680.000,00	PT. Permadi Jaya Kurnia	Poncogati Regency	050/663/430.9.12/2021
14.	Tanah Untuk Jalan	756.874.000,00	PT. Carani Bhanu Balakosa	Green City	050/660/430.9.12/2021
15.	Tanah Untuk Jalan	1.432.978.000,00	PT. Dewi Rinjani Persada	Permata Rinjani Regency	050/662/430.9.12/2021
16.	Tanah Untuk Jalan	2.043.008.000,00	PT. Podo Joyo Masyhur	Taman Mutiara	640/163/430.9.12/2018
17.	Tanah Untuk Taman	145.000.000,00	PT. Bakti Gumilang Livena	River Side Garden	050/1421/430.9.12/2023
18.	Tanah Untuk Taman	60.928.000,00	PT. Kharisma Penanggungan Raya	Kharisma Regency	050/498/430.9.12/2022
19.	Tanah Untuk Taman	204.060.000,00	PT. Adhi Prima Multiguna	Graha Pelita Regency	050/659/430.9.12/2021
20.	Tanah Untuk Taman	15.936.000,00	PT. Permadi Jaya Kurnia	Poncogati Regency	050/663/430.9.12/2021
21.	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	57.400.000,00	PT. Griya Bumi Asri	Cluster Wijaya Kusuma	050/1419/430.9.12/2023
22.	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	7.424.000,00	PT. Kharisma Penanggungan Raya	Kharisma Regency	050/498/430.9.12/2022
23.	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	7.424.000,00	PT. Permadi Jaya Kurnia	Poncogati Regency	050/663/430.9.12/2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	Lokasi	Nomor BAST
24.	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	106.380.000,00	PT. Carani Bhanu Balakosa	Green City	050/660/430.9.12/2021
25.	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	83.134.000,00	PT. Dewi Rinjani Persada	Permata Rinjani Regency	050/662/430.9.12/2021
26.	Tanah Untuk Makam	42.394.000,00	PT. Griya Bumi Asri	Cluster Wijaya Kusuma	050/1419/430.9.12/2023
27.	Tanah Untuk Makam	49.364.000,00	PT. Berkah Utama Abadi	Kademangan Utama Residence	050/1423/430.9.12/2023
28.	Tanah Lapangan Olah Raga	3.690.000,00	PT. Griya Bumi Asri	Cluster Wijaya Kusuma	050/1419/430.9.12/2023
29.	Tanah Lapangan Olah Raga	3.328.000,00	PT. Gemilang Citra Persada	New Taman Safira	050/497/430.9.12/2022
30.	Tanah Lapangan Olah Raga	27.913.000,00	PT. Kharisma Istana Persada	Istana Bondowoso	050/661/430.9.12/2021
31.	Tanah Lapangan Olah Raga	10.176.000,00	PT. Permadi Jaya Kurnia	Poncogati Regency	050/663/430.9.12/2021
32.	Tanah Lapangan Olah Raga	3.583.104.000,00	PT. Podo Joyo Masyhur	Taman Mutiara	640/163/430.9.12/2018
	Jumlah	**14.473.469.000,00**			

2. Pengurangan tanah sebesar Rp4.075.706.400,00 merupakan pengurang aset tetap tanah karena dihibahkan ke Kepolisian Resort Bondowoso sebesar Rp8.099.020,00 dengan BAST nomor B/1069/VIII/LOG 8.1/2023 dan ke Koramil Taman Krocok sebesar Rp1.204.800,00 dengan BAST nomor 188.45/624/430.4.2/2023 serta direklasifikasi menjadi Properti Investasi karena berdasarkan kebijakan akuntansi memenuhi kriteria menjadi properti investasi sebesar Rp4.066.402.580,00.

Pada nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2023, dari hasil verifikasi lapang oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kelurahan sebagai berikut :

Tabel 5-333 Rincian Tanah Kas Desa Dalam Penelusuran

No	Nama Kelurahan	Total Luas Tanah Eks TKD (m^2)	Total Luas Eks TKD Yang Tercatat di KIB A (m^2)	Total Luas Eks TKD Yang Belum Tercatat di KIB A (m^2)
1	Dabasah	47.055,40	1.361,00	45.694,40
2	Tamansari	48.598,00	220,00	48.378,00
3	Kotakulon	57.015,13	2.930,00	54.085,13
4	Blindungan	10.187,61	1.150,00	9.037,61
5	Badean	58.343,80	280,00	58.063,80
6	Kademangan	65.933,62	340,00	65.593,62
7	Nangkaan	27.628,00	0,00	27.628,00
8	Sekarputih	73.515,00	3.521,00	69.994,00
9	Tenggarang	33.997,00	2.595,00	31.402,00
10	Curahdami	108.111,00	2.170,00	105.941,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	**954.974.563.272,04**	**882.762.175.492,04**

Mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	882.762.175.492,04
Penambahan Tahun 2023	Rp	82.280.691.793,00
Jumlah	**Rp**	**965.042.867.285,04**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	10.068.304.013,00
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**954.974.563.272,04**

1. Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp82.280.691.793,00 terdiri dari :

a. Belanja modal *netto*	Rp	81.031.034.693,00
b. Penerimaan dari hibah	Rp	1.211.498.400,00
c. Belanja barang dan jasa	Rp	21.821.500,00
d. Koreksi aset tetap	Rp	16.337.200,00
Jumlah	**Rp**	**82.280.691.793,00**

Penjelasan untuk masing-masing penambahan peralatan dan mesin Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal *netto* sebesar Rp81.031.034.693,00;

Jumlah tersebut merupakan penambahan peralatan dan mesin dari realisasi belanja modal yang dianggarkan pada APBD dengan rincian sebagai berikut :

1. Alat Besar	Rp	808.225.192,00
2. Alat Angkutan	Rp	7.894.906.900,00
3. Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	92.018.950,00
4. Alat Pertanian	Rp	323.173.300,00
5. Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	15.636.762.795,00
6. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp	1.248.357.987,00
7. Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	41.689.391.217,00
8. Alat Laboratorium	Rp	3.425.116.593,00
9. Komputer	Rp	8.972.282.223,00
10. Alat Keselamatan Kerja	Rp	142.023.750,00
11. Alat Peraga	Rp	374.431.500,00
12. Rambu-Rambu	Rp	379.554.150,00
13. Peralatan Olah Raga	Rp	44.790.136,00
Jumlah	**Rp**	**81.031.034.693,00**

b. Penerimaan dari hibah sebesar Rp1.211.498.400,00;

Jumlah tersebut merupakan penambahan aset tetap karena adanya hibah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-334 Rincian Hibah Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	Nomor BAST	SKPD
1.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.599.730,00	BPBD Provinsi Jawa Timur	360/C.XII.47/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Alat Besar	100.000.000,00	BPBD Provinsi Jawa Timur	360/C.XII.47/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.	Alat Keselamatan Kerja	81.000.000,00	BPBD Provinsi Jawa Timur	360/C.XII.47/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.	Alat Keselamatan Kerja	19.905.405,00	BPBD Provinsi Jawa Timur	360/C-V.013/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.	Alat Angkutan	521.525.000,00	Kementerian Kesehatan Indonesia	KN.02.07/V.IV/1364/02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	443.000.000,00	Kementerian Kesehatan Indonesia	440/879/430.9.3/2023	Dinas Kesehatan
7.	Alat Laboratorium	42.468.265,00	Kementerian Kesehatan Indonesia	BJ.01.04/PPK4.2/452/2023	Dinas Kesehatan
	Jumlah	**1.211.498.400,00**			

c. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp21.821.500,00;

Jumlah tersebut merupakan penambahan peralatan dan mesin dari realisasi belanja barang dan jasa. Pengakuan ini diperlukan karena belanja barang dan jasa tersebut

memenuhi kriteria untuk diakui sebagai peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut :

1.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	12.025.000,00
2.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	6.000.000,00
3.	Komputer	Rp	2.574.900,00
4.	Alat Keselamatan Kerja	Rp	1.221.600,00
	Jumlah	**Rp**	**21.821.500,00**

d. Koreksi aset tetap sebesar Rp16.337.200,00

Jumlah tersebut merupakan penambahan aset tetap yang berasal dari reklasifikasi barang persediaan (koreksi saldo awal) berupa alat pertanian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.068.304.013,00 terdiri dari :

a.	Koreksi Aset Tetap	Rp	64.000.000,00
b.	Dimusnahkan	Rp	4.084.995.374,00
c.	Dijual	Rp	4.680.842.910,00
d.	Hibah Keluar	Rp	1.238.465.729,00
	Jumlah	**Rp**	**10.068.304.013,00**

Penjelasan untuk masing-masing pengurangan peralatan dan mesin Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Koreksi Aset Tetap sebesar Rp64.000.000,00;

Jumlah tersebut merupakan pengurangan aset tetap barupa alat angkutan yang sudah dihapus sesuai Keputusan Bupati Nomor 188.45/988/430.6.2/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan Dengan Lelang Terbatas dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 188/82/430.6.2/2015 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan Dengan Lelang Terbatas dan telah diterima kasnya pada tanggal 31 Desember 2015 namun masih tercatat pada Kartu Inventaris Barang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Selanjutnya atas peristiwa tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Nomor : 188.45/750/430.6.2/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Dengan Tindak Lanjut Koreksi Pencatatan Barang Milik Daerah dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor : 188/41/430.4.2/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dengan Tindak Lanjut Koreksi Pencatatan Barang Milik Daerah.

b. Dimusnahkan sebesar Rp4.084.995.374,00;

Jumlah tersebut merupakan pengurangan aset tetap yang berasal dari aset tetap milik daerah dengan tindak lanjut dimusnahkan dengan rincian sebagai berikut :

1.	Alat Besar	Rp	6.000.000,00
2.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	1.294.450.671,00
3.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp	996.857.479,00
4.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	1.065.000,00
5.	Komputer	Rp	1.780.787.224,00
6.	Peralatan Olah Raga	Rp	5.835.000,00
	Jumlah	**Rp**	**4.084.995.374,00**

c. Dijual sebesar Rp4.680.842.910,00;
Jumlah tersebut merupakan pengurangan aset tetap yang berasal dari aset tetap milik daerah dengan tindak lanjut penjualan berupa alat angkutan.

d. Hibah Keluar sebesar Rp1.238.465.729,00;
Jumlah tersebut merupakan pengurangan aset tetap yang berasal dari aset tetap milik daerah dengan tindak lanjut dihibahkan berupa alat angkutan.

Pada tahun 2019 sampai dengan 2023 terdapat kendaraan yang dipinjampakaikan sejumlah 10 unit kendaraan roda 4 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-335 Kendaraan Yang Dipinjampakaikan

No	Jenis aset	Dimanfaatkan oleh	Jangka waktu	Jenis pemanfaatan
1	Kendaraan Roda 4	Kepolisian Resort Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
2	Kendaraan Roda 4	Kejaksaan Negeri Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
3	Kendaraan Roda 4	Kodim 0822 Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
4	Kendaraan Roda 4	Kodim 0822 Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
5	Kendaraan Roda 4	DPC Persatuan Guru Ngaji Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
6	Kendaraan Roda 4	Forum Komunitas Umat Beragama Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
7	Kendaraan Roda 4	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
8	Kendaraan Roda 4	Forum Komunikasi Diniah Taklimiyah Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
9	Kendaraan Roda 4	Majelis Salawat El Wahda Nahdliyyah Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai
10	Kendaraan Roda 4	Pengadilan Negeri Kabupaten Bondowoso	5 Tahun	Pinjam Pakai

Rekapitulasi mutasi penambahan dan pengurangan berdasarkan uraian diatas untuk tiap-tiap jenis peralatan dan mesin selama Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-336 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Alat Besar	19.163.781.305,00	908.225.192,00	6.000.000,00	20.066.006.497,00
2	Alat Angkutan	120.557.566.891,00	8.416.431.900,00	5.983.308.639,00	122.990.690.152,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.170.414.347,00	104.043.950,00	0,00	7.274.458.297,00
4	Alat Pertanian	5.602.893.866,00	339.510.500,00	0,00	5.942.404.366,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	177.719.979.523,01	15.646.362.525,00	1.294.450.671,00	192.071.891.377,01
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	33.251.300.611,00	1.248.357.987,00	996.857.479,00	33.502.801.119,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	279.903.878.097,29	42.132.391.217,00	1.065.000,00	322.035.204.314,29
8	Alat Laboratorium	78.772.312.104,26	3.467.584.858,00	0,00	82.239.896.962,26
9	Alat Persenjataan	154.931.000,00	0,00	0,00	154.931.000,00
10	Komputer	144.976.048.069,48	8.974.857.123,00	1.780.787.224,00	152.170.117.968,48
11	Alat Eksplorasi	1.975.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	2.599.795.178,00	244.150.755,00	0,00	2.843.945.933,00
16	Alat Peraga	337.482.300,00	374.431.500,00	0,00	711.913.800,00
17	Peralatan Proses/ Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Rambu-Rambu	10.890.922.982,00	379.554.150,00	0,00	11.270.477.132,00
19	Peralatan Olah Raga	1.658.894.218,00	44.790.136,00	5.835.000,00	1.697.849.354,00
Jumlah Aset Tetap		**882.762.175.492,04**	**82.280.691.793,00**	**10.068.304.013,00**	**954.974.563.272,04**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	**1.092.208.331.500,07**	**1.065.048.895.661,77**

Mutasi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.065.048.895.661,77
Penambahan Tahun 2023	Rp	28.228.871.483,30
Jumlah	**Rp**	**1.093.277.767.145,07**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	1.069.435.645,00
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**1.092.208.331.500,07**

1. Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp28.228.871.483,30,00 terdiri dari :

a. Belanja modal *netto*	Rp	20.558.158.238,30
b. Penerimaan dari Hibah	Rp	7.282.432.600,00
c. Mutasi Masuk	Rp	388.280.645,00
Jumlah	**Rp**	**28.228.871.483,30**

Penjelasan untuk masing-masing penambahan gedung dan bangunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal *netto* sebesar Rp20.558.158.238,30;

Jumlah tersebut merupakan penambahan gedung dan bangunan dari realisasi belanja modal yang dianggarkan pada APBD dengan rincian sebagai berikut :

1. Bangunan gedung	Rp	19.906.522.463,30
2. Monumen	Rp	212.299.070,00
3. Bangunan Menara	Rp	0,00
4. Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp	439.336.705,00
Jumlah	**Rp**	**20.558.158.238,30**

b. Penerimaan dari hibah sebesar Rp7.282.432.600,00;

Jumlah tersebut merupakan penambahan aset tetap karena adanya hibah dari pemerintah pusat dan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) dari pengembang perumahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat	Rp	4.686.869.600,00
2. Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	Rp	2.595.563.000,00
Jumlah	**Rp**	**7.282.432.600,00**

Jumlah masing-masing hibah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-337 Rincian Hibah Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Pusat

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	SKPD	Nomor BAST
1.	Bangunan Gedung	2.359.569.600,00	Kemendag RI	Diskoperindag	321/M-DAG/BAST/06/2023
2.	Bangunan Gedung	2.327.300.000,00	Kemendag RI	Diskoperindag	323/M-DAG/BAST/06/2023
	Jumlah	**4.686.869.600,00**			

Tabel 5-338 Rincian Hibah Gedung dan Bangunan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	Lokasi	Nomor BAST
1.	Taman	43.500.000,00	PT. Bakti Gumilang Livena	River Side Garden	050/1421/430.9.12/2023
2.	Taman	58.072.000,00	PT. Kharisma Penanggungan Raya	Kharisma Regency	050/498/430.9.12/2022
3.	Taman	23.180.000,00	PT. Adhi Prima Multiguna	Graha Pelita Regency	050/659/430.9.12/2021
4.	Taman	15.189.000,00	PT. Permadi Jaya Kurnia	Poncogati Regency	050/663/430.9.12/2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	Lokasi	Nomor BAST
5.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.225.000.000,00	PT. Griya Bumi Asri	Cluster Wijaya Kusuma	050/1419/430.9.12/2023
6.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	203.000.000,00	PT. Kharisma Penanggungan Raya	Kharisma Regency	050/498/430.9.12/2022
7.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	203.000.000,00	PT. Permadi Jaya Kurnia	Poncogati Regency	050/663/430.9.12/2021
8.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	405.000.000,00	PT. Carani Bhanu Balakosa	Green City	050/660/430.9.12/2021
9.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	316.500.000,00	PT. Dewi Rinjani Persada	Permata Rinjani Regency	050/662/430.9.12/2021
10.	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	11.250.000,00	PT. Griya Bumi Asri	Cluster Wijaya Kusuma	050/1419/430.9.12/2023
11.	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	7.800.000,00	PT. Gemilang Citra Persada	New Taman Safira	050/497/430.9.12/2022
12.	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	29.192.000,00	PT. Griya Bumi Asri	Cluster Wijaya Kusuma	050/495/430.9.12/2022
13.	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	39.750.000,00	PT. Permadi Jaya Kurnia	Poncogati Regency	050/663/430.9.12/2021
14.	Bangunan Fasilitas Umum	15.130.000,00	PT. Griya Bumi Asri	Cluster Wijaya Kusuma	050/495/430.9.12/2022
	Jumlah	**2.595.563.000,00**			

c. Mutasi Masuk Sebesar Rp388.280.645,00;
Jumlah tersebut merupakan penambah aset tetap karena adanya perpindahan aset tetap antar perangkat daerah berupa bangunan gedung dari Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang kepada Kecamatan Bondowoso sebesar Rp191.783.045,00 dan Kecamatan Cermee sebesar Rp196.497.600,00.

2. Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp1.069.435.645,00 terdiri dari :

a.	Dimusnahkan	Rp	600.000,00
b.	Mutasi Keluar	Rp	388.280.645,00
c.	Reklasifikasi ke Properti Investasi	Rp	680.555.000,00
	Jumlah	**Rp**	**1.069.435.645,00**

Penjelasan untuk masing-masing pengurangan gedung dan bangunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Dimusnahkan sebesar Rp600.000,00;
Jumlah tersebut merupakan pengurangan aset tetap yang berasal dari aset tetap milik daerah dengan tindak lanjut dimusnahkan berupa monumen.

b. Mutasi Keluar sebesar Rp388.280.645,00
Jumlah tersebut merupakan pengurang aset tetap karena adanya perpindahan aset tetap antar perangkat daerah (mutasi keluar) berupa bangunan gedung kepada Kecamatan Bondowoso sebesar Rp191.783.045,00 dan Kecamatan Cermee sebesar Rp196.497.600,00 yang berasal dari Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang.

c. Reklasifikasi ke Properti Investasi sebesar Rp680.555.000,00;
Jumlah tersebut merupakan pengurang aset tetap karena aset tersebut berdasarkan kebijakan akuntansi memenuhi kriteria menjadi properti investasi sehingga direklasifikasi ke Properti Investasi.

Pada Tahun 2022 sampai dengan 2025 terdapat gedung dan bangunan yang dipinjampakaikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-339 Gedung dan Bangunan Yang Dipinjampakaikan

No	Jenis aset	Dimanfaatkan oleh	Jangka waktu	Jenis pemanfaatan
1	Tanah Bangunan Kantor	Fatayat Nahdlatul Ulama Bondowoso	1 Tahun	Pinjam Pakai
2	Tanah Bangunan Kantor	Lembaga Pendidikan Taman Qur'an	1 Tahun	Pinjam Pakai

No	Jenis aset	Dimanfaatkan oleh	Jangka waktu	Jenis pemanfaatan
		Bondowoso		
3	Tanah Bangunan Kantor	Persatuan Wartawan Indonesia Bondowoso	3 Tahun	Pinjam Pakai

Rekapitulasi mutasi penambahan dan pengurangan berdasarkan uraian diatas untuk tiap-tiap jenis gedung dan bangunan selama Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-340 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Bangunan Gedung	1.058.235.386.244,12	27.577.235.708,30	1.068.835.645,00	1.084.743.786.307,42
2	Monumen	4.950.318.616,65	212.299.070,00	600.000,00	5.162.017.686,65
3	Bangunan Menara	574.632.381,00	0,00	0,00	574.632.381,00
4	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	1.288.558.420,00	439.336.705,00	0,00	1.727.895.125,00
Jumlah Aset Tetap		**1.065.048.895.661,77**	**28.228.871.483,30**	**1.069.435.645,00**	**1.092.208.331.500,07**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	**2.312.852.019.708,27**	**2.257.980.446.596,54**

Mutasi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	2.257.980.446.596,54
Penambahan Tahun 2023	Rp	54.871.573.111,73
Jumlah	**Rp**	**2.312.852.019.708,27**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**2.312.852.019.708,27**

1. Penambahan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp54.871.573.111,73 terdiri dari :

a. Belanja modal *netto*	Rp	47.347.947.375,73
b. Penerimaan dari Hibah	Rp	7.522.200.511,00
c. Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.425.225,00
Jumlah	**Rp**	**54.871.573.111,73**

Penjelasan untuk masing-masing penambahan jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal *netto* sebesar Rp47.347.947.375,73;
Jumlah tersebut merupakan penambahan jalan, irigasi dan jaringan dari realisasi belanja modal yang dianggarkan pada APBD dengan rincian sebagai berikut :

1. Jalan dan Jembatan	Rp	36.697.731.274,33
2. Bangunan Air	Rp	10.239.579.071,40
3. Jaringan	Rp	410.637.030,00
Jumlah	**Rp**	**47.347.947.375,73**

b. Penerimaan dari Hibah sebesar Rp7.522.200.511,00
Jumlah tersebut merupakan penambahan jalan, irigasi dan jaringan karena adanya hibah dari pemerintah pusat dan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) dari pengembang perumahan terdiri dari :

1. Pemerintah Pusat	Rp	2.178.628.611,00
2. Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	Rp	5.343.571.900,00
Jumlah	**Rp**	**7.522.200.511,00**

Jumlah masing-masing hibah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-341 Rincian Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Pemerintah Pusat

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	SKPD	Nomor BAST
1.	Jaringan	2.178.628.611,00	Dirjen Energi Baru, Terbarukan, Dan Konservasi Energi	Dinas Perhubungan	550/57/430.9.10/2023
	Jumlah	**2.178.628.611,00**			

Tabel 5-342 Rincian Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	Lokasi	Nomor BAST
1.	Jalan Khusus	275.495.000,00	PT. Bakti Gumilang Livena	River Side Garden	050/1421/430.9.12/2023
2.	Jalan Khusus	245.000.000,00	PT. Griya Bumi Asri	Cluster Wijaya Kusuma	050/1419/430.9.12/2023
3.	Jalan Khusus	415.415.000,00	PT. Arya Radja Raharja	Griya Diponegoro Regency	050/1422/430.9.12/2023
4.	Jalan Khusus	190.710.000,00	PT. Berkah Utama Abadi	Kademangan Utama Residence	050/1423/430.9.12/2023
5.	Jalan Khusus	336.000.000,00	PT. Graha Permata Gemilang	Permata Bataan	050/1420/430.9.12/2023
6.	Jalan Khusus	409.850.000,00	PT. Kharisma Penanggungan Raya	Kharisma Regency	050/498/430.9.12/2022
7.	Jalan Khusus	91.140.000,00	PT. Gemilang Citra Persada	New Taman Safira	050/497/430.9.12/2022
8.	Jalan Khusus	113.340.000,00	PT. Joyo Moro Land	Dewata Land	050/496/430.9.12/2022
9.	Jalan Khusus	263.480.000,00	PT. Griya Bumi Asri	Cluster Wijaya Kusuma	050/495/430.9.12/2022
10.	Jalan Khusus	495.740.000,00	PT. Lintang Jaya Properti	Tata Residence	050/494/430.9.12/2022
11.	Jalan Khusus	283.780.000,00	PT. Adhi Prima Multiguna	Graha Pelita Regency	050/659/430.9.12/2021
12.	Jalan Khusus	493.250.000,00	PT. Kharisma Istana Persada	Istana Bondowoso	050/661/430.9.12/2021
13.	Jalan Khusus	393.400.000,00	PT. Permadi Jaya Kurnia	Poncogati Regency	050/663/430.9.12/2021
14.	Jalan Khusus	128.130.700,00	PT. Carani Bhanu Balakosa	Green City	050/660/430.9.12/2021
15.	Jalan Khusus	290.960.000,00	PT. Dewi Rinjani Persada	Permata Rinjani Regency	050/662/430.9.12/2021
16.	Jalan Khusus	574.603.200,00	PT. Podo Joyo Masyhur	Taman Mutiara	640/163/430.9.12/2018
17.	Bangunan Pembuang Irigasi	343.278.000,00	PT. Podo Joyo Masyhur	Taman Mutiara	640/163/430.9.12/2018
	Jumlah	**5.343.571.900,00**			

c. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.425.225,00

Jumlah tersebut merupakan penambahan jalan, irigasi dan jaringan dari realisasi belanja barang dan jasa. Pengakuan ini diperlukan karena belanja barang dan jasa tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai jalan, irigasi dan jaringan berupa jaringan.

2. Pengurangan jalan, irigasi dan jaringan sebesar nihil.

Rekapitulasi mutasi penambahan dan pengurangan berdasarkan uraian diatas untuk tiap-tiap jenis jalan, irigasi dan jaringan selama Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-343 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	1.094.517.872.008,61	41.698.025.174,33	0,00	1.136.215.897.182,94
2	Bangunan Air (Irigasi)	1.093.126.394.183,93	10.582.857.071,40	0,00	1.103.709.251.255,33
3	Instalasi	14.113.749.383,00	0,00	0,00	14.113.749.383,00
4	Jaringan	56.222.431.021,00	2.590.690.866,00	0,00	58.813.121.887,00
Jumlah Aset Tetap		**2.257.980.446.596,54**	**54.871.573.111,73**	**0,00**	**2.312.852.019.708,27**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	**94.033.788.836,21**	**85.745.196.946,21**

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	85.745.196.946,21
Penambahan Tahun 2023	Rp	8.288.591.890,00
Jumlah	**Rp**	**94.033.788.836,21**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**94.033.788.836,21**

1. Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp8.288.591.890,00 merupakan penambahan aset tetap lainnya dari realisasi belanja modal yang dianggarkan pada APBD berupa bahan perpustakaan.
2. Pengurangan aset tetap lainnya sebesar nihil.

Rekapitulasi mutasi penambahan dan pengurangan berdasarkan uraian diatas untuk tiap-tiap jenis aset tetap lainnya selama Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-344 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Lainnya

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	83.783.736.801,21	8.288.591.890,00	0,00	92.072.328.691,21
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	1.097.224.314,00	0,00	0,00	1.097.224.314,00
3	Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Biota Perairan	100.790.000,00	0,00	0,00	100.790.000,00
5	Tanaman	763.445.831,00	0,00	0,00	763.445.831,00
6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**85.745.196.946,21**	**8.288.591.890,00**	**0,00**	**94.033.788.836,21**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	**10.359.500.353,00**	**545.343.200,00**

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang dalam masa pembangunan atau pengerjaannya melewati satu periode anggaran. Jumlah tersebut merupakan Bangunan Gedung milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang masih dalam pengerjaan, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-345 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	545.343.200,00	9.814.157.153,00	0,00	10.359.500.353,00
	Jumlah Aset Tetap	**545.343.200,00**	**9.814.157.153,00**	**0,00**	**10.359.500.353,00**

Penambahan KDP sebesar Rp9.814.157.153,00 merupakan aset-aset yang dalam masa pembangunan atau pengerjaannya melewati periode anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-346 Rincian Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Jenis KDP	Jumlah (Rp)	OPD	Keterangan
1	KDP - Jalan	9.814.157.153,00	Dinas Bina Marga, SDA & BK	Fisik, Perencanaan dan Pengawasan
	Jumlah	**9.814.157.153,00**		

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2023 sebesar Rp10.359.500.353,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-347 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Jenis KDP	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Jumlah Biaya Yg Sudah Dikeluarkan
1	Perencanaan – Tugu Pembangunan	24.05/02/PPK-DED Alun-alun/XI/2019, 26/11/2019	388.000.800,00	388.000.800,00
	Administrasi Proyek (AP) – Tugu Pembangunan		0,00	1.500.000,00
2	Perencanaan – Bangunan Kesehatan	07.02/72.A/PPK/1.02.01./2019 , 30/10/2019	97.810.000,00	83.138.500,00
3	Perencanaan – Bangunan Kesehatan	07.02/71.A/PPK/1.02.01./2019 , 30/10/2019	85.534.000,00	72.703.900,00
4	Rekonstrusi Jaringan Jalan Sempol - Penang (STA 7+500), Kec. Botolinggo	10.2.01.08/031/PPKom-Rekons.E-Katalog.C141/1.03.0.00.0.00.01.00/2023 18 November 2023	290.510.000,00	87.153.000,00
5	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jaringan jalan Paket XXVIII	10.2.01.08/136/PPKom-prcn.C29/1.03.0.00.0.00.01.00/2023 23 Oktober 2023	15.902.000,00	13.516.700,00
6	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jaringan jalan Paket XXVIII	10.2.01.08 /137/PPKom-pgws.C29/1.03.0.00.0.00.01.00/2023 08 November 2023	10.012.000,00	0,00
	AP		2.935.300,00	2.935.300,00
7	Rekonstruksi Jaringan Jalan Lumutan - Pancur Sta. 12+000,Kec. Botolinggo	10.2.01.08/421/PPKom-Rekons.Jalan.C153/1.03.0.00.0.00.01.00/2023 04 Desember 2023	167.658.000,00	167.658.000,00
8	Rekonstruksi Jaringan Jalan Tangsil Wetan - Wonosroyo,Kec. Wonosari	10.2.01.08/422/PPKom-Rekons.Jalan.C154/1.03.0.00.0.00.01.00/2023 04 Desember 2023	136.010.000,00	126.383.852,00
9	Rekonstruksi Jaringan Jalan Kajar - Pengarang Sta. 1+800,Kec. Jambesari DS	10.2.01.08/423/PPKom-Rekons.Jalan.C155/1.03.0.00.0.00.01.00/2023 04 Desember 2023	87.692.000,00	87.692.000,00
10	Rekonstruksi Jaringan Jalan Mangli Wetan - Padasan,Kec. Pujer	10.2.01.08/424/PPKom-Rekons.Jalan.C156/1.03.0.00.0.00.01.00/2023 04 Desember 2023	68.755.000,00	68.755.000,00
11	Rekonstruksi Jaringan Jalan Wonosari - Patirana Sta. 2+000,Kec. Grujugan	10.2.01.08/425/PPKom-Rekons.Jalan.C157/1.03.0.00.0.00.01.00/2023 04 Desember 2023	77.330.000,00	75.521.165,00
12	Rekonstruksi Jaringan Jalan Taman - Pancoran Sta. 0+200,Kec. Grujugan	10.2.01.08/426/PPKom-Rekons.Jalan.C158/1.03.0.00.0.00.01.00/2023 04 Desember 2023	77.257.000,00	75.187.121,00
13	Rekonstruksi Jaringan Jalan Tanggulangin - Krajan Sta. 1+400,Kec. Tegalampel	10.2.01.08/427/PPKom-Rekons.Jalan.C159/1.03.0.00.0.00.01.00/2023 04 Desember 2023	131.802.000,00	131.802.000,00
14	Rekonstruksi Jaringan Jalan Bukor - Sumber Malang Sta. 2+300,Kec. Wringin	10.2.01.08/428/PPKom-Rekons.Jalan.C160/1.03.0.00.0.00.01.00/2023 04 Desember 2023	166.780.000,00	0,00
15	Perencanaan Teknis Rekonstruksi	10.2.01.08/130/PPKom-	62.559.000,00	53.175.150,00

No	Jenis KDP	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Jumlah Biaya Yg Sudah Dikeluarkan
	Jaringan Jalan Paket XXII	prcn.C23/1.03.0.00.0.00.01.00 /2023 23 Oktober 2023		
16	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jaringan Jalan Paket XXII	10.2.01.08 /148/PPKom-pgws.C23/1.03.0.00.0.00.01.0 0/2023 tgl 4 Desember 2023	41.820.000,00	0,00
	AP		9.994.000,00	9.994.000,00
17	Penanganan long segment Plalangan - Blawan Kec. Ijen	10.2.01.08/011/PPKom-Rekons.E-Katalog.C41/1.03.0.00.0.00.01 .00/2023 18 Juli 2023	12.696.793.700, 00	8.887.755.165,00
18	Pengawasan Teknis Jalan Palalangan - Blawan, Kec. Ijen	10.2.01.08/044/PPK-Rekons.C11/1.03.0.00.0.00.01 .00/2023 17 Juli 2023	165.702.798,00	0,00
	AP		18.788.700,00	18.788.700,00
	SPPD		7.840.000,00	7.840.000,00
	Jumlah		**14.807.486.298,00**	**10.359.500.353,00**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	**2.443.642.622.097,02**	**2.201.242.997.669,22**

Akumulasi Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai Aset Tetap yang menggunakan metode harga perolehan**.** Penghitungan penyusutan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menerapkan perhitungan penyusutan Aset Tetap berdasarkan Buletin Teknis SAP Nomor 18 dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 70 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.443.642.622.097,02.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-348 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Jenis Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Peralatan Mesin	690.153.002.076,77	92.053.335.790,00	9.505.580.842,00	772.700.757.024,77
2	Gedung dan Bangunan	455.411.879.809,11	24.384.801.325,80	680.649.000,00	479.116.032.134,91
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.055.678.115.783,34	136.147.717.154,00	0,00	1.191.825.832.937,34
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		**2.201.242.997.669,22**	**252.585.854.269,80**	**10.186.229.842,00**	**2.443.642.622.097,02**

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp252.585.854.269,80 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5-349 Rincian Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset

No	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Beban Penyusutan (Rp)	Koreksi (Rp)	Total (Rp)
1	Peralatan Mesin	92.053.335.790,00	0,00	92.053.335.790,00

No	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Beban Penyusutan (Rp)	Koreksi (Rp)	Total (Rp)
2	Gedung dan Bangunan	24.384.801.325,80	0,00	24.384.801.325,80
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	136.147.717.154,00	0,00	136.147.717.154,00
	Jumlah	**252.585.854.269,80**	**0,00**	**252.585.854.269,80**

Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp10.186.229.842,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5-350 Rincian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset

No	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Penghapusan (Rp)	Koreksi (Rp)	Reklasifikasi (Rp)	Total (Rp)
1	Peralatan Mesin	9.441.580.842,00	64.000.000,00	0,00	9.505.580.842,00
2	Gedung dan Bangunan	94.000,00	0,00	680.555.000,00	680.649.000,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**9.441.674.842,00**	**64.000.000,00**	**680.555.000,00**	**10.186.229.842,00**

Pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap dengan tindak lanjut penghapusan terdiri dari :

- Dihibahkan sebesar Rp 1.238.465.729,00
- Dihapus sebesar Rp 4.084.923.944,00
- Dijual sebesar Rp 4.118.191.169,00

Jumlah Rp 9.441.580.842,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.4 Properti Investasi	**4.066.402.580,00**	**0,00**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.4.1 Properti Investasi	**4.746.957.580,00**	**0,00**

Properti Investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya, termasuk inftrastruktur yang terintegrasi) yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan berupa sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau kedua-duanya, dan dikelola entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaaan aset, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum atau diserahkan kepada masyarakat.

Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.746.957.580,00 bila dibandingkan dengan properti investasi per 31 Desember 2022 sebesar nihil mengalami kenaikan sebesar Rp4.746.957.580,00. Mutasi penambahan dan pengurangan properti investasi Tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	0,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	4.746.957.580,00
Jumlah	**Rp**	**4.746.957.580,00**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**4.746.957.580,00**

1. Mutasi Penambahan Properti Investasi sebesar Rp4.746.957.580,00 terdiri dari :
   a. Tanah Eks Bengkok Rp 2.578.402.580,00
   b. Tanah dan Bangunan Gedung Bank Jatim Rp 2.168.555.000,00
   Jumlah **Rp 4.746.957.580,00**
2. Pengurangan Properti Investasi sebesar nihil.

Saldo Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.746.957.580,00 terdiri dari :

Tabel 5-351 Rincian Properti Investasi

No	Uraian	Lokasi	Nama Aset	Nilai Perolehan
A	**Tanah Eks Bengkok**			**2.578.402.580,00**
1	Eks Bengkok Kelurahan Dabasah	Desa Jetis Kecamatan Curahdami	Tanah Usaha	55.448.030,30
2	Eks Bengkok Kelurahan Tamansari	Desa Jetis Kecamatan Curahdami	Tanah Usaha	58.754.626,68
3	Eks Bengkok Kelurahan Nangkaan	Desa Jetis Kecamatan Curahdami	Tanah Usaha	29.288.165,36
4	Eks Bengkok Kelurahan Curahdami	Desa Jetis Kecamatan Curahdami	Tanah Usaha	64.749.523,22
5	Eks Bengkok Kelurahan Kotakulon	Desa Jetis Kecamatan Curahdami	Tanah Usaha	56.965.219,06
6	Eks Bengkok Kelurahan Badean	Desa Jetis Kecamatan Curahdami	Tanah Usaha	62.143.935,29
7	Eks Bengkok Kelurahan Kademangan	Desa Jetis Kecamatan Curahdami	Tanah Usaha	67.396.400,09
8	Eks Bengkok Kelurahan Kotakulon	Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso	Tanah Usaha	758.153.535,67
9	Eks Bengkok Kelurahan Kademangan	Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso	Tanah Usaha	715.920.237,70
10	Eks Bengkok Kelurahan Curahdami	Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso	Tanah Usaha	602.592.926,63
11	Eks Bengkok Kelurahan Sekarputih	Desa Trebungan Kecamatan Tamankrocok	Tanah Usaha	22.906.998,96
12	Eks Bengkok Kelurahan Sekarputih	Desa Paguan Kecamatan Tamankrocok	Tanah Usaha	12.693.001,04
13	Eks Bengkok Kelurahan Badean	Desa Badean Kecamatan Bondowoso	Tanah Usaha	63.083.300,00
14	-	Desa Kejayan Kecamatan Pujer	Tanah Usaha	8.306.680,00
B	**Tanah dan Bangunan Gedung Bank Jatim**			**2.168.555.000,00**
1	Tanah Gedung Bank Jatim	Jl. Letnan Karsono No. 1 Bondowoso	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.488.000.000,00
2	Bangunan Gedung Bank Jatim	Jl. Letnan Karsono No. 1 Bondowoso	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	680.555.000,00
		Jumlah		**4.746.957.580,00**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.4.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	**680.555.000,00**	**0,00**

Akumulasi penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp680.555.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-352 Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

No	Jenis Penyusutan Properti Investasi	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	0,00	680.555.000,00	0,00	680.555.000,00
	Jumlah	**0,00**	**680.555.000,00**	**0,00**	**680.555.000,00**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.5 Dana Cadangan	**30.000.000.000,00**	**15.040.311.124,69**

Jumlah tersebut merupakan Dana Cadangan yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mendanai kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bondowoso ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 yang penyediaan dananya tidak dapat

sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sehingga disisihkan setiap Tahun Anggaran mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp15.000.000.000,00. Pembentukan Dana Cadangan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2024-2029. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/648/430.4.2/2022 tentang Penunjukan Bank Tempat Penyimpanan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2024-2029. Dana Cadangan diinvestasikan dalam bentuk Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Bondowoso.

Realisasi pembentukan dana cadangan melalui pencairan SP2D Nomor : 05.05/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2023 tanggal 14 November 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-353 Dana Cadangan

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dana Cadangan	15.040.311.124,69	15.000.000.000,00	40.311.124,69	30.000.000.000,00
	Jumlah	**15.040.311.124,69**	**15.000.000.000,00**	**40.311.124,69**	**30.000.000.000,00**

Penambahan dana cadangan sebesar Rp15.000.000.000,00 merupakan realisasi pembentukan dana cadangan melalui pencairan SP2D Nomor: 05.05/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/ P.04/11/2023 tanggal 14 November 2023.

Pengurangan dana cadangan sebesar Rp40.311.124,69 merupakan koreksi saldo awal dana cadangan yang berasal dari bunga deposito dana cadangan bagian Tahun 2022 yang direklasifikasi ke Kas di Kas Daerah.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.6 Aset Lainnya	**61.326.691.708,80**	**60.391.079.007,66**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5-354 Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	2.578.008.825,00	2.549.278.509,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	151.408.140,00	151.408.140,00
3	Aset Tak Berwujud	9.153.295.822,00	9.223.187.675,00
4	Akumulasi Amortisasi	(7.964.347.590,20)	(7.870.655.413,34)
5	Aset Lain-lain	61.400.934.114,00	59.367.581.199,00
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(3.992.607.602,00)	(3.029.721.102,00)
	Jumlah	**61.326.691.708,80**	**60.391.079.007,66**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.6.1 Tagihan Jangka Panjang	**2.578.008.825,00**	**2.549.278.509,00**

Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bondowoso per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.578.008.825,00 bila dibandingkan dengan tagihan jangka panjang per 31 Desember

2022 sebesar Rp2.549.278.509,00 mengalami kenaikan sebesar Rp28.730.316,00. Mutasi penambahan dan pengurangan tagihan jangka panjang Tahun 2023 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	2.549.278.509,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	44.230.316,00
Jumlah	**Rp**	**2.593.508.825,00**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	15.500.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**2.578.008.825,00**

Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bondowoso per 31 Desember 2023 tersebut meliputi Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) Daerah. Tagihan TGR Daerah per 31 Desember 2023 merupakan TGR pada kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dengan SK Pembebanan, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Putusan Pengadilan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-355 Rekapitulasi Mutasi Tagihan Jangka Panjang

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) Daerah	2.549.278.509,00	44.230.316,00	15.500.000,00	2.578.008.825,00
	Jumlah	**2.549.278.509,00**	**44.230.316,00**	**15.500.000,00**	**2.578.008.825,00**

Penambahan tagihan jangka panjang Tahun 2023 berdasarkan SKTJM PNS pada RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso tahun 2015 sebesar Rp44.230.316,00.

Pengurangan sebesar Rp15.500.000,00 merupakan setoran sampai dengan 2022 yang belum diakui sebagai pengurang di Neraca sehingga dicatat sebagai koreksi pengurangan berdasarkan hasil rekonsiliasi saldo TGR dengan Inspektorat dan Buku Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah Per Semester II Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso di Bondowoso yang terdiri dari sebesar Rp12.000.000,00 pada tanggal 3 Juli 2015 dan sebesar Rp3.500.000,00 pada tanggal 18 Januari 2018.

Saldo tagihan jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.578.008.825,00 terdiri dari:

Tabel 5-356 Rekapitulasi TGR atas hasil Pemeriksaan APIP dan APEP yang Dilaporkan kepada Majelis TPTGR

No	Uraian	Tahun	Jumlah
a	**SK Pembebanan Sementara**		**2.507.350.309,00**
1	Temuan Audit BPK atas LKD tahun 2004 pada pos DPRD	2004	2.034.463.909,00
2	Belanja Bantuan Parpol pada Bakesbang Linmas	2006	74.900.000,00
3	Penerimaan pembayaran piutang kredit sapi kereman (PTSK)	2013	397.986.400,00
b	**SK Pembebanan Sementara**		**70.658.516,00**
1	TGR barang/uang milik daerah	2004	70.658.516,00
	Jumlah		**2.578.008.825,00**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.6.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	**151.408.140,00**	**151.408.140,00**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp151.408.140,00 merupakan kerjasama pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Bondowoso berupa tanah dan bangunan dikomplek Pemandian Tasnan Baru Bondowoso dengan PT. Dian Graha Utama sebagai berikut :

1. Bentuk kerjasama : Kerjasama Pemanfaatan

2. Nomor Perjanjian : 188/13/430.6.2/2014
3. Pembagian Keuntungan : Kontribusi keuntungan dibayarkan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2044 dengan kesepakatan sebagai berikut:
   - Untuk 5 tahun pertama sebesar Rp18.000.000,00/ tahun.
   - Untuk 5 tahun kedua sebesar Rp20.000.000,00/ tahun.
   - Untuk 5 tahun ketiga sebesar Rp22.000.000,00/ tahun.
   - Untuk 5 tahun keempat sebesar Rp24.000.000,00 /tahun.
   - Untuk 5 tahun kelima sebesar Rp26.000.000,00 /tahun.
   - Untuk 5 tahun keenam sebesar Rp28.000.000,00/ tahun, dengan total jangka waktu pemangaatan selama 30 tahun dengan grace period 1 tahun, sehingga pembayaran kontribusi oleh PT. Dian Graha Utama dimulai tahun ke 2 sampai dengan tahun ke 30. Kontribusi tersebut sudah termasuk diperhitungkan didalamnya, kontribusi sewa bangunan Pedagang Kaki Lima dan keuntungan pengelolaan.
4. Jangka Waktu Perjanjian : 30 tahun

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.6.3 Aset Tak Berwujud	**9.153.295.822,00**	**9.223.187.675,00**

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.153.295.822,00 bila dibandingkan dengan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.223.187.675,00 mengalami penurunan sebesar Rp69.891.853,00. Mutasi penambahan dan pengurangan aset tidak berwujud dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	9.223.187.675,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	974.372.647,00
Jumlah	**Rp**	**10.197.560.322,00**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	1.044.264.500,00
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**9.153.295.822,00**

Penambahan Aset tidak berwujud sebesar Rp974.372.647,00 berasal dari :

- Belanja Modal Aset Lainnya pada RSUD dr. Koesnadi	Rp.	516.625.745,00
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	180.571.271,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp.	277.175.631,00
Jumlah	Rp.	974.372.647,00

Pengurangan aset tidak berwujud sebesar Rp1.044.264.500,00 berasal dari :
- Reklasifikasi ke aset lain-lain karena aset tidak berwujud tersebut rusak dan diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebesar Rp 994.764.500,00.
- Penghapusan aset tidak berwujud dengan tindak lanjut pemusnahan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp49.500.000,00.

Rekapitulasi mutasi penambahan dan pengurangan berdasarkan uraian diatas untuk tiap-tiap Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana lampiran 7.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.6.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	**7.964.347.590,20**	**7.870.655.413,34**

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.964.347.590,20 bila dibandingkan dengan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.870.655.413,34 mengalami kenaikan sebesar Rp93.692.176,86. Mutasi penambahan dan pengurangan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	7.870.655.413,34
Penambahan Tahun 2023	Rp	1.106.078.676,86
Jumlah	**Rp**	**8.976.734.090,20**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	1.012.386.500,00
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**7.964.347.590,20**

Penambahan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp1.106.078.676,86 berasal beban amortisasi aset tidak berwujud Tahun 2023.

Pengurangan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp1.044.264.500,00 berasal dari :

- Reklasifikasi ke aset lain-lain karena amortisasi aset tidak berwujud tersebut diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebesar Rp962.886.500,00.
- Penghapusan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud karena dimusnahan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp49.500.000,00.

Untuk Aset Tak Berwujud yang masih memiliki masa manfaat tetapi sudah tidak digunakan lagi, maka Amortisasi dibebankan seluruhnya sampai berakhirnya masa manfaat pada tahun berjalan.

Rekapitulasi mutasi penambahan dan pengurangan berdasarkan uraian diatas untuk tiap-tiap Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana lampiran 8.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.6.5 Aset Lain-Lain	**61.400.934.114,00**	**59.367.581.199,00**

Jumlah Aset Lain-Lain merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan Kebijakan Akuntansi.

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp**61.400.934.114,00** bila dibandingkan dengan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.367.581.199,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.033.352.915,00. Mutasi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	59.367.581.199,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	20.212.211.500,00
Jumlah	**Rp**	**79.579.792.699,00**
Pengurangan Tahun 2023	Rp	18.178.858.585,00
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**61.400.934.114,00**

Penambahan aset lain-lain sebesar Rp20.212.211.500,00 berasal dari :

- Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.	Rp	19.217.447.000,00
- Reklasifikasi ke aset lain-lain merupakan aset tidak berwujud rusak dan diusulkan untuk dilakukan penghapusan.	Rp	994.764.500,00
Jumlah	Rp	20.212.211.500,00

Pengurangan aset lain-lain sebesar Rp18.178.858.585,00 berasal dari :

- Penghapusan Aset Lain-Lain	Rp	3.591.105.516,00
- Treasury Deposit Facility	Rp	14.587.753.069,00
Jumlah	Rp	18.178.858.585,00

Rekapitulasi mutasi penambahan dan pengurangan berdasarkan uraian diatas untuk tiap-tiap Aset Lain-Lain Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-357 Rincian Aset Lainnya – Aset Lain-Lain

No	Jenis Aset Lain-Lain	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	**Tanah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Peralatan dan Mesin**	**13.557.383.879,00**	**0,00**	**3.591.105.516,00**	**9.966.278.363,00**
	Alat Besar	1.084.077.500,00	0,00	0,00	1.084.077.500,00
	Alat Angkutan	1.182.062.882,00	0,00	0,00	1.182.062.882,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
	Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.803.333.020,00	0,00	1.074.690.548,00	5.728.642.472,00
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	325.015.904,00	0,00	312.315.904,00	12.700.000,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	267.832.721,00	0,00	267.832.721,00	0,00
	Alat Laboratorium	1.957.278.040,00	0,00	900.995.988,00	1.056.282.052,00
	Alat Persenjataan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komputer	1.937.208.812,00	0,00	1.035.270.355,00	901.938.457,00
	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peralatan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Gedung dan Bangunan**	**396.213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**396.213.000,00**
	Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Monumen	396.213.000,00	0,00	0,00	396.213.000,00
	Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**30.826.231.251,00**	**0,00**	**0,00**	**30.826.231.251,00**
	Jalan dan Jembatan	6.178.366.620,00	0,00	0,00	6.178.366.620,00
	Bangunan Air (Irigasi)	5.456.341.361,00	0,00	0,00	5.456.341.361,00
	Instalasi	19.191.523.270,00	0,00	0,00	19.191.523.270,00
	Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aset Tetap Lainnya**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Aset Lain-Lain	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Aset Tidak Berwujud**	**0,00**	**994.764.500,00**	**0,00**	**994.764.500,00**
	Aset Tidak Berwujud	0,00	994.764.500,00	0,00	994.764.500,00
7	**Treasury Deposit Facility**	**14.587.753.069,00**	**19.217.447.000,00**	**14.587.753.069,00**	**19.217.447.000,00**
	Treasury Deposit Facility	14.587.753.069,00	19.217.447.000,00	14.587.753.069,00	19.217.447.000,00
	Jumlah	**59.367.581.199,00**	**20.212.211.500,00**	**18.178.858.585,00**	**61.400.934.114,00**

Beberapa upaya telah dilakukan Pemkab Bondowoso untuk menyelesaikan aset lain-lain pada Tahun 2023, namun beberapa faktor penyebab masih adanya saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 pada beberapa OPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Berkas-berkas dokumen yang dibutuhkan belum sepenuhnya lengkap.
- Kegiatan/pekerjaan yang asetnya akan dimutasi adalah kegiatan yang tahun perolehannya lebih dari 5 tahun dan saat ini pejabat yang mengelola kegiatan pada saat itu sebagian besar
  sudah purna tugas.
- Terjadi perubahan/penggabungan Organisasi Perangkat Daerah di tahun 2017 yang menyebabkan beberapa berkas kegiatan tidak dapat ditemukan karena perpindahan kantor dan ruangan.
- Pejabat penerima hibah (Kepala Desa/Kelurahan) sudah banyak yang purna/tidak menjabat sehingga kesulitan dalam melengkapi kelengkapan berkas hibah.

Terkait aset lain-lain berupa instalasi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah sebesar Rp19.191.523.270,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil sebanyak 54 unit senilai Rp19.191.523.270,00 merupakan aset yang berasal dari belanja modal (pengadaan tahun 2007, 2008 dan 2012) dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat (pengadaan tahun 2013, 2014 dan 2015). Aset yang berasal dari belanja modal tahun 2007, 2008 dan 2012 belum dihapus karena bentuk serah terima kepada PT. PLN (Persero) berupa Serah Terima Operasi (STO) sehingga aset masih menjadi milik Pemkab. Sedangkan pengadaan tahun 2013, 2014 dan 2015 awalnya masuk ke persediaan tetapi kemudian direklas (masuk aset lainnya) karena bentuk penyerahan berupa Serah Terima Operasi (STO).
b. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Situbondo untuk penyerahan aset dan perubahan Berita Acara Serah Terima yang awalnya Serah Terima Operasi (STO) menjadi Serah Terima Jaringan (STJ). Upaya lainnya, telah dilakukan konsultasi dengan KPP Pratama Situbondo dalam rangka pengenaan pajak hibah akibat serah terima aset. Namun demikian, dari upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut hingga sekarang masih belum menemui titik temu sehingga akan direncanakan untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak PT. PLN (Persero).

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.6.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	**3.992.607.602,00**	**3.029.721.102,00**

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.992.607.602,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5-358 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

No	Jenis Aset Lain-Lain	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	**Tanah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Peralatan dan Mesin**	**2.361.045.832,00**	**0,00**	**0,00**	**2.361.045.832,00**
	Alat Besar	1.084.077.500,00	0,00	0,00	1.084.077.500,00
	Alat Angkutan	1.171.229.882,00	0,00	0,00	1.171.229.882,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
	Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	101.263.450,00	0,00	0,00	101.263.450,00
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Persenjataan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komputer	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peralatan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Gedung dan Bangunan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**668.675.270,00**	**0,00**	**0,00**	**668.675.270,00**
	Jalan dan Jembatan	316.180.956,00	0,00	0,00	316.180.956,00
	Bangunan Air (Irigasi)	352.494.314,00	0,00	0,00	352.494.314,00
	Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aset Tetap Lainnya**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Aset Tidak Berwujud**	**0,00**	**962.886.500,00**	**0,00**	**962.886.500,00**
	Aset Tidak Berwujud	0,00	962.886.500,00	0,00	962.886.500,00
7	**Treasury Deposit Facility**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Treasury Deposit Facility	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**3.029.721.102,00**	**962.886.500,00**	**0,00**	**3.992.607.602,00**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.2 Kewajiban	**11.376.435.422,29**	**16.367.551.186,24**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, dengan penjelasan sebagai berikut:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	**11.376.435.422,29**	**16.367.551.186,24**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-359 Rincian Utang Jangka Pendek

No	Jenis	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	82.902.010,00	2.038.181.144,82	2.073.284.333,82	47.798.821,00
2	Pendapatan Diterima di Muka	1.405.862.437,56	332.905.020,67	959.405.520,90	779.361.937,33
3	Utang Beban	11.018.561.650,56	98.972.532.185,91	99.880.184.338,63	10.110.909.497,84
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.860.225.088,12	11.844.850.021,00	15.266.709.943,00	438.365.166,12
	Jumlah	**16.367.551.186,24**	**113.188.468.372,40**	**118.179.584.136,35**	**11.376.435.422,29**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga	**47.798.821,00**	**82.902.010,00**

Utang Perhitungan Fihak Ketiga adalah pajak atau uang yang dipungut tetapi belum disetor ke pihak ketiga atau ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2023. Utang PFK sebesar Rp47.798.821,00 terdiri dari :

Tabel 5-360 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	Jenis	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Pajak BOS	82.902.010,00	2.035.975.901,82	2.073.284.333,82	45.593.578,00
2	Utang Pajak BOK FKTP	0,00	2.205.243,00	0,00	2.205.243,00
	Jumlah	**82.902.010,00**	**2.038.181.144,82**	**2.073.284.333,82**	**47.798.821,00**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2023 sebesar Rp47.798.821,00. Jumlah tersebut merupakan pajak yang dipungut oleh Bendahara Dana BOS sebesar Rp45.593.578,00 dan Bendahara BOK FKTP sebesar Rp2.205.243,00 yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Negara.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	**779.361.937,33**	**1.405.862.437,56**

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan bentuk penerimaan dalam bentuk uang tunai yang diterima dari pihak ketiga namun belum mendapat kontraprestasi dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mengakui

sebagai pendapatan. Pendapatan Diterima di muka merupakan perbedaan pengakuan pendapatan LRA dengan pendapatan LO selain terjadinya piutang.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 untuk masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp779.361.937,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-361 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Sewa dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Bondowoso	793.511.666,67	0,00	476.107.000,00	317.404.666,67
2	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Kantor Kecamatan Tamanan	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Kantor Sekretariat DPRD	11.333.333,33	0,00	8.000.000,00	3.333.333,33
4	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Dinas Kesehatan	11.333.333,33	0,00	8.000.000,00	3.333.333,33
5	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.333.333,33	0,00	8.000.000,00	3.333.333,33
6	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Sekretariat Daerah	14.166.666,67	0,00	10.000.000,00	4.166.666,67
7	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Kecamatan Sukosari	0,00	35.000.000,00	7.000.000,00	28.000.000,00
8	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di SMP 1 Bondowoso	0,00	24.000.000,00	12.666.666,67	11.333.333,33
9	Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di RSUD dr. H.Koesnadi	172.377.000,00	0,00	38.306.000,00	134.071.000,00
10	Pendapatan Sewa ATM BRI di RSUD dr. H.Koesnadi	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00
11	Pendapatan Sewa ATM BNI di RSUD dr. H.Koesnadi	7.762.500,00	0,00	7.762.500,00	0,00
12	Pendapatan Pajak Reklame	371.394.604,23	273.905.020,67	370.913.354,23	274.386.270,67
	Jumlah	**1.405.862.437,56**	**332.905.020,67**	**959.405.520,90**	**779.361.937,33**

1. Pendapatan Sewa dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Bondowoso sebesar Rp317.404.666,67.

   Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk Kantor Bank Jatim Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 2 tahun dimulai pada tanggal 26 Agustus 2022 dan akan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2024 sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bondowoso Nomor : 180/667/430.4.2/2022 – Nomor : 061/742/BWS/UM/PKS

tanggal 22 Agustus 2022. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-362 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Bondowoso

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	24	16	8
2	Nilai Sewa Gedung (Rupiah)	952.214.000,00	634.809.333,33	317.404.666,67

2. Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Kantor Kecamatan Tamanan sebesar Rp0,00.
   Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk Gedung Kantor Kas Bank Jatim Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bondowoso Nomor : 180/925/430.10.3/2019 – Nomor : 061/306.a/BWS/UM/2019 Tanggal 5 Agustus 2019. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-363 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka
Gedung Kantor Kas Bank Jatim Kantor Kecamatan Tamanan

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	60	0
2	Nilai Sewa Gedung (Rupiah)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00

3. Pendapatan Sewa ATM Bank Jatim di Kantor Sekretariat DPRD sebesar Rp3.333.333,33.
   Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM Bank Jatim Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bondowoso Nomor : 180/925A/430.10.3/2019 – Nomor : 058/306.b/BWS/UM/2019 Tanggal 5 Agustus 2019. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-364 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa ATM Bank Jatim
Kantor Sekretariat DPRD

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	55	5
2	Nilai Sewa Gedung (Rupiah)	40.000.000,00	36.666.666,67	3.333.333,33

4. Pendapatan Sewa ATM Bank Jatim di Dinas Kesehatan sebesar Rp3.333.333,33.
   Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM Bank Jatim Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tanggal 1 Juni 2019 dan akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bondowoso Nomor : 180/925D/430.10.3/2019 – Nomor : 058/306.e/BWS/UM/2019 Tanggal 5 Agustus 2019. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-365 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa ATM Bank Jatim Dinas Kesehatan

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	55	5
2	Nilai Sewa Gedung (Rupiah)	40.000.000,00	36.666.666,67	3.333.333,33

5. Pendapatan Sewa ATM Bank Jatim di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.333.333,33.
   Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM Bank Jatim Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tanggal 1 Juni 2019 dan akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bondowoso Nomor : 180/925B/430.10.3/2019 – Nomor : 058/306.c/BWS/UM/2019 Tanggal 5 Agustus 2019. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-366 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa ATM Bank Jatim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	55	5
2	Nilai Sewa Gedung (Rupiah)	40.000.000,00	36.666.666,67	3.333.333,33

6. Pendapatan Sewa ATM Bank Jatim di Sekretariat Daerah sebesar Rp4.166.666,67.
   Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM Bank Jatim Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tanggal 1 Juni 2019 dan akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bondowoso Nomor : 180/925C/430.10.3/2019 – Nomor : 058/306.o/BWS/UM/2019 Tanggal 5 Agustus 2019. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-367 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa ATM Bank Jatim Sekretariat Daerah

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	55	5
2	Nilai Sewa Gedung (Rupiah)	50.000.000,00	45.833.333,33	4.166.666,67

7. Pendapatan Sewa ATM Bank Jatim di Kecamatan Sukosari sebesar Rp28.000.000,00.
   Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM Bank Jatim Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan akan berakhir pada 31 Desember 2027 sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bondowoso Nomor : 900/004/430.10.3/2023 – Nomor : 061/038/BWS/UM/2023 Tanggal 2 Januari 2023. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-368 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa ATM Bank Jatim Kecamatan Sukosari

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	12	48
2	Nilai Sewa Gedung (Rupiah)	35.000.000,00	7.000.000,00	28.000.000,00

8. Pendapatan Sewa ATM Bank BNI di SMP 1 Bondowoso sebesar Rp11.333.333,33.
   Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM Bank Negara Indoesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 3 tahun dimulai pada tanggal 1 Juni 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Lahan ATM Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember Dengan SMP Negeri 01 Bondowoso Nomor : JBR/2/002/2023 Tanggal 10 Januari 2023. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-369 Perhitungan Pendapatan Diterima Di Muka Sewa ATM Bank BNI SMP 1 Bondowoso

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	36	19	17
2	Nilai Sewa Gedung (Rupiah)	24.000.000,00	12.666.666,67	11.333.333,33

9. Pendapatan Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di RSUD dr. H. Koesnadi sebesar Rp134.071.000,00.
   Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk Gedung Kantor Kas Bank Jatim di RSUD dr. H. Koesnadi yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tanggal 11 Juni 2022 dan akan berakhir pada tanggal 11 Juni 2027 sesuai Akta Perjanjian Kerjasama Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jatim di Rumah Sakit Umum Dokter Haji Koesnadi Bondowoso Antara Rumah Sakit Umum Dokter Haji Koesnadi Bondowoso dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bondowoso Nomor : 97 Tanggal 23 September 2023. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-370 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Gedung Kantor Kas Bank Jatim RSUD dr. H. Koesnadi

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	18	42
2	Nilai Sewa Gedung (Rupiah)	191.530.000,00	57.459.000,00	134.071.000,00

10. Pendapatan Sewa ATM BRI di RSUD dr. H.Koesnadi sebesar nihil.
    Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM BRI di RSUD dr. H.Koesnadi yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 5 tahun dimulai pada tanggal 24 September 2018 dan akan berakhir pada tanggal 23 September 2023 sesuai Perjanjian Kerjasama RSUD dr. H. Koesnadi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso tentang Pengoperasian Automated Teller Machine (ATM) di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso Nomor : 134.4/1361/43010.7/2018 – Nomor : B2794/KC-XIV/LOG/12/2018 Tanggal 10 Desember 2018. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-371 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka ATM BRI RSUD dr. H.Koesnadi

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	60	60	0
2	Nilai Sewa Gedung (Rupiah)	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00

11. Pendapatan Sewa ATM BNI di RSUD dr. H.Koesnadi sebesar nihil.
Jumlah tersebut merupakan pendapatan sewa gedung milik Pemda yang disewa untuk ATM BNI di RSUD dr. H.Koesnadi yang belum jatuh tempo. Masa sewa gedung tersebut selama 3 tahun dimulai pada tanggal 1 Oktober 2020 dan akan berakhir pada 30 September 2023 sesuai Addendum (Perubahan) Perjanjian Kerjasama Sewa – Menyewa Lahan ATM Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember dengan RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso Nomor : JBR/2.1/021/ /2020 – Nomor : 134.4/1353/430.10.7/2020. Perhitungan pendapatan dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-372 Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka ATM BNI RSUD dr. H.Koesnadi

No	Uraian	Masa Sewa	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Periode Sewa Gedung (Bulan)	36	36	0
2	Nilai Sewa Gedung (Rupiah)	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00

12. Pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp274.386.270,67.
Jumlah tersebut merupakan pendapatan Pajak Reklame yang dikelola oleh Badan Pendapatan.

Tabel 5-373 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pajak Reklame	371.394.604,23	273.905.020,67	370.913.354,23	274.386.270,67
	Jumlah	**371.394.604,23**	**273.905.020,67**	**370.913.354,23**	**274.386.270,67**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.2.1.3 Utang Belanja	**10.110.909.497,84**	**11.018.561.650,56**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 adalah Rp10.110.909.497,84, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-374 Rincian Utang Belanja

No	Jenis Utang Beban	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Bagi Hasil atas Retribusi Parkir Berlangganan	28.008.000,00	27.891.000,00	28.008.000,00	27.891.000,00
2	Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya	701.131.274,56	36.101.235.164,91	33.874.448.678,63	2.927.917.760,84
3	Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi-BPJS	6.406.078.127,00	50.169.268.562,00	50.879.614.394,00	5.695.732.295,00
4	Utang jasa pelayanan Non Maskin	517.455.900,00	0,00	517.455.900,00	0,00

No	Jenis Utang Beban	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5	Utang jasa pelayanan SJP	0,00	38.120.800,00	33.150.800,00	4.970.000,00
6	Utang jasa pelayanan Covid-19	16.238.000,00	0,00	16.238.000,00	0,00
7	Utang Jasa Pelayanan Umum	410.189.701,00	7.019.224.979,00	7.038.740.617,00	390.674.063,00
8	Utang Jasa Pemusnahan Sampah Medis	1.353.645,00	7.907.255,00	1.353.645,00	7.907.255,00
9	Utang Jasa Pelayanan Jampersal	6.884.800,00	0,00	6.884.800,00	0,00
10	Utang Belanja Pegawai	35.550.000,00	1.632.800.000,00	1.668.350.000,00	0,00
11	Utang Belanja Barang	230.345.500,00	619.075.700,00	636.587.250,00	212.833.950,00
12	Utang Belanja Jasa	2.315.087.703,00	3.356.243.375,00	4.829.113.254,00	842.217.824,00
13	Utang Belanja Perjalanan Dinas	97.990.000,00	765.350,00	97.990.000,00	765.350,00
14	Utang Belanja Hibah	252.249.000,00	0,00	252.249.000,00	0,00
	Total	**11.018.561.650,56**	**98.972.532.185,91**	**99.880.184.338,63**	**10.110.909.497,84**

1. Utang Bagi Hasil Atas Retribusi Parkir Berlangganan sebesar Rp27.891.000,00.
   Jumlah tersebut merupakan utang bagi hasil atas pendapatan retribusi parkir berlangganan kepada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resort Bondowoso berdasarkan perjanjian kerja sama pelaksanaan fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan kendaraan bermotor di Kabupaten Bondowoso Nomor:188.45/10.15/430.6.2/2014, Nomor:974/547/120.12/2014 dan Nomor: 1057/VI/2014/Polres tanggal 5 Juni 2014 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:
   - Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Tabel 5-375 Rincian Utang Bagi Hasil Parkir Berlangganan – Dispenda Prov Jatim

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	20.228.000,00	0,00	20.228.000,00	0,00
2	2023	0,00	20.143.500,00		20.143.500,00
Jumlah		**20.228.000,00**	**20.143.500,00**	**20.228.000,00**	**20.143.500,00**

   - Polres Bondowoso

Tabel 5-376 Rincian Utang Bagi Hasil Parkir Berlangganan – Polres Bondowoso

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	7.780.000,00	0,00	7.780.000,00	0,00
2	2023	0,00	7.747.500,00	0,00	7.747.500,00
Jumlah		**7.780.000,00**	**7.747.500,00**	**7.780.000,00**	**7.747.500,00**

2. Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya sebesar Rp2.927.917.760,84.
   Jumlah tersebut merupakan utang atas jasa pelayanan yang telah diberikan oleh pihak ketiga kepada RSUD dr H. Koesnadi Bondowoso dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-377 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya

No	Jenis Utang Beban	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a	UTD PMI Bondowoso	168.480.000,00	2.458.360.000,00	2.019.240.000,00	607.600.000,00

No	Jenis Utang Beban	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b	Penyedia Bahan Habis Pakai Umum (Alat Kesehatan)	46.566.593,46	4.238.630.612,45	4.116.411.321,28	168.785.884,63
c	Penyedia Bahan Habis Pakai Laborat (Bahan Kimia)	69.032.005,24	3.060.156.121,62	2.866.040.158,87	263.147.967,99
d	Penyedia Obat	134.728.321,40	17.476.681.616,95	16.563.546.487,96	1.047.863.450,39
e	Penyedia Oksigen	117.272.721,00	2.451.717.997,68	2.344.642.680,18	224.348.038,50
f	Penyedia Bahan Habis Pakai Gigi	6.819.749,00	21.125.401,00	27.000.150,00	945.000,00
g	Penyedia Bahan Habis Pakai IBS/ RBS	62.981.305,18	3.976.589.773,97	3.714.790.715,17	324.780.363,98
h	Penyedia Bahan Habis Pakai Radiologi	46.156.020,00	860.582.787,50	906.738.807,50	0,00
i	Bahan Habis Pakai Cathlab	0,00	1.833.590,00	321.530,00	1.512.060,00
j	Bahan Habis Pakai Orthopedi	44.458.559,28	1.359.889.849,75	1.130.488.925,68	273.859.483,35
k	Biaya Pemeriksaan Penunjang Medik	4.636.000,00	144.911.000,00	141.452.000,00	8.095.000,00
l	Penyedia Nitrogen	0,00	50.756.413,99	43.775.901,99	6.980.512,00
	Total	**701.131.274,56**	**36.101.235.164,91**	**33.874.448.678,63**	**2.927.917.760,84**

a. Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Bondowoso.

Tabel 5-378 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya

UTD PMI Bondowoso

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	168.480.000,00	0,00	168.480.000,00	0,00
2	2023	0,00	2.458.360.000,00	1.850.760.000,00	607.600.000,00
Jumlah		**168.480.000,00**	**2.458.360.000,00**	**2.019.240.000,00**	**607.600.000,00**

b. Penyedia Bahan Habis Pakai Umum (Alat Kesehatan).

Tabel 5-379 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Bahan Habis Pakai Umum (Alat Kesehatan)

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	46.566.593,46	0,00	46.566.593,46	0,00
2	2023	0,00	4.238.630.612,45	4.069.844.727,82	168.785.884,63
Jumlah		**46.566.593,46**	**4.238.630.612,45**	**4.116.411.321,28**	**168.785.884,63**

Rincian saldo utang per 31 Desember 2023 sebesar Rp168.785.884,63 tersebut merupakan utang kepada penyedia bahan habis pakai umum (alat kesehatan) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-380 Rincian Saldo Utang Bahan Habis Pakai Umum (Alkes)

No	Nama Penyedia	31 Desember 2023 (Rp)
1	PT. SUMBER ZHAFRAN A	10.989.000,00
2	PT. MPA	10.381.998,20
3	PT. SINAR PANCA M	8.700.624,00
4	PT. MBS	1.526.066,00
5	PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA G	48.523.480,00
6	PT. ENSEVAL	11.603.385,00
7	PT. MMA	2.243.640,00
8	PT. Rajawali Nusindo	2.600.285,00
9	PT. APL	3.412.870,00
10	PT. MMM	1.110.000,00

No	Nama Penyedia	31 Desember 2023 (Rp)
11	PT. BRATACO	683.880,00
12	PT. AAM	7.584.875,00
13	PT. SUWARNA ABRA M	32.200.000,00
14	PT. KF	1.139.579,00
15	PT. GLOBAL PHARMA I	3.300.000,00
16	PT. SINAR RODA	13.394.703,00
17	PT. ENDO INDONESIA	2.400.000,93
18	PT. SURGIKA	4.049.998,50
19	PT. MERAPI	2.941.500,00
	Jumlah	**168.785.884,63**

c. Penyedia Bahan Habis Pakai Laboratorium (Bahan Kimia).

Tabel 5-381 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Bahan Habis Pakai Laboratorium (Bahan Kimia)

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	69.032.005,24	0,00	69.032.005,24	0,00
2	2023	0,00	3.060.156.121,62	2.797.008.153,63	263.147.967,99
Jumlah		**69.032.005,24**	**3.060.156.121,62**	**2.866.040.158,87**	**263.147.967,99**

Rincian saldo utang per 31 Desember 2023 sebesar Rp263.147.967,99 tersebut merupakan utang kepada penyedia bahan habis pakai laboratorium (bahan kimia) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-382 Rincian Saldo Utang Bahan Habis Pakai Laboratorium (Bahan Kimia)

No	Nama Penyedia	31 Desember 2023 (Rp)
1	PT. MB.CITRA MEDIKA	93.415.300,76
2	PT. KPA	61.119.430,50
3	PT. SABA INDOMEDIKA	2.773.890,00
4	PT. DEXA ARFINDO P	39.973.026,76
5	PT. DIMENSI CITRA SEMESTA	9.686.970,00
6	PT. BIO ANALITIKA	7.283.849,97
7	PT. MAHAKARYA PRATAMA MEDIKA	20.868.000,00
8	PT. MULTI MEDIKA MAKMUR	8.325.000,00
9	PT. SETIA ANDALAN SUKSES	1.665.000,00
10	PT. WAHANA RIZKY G	18.037.500,00
	Jumlah	**263.147.967,99**

d. Penyedia Obat.

Tabel 5-383 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Obat

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	134.728.321,40	0,00	134.728.321,40	0,00
2	2023	0,00	17.476.681.616,95	16.428.818.166,56	1.047.863.450,39
Jumlah		**134.728.321,40**	**17.476.681.616,95**	**16.563.546.487,96**	**1.047.863.450,39**

Rincian saldo utang per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.047.863.450,39 tersebut merupakan utang kepada penyedia obat dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-384 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Obat

No	Nama Penyedia	31 Desember 2023 (Rp)
1	PT. SATORIA DIST.L	109.119.878,00
2	PT. MBS	46.288.826,50
3	PT. MPI	64.150.452,00
4	PT. DNR	1.715.745,00

No	Nama Penyedia	31 Desember 2023 (Rp)
5	PT. KF	254.832.620,30
6	PT. DISTRIVERSA BUANAMAS	660.450,00
7	PT. DMA	4.382.000,00
8	PT. MERAPI	101.056.350,00
9	PT. AAM	249.462.720,00
10	PT. PARIT PADANG	41.308.900,00
11	PT. PENTA VALENT	37.583.474,39
12	PT. APL	54.484.789,00
13	PT. ENSEVAL	43.936.927,78
14	PT. SAPTA SARI TAMA	255.030,00
15	RS. BHAYANGKARA	190.955,00
16	PT. AAA	16.650.000,00
17	PT. Rajawali Nusindo	2.214.798,92
18	PT. BSP	18.608.533,50
19	APT. SAFARI	961.000,00
	Jumlah	**1.047.863.450,39**

e. Penyedia Oksigen.

Tabel 5-385 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Oksigen

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	117.272.721,00	0,00	117.272.721,00	0,00
2	2023	0,00	2.451.717.997,68	2.227.369.959,18	224.348.038,50
Jumlah		**117.272.721,00**	**2.451.717.997,68**	**2.344.642.680,18**	**224.348.038,50**

Rincian saldo utang per 31 Desember 2023 sebesar Rp224.348.038,50 tersebut merupakan utang kepada penyedia oksigen dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-386 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Oksigen

No	Nama Penyedia	31 Desember 2023 (Rp)
1	PT. SAMATOR GAS I	224.348.038,50
	Jumlah	**224.348.038,50**

f. Penyedia Bahan Habis Pakai Gigi.

Tabel 5-387 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Bahan Habis Pakai Gigi

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	6.819.749,00	0,00	6.819.749,00	0,00
2	2023	0,00	21.125.401,00	20.180.401,00	945.000,00
Jumlah		**6.819.749,00**	**21.125.401,00**	**27.000.150,00**	**945.000,00**

Rincian saldo utang per 31 Desember 2023 sebesar Rp945.000,00 tersebut merupakan utang kepada penyedia bahan habis pakai gigi dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-388 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Bahan Habis Pakai Gigi

No	Nama Penyedia	31 Desember 2023 (Rp)
1	PT. SENTRUM DENTAL SENTOSA	945.000,00
	Jumlah	**945.000,00**

g. Penyedia Bahan Habis Pakai Instalasi/Ruang Bedah Sentral (IBS/RBS).

Tabel 5-389 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Bahan Habis Pakai IBS/RBS

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	62.981.305,18	0,00	62.981.305,18	0,00
2	2023	0,00	3.976.589.773,97	3.651.809.409,99	324.780.363,98
Jumlah		**62.981.305,18**	**3.976.589.773,97**	**3.714.790.715,17**	**324.780.363,98**

Rincian saldo utang per 31 Desember 2023 sebesar Rp324.780.363,98 tersebut merupakan utang kepada penyedia bahan habis pakai IBS/RBS dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-390 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Bahan Habis Pakai IBS/RBS

No	Nama Penyedia	31 Desember 2023 (Rp)
1	PT. MEGAH MEDIKA PHARMA	4.162.500,00
2	PT. MPI	76.419.504,00
3	PT. SAG	480.630,00
4	PT. MERAPI	6.219.824,00
5	PT. ABYAKTA SEJAHTERA A	169.662.168,00
6	PT. AAM	4.616.999,98
7	PT. SURGIKA	4.499.998,00
8	PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA G	2.226.400,00
9	PT. PANCARAYA K S	32.827.140,00
10	PT. IJABAH MAKMUR J	12.010.200,00
11	PT. DIRGANTARA Jaya S	11.655.000,00
	Jumlah	**324.780.363,98**

h. Penyedia Bahan Habis Pakai Radiologi.

Tabel 5-391 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Bahan Habis Pakai Radiologi

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	46.156.020,00	0,00	46.156.020,00	0,00
2	2023	0,00	860.582.787,50	860.582.787,50	0,00
Jumlah		**46.156.020,00**	**860.582.787,50**	**906.738.807,50**	**0,00**

Rincian saldo utang per 31 Desember 2023 sebesar nihil tersebut merupakan utang kepada penyedia bahan habis pakai radiologi.

i. Penyedia Bahan Habis Pakai Cathlab.

Tabel 5-392 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Bahan Habis Pakai Cathlab

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2023	0,00	1.833.590,00	321.530,00	1.512.060,00
Jumlah		**0,00**	**1.833.590,00**	**321.530,00**	**1.512.060,00**

Rincian saldo utang per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.512.060,00 tersebut merupakan utang kepada penyedia bahan habis pakai Cathlab dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-393 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Bahan Habis Pakai Cathlab

No	Nama Penyedia	31 Desember 2023 (Rp)
1	PT. RAJAWALI MEDIKA MANDIRI	1.512.060,00
	Jumlah	**1.512.060,00**

j. Orthopedi.

Tabel 5-394 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Bahan Habis Pakai Orthopedi

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	44.458.559,28	0,00	44.458.559,28	0,00
2	2023	0,00	1.359.889.849,75	1.086.030.366,40	273.859.483,35
Jumlah		**44.458.559,28**	**1.359.889.849,75**	**1.130.488.925,68**	**273.859.483,35**

Rincian saldo utang per 31 Desember 2023 sebesar Rp273.859.483,35 tersebut merupakan utang kepada penyedia bahan habis pakai orthopedi dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-395 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Bahan Habis Pakai Orthopedi

No	Nama Penyedia	31 Desember 2023 (Rp)
1	PT. ENDO INDONESIA	159.591.999,35
2	PT. PARIT PADANG	25.763.854,00
3	PT. ORTO TIMUR	88.503.630,00
	Jumlah	**273.859.483,35**

k. Biaya Pemeriksaan Penunjang Medik.

Tabel 5-396 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Biaya Pemeriksaan Penunjang Medik

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2	2022	3.136.000,00	0,00	3.136.000,00	0,00
3	2023	0,00	144.911.000,00	136.816.000,00	8.095.000,00
Jumlah		**4.636.000,00**	**144.911.000,00**	**141.452.000,00**	**8.095.000,00**

l. Penyedia Nitrogen.

Tabel 5-397 Rincian Utang Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya Penyedia Nitrogen

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2023	0,00	50.756.413,99	43.775.901,99	6.980.512,00
Jumlah		**0,00**	**50.756.413,99**	**43.775.901,99**	**6.980.512,00**

Rincian saldo utang per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.980.512,00 tersebut merupakan utang kepada penyedia nitrogen dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-398 Rincian Saldo Utang Kepada Penyedia Nitrogen

No	Nama Penyedia	31 Desember 2023 (Rp)
1	PT. SAMATOR GAS I	6.980.512,00
	Jumlah	**6.980.512,00**

3. Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi-BPJS sebesar Rp5.695.732.295,00.

Jumlah tersebut merupakan utang kepada pegawai pada lingkup Dinas Kesehatan dan RSUD dr H. Koesnadi atas jasa pelayanan kesehatan terhadap pasien non rawat jalan BPJS sebesar persentase tertentu dari besarnya klaim BPJS yang diterima dengan rincian sebagai berikut :

a. Jasa Pelayanan Non Kapitasi BPJS – Dinas Kesehatan

Tabel 5-399 Rincian Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi BPJS – Dinas Kesehatan

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	122.386.000,00	0,00	122.386.000,00	0,00
2	2023	0,00	4.067.543.560,00	3.438.614.080,00	628.929.480,00
Jumlah		**122.386.000,00**	**4.067.543.560,00**	**3.561.000.080,00**	**628.929.480,00**

b. Jasa Pelayanan Non Kapitasi BPJS – RSUD dr H. Koesnadi.

Tabel 5-400 Rincian Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi BPJS – RSUD dr H. Koesnadi

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	6.283.692.127,00	0,00	6.283.692.127,00	0,00
2	2023	0,00	46.101.725.002,00	41.034.922.187,00	5.066.802.815,00
Jumlah		**6.283.692.127,00**	**46.101.725.002,00**	**47.318.614.314,00**	**5.066.802.815,00**

4. Jasa Pelayanan Non Maskin sebesar nihil.
Jumlah tersebut merupakan utang kepada pegawai pada lingkup Dinas Kesehatan atas jasa pelayanan terhadap pasien non maskin dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-401 Rincian Utang Jasa Pelayanan Non Maskin

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	517.455.900,00	0,00	517.455.900,00	0,00
Jumlah		**517.455.900,00**	**0,00**	**517.455.900,00**	**0,00**

5. Utang Jasa Pelayanan SJP sebesar Rp4.970.000,00.
Jumlah tersebut merupakan utang kepada pegawai pada lingkup Dinas Kesehatan atas jasa pelayanan terhadap masyarakat miskin yang belum memiliki penjaminan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu Indonesia Sehat (KIS) (aktif/belum aktif) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-402 Rincian Utang Jasa Pelayanan SJP

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2023	0,00	38.120.800,00	33.150.800,00	4.970.000,00
Jumlah		**0,00**	**38.120.800,00**	**33.150.800,00**	**4.970.000,00**

6. Utang Jasa Pelayanan Covid-19 sebesar nihil.
Jumlah tersebut merupakan utang kepada pegawai pada lingkup Dinas Kesehatan atas jasa pelayanan kesehatan terhadap pasien Covid-19 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-403 Rincian Utang Jasa Pelayanan Covid-19

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	16.238.000,00	0,00	16.238.000,00	0,00
Jumlah		**16.238.000,00**	**0,00**	**16.238.000,00**	**0,00**

7. Utang Jasa Pelayanan Umum sebesar Rp390.674.063,00.
Jumlah tersebut merupakan utang kepada pegawai pada lingkup Dinas Kesehatan dan RSUD dr H. Koesnadi atas jasa pelayanan kesehatan terhadap pasien umum dengan rincian sebagaimana tabel berikut :
a. Jasa Pelayanan Umum – Dinkes.

Tabel 5-404 Rincian Utang Jasa Pelayanan Umum – Dinkes

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	125.401.640,00	0,00	125.401.640,00	0,00
2	2023	0,00	1.457.665.571,00	1.339.864.932,00	117.800.639,00
Jumlah		**125.401.640,00**	**1.457.665.571,00**	**1.465.266.572,00**	**117.800.639,00**

b. Jasa Pelayanan Umum – RSUD dr H. Koesnadi.

Tabel 5-405 Rincian Utang Jasa Pelayanan Umum – RSUD dr H. Koesnadi

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	284.788.061,00	0,00	284.788.061,00	0,00
2	2023	0,00	5.561.559.408,00	5.288.685.984,00	272.873.424,00
Jumlah		**284.788.061,00**	**5.561.559.408,00**	**5.573.474.045,00**	**272.873.424,00**

8. Utang Jasa Pemusnahan Sampah Medis sebesar Rp7.907.255,00.
Jumlah tersebut merupakan utang kepada pihak ketiga atas jasa pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah hasil buangan dari suatu aktivitas medis pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-406 Rincian Utang Jasa Pemusnahan Sampah Medis
PT. Anak Lanang Tiga Perkasa

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	1.353.645,00	0,00	1.353.645,00	0,00
2	2023	0,00	7.907.255,00	0,00	7.907.255,00
Jumlah		**1.353.645,00**	**7.907.255,00**	**1.353.645,00**	**7.907.255,00**

9. Utang Jasa Pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) sebesar nihil.
Jumlah tersebut merupakan utang kepada pegawai pada lingkup Dinas Kesehatan atas pelayanan kesehatan terhadap pasien Jampersal dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-407 Rincian Utang Jasa Pelayanan Jampersal

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	6.884.800,00	0,00	6.884.800,00	0,00
Jumlah		**6.884.800,00**	**0,00**	**6.884.800,00**	**0,00**

10. Utang Belanja Pegawai sebesar nihil.
Jumlah tersebut merupakan utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi dan iuran jaminan kesehatan PNS pada RSUD dr. H. Koesnadi serta insentif BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah yang belum dibayar dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-408 Rincian Utang Belanja Pegawai

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	s.d 2022	35.550.000,00	0,00	35.550.000,00	0,00
2	2023	0,00	1.632.800.000,00	1.632.800.000,00	0,00
Jumlah		**35.550.000,00**	**1.632.800.000,00**	**1.668.350.000,00**	**0,00**

11. Utang Belanja Barang sebesar Rp212.833.950,00.
Jumlah tersebut merupakan utang kepada penyedia barang atas barang berupa persediaan yang belum dibayar dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-409 Rincian Utang Belanja Barang

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	s.d 2022	230.345.500,00	0,00	230.345.500,00	0,00
2	2023	0,00	619.075.700,00	406.241.750,00	212.833.950,00
Jumlah		**230.345.500,00**	**619.075.700,00**	**636.587.250,00**	**212.833.950,00**

12. Utang Belanja Jasa sebesar Rp842.217.824,00.
Jumlah tersebut merupakan utang belanja jasa listrik, air, telepon, internet, dan langganan media cetak yang sampai akhir Tahun 2023 belum terbayar dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-410 Rincian Utang Belanja Jasa

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	s.d 2022	2.315.087.703,00	0,00	2.315.087.703,00	0,00
2	2023	0,00	3.356.243.375,00	2.514.025.551,00	842.217.824,00
Jumlah		**2.315.087.703,00**	**3.356.243.375,00**	**4.829.113.254,00**	**842.217.824,00**

13. Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp765.350,00.
    Jumlah tersebut merupakan utang belanja perjalanan dinas sumber dana BOS yang belum dibayar dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-411 Rincian Utang Belanja Perjalanan Dinas

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	97.990.000,00	0,00	97.990.000,00	0,00
2	2023	0,00	765.350,00	0,00	765.350,00
Jumlah		**97.990.000,00**	**765.350,00**	**97.990.000,00**	**765.350,00**

14. Utang Belanja Hibah sebesar nihil.
    Jumlah tersebut merupakan utang kepada pihak ketiga berupa hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang yang belum dibayar dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-412 Rincian Utang Belanja Hibah

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	252.249.000,00	0,00	252.249.000,00	0,00
Jumlah		**252.249.000,00**	**0,00**	**252.249.000,00**	**0,00**

Utang belanja belum termasuk utang klaim Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso kepada BLUD RSUD dr. H. Koesnadi sebesar Rp347.597.386,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Klaim Otopsi/Visum - Dinkes	Rp	3.300.000,00
- Klaim Penjamin - Dinkes	Rp	319.767.386,00
- Klaim Pelayanan Ambulance - Dinkes	Rp	24.530.000,00
Jumlah	Rp	**347.597.386,00**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	**438.365.166,12**	**3.860.225.088,12**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebesar Rp438.365.166,12 pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp3.860.225.088,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-413 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Jenis Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Titipan Dana Bantuan Sapi Banpres	125.912.000,00	0,00	0,00	125.912.000,00
2	Utang Bantuan Sosial kepada Partai Politik	645,12	0,00	0,00	645,12
3	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	3.284.079.672,00	0,00	3.284.079.672,00	0,00
4	Utang Bantuan Keuangan Provinsi	450.232.771,00	11.844.850.021,00	11.982.630.271,00	312.452.521,00
	Jumlah	**3.860.225.088,12**	**11.844.850.021,00**	**15.266.709.943,00**	**438.365.166,12**

1. Titipan Dana Bantuan Sapi Banpres sebesar Rp125.912.000,00.
   Jumlah tersebut merupakan hasil penerimaan kembali atas pengguliran dana bantuan sapi Banpres/hibah dari Pemerintah Pusat kepada Masyarakat Petani Peternak yang belum digulirkan kembali dan dana tersebut masih ada di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-414 Rincian Utang Titipan Dana Bantuan Sapi Banpres

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2003	125.912.000,00	0,00	0,00	125.912.000,00
Jumlah		**125.912.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125.912.000,00**

2. Utang Bantuan Sosial kepada Partai Politik sebesar Rp645,12.
   Jumlah tersebut merupakan utang beban berupa saldo Utang Bantuan Sosial kepada Partai Politik pada tahun 2010 dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-415 Rincian Utang Bantuan Sosial kepada Partai Politik

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	P K B	64,13	0,00	0,00	64,13
2	P. GOLKAR	51,78	0,00	0,00	51,78
3	P P P	30,53	0,00	0,00	30,53
4	P D I P	34,44	0,00	0,00	34,44
5	P. DEMOKRAT	99,43	0,00	0,00	99,43
6	P K S	59,95	0,00	0,00	59,95
7	P K P B	23,95	0,00	0,00	23,95
8	P. HANURA	71,81	0,00	0,00	71,81
9	P P R N	62,69	0,00	0,00	62,69
10	P A N	29,04	0,00	0,00	29,04
11	P. BARNAS	40,86	0,00	0,00	40,86
12	P K N U	76,51	0,00	0,00	76,51
Jumlah		**645,12**	**0,00**	**0,00**	**645,12**

3. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer sebesar Rp0,00.
   Jumlah tersebut merupakan utang utang kelebihan pembayaran transfer dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada pihak ketiga dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-416 Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	s.d 2021	3.284.079.672,00	0,00	3.284.079.672,00	0,00
Jumlah		**3.284.079.672,00**	**0,00**	**3.284.079.672,00**	**0,00**

   Pengurangan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer sebesar Rp3.284.079.672,00 merupakan koreksi saldo awal Utang Kelebihan Pembayaran Transfer.

4. Utang Bantuan Keuangan Provinsi Rp312.452.521,00.
   Jumlah tersebut merupakan bantuan keuangan yang tidak terealisasi dan sampai dengan akhir Tahun 2023 belum disetorkan kembali ke rekening Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-417 Rincian Bantuan Keuangan Provinsi

No	Tahun	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2022	450.232.771,00	0,00	450.232.771,00	0,00
2	2023	0,00	11.844.850.021,00	11.532.397.500,00	312.452.521,00
Jumlah		**450.232.771,00**	**11.844.850.021,00**	**11.982.630.271,00**	**312.452.521,00**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	**0,00**	**0,00**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Saldo kewajiban jangka panjang Per 31 Desember 2023 adalah Rp0,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.3 Ekuitas	**2.781.949.059.263,09**	**2.830.841.722.238,64**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Untuk ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.781.949.059.263,09 dan per 31 Desember 2022 senilai Rp2.830.841.722.238,64. Penjelasan secara lengkap dapat dilihat di Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.1 Pendapatan-LO	**1.784.121.948.219,29**	**1.728.571.124.896,29**

Pendapatan pada Laporan Operasional (LO) disajikan berdasarkan akuntansi berbasis akrual dimana pengakuan Pendapatan-LO terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan Tahun 2023, sehingga nilai pendapatan-LO adalah sebesar Surat Ketetapan Pendapatan yang telah diterbitkan. Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan pada Laporan Operasional untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.784.121.948.219,29. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.728.571.124.896,29 mengalami kenaikan sebesar Rp55.550.823.323,00 atau 3,21% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-418 Kelompok Pendapatan LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah	222.624.958.502,00	194.782.467.348,86	27.842.491.153,14	14,29
2	Pendapatan Transfer	1.478.045.566.360,00	1.464.019.699.764,00	14.025.866.596,00	0,82
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	83.451.423.357,29	69.768.957.783,43	13.682.465.573,86	19,61
	Jumlah	**1.784.121.948.219,29**	**1.728.571.124.896,29**	**55.550.823.323,00**	**3,21**

Adapun realisasi masing-masing akun Pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut :

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
4.7.5 Pendapatan Asli Daerah	**222.624.958.502,00**	**194.782.467.348,86**

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp222.624.958.502,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp194.782.467.348,86 mengalami kenaikan sebesar Rp27.842.491.153,14 atau 14,29 % dengan jenis pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-419 Jenis Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	49.153.984.492,56	45.647.481.807,03	3.506.502.685,53	7,68
2	Pendapatan Retribusi Daerah	20.956.797.827,68	17.973.593.571,24	2.983.204.256,44	16,60
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.113.545.893,13	6.242.668.473,27	(129.122.580,14)	(2,07)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	146.400.630.288,63	124.918.723.497,32	21.481.906.791,31	17,20
	Jumlah	**222.624.958.502,00**	**194.782.467.348,86**	**27.842.491.153,14**	**14,29**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.1.5.1 Pendapatan Pajak Daerah	**49.153.984.492,56**	**45.647.481.807,03**

Pajak daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah. Realisasi pajak daerah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp49.153.984.492,56. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp45.647.481.807,03 mengalami kenaikan sebesar Rp3.506.502.685,53 atau 7,68% dengan obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5-420 Obyek Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Hotel-LO	1.213.317.298,00	1.074.779.497,00	138.537.801,00	12,89
2	Pajak Restoran-LO	4.940.030.680,00	4.466.861.304,00	473.169.376,00	10,59
3	Pajak Hiburan-LO	231.361.689,00	78.929.700,00	152.431.989,00	193,12
4	Pajak Reklame-LO	1.357.738.360,56	1.337.851.111,03	19.887.249,53	1,49
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	16.434.354.493,00	15.205.135.033,00	1.229.219.460,00	8,08
6	Pajak Parkir-LO	264.705.600,00	133.130.330,00	131.575.270,00	98,83
7	Pajak Air Tanah-LO	542.457.455,00	226.445.801,00	316.011.654,00	139,55
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	950.000,00	2.193.500,00	(1.243.500,00)	(56,69)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	18.448.032.796,00	17.323.367.268,00	1.124.665.528,00	6,49
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	5.721.036.121,00	5.798.788.263,00	(77.752.142,00)	(1,34)
	Jumlah	**49.153.984.492,56**	**45.647.481.807,03**	**3.506.502.685,53**	**7,68**

1. Pendapatan Pajak Hotel-LO

   Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.213.317.298,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.074.779.497,00 mengalami kenaikan sebesar Rp138.537.801,00 atau 12,89% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-421 Rincian Pajak Hotel-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Hotel-LO	1.213.317.298,00	1.074.779.497,00	138.537.801,00	12,89
	Jumlah	**1.213.317.298,00**	**1.074.779.497,00**	**138.537.801,00**	**12,89**

Pendapatan Pajak Hotel-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Hotel Tahun 2023 sebanyak 230 SKP dengan pokok pajak senilai Rp1.213.317.298,00.

2. Pendapatan Pajak Restoran-LO

Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.940.030.680,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.466.861.304,00 mengalami kenaikan sebesar Rp240.895.834,00 atau 10,59% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-422 Rincian Pajak Restoran-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	4.940.030.680,00	4.466.861.304,00	473.169.376,00	10,59
	Jumlah	**4.940.030.680,00**	**4.466.861.304,00**	**473.169.376,00**	**10,59**

Pendapatan Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO Tahun 2023 sebanyak 10.533 SKP dengan pokok pajak senilai Rp4.707.757.138,00 dan koreksi penambahan piutang pajak restoran Tahun 2023 sebesar Rp232.273.542,00.

3. Pajak Hiburan-LO

Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp231.361.689,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp78.929.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp152.431.989,00 atau 193,12% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-423 Rincian Pajak Hiburan-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/ Busana-LO	20.380.000,00	10.883.000,00	9.497.000,00	87,26
2	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	210.981.689,00	68.046.700,00	142.934.989,00	210,05
	Jumlah	**231.361.689,00**	**78.929.700,00**	**152.431.989,00**	**193,12**

Pendapatan Pajak Hiburan-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Hiburan-LO Tahun 2022 sebanyak 201 SKP dengan pokok pajak senilai Rp231.361.689,00.

4. Pendapatan Pajak Reklame-LO

Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.357.738.360,56. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.337.851.111,03 mengalami kenaikan sebesar Rp19.887.249,53 atau 1,49% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-424 Rincian Pajak Reklame-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/ Megatron-LO	1.357.738.360,56	1.337.851.111,03	19.887.249,53	1,49
	Jumlah	**1.357.738.360,56**	**1.337.851.111,03**	**19.887.249,53**	**1,49**

Pendapatan Pajak Reklame-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Reklame-LO Tahun 2023 sebanyak 2.776 SKP dengan pokok pajak senilai Rp1.260.730.027,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun 2023 sebesar Rp1.357.738.360,56 terdapat perbedaaan sebesar minus Rp97.008.333,56 dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Reklame-LO		1.357.738.360,56
SKP Pajak Reklame		1.260.730.027,00
Selisih		(97.008.333,56)
Penjelasan Selisih :		
- Penyesuaian pendapatan diterima dimuka awal tahun	371.394.604,23	
- Penyesuaian pendapatan diterima dimuka akhir tahun	274.386.270,67	
Selisih		(97.008.333,56)
Total Selisih		0,00

5. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp16.434.354.493,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp15.205.135.033,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.229.219.460,00 atau 8,08% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-425 Rincian Pajak Penerangan Jalan-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	16.434.354.493,00	15.205.135.033,00	1.229.219.460,00	8,08
	Jumlah	**16.434.354.493,00**	**15.205.135.033,00**	**1.229.219.460,00**	**8,08**

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun 2023 sebanyak 13 SKP dengan pokok pajak senilai Rp16.434.354.493,00.

6. Pendapatan Pajak Parkir-LO

Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp264.705.600,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp133.130.330,00 mengalami kenaikan sebesar Rp131.575.270,00 atau 98,83% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-426 Rincian Pajak Parkir-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Parkir-LO	264.705.600,00	133.130.330,00	131.575.270,00	98,83
	Jumlah	**264.705.600,00**	**133.130.330,00**	**131.575.270,00**	**98,83**

Pendapatan Pajak Parkir-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Parkir Tahun 2023 sebanyak 152 SKP dengan pokok pajak senilai Rp 264.705.600,00.

7. Pendapatan Pajak Air Tanah-LO

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp542.457.455,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp226.445.801,00 mengalami kenaikan sebesar Rp316.011.654,00 atau 139,55% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-427 Rincian Pajak Air Tanah-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Air Tanah-LO	542.457.455,00	226.445.801,00	316.011.654,00	139,55
	Jumlah	**542.457.455,00**	**226.445.801,00**	**316.011.654,00**	**139,55**

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Air Tanah Tahun 2023 sebanyak 1.863 SKP dengan pokok pajak senilai Rp542.457.455,00.

8. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp950.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.193.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.243.500,00 atau 56,69% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-428 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	950.000,00	2.193.500,00	(1.243.500,00)	(56,69)
	Jumlah	**950.000,00**	**2.193.500,00**	**(1.243.500,00)**	**(56,69)**

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 sebanyak 2 SKP dengan pokok pajak senilai Rp950.000,00.

9. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp18.448.032.796,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp17.323.367.268,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.124.665.528,00 atau 6,49% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-429 Rincian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	PBBP2-LO	18.448.032.796,00	17.323.367.268,00	1.124.665.528,00	6,49
	Jumlah	**18.448.032.796,00**	**17.323.367.268,00**	**1.124.665.528,00**	**6,49**

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2022 sebanyak 356.596 SKP dengan pokok dan bunga pajak senilai Rp18.448.032.796,00.

10. Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.721.036.121,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp5.798.788.263,00 mengalami penurunan sebesar Rp77.752.142,00 atau 1,34% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-430 Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	5.721.036.121,00	5.798.788.263,00	(77.752.142,00)	(1,34)
	Jumlah	**5.721.036.121,00**	**5.798.788.263,00**	**(77.752.142,00)**	**(1,34)**

Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO berasal dari penerbitan SKP Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2023 sebanyak 974 SKP dengan pokok pajak senilai Rp5.721.036.121,00.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.1.5.2 Pendapatan Retribusi Daerah	**20.956.797.827,68**	**17.973.593.571,24**

Pendapatan Retribusi-LO pada Laporan Operasional untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp20.956.797.827,68. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp17.973.593.571,24 mengalami kenaikan sebesar Rp2.983.204.256,44 atau 16,60% dengan realisasi obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-431 Obyek Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Retribusi Jasa Umum	18.771.799.852,68	16.280.487.891,24	2.491.311.961,44	15,30
2	Retribusi Jasa Usaha	1.164.092.975,00	1.044.222.630,00	119.870.345,00	11,48
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.020.905.000,00	648.883.050,00	372.021.950,00	57,33
	Jumlah	**20.956.797.827,68**	**17.973.593.571,24**	**2.983.204.256,44**	**16,60**

1. Retribusi Jasa Umum

   Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 adalah sebesar Rp18.771.799.852,68. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp16.280.487.891,24 mengalami penurunan sebesar Rp2.491.311.961,44 atau 15,30 % dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-432 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	12.976.193.512,68	10.488.711.337,00	2.487.482.175,68	23,72
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	154.604.586,00	152.546.000,00	2.058.586,00	1,35
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	3.867.605.000,00	3.770.358.000,00	97.247.000,00	2,58
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	1.379.360.280,00	1.394.904.662,00	(15.544.382,00)	(1,11)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	187.959.500,00	223.730.600,00	(35.771.100,00)	(15,99)
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	1.750.000,00	1.500.000,00	250.000,00	16,67
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	21.240.000,00	(21.240.000,00)	(100,00)
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	204.326.974,00	227.497.292,24	(23.170.318,24)	(10,18)
	Jumlah	**18.771.799.852,68**	**16.280.487.891,24**	**2.491.311.961,44**	**15,30**

2. Retribusi Jasa Usaha

   Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.164.092.975,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.044.222.630,00 mengalami kenaikan sebesar Rp119.870.345,00 atau 11,48% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-433 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	208.141.875,00	221.963.050,00	(13.821.175,00)	(6,23)
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	435.209.000,00	410.283.000,00	24.926.000,00	6,08
3	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	131.900.000,00	129.715.000,00	2.185.000,00	1,68

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	388.842.100,00	282.261.580,00	106.580.520,00	37,76
	Jumlah	**1.164.092.975,00**	**1.044.222.630,00**	**119.870.345,00**	**11,48**

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.020.905.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.007.645.432,00 mengalami kenaikan sebesar Rp648.883.050,00 atau 57,33% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-434 Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	1.020.905.000,00	648.883.050,00	372.021.950,00	57,33
	Jumlah	**1.020.905.000,00**	**648.883.050,00**	**372.021.950,00**	**57,33**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.1.5.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**6.113.545.893,13**	**6.242.668.473,27**

Pendapatan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Laporan Operasional untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp6.113.545.893,13. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp6.242.668.473,27 mengalami penurunan sebesar Rp129.122.580,14 atau 2,07% dengan realisasi obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-435 Obyek Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	6.113.545.893,13	6.242.668.473,27	(129.122.580,14)	(2,07)
	Jumlah	**6.113.545.893,13**	**6.242.668.473,27**	**(129.122.580,14)**	**(2,07)**

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp6.113.545.893,13. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp6.242.668.473,27 mengalami penurunan sebesar Rp129.122.580,14 atau 2,07% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-436 Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	4.629.838.583,13	4.544.375.373,27	85.463.209,86	1,88
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	1.483.707.310,00	1.698.293.100,00	(214.585.790,00)	(12,64)
	Jumlah	**6.113.545.893,13**	**6.242.668.473,27**	**(129.122.580,14)**	**(2,07)**

		TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.1.5.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	**146.400.630.288,63**	**124.918.723.497,32**

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Laporan Operasional untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp146.400.630.288,63. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp124.918.723.497,32 mengalami kenaikan sebesar Rp21.477.619.790,57 atau 17,19% dengan realisasi obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5-437 Obyek Lain-Lain PAD Yang Sah-LO

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	243.645.272,00	260.757.915,00	(17.112.643,00)	(6,56)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	936.479.261,67	970.838.333,33	(34.359.071,66)	(3,54)
3	Jasa Giro-LO	1.895.060.542,93	1.388.173.346,13	506.887.196,80	36,51
4	Pendapatan Bunga-LO	4.062.086.161,12	5.485.568.646,37	(1.423.482.485,99)	(25,95)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	0,00	56.184.972,00	(56.184.972,00)	(100,00)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	291.724.720,00	0,00	291.724.720,00	0,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	307.903.283,44	362.808.446,49	(54.905.163,05)	(15,13)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	149.874.327,00	12.878.434,00	136.995.893,00	1.063,76
9	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	44.700.000,00	84.165.500,00	(39.465.500,00)	(46,89)
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	621.069.990,49	1.032.217.466,81	(411.147.476,32)	(39,83)
11	Pendapatan dari BLUD-LO	137.848.086.729,98	115.249.283.901,19	22.598.802.828,79	19,61
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00	15.846.536,00	(15.846.536,00)	(100,00)
	Jumlah	**146.400.630.288,63**	**124.918.723.497,32**	**21.481.906.791,31**	**17,20**

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO

   Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp243.645.272,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp260.757.915,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.112.643,00 atau 6,56% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-438 Rincian Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan- LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00
2	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	239.995.272,00	260.757.915,00	(20.762.643,00)	(7,96)
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	Jumlah	**243.645.272,00**	**260.757.915,00**	**(17.112.643,00)**	**(6,56)**

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

   Pendapatan hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp936.479.261,67. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar

Rp970.838.333,33 mengalami penurunan sebesar Rp34.359.071,66 atau 3,54% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-439 Rincian Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Hasil Sewa BMD-LO	936.479.261,67	970.838.333,33	(34.359.071,66)	(3,54)
	Jumlah	**936.479.261,67**	**970.838.333,33**	**(34.359.071,66)**	**(3,54)**

3. Pendapatan Jasa Giro-LO Tahun 2023

   Pendapatan Jasa Giro-LO adalah sebesar Rp1.895.060.542,93. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.388.173.346,13 mengalami kenaikan sebesar Rp506.887.196,80 atau 36,51% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-440 Rincian Jasa Giro-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.239.044.624,78	1.388.173.346,13	(149.128.721,35)	(10,74)
2	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO	656.015.918,15	0,00	656.015.918,15	0,00
	Jumlah	**1.895.060.542,93**	**1.388.173.346,13**	**506.887.196,80**	**36,51**

4. Pendapatan Pendapatan Bunga-LO

   Pendapatan Pendapatan Bunga-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.062.086.161,12. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp5.485.568.646,37 mengalami penurunan sebesar Rp1.423.482.485,25 atau 25,95% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-441 Rincian Pendapatan Bunga-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	4.062.086.161,12	5.485.568.646,37	(1.423.482.485,25)	(25,95)
	Jumlah	**4.062.086.161,12**	**5.485.568.646,37**	**(1.423.482.485,25)**	**(25,95)**

5. Pendapatan penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-LO

   Pendapatan penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp56.184.972,00 mengalami penurunan sebesar Rp56.184.972,00 atau 100,00% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-442 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	0,00	56.184.972,00	(56.184.972,00)	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**56.184.972,00**	**(56.184.972,00)**	**(100,00)**

6. Pendapatan penerimaan atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO

Pendapatan penerimaan atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp291.724.720,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp291.724.720,00 atau 0,00% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-443 Rincian Penerimaan atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	291.724.720,00	0,00	291.724.720,00	0,00
	Jumlah	**291.724.720,00**	**0,00**	**291.724.720,00**	**0,00**

7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan-LO

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp307.903.283,44. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp362.808.446,49 mengalami penurunan sebesar Rp54.905.163,05 atau 15,13% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-444 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	307.903.283,44	362.808.446,49	(54.905.163,05)	(15,13)
	Jumlah	**307.903.283,44**	**362.808.446,49**	**(54.905.163,05)**	**(15,13)**

8. Pendapatan denda pajak daerah-LO

Pendapatan denda pajak daerah-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp149.874.327,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp12.878.434,00 mengalami kenaikan sebesar Rp136.995.893,00 atau 1.063,76% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-445 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	18.874.327,00	12.878.434,00	5.995.893,00	46,56
2	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	131.000.000,00	0,00	131.000.000,00	0,00
	Jumlah	**149.874.327,00**	**12.878.434,00**	**136.995.893,00**	**1.063,76**

9. Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO

Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp44.700.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp84.165.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp39.465.500,00 atau 46,89% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-446 Rincian Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	44.700.000,00	84.165.500,00	(39.465.500,00)	(46,89)
	Jumlah	**44.700.000,00**	**84.165.500,00**	**(39.465.500,00)**	**(46,89)**

10. Pendapatan dari pengembalian-LO

Pendapatan dari pengembalian-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp621.069.990,49. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.032.217.466,81 mengalami penurunan sebesar Rp411.147.476,32 atau 39,83% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-447 Rincian Pendapatan dari Pengembalian-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	70.752.377,00	39.471.562,00	31.280.815,00	79,25
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	10.305.848,69	820.000,00	9.485.848,69	1.156,81
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)-LO	0,00	7.611,00	(7.611,00)	(100,00)
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)-LO	0,00	22.834,00	(22.834,00)	(100,00)
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-LO	0,00	5.820.000,00	(5.820.000,00)	(100,00)
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	52.032.438,00	454.410.475,00	(402.378.037,00)	(88,55)
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	45.063.187,00	2.469.988,00	42.593.199,00	1.724,43
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	5.529.322,35	14.134.764,00	(8.605.441,65)	(60,88)
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	0,00	381.600.000,00	(381.600.000,00)	(100,00)
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	13.640.593,00	(13.640.593,00)	(100,00)
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	14.537.626,25	51.900.320,66	(37.362.694,41)	(71,99)
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu-LO	0,00	9.653.500,00	(9.653.500,00)	(100,00)
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)-LO	0,00	18.160.000,00	(18.160.000,00)	(100,00)
14	Pendapatan dari Pengembalian	12.526.575,00	0,00	12.526.575,00	0,00

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
	Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO				
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	0,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO	12.344.000,00	0,00	12.344.000,00	0,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-LO	5.874.364,00	3.308.182,00	2.566.182,00	77,57
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-LO	0,00	1.997.647,00	(1.997.647,00)	(100,00)
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	112.587.941,37	34.799.990,15	77.787.951,22	223,53
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO	247.871.369,35	0,00	247.871.369,35	0,00
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-LO	29.629.941,48	0,00	29.629.941,48	0,00
	Jumlah	**621.069.990,49**	**1.032.217.466,81**	**(411.147.476,32)**	**(39,83)**

11. Pendapatan dari BLUD-LO

Pendapatan dari BLUD-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp137.848.086.729,98. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp115.249.283.901,19 mengalami kenaikan sebesar Rp22.598.802.828,79 atau 19,61% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-448 Rincian Pendapatan dari BLUD-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan dari BLUD-LO	137.848.086.729,98	115.249.283.901,19	22.598.802.828,79	19,61
	Jumlah	**137.848.086.729,98**	**115.249.283.901,19**	**22.598.802.828,79**	**19,61**

12. Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah-LO

Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp15.846.536,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.846.536,00 atau 100,00% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-449 Rincian Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00	15.846.536,00	(15.846.536,00)	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**15.846.536,00**	**(15.846.536,00)**	**(100,00)**

		TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
4.7.6	**Pendapatan Transfer**	**1.478.045.566.360,00**	**1.464.019.699.764,00**

Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.478.045.566.360,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.464.019.699.764,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.025.866.596,00 atau 0,96% dengan jenis pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-450 Rincian Pendapatan Transfer

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.333.282.684.439,00	1.313.510.037.671,00	19.772.646.768,00	1,51
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	0,00	7.725.363.000,00	(7.725.363.000,00)	(100,00)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	144.762.881.921,00	142.784.299.093,00	1.978.582.828,00	1,39
	Jumlah	**1.478.045.566.360,00**	**1.464.019.699.764,00**	**14.025.866.596,00**	**0,96**

		TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.1.6.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**	**1.333.282.684.439,00**	**1.313.510.037.671,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.333.282.684.439,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.313.510.037.671,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.772.646.768,00 atau 1,51% dengan obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-451 Obyek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Dana Bagi Hasil	142.073.182.000,00	178.650.834.228,00	(36.577.652.228,00)	(20,47)
2	Dana Alokasi Umum	881.906.003.493,00	829.591.176.619,00	52.314.826.874,00	6,31
3	Dana Alokasi Khusus-Fisik	100.481.994.423,00	95.866.127.142,00	4.615.867.281,00	4,81
4	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	208.821.504.523,00	209.401.899.682,00	(580.395.159,00)	(0,28)
	Jumlah	**1.333.282.684.439,00**	**1.313.510.037.671,00**	**19.772.646.768,00**	**1,51**

		TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.1.4.2.1.1	**Dana Bagi Hasil**	**140.036.648.470,00**	**178.650.834.228,00**

Pendapatan dana bagi hasil pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp142.073.182.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp178.650.834.228,00 mengalami penurunan sebesar Rp36.577.652.228,00 atau 20,47% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-452 Rincian Dana Bagi Hasil

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	DBH PBB-LO	6.423.555.000,00	13.071.915.871,00	(6.648.360.871,00)	(50,86)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	13.261.634.000,00	15.450.873.034,00	(2.189.239.034,00)	(14,17)

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	1.397.641.000,00	3.423.543.801,00	(2.025.902.801,00)	(59,18)
4	DBH CHT-LO	65.141.356.000,00	57.874.054.455,00	7.267.301.545,00	12,56
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	40.206.901.000,00	77.737.361.098,00	(37.530.460.098,00)	(48,28)
6	DBH SDA Gas Bumi-LO	4.786.185.000,00	4.486.402.212,00	299.782.788,00	6,68
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	454.731.000,00	412.082.859,00	42.648.141,00	10,35
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	8.268.242.000,00	3.300.135.576,00	4.968.106.424,00	150,54
9	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	846.188.000,00	724.401.111,00	121.786.889,00	16,81
10	DBH SDA Perikanan-LO	1.286.749.000,00	2.170.064.211,00	(883.315.211,00)	(40,70)
	Jumlah	**142.073.182.000,00**	**178.650.834.228,00**	**(36.577.652.228,00)**	**(20,47)**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.1.4.2.1.2 Dana Alokasi Umum	**881.906.003.493,00**	**829.591.176.619,00**

Pendapatan Dana Alokasi Umum pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp881.906.003.493,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp829.591.176.619,00 mengalami kenaikan sebesar Rp52.314.826.874,00 atau 6,31% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-453 Rincian Dana Alokasi Umum – LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Dana Alokasi Umum-LO	881.906.003.493,00	829.591.176.619,00	52.314.826.874,00	6,31
	Jumlah	**881.906.003.493,00**	**829.591.176.619,00**	**52.314.826.874,00**	**6,31**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.1.4.2.1.3 Dana Alokasi Khusus-Fisik	**100.481.994.423,00**	**95.866.127.142,00**

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Fisik pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp100.481.994.423,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp95.866.127.142,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.615.867.281,00 atau 4,81% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-454 Rincian Dana Alokasi Khusus-Fisik

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	940.102.250,00	2.583.120.620,00	(1.643.018.370,00)	(63,61)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	7.156.923.755,00	16.626.186.147,00	(9.469.262.392,00)	(56,95)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	4.227.457.940,00	8.195.534.772,00	(3.968.076.832,00)	(48,42)
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	0,00	1.139.800.000,00	(1.139.800.000,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	4.882.885.853,00	(4.882.885.853,00)	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan	6.886.250.000,00	0,00	6.886.250.000,00	0,00

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	AKI dan AKB-LO				
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	0,00	2.179.621.770,00	(2.179.621.770,00)	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	1.643.709.164,00	7.587.281.115,00	(5.943.571.951,00)	(78,34)
9	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	4.140.871.761,00	(4.140.871.761,00)	(100,00)
10	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	0,00	5.428.805.830,00	(5.428.805.830,00)	(100,00)
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	5.011.666.000,00	(5.011.666.000,00)	(100,00)
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	29.590.763.182,00	11.832.644.000,00	17.758.119.182,00	150,08
13	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	0,00	2.571.982.000,00	(2.571.982.000,00)	(100,00)
14	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	8.565.921.357,00	0,00	8.565.921.357,00	0,00
15	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	7.483.313.000,00	(7.483.313.000,00)	(100,00)
16	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	11.355.378.000,00	0,00	11.355.378.000,00	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	5.189.881.000,00	(5.189.881.000,00)	(100,00)
18	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	710.000.000,00	851.390.750,00	(141.390.750,00)	(16,61)
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	0,00	5.785.508.149,00	(5.785.508.149,00)	(100,00)
20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO	530.778.000,00	0,00	530.778.000,00	0,00
21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	3.193.684.375,00	(3.193.684.375,00)	(100,00)
22	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting-LO	0,00	1.181.950.000,00	(1.181.950.000,00)	(100,00)
23	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	2.685.500.000,00	0,00	2.685.500.000,00	0,00
24	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	26.189.210.775,00	0,00	26.189.210.775,00	0,00
	Jumlah	**100.481.994.423,00**	**95.866.127.142,00**	**4.615.867.281,00**	**4,81**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.1.4.2.1.4 Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	**208.821.504.523,00**	**209.401.899.682,00**

Pendapatan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp208.821.504.523,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp209.401.899.682,00 mengalami penurunan sebesar Rp580.395.159,00 atau 0,28% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-455 Rincian Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	61.118.121.317,00	58.688.650.397,00	2.429.470.920,00	4,14
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	113.034.486.820,00	105.749.456.785,00	7.285.030.035,00	6,89
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	535.874.999,00	3.669.499.500,00	(3.133.624.501,00)	(85,40)
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	557.793.900,00	0,00	557.793.900,00	0,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00	20.026.780.000,00	(20.026.780.000,00)	(100,00)
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	0,00	2.913.700.000,00	(2.913.700.000,00)	(100,00)
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	0,00	10.720.314.642,00	(10.720.314.642,00)	(100,00)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO	20.811.300.000,00	0,00	20.811.300.000,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	0,00	4.101.357.645,00	(4.101.357.645,00)	(100,00)
10	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00	401.665.000,00	(401.665.000,00)	(100,00)
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan-LO	1.964.144.000,00	1.152.890.100,00	811.253.900,00	70,37
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	381.758.100,00	344.000.113,00	37.757.987,00	10,98
13	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	7.082.454.031,00	0,00	7.082.454.031,00	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	936.914.078,00	299.098.500,00	637.815.578,00	213,25
15	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	1.946.836.678,00	1.334.487.000,00	612.349.678,00	45,89
16	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	451.820.600,00	0,00	451.820.600,00	0,00
	Jumlah	**208.821.504.523,00**	**209.401.899.682,00**	**(580.395.159,00)**	**(0,28)**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.1.6.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	**0,00**	**7.725.363.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainya pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp7.725.363.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.725.363.000,00 atau 100,00% dengan obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-456 Obyek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	7.725.363.000,00	(7.725.363.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**7.725.363.000,00**	**(7.725.363.000,00)**	**(100,00)**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.1.6.2.1 Dana Insentif Daerah (DID)	**0,00**	**7.725.363.000,00**

Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp7.725.363.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.725.363.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-457 Rincian Dana Insentif Daerah (DID

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	DID-LO	0,00	7.725.363.000,00	(7.725.363.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**7.725.363.000,00**	**(7.725.363.000,00)**	**(100,00)**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.1.6.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah	**144.762.881.921,00**	**142.784.299.093,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp144.762.881.921,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp142.784.299.093,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.978.582.828,00 atau 1,39% dengan obyek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5-458 Obyek Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	132.918.031.900,00	121.927.576.093,00	10.990.455.807,00	9,01
2	Bantuan Keuangan	11.844.850.021,00	20.856.723.000,00	(9.011.872.979,00)	(43,21)
	Jumlah	**144.762.881.921,00**	**142.784.299.093,00**	**1.978.582.828,00**	**1,39**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.1.6.3.1 Pendapatan Bagi Hasil	**132.918.031.900,00**	**121.927.576.093,00**

Pendapatan Bagi Hasil-LO pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp132.918.031.900,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp121.927.576.093,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.990.455.807,00 atau 9,01% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-459 Rincian Pendapatan Bagi Hasil-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	132.918.031.900,00	121.927.576.093,00	10.990.455.807,00	9,01
	Jumlah	**132.918.031.900,00**	**121.927.576.093,00**	**10.990.455.807,00**	**9,01**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.1.6.3.2 Bantuan Keuangan	**11.844.850.021,00**	**20.856.723.000,00**

Pendapatan Bantuan Keuangan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp11.844.850.021,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp20.856.723.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.011.872.979,00 atau 43,21% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-460 Rincian Pendapatan Bagi Hasil-LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	11.844.850.021,00	20.856.723.000,00	(9.011.872.979,00)	(43,21)
	Jumlah	**11.844.850.021,00**	**20.856.723.000,00**	**(9.011.872.979,00)**	**(43,21)**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
4.7.7 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	**83.451.423.357,29**	**69.768.957.783,43**

Lain-lain pendapatan yang sah pada Laporan Operasional untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp83.451.423.357,29. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp69.768.957.783,43 mengalami kenaikan sebesar Rp13.682.465.573,86 atau 20,53% dengan obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-461 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan Hibah	47.488.710.300,29	41.179.142.839,43	6.309.567.460,86	15,32
2	Pendapatan Lainnya	35.962.713.057,00	28.589.814.944,00	7.372.898.113,00	25,79
	Jumlah	**83.451.423.357,29**	**69.768.957.783,43**	**13.682.465.573,86**	**19,61**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.1.7.1 Pendapatan Hibah	**47.488.710.300,29**	**41.179.142.839,43**

Pendapatan Hibah Tahun 2023 adalah sebesar Rp47.488.710.300,29. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp41.179.142.839,43 mengalami kenaikan sebesar Rp6.309.567.460,86 atau 15,32% dengan obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-462 Pendapatan Hibah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	19.550.567.716,29	18.161.071.920,00	1.389.495.796,29	7,65
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	5.525.538.684,00	23.018.070.919,43	(17.492.532.235,43)	(75,99)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	22.412.603.900,00	0,00	22.412.603.900,00	0,00
	Jumlah	**47.488.710.300,29**	**41.179.142.839,43**	**6.309.567.460,86**	**15,32**

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp19.550.567.716,29. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp18.161.071.920,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.029.072.738,29 atau 11,17% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-463 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	19.550.567.716,29	18.161.071.920,00	1.389.495.796,29	7,65
	Jumlah	**19.550.567.716,29**	**18.161.071.920,00**	**1.389.495.796,29**	**7,65**

2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.525.538.684,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp23.018.070.919,43 mengalami penurunan sebesar Rp17.492.532.235,43 atau 75,99% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-464 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	5.525.538.684,00	23.018.070.919,43	(17.492.532.235,43)	(75,99)
	Jumlah	**5.525.538.684,00**	**23.018.070.919,43**	**(17.492.532.235,43)**	**(75,99)**

3. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp22.412.603.900,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.412.603.900,00 atau 0,00% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-465 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	22.412.603.900,00	0,00	22.412.603.900,00	0,00
	Jumlah	**22.412.603.900,00**	**0,00**	**22.412.603.900,00**	**0,00**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.1.7.2 Pendapatan Lainnya	**35.962.713.057,00**	**28.589.814.944,00**

Pendapatan Lainnya Tahun 2023 adalah sebesar Rp35.962.713.057,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp28.589.814.944,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.372.898.113,00 atau 25,79% dengan realisasi obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-466 Rincian Pendapatan Lainnya

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP	35.962.713.057,00	28.589.814.944,00	7.372.898.113,00	25,79
	Jumlah	**35.962.713.057,00**	**28.589.814.944,00**	**7.372.898.113,00**	**25,79**

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP Tahun 2023 adalah sebesar Rp35.962.713.057,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp28.589.814.944,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.372.898.113,00 atau 25,79% dengan realisasi rincian obyek pendapatan sebagai berikut :

Tabel 5-467 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP	35.962.713.057,00	28.589.814.944,00	7.372.898.113,00	25,79
	Jumlah	**35.962.713.057,00**	**28.589.814.944,00**	**7.372.898.113,00**	**25,79**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.2 Beban	**1.858.127.281.880,30**	**1.762.018.533.864,27**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban pada Laporan Operasional untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.858.127.281.880,30. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.762.018.533.864,27 mengalami kenaikan sebesar Rp96.108.748.016,03 atau 5,45% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-468 Jenis Beban

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Pegawai	806.399.417.317,40	788.425.764.357,00	17.973.652.960,40	2,28
2	Beban Persediaan	152.134.045.935,17	150.062.979.930,04	2.071.066.005,13	1,38
3	Beban Jasa	300.255.620.740,00	258.282.740.559,96	41.972.880.180,04	16,25
4	Beban Pemeliharaan	15.620.057.272,00	26.093.407.537,00	(10.473.350.265,00)	(40,14)
5	Beban Perjalanan Dinas	40.311.519.379,00	37.637.082.047,00	2.674.437.332,00	7,11
6	Beban Subsidi	1.781.923.800,00	2.183.163.800,00	(401.240.000,00)	(18,38)
7	Beban Hibah	171.489.228.753,43	129.685.700.668,00	41.803.528.085,43	32,23
8	Beban Bantuan Sosial	3.032.260.000,00	19.011.581.040,00	(15.979.321.040,00)	(84,05)
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	253.691.932.946,66	245.079.086.120,78	8.612.846.825,88	3,51
10	Beban Penyisihan Piutang	7.249.593.961,64	4.242.914.391,49	3.006.679.570,15	72,51
11	Beban Transfer	104.908.188.234,00	99.897.620.287,00	5.010.567.947,00	5,02
12	Beban Lain-lain	1.253.493.541,00	1.416.493.126,00	(162.999.585,00)	(11,51)
	Jumlah	**1.858.127.281.880,30**	**1.762.018.533.864,27**	**96.108.748.016,03**	**5,45**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
4.7.8 Beban Pegawai	**806.399.417.317,40**	**788.425.764.357,00**

Beban Pegawai Tahun 2023 adalah sebesar Rp806.399.417.317,40. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp788.425.764.357,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.973.652.960,40 atau 2,28% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-469 Obyek Beban Pegawai

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	560.320.281.394,00	541.821.046.629,00	18.499.234.765,00	3,41
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	72.254.703.576,00	73.267.696.823,00	(1.012.993.247,00)	(1,38)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	141.155.728.956,40	141.134.942.700,00	20.786.256,40	0,01
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	19.384.448.050,00	18.824.978.362,00	559.469.688,00	2,97
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	302.155.644,00	365.688.286,00	(63.532.642,00)	(17,37)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta	851.865.000,00	876.650.000,00	(24.785.000,00)	(2,83)

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	KDH/WKDH				
7	Beban Pegawai BLUD	12.130.234.697,00	12.134.761.557,00	(4.526.860,00)	(0,04)
	Jumlah	**806.399.417.317,40**	**788.425.764.357,00**	**17.973.652.960,40**	**2,28**

1. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

   Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023 adalah sebesar Rp560.320.281.394,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp541.821.046.629,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.499.234.765,00 atau 3,41% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-470 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Gaji Pokok ASN	424.451.347.370,00	405.506.419.329,00	18.944.928.041,00	4,67
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	39.990.445.466,00	37.923.979.452,00	2.066.466.014,00	5,45
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.074.996.500,00	5.444.899.750,00	(369.903.250,00)	(6,79)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	24.305.569.200,00	24.765.824.780,00	(460.255.580,00)	(1,86)
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	10.500.879.248,00	8.716.041.750,00	1.784.837.498,00	20,48
6	Beban Tunjangan Beras ASN	24.953.940.150,00	23.279.674.097,00	1.674.266.053,00	7,19
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.021.245.396,00	2.171.151.545,00	(149.906.149,00)	(6,90)
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	5.953.628,00	5.719.552,00	234.076,00	4,09
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	25.520.241.595,00	30.658.872.435,00	(5.138.630.840,00)	(16,76)
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	873.919.289,00	837.117.679,00	36.801.610,00	4,40
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.621.743.552,00	2.511.346.260,00	110.397.292,00	4,40
	Jumlah	**560.320.281.394,00**	**541.821.046.629,00**	**18.499.234.765,00**	**3,41**

2. Beban Tambahan Penghasilan ASN

   Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2023 adalah sebesar Rp72.254.703.576,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp73.267.696.823,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.012.993.247,00 atau 1,38% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-471 Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	70.684.703.576,00	71.706.896.823,00	(1.022.193.247,00)	(1,43)
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.570.000.000,00	1.560.800.000,00	9.200.000,00	0,59
	Jumlah	**72.254.703.576,00**	**73.267.696.823,00**	**(1.012.993.247,00)**	**(1,38)**

3. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

   Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Tahun 2023 adalah sebesar Rp141.155.728.956,40. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp141.134.942.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.786.256,40 atau 0,01% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-472 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	109.360.714.720,00	116.109.500.220,00	(6.748.785.500,00)	(5,81)
2	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	342.998.900,00	0,00	342.998.900,00	0,00
3	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.272.250.000,00	1.265.250.000,00	7.000.000,00	0,55
4	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	30.123.795.336,40	23.670.439.869,00	6.453.355.467,40	27,26
5	Beban Honorarium	55.970.000,00	89.752.611,00	(33.782.611,00)	(37,64)
	Jumlah	**141.155.728.956,40**	**141.134.942.700,00**	**20.786.256,40**	**0,01**

4. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

   Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2023 adalah sebesar Rp19.384.448.050,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp18.824.978.362,00 mengalami kenaikan sebesar Rp559.469.688,00 atau 2,97% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-473 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Uang Representasi DPRD	1.002.435.000,00	1.004.010.000,00	(1.575.000,00)	(0,16)
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	121.552.200,00	121.522.800,00	29.400,00	0,02
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	123.041.580,00	122.896.740,00	144.840,00	0,12
4	Beban Uang Paket DPRD	85.900.500,00	86.058.000,00	(157.500,00)	(0,18)
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.453.530.750,00	1.455.814.500,00	(2.283.750,00)	(0,16)
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.111.500,00	136.416.000,00	(304.500,00)	(0,22)
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	60.428.025,00	39.021.675,00	21.406.350,00	54,86
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.659.500.000,00	5.670.000.000,00	(10.500.000,00)	(0,19)
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.407.000.000,00	1.375.500.000,00	31.500.000,00	2,29
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	865.953,00	646.063,00	219.890,00	34,04
11	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.466.882.542,00	4.139.092.584,00	327.789.958,00	7,92
12	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.860.900.000,00	4.674.000.000,00	186.900.000,00	4,00
13	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00
	Jumlah	**19.384.448.050,00**	**18.824.978.362,00**	**559.469.688,00**	**2,97**

5. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

   Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebesar Rp302.155.644,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp365.688.286,00 mengalami penurunan sebesar Rp63.532.642,00 atau 17,37% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-474 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	42.900.000,00	54.600.000,00	(11.700.000,00)	(21,43)
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.686.000,00	6.288.000,00	(1.602.000,00)	(25,48)
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	81.000.000,00	98.280.000,00	(17.280.000,00)	(17,58)
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.983.100,00	4.852.140,00	(869.040,00)	(17,91)
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.534.453,00	1.401.404,00	133.049,00	9,49
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.460,00	1.120,00	340,00	30,36
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	4.235.760,00	5.456.160,00	(1.220.400,00)	(22,37)
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	84.240,00	112.320,00	(28.080,00)	(25,00)
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	252.720,00	336.960,00	(84.240,00)	(25,00)
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	163.477.911,00	194.360.182,00	(30.882.271,00)	(15,89)
	Jumlah	**302.155.644,00**	**365.688.286,00**	**(63.532.642,00)**	**(17,37)**

6. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

   Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebesar Rp851.865.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp876.650.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp24.785.000,00 atau 2,83% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-475 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	599.865.000,00	624.650.000,00	(24.785.000,00)	(3,97)
	Jumlah	**851.865.000,00**	**876.650.000,00**	**(24.785.000,00)**	**(2,83)**

7. Beban Pegawai BLUD

   Beban Pegawai BLUD Tahun 2023 adalah sebesar Rp12.130.234.697,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp12.134.761.557,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.526.860,00atau 0,04% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-476 Rincian Beban Beban Pegawai BLUD

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Pegawai BLUD	12.130.234.697,00	12.134.761.557,00	(4.526.860,00)	(0,04)
	Jumlah	**12.130.234.697,00**	**12.134.761.557,00**	**(4.526.860,00)**	**(0,04)**

		TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
4.7.9	**Beban Persediaan**	**152.134.045.935,17**	**150.062.979.930,04**

Beban Persediaan disajikan dengan basis akrual sehingga Beban Persediaan merupakan pemakaian persediaan (*use of goods*) selama Tahun 2023. Beban persediaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp152.134.045.935,17. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp150.062.979.930,04 mengalami kenaikan sebesar Rp2.071.066.005,13 atau 1,38% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-477 Obyek Beban Persediaan

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Barang	152.134.045.935,17	150.062.979.930,04	2.071.066.005,13	1,38
	Jumlah	**152.134.045.935,17**	**150.062.979.930,04**	**2.071.066.005,13**	**1,38**

Beban Barang Tahun 2023 adalah sebesar Rp152.134.045.935,17. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp150.062.979.930,04 mengalami kenaikan sebesar Rp2.071.066.005,13 atau 1,38% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-478 Rincian Beban Barang

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	Beban Barang Pakai Habis	151.821.530.735,17	150.048.879.930,04	1.772.650.805,13	1,18
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	312.515.200,00	14.100.000,00	298.415.200,00	2.116,42
	Jumlah	**152.134.045.935,17**	**150.062.979.930,04**	**2.071.066.005,13**	**1,38**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
4.7.10 Beban Jasa	**300.255.620.740,00**	**258.282.740.559,96**

Perbedaan pengakuan belanja jasa dengan beban jasa diantaranya pada pengakuan utang beban jasa telepon, air, listrik dan Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit dan utang beban jasa lainnya. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan.

Beban jasa Tahun 2023 adalah sebesar Rp300.255.620.740,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp258.282.740.559,96 mengalami kenaikan sebesar Rp41.972.880.180,04 atau 16,25% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-479 Obyek Beban Jasa

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Jasa	268.919.671.240,00	237.737.810.550,96	31.181.860.689,04	13,12
2	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	31.335.949.500,00	20.544.930.009,00	10.791.019.491,00	52,52
	Jumlah	**300.255.620.740,00**	**258.282.740.559,96**	**41.972.880.180,04**	**16,25**

1. Beban jasa tahun 2023 adalah sebesar Rp268.919.671.240,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp237.737.810.550,96 mengalami kenaikan sebesar Rp31.181.860.689,04 atau 13,12% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-480 Rincian Beban Jasa

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Jasa Kantor	205.212.250.509,00	191.144.467.824,00	14.067.782.685,00	7,36
2	Beban Iuran	50.019.595.151,00	34.246.878.226,96	15.772.716.924,04	46,06

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	Jaminan/Asuransi				
3	Beban Sewa Tanah	79.800.000,00	18.845.000,00	60.955.000,00	323,45
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.082.279.180,00	2.976.151.309,00	1.106.127.871,00	37,17
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	383.220.000,00	1.331.481.000,00	(948.261.000,00)	(71,22)
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	21.396.622,00	427.841.333,00	(406.444.711,00)	(95,00)
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.800.046.080,00	1.636.575.359,00	1.163.470.721,00	71,09
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	953.068.264,00	1.259.009.647,00	(305.941.383,00)	(24,30)
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	45.000.000,00	136.500.000,00	(91.500.000,00)	(67,03)
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.316.415.434,00	4.560.060.852,00	756.354.582,00	16,59
	Jumlah	**268.919.671.240,00**	**237.737.810.550,96**	**31.181.860.689,04**	**13,12**

2. Beban Uang dan atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 adalah sebesar Rp31.335.949.500,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp20.544.930.009,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.791.019.491,00 atau 52,52% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-481 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	30.538.100.000,00	17.780.681.000,00	12.757.419.000,00	71,75
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	797.849.500,00	2.764.249.009,00	(1.966.399.509,00)	(71,14)
	Jumlah	**31.335.949.500,00**	**20.544.930.009,00**	**10.791.019.491,00**	**52,52**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
4.7.11 Beban Pemeliharaan	**15.620.057.272,00**	**26.093.407.537,00**

Beban Pemeliharaan digunakan untuk pemeliharaan Aset Tetap atau Aset lainnya milik OPD Tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp15.620.057.272,00. Jika dibandingkan dengan realisasi beban pemeliharaan Tahun 2022 sebesar Rp26.093.407.537,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.473.350.265,00 atau 40,14% dengan obyek beban pemeliharaan sebagai berikut :

Tabel 5-482 Rincian Obyek Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Pemeliharaan	15.620.057.272,00	26.093.407.537,00	(10.473.350.265,00)	(40,14)
	Jumlah	**15.620.057.272,00**	**26.093.407.537,00**	**(10.473.350.265,00)**	**(40,14)**

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp15.620.057.272,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp26.093.407.537,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.473.350.265,00 atau 40,14% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-483 Rincian Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	46.541.190,00	24.988.000,00	21.553.190,00	86,25
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.366.420.686,00	5.841.367.702,00	(474.947.016,00)	(8,13)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.127.828.086,00	18.908.380.743,00	(9.780.552.657,00)	(51,73)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	938.619.650,00	915.556.092,00	23.063.558,00	2,52
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.380.000,00	403.115.000,00	(401.735.000,00)	(99,66)
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	139.267.660,00	0,00	139.267.660,00	0,00
	Jumlah	**15.620.057.272,00**	**26.093.407.537,00**	**(10.473.350.265,00)**	**(40,14)**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
4.7.12 Beban Perjalanan Dinas	**40.311.519.379,00**	**37.637.082.047,00**

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi selama Tahun 2023 untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi dan jabatan yang terealisasi sebesar Rp40.311.519.379,00. Jika dibandingkan dengan realisasi beban perjalanan dinas Tahun 2022 sebesar Rp37.637.082.047,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.674.437.332,00 7,11% dengan obyek beban perjalanan dinas sebagai berikut :

Tabel 5-484 Obyek Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Perjalanan Dinas	40.311.519.379,00	37.637.082.047,00	2.674.437.332,00	7,11
	Jumlah	**40.311.519.379,00**	**37.637.082.047,00**	**2.674.437.332,00**	**7,11**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 adalah sebesar Rp40.311.519.379,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp37.637.082.047,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.674.437.332,00 atau 7,11% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-485 Rincian Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.975.631.874,00	37.637.082.047,00	2.338.549.827,00	6,21
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	335.887.505,00	0,00	335.887.505,00	0,00
	Jumlah	**40.311.519.379,00**	**37.637.082.047,00**	**2.674.437.332,00**	**7,11**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
4.7.13 Beban Subsidi	**1.781.923.800,00**	**2.183.163.800,00**

Beban Subsidi Tahun 2023 sebesar Rp1.781.923.800,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Beban Subsidi Tahun 2022 sebesar Rp2.183.163.800,00 mengalami penurunan Rp401.240.000,00 atau 18,38% dengan obyek beban subsidi sebagai berikut:

Tabel 5-486 Obyek Beban Subsidi

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Subsidi kepada BUMD	1.781.923.800,00	2.183.163.800,00	(401.240.000,00)	(18,38)
	Jumlah	**1.781.923.800,00**	**2.183.163.800,00**	**(401.240.000,00)**	**(18,38)**

Beban Subsidi kepada BUMD Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.781.923.800,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.183.163.800,00 mengalami penurunan Rp401.240.000,00 atau 18,38% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-487 Rincian Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Subsidi kepada BUMD	1.781.923.800,00	2.183.163.800,00	(401.240.000,00)	(18,38)
	Jumlah	**1.781.923.800,00**	**2.183.163.800,00**	**(401.240.000,00)**	**(18,38)**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
4.7.14 Beban Hibah	**171.489.228.753,43**	**129.685.700.668,00**

Beban Hibah berupa barang dapat berasal dari barang yang dibeli untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau sebelumnya merupakan bagian persediaan, dan telah diserahkan kepada masyarakat pada tahun berjalan.

Beban hibah Tahun 2023 sebesar Rp171.489.228.753,43. Jika dibandingkan dengan realisasi beban hibah Tahun 2022 sebesar Rp129.685.700.668,00 mengalami kenaikan sebesar Rp41.803.528.085,43 atau 32,23% dengan obyek beban hibah sebagai berikut:

Tabel 5-488 Obyek Beban Hibah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.215.706.111,00	0,00	2.215.706.111,00	0,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	83.377.914.947,00	91.843.624.320,00	(8.465.709.373,00)	(9,22)
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.775.452.000,00	1.775.452.000,00	0,00	0,00
4	Beban Hibah Barang Untuk Dijual/Diserahkan	84.120.155.695,43	36.066.624.348,00	48.053.531.347,43	133,24
	Jumlah	**171.489.228.753,43**	**129.685.700.668,00**	**41.803.528.085,43**	**32,23**

1. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.215.706.111,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.215.706.111,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-489 Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.215.706.111,00	0,00	2.215.706.111,00	0,00
	Jumlah	**2.215.706.111,00**	**0,00**	**2.215.706.111,00**	**0,00**

2. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 adalah sebesar Rp83.377.914.947,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp91.843.624.320,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.465.709.373,00 atau 9,22% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-490 Rincian Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	42.305.174.000,00	34.456.681.933,00	7.848.492.067,00	22,78
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.655.582.740,00	21.421.184.900,00	(5.765.602.160,00)	(26,92)
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.417.158.207,00	35.965.757.487,00	(10.548.599.280,00)	(29,33)
	Jumlah	**83.377.914.947,00**	**91.843.624.320,00**	**(8.465.709.373,00)**	**(9,22)**

3. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.775.452.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.775.452.000,00 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-491 Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.775.452.000,00	1.775.452.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.775.452.000,00**	**1.775.452.000,00**	**0,00**	**0,00**

4. Beban Hibah Barang Untuk Dijual/Diserahkan Tahun 2023 adalah sebesar Rp84.120.155.695,43. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp36.066.624.348,00 mengalami kenaikan sebesar Rp48.053.531.347,43 atau 133,24% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-492 Rincian Beban Hibah Barang Untuk Dijual/Diserahkan

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Hibah Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	62.289.487.840,00	35.550.781.324,00	26.738.706.516,00	75,21

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
2	Beban Hibah Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	21.830.667.855,43	515.843.024,00	21.314.824.831,43	4.132,04
	Jumlah	**84.120.155.695,43**	**36.066.624.348,00**	**48.053.531.347,43**	**133,24**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
4.7.15 Beban Bantuan Sosial	**3.032.260.000,00**	**19.011.581.040,00**

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.032.260.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp19.011.581.040,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.979.321.040,00 atau 84,05% dengan obyek beban sebagai berikut :

Tabel 5-493 Obyek Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.202.500.000,00	4.833.823.540,00	(3.631.323.540,00)	(75,12)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	207.500.000,00	306.897.500,00	(99.397.500,00)	(32,39)
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.622.260.000,00	13.870.860.000,00	(12.248.600.000,00)	(88,30)
	Jumlah	**3.032.260.000,00**	**19.011.581.040,00**	**(15.979.321.040,00)**	**(84,05)**

1. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.202.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.833.823.540,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.631.323.540,00 atau 75,12% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-494 Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.202.500.000,00	3.437.200.000,00	(2.234.700.000,00)	(65,02)
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	1.396.623.540,00	(1.396.623.540,00)	(100,00)
	Jumlah	**1.202.500.000,00**	**4.833.823.540,00**	**(3.631.323.540,00)**	**(75,12)**

2. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2023 adalah sebesar Rp207.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp306.897.500,00. mengalami penurunan sebesar Rp99.397.500,00 atau 32,39% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-495 Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang	207.500.000,00	260.000.000,00	(52.500.000,00)	(20,19)

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat				
2	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	46.897.500,00	(46.897.500,00)	(100,00)
	Jumlah	**207.500.000,00**	**306.897.500,00**	**(99.397.500,00)**	**(32,39)**

3. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.622.260.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp13.870.860.000,00 mengalami penuruanan sebesar Rp12.248.600.000,00 atau 88,30% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-496 Rincian Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.422.500.000,00	13.671.100.000,00	(12.248.600.000,00)	(89,59)
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	199.760.000,00	199.760.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.622.260.000,00**	**13.870.860.000,00**	**(12.248.600.000,00)**	**(88,30)**

		TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
4.7.16	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**253.691.932.946,66**	**245.079.086.120,78**

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan baru diterapkan pertama kali di Tahun 2015 sesuai dengan PP 71 Tahun 2010. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp253.691.932.946,66. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp245.079.086.120,78 mengalami kenaikan sebesar Rp8.612.846.825,88 atau 3,51% dengan obyek beban sebagai berikut:

Tabel 5-497 Obyek Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Beban Penyusutan dan Amortisasi 2023 (Rp)	Beban Penyusutan dan Amortisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Penyusutan	252.585.854.269,80	243.978.325.098,78	8.607.529.171,02	3,53
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.106.078.676,86	1.100.761.022,00	5.317.654,86	0,48
	Jumlah	**253.691.932.946,66**	**245.079.086.120,78**	**8.612.846.825,88**	**3,51**

1. Beban Penyusutan Tahun 2023 adalah sebesar Rp252.585.854.269,80. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp243.978.325.098,78 mengalami kenaikan sebesar Rp8.607.529.171,02 atau 3,53% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-498 Rincian Beban Penyusutan

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	92.053.335.790,00	93.435.013.233,00	(1.381.677.443,00)	(1,48)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.384.801.325,80	23.062.699.736,78	1.322.101.589,02	5,73
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	136.147.717.154,00	127.480.612.129,00	8.667.105.025,00	6,80
	Jumlah	**252.585.854.269,80**	**243.978.325.098,78**	**8.607.529.171,02**	**3,53**

2. Beban Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.106.078.676,86. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.100.761.022,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.317.654,86 atau 0,48% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-499 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.106.078.676,86	1.100.761.022,00	5.317.654,86	0,48
	Jumlah	**1.106.078.676,86**	**1.100.761.022,00**	**5.317.654,86**	**0,48**

		TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
4.7.17	**Beban Penyisihan Piutang**	**7.249.593.961,64**	**4.242.914.391,49**

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, penghitungan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih didasarkan pada analisis umur piutang (*aging schedule*). Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.249.593.961,64. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.242.914.391,49 mengalami kenaikan sebesar Rp3.006.679.570,15 atau 70,86% dengan obyek beban sebagai berikut:

Tabel 5-500 Obyek Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Jenis Piutang	Beban Penyisihan Piutang 2023 (Rp)	Beban Penyisihan Piutang 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.131.282.246,30	3.440.174.225,00	1.691.108.021,30	49,16
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	277.754.416,64	534.315.712,79	(256.561.296,15)	(48,02)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.840.557.298,70	268.424.453,70	1.572.132.845,00	585,69
	Jumlah	**7.249.593.961,64**	**4.242.914.391,49**	**3.006.679.570,15**	**70,86**

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.131.282.246,30. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.440.174.225,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.691.108.021,30 atau 49,16% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-501 Rincian Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	1.277.331,00	0,00	1.277.331,00	0,00

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
2	Beban Penyisihan Pajak Restoran	12.151.610,70	0,00	12.151.610,70	0,00
3	Beban Penyisihan Pajak Hiburan	3.876.336,00	1.554.662,00	2.321.674,00	149,34
4	Beban Penyisihan Pajak Reklame	87.539.404,60	68.925.998,30	18.613.406,30	27,00
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	346.500,00	0,00	346.500,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	187.587,00	182.309,80	5.277,20	2,89
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	753.060,00	0,00	753.060,00	0,00
8	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.025.150.417,00	3.369.511.254,90	1.655.639.162,10	49,14
	Jumlah	**5.131.282.246,30**	**3.440.174.225,00**	**1.691.108.021,30**	**49,16**

2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp277.754.416,64. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp534.315.712,79 mengalami penurunan sebesar Rp256.561.296,15 atau 48,02% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-502 Rincian Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	242.014.767,94	508.454.912,79	(266.440.144,85)	(52,40)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	35.739.648,70	25.860.800,00	9.878.848,70	38,20
	Jumlah	**277.754.416,64**	**534.315.712,79**	**(256.561.296,15)**	**(48,02)**

3. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.840.557.298,70. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp268.424.453,70 mengalami kenaikan sebesar Rp1.572.132.845,00 atau 585,69% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-503 Rincian Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	228.531.690,30	10.831.642,50	217.700.047,80	2.009,85
2	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	42.385.884,30	0,00	42.385.884,30	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	1.569.639.724,10	257.592.811,20	1.312.046.912,90	509,35
	Jumlah	**1.840.557.298,70**	**268.424.453,70**	**1.572.132.845,00**	**585,69**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
4.7.18 Beban Transfer	**104.908.188.234,00**	**99.897.620.287,00**

Beban transfer Tahun 2023 sebesar Rp104.908.188.234,00. Jika dibandingkan dengan realisasi beban transfer Tahun 2022 sebesar Rp99.897.620.287,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.010.567.947,00 atau 5,02% dengan obyek beban transfer sebagai berikut :

Tabel 5-504 Obyek Beban Transfer

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.913.455.644,00	4.527.376.025,00	386.079.619,00	8,53
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.266.372.490,00	0,00	2.266.372.490,00	0,00
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	97.728.360.100,00	95.370.244.262,00	2.358.115.838,00	2,47
	Jumlah	**104.908.188.234,00**	**99.897.620.287,00**	**5.010.567.947,00**	**5,02**

1. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.913.455.644,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.527.376.025,00 mengalami kenaikan sebesar Rp386.079.619,00 atau 8,53% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-505 Rincian Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.913.455.644,00	4.527.376.025,00	386.079.619,00	8,53
	Jumlah	**4.913.455.644,00**	**4.527.376.025,00**	**386.079.619,00**	**8,53**

2. Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.266.372.490,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.266.372.490,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-506 Rincian Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.266.372.490,00	0,00	2.266.372.490,00	0,00
	Jumlah	**2.266.372.490,00**	**0,00**	**2.266.372.490,00**	**0,00**

3. Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa Tahun 2023 adalah sebesar Rp97.728.360.100,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp95.370.244.262,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.358.115.838,00 atau 2,47% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-507 Rincian Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	97.728.360.100,00	95.370.244.262,00	2.358.115.838,00	2,47
	Jumlah	**97.728.360.100,00**	**95.370.244.262,00**	**2.358.115.838,00**	**2,47**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
4.7.19 Beban Lain-lain	**1.253.493.541,00**	**1.416.493.126,00**

Beban Lain-Lain berasal dari Belanja Pengadaan Barang dan Jasa dan Belanja Modal dengan nilai di bawah kebijakan kapitalisasi. Pengadaan yang berasal dari Belanja Modal di bawah nilai kapitalisasi akan dilakukan pencatatan secara *extracomptable*. Realisasi beban lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp1.253.493.541,00. Jika dibandingkan dengan realisasi beban lain-lain Tahun 2022 sebesar Rp1.416.493.126,00 mengalami penurunan sebesar Rp162.999.585,00 atau 11,51% dengan obyek beban lain-lain sebagai berikut :

Tabel 5-508 Obyek Beban Lain-Lain

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	207.275.897,00	(207.275.897,00)	(100,00)
2	Beban Lain-lain	1.253.493.541,00	1.209.217.229,00	44.276.312,00	3,66
	Jumlah	**1.253.493.541,00**	**1.416.493.126,00**	**(162.999.585,00)**	**(11,51)**

1. Beban penurunan nilai investasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp207.275.897,00 mengalami penurunan sebesar Rp207.275.897 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-509 Rincian Beban Penurunan Nilai Investasi

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	207.275.897,00	(207.275.897,00)	(100,00)
	Jumlah	**0,00**	**207.275.897,00**	**(207.275.897,00)**	**(100,00)**

2. Beban lain-lain Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.253.493.541,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.209.217.229,00 mengalami kenaikan sebesar Rp44.276.312,00 atau 3,66% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-510 Rincian Beban Lain-lain

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Lain-lain	1.253.493.541,00	1.209.217.229,00	44.276.312,00	3,66
	Jumlah	**1.253.493.541,00**	**1.209.217.229,00**	**44.276.312,00**	**3,66**

Beban lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp1.253.493.541,00 merupakan extracomptabel yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap sebesar Rp1.054.825.321,00, koreksi saldo awal persediaan sebesar Rp1.193.500,00 dan reklasifikasi Persediaan sebesar Rp197.474.720,00.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	**(74.005.333.661,01)**	**(33.447.408.967,98)**

Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar minus Rp74.005.333.661,01 dan

Rp35.802.710.735,02. Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-511 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	(74.005.333.661,01)	(33.447.408.967,98)	(40.557.924.693,03)	121,26
	Jumlah	**(74.005.333.661,01)**	**(33.447.408.967,98)**	**(40.557.924.693,03)**	**121,26**

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	**(3.277.357.812,80)**	**(16.428.823.001,04)**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sejumlah minus Rp3.277.357.812,80 dan minus Rp16.428.823.001,04. Surplus/defisit dari kegiatan non Operasi merupakan selisih antara Surplus Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp528.228.535,00 yang berasal dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp1.090.880.276,00 dikurangi nilai bukunya sebesar Rp562.651.741,00 dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp3.805.586.347,80.

5.4.5 Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebesar minus Rp77.282.691.473,81 dan minus Rp49.876.231.969,02.

5.4.6 Pos Luar Biasa

Saldo Pos luar biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sejumlah minus Rp897.485.221,00 dan minus Rp1.019.080.271,86. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Surplus/defisit dari pos luar biasa merupakan selisih antara Pendapatan luar biasa sebesar Rp0,00 dengan Beban Luar Biasa sebesar Rp897.485.221,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-512 Rincian Pos Luar Biasa

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Tak Terduga	897.485.221,00	1.019.080.271,86	(121.595.050,86)	(11,93)
	Jumlah	**(897.485.221,00)**	**(1.019.080.271,86)**	**(121.595.050,86)**	**(11,93)**

5.4.6.1 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa pada Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar minus Rp897.485.221,00 dan sebesar minus Rp1.019.080.271,86.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
5.4.7 Surplus/Defisit LO	**(78.180.176.694,81)**	**(50.895.312.240,88)**

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah minus sebesar Rp78.180.176.694,81 dan sebesar Rp50.895.312.240,88.

5.5 Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas adalah adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Penjelasan masing-masing aktivitas sebagai berikut :

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp141.149.922.959,09 dan Tahun 2022 sebesar Rp197.477.002.988,40 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Aliran kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas yang terdiri dari :

Tabel 5-513 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas	1.989.848.009.611,12	1.907.989.858.073,06
2	Jumlah Arus Keluar Kas	1.848.698.086.652,03	1.710.512.855.084,66
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**141.149.922.959,09**	**197.477.002.988,40**

5.5.2 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp1.989.848.009.611,12 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.907.989.858.073,06 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-514 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	43.384.281.391,00	41.397.270.293,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	21.566.432.779,68	16.881.328.762,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.629.838.583,13	4.544.375.373,27
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	140.856.087.792,31	126.192.979.702,79
5	PenerimaanDana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	137.443.488.069,00	163.050.876.593,00
6	Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	881.906.003.493,00	829.591.176.619,00
7	Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	100.481.994.423,00	95.866.127.142,00
8	Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	245.023.728.502,00	209.401.899.682,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	7.725.363.000,00
10	Penerimaan Dana Desa	224.397.404.000,00	231.667.832.000,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil	142.351.187.500,00	120.622.425.962,00
12	Penerimaan Bantuan Keuangan	11.844.850.021,00	20.856.723.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Hibah	0,00	11.601.665.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Lainnya	35.962.713.057,00	28.589.814.944,00
	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	**1.989.848.009.611,12**	**1.907.989.858.073,06**

5.5.3 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp1.848.698.086.652,03 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.710.512.855.084,66 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-515 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pembayaran Belanja Pegawai	806.488.789.870,40	787.984.360.335,00
2	Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	582.713.480.289,63	475.352.226.339,66
3	Pembayaran Belanja Subsidi	1.781.923.800,00	2.183.163.800,00
4	Pembayaran Belanja Hibah	124.626.774.987,00	93.266.283.855,00
5	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	3.032.260.000,00	19.011.581.040,00
6	Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.913.455.644,00	4.527.376.025,00
7	Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.266.372.490,00	0,00
8	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	322.125.764.100,00	327.038.076.262,00
9	Pembayaran Belanja Tidak Terduga	749.265.471,00	1.149.787.428,00
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	**1.848.698.086.652,03**	**1.710.512.855.084,66**

5.5.4 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 sebesar minus Rp169.261.091.886,03 dan Tahun 2022 sebesar minus Rp189.908.040.664,00 mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

Tabel 5-516 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Jumlah Arus Masuk Kas	572.753.447,00	488.536.336,00
2.	Jumlah Arus Keluar Kas	169.833.845.333,03	190.396.577.000,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(169.261.091.886,03)**	**(189.908.040.664,00)**

5.5.5 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 sebesar Rp572.753.447,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp488.536.336,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-517 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	329.108.175,00	227.778.421,00
	- Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	227.778.421,00
	- Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat - Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	329.108.175,00	0,00
2.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	1.150.000,00	0,00
3.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	239.995.272,00	260.757.915,00
	- Hasil Penjualan Hewan	27.000.000,00	47.751.000,00
	- Hasil Penjualan Tanaman	212.995.272,00	213.006.915,00
4.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	2.500.000,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	**572.753.447,00**	**488.536.336,00**

5.5.6 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 sebesar Rp169.833.845.333,03 dan Tahun 2022 sebesar Rp190.396.577.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-518 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Perolehan Tanah	94.915.970,00	0,00
2.	Perolehan Peralatan dan Mesin	82.098.298.764,00	86.205.466.900,00
3.	Perolehan Gedung dan Bangunan	20.570.157.238,30	48.977.092.155,00
4.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	58.084.684.454,73	48.386.382.840,00
5.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	8.469.163.161,00	6.802.635.105,00
6.	Perolehan Aset Lainnya	516.625.745,00	25.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	**169.833.845.333,03**	**190.396.577.000,00**

5.5.7 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 sebesar minus Rp14.954.884.000,00 dan Tahun 2022 sebesar minus Rp14.868.762.000,00 menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pembiayaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim/tuntutan pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

Tabel 5-519 Arus Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Jumlah Arus Masuk Kas	45.116.000,00	131.238.000,00
2.	Jumlah Arus Keluar Kas	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(14.954.884.000,00)**	**(14.868.762.000,00)**

5.5.8 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 sebesar Rp45.116.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp131.238.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-520 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	45.116.000,00	131.238.000,00
	Jumlah Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan	**45.116.000,00**	**131.238.000,00**

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2023 sebesar Rp45.116.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp131.238.000,00 merupakan penerimaan pokok atas pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dalam jangka waktu dan tingkat bunga tertentu sesuai perjanjian.

5.5.9 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-521 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	**15.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**

5.5.10 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar minus Rp35.103.189,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp118.502.155,00 merupakan penerimaan dan pengeluaran kas berupa

pajak, potongan ataupun penerimaan lainnya yang menjadi hak pihak ketiga yang dikeluarkan dari Kas Daerah/BUD dan langsung dibayarkan kepada yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-522 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Jumlah Arus Masuk Kas	116.979.583.935,82	121.032.537.495,54
2.	Jumlah Arus Keluar Kas	117.014.687.124,82	121.151.039.650,54
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**(35.103.189,00)**	**(118.502.155,00)**

5.5.11 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp116.979.583.935,82 dan Tahun 2022 sebesar Rp121.032.537.495,54 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-523 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	116.979.583.935,82	121.032.537.495,54
	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	**116.979.583.935,82**	**121.032.537.495,54**

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp116.979.583.935,82 dan Tahun 2022 sebesar Rp121.032.537.495,54 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-524 Rincian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	PFK 1 % (BPJS - Akun 811113)	5.392.658.121,00	5.955.792.993,00
2	811412 Setoran PFK IW PEMDA 4 %	24.167.901.848,00	30.664.564.900,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	17.766.214.024,00	22.420.673.979,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	1.778.581.184,00	1.334.103.670,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	489.434.818,00	451.503.892,00
6	Pajak Penghasilan Ps 26	52.279.322,00	0,00
7	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	2.594.072.287,00	2.240.572.344,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	29.614.384.596,00	23.576.969.238,00
9	PFK 8 % (PT TASPEN - Akun 811114)	28.742.494.156,00	29.059.944.853,00
10	PFK - JKK	911.280.723,00	837.240.489,00
11	PFK - JKM	2.622.034.225,00	2.511.714.690,00
12	BPJS Kesehatan	4.567.403,00	0,00
13	BPJS Ketenagakerjaan	805.500.084,00	0,00
14	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana BOS Tahun 2022	0,00	1.979.456.447,54
15	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana BOS Tahun 2023	2.035.975.901,82	0,00
16	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana BOK FKTP 2023	2.205.243,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	**116.979.583.935,82**	**121.032.537.495,54**

5.5.12 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp117.014.687.124,82 dan Tahun 2022 sebesar Rp121.151.039.650,54 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-525 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	117.014.687.124,82	121.151.039.650,54
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	**117.014.687.124,82**	**121.151.039.650,54**

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp117.014.687.124,82 dan Tahun 2022 sebesar Rp121.151.039.650,54 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-526 Rincian Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	PFK 1 % (BPJS - Akun 811113)	5.392.658.121,00	5.955.792.993,00
2	811412 Setoran PFK IW PEMDA 4 %	24.167.901.848,00	30.664.564.900,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	17.766.214.024,00	22.420.673.979,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	1.778.581.184,00	1.334.103.670,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	489.434.818,00	451.503.892,00
6	Pajak Penghasilan Ps 26	52.279.322,00	0,00
7	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	2.594.072.287,00	2.240.572.344,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	29.614.384.596,00	23.576.969.238,00
9	PFK 8 % (PT TASPEN - Akun 811114)	28.742.494.156,00	29.059.944.853,00
10	PFK - JKK	911.280.723,00	837.240.489,00
11	PFK - JKM	2.622.034.225,00	2.511.714.690,00
12	BPJS Kesehatan	4.567.403,00	0,00
13	BPJS Ketenagakerjaan	805.500.084,00	0,00
14	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana BOS Tahun 2020	0,00	1.416.120,00
15	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana BOS Tahun 2021	0,00	199.988.045,00
16	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana BOS Tahun 2022	82.902.010,00	1.896.554.437,54
17	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana BOS Tahun 2023	1.990.382.323,82	0,00
Jumlah Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		**117.014.687.124,82**	**121.151.039.650,54**

5.5.13 Kenaikan /(Penurunan) Kas

Kenaikan/ (Penurunan) Kas merupakan hasil penjumlahan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Pada Tahun 2023 terdapat penurunan kas sebesar Rp43.101.156.115,94 sedangkan pada Tahun 2022 terdapat penurunan kas sebesar Rp7.418.301.830,60 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-527 Rincian Kenaikan dan Penurunan Kas

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	141.149.922.959,09	197.477.002.988,40
2.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(169.261.091.886,03)	(189.908.040.664,00)
3.	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	(14.954.884.000,00)	(14.868.762.000,00)
4.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(35.103.189,00)	(118.502.155,00)
	Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas	**(43.101.156.115,94)**	**(7.418.301.830,60)**

5.5.14 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp177.277.057.435,39 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp220.378.213.551,33 merupakan penjumlahan Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Saldo Awal Kas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-528 Saldo Akhir Kas

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kenaikan/(Penurunan) Kas	(43.101.156.115,94)	(7.418.301.830,60)
2.	Saldo Awal Kas	220.378.213.551,33	227.796.515.381,93
	Jumlah Saldo Akhir Kas	**177.277.057.435,39**	**220.378.213.551,33**

Jumlah saldo akhir kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp177.277.057.435,39 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp220.378.213.551,33 terdiri dari :

Tabel 5-529 Rincian Saldo Akhir Kas

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	158.334.059.191,91	207.708.972.841,60
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	42.000,00	1.001.111,23
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	30.000.000,00
4.	Kas di BLUD	13.522.118.826,27	10.329.468.288,89
5.	Kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - FKTP	579.740.166,12	1.767.917.917,52
6.	Kas di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - FKTP	4.728.092.342,00	0,00
7.	Kas di Bendahara BOS	65.206.088,09	457.951.382,09
8.	Kas Lainnya	47.798.821,00	82.902.010,00
	Jumlah Saldo Akhir Kas	**177.277.057.435,39**	**220.378.213.551,33**

1. Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp158.334.059.191,91 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp207.708.972.841,60 terdiri dari :

Tabel 5-530 Rincian Kas di Kas Daerah

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Giro Kas Umum Daerah	157.637.732.149,07	207.708.972.841,60
2	Bunga Deposito Rekening Dana Cadangan	696.327.042,84	0,00
	Jumlah	**158.334.059.191,91**	**207.708.972.841,60**

2. Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp42.000 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.001.111,23 terdiri dari:

Tabel 5-531 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	0,00	4.000,00
2.	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	997.111,23
3.	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan	42.000,00	0,00
	Jumlah	**42.000,00**	**1.001.111,23**

3. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar nihil dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.000.000,00 terdiri dari :

Tabel 5-532 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Wonosari	0,00	30.000.000,00
	Jumlah	**0,00**	**30.000.000,00**

4. Jumlah Kas di BLUD RSU dr. H. Koesnadi per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.522.118.826,27 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.329.468.288,89 terdiri dari :

Tabel 5-533 Rincian Kas di BLUD RSU dr. H. Koesnadi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas di BLUD RSUD dr H Koesnadi	13.484.765.230,27	10.317.291.823,89
2.	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dr H Koesnadi	37.353.596,00	12.176.465,00
	Jumlah	**13.522.118.826,27**	**10.329.468.288,89**

5. Kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp579.740.166,12 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.767.917.917,52 terdiri dari :

Tabel 5-534 Rincian Kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - FKTP

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	FKTP Curahdami	2.515.462,00	87.649.652,00
2.	FKTP Binakal	7.935.875,00	29.672.453,00
3.	FKTP Grujugan	32.873.000,00	86.517.606,00
4.	FKTP Maesan	24.018.710,00	187.116.319,00
5.	FKTP Tamanan	5.212.614,00	148.117.908,00
6.	FKTP Jambesari	10.547.363,00	55.741.806,00
7.	FKTP Pujer	731.834,48	100.756.434,48
8.	FKTP Tlogosari	120.165.578,00	38.175.785,00
9.	FKTP Wonosari	1.997.856,00	83.336.129,00
10.	FKTP Tapen	39.199.263,00	179.234.301,00
11.	FKTP Nangkaan	148.091.955,04	108.248.126,04
12.	FKTP Sukosari	7.316.411,00	79.080.972,00
13.	FKTP Sumber Wringin	29.708.908,00	71.197.734,00
14.	FKTP Klabang	1.081.373,00	14.368.494,00
15.	FKTP Sempol	43.270.212,04	49.997.997,04
16.	FKTP Prajekan	3.898.678,60	22.387.392,60
17.	FKTP Botolinggo	736.291,00	9.731.647,00
18.	FKTP Cermee	482.773,35	94.315.358,35
19.	FKTP Kotakulon	6.811.698,70	13.434.215,70
20.	FKTP Kademangan	3.481.824,80	43.737.123,00
21.	FKTP Tenggarang	34.804,80	92.688.293,00
22.	FKTP Tegalampel	48.073.536,27	59.452.742,27
23.	FKTP Taman Krocok	11.880.655,00	1.420.986,00
24.	FKTP Wringin	13.623.807,00	28.105.188,00
25.	FKTP Pakem	16.049.682,04	83.433.255,04
	Jumlah	**579.740.166,12**	**1.767.917.917,52**

6. Kas di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) – FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.728.092.342,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar nihil terdiri dari:

Tabel 5-535 Rincian Kas di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - FKTP

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	FKTP Curahdami	139.721.459,00	0,00
2.	FKTP Binakal	82.174.296,00	0,00
3.	FKTP Grujugan	208.904.429,00	0,00
4.	FKTP Maesan	177.838.651,00	0,00
5.	FKTP Tamanan	120.042.895,00	0,00
6.	FKTP Jambesari	185.637.553,00	0,00
7.	FKTP Pujer	99.357.158,00	0,00
8.	FKTP Tlogosari	326.709.230,00	0,00
9.	FKTP Wonosari	117.876.093,00	0,00
10.	FKTP Tapen	135.499.688,00	0,00
11.	FKTP Nangkaan	96.154.607,00	0,00
12.	FKTP Sukosari	99.241.050,00	0,00
13.	FKTP Sumber Wringin	100.448.803,00	0,00
14.	FKTP Klabang	182.726.909,00	0,00
15.	FKTP Sempol	244.903.409,00	0,00
16.	FKTP Prajekan	259.970.821,00	0,00
17.	FKTP Botolinggo	412.824.855,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
18.	FKTP Cermee	506.022.206,00	0,00
19.	FKTP Kotakulon	150.184.331,00	0,00
20.	FKTP Kademangan	131.525.016,00	0,00
21.	FKTP Tenggarang	362.600.537,00	0,00
22.	FKTP Tegalampel	111.083.410,00	0,00
23.	FKTP Taman Krocok	127.390.311,00	0,00
24.	FKTP Wringin	253.837.133,00	0,00
25.	FKTP Pakem	95.417.492,00	0,00
	Jumlah	**4.728.092.342,00**	**0,00**

7. Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp65.206.088,09 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp457.951.382,09 terdiri dari :

Tabel 5-536 Rincian Kas di Bendahara BOS

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Kas di Dana BOS - SD	62.756.885,80	85.317.247,80
2	Kas di Dana BOS - SMP	2.449.202,29	372.634.134,29
	Jumlah	**65.206.088,09**	**457.951.382,09**

8. Jumlah Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp47.798.821,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.902.010,00 terdiri dari :

Tabel 5-537 Rincian Kas Lainnya

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Utang PFK Dana BOS - SD	35.991.684,00	79.076.686,00
2	Utang PFK Dana BOS - SMP	9.601.894,00	3.825.324,00
3	Utang PFK Dana BOK - FKTP	2.205.243,00	0,00
	Jumlah	**47.798.821,00**	**82.902.010,00**

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Tahun 2023 sebesar Rp2.830.841.722.238,64 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2023.

5.6.2 Surplus/(Defisit) LO

Surplus/(Defisit) LO sebesar defisit Rp78.180.176.694,81 merupakan defisit atas kegiatan operasional yang mengurangi nilai ekuitas pada neraca Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023.

5.6.3 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp29.287.513.719,26 disebabkan oleh koreksi kesalahan mendasar.

5.6.4 Koreksi nilai persediaan

Koreksi nilai persediaan sebesar Rp24.894.900,00 disebabkan oleh penambahan nilai saldo awal persediaan berupa Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.471.050,00 dan Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp23.423.850,00.

5.6.5 Koreksi kesalahan mendasar

Koreksi kesalahan mendasar sebesar minus Rp229.262.618.819,26 disebabkan oleh koreksi ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

5.6.5.1 Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar minus Rp4.287.000,74 terdiri dari koreksi pengurangan saldo awal piutang klaim BPJS pada RSUD dr. H. Koesnadi sebesar Rp4.287.000,00 berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Pasca Klaim Pembayaran Kelebihan Biaya Pelayanan Kesehatan RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso nomor 900/124/430.7/2023 – Nomor 298/BA/VII-07/01/23 tanggal 06 Januari 2023 dan koreksi pembulatan Piutang Renumerasi Treasury Deposit Facility (TDF) bagian bulan Desember 2022.

5.6.5.2 Koreksi Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp44.230.316,00,00 merupakan koreksi penambahan saldo awal Tagihan Jangka Panjang (TGR) pada RSUD dr. H. Koesnadi.

5.6.5.3 Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp3.284.079.672,00 merupakan koreksi pengurangan saldo awal utang jangka pendek lainya-kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana bagi hasil.

5.6.5.4 Koreksi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp25.938.595.832,00 merupakan Koreksi Penyertaan Modal pada PDAM.

5.6.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp2.781.949.059.263,09 dengan rincian sebagai berikut :

-	Ekuitas Awal	Rp	2.830.841.722.238,64
-	Surplus/ Defisit LO	Rp	(78.180.176.694,81)
-	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp	29.287.513.719,26
-	**Ekuitas Akhir**	**Rp**	**2.781.949.059.263,09**

5.6.7 Pengungkapan Atas Pos-Pos Laporan Keuangan Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual.

Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023, nilai surplus/(defisit) adalah defisit sebesar Rp28.111.168.926,94 dan nilai surplus/(defisit) Laporan Operasional Tahun 2023 adalah defisit sebesar defisit Rp78.180.176.694,81. Nilai tersebut memiliki perbedaan sebesar minus Rp50.069.007.767,87.

5.7 Pengungkapan Perbedaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dan Laporan Operasional (LO)

5.7.1 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan – LRA Dan Pendapatan –LO

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	**43.384.281.391,00**	**49.153.984.492,56**	**5.769.703.101,56**

Pendapatan Pajak Daerah – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp43.384.281.391,00 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah sebesar Rp49.153.984.492,56. Selisih antara pendapatan Pajak Daerah – LRA dengan pendapatan Pajak Daerah-LO adalah sebesar Rp5.769.703.101,56 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-538 Selisih Rincian Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Realisasi LRA	Realisasi LO	Selisih
1	Pajak Hotel	1.209.059.528,00	1.213.317.298,00	4.257.770,00
2	Pajak Restoran	4.689.253.089,00	4.940.030.680,00	250.777.591,00
3	Pajak Hiburan	223.681.289,00	231.361.689,00	7.680.400,00
4	Pajak Reklame	1.150.978.778,00	1.357.738.360,56	206.759.582,56
5	Pajak Penerangan Jalan	16.340.793.517,00	16.434.354.493,00	93.560.976,00
6	Pajak Parkir	263.550.600,00	264.705.600,00	1.155.000,00
7	Pajak Air Tanah	542.294.045,00	542.457.455,00	163.410,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	950.000,00	950.000,00	0,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	13.242.684.424,00	18.448.032.796,00	5.205.348.372,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.721.036.121,00	5.721.036.121,00	0,00
	Jumlah	**43.384.281.391,00**	**49.153.984.492,56**	**5.769.703.101,56**

Selisih antara pendapatan pajak daerah LRA dan LO sebesar Rp5.769.703.101,56 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :	
a. SKP 2023	48.824.702.617,00
b. Pembebasan denda	113.528.348,00
c. Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	371.394.604,23
d. Koreksi Penambahan Piutang Pajak Restoran	232.273.542,00
Jumlah penambahan	49.541.899.111,23
Pengurangan:	
a. Pembayaran Piutang	1.669.032.471,00
b. Realisasi SKP 2023	41.715.248.920,00
c. Pembebasan denda atas piutang tahun sebelumnya	33.197.404,00
d. Pembebasan denda Tahun 2023	80.330.944,00
e. Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	274.386.270,67
Jumlah pengurangan	43.772.196.009,67
Selisih antara penambahan dan pengurangan	5.769.703.101,56

Penjelasan selisih masing-masing rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Selisih Pajak Hotel – LRA dengan Pajak Hotel – LO sebesar Rp4.257.770,00 merupakan SKP Tahun 2023 sebesar Rp1.213.317.298,00 yang baru diterima pembayarannya sebesar Rp1.209.059.528,00.

2. Selisih Pajak Restoran – LRA dengan Pajak Restoran – LO sebesar Rp250.777.591,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :	
a. SKP 2023	4.707.757.138,00
b. Koreksi Penambahan Piutang Pajak Restoran	232.273.542,00
Jumlah penambahan	4.940.030.680,00
Pengurangan:	
a. Realisasi SKP 2023	4.689.253.089,00
Jumlah pengurangan	4.689.253.089,00
Selisih antara penambahan dan pengurangan	250.777.591,00

3. Selisih Pajak Hiburan – LRA dengan Pajak Hiburan – LO sebesar Rp7.680.400,00 merupakan SKP Tahun 2023 sebesar Rp231.361.689,00 yang baru diterima pembayarannya sebesar Rp223.681.289,00.
4. Selisih Pajak Reklame – LRA dengan Pajak Reklame – LO sebesar Rp206.759.582,56 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :	
a. SKP 2023	1.260.730.027,00
b. Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	371.394.604,23
Jumlah penambahan	1.632.124.631,23
Pengurangan:	
a. Pembayaran Piutang	39.428.188,00
b. Realisasi SKP 2023	1.111.550.590,00
c. Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	274.386.270,67
Jumlah pengurangan	1.425.365.048,67
Selisih antara penambahan dan pengurangan	206.759.582,56

5. Selisih Pajak Penerangan Jalan – LRA dengan Pajak Penerangan Jalan – LO sebesar Rp93.560.976,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :	
a. SKP 2023	16.434.354.493,00
Jumlah penambahan	16.434.354.493,00
Pengurangan:	
a. Pembayaran Piutang	1.362.232.382,00
b. Realisasi SKP 2023	14.978.561.135,00
Jumlah pengurangan	16.340.793.517,00
Selisih antara penambahan dan pengurangan	93.560.976,00

6. Selisih Pajak Parkir – LRA dengan Pajak Parkir – LO sebesar Rp1.155.000,00 merupakan SKP Tahun 2023 sebesar Rp264.705.600,00 yang baru diterima pembayarannya sebesar Rp263.550.600,00.
7. Selisih Pajak Pajak Air Tanah – LRA dengan Pajak Pajak Air Tanah – LO sebesar Rp163.410,00 merupakan SKP Tahun 2023 sebesar Rp542.457.455,00 yang baru diterima pembayarannya sebesar Rp542.294.045,00.
8. Tidak ada selisih antara Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO karena SKP Tahun 2023 sebesar Rp950.000,00 telah diterima seluruh pembayarannya di Tahun 2023.

9. Selisih Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO adalah sebesar Rp5.205.348.372,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :	
a. SKP 2023	18.448.032.796,00
b. Pembebasan denda	113.528.348,00
Jumlah penambahan	18.561.561.144,00
Pengurangan:	
a. Pembayaran Piutang	267.371.901,00
b. Pembebasan denda atas piutang tahun sebelumnya	33.197.404,00
c. Realisasi SKP 2023	12.975.312.523,00
d. Pembebasan denda Tahun 2023	80.330.944,00
Jumlah pengurangan	13.356.212.772,00
Selisih antara penambahan dan pengurangan	5.205.348.372,00

10. Tidak ada selisih antara Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO karena SKP Tahun 2023 sebesar Rp5.721.036.121,00 telah diterima seluruh pembayarannya di Tahun 2023.

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.1.2	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**21.566.432.779,68**	**20.956.797.827,68**	**(609.634.952,00)**

Pendapatan Retribusi Daerah – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp21.566.432.779,68 sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah – LO adalah sebesar Rp20.956.797.827,68. Selisih antara pendapatan Retribusi Daerah – LRA dengan pendapatan Retribusi Daerah – LO adalah sebesar minus Rp609.634.952,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-539 Selisih Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Realisasi		
		LRA	LO	Selisih
1	Retribusi Jasa Umum	19.441.464.804,68	18.771.799.852,68	(669.664.952,00)
2	Retribusi Jasa Usaha	1.104.062.975,00	1.164.092.975,00	60.030.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.020.905.000,00	1.020.905.000,00	0,00
	Jumlah	**21.566.432.779,68**	**20.956.797.827,68**	**(609.634.952,00)**

Selisih antara pendapatan retribusi daerah LRA dan LO sebesar minus Rp609.634.952,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :	
a. Penambahan SK Klaim 2023	9.286.680.000,00
b. Penambahan SKR 2023	1.385.350.254,00
c. Pemotongan pembayaran transfer bank atas pembayaran klaim BPJS Dinas Kesehatan	872.900,00
Jumlah penambahan	10.672.903.154,00
Pengurangan:	
a. Pembayaran Piutang	1.373.628.456,00
b. Realisasi SK Klaim 2023	9.142.555.000,00
c. Realisasi SKR 2023	764.756.750,00

d. Pemotongan pembayaran transfer bank atas pembayaran klaim BPJS Dinas Kesehatan	872.900,00
e. BA. Hasil Audit Klaim B.P	725.000,00
Jumlah pengurangan	11.282.538.106,00
Selisih antara penambahan dan pengurangan	(609.634.952,00)

Penjelasan selisih masing-masing rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Selisih Retribusi Jasa Umum – LRA dengan Retribusi Jasa Umum – LO sebesar minus Rp669.664.952,00dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :	
a. Penambahan SK Klaim 2023	9.286.680.000,00
b. Penambahan SKR 2023	940.931.254,00
c. Pemotongan pembayaran transfer bank atas pembayaran klaim BPJS Dinas Kesehatan	872.900,00
Jumlah penambahan	10.228.484.154,00
Pengurangan:	
a. Pembayaran Piutang	1.239.723.206,00
b. Realisasi SK Klaim 2023	9.142.555.000,00
c. Realisasi SKR 2023	514.273.000,00
d. Pemotongan pembayaran transfer bank atas pembayaran klaim BPJS Dinas Kesehatan	872.900,00
e. BA. Hasil Audit Klaim B.P	725.000,00
Jumlah pengurangan	10.898.149.106,00
Selisih antara penambahan dan pengurangan	(669.664.952,00)

2. Selisih Retribusi Jasa Usaha – LRA dengan Retribusi Jasa Usaha – LO sebesar Rp60.030.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :	
a. Penambahan SKR 2023	444.419.000,00
Jumlah penambahan	444.419.000,00
Pengurangan:	
a. Pembayaran Piutang	133.905.250,00
b. Realisasi SKR 2023	250.483.750,00
Jumlah pengurangan	384.389.000,00
Selisih antara penambahan dan pengurangan	60.030.000,00

3. Tidak ada selisih antara Retribusi Perizinan Tertentu – LRA dengan Retribusi Perizinan Tertentu – LO.

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.1.3	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	**4.629.838.583,13**	**6.113.545.893,13**	**1.483.707.310,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.629.838.583,13 sedangkan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO adalah sebesar Rp6.113.545.893,13. Selisih antara pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA dengan

pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO adalah sebesar Rp1.483.707.310,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-540 Selisih Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Realisasi		
		LRA	LO	Selisih
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.629.838.583,13	6.113.545.893,13	1.483.707.310,00
	Jumlah	**4.629.838.583,13**	**6.113.545.893,13**	**1.483.707.310,00**

Selisih antara pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA dan LO sebesar Rp1.483.707.310,00 merupakan Penambahan Pengakuan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda pada PDAM (Metode Ekuitas) Tahun 2023.

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.1.4	**Pendapatan Hasil Lain-Lain PAD Yang Sah**	**141.428.841.239,31**	**146.400.630.288,63**	**4.971.789.049,32**

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp141.428.841.239,31 sedangkan pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO adalah sebesar Rp146.400.630.288,63. Selisih antara pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LRA dengan pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO adalah sebesar Rp4.971.789.049,32 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-541 Selisih Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Realisasi		
		LRA	LO	Selisih
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	572.753.447,00	243.645.272,00	(329.108.175,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	457.705.595,00	936.479.261,67	478.773.666,67
3	Jasa Giro	1.944.311.326,04	1.895.060.542,93	(49.250.783,11)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)
5	Pendapatan Bunga	4.105.935.258,81	4.062.086.161,12	(43.849.097,69)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00	291.724.720,00	291.724.720,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	307.903.283,44	307.903.283,44	0,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	149.874.327,00	149.874.327,00	0,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	658.713.490,49	621.069.990,49	(37.643.500,00)
11	Pendapatan BLUD	133.184.544.511,53	137.848.086.729,98	4.663.542.218,45
	Jumlah	**141.428.841.239,31**	**146.400.630.288,63**	**4.971.789.049,32**

Selisih antara pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA dan LO sebesar Rp4.971.789.049,32 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :

a. Penambahan Piutang Tahun 2023 130.132.549.731,52
b. Pemotongan pembayaran transfer bank atas pembayaran klaim BPJS RSUD 768.300,00
c. Pemotongan pembayaran transfer bank atas pembayaran Pihak Ketiga RSUD 34.800,00

d.	BA. Hasil Verifikasi Paska Klaim Tahun 2022	4.287.000,00
e	Saldo awal pendapatan diterima dimuka	1.034.467.833,33
f.	Perubahan status performing/likuiditas Piutang yg dicatat sebagai pendapatan	333.404.865,20
Jumlah penambahan		131.505.512.530,05
Pengurangan:		
a.	Pembayaran Piutang Tahun Sebelumnya	9.335.090.733,38
b.	Pembayaran Piutang Tahun 2023	115.316.722.889,00
c.	Reklasifikasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan atas penghapusan aset tetap dengan tindak lanjut penjualan ke surplus penjualan Aset Non Lancar-aset tetap	1.090.880.276,00
d.	Pemotongan pembayaran transfer bank atas pembayaran klaim BPJS RSUD	768.300,00
e.	Pemotongan pembayaran transfer bank atas pembayaran Pihak Ketiga RSUD	34.800,00
f.	BA. Hasil Verifikasi Paska Klaim Tahun 2023 atas Klaim BPJS	183.231.845,00
g.	BA. Hasil Verifikasi Paska Klaim Tahun 2023 atas Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya-Yayasan Kesehatan Pegawai TELKOM	54.846,00
h.	BA. Hasil Verifikasi Paska Klaim Tahun 2023 atas Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya- Kemenkes	41.866.000,00
i.	Saldo akhir pendapatan diterima dimuka	504.975.666,66
j.	Bunga Deposito pada Rekening Dana Cadangan Tahun 2022	40.311.124,69
k.	Koreksi pengurangan saldo awal piutang klaim BPJS	4.287.000,00
l.	Pembayaran Tagihan Jangka Panjang - Tuntutan Ganti Kerugian	15.500.000,00
Jumlah pengurangan		126.533.723.480,73
Selisih antara penambahan dan pengurangan		4.971.789.049,32

Penjelasan selisih masing-masing rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Selisih antara Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan LRA dan LO sebesar minus Rp329.108.175,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :		
a.	Penambahan Piutang Tahun 2023	1.090.880.276,00
Jumlah penambahan		1.090.880.276,00
Pengurangan:		
a.	Pembayaran Piutang Tahun Sebelumnya	121.421.745,00
b.	Pembayaran Piutang Tahun 2023	207.686.430,00
c.	Reklasifikasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan atas penghapusan aset tetap dengan tindak lanjut penjualan ke suprlus penjualan Aset Non Lancar-aset tetap	1.090.880.276,00
Jumlah pengurangan		1.419.988.451,00
Selisih antara penambahan dan pengurangan		(329.108.175,00)

2. Selisih Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA dengan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO sebesar Rp478.773.666,67 merupakan saldo awal pendapatan diterima dimuka sebesar Rp849.678.333,33 setelah dikurangi dengan saldo akhir pendapatan diterima dimuka sebesar Rp370.904.666,66.

3. Selisih Jasa Giro – LRA dengan Jasa Giro – LO sebesar minus Rp49.250.783,11 merupakan penambahan piutang Tahun 2023 sebesar Rp126.734.950,20 setelah dikurangi dengan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp175.985.733,31.
4. Selisih Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LRA dengan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO sebesar minus Rp2.400.000,00 merupakan pembayaran piutang bunga perguliran tahun sebelumnya.
5. Selisih Pendapatan Bunga – LRA dengan Pendapatan Bunga – LO sebesar minus Rp43.849.097,69 merupakan Bunga Deposito pada Rekening Dana Cadangan Tahun 2022 sebesar Rp40.311.124,69 setelah ditambah dengan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp3.537.973,00.
6. Selisih Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LRA dengan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO sebesar Rp291.724.720,00 merupakan Penurunan nilai penyisihan karena perubahan status performing/likuiditas Piutang yg dicatat sebagai pendapatan sebesar Rp307.224.720,00 setelah dikurangi dengan pembayaran Tagihan Jangka Panjang - Tuntutan Ganti Kerugian sebesar Rp15.500.000,00.
7. Tidak ada selisih antara Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA dengan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
8. Tidak ada selisih antara Pendapatan Denda Pajak Daerah - LRA dengan Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO
9. Tidak ada selisih antara Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA dengan Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO
10. Selisih Pendapatan dari Pengembalian – LRA dengan Pendapatan dari Pengembalian – LO sebesar minus Rp37.643.500,00 merupakan pembayaran piutang tahun sebelumnya
11. Pendapatan BLUD yang Tidak Dipisahkan LRA dan LO sebesar Rp4.663.542.218,45 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :

a.	Penambahan Piutang Tahun 2023	128.914.934.505,32
b.	Pemotongan pembayaran transfer bank atas pembayaran klaim BPJS RSUD	768.300,00
c.	Pemotongan pembayaran transfer bank atas pembayaran Pihak Ketiga RSUD	34.800,00
d.	BA. Hasil Verifikasi Paska Klaim Tahun 2022	4.287.000,00
e.	Saldo awal pendapatan diterima dimuka	184.789.500,00
f.	Penurunan nilai penyisihan karena perubahan status performing/likuiditas Piutang yg dicatat sebagai pendapatan	26.180.145,20
Jumlah penambahan		129.130.994.250,52

Pengurangan:

a.	Pembayaran Piutang Tahun Sebelumnya	8.994.101.782,07
b.	Pembayaran Piutang Tahun 2023	115.109.036.459,00
c.	Pemotongan pembayaran transfer bank atas pembayaran klaim BPJS RSUD	768.300,00
d.	Pemotongan pembayaran transfer bank atas pembayaran Pihak Ketiga RSUD	34.800,00
e.	BA. Hasil Verifikasi Paska Klaim Tahun 2023 atas Klaim BPJS	183.231.845,00

f.	BA. Hasil Verifikasi Paska Klaim Tahun 2023 atas Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya-Yayasan Kesehatan Pegawai TELKOM	54.846,00
g.	BA. Hasil Verifikasi Paska Klaim Tahun 2023 atas Klaim Pelayanan Kesehatan kepada pihak III lainnya- Kemenkes	41.866.000,00
h.	saldo akhir pendapatan diterima dimuka	134.071.000,00
i.	Koreksi pengurangan saldo awal piutang klaim BPJS	4.287.000,00
Jumlah pengurangan		124.467.452.032,07
Selisih antara penambahan dan pengurangan		4.663.542.218,45

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.1.5	**Dana Bagi Hasil**	**137.443.488.069,00**	**142.073.182.000,00**	**4.629.693.931,00**

Pendapatan Dana Bagi Hasil – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp137.443.488.069,00 sedangkan pendapatan Dana Bagi Hasil – LO adalah sebesar Rp142.073.182.000,00. Selisih antara pendapatan Dana Bagi Hasil – LRA dengan pendapatan Dana Bagi Hasil – LO adalah sebesar Rp4.629.693.931,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-542 Selisih Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Realisasi LRA	Realisasi LO	Selisih
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.589.551.494,00	6.423.555.000,00	(165.996.494,00)
2	DBH PPh Pasal 21	12.610.077.252,00	13.261.634.000,00	651.556.748,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.569.017.996,00	1.397.641.000,00	(171.376.996,00)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	71.133.888.706,00	65.141.356.000,00	(5.992.532.706,00)
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	33.912.726.005,00	40.206.901.000,00	6.294.174.995,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.484.734.246,00	4.786.185.000,00	2.301.450.754,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	318.802.552,00	454.731.000,00	135.928.448,00
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	6.421.011.591,00	8.268.242.000,00	1.847.230.409,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	905.176.016,00	846.188.000,00	(58.988.016,00)
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.498.502.211,00	1.286.749.000,00	(211.753.211,00)
	Jumlah	**137.443.488.069,00**	**142.073.182.000,00**	**4.629.693.931,00**

Selisih antara pendapatan Dana Bagi Hasil yang Sah LRA dan LO sebesar Rp4.629.693.931,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :

a. Penambahan Piutang yang dibayar melalui Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2023	12.084.892.000,00
b. Penambahan Dana Bagi Hasil dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2023	7.132.555.000,00
Jumlah penambahan	19.217.447.000,00

Pengurangan:

a. Pencairan Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Dana Bagi Hasil Tahun 2022	14.587.753.069,00
Jumlah pengurangan	14.587.753.069,00
Selisih antara penambahan dan pengurangan	4.629.693.931,00

Penjelasan selisih masing-masing rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Selisih DBH Pajak Bumi dan Bangunan – LRA dengan DBH Pajak Bumi dan Bangunan – LO sebesar minus Rp165.996.494,00 merupakan Penambahan Dana Bagi Hasil dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2023 sebesar Rp946.698.000,00 setelah dikurangi Pencairan Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Dana Bagi Hasil Tahun 2022 sebesar Rp1.112.694.494,00.
2. Selisih DBH PPh Pasal 21 – LRA dengan DBH PPh Pasal 21 – LO sebesar Rp651.556.748,00 merupakan Penambahan Dana Bagi Hasil dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2023 sebesar Rp2.173.208.000,00 setelah dikurangi Pencairan Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Dana Bagi Hasil Tahun 2022 sebesar Rp1.521.651.252,00.
3. Selisih DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN – LRA dengan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN – LO sebesar minus Rp171.376.996,00 merupakan Penambahan Dana Bagi Hasil dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2023 sebesar Rp38.234.000,00 setelah dikurangi Pencairan Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Dana Bagi Hasil Tahun 2022 sebesar Rp209.610.996,00.
4. Selisih DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) – LRA dengan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) – LO sebesar minus Rp5.992.532.706,00 merupakan Pencairan Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Dana Bagi Hasil Tahun 2022.
5. Selisih DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi– LRA dengan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi – LO sebesar Rp6.294.174.995,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :	
a. Penambahan Piutang yang dibayar melalui Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2023	9.422.377.000,00
b. Penambahan Dana Bagi Hasil dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2023	1.762.279.000,00
Jumlah penambahan	11.184.656.000,00
Pengurangan:	
a. Pencairan Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Dana Bagi Hasil Tahun 2022	4.890.481.005,00
Jumlah pengurangan	4.890.481.005,00
Selisih antara penambahan dan pengurangan	6.294.174.995,00

6. Selisih DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi – LRA dengan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi – LO sebesar Rp2.301.450.754,00 merupakan Penambahan Piutang yang dibayar melalui Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2023 sebesar Rp2.612.162.000,00 setelah dikurangi dengan Pencairan Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Dana Bagi Hasil Tahun 2022 sebesar Rp310.711.246,00.
7. Selisih DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi – LRA dengan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi – LO sebesar Rp135.928.448,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :	
a. Penambahan Piutang yang dibayar melalui Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2023	50.061.000,00
b. Penambahan Dana Bagi Hasil dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2023	114.205.000,00
Jumlah penambahan	164.266.000,00
Pengurangan:	
a. Pencairan Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Dana Bagi Hasil Tahun 2022	28.337.552,00
Jumlah pengurangan	28.337.552,00
Selisih antara penambahan dan pengurangan	135.928.448,00

8. Selisih Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty – LRA dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty – LO sebesar Rp1.847.230.409,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :	
a. Penambahan Piutang yang dibayar melalui Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2023	292.000,00
b. Penambahan Dana Bagi Hasil dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2023	2.097.931.000,00
Jumlah penambahan	2.098.223.000,00
a. Pencairan Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Dana Bagi Hasil Tahun 2022	250.992.591,00
Jumlah pengurangan	250.992.591,00
Selisih antara penambahan dan pengurangan	1.847.230.409,00

9. Selisih DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) – LRA dengan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) – LO sebesar minus Rp58.988.016,00 merupakan Pencairan Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Dana Bagi Hasil Tahun 2022.
10. Selisih DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan – LRA dengan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan – LO sebesar minus Rp211.753.211,0 merupakan Pencairan Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Dana Bagi Hasil Tahun 2022.

	LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.1.6 Dana Alokasi Umum	**881.906.003.493,00**	**881.906.003.493,00**	**0,00**

Pendapatan Dana Alokasi Umum – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp881.906.003.493,00 sedangkan Pendapatan Dana Alokasi Umum – LO adalah sebesar Rp881.906.003.493,00. Selisih antara Pendapatan Dana Alokasi Umum – LRA dengan Pendapatan Dana Alokasi Umum – LO adalah sebesar minus Rp0,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-543 Selisih Rincian Pendapatan Dana Alokasi Umum

No	Uraian	Realisasi LRA	Realisasi LO	Selisih
1	DAU	881.906.003.493,00	881.906.003.493,00	0,00
	Jumlah	**881.906.003.493,00**	**881.906.003.493,00**	**0,00**

Tidak ada selisih antara Pendapatan Dana Alokasi Umum - LRA dengan Pendapatan Dana Alokasi Umum – LO

	LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.1.7 DAK Fisik	**100.481.994.423,00**	**100.481.994.423,00**	**0,00**

Pendapatan DAK Fisik – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp100.481.994.423,00 sedangkan pendapatan DAK Fisik – LO adalah sebesar Rp100.481.994.423,00. Selisih antara pendapatan DAK Fisik – LRA dengan pendapatan DAK Fisik – LO adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-544 Selisih Rincian DAK Fisik

No	Uraian	Realisasi		
		LRA	LO	Selisih
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	940.102.250,00	940.102.250,00	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.156.923.755,00	7.156.923.755,00	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.227.457.940,00	4.227.457.940,00	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	6.886.250.000,00	6.886.250.000,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	1.643.709.164,00	1.643.709.164,00	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	29.590.763.182,00	29.590.763.182,00	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	8.565.921.357,00	8.565.921.357,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	11.355.378.000,00	11.355.378.000,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	530.778.000,00	530.778.000,00	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	2.685.500.000,00	2.685.500.000,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	26.189.210.775,00	26.189.210.775,00	0,00
	Jumlah	**100.481.994.423,00**	**100.481.994.423,00**	**0,00**

Tidak ada selisih antara Pendapatan DAK Fisik - LRA dengan Pendapatan DAK Fisik – LO.

	LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.1.8 DAK Non Fisik	**245.023.728.502,00**	**208.821.504.523,00**	**(36.202.223.979,00)**

Pendapatan DAK Non Fisik – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp245.023.728.502,00 sedangkan pendapatan DAK Non Fisik – LO adalah sebesar Rp208.821.504.523,00. Selisih antara pendapatan DAK Non Fisik – LRA dengan pendapatan DAK Fisik – LO adalah sebesar minus Rp36.202.223.979,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-545 Selisih Rincian DAK Non Fisik

No	Uraian	Realisasi		
		LRA	LO	Selisih
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	70.093.106.796,00	61.118.121.317,00	(8.974.985.479,00)
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD	113.034.486.820,00	113.034.486.820,00	0,00
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	535.874.999,00	535.874.999,00	0,00
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD	557.793.900,00	557.793.900,00	0,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	21.327.939.000,00	0,00	(21.327.939.000,00)
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	5.899.299.500,00	0,00	(5.899.299.500,00)
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	20.811.300.000,00	20.811.300.000,00	0,00

No	Uraian	Realisasi LRA	Realisasi LO	Selisih
8	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.964.144.000,00	1.964.144.000,00	0,00
9	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	381.758.100,00	381.758.100,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKB-KB	7.082.454.031,00	7.082.454.031,00	0,00
11	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	936.914.078,00	936.914.078,00	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.946.836.678,00	1.946.836.678,00	0,00
13	DAK Non Fisik-PK2UMK	451.820.600,00	451.820.600,00	0,00
	Jumlah	**245.023.728.502,00**	**208.821.504.523,00**	**(36.202.223.979,00)**

Selisih antara pendapatan DAK Non Fisik LRA dan LO sebesar minus Rp36.202.223.979,00 merupakan pendapatan BOS Swasta sebesar Rp8.974.985.479,00, pendapatan Dana BOP PAUD sebesar Rp21.327.939.000,00, dan penadapatan Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp5.899.299.500,00 yang tidak diakui sebagai pendapatan DAK Non Fisik -LO karena bukan bagian dari entitas pelaporan.

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.1.9	**Dana Desa**	**224.397.404.000,00**	**0,00**	**(224.397.404.000,00)**

Pendapatan Desa – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp224.397.404.000,00 sedangkan pendapatan Desa – LO adalah sebesar Rp0,00. Selisih antara pendapatan Dana Desa – LRA dengan pendapatan Dana Desa – LO adalah sebesar minus Rp224.397.404.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-546 Selisih Rincian Desa

No	Uraian	Realisasi LRA	Realisasi LO	Selisih
1	Dana Desa	224.397.404.000,00	0,00	(224.397.404.000,00)
	Jumlah	**224.397.404.000,00**	**0,00**	**(224.397.404.000,00)**

Selisih antara pendapatan Dana Desa LRA dan LO sebesar minus Rp224.397.404.000,00 merupakan pendapatan dana desa yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO karena bukan bagian dari entitas pelaporan.

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.1.10	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**142.351.187.500,00**	**132.918.031.900,00**	**(9.433.155.600,00)**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp142.351.187.500,00 sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO adalah sebesar Rp132.918.031.900,00. Selisih antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO adalah sebesar minus Rp9.433.155.600,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-547 Selisih Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Realisasi LRA	Realisasi LO	Selisih
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	142.351.187.500,00	132.918.031.900,00	(9.433.155.600,00)
	Jumlah	**142.351.187.500,00**	**132.918.031.900,00**	**(9.433.155.600,00)**

Selisih antara Pendapatan Bagi Hasil LRA dan LO sebesar minus Rp9.433.155.600,00 merupakan pembayaran piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok tahun sebelumnya.

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.1.11	**Pendapatan Bantuan Keuangan**	**11.844.850.021,00**	**11.844.850.021,00**	**0,00**

Pendapatan Bantuan Keuangan – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp11.844.850.021,00 sedangkan Pendapatan Bantuan Keuangan – LO adalah sebesar Rp11.844.850.021,00. Selisih antara Pendapatan Bantuan Keuangan – LRA dengan Pendapatan Bantuan Keuangan – LO adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-548 Selisih Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan

No	Uraian	Realisasi		
		LRA	LO	Selisih
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	11.844.850.021,00	11.844.850.021,00	0,00
	Jumlah	**11.844.850.021,00**	**11.844.850.021,00**	**0,00**

Tidak ada selisih antara Pendapatan Bantuan Keuangan - LRA dengan Pendapatan Bantuan Keuangan – LO

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.1.12	**Pendapatan Hibah**	**0,00**	**47.488.710.300,29**	**47.488.710.300,29**

Pendapatan Hibah – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan Pendapatan Hibah – LO adalah sebesar Rp47.488.710.300,29. Selisih antara Pendapatan Hibah – LRA dengan Pendapatan Hibah – LO adalah sebesar Rp47.488.710.300,29 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-549 Selisih Rincian Pendapatan Hibah

No	Uraian	Realisasi		
		LRA	LO	Selisih
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	19.550.567.716,29	19.550.567.716,29
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	5.525.538.684,00	5.525.538.684,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	22.412.603.900,00	22.412.603.900,00
	Jumlah	**0,00**	**47.488.710.300,29**	**47.488.710.300,29**

Selisih antara pendapatan Hibah LRA dan LO sebesar Rp47.488.710.300,29 merupakan Penerimaan Hibah Barang berupa Aset Tetap sebesar Rp30.489.600.511,00 dan Penerimaan Hibah Barang berupa Persediaan sebesar Rp16.999.109.789,29.

Penjelasan selisih masing-masing rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Selisih Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LRA dengan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO sebesar Rp19.550.567.716,29 merupakan Penerimaan Hibah Barang berupa Aset Tetap sebesar Rp7.872.491.476,00 dan Penerimaan Hibah Barang berupa Persediaan sebesar Rp11.678.076.240,29.
2. Selisih Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LRA dengan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO sebesar Rp5.525.538.684,00 merupakan Penerimaan Hibah Barang berupa Aset Tetap sebesar Rp204.505.135,00 dan Penerimaan Hibah Barang berupa Persediaan sebesar Rp5.321.033.549,00.

3. Selisih Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri – LRA dengan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri – LO sebesar Rp22.412.603.900,00 merupakan Penerimaan Hibah Barang berupa Aset Tetap sebesar Rp22.412.603.900,00.

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.1.13	**Pendapatan Lainnya**	**35.962.713.057,00**	**35.962.713.057,00**	**0,00**

Pendapatan Lainnya – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp35.962.713.057,00 sedangkan Pendapatan Lainnya – LO adalah sebesar Rp35.962.713.057,00. Selisih antara Pendapatan Lainnya – LRA dengan Pendapatan Lainnya – LO adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-550 Selisih Rincian Pendapatan Lainnya

No	Uraian	Realisasi		Selisih
		LRA	LO	
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	35.962.713.057,00	35.962.713.057,00	0,00
	Jumlah	**35.962.713.057,00**	**35.962.713.057,00**	**0,00**

Tidak ada selisih antara Pendapatan Lainnya - LRA dengan Pendapatan Lainnya – LO.

5.7.2 Pengungkapan Perbedaan Belanja – LRA Dan Beban – LO

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.2.1	**Beban Pegawai**	**806.488.789.870,40**	**806.399.417.317,40**	**(89.372.553,00)**

Belanja Pegawai – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp806.488.789.870,40 sedangkan Beban Pegawai – LO adalah sebesar Rp806.399.417.317,40. Selisih antara Belanja Pegawai – LRA dengan Beban Pegawai - LO adalah sebesar minus Rp89.372.553,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-551 Selisih Rincian Beban Pegawai

No	Uraian	Realisasi		Selisih
		LRA	LO	
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	560.320.881.394,00	560.320.281.394,00	(600.000,00)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	72.286.859.908,00	72.254.703.576,00	(32.156.332,00)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	141.192.395.177,40	141.155.728.956,40	(36.666.221,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	19.384.448.050,00	19.384.448.050,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	322.105.644,00	302.155.644,00	(19.950.000,00)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	851.865.000,00	851.865.000,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	12.130.234.697,00	12.130.234.697,00	0,00
	Jumlah	**806.488.789.870,40**	**806.399.417.317,40**	**(89.372.553,00)**

Selisih antara Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai LO sebesar minus Rp89.372.553,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :

a. Pengakuan Utang Tahun 2023	751.700.119,00
Jumlah penambahan	751.700.119,00

Pengurangan:

a.	Pembayaran Utang tahun sebelumnya	823.916.340,00
b	Piutang kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan ASN	17.156.332,00
Jumlah pengurangan		841.072.672,00
Selisih antara penambahan dan pengurangan		(89.372.553,00)

Penjelasan selisih masing-masing rincian belanja dan beban pegawai adalah sebagai berikut:

1. Selisih antara Belanja Gaji dan Tunjangan LRA dan Beban Gaji dan Tunjangan LO sebesar minus Rp600.000,00 merupakan pembayaran utang tahun sebelumnya.
2. Selisih antara Belanja Tambahan Penghasilan ASN LRA dan Beban Tambahan Penghasilan ASN LO sebesar minus Rp32.156.332,00 merupakan pembayaran utang tahun sebelumnya sebesar Rp15.000.000,00 ditambah piutang kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp17.156.332,00.
3. Selisih antara Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN LRA dan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN LO sebesar minus Rp36.666.221,00 merupakan pengakuan utang Tahun 2023 sebesar Rp751.700.119,00 setelah dikurangi pembayaran utang tahun sebelumnya sebesar Rp788.366.340,00.
4. Tidak ada selisih antara Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD - LRA dengan Beban Gaji dan Tunjangan DPRD - LO
5. Selisih antara Belanja Gaji dan Tunjangan LRA dan Beban Gaji dan Tunjangan LO sebesar minus Rp19.950.000,00 merupakan pembayaran utang tahun sebelumnya.
6. Tidak ada selisih antara Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH - LRA dengan Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH – LO.
7. Tidak ada selisih antara Belanja Pegawai BLUD - LRA dengan Beban Pegawai BLUD – LO.

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.2.2	**Beban Persediaan**	**161.653.846.833,00**	**152.134.045.935,17**	**(9.519.800.897,83)**

Belanja Barang – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 161.653.846.833,00 sedangkan Beban Persediaan – LO adalah sebesar Rp152.134.045.935,17. Selisih antara Belanja Barang – LRA dengan Beban Persediaan - LO adalah sebesar minus Rp9.519.800.897,83 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-552 Selisih Rincian Beban Persediaan

No	Uraian	Realisasi LRA	Realisasi LO	Selisih
1	Beban Barang Pakai Habis	161.645.553.333,00	151.821.530.735,17	(9.824.022.597,83)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	8.293.500,00	312.515.200,00	304.221.700,00
	Jumlah	**161.653.846.833,00**	**152.134.045.935,17**	**(9.519.800.897,83)**

Selisih antara Belanja Barang LRA dan Beban Persediaan LO sebesar minus Rp9.519.800.897,83 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :

a.	Saldo awal persediaan Tahun 2023	38.455.122.907,88
b.	Penerimaan hibah barang persediaan	16.999.109.789,29

c. Pengakuan utang Tahun 2023	3.132.656.710,84
d. Koreksi saldo awal persediaan	24.894.900,00
e. Reklas tambah dari belanja non persediaan	1.509.858.665,00
f. Belanja Persediaan Dana BOS	15.210.710.183,00
g. Belanja Persediaan Dana BLUD	46.529.496.708,63
h. Reklas tambah dari Belanja Barang Tak Habis Pakai	303.717.700,00
Jumlah penambahan	122.165.567.564,64
Pengurangan:	
a. Saldo akhir persediaan Tahun 2023	46.407.726.928,11
b. Pemberian Hibah barang persediaan (Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat/lainnya - Reklas ke Beban Hibah)	84.120.155.695,43
c. Persediaan expired/kedaluarsa	213.903.401,80
d. Reklas kurang karena bukan Belanja untuk persediaan	313.341.445,00
e. Pembayaran utang tahun sebelumnya	926.840.774,56
f. Piutang kelebihan pembayaran persediaan	37.788.409,57
g. Reklas kurang ke Belanja Barang Tak Habis Pakai	303.717.700,00
h. Koreksi saldo awal persediaan	17.530.700,00
Jumlah pengurangan	131.685.368.462,47
Selisih antara penambahan dan pengurangan	(9.519.800.897,83)

Penjelasan selisih masing-masing rincian belanja dan beban persediaan adalah sebagai berikut:

1. Selisih antara Belanja Barang Pakai Habis LRA dan Beban Barang Pakai Habis LO sebesar minus Rp9.824.022.597,83 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :	
a. Saldo awal persediaan Tahun 2023	38.454.618.907,88
b. Penerimaan hibah barang persediaan	16.999.109.789,29
c. Pengakuan utang Tahun 2023	3.132.656.710,84
d. Koreksi saldo awal persediaan	24.894.900,00
e. Reklas tambah dari belanja non persediaan	1.509.858.665,00
f. Belanja Persediaan Dana BOS	15.210.710.183,00
g. Belanja Persediaan Dana BLUD	46.529.496.708,63
Jumlah penambahan	121.861.345.864,64
Pengurangan:	
a. Saldo akhir persediaan Tahun 2023	46.407.726.928,11
b. Pemberian Hibah barang persediaan (Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat/lainnya - Reklas ke Beban Hibah)	84.120.155.695,43
c. Persediaan expired/kedaluarsa	213.903.401,80
d. Reklas kurang karena bukan Belanja untuk persediaan	323.341.445,00
e. Pembayaran utang tahun sebelumnya	926.840.774,56
f. Piutang kelebihan pembayaran persediaan	37.788.409,57
g. Reklas kurang ke Belanja Barang Tak Habis Pakai	303.717.700,00

h. Koreksi saldo awal persediaan	17.530.700,00
Jumlah pengurangan	131.685.368.462,47
Selisih antara penambahan dan pengurangan	(9.824.022.597,83)

2. Selisih antara Belanja Barang Tak Habis Pakai – LRA dengan Beban Barang Tak Habis Pakai – LO sebesar Rp304.221.700,00 merupakan saldo awal persediaan Tahun 2023 sebesar Rp504.000,00 ditambah dengan reklas tambah dari belanja barang tak habis pakai sebesar Rp303.717.700,00.

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.2.3	**Beban Jasa**	**219.581.860.860,00**	**300.255.620.740,00**	**80.673.759.880,00**

Belanja Jasa – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp219.581.860.860,00 sedangkan Beban Jasa – LO adalah sebesar Rp300.255.620.740,00. Selisih antara Belanja Jasa – LRA dengan Beban Jasa - LO adalah sebesar Rp80.673.759.880,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-553 Selisih Rincian Beban Jasa

No	Uraian	Realisasi LRA	Realisasi LO	Selisih
1	Beban Jasa Kantor	128.027.483.062,00	205.212.250.509,00	77.184.767.447,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	49.666.806.330,00	50.019.595.151,00	352.788.821,00
3	Beban Sewa Tanah	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.066.031.680,00	4.082.279.180,00	1.016.247.500,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	332.090.000,00	383.220.000,00	51.130.000,00
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	21.396.622,00	21.396.622,00	0,00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.703.126.080,00	2.800.046.080,00	96.920.000,00
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	953.068.264,00	953.068.264,00	0,00
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.345.892.322,00	5.316.415.434,00	1.970.523.112,00
12	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.536.600.000,00	30.538.100.000,00	1.500.000,00
13	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	797.966.500,00	797.849.500,00	(117.000,00)
	Jumlah	**219.581.860.860,00**	**300.255.620.740,00**	**80.673.759.880,00**

Selisih antara Belanja Jasa LRA dan Beban Jasa LO sebesar minus Rp80.673.759.880,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :

a. Pengakuan utang Tahun 2023	6.225.787.318,00
b. Reklas tambah dari Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.273.325,00
c. Pemotongan pembayaran transfer bank atas pembayaran klaim BPJS RSUD	768.300,00
d. Pemotongan pembayaran transfer bank atas pembayaran Pihak Ketiga RSUD	34.800,00
e. Pemotongan pembayaran transfer bank atas pembayaran klaim BPJS Dinas Kesehatan	872.900,00
f. Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	54.000.000,00
g. Reklas tambah dari Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2023	96.920.000,00
h. Belanja Barang Modal - Peralatan dan Mesin Tahun 2023	1.500.000,00

i. Belanja Jasa Dana BOS	24.246.331.946,00
j. Belanja Jasa Dana BLUD	59.468.132.458,00
Jumlah penambahan	90.158.621.047,00
Pengurangan:	
a. Pembayaran utang tahun sebelumnya	8.917.565.536,00
b. Pembayaran utang Silpa Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2022	286.000.000,00
c. Saldo Akhir Beban Dibayar Dimuka	4.120.000,00
d. Reklas kurang ke Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	277.175.631,00
Jumlah pengurangan	9.484.861.167,00
Selisih antara penambahan dan pengurangan	80.673.759.880,00

Penjelasan selisih masing-masing rincian belanja dan beban jasa adalah sebagai berikut:

1. Selisih antara Belanja Jasa Kantor LRA dan Beban Jasa Kantor LO sebesar Rp77.184.767.447,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :	
a. Pengakuan utang Tahun 2023	6.190.226.298,00
b. Reklas tambah dari Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.273.325,00
c. Pemotongan pembayaran transfer bank atas pembayaran klaim BPJS RSUD	768.300,00
d. Pemotongan pembayaran transfer bank atas pembayaran Pihak Ketiga RSUD	34.800,00
e. Pemotongan pembayaran transfer bank atas pembayaran klaim BPJS Dinas Kesehatan	872.900,00
f. Belanja Jasa Kantor Dana BOS	23.204.984.446,00
g. Belanja Jasa Kantor Dana BLUD	57.176.340.545,00
Jumlah penambahan	86.637.500.614,00
Pengurangan:	
a. Pembayaran utang tahun sebelumnya	8.889.557.536,00
b. Pembayaran utang Silpa Bantuan Keuangan Provinsi 2022	286.000.000,00
c. Reklas kurang ke Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	277.175.631,00
Jumlah pengurangan	9.452.733.167,00
Selisih antara penambahan dan pengurangan	77.184.767.447,00

2. Selisih antara Belanja Iuran Jaminan/Asuransi LRA dan Beban Iuran Jaminan/Asuransi LO sebesar Rp352.788.821,00 merupakan pengakuan utang Tahun 2023 sebesar Rp7.670.020,00 ditambah dengan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Dana BLUD Tahun 2023 sebesar Rp345.118.801,00.
3. Tidak ada selisih antara Belanja Sewa Tanah - LRA dengan Beban Sewa Tanah – LO.
4. Selisih antara Belanja Sewa Peralatan dan Mesin LRA dan Beban Sewa Peralatan dan Mesin LO sebesar Rp1.016.247.500,00 merupakan Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Dana BOS Tahun 2023 .
5. Selisih antara Belanja Sewa Gedung dan Bangunan LRA dan Beban Sewa Gedung dan Bangunan LO sebesar Rp51.130.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :	
a. Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	54.000.000,00
b. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Dana BOS Tahun 2023	1.250.000,00
Jumlah penambahan	55.250.000,00

Pengurangan:

a. Saldo Akhir Beban Dibayar Dimuka 4.120.000,00

Jumlah pengurangan 4.120.000,00

Selisih antara penambahan dan pengurangan 51.130.000,00

6. Tidak ada selisih antara Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi - LRA dengan Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi – LO.
7. Tidak ada selisih antara Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya - LRA dengan Beban Sewa Aset Tetap Lainnya - LO
8. Selisih antara Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi LRA dan Beban Jasa Konsultansi Konstruksi LO sebesar Rp96.920.000,00 merupakan reklas tambah dari Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2023.
9. Tidak ada selisih antara Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi - LRA dengan Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi - LO
10. Tidak ada selisih antara Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) - LRA dengan Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) - LO
11. Selisih antara Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan LRA dan Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan LO sebesar Rp1.970.523.112,00 merupakan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Dana BOS Tahun 2023 sebesar Rp23.850.000,00 ditambah Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Dana BLUD Tahun 2023 sebesar Rp1.946.673.112,00.
12. Selisih antara Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat LRA dan Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat LO sebesar Rp1.500.000,00 merupakan reklas tambah dari Belanja Barang Modal - Peralatan dan Mesin Tahun 2023.
13. Selisih antara Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat LRA dan Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat LO sebesar minus Rp117.000,00 merupakan pengakuan utang Tahun 2023 sebesar Rp27.891.000,00 setelah dikurangi pembayaran utang tahun sebelumnya sebesar Rp28.008.000,00.

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.2.4	**Beban Pemeliharaan**	**5.531.991.760,00**	**15.620.057.272,00**	**10.088.065.512,00**

Belanja Pemeliharaan – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.531.991.760,00 sedangkan Beban Pemeliharaan – LO adalah sebesar Rp15.620.057.272,00. Selisih antara Belanja Pemeliharaan – LRA dengan Beban Pemeliharaan - LO adalah sebesar Rp10.088.065.512,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-554 Selisih Rincian Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Realisasi LRA	Realisasi LO	Selisih
1	Beban Pemeliharaan Tanah	46.541.190,00	46.541.190,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.398.405.225,00	5.366.420.686,00	3.968.015.461,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.298.186.785,00	9.127.828.086,00	5.829.641.301,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan	649.590.900,00	938.619.650,00	289.028.750,00

No	Uraian	LRA	Realisasi LO	Selisih
	Irigasi			
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	139.267.660,00	139.267.660,00	0,00
	Jumlah	**5.531.991.760,00**	**15.620.057.272,00**	**10.088.065.512,00**

Selisih antara Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan LO sebesar Rp10.088.065.512,00 merupakan Belanja Pemeliharaan BOS Tahun 2023 sebesar Rp5.544.610.514,00 ditambah Belanja Pemeliharaan Dana BLUD Tahun 2023 sebesar Rp4.543.454.998.

Penjelasan selisih masing-masing rincian belanja dan beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada selisih antara Belanja Pemeliharaan Tanah - LRA dengan Beban Pemeliharaan Tanah – LO.
2. Selisih antara Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LRA dan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LO sebesar Rp3.968.015.461,00 merupakan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Dana BOS Tahun 2023 sebesar Rp738.305.063,00 ditambah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Dana BLUD Tahun 2023 sebesar Rp3.229.710.398,00.
3. Selisih antara Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan LRA dan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan LO sebesar Rp5.829.641.301,00 merupakan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Dana BOS Tahun 2023 sebesar Rp4.615.308.301,00 ditambah Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan BLUD Tahun 2023 sebesar Rp1.214.333.000,00.
4. Selisih antara Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi LRA dan Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi LO sebesar Rp289.028.750,00 merupakan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dana BOS Tahun 2023 sebesar Rp189.617.150,00 ditambah Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Tahun 2023 sebesar Rp99.411.600,00.
5. Selisih antara Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya LRA dan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya LO sebesar Rp1.380.000,00 merupakan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Dana BOS Tahun 2023.
6. Tidak ada selisih antara Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud - LRA dengan Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud – LO.

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.2.5	**Beban Perjalanan Dinas**	**39.543.023.979,00**	**40.311.519.379,00**	**768.495.400,00**

Belanja Perjalanan Dinas – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp39.543.023.979,00 sedangkan Beban Perjalanan Dinas – LO adalah sebesar Rp40.311.519.379,00. Selisih antara Belanja Perjalanan Dinas – LRA dengan Beban Perjalanan Dinas – LO adalah sebesar Rp768.495.400,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-555 Selisih Rincian Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	LRA	Realisasi LO	Selisih
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.207.136.474,00	39.975.631.874,00	768.495.400,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	335.887.505,00	335.887.505,00	0,00
	Jumlah	**39.543.023.979,00**	**40.311.519.379,00**	**768.495.400,00**

Selisih antara Belanja Perjalanan Dinas LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO sebesar Rp768.495.400,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :	
a. Pengakuan utang Tahun 2023	765.350,00
b. Reklas tambah dari Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2023	5.700.000,00
c. Belanja Jasa Kantor Dana BOS	357.485.750,00
d. Belanja Jasa Kantor Dana BLUD	502.534.300,00
Jumlah penambahan	866.485.400,00
Pengurangan:	
a. Pembayaran utang tahun sebelumnya	97.990.000,00
Jumlah pengurangan	97.990.000,00
Selisih antara penambahan dan pengurangan	768.495.400,00

Penjelasan selisih masing-masing rincian belanja dan beban perjalanan dinas adalah sebagai berikut:

1. Selisih antara Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah LRA dan Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah LO sebesar Rp768.495.400,00,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :	
a. Pengakuan utang Tahun 2023	765.350,00
b. Reklas tambah dari Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2023	5.700.000,00
c. Belanja Jasa Kantor Dana BOS	357.485.750,00
d. Belanja Jasa Kantor Dana BLUD	502.534.300,00
Jumlah penambahan	866.485.400,00
Pengurangan:	
a. Pembayaran utang tahun sebelumnya	97.990.000,00
Jumlah pengurangan	97.990.000,00
Selisih antara penambahan dan pengurangan	768.495.400,00

2. Tidak ada selisih antara Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri - LRA dengan Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri – LO.

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.2.6	**Beban Subsidi**	**1.781.923.800,00**	**1.781.923.800,00**	**0,00**

Belanja Subsidi – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.781.923.800,00 sedangkan Beban Subsidi – LO adalah sebesar Rp1.781.923.800,00. Selisih antara Belanja Subsidi – LRA dengan Beban Subsidi – LO adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-556 Selisih Rincian Beban Subsidi

No	Uraian	Realisasi LRA	Realisasi LO	Selisih
1	Beban Subsidi kepada BUMD	1.781.923.800,00	1.781.923.800,00	0,00
	Jumlah	**1.781.923.800,00**	**1.781.923.800,00**	**0,00**

Tidak ada selisih antara Belanja Subsidi LRA dengan Beban Subsidi LO.

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.2.7	**Beban Hibah**	**124.626.774.987,00**	**171.489.228.753,43**	**46.862.453.766,43**

Belanja Hibah – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp124.626.774.987,00 sedangkan Beban Hibah – LO adalah sebesar Rp171.489.228.753,43. Selisih antara Belanja Hibah – LRA dengan Beban Hibah – LO adalah sebesar Rp46.862.453.766,43 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-557 Selisih Rincian Beban Hibah

No	Uraian	Realisasi LRA	Realisasi LO	Selisih
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.206.402.291,00	2.215.706.111,00	9.303.820,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	111.669.935.217,00	83.377.914.947,00	(28.292.020.270,00)
3	Beban Hibah Dana BOS	8.974.985.479,00	0,00	(8.974.985.479,00)
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.775.452.000,00	1.775.452.000,00	0,00
5	Beban Hibah Barang Untuk Dijual/Diserahkan	0,00	84.120.155.695,43	84.120.155.695,43
	Jumlah	**124.626.774.987,00**	**171.489.228.753,43**	**46.862.453.766,43**

Selisih antara Belanja Hibah LRA dan Beban Hibah LO sebesar Rp46.862.453.766,43 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :	
a. Nilai Buku dari Pemberian Hibah Barang berupa Tanah	9.303.820,00
b. Reklas tambah dari Belanja Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat/Lainnya yang telah disalurkan kepada Masyarakat/Lainnya.	84.120.155.695,43
Jumlah penambahan	84.129.459.515,43
Pengurangan:	
a. Beban Hibah Dana BOP PAUD yang tidak diakui sebagai Beban-LO karena bukan merupakan bagian dari entitas pelaporan	21.327.939.000,00
b. Beban Hibah Dana BOP Kesetaraan yang tidak diakui sebagai Beban-LO karena bukan merupakan bagian dari entitas pelaporan	5.899.299.500,00
c. Beban Hibah Dana BOS Swasta yang tidak diakui sebagai Beban-LO karena bukan merupakan bagian dari entitas pelaporan	8.974.985.479,00
d. Reklas kurang ke Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2023	812.532.770,00
e. Pembayaran utang tahun sebelumnya	252.249.000,00
Jumlah pengurangan	37.267.005.749,00
Selisih antara penambahan dan pengurangan	46.862.453.766,43

Penjelasan selisih masing-masing rincian belanja dan beban hibah adalah sebagai berikut:

1. Selisih antara Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat - LRA dan Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp9.303.820,00 merupakan Nilai Buku dari Pemberian Hibah Barang berupa Tanah.
2. Selisih antara Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LRA dan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LO sebesar minus Rp28.292.020.270,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :	0,00
Pengurangan:	
a. Beban Hibah Dana BOP PAUD yang tidak diakui sebagai Beban-LO karena bukan merupakan bagian dari entitas pelaporan	21.327.939.000,00
b. Beban Hibah Dana BOP Kesetaraan yang tidak diakui sebagai Beban-LO karena bukan merupakan bagian dari entitas pelaporan	5.899.299.500,00
c. Reklas kurang ke Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2023	812.532.770,00
d. Pembayaran utang tahun sebelumnya	252.249.000,00
Jumlah pengurangan	28.292.020.270,00
Selisih antara penambahan dan pengurangan	(28.292.020.270,00)

3. Selisih antara Belanja Hibah Dana BOS - LRA dan Beban Hibah Dana BOS - LO sebesar minus Rp8.974.985.479,00 merupakan Beban Hibah Dana BOS Swasta yang tidak diakui sebagai Beban-LO karena bukan merupakan bagian dari entitas pelaporan.
4. Tidak ada selisih antara Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik – LRA dengan Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik – LO.
5. Selisih antara Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan - LRA dan Beban Barang Untuk Dijual/Diserahkan - LO sebesar Rp84.120.155.695,43 merupakan Reklas tambah dari Belanja Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat/Lainnya yang telah disalurkan kepada Masyarakat/Lainnya.

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.2.8	**Beban Bantuan Sosial**	**3.032.260.000,00**	**3.032.260.000,00**	**0,00**

Belanja Bantuan Sosial – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.032.260.000,00 sedangkan Beban Bantuan Sosial – LO adalah sebesar Rp3.032.260.000,00. Selisih antara Belanja Bantuan Sosial – LRA dengan Beban Bantuan Sosial – LO adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-558 Selisih Rincian Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Realisasi LRA	Realisasi LO	Selisih
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.202.500.000,00	1.202.500.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	207.500.000,00	207.500.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.622.260.000,00	1.622.260.000,00	0,00
	Jumlah	**3.032.260.000,00**	**3.032.260.000,00**	**0,00**

Tidak ada selisih antara Belanja Bantuan Sosial LRA dengan Beban Bantuan Sosial LO.

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.2.9	**Beban Penyusutan Dan Amortisasi**	**0,00**	**253.691.932.946,66**	**253.691.932.946,66**

Beban penyusutan dan amortisasi hanya diakui dalam Laporan Operasional yaitu sebesar Rp253.691.932.946,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-559 Selisih Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Realisasi		
		LRA	LO	Selisih
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	92.053.335.790,00	92.053.335.790,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	24.384.801.325,80	24.384.801.325,80
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	136.147.717.154,00	136.147.717.154,00
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	1.106.078.676,86	1.106.078.676,86
	Jumlah	**0,00**	**253.691.932.946,66**	**253.691.932.946,66**

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.2.10	**Beban Penyisihan Piutang**	**0,00**	**7.249.593.961,64**	**7.249.593.961,64**

Beban penyisihan piutang hanya diakui dalam Laporan Operasional yaitu sebesar Rp7.249.593.961,64 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-560 Selisih Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Realisasi		
		LRA	LO	Selisih
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0,00	5.131.282.246,30	5.131.282.246,30
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	277.754.416,64	277.754.416,64
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	1.840.557.298,70	1.840.557.298,70
	Jumlah	**0,00**	**7.249.593.961,64**	**7.249.593.961,64**

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.2.11	**Beban Transfer**	**329.305.592.234,00**	**104.908.188.234,00**	**(224.397.404.000,00)**

Belanja Transfer – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp329.305.592.234,00 sedangkan Beban Transfer – LO adalah sebesar Rp104.908.188.234,00. Selisih antara Belanja Transfer – LRA dengan Beban Transfer – LO adalah sebesar minus Rp224.397.404.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-561 Selisih Rincian Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Realisasi		
		LRA	LO	Selisih
1	Beban Bagi Hasil	7.179.828.134,00	7.179.828.134,00	0,00
2	Beban Bantuan Keuangan	322.125.764.100,00	97.728.360.100,00	(224.397.404.000,00)
	Jumlah	**329.305.592.234,00**	**104.908.188.234,00**	**(224.397.404.000,00)**

Selisih antara Belanja Transfer LRA dan Beban Transfer LO sebesar minus Rp224.397.404.000,00 merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - Dana Desa yang tidak diakui sebagai Beban - LO karena bukan merupakan bagian dari entitas pelaporan.

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.2.12	**Beban Lain-Lain**	**0,00**	**1.253.493.541,00**	**1.253.493.541,00**

Belanja Lain-Lain – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan Beban Lain-Lain – LO adalah sebesar Rp1.253.493.541,00. Selisih antara Belanja Lain-lain – LRA dengan Beban Lain-Lain – LO adalah sebesar Rp1.253.493.541,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-562 Selisih Rincian Beban Lain-Lain

No	Uraian	Realisasi LRA	Realisasi LO	Selisih
1	Beban Lain-lain	0,00	1.253.493.541,00	1.253.493.541,00
	Jumlah	**0,00**	**1.253.493.541,00**	**1.253.493.541,00**

Selisih antara Belanja lain-lain LRA dan Beban Lain-lain LO sebesar Rp1.253.493.541,00 merupakan penambahan barang extracomtable yang berasal dari:

a. Reklas tambah dari belanja modal - aset tetap sebesar Rp1.054.825.321,00;
b. Koreksi saldo awal persediaan sebesar Rp1.193.500,00; dan
c. Reklas tambah dari belanja barang - persediaan sebesar Rp197.474.720,00.

		LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
5.7.2.13	**Beban Luar Biasa**	**749.265.471,00**	**897.485.221,00**	**148.219.750,00**

Belanja Tidak Terduga – LRA pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp749.265.471,00 sedangkan Beban Luar Biasa – LO adalah sebesar Rp897.485.221,00. Selisih antara Belanja Tidak Terduga – LRA dengan Beban Luar Biasa – LO adalah sebesar Rp148.219.750,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-563 Selisih Rincian Beban Luar Biasa

No	Uraian	Realisasi LRA	Realisasi LO	Selisih
1	Beban Luar Biasa	749.265.471,00	897.485.221,00	148.219.750,00
	Jumlah	**749.265.471,00**	**897.485.221,00**	**148.219.750,00**

Selisih antara Belanja Tidak Terduga LRA dan Beban Luar Biasa LO sebesar Rp148.219.750,00 merupakan pengakuan utang Silpa Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp312.452.521 setelah dikurangi pembayaran utang Silpa Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp164.232.771,00.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kinerja BUMD PT. Bondowoso Gemilang

PT. Bondowoso Gemilang (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No. 1 Tahun 2017 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Legalitas PT. Bondowoso Gemilang (Perseroda) dengan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 5 September 2018, Tanda Daftar Perusahaan No: 35.11.1.46.00008, Surat Ijin Usaha Nomor 503.510/00151/430.9.13/2018, NPWP : 85.780.793.7-7-656.000, SK Menkumham : AHAU – 0052424.AHA.01.01.2018, dengan lokasi usaha di Jalan Letnan Amir Kusnan No. 2 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso dan Gudang di Jalan Raya Situbondo No. 889, Desa Besuk, Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso. PT Bondowoso Gemilang didirikan dengan maksud untuk mengelola potensi daerah, dan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
2. Memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya daerah yang tersedia;
3. Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
4. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
5. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan masyarakat dan dunia usaha berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
6. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sejak didirikan, PT Bondowoso Gemilang mengalami kerugian sehingga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap PAD yang pada akhirnya membebani keuangan daerah sebesar nilai kerugian yang berakibat pada berkurangnya nilai saldo penyertaan modal.

Penyertaan modal awal Pemerintah Kabupaten Bondowoso berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang dan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/625/430.4.2/2018 tentang Realisasi Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang (Perseroda) Tahun Anggaran 2018. Nilai penyertaan modal awal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada BUMD PT. Bondowoso Gemilang per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.961.849.000,00 berdasarkan nilai yang disetorkan oleh Pemkab Bondowoso pada PT Bondowoso Gemilang (Rekening Bank Jatim nomor 0311022253 atas nama PT Bondowoso Gemilang) yang dibayarkan melalui SP2D Nomor : 1.01638/SP2D/2018 tanggal 23 Oktober 2018.

Laporan Keuangan PT Bondowoso Gemilang belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah tentang Pernbentukan BUMD. Selain itu, Laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan (CaLK dan kebijakan akuntansi) PT Bondowoso Gemilang belum sepenuhnya disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan belum digunakan sebagai dasar pengukuran.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait Laporan Keuangan Laporan Keuangan PT Bondowoso Gemilang yang harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah tentang Pernbentukan BUMD dan disusun berdasarkan standar akuntansi

yang berlaku dengan mengirimkan surat peringatan Bupati Bondowoso Nomor: 539/538/430.5.1/2023 tanggal 31 Desember 2023, agar PT. Bondowoso Gemilang segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur paling lambat tanggal 2024. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga mengirimkan surat peringatan Bupati Bondowoso Nomor: 539/10/430.5.1/2024 tanggal 22 Januari 2024 kepada Direktur PT. Bondowoso Gemilang agar segera menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengurusan Tugas Akhir Masa Jabatan Direksi PT. Bondowoso Gemilang Tahun 2019-2023 paling lambat tanggal 22 Januari 2024.

Pada CaLK per 31 Desember 2023 unaudited Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyajikan nilai penyertaan modal sebesar Rp1.670.177.863,76. Nilai tersebut sama dengan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso kepada PT. Bondowoso Gemilang TA 2022 audited. Hal ini karena sampai dengan penyusunan laporan keuangan TA 2023, PT Bondowoso Gemilang belum menyampaikan laporan keuangan TA 2023 audited kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

6.2 Kinerja BUMD PDAM Bondowoso

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam pelayanan air minum. PDAM Kabupaten Bondowoso didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tanggal 5 Februari 1993, dan telah disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011. Dimana pembentukannya merupakan pengalihan status dari Badan Pengelola Air Minum (BPAM) sesuai Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/KPTS/1088 tanggal 11 Januari 1989 dan beroperasi secara komersial tanggal 1 April 1989. Pengalihan status BPAM menjadi PDAM berdasarkan Berita Acara Nomor : 6090/2769/1992 dan 690/3567/438.23/1992 tanggal 28 Desember 1992. PDAM Kabupaten Bondowoso berkedudukan di Jalan Mastrip Nomor 193A Kabupaten Bondowoso.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso, maksud dan tujuan dari pendirian PDAM Kabupaten Bondowoso adalah bergerak dalam bidang pelayanan air bersih yang sehat dan memenuhi syarat-syarat bagi masyarakat Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diketahui penilaian kinerja PDAM diantaranya adalah sebagai berikut:

Dasar penilaian kinerja	**Tahun 2022**	**Tahun 2021**	**Tahun 2020**	**Tahun 2019**
Indikator Kementerian PUPR	sehat	sehat	sehat	sehat
Indikator Kepmendagri No 47 Tahun 1999	baik	baik	baik	baik
Efektivitas penagihan	97,71%	97,54%	97,59%	97,71%
Cakupan Pelayanan	8,79%	8,34%	8,97%	13,90%
Full Cost Recovery	*Full Cost Recovery*	*Unfull Cost Recovery*	*Unfull Cost Recovery*	*Unfull Cost Recovery*
Tingkat Kehilangan Air	17,85%	17,56%	17,63%	17,34%

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat dan peningkatan pelayanan PDAM kepada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan penyertaan modal kepada PDAM baik dalam bentuk uang maupun barang. Disamping itu, bagian hak pemerintah daerah atas laba

PDAM (PAD) langsung diinvestasikan kembali kepada PDAM tanpa harus disetor ke kas daerah. Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso kepada PDAM per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp43.989.999.399,00. Penjelasan dan rincian penyertaan serta mutasi terdapat dalam tabel 5-327 Perhitungan Penyertaan Modal Pada PDAM.

Selain memberikan penyertaan modal, Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga telah memberikan subsidi kepada PDAM. Subsidi tersebut bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Subsidi diberikan kepada PDAM secara berkesinambungan sejak tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah mengalokasikan dana subsidi yang bersumber dari dana APBD Tahun 2023 kepada PDAM sebesar Rp1.781.923.800,00. Belanja Subsidi ini merupakan pemberian subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 yang direalisasikan dua tahap. Tahap pertama sesuai Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/296/430.4.2/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Pemberian Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 melalui SP2D tanggal 11 Juli 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00. Tahap kedua sesuai Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/735/430.4.2/2023 tanggal 3 November 2023 tentang Pemberian Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 melalui SP2D tanggal 15 Desember 2023 sebesar Rp781.923.800,00.
2. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah mengalokasikan dana subsidi yang bersumber dari dana APBD Tahun 2022 kepada PDAM sebesar Rp2.183.163.800,00 sesuai Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/323/430.4.2/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Pemberian Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022.
3. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah mengalokasikan dana subsidi yang bersumber dari dana APBD Tahun 2021 kepada PDAM sebesar Rp1.183.163.800,00 sesuai Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/201/430.4.2/2021 tentang Pemberian Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2021 yang disalurkan kepada PDAM Bondowoso melalui SP2D Nomor 00585/SP2D/2021 tanggal 10 Maret 2021.
4. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah mengalokasikan dana subsidi yang bersumber dari dana APBD Tahun 2020 sebesar Rp1.183.163.800,00 sesuai Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/347/430.4.2/2020 tanggal 10 Pebruari 2020 tentang Pemberian Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2020 yang disalurkan kepada PDAM Bondowoso melalui SP2D Nomor 1.00290/SP2D/2020 tanggal 17 Maret 2020.
5. Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah mengalokasikan dana subsidi yang bersumber dari dana APBD Tahun 2019 sebesar Rp2.676.817.400,00. Belanja Subsidi ini merupakan pemberian subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 yang direalisasikan dua tahap. Tahap pertama sesuai Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/206/430.4.2/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Pemberian Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019 yang disalurkan kepada PDAM Bondowoso melalui SP2D Nomor 1.00183/SP2D/2019 tanggal 26 Pebruari 2019 sebesar Rp1.183.163.800,00. Tahap kedua sesuai Keputusan Bupati Bondowoso Nomor :

188.45/547/430.4.2/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/206/430.4.2/2019 tentang Pemberian Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019 yang disalurkan kepada PDAM Bondowoso melalui SP2D Nomor 1.01714/SP2D/2019 tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp1.493.653.600,00.

6. Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah mengalokasikan dana subsidi yang bersumber dari dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp2.167.255.600,00. Belanja Subsidi ini merupakan pemberian subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 yang direalisasikan dua tahap. Tahap pertama sesuai Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/374/430.4.2/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 tentang Pemberian Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 yang disalurkan kepada PDAM Bondowoso melalui SP2D Nomor 1.00322/SP2D/2018 tanggal 27 Pebruari 2018. Tahap kedua sesuai Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/748/430.4.2/2018 tanggal 9 Nopember 2018 tentang Pemberian Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 yang disalurkan kepada PAM Bondowoso melalui SP2D Nomor 1.01855/SP2D/2018 tanggal 28 Nopember 2018.
7. Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah mengalokasikan dana subsidi yang bersumber dari dana APBD Tahun 2017 sebesar Rp1.183.163.800,00. Subsidi diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum. Kemudian Pemkab. Bondowoso menindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/542/430.4.2/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pemberian Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017. Belanja subsidi tersebut disalurkan kepada PDAM Bondowoso melalui SP2D Nomor 1.00408/SP2D/2017 tanggal 12 Mei 2017.

Laporan Keuangan PDAM Tahun 2002 s.d 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan mendapatkan opini Wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) di Indonesia.

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja.

Salah satu upaya nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip keterbukaan, profesional dan bertanggung jawab. Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diperkuat untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah Kabupaten telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan berbagai tahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta memperhatikan situasi, kondisi dan sumberdaya yang dimiliki.

Laporan Keuangan Tahun 2023 telah disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya, laporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tahun 2023 merupakan tahun kesembilan Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerapkan akuntansi berbasis akrual. Terdapat banyak sekali tantangan seiring dengan kompleksitas transaksi keuangan yang semakin beragam. Namun dengan berbekal komitmen dari seluruh tingkatan manajemen pemerintahan, sehingga laporan keuangan ini dapat diselesaikan secara paripurna dengan tetap memperhatikan kualitas penyajiannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi laporan keuangan. Kami menyadari bahwa penyajian laporan keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa secara umum pengelolaan keuangan Tahun

2023 telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan, serta pengungkapan yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh pengelolaan guna pengambilan keputusan.

Kami berharap dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 berbasis akrual, pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan ini, dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran kami harapkan demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bondowoso di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas upaya-upaya yang kita lakukan, dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan khususnya untuk Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang lebih baik.

Pj. BUPATI BONDOWOSO

BAMBANG SOEKWANTO

Lampiran 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi dan Organisasi

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		%
			ANGGARAN	REALISASI	
	4	Pendapatan	2.032.456.443.947,00	1.990.420.763.058,12	97,93
	5	Belanja	2.237.751.755.488,00	2.018.531.931.985,06	90,20
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	138.065.868.860,00	147.238.757.899,21	106,64
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	137.896.151.712,00	147.093.766.024,21	106,67
1.02		Dinas Kesehatan	14.000.000.000,00	13.909.221.512,68	99,35
1.02	4	PENDAPATAN DAERAH	14.000.000.000,00	13.909.221.512,68	99,35
1.02		Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi	123.896.151.712,00	133.184.544.511,53	107,50
1.02	4	PENDAPATAN DAERAH	123.896.151.712,00	133.184.544.511,53	107,50
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	169.717.148,00	144.991.875,00	85,43
1.03		Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi	169.717.148,00	144.991.875,00	85,43
1.03	4	PENDAPATAN DAERAH	169.717.148,00	144.991.875,00	85,43
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.980.528.750,00	7.062.395.292,00	101,17
2.11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	127.688.400,00	156.354.586,00	122,45
2.11		Dinas Lingkungan Hidup	127.688.400,00	156.354.586,00	122,45
2.11	4	PENDAPATAN DAERAH	127.688.400,00	156.354.586,00	122,45
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4.451.713.000,00	4.055.564.500,00	91,10
2.15		Dinas Perhubungan	4.451.713.000,00	4.055.564.500,00	91,10
2.15	4	PENDAPATAN DAERAH	4.451.713.000,00	4.055.564.500,00	91,10
2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	191.400.000,00	145.472.116,00	76,00
2.16		Dinas Komunikasi dan Informatika	191.400.000,00	145.472.116,00	76,00
2.16	4	PENDAPATAN DAERAH	191.400.000,00	145.472.116,00	76,00
2.17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.834.727.350,00	1.684.099.090,00	91,79
2.17		Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.834.727.350,00	1.684.099.090,00	91,79
2.17	4	PENDAPATAN DAERAH	1.834.727.350,00	1.684.099.090,00	91,79
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	375.000.000,00	1.020.905.000,00	272,24
2.18		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	375.000.000,00	1.020.905.000,00	272,24
2.18	4	PENDAPATAN DAERAH	375.000.000,00	1.020.905.000,00	272,24
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.039.720.113,00	740.087.372,00	71,18
3.26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	639.552.000,00	368.842.100,00	57,67
3.26		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	639.552.000,00	368.842.100,00	57,67
3.26	4	PENDAPATAN DAERAH	639.552.000,00	368.842.100,00	57,67
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	400.168.113,00	371.245.272,00	92,77
3.27		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	219.139.948,00	212.345.272,00	96,90
3.27	4	PENDAPATAN DAERAH	219.139.948,00	212.345.272,00	96,90
3.27		Dinas Peternakan dan Perikanan	181.028.165,00	158.900.000,00	87,78
3.27	4	PENDAPATAN DAERAH	181.028.165,00	158.900.000,00	87,78
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.886.370.326.224,00	1.834.683.153.452,07	97,26
5.02		KEUANGAN	1.886.370.326.224,00	1.834.683.153.452,07	97,26
5.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.837.235.769.788,00	1.791.298.872.061,07	97,50
5.02	4	PENDAPATAN DAERAH	1.837.235.769.788,00	1.791.298.872.061,07	97,50
5.02		Badan Pendapatan Daerah	49.134.556.436,00	43.384.281.391,00	88,30
5.02	4	PENDAPATAN DAERAH	49.134.556.436,00	43.384.281.391,00	88,30
			0,00	696.369.042,84	0,00
			0,00	696.369.042,84	0,00
		Dinas Kesehatan	0,00	42.000,00	0,00
	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	42.000,00	0,00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	696.327.042,84	0,00
	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	696.327.042,84	0,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.349.854.773.280,00	1.205.337.280.176,06	89,29
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	662.024.624.983,00	585.899.861.762,78	88,50
1.01		Dinas Pendidikan	662.024.624.983,00	585.899.861.762,78	88,50
1.01	5	BELANJA DAERAH	662.024.624.983,00	585.899.861.762,78	88,50
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	451.689.563.778,00	410.971.504.119,55	90,99
1.02		Dinas Kesehatan	185.996.524.341,00	162.761.676.912,00	87,51
1.02	5	BELANJA DAERAH	185.996.524.341,00	162.761.676.912,00	87,51
1.02		FKTP Nangkaan	2.372.610.076,00	2.013.017.707,00	84,84

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		%
			ANGGARAN	REALISASI	
1.02	5	BELANJA DAERAH	2.372.610.076,00	2.013.017.707,00	84,84
1.02		FKTP Kotakulon	1.462.489.592,00	1.174.722.532,00	80,32
1.02	5	BELANJA DAERAH	1.462.489.592,00	1.174.722.532,00	80,32
1.02		FKTP Kademangan	1.420.160.288,00	1.149.500.191,20	80,94
1.02	5	BELANJA DAERAH	1.420.160.288,00	1.149.500.191,20	80,94
1.02		FKTP Tenggarang	3.208.620.630,00	2.471.146.793,20	77,02
1.02	5	BELANJA DAERAH	3.208.620.630,00	2.471.146.793,20	77,02
1.02		FKTP Tegalampel	2.037.421.796,00	1.763.676.069,00	86,56
1.02	5	BELANJA DAERAH	2.037.421.796,00	1.763.676.069,00	86,56
1.02		FKTP Tamankrocok	1.439.919.685,00	1.131.653.909,00	78,59
1.02	5	BELANJA DAERAH	1.439.919.685,00	1.131.653.909,00	78,59
1.02		FKTP Wringin	3.289.945.355,00	2.693.941.795,00	81,88
1.02	5	BELANJA DAERAH	3.289.945.355,00	2.693.941.795,00	81,88
1.02		FKTP Pakem	2.045.121.737,00	1.697.116.711,00	82,98
1.02	5	BELANJA DAERAH	2.045.121.737,00	1.697.116.711,00	82,98
1.02		FKTP Curahdami	2.661.302.135,00	2.217.054.112,00	83,31
1.02	5	BELANJA DAERAH	2.661.302.135,00	2.217.054.112,00	83,31
1.02		FKTP Binakal	1.661.735.589,00	1.377.028.533,00	82,87
1.02	5	BELANJA DAERAH	1.661.735.589,00	1.377.028.533,00	82,87
1.02		FKTP Grujugan	3.526.791.501,00	2.888.212.552,00	81,89
1.02	5	BELANJA DAERAH	3.526.791.501,00	2.888.212.552,00	81,89
1.02		FKTP Maesan	3.729.817.730,00	3.141.107.085,00	84,22
1.02	5	BELANJA DAERAH	3.729.817.730,00	3.141.107.085,00	84,22
1.02		FKTP Tamanan	3.566.747.554,00	3.018.780.925,00	84,64
1.02	5	BELANJA DAERAH	3.566.747.554,00	3.018.780.925,00	84,64
1.02		FKTP Jambesari	2.950.310.153,00	2.440.406.024,00	82,72
1.02	5	BELANJA DAERAH	2.950.310.153,00	2.440.406.024,00	82,72
1.02		FKTP Pujer	3.287.898.114,00	2.846.951.703,00	86,59
1.02	5	BELANJA DAERAH	3.287.898.114,00	2.846.951.703,00	86,59
1.02		FKTP Tlogosari	4.035.700.348,00	3.172.893.604,00	78,62
1.02	5	BELANJA DAERAH	4.035.700.348,00	3.172.893.604,00	78,62
1.02		FKTP Wonosari	3.155.424.406,00	2.681.887.915,00	84,99
1.02	5	BELANJA DAERAH	3.155.424.406,00	2.681.887.915,00	84,99
1.02		FKTP Tapen	2.716.631.885,00	2.221.469.188,00	81,77
1.02	5	BELANJA DAERAH	2.716.631.885,00	2.221.469.188,00	81,77
1.02		FKTP Sukosari	1.580.692.578,00	1.350.126.969,00	85,41
1.02	5	BELANJA DAERAH	1.580.692.578,00	1.350.126.969,00	85,41
1.02		FKTP Sumber Wringin	2.843.002.762,00	2.405.121.139,00	84,60
1.02	5	BELANJA DAERAH	2.843.002.762,00	2.405.121.139,00	84,60
1.02		FKTP Prajekan	2.023.014.260,00	1.572.221.198,00	77,72
1.02	5	BELANJA DAERAH	2.023.014.260,00	1.572.221.198,00	77,72
1.02		FKTP Sempol	1.774.948.940,00	1.483.012.479,00	83,55
1.02	5	BELANJA DAERAH	1.774.948.940,00	1.483.012.479,00	83,55
1.02		FKTP Klabang	1.650.077.236,00	1.292.669.653,00	78,34
1.02	5	BELANJA DAERAH	1.650.077.236,00	1.292.669.653,00	78,34
1.02		FKTP Botolinggo	2.385.458.459,00	1.786.776.962,00	74,90
1.02	5	BELANJA DAERAH	2.385.458.459,00	1.786.776.962,00	74,90
1.02		FKTP Cermee	4.080.821.528,00	3.243.602.718,00	79,48
1.02	5	BELANJA DAERAH	4.080.821.528,00	3.243.602.718,00	79,48
1.02		Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi	200.786.375.100,00	194.975.728.741,15	97,11
1.02	5	BELANJA DAERAH	200.786.375.100,00	194.975.728.741,15	97,11
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	160.440.378.705,00	139.310.443.550,73	86,83
1.03		Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi	111.437.093.005,00	97.052.853.990,73	87,09
1.03	5	BELANJA DAERAH	111.437.093.005,00	97.052.853.990,73	87,09
1.03		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	49.003.285.700,00	42.257.589.560,00	86,23
1.03	5	BELANJA DAERAH	49.003.285.700,00	42.257.589.560,00	86,23
1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.417.379.800,00	12.876.062.964,00	95,97
1.04		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	13.417.379.800,00	12.876.062.964,00	95,97
1.04	5	BELANJA DAERAH	13.417.379.800,00	12.876.062.964,00	95,97
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	34.596.388.914,00	33.738.017.106,00	97,52
1.05		Satuan Polisi Pamong Praja	17.903.247.614,00	17.199.062.124,00	96,07

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		%
			ANGGARAN	REALISASI	
1.05	5	BELANJA DAERAH	17.903.247.614,00	17.199.062.124,00	96,07
1.05		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.693.141.300,00	16.538.954.982,00	99,08
1.05	5	BELANJA DAERAH	16.693.141.300,00	16.538.954.982,00	99,08
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	27.686.437.100,00	22.541.390.673,00	81,42
1.06		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	27.686.437.100,00	22.541.390.673,00	81,42
1.06	5	BELANJA DAERAH	27.686.437.100,00	22.541.390.673,00	81,42
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	136.293.086.327,00	116.016.258.128,00	85,12
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.054.040.300,00	1.940.016.379,00	94,45
2.07		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	2.054.040.300,00	1.940.016.379,00	94,45
2.07	5	BELANJA DAERAH	2.054.040.300,00	1.940.016.379,00	94,45
2.08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.025.120.000,00	455.614.007,00	44,44
2.08		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	1.025.120.000,00	455.614.007,00	44,44
2.08	5	BELANJA DAERAH	1.025.120.000,00	455.614.007,00	44,44
2.09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	686.751.900,00	680.782.463,00	99,13
2.09		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	686.751.900,00	680.782.463,00	99,13
2.09	5	BELANJA DAERAH	686.751.900,00	680.782.463,00	99,13
2.10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	250.000.000,00	217.826.331,00	87,13
2.10		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	250.000.000,00	217.826.331,00	87,13
2.10	5	BELANJA DAERAH	250.000.000,00	217.826.331,00	87,13
2.11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	17.670.502.660,00	16.171.366.759,00	91,52
2.11		Dinas Lingkungan Hidup	17.670.502.660,00	16.171.366.759,00	91,52
2.11	5	BELANJA DAERAH	17.670.502.660,00	16.171.366.759,00	91,52
2.12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.338.462.907,00	4.380.023.733,00	82,05
2.12		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.338.462.907,00	4.380.023.733,00	82,05
2.12	5	BELANJA DAERAH	5.338.462.907,00	4.380.023.733,00	82,05
2.13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20.597.852.100,00	19.162.703.273,00	93,03
2.13		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.597.852.100,00	19.162.703.273,00	93,03
2.13	5	BELANJA DAERAH	20.597.852.100,00	19.162.703.273,00	93,03
2.14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.505.823.000,00	9.428.139.263,00	89,74
2.14		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	10.505.823.000,00	9.428.139.263,00	89,74
2.14	5	BELANJA DAERAH	10.505.823.000,00	9.428.139.263,00	89,74
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	26.264.401.300,00	25.691.504.549,00	97,82
2.15		Dinas Perhubungan	26.264.401.300,00	25.691.504.549,00	97,82
2.15	5	BELANJA DAERAH	26.264.401.300,00	25.691.504.549,00	97,82
2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.181.647.360,00	10.654.444.756,00	95,29
2.16		Dinas Komunikasi dan Informatika	11.181.647.360,00	10.654.444.756,00	95,29
2.16	5	BELANJA DAERAH	11.181.647.360,00	10.654.444.756,00	95,29
2.17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.236.963.300,00	11.552.581.283,00	94,41
2.17		Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	12.236.963.300,00	11.552.581.283,00	94,41
2.17	5	BELANJA DAERAH	12.236.963.300,00	11.552.581.283,00	94,41
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.138.989.300,00	3.979.455.990,00	96,15
2.18		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	4.138.989.300,00	3.979.455.990,00	96,15
2.18	5	BELANJA DAERAH	4.138.989.300,00	3.979.455.990,00	96,15
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11.717.437.000,00	4.076.290.722,00	34,79
2.19		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	11.717.437.000,00	4.076.290.722,00	34,79
2.19	5	BELANJA DAERAH	11.717.437.000,00	4.076.290.722,00	34,79
2.20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	100.000.000,00	96.841.300,00	96,84
2.20		Dinas Komunikasi dan Informatika	100.000.000,00	96.841.300,00	96,84
2.20	5	BELANJA DAERAH	100.000.000,00	96.841.300,00	96,84
2.21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	200.000.000,00	179.918.700,00	89,96
2.21		Dinas Komunikasi dan Informatika	200.000.000,00	179.918.700,00	89,96
2.21	5	BELANJA DAERAH	200.000.000,00	179.918.700,00	89,96
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.390.000.000,00	3.920.924.210,00	53,06

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		%
			ANGGARAN	REALISASI	
2.22		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	7.390.000.000,00	3.920.924.210,00	53,06
2.22	5	BELANJA DAERAH	7.390.000.000,00	3.920.924.210,00	53,06
2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.770.095.200,00	3.264.265.835,00	68,43
2.23		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.770.095.200,00	3.264.265.835,00	68,43
2.23	5	BELANJA DAERAH	4.770.095.200,00	3.264.265.835,00	68,43
2.24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	165.000.000,00	163.558.575,00	99,13
2.24		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	165.000.000,00	163.558.575,00	99,13
2.24	5	BELANJA DAERAH	165.000.000,00	163.558.575,00	99,13
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	65.296.702.074,00	62.612.518.782,00	95,89
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	411.295.000,00	406.729.400,00	98,89
3.25		Dinas Peternakan dan Perikanan	411.295.000,00	406.729.400,00	98,89
3.25	5	BELANJA DAERAH	411.295.000,00	406.729.400,00	98,89
3.26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8.503.657.100,00	8.122.727.958,00	95,52
3.26		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	8.503.657.100,00	8.122.727.958,00	95,52
3.26	5	BELANJA DAERAH	8.503.657.100,00	8.122.727.958,00	95,52
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	44.296.868.574,00	43.122.135.094,00	97,35
3.27		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29.016.005.688,00	28.336.872.123,00	97,66
3.27	5	BELANJA DAERAH	29.016.005.688,00	28.336.872.123,00	97,66
3.27		Dinas Peternakan dan Perikanan	15.280.862.886,00	14.785.262.971,00	96,76
3.27	5	BELANJA DAERAH	15.280.862.886,00	14.785.262.971,00	96,76
3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.150.000.000,00	1.095.999.900,00	95,30
3.30		Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.150.000.000,00	1.095.999.900,00	95,30
3.30	5	BELANJA DAERAH	1.150.000.000,00	1.095.999.900,00	95,30
3.31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	10.934.881.400,00	9.864.926.430,00	90,22
3.31		Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	10.934.881.400,00	9.864.926.430,00	90,22
3.31	5	BELANJA DAERAH	10.934.881.400,00	9.864.926.430,00	90,22
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	129.878.590.269,00	108.728.343.938,00	83,72
4.01		SEKRETARIAT DAERAH	78.810.408.882,00	68.759.554.131,00	87,25
4.01		Sekretariat Daerah	0,00	68.759.554.131,00	0,00
4.01	5	BELANJA DAERAH	0,00	68.759.554.131,00	0,00
4.01		Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	1.640.680.000,00	0,00	0,00
4.01	5	BELANJA DAERAH	1.640.680.000,00	0,00	0,00
4.01		Bagian Hukum	1.315.503.000,00	0,00	0,00
4.01	5	BELANJA DAERAH	1.315.503.000,00	0,00	0,00
4.01		Bagian Kesejahteraan Rakyat	38.046.807.800,00	0,00	0,00
4.01	5	BELANJA DAERAH	38.046.807.800,00	0,00	0,00
4.01		Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	3.194.609.800,00	0,00	0,00
4.01	5	BELANJA DAERAH	3.194.609.800,00	0,00	0,00
4.01		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.017.593.800,00	0,00	0,00
4.01	5	BELANJA DAERAH	1.017.593.800,00	0,00	0,00
4.01		Bagian Organisasi	810.000.000,00	0,00	0,00
4.01	5	BELANJA DAERAH	810.000.000,00	0,00	0,00
4.01		Bagian Umum	19.581.031.982,00	0,00	0,00
4.01	5	BELANJA DAERAH	19.581.031.982,00	0,00	0,00
4.01		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	475.000.000,00	0,00	0,00
4.01	5	BELANJA DAERAH	475.000.000,00	0,00	0,00
4.01		Bagian Perencanaan dan Keuangan	12.729.182.500,00	0,00	0,00
4.01	5	BELANJA DAERAH	12.729.182.500,00	0,00	0,00
4.02		SEKRETARIAT DPRD	51.068.181.387,00	39.968.789.807,00	78,27
4.02		Sekretariat DPRD	51.068.181.387,00	39.968.789.807,00	78,27
4.02	5	BELANJA DAERAH	51.068.181.387,00	39.968.789.807,00	78,27
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	464.675.105.802,00	436.199.462.465,00	93,87
5.01		PERENCANAAN	8.086.842.000,00	7.637.467.630,00	94,44
5.01		Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.086.842.000,00	7.637.467.630,00	94,44
5.01	5	BELANJA DAERAH	8.086.842.000,00	7.637.467.630,00	94,44
5.02		KEUANGAN	447.809.115.292,00	420.440.397.979,00	93,89
5.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	440.377.945.852,00	413.463.127.732,00	93,89
5.02	5	BELANJA DAERAH	440.377.945.852,00	413.463.127.732,00	93,89
5.02		Badan Pendapatan Daerah	7.431.169.440,00	6.977.270.247,00	93,89
5.02	5	BELANJA DAERAH	7.431.169.440,00	6.977.270.247,00	93,89
5.03		KEPEGAWAIAN	6.634.148.510,00	6.137.084.703,00	92,51
5.03		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.634.148.510,00	6.137.084.703,00	92,51
5.03	5	BELANJA DAERAH	6.634.148.510,00	6.137.084.703,00	92,51
5.04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.175.000.000,00	1.147.466.850,00	97,66
5.04		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.175.000.000,00	1.147.466.850,00	97,66

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		%
			ANGGARAN	REALISASI	
5.04	5	BELANJA DAERAH	1.175.000.000,00	1.147.466.850,00	97,66
5.05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	970.000.000,00	837.045.303,00	86,29
5.05		Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	970.000.000,00	837.045.303,00	86,29
5.05	5	BELANJA DAERAH	970.000.000,00	837.045.303,00	86,29
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	7.071.742.500,00	6.850.537.241,00	96,87
6.01		INSPEKTORAT DAERAH	7.071.742.500,00	6.850.537.241,00	96,87
6.01		Inspektorat	7.071.742.500,00	6.850.537.241,00	96,87
6.01	5	BELANJA DAERAH	7.071.742.500,00	6.850.537.241,00	96,87
7		UNSUR KEWILAYAHAN	49.930.686.086,00	48.524.710.051,00	97,18
7.01		KECAMATAN	49.930.686.086,00	48.524.710.051,00	97,18
7.01		Kecamatan Bondowoso	6.062.911.200,00	8.148.444.019,00	134,40
7.01	5	BELANJA DAERAH	6.062.911.200,00	8.148.444.019,00	134,40
7.01		Kelurahan Badean	315.475.000,00	0,00	0,00
7.01	5	BELANJA DAERAH	315.475.000,00	0,00	0,00
7.01		Kelurahan Nangkaan	291.300.600,00	0,00	0,00
7.01	5	BELANJA DAERAH	291.300.600,00	0,00	0,00
7.01		Kelurahan Kotakulon	342.400.000,00	0,00	0,00
7.01	5	BELANJA DAERAH	342.400.000,00	0,00	0,00
7.01		Kelurahan Tamansari	306.815.000,00	0,00	0,00
7.01	5	BELANJA DAERAH	306.815.000,00	0,00	0,00
7.01		Kelurahan Dabasah	342.398.000,00	0,00	0,00
7.01	5	BELANJA DAERAH	342.398.000,00	0,00	0,00
7.01		Kelurahan Kademangan	316.248.400,00	0,00	0,00
7.01	5	BELANJA DAERAH	316.248.400,00	0,00	0,00
7.01		Kelurahan Blindungan	324.335.000,00	0,00	0,00
7.01	5	BELANJA DAERAH	324.335.000,00	0,00	0,00
7.01		Kecamatan Tamanan	1.536.689.500,00	1.508.357.822,00	98,16
7.01	5	BELANJA DAERAH	1.536.689.500,00	1.508.357.822,00	98,16
7.01		Kecamatan Tenggarang	2.358.761.986,00	2.575.701.475,00	109,20
7.01	5	BELANJA DAERAH	2.358.761.986,00	2.575.701.475,00	109,20
7.01		Kelurahan Tenggarang	338.323.500,00	0,00	0,00
7.01	5	BELANJA DAERAH	338.323.500,00	0,00	0,00
7.01		Kecamatan Tegalampel	2.408.080.800,00	2.692.102.433,00	111,79
7.01	5	BELANJA DAERAH	2.408.080.800,00	2.692.102.433,00	111,79
7.01		Kelurahan Sekarputih	333.448.000,00	0,00	0,00
7.01	5	BELANJA DAERAH	333.448.000,00	0,00	0,00
7.01		Kecamatan Curahdami	2.385.324.500,00	2.599.803.027,00	108,99
7.01	5	BELANJA DAERAH	2.385.324.500,00	2.599.803.027,00	108,99
7.01		Kelurahan Curahdami	292.998.000,00	0,00	0,00
7.01	5	BELANJA DAERAH	292.998.000,00	0,00	0,00
7.01		Kecamatan Wringin	1.624.767.900,00	1.583.639.764,00	97,47
7.01	5	BELANJA DAERAH	1.624.767.900,00	1.583.639.764,00	97,47
7.01		Kecamatan Pakem	1.321.407.600,00	1.292.562.985,00	97,82
7.01	5	BELANJA DAERAH	1.321.407.600,00	1.292.562.985,00	97,82
7.01		Kecamatan Binakal	1.796.658.500,00	1.751.691.707,00	97,50
7.01	5	BELANJA DAERAH	1.796.658.500,00	1.751.691.707,00	97,50
7.01		Kecamatan Maesan	2.095.918.800,00	2.023.388.128,00	96,54
7.01	5	BELANJA DAERAH	2.095.918.800,00	2.023.388.128,00	96,54
7.01		Kecamatan Grujugan	2.171.177.600,00	2.133.402.039,00	98,26
7.01	5	BELANJA DAERAH	2.171.177.600,00	2.133.402.039,00	98,26
7.01		Kecamatan Pujer	2.330.367.500,00	2.275.273.512,00	97,64
7.01	5	BELANJA DAERAH	2.330.367.500,00	2.275.273.512,00	97,64
7.01		Kecamatan Wonosari	2.118.478.600,00	2.010.737.650,00	94,91
7.01	5	BELANJA DAERAH	2.118.478.600,00	2.010.737.650,00	94,91
7.01		Kecamatan Sukosari	1.787.799.900,00	1.749.481.219,00	97,86
7.01	5	BELANJA DAERAH	1.787.799.900,00	1.749.481.219,00	97,86
7.01		Kecamatan Tlogosari	1.870.166.000,00	1.794.411.505,00	95,95
7.01	5	BELANJA DAERAH	1.870.166.000,00	1.794.411.505,00	95,95
7.01		Kecamatan Tapen	1.836.527.700,00	1.799.437.653,00	97,98
7.01	5	BELANJA DAERAH	1.836.527.700,00	1.799.437.653,00	97,98
7.01		Kecamatan Sumber Wringin	1.609.411.400,00	1.545.492.592,00	96,03
7.01	5	BELANJA DAERAH	1.609.411.400,00	1.545.492.592,00	96,03
7.01		Kecamatan Prajekan	1.711.396.900,00	1.660.561.497,00	97,03
7.01	5	BELANJA DAERAH	1.711.396.900,00	1.660.561.497,00	97,03
7.01		Kecamatan Klabang	1.876.121.300,00	1.831.236.523,00	97,61

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		%
			ANGGARAN	REALISASI	
7.01	5	BELANJA DAERAH	1.876.121.300,00	1.831.236.523,00	97,61
7.01		Kecamatan Cermee	2.127.032.400,00	2.077.154.198,00	97,66
7.01	5	BELANJA DAERAH	2.127.032.400,00	2.077.154.198,00	97,66
7.01		Kecamatan Ijen	1.270.789.000,00	1.196.298.865,00	94,14
7.01	5	BELANJA DAERAH	1.270.789.000,00	1.196.298.865,00	94,14
7.01		Kecamatan Taman Krocok	1.504.564.700,00	1.448.807.435,00	96,29
7.01	5	BELANJA DAERAH	1.504.564.700,00	1.448.807.435,00	96,29
7.01		Kecamatan Jambesari Darussholah	1.285.945.300,00	1.243.754.662,00	96,72
7.01	5	BELANJA DAERAH	1.285.945.300,00	1.243.754.662,00	96,72
7.01		Kecamatan Botolinggo	1.636.645.500,00	1.582.969.341,00	96,72
7.01	5	BELANJA DAERAH	1.636.645.500,00	1.582.969.341,00	96,72
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	34.751.069.150,00	34.262.821.204,00	98,60
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	34.751.069.150,00	34.262.821.204,00	98,60
8.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.751.069.150,00	34.262.821.204,00	98,60
8.01	5	BELANJA DAERAH	34.751.069.150,00	34.262.821.204,00	98,60

Lampiran 2 :Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang

No	Jenis Piutang	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
I	**PIUTANG PAJAK**	**17.953.492.986,70**	**5.017.753.898,30**	**0,00**	**22.971.246.885,00**
1	Pajak Reklame	407.504.129,50	87.539.404,60	0,00	495.043.534,10
2	Pajak Penerangan Jalan	1.101.408.541,20	0,00	0,00	1.101.408.541,20
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.370.333,00	753.060,00	0,00	6.123.393,00
4	Pajak Hotel	0,00	1.277.331,00	0,00	1.277.331,00
5	Pajak Restoran	11.881.513,10	12.151.610,70	0,00	24.033.123,80
6	Pajak Air Tanah	340.554,40	187.587,00	0,00	528.141,40
7	Pajak Hiburan	2.774.662,00	3.876.336,00	0,00	6.650.998,00
8	Pajak Parkir	0,00	346.500,00	0,00	346.500,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	16.407.976.404,50	4.911.622.069,00	0,00	21.319.598.473,50
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	16.236.849,00	0,00	0,00	16.236.849,00
II	**PIUTANG RETRIBUSI**	**2.462.433.387,94**	**277.754.416,64**	**259.708.720,00**	**2.480.479.084,58**
A	**Piutang Retribusi Jasa Umum**	**1.533.347.014,34**	**242.014.767,94**	**253.420.320,00**	**1.521.941.462,28**
1	Sewa Kios Pasar	606.231.333,10	162.089.967,70	855.000,00	767.466.300,80
2	Sewa Los Pasar	112.132.217,10	19.043.689,80	12.257.550,00	118.918.356,90
3	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	249.060.064,14	60.881.110,44	0,00	309.941.174,58
4	Piutang Klaim Non Kapitasi BPJS	565.923.400,00	0,00	240.307.770,00	325.615.630,00
B	**Piutang Retribusi Jasa Usaha**	**261.364.029,60**	**35.739.648,70**	**6.288.400,00**	**290.815.278,30**
1	Retribusi Sewa Tanah Trotoar	1.688.400,00	0,00	0,00	1.688.400,00
2	Sewa Kios Terminal	5.282.200,00	0,00	0,00	5.282.200,00
3	Sewa Toko Pasar	220.693.429,60	21.039.648,70	6.288.400,00	235.444.678,30
4	Kemitraan	33.700.000,00	14.700.000,00	0,00	48.400.000,00
C	**Piutang Retribusi Perizinan Tertentu**	**667.722.344,00**	**0,00**	**0,00**	**667.722.344,00**
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	667.722.344,00	0,00	0,00	667.722.344,00
III	**PIUTANG LAIN-LAIN PAD**	**3.283.377.014,80**	**1.840.557.298,70**	**26.180.145,20**	**5.097.754.168,30**
1	Piutang Jasa Giro BUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Jasa Giro BUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Jasa Giro BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Jasa Giro BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Klaim BPJS	2.508.821.760,60	1.344.681.651,00	0,00	3.853.503.411,60
4	Klaim Pelayanan Kesehatan Kepada Pihak III Lainnya	525.237.661,70	224.958.073,10	26.180.145,20	724.015.589,60
	PT KAI	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00
	PT Jasa Raharja	308.898.265,60	4.832.294,70	0,00	313.730.560,30
	BPJS Tenaga Kerja	166.755.202,10	172.206.763,40	0,00	338.961.965,50
	Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia (PPBRI)	0,00	1.097.145,00	0,00	1.097.145,00
	Yayasan Kesehatan Pegawai TELKOM	7.133.126,70	0,00	1.214.487,90	5.918.638,80
	RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo	4.590.000,00	26.025.600,00	0,00	30.615.600,00
	RSU Bhayangkara Bondowoso	31.805.550,00	0,00	23.225.850,00	8.579.700,00
	Dinkes Situbondo	5.888.517,30	0,00	1.572.807,30	4.315.710,00
	Kemenkes	0,00	13.022.100,00	0,00	13.022.100,00
	Biakes Provinsi Jatim	0,00	7.774.170,00	0,00	7.774.170,00
5	Piutang Bantuan Keuangan Parpol	94.640.604,00	0,00	0,00	94.640.604,00
6	Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	120.686.948,50	228.531.690,30	0,00	349.218.638,80

No	Jenis Piutang	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
7	Piutang Denda Keterlambatan Proyek	33.990.040,00	0,00	0,00	33.990.040,00
8	Piutang Remunerasi pada Rekening TDF-TKD	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Piutang sewa ATM BNI	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Piutang sewa ATM BRI	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Lain-Lain	0,00	42.385.884,30	0,00	42.385.884,30
	Lain-Lain Dinas Perkim, CK & TR (Belanja Persediaan utk Dijual/Diserahkan kpd Masy.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-Lain Dinas Bina Marga (Lebih Bayar Jalan Kabupaten & Persediaan Yg Diserahkan)	0,00	42.385.884,30	0,00	42.385.884,30
	Lain-Lain BPKAD (Lebih Bayar Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**PIUTANG TRANSFER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi)	0,00	0,00	0,00	0,00
V	**Piutang Lain-Lain/Piutang Yang Timbul Dari Perjanjian/Perikatan**	**8.824.144.388,86**	**0,00**	**47.516.000,00**	**8.776.628.388,86**
	Kredit Sapi Kereman	881.576.257,00	0,00	0,00	881.576.257,00
	Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Feeder Point)	2.365.214.118,92	0,00	0,00	2.365.214.118,92
	Kredit Pembelian Gabah	1.317.731.736,94	0,00	0,00	1.317.731.736,94
	Kredit kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.241.513.026,00	0,00	47.516.000,00	4.193.997.026,00
	Kredit Penguatan Modal Usaha Perikanan	18.109.250,00	0,00	0,00	18.109.250,00
	Total	**32.523.447.778,30**	**7.136.065.613,64**	**333.404.865,20**	**39.326.108.526,74**

Lampiran 3 : Rincian Penerimaan Hibah Bahan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
1	Alkohol Swab	5.182.400,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0068/102.5/covid/I/2023	Dinas Kesehatan
2	Auto Destruct Syringe 0,3 ml	41.164.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0068/102.5/covid/I/2023	Dinas Kesehatan
3	Spuit 3 ml	1.593.200,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0068/102.5/covid/I/2023	Dinas Kesehatan
4	BTI Larvasida	776.292,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0683/102.5/dbd/II/2023	Dinas Kesehatan
5	RDT DBD Combo	90.732.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0683/102.5/dbd/II/2023	Dinas Kesehatan
6	RDT Leptospirosis	571.500,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0682/102.5/Zoonosis/II/2023	Dinas Kesehatan
7	Masker bedah 3 ply alokasi anak sekolah 2021	18.560.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0752/102.5/KIA/II/2023	Dinas Kesehatan
8	NaCl 0,9 %	2.732.240,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0778/102.5/covid/II/2023	Dinas Kesehatan
9	Spuit 3 ml	512.100,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0778/102.5/covid/II/2023	Dinas Kesehatan
10	Alkohol Swab 2 ply	790.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0778/102.5/covid/II/2023	Dinas Kesehatan
11	Auto Disable Syringe 0,3 ml	6.275.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0778/102.5/covid/II/2023	Dinas Kesehatan
12	Safety Box	973.500,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0778/102.5/covid/II/2023	Dinas Kesehatan
13	Auto Disable Syringe 0,5 ml	2.975.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2282/102.5/covid/IV/2023	Dinas Kesehatan
14	Safety box	412.500,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2282/102.5/covid/IV/2023	Dinas Kesehatan
15	Alkohol Swab	395.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2282/102.5/covid/IV/2023	Dinas Kesehatan
16	APD Penyemprot	1.392.094,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2366/102.5/dbd/IV/2023	Dinas Kesehatan
17	RDT Chikungunya	8.125.000,00	Dinas Kesehatan	442/2366/102.5/dbd/IV/2023	Dinas Kesehatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
			Provinsi Jawa Timur		
18	Auto Disable Syringe 0,5 ml	1.190.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2699/102.5/covid/V/2023	Dinas Kesehatan
19	Safety box	181.500,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2699/102.5/covid/V/2023	Dinas Kesehatan
20	Auto Disable Syringe 0,5 ml	173.800,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2699/102.5/covid/V/2023	Dinas Kesehatan
21	Auto Disable Syringe 0,3 ml	125.500,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2699/102.5/covid/V/2023	Dinas Kesehatan
22	Indec HIV 1/2 dan Syphilis combo	30.620.660,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3034/102.5/HIV/VI/2023	Dinas Kesehatan
23	Virocheck HIV 1/2 (R1)	80.553.600,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3034/102.5/HIV/VI/2023	Dinas Kesehatan
24	DBS Collection Kit	269.800,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3034/102.5/HIV/VI/2023	Dinas Kesehatan
25	RDT DBD Combo	89.700.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	KN.02.02/4.3/ /2023	Dinas Kesehatan
26	APD Foger	82.000.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	KN.02.02/4.3/ /2023	Dinas Kesehatan
27	Pot Sputum	1.320.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3527/102.5/TB/VII/2023	Dinas Kesehatan
28	Masker N95	48.240.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3527/102.5/TB/VII/2023	Dinas Kesehatan
29	masker bedah 3 ply + konektor	12.731.700,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3527/102.5/TB/VII/2023	Dinas Kesehatan
30	kaca slide	2.944.306,20	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3527/102.5/TB/VII/2023	Dinas Kesehatan
31	RDT Frambusia	963.900,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3526/102.5/Kusta/VII/2023	Dinas Kesehatan
32	Alkohol Swab	158.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3766/102.5/covid/VII/2023	Dinas Kesehatan
33	Auto Disable Syringe 0,5 ml	1.190.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3766/102.5/covid/VII/2023	Dinas Kesehatan
34	Safety box	132.890,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa	442/3766/102.5/covid/VII/2023	Dinas Kesehatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
			Timur		
35	Auto Disable Syringe 0,05 ml	11.720.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3767/102.5/Vaksin/VII/2023	Dinas Kesehatan
36	Pot Sputum	6.600.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3811/102.5/tb/VII/2023	Dinas Kesehatan
37	RDT Malaria combo	2.025.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3803/102.5/malaria/VII/2023	Dinas Kesehatan
38	Alkohol Swab	79.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4036/102.5/vaksin/VIII/2023	Dinas Kesehatan
39	Auto Disable Syringe 0,5 ml	595.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4036/102.5/vaksin/VIII/2023	Dinas Kesehatan
40	Safety box	82.500,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4036/102.5/vaksin/VIII/2023	Dinas Kesehatan
41	Auto Disable Syringe 0,5 ml	19.040.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4037/102.5/Vaksin/VIII/2023	Dinas Kesehatan
42	Auto Disable Syringe 5 ml	5.256.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4037/102.5/Vaksin/VIII/2023	Dinas Kesehatan
43	Safety Box	1.650.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4037/102.5/Vaksin/VIII/2023	Dinas Kesehatan
44	Auto Disable Syringe 0,5 ml	19.040.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4690/102.5/Vaksin/IX/2023	Dinas Kesehatan
45	Safety Box	1.650.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4690/102.5/Vaksin/IX/2023	Dinas Kesehatan
46	RDT Leptospirosis	1.170.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5023/102.5/Zoonosis/X/2023	Dinas Kesehatan
47	RDT Chikungunya	19.500.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5433/102.5/dbd/XI/2023	Dinas Kesehatan
48	RDT DBD Combo	18.835.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5433/102.5/dbd/XI/2023	Dinas Kesehatan
49	Taburia	151.788.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	BJ.01.04/PPK4-1/736/2023	Dinas Kesehatan
50	Alkohol Swab	79.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5694/102.5/covid/X11/2023	Dinas Kesehatan
51	Auto Disable Syringe 0,5 ml	595.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa	442/5694/102.5/covid/X11/2023	Dinas Kesehatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
			Timur		
52	Safety Box	56.445,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5694/102.5/covid/X11/2023	Dinas Kesehatan
53	Rapid test Anti HCV	1.583.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5727/102.5/HEP/XI/2023	Dinas Kesehatan
54	Rapid Test HBsAg	6.380.560,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5727/102.5/HEP/XI/2023	Dinas Kesehatan
55	Auto Disable Syringe 0,5 ml	5.856.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5780/102.5/Distribusi_BMHP Vaksin/XI/2023	Dinas Kesehatan
56	Safety Box	6.773.400,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5780/102.5/Distribusi_BMHP Vaksin/XI/2023	Dinas Kesehatan
57	Paket Barang Medis Habis Pakai Uji Saring Neonatus	16.128.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	BJ.01.04/PPK4.2/686/2023	Dinas Kesehatan
58	Alkohol Swab	237.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/6045/102'5/COVID/XII/2023	Dinas Kesehatan
59	Auto Disable Syringe 0,5 ml	1.830.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/6045/102'5/COVID/XII/2023	Dinas Kesehatan
60	Safety Box	169.335,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/6045/102'5/COVID/XII/2023	Dinas Kesehatan
61	Auto Disable Syringe 0,05 ml	21.312.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/6044/102.5/BMHP VAKSIN/XII/2023	Dinas Kesehatan
62	Auto Disable Syringe 0,5 ml	15.616.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/6044/102.5/BMHP VAKSIN/XII/2023	Dinas Kesehatan
63	Pot Sputum	14.520.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/6193/102.5/Distribusi_TB/XII/2023	Dinas Kesehatan
64	Insektisida	28.500.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	KN.02.02/4.3/2023	Dinas Kesehatan
65	Larvasida	19.500.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	KN.02.02/4.3/2023	Dinas Kesehatan
66	Microcuvette	44.106.865,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	BJ.01.04/PPK4.1/452/2023	Dinas Kesehatan
67	Jasmine Disposable Syringe With Neddle 3 cc	238.000.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05/SPUIT-PMK/KSWN/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
68	Jasmine Disposable Syringe With	4.560.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa	05/SPUIT-PMK/KSWN/2023	Dinas Peternakan dan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
	Neddle 10 cc		Timur		Perikanan
	JUMLAH	**1.220.490.587,20**			

Lampiran 4 : Rincian Penerimaan Hibah Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
1	Blangko KTP Elektronik	40.728.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 471.13/204/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Blangko KTP Elektronik	5.091.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 470/31/109.06/2022	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Blangko KTP Elektronik	40.728.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 471.13/840/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Blangko KTP Elektronik	40.728.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 471.13/1358/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Blangko KTP Elektronik	40.728.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 471.13/1635/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Blangko KTP Elektronik	20.364.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 471.13/1700/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Blangko KTP Elektronik	10.182.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 471.13/1880/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Blangko KTP Elektronik	20.364.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 471.13/2417/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Blangko KTP Elektronik	5.091.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 470/174/109.06/2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Blangko KTP Elektronik	10.182.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 471.13/2818/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Blangko KTP Elektronik	5.091.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 471.13/2818/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
12	Blangko KTP Elektronik	20.364.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 471.13/3214/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Blangko KTP Elektronik	40.728.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 471.13/3746/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Blangko KTP Elektronik	5.091.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 470/207/109.06/2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	Blangko KTP Elektronik	40.728.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 471.13/4191/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Blangko KTP Elektronik	61.092.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 400.8.1.2/4737/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Blangko KTP Elektronik	5.091.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 470/256/109.06/2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	Blangko KTP Elektronik	20.364.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 400.8.1.2/5290/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19	Blangko KTP Elektronik	20.364.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 400.8.1.2/5421/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20	Blangko KTP Elektronik	10.182.000,00	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NO. 400.8.1.2/5685/SES	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21	Jas Hujan	3.084.990,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.I-018/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	Sepatu Boots	1.535.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.I-018/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23	Jas hujan	46.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.XII-47/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (	57.060.354,75	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	KN.01.05/BIII.I/1472/2023	Dinas Kesehatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
	Buku KIA)				
25	Buku KIA Khusus Bayi Kecil Tahun 2023	2.415.200,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	KN.01.05/BIII.I/3051/2023	Dinas Kesehatan
26	Buku Strategi Nasional TBC 2020-2024	251.250,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	94/APBN/CTK/P/II/2023	Dinas Kesehatan
27	Tas TOSS TBC HTBS	45.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	94/APBN/CTK/P/II/2023	Dinas Kesehatan
28	Mug TOSS TBC HTBS	272.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	94/APBN/CTK/P/II/2023	Dinas Kesehatan
29	Buku Pedoman Sekolah TBC	33.400,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	94/APBN/CTK/P/II/2023	Dinas Kesehatan
30	Kaos TOSS TBC HTBS	65.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	94/APBN/CTK/P/II/2023	Dinas Kesehatan
31	Lembar Balik Edukasi Terapi Pencegahan TBC (TPT)3HP	660.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	94/APBN/CTK/P/II/2023	Dinas Kesehatan
32	Buku Saku Informasi Pasien 3 HP	390.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	94/APBN/CTK/P/II/2023	Dinas Kesehatan
33	Buku Peraturan Presiden RI No. 67 Tahun 2021 Tentang Penangulangan Tuberkulosis	170.250,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	94/APBN/CTK/P/II/2023	Dinas Kesehatan
34	Leaflet ILTB	251.695,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	95/APBN/CTK/P/II/2023	Dinas Kesehatan
35	Lembar Balik ILTB	890.400,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	95/APBN/CTK/P/II/2023	Dinas Kesehatan
36	Buku Strategi Komunikasi TOSS TBC	126.150,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	95/APBN/CTK/P/II/2023	Dinas Kesehatan
37	Leaflet Komunikasi Informasi dan Edukasi	511.500,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	95/APBN/CTK/P/II/2023	Dinas Kesehatan
38	Buku Saku PMK dan PHMS	5.400.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05.A/BUKU SAKU BTT PMK/X/KESWAN/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
39	Leaflet Strategi Pencegahan Penyebaran PMK	3.510.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	5/LEAFLET/KSWN/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
40	Flyer Kie Anthrak	2.632.500,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	5/LEAFLET/KSWN/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
41	Leaflet LSD	3.325.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05/LEAFLET LSD PMK/XII/KSWN/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
	JUMLAH	**591.910.689,75**			

Lampiran 5 : Rincian Penerimaan Hibah Obat

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
1	Oat KDT Dosis Harian	32.742.976,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0253/102.5/TB/I/2023	Dinas Kesehatan
2	OAT FDC Kat Anak	4.015.536,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0253/102.5/TB/I/2023	Dinas Kesehatan
3	INH 300 mg	226.934,40	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0253/102.5/TB/I/2023	Dinas Kesehatan
4	Rifapentin 300 mg + isoniazid 300 mg	2.361.960,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0253/102.5/TB/I/2023	Dinas Kesehatan
5	OAT FDC I	53.628.288,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0253/102.5/TB/I/2023	Dinas Kesehatan
6	HBIG	55.650.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0255/102.5/Hepatitis/I/2023	Dinas Kesehatan
7	Obat anti malaria	171.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0254/102.5/malaria/I/2023	Dinas Kesehatan
8	Primaquin 15 mg	23.700,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0254/102.5/malaria/I/2023	Dinas Kesehatan
9	Vaksin BCG	29.334.030,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0381/102.5/vaksin/I/2023	Dinas Kesehatan
10	Vaksin Polio 10 dosis BOPV	10.844.700,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0381/102.5/vaksin/I/2023	Dinas Kesehatan
11	Vaksin Hepatitis B1 ds / HB Unijeck	26.073.900,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0381/102.5/vaksin/I/2023	Dinas Kesehatan
12	Vaksin DPT-HB-Hib 5ds / Pentabio	92.839.632,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0381/102.5/vaksin/I/2023	Dinas Kesehatan
13	Vaksin Td	4.144.200,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0381/102.5/vaksin/I/2023	Dinas Kesehatan
14	Kaporit 90% tab	577.500,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0603/102.5/P3K/II/2023	Dinas Kesehatan
15	Lysol	308.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0603/102.5/P3K/II/2023	Dinas Kesehatan
16	Metronidazol Infus 100 ml	296.925,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0603/102.5/P3K/II/2023	Dinas Kesehatan
17	Salbutamol 2 mg	103.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0603/102.5/P3K/II/2023	Dinas Kesehatan
18	Albendazole tab kunyah 400 mg	390.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0602/102.5/P3K/II/2023	Dinas Kesehatan
19	Garam Oralit serbuk	280.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0602/102.5/P3K/II/2023	Dinas Kesehatan
20	Natrium Klorida 0,9 lar infus	739.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0602/102.5/P3K/II/2023	Dinas Kesehatan
21	Glukosa larutan Infus 5 % steril	147.260,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0602/102.5/P3K/II/2023	Dinas Kesehatan
22	Tuberculin	9.124.200,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0687/102.5/TB/II/2023	Dinas Kesehatan
23	OAT KDT Dosis harian	32.742.976,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0685/102.5/TB/II/2023	Dinas Kesehatan
24	Rifampisin 75 mg + isoniazid 50 mg	1.004.388,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0685/102.5/TB/II/2023	Dinas Kesehatan
25	Rifapentin 150 mg	2.652.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0685/102.5/TB/II/2023	Dinas Kesehatan
26	Rifapentin 300 mg + Isoniazid 300 mg	4.845.600,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0685/102.5/TB/II/2023	Dinas Kesehatan
27	Vitamin b6 25 mg	222.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0685/102.5/TB/II/2023	Dinas Kesehatan
28	Catridge GenXpert	126.200.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0685/102.5/TB/II/2023	Dinas Kesehatan
29	Lamivudin tablet 150 mg	1.591.200,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0684/102.5/hiv/II/2023	Dinas Kesehatan
30	Nevirapin tablet 200 mg	32.602.500,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0684/102.5/hiv/II/2023	Dinas Kesehatan
31	Tenofovir 300mg + Lamivudin 300mg + Efavirenz 600mg	1.369.200,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0684/102.5/hiv/II/2023	Dinas Kesehatan
32	Dolutegrafir	873.900,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0684/102.5/hiv/II/2023	Dinas Kesehatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
33	Dolutegrafir kombinasi TDF300+3TC300+ DTG50 Acriptega	5.773.350,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0684/102.5/hiv/II/2023	Dinas Kesehatan
34	Lopinavir 200mg + Ritonavir (LPV/r) 50 mg	5.612.565,60	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0684/102.5/hiv/II/2023	Dinas Kesehatan
35	Vaksin BCG	19.556.020,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0777/102.5/vaksin/II/2023	Dinas Kesehatan
36	Vaksin Polio 10 dosis BOPV	10.844.700,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0777/102.5/vaksin/II/2023	Dinas Kesehatan
37	Vaksin Hepatitis B1 ds / HB Unijeck	18.251.730,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0777/102.5/vaksin/II/2023	Dinas Kesehatan
38	Vaksin DPT-HB-Hib 5ds / Pentabio	54.156.452,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0777/102.5/vaksin/II/2023	Dinas Kesehatan
39	Diazepam 5 mg	604.800,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0862/102.5/Keswa/II/2023	Dinas Kesehatan
40	Diazepam inj 5 mg/ml	1.112.400,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0862/102.5/Keswa/II/2023	Dinas Kesehatan
41	Amitriptilin tab 25 mg	2.076.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0862/102.5/Keswa/II/2023	Dinas Kesehatan
42	Clozapin 25 mg	331.100,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0862/102.5/Keswa/II/2023	Dinas Kesehatan
43	Haloperidol 5 mg	810.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0862/102.5/Keswa/II/2023	Dinas Kesehatan
44	Risperidon 2 mg tab	738.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0862/102.5/Keswa/II/2023	Dinas Kesehatan
45	Triheksifenidil HCL tab 2 mg	378.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/0862/102.5/Keswa/II/2023	Dinas Kesehatan
46	MB Anak	152.124,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/1028/102.5/Kusta/III/2023	Dinas Kesehatan
47	PB Dewasa	697.488,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/1028/102.5/Kusta/III/2023	Dinas Kesehatan
48	MB Dewasa	6.430.392,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/1028/102.5/Kusta/III/2023	Dinas Kesehatan
49	Vaksin BCG	4.889.005,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2022/102.5/vaksin/III/2023	Dinas Kesehatan
50	Vaksin Polio 10 dosis BOPV	10.844.700,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2022/102.5/vaksin/III/2023	Dinas Kesehatan
51	Vaksin Hepatitis B1 ds / HB Unijeck	13.036.950,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2022/102.5/vaksin/III/2023	Dinas Kesehatan
52	Vaksin Formening	76.494.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2281/102.5/Haji/IV/2023	Dinas Kesehatan
53	Inavac	185.690.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2282/102.5/covid/IV/2023	Dinas Kesehatan
54	Vaksin Mr 10ds	33.877.200,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2301/102.5/vaksin/IV/2023	Dinas Kesehatan
55	OAT FDC Kat Anak	1.507.935,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2366/102.5/TB/IV/2023	Dinas Kesehatan
56	Isoniazid 300 mg	208.320,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2366/102.5/TB/IV/2023	Dinas Kesehatan
57	Rifapentin 300 mg + Isoniazid 300 mg	2.740.716,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2366/102.5/TB/IV/2023	Dinas Kesehatan
58	Rifampisin 75 mg + Isoniazid 50 mg	913.080,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2366/102.5/TB/IV/2023	Dinas Kesehatan
59	Vitamin b6 25 mg	88.800,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2366/102.5/TB/IV/2023	Dinas Kesehatan
60	Catridge GenXpert	75.720.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2366/102.5/TB/IV/2023	Dinas Kesehatan
61	Zinc 20 mg	18.720.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2367/102.5/Diare/IV/2023	Dinas Kesehatan
62	Garam oralit serbuk	672.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2367/102.5/Diare/IV/2023	Dinas Kesehatan
63	Vaksin Polio 10 dosis BOPV	6.506.820,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2698/102.5/vaksin/V/2023	Dinas Kesehatan
64	Vaksin Hepatitis B1 ds / HB Unijeck	39.110.850,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2698/102.5/vaksin/V/2023	Dinas Kesehatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
65	Vaksin Mr 10ds	84.693.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2698/102.5/vaksin/V/2023	Dinas Kesehatan
66	OAT FDC Kat Anak	3.142.410,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2730/102.5/TB/V/2023	Dinas Kesehatan
67	Isoniazid 300 mg	208.320,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2730/102.5/TB/V/2023	Dinas Kesehatan
68	Rifampisin 75 mg + Isoniazid 50 mg	547.848,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2730/102.5/TB/V/2023	Dinas Kesehatan
69	Oat KDT Dosis Harian	16.371.488,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2730/102.5/TB/V/2023	Dinas Kesehatan
70	Rifapentin 150 mg	2.652.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2730/102.5/TB/V/2023	Dinas Kesehatan
71	Rifapentin 300 mg + Isoniazid 300 mg	4.983.120,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2730/102.5/TB/V/2023	Dinas Kesehatan
72	OAT FDC I	154.181.328,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2730/102.5/TB/V/2023	Dinas Kesehatan
73	Catridge GenXpert	151.440.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2730/102.5/TB/V/2023	Dinas Kesehatan
74	Tuberculin	9.124.200,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2732/102.5/TB/V/2023	Dinas Kesehatan
75	Nevirapin tablet 200 mg	43.470.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2731/102.5/HIV/V/2023	Dinas Kesehatan
76	Lopinavir 200mg + Ritonavir (LPV/r) 50 mg	3.741.710,40	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2731/102.5/HIV/V/2023	Dinas Kesehatan
77	Zidovudin 300 mg + Lamivudin 150mg	103.896.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2731/102.5/HIV/V/2023	Dinas Kesehatan
78	Tenofovir 300mg + Lamivudin 300mg + Efavirenz 600mg	17.604.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2731/102.5/HIV/V/2023	Dinas Kesehatan
79	Dolutegrafir	1.456.500,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2731/102.5/HIV/V/2023	Dinas Kesehatan
80	Dolutegrafir kombinasi TDF300+3TC300+ DTG50 Acriptega	7.515.168,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2731/102.5/HIV/V/2023	Dinas Kesehatan
81	Fluconazole	7.488.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/2731/102.5/HIV/V/2023	Dinas Kesehatan
82	Vaksin BCG	9.799.968,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3012/102.5/vaksin/V/2023	Dinas Kesehatan
83	Vaksin Polio 10 dosis BOPV	10.844.700,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3012/102.5/vaksin/V/2023	Dinas Kesehatan
84	Vaksin Td	6.216.300,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3012/102.5/vaksin/V/2023	Dinas Kesehatan
85	Vaksin Mr 10ds	16.938.600,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3012/102.5/vaksin/V/2023	Dinas Kesehatan
86	OAT FDC Kat Anak	5.027.856,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3030/102.5/TB/VI/2023	Dinas Kesehatan
87	Isoniazid 300 mg	208.320,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3030/102.5/TB/VI/2023	Dinas Kesehatan
88	Rifapentin 300 mg + Isoniazid 300 mg	2.491.560,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3030/102.5/TB/VI/2023	Dinas Kesehatan
89	Levofloxacin 100 mg	976.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3030/102.5/TB/VI/2023	Dinas Kesehatan
90	Levofloxacin 250 mg	393.660,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3030/102.5/TB/VI/2023	Dinas Kesehatan
91	Catridge GenXpert	201.920.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3030/102.5/TB/VI/2023	Dinas Kesehatan
92	Rifapentin 300mg + Isoniazid 300mg	11.765.950,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3032/102.5/HIV/VI/2023	Dinas Kesehatan
93	HBIG	96.250.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3033/102.5/Hep/VI/2023	Dinas Kesehatan
94	Vaksin Formening situbondo	732.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	445/4287/431.302.7.2/2023/vaksin haji	Dinas Kesehatan
95	Catridge GenXpert	116.550.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3290/102.5/TB/VI/2023	Dinas Kesehatan
96	Garam Oralit	336.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3435/102.5/KLB/VII/2023	Dinas Kesehatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
97	Zinc 20 mg	1.664.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3435/102.5/KLB/VII/2023	Dinas Kesehatan
98	Becefort tab	524.920,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3436/102.5/KLB/VII/2023	Dinas Kesehatan
99	Rifampisin 75 mg + Isoniazid 50 mg	182.616,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3518/102.5/TB/VII/2023	Dinas Kesehatan
100	Rifapentin 150 mg	1.326.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3518/102.5/TB/VII/2023	Dinas Kesehatan
101	Rifapentin 300 mg + Isoniazid 300 mg	4.983.120,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3518/102.5/TB/VII/2023	Dinas Kesehatan
102	Catridge GenXpert	66.600.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3517/102.5/TB/VII/2023	Dinas Kesehatan
103	Tuberculin	18.248.400,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3527/102.5/TB/VII/2023	Dinas Kesehatan
104	Reagen Indec ZN TB	696.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3527/102.5/TB/VII/2023	Dinas Kesehatan
105	Ethambutol 400 mg TB	352.800,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3520/102.5/TB/VII/2023	Dinas Kesehatan
106	Oat KDT Dosis Harian	32.742.976,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3516/102.5/TB/VII/2023	Dinas Kesehatan
107	Lamivudin tablet 150 mg	1.591.200,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3515/102.5/HIV/VII/2023	Dinas Kesehatan
108	abacavir 120 mg / lamivudin 60 mg	291.288,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3515/102.5/HIV/VII/2023	Dinas Kesehatan
109	Efavirens 600 mg	15.862.500,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3515/102.5/HIV/VII/2023	Dinas Kesehatan
110	Lopinavir 200mg + Ritonavir (LPV/r) 50 mg	9.354.276,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3515/102.5/HIV/VII/2023	Dinas Kesehatan
111	Nevirapin tablet 200 mg	108.675.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3515/102.5/HIV/VII/2023	Dinas Kesehatan
112	Dolutegrafir kombinasi TDF300+3TC300+ DTG50 Acriptega	29.160.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3515/102.5/HIV/VII/2023	Dinas Kesehatan
113	Zidovudin 300 mg + Lamivudin 150 mg	173.160.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3515/102.5/HIV/VII/2023	Dinas Kesehatan
114	MB Dewasa	655.213,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3525/102.5/Kusta/VII/2023	Dinas Kesehatan
115	MB Anak	33.282,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3525/102.5/Kusta/VII/2023	Dinas Kesehatan
116	Vaksin BCG	31.135.500,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3765/102.5/vaksin/VII/2023	Dinas Kesehatan
117	Vaksin Polio 10 dosis BOPV	10.844.700,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3765/102.5/vaksin/VII/2023	Dinas Kesehatan
118	Vaksin IPV	79.250.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3765/102.5/vaksin/VII/2023	Dinas Kesehatan
119	Vaksin Hepatitis B1 ds / HB Unijeck	23.490.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3765/102.5/vaksin/VII/2023	Dinas Kesehatan
120	Vaksin DPT-HB-Hib 5ds / Pentabio	103.051.992,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3765/102.5/vaksin/VII/2023	Dinas Kesehatan
121	Vaksin Td	10.360.500,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3765/102.5/vaksin/VII/2023	Dinas Kesehatan
122	Vaksin Mr 10ds	186.324.600,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3765/102.5/vaksin/VII/2023	Dinas Kesehatan
123	Vaksin PCV	285.985.500,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3765/102.5/vaksin/VII/2023	Dinas Kesehatan
124	Rotavac	156.093.750,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3765/102.5/vaksin/VII/2023	Dinas Kesehatan
125	Inavac	51.528.975,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3766/102.5/covid/VII/2023	Dinas Kesehatan
126	MB Dewasa	6.048.120,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3800/102.5/kusta/VII/2023	Dinas Kesehatan
127	PB Anak	591.808,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3800/102.5/kusta/VII/2023	Dinas Kesehatan
128	MB Anak	199.692,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3800/102.5/kusta/VII/2023	Dinas Kesehatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
129	Dehydro Artemisin 40 mg + Piperakuin 320 mg (DHP)	641.475,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3801/102.5/malaria/VII/2023	Dinas Kesehatan
130	Primaquin 15 mg	47.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3801/102.5/malaria/VII/2023	Dinas Kesehatan
131	Vaksin Anti Rabies	1.530.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3802/102.5/zoonosis/VII/2023	Dinas Kesehatan
132	Rifapentin 300 mg + Isoniazid 300 mg	4.983.120,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3840/102.5/TB/VII/2023	Dinas Kesehatan
133	Catridge GenXpert	114.170.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3840/102.5/TB/VII/2023	Dinas Kesehatan
134	Albendazole 400 mg	52.555.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3844/102.5/Filariasis/VIII/2023	Dinas Kesehatan
135	Albendazole Suspensi 200mg/5ml	21.500.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3844/102.5/Filariasis/VIII/2023	Dinas Kesehatan
136	Anti Venom green pit viber	4.608.720,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/3843/102.5/Zoonosis/VIII/2023	Dinas Kesehatan
137	Vaksin BCG	19.600.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4035/102.5/Covid/VIII/2023	Dinas Kesehatan
138	Vaksin Polio 10 dosis BOPV	10.844.700,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4035/102.5/Covid/VIII/2023	Dinas Kesehatan
139	Vaksin Hepatitis B1 ds / HB Unijeck	18.792.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4035/102.5/Covid/VIII/2023	Dinas Kesehatan
140	Vaksin DPT-HB-Hib 5ds / Pentabio	25.762.998,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4035/102.5/Covid/VIII/2023	Dinas Kesehatan
141	Vaksin Td	57.500.775,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4035/102.5/Covid/VIII/2023	Dinas Kesehatan
142	Vaksin Dt	47.709.995,58	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4035/102.5/Covid/VIII/2023	Dinas Kesehatan
143	Vaksin HPV	1.188.606.981,72	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4035/102.5/Covid/VIII/2023	Dinas Kesehatan
144	Inavac	51.528.975,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4036/102.5/vaksin/VIII/2023	Dinas Kesehatan
145	Isoniazid 300 mg	268.800,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4207/102.5/TB/VIII/2023	Dinas Kesehatan
146	Rifampisin 75 mg + Isoniazid 50 mg	861.840,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4207/102.5/TB/VIII/2023	Dinas Kesehatan
147	Rifapentin 150 mg	6.630.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4207/102.5/TB/VIII/2023	Dinas Kesehatan
148	Rifapentin 300 mg + isoniazid 300 mg	4.983.120,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4207/102.5/TB/VIII/2023	Dinas Kesehatan
149	Ethambutol 400 mg	681.408,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4207/102.5/TB/VIII/2023	Dinas Kesehatan
150	Oat KDT Dosis Harian	87.818.400,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4205/102.5/TB/VIII/2023	Dinas Kesehatan
151	Reagen Indec ZN TB	2.525.600,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4206/102.5/TB/VIII/2023	Dinas Kesehatan
152	Catridge GenXpert	144.000.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4206/102.5/TB/VIII/2023	Dinas Kesehatan
153	Catridge GenXpert	16.000.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4206/102.5/TB/VIII/2023	Dinas Kesehatan
154	Levofloxacin 250 mg	413.100,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4207.1/102.5/TB/VIII/2023	Dinas Kesehatan
155	Tablet tambah darah	28.305.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/30.7/102.5/GIZI_TTD/VIII/2023	Dinas Kesehatan
156	Retinol 200.000 IU	36.291.450,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/04.1/102.5/GIZI_Vit A/XI/2023	Dinas Kesehatan
157	Retinol 100.000IU	3.393.600,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/04.1/102.5/GIZI_Vit A/XI/2023	Dinas Kesehatan
158	Rifampisin 75 mg + Isoniazid 50 mg	861.840,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4497/102.5/TB/IX/2023	Dinas Kesehatan
159	Rifapentin 150 mg	5.304.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4497/102.5/TB/IX/2023	Dinas Kesehatan
160	Levofloxacin 100 mg	1.952.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4497/102.5/TB/IX/2023	Dinas Kesehatan
161	Ethambutol 400 mg	340.704,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4497/102.5/TB/IX/2023	Dinas Kesehatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
162	Oat KDT Dosis Harian	35.127.360,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4496/102.5/TB/IX/2023	Dinas Kesehatan
163	OAT FDC Kat Anak	6.284.820,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4496/102.5/TB/IX/2023	Dinas Kesehatan
164	Tuberculin	24.331.200,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4499/102.5/TB/IX/2023	Dinas Kesehatan
165	Catridge GenXpert	160.000.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4498/102.5/TB/IX/2023	Dinas Kesehatan
166	abacavir 120 mg / lamivudin 60 mg	48.548,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4495/102.5/HIV/IX/2023	Dinas Kesehatan
167	Dolutegrafir	799.200,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4495/102.5/HIV/IX/2023	Dinas Kesehatan
168	Nevirapin tablet 200 mg	76.072.500,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4495/102.5/HIV/IX/2023	Dinas Kesehatan
169	Dolutegrafir kombinasi TDF300+3TC300+ DTG50 Acriptega	51.300.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4495/102.5/HIV/IX/2023	Dinas Kesehatan
170	Zidovudin 300 mg + Lamivudin 150 mg	69.264.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4495/102.5/HIV/IX/2023	Dinas Kesehatan
171	Dolutegrafir 10 mg	69.474,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4495/102.5/HIV/IX/2023	Dinas Kesehatan
172	Vaksin BCG	31.135.500,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4688/102.5/vaksin/IX/2023	Dinas Kesehatan
173	Vaksin Polio 10 dosis BOPV	10.844.700,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4688/102.5/vaksin/IX/2023	Dinas Kesehatan
174	Vaksin IPV	86.000.025,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4688/102.5/vaksin/IX/2023	Dinas Kesehatan
175	Vaksin Hepatitis - B (BAYI)	22.955.998,80	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4688/102.5/vaksin/IX/2023	Dinas Kesehatan
176	Vaksin Mr 10ds	101.631.600,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4688/102.5/vaksin/IX/2023	Dinas Kesehatan
177	Rotavac	168.581.250,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4688/102.5/vaksin/IX/2023	Dinas Kesehatan
178	Vaksin HPV	354.923.423,34	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4688/102.5/vaksin/IX/2023	Dinas Kesehatan
179	Tablet tambah darah	177.156.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/26.02/102.5/Gizi TTD/XI/2023	Dinas Kesehatan
180	Vaksin BCG	25.946.250,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4961/102.5/vaksin/X/2023	Dinas Kesehatan
181	Vaksin Polio 10 dosis BOPV	10.905.405,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4961/102.5/vaksin/X/2023	Dinas Kesehatan
182	Vaksin IPV	51.600.015,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4961/102.5/vaksin/X/2023	Dinas Kesehatan
183	Vaksin Mr 10ds	50.815.800,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/4961/102.5/vaksin/X/2023	Dinas Kesehatan
184	Isoniazid 300 mg	537.600,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5020/102.5/tb/X/2023	Dinas Kesehatan
185	Rifampisin 75 mg + Isoniazid 50 mg	861.840,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5020/102.5/tb/X/2023	Dinas Kesehatan
186	Rifapentin 150 mg	3.978.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5020/102.5/tb/X/2023	Dinas Kesehatan
187	Rifapentin 300 mg + isoniazid 300 mg	4.983.120,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5020/102.5/tb/X/2023	Dinas Kesehatan
188	Levofloxacin 250 mg	400.950,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5020/102.5/tb/X/2023	Dinas Kesehatan
189	Ethambutol 400 mg	681.408,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5020/102.5/tb/X/2023	Dinas Kesehatan
190	Pyridoxine	363.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5020/102.5/tb/X/2023	Dinas Kesehatan
191	Catridge GenXpert	160.000.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5021/102.5/tb/X/2023	Dinas Kesehatan
192	OAT KDT Dosis Harian	59.362.800,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5019/102.5/TB/X/2023	Dinas Kesehatan
193	OAT FDC kat Anak	5.027.856,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5019/102.5/TB/X/2023	Dinas Kesehatan
194	Dolutegrafir	3.330.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5017/102.5/HIV/X/2023	Dinas Kesehatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
195	Efavirens 600 mg	15.862.500,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5017/102.5/HIV/X/2023	Dinas Kesehatan
196	Nevirapin tablet 200 mg	2.463.300,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5017/102.5/HIV/X/2023	Dinas Kesehatan
197	Zidovudin 300 mg + Lamivudin 150 mg	138.528.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5017/102.5/HIV/X/2023	Dinas Kesehatan
198	PB Anak	55.686,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5018/102.5/kusta/X/2023	Dinas Kesehatan
199	PB Dewasa	297.600,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5018/102.5/kusta/X/2023	Dinas Kesehatan
200	MB Anak	195.360,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5018/102.5/kusta/X/2023	Dinas Kesehatan
201	MB Dewasa	6.048.120,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5018/102.5/kusta/X/2023	Dinas Kesehatan
202	Vaksin Anti Rabies	765.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5022/102.5/zoonosis/X/2023	Dinas Kesehatan
203	Vaksin Anti Rabies	773.950,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5022.1/102.5/Zoonosis/X/2023	Dinas Kesehatan
204	Tablet tambah darah	94.280.625,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/17.03/102.5/Gizi.TTD/X/2023	Dinas Kesehatan
205	Amitriptilin tab 25 mg	31.600,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5266/102.5/keswa/X/2023	Dinas Kesehatan
206	Haloperidol 5 mg	27.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5266/102.5/keswa/X/2023	Dinas Kesehatan
207	Diazepam 5 mg tablet	162.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5266/102.5/keswa/X/2023	Dinas Kesehatan
208	Diazepam injeksi 5 mg/ml	30.900,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5266/102.5/keswa/X/2023	Dinas Kesehatan
209	Triheksifenidil HCL tab 2mg	36.297,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5267/102.5/keswa/X/2023	Dinas Kesehatan
210	Risperidon 2 mg tab	63.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5267/102.5/keswa/X/2023	Dinas Kesehatan
211	Clozapin 25 mg	118.250,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5267/102.5/keswa/X/2023	Dinas Kesehatan
212	ABATE	3.675.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5433/102.5/dbd/XI/2023	Dinas Kesehatan
213	Anti Venom green pit viber	7.681.200,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5431/102.5/Zoonosis/XI/2023	Dinas Kesehatan
214	Vaksin BCG	29.400.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5695/102.5/Vaksin/XI/2023	Dinas Kesehatan
215	Vaksin Polio 10 dosis BOPV	13.086.486,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5695/102.5/Vaksin/XI/2023	Dinas Kesehatan
216	Vaksin Hepatitis - B (BAYI)	18.095.945,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5695/102.5/Vaksin/XI/2023	Dinas Kesehatan
217	Vaksin MR 10 ds	67.754.400,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5695/102.5/Vaksin/XI/2023	Dinas Kesehatan
218	Rotavac	156.093.750,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5695/102.5/Vaksin/XI/2023	Dinas Kesehatan
219	Vaksin PCV	76.262.800,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5695/102.5/Vaksin/XI/2023	Dinas Kesehatan
220	Vaksin Hepatitis - B (DEWASA)	98.183.783,69	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5695/102.5/Vaksin/XI/2023	Dinas Kesehatan
221	Inavac	51.528.975,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5694/102.5/covid/X11/2023	Dinas Kesehatan
222	Pyrazinamide tab 500 mg	460.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5729/102.5/TB/XI/2023	Dinas Kesehatan
223	Pyridoxine	1.452.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5729/102.5/TB/XI/2023	Dinas Kesehatan
224	Moxiflocaxin 400 mg	340.100,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5729/102.5/TB/XI/2023	Dinas Kesehatan
225	Linezolid 600 mg	1.466.500,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5729/102.5/TB/XI/2023	Dinas Kesehatan
226	Isoniazid 300 mg	537.600,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5729/102.5/TB/XI/2023	Dinas Kesehatan
227	Ethionamide 250 mg	783.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5729/102.5/TB/XI/2023	Dinas Kesehatan
228	Ethambutol 400 mg	681.408,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5729/102.5/TB/XI/2023	Dinas Kesehatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
229	Cycloserine 250 mg	4.256.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5729/102.5/TB/XI/2023	Dinas Kesehatan
230	Clofazimine 100 mg	7.977.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5729/102.5/TB/XI/2023	Dinas Kesehatan
231	Bedaquiline100 mg	32.534.340,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5729/102.5/TB/XI/2023	Dinas Kesehatan
232	Rifapentin 300 mg + isoniazid 300 mg	12.196.800,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5725/102.5/TB/XI/2023	Dinas Kesehatan
233	Rifampisin 75 mg + Isoniazid 50 mg	861.840,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5725/102.5/TB/XI/2023	Dinas Kesehatan
234	Rifapentin 150 mg	7.956.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5725/102.5/TB/XI/2023	Dinas Kesehatan
235	Isoniazid 300 mg	537.600,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5725/102.5/TB/XI/2023	Dinas Kesehatan
236	Reagen Indec ZN TB	4.510.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5726/102.5/TB/XI/2023	Dinas Kesehatan
237	OAT KDT Dosis harian	144.166.800,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5724/102.5/TB/XI/2023	Dinas Kesehatan
238	OAT FDC kat Anak	10.055.712,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5724/102.5/TB/XI/2023	Dinas Kesehatan
239	Dolutegrafir	1.998.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5728/102.5/HV/XI/2023	Dinas Kesehatan
240	Efavirens 600 mg	31.500.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5728/102.5/HV/XI/2023	Dinas Kesehatan
241	Lopinavir 200mg + Ritonavir (LPV/r) 50 mg	2.973.600,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5728/102.5/HV/XI/2023	Dinas Kesehatan
242	Tenofovir 300mg + Lamivudin 300mg + Efavirenz 600mg	16.259.400,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5728/102.5/HV/XI/2023	Dinas Kesehatan
243	Dolutegrafir kombinasi TDF300+3TC300+ DTG50 Acriptega	10.260.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/5728/102.5/HV/XI/2023	Dinas Kesehatan
244	OAT FDC I	40.221.216,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/454/423.104.09/2023	Dinas Kesehatan
245	Tuberculin	608.280,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	445/5960/431.302./7.2/2023/TB	Dinas Kesehatan
246	Vaksin Polio 10 dosis BOPV	17.448.648,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/6039/102.5/VAKSIN/XII/2023	Dinas Kesehatan
247	Vaksin Hepatitis - B (BAYI)	20.681.080,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/6039/102.5/VAKSIN/XII/2023	Dinas Kesehatan
248	Vaksin DPT-HB-Hib 5ds / Pentabio	26.102.998,65	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/6039/102.5/VAKSIN/XII/2023	Dinas Kesehatan
249	Vaksin Td	6.500.000,16	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/6039/102.5/VAKSIN/XII/2023	Dinas Kesehatan
250	Vaksin MR 10 ds	84.693.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/6039/102.5/VAKSIN/XII/2023	Dinas Kesehatan
251	Vaksin PCV	95.328.500,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/6039/102.5/VAKSIN/XII/2023	Dinas Kesehatan
252	Vaksin BCG	49.000.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/6039/102.5/VAKSIN/XII/2023	Dinas Kesehatan
253	Inavac	103.057.950,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/6045/102'5/COVID/XII/2023	Dinas Kesehatan
254	Inavac	51.528.975,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/6045/102'5/COVID/XII/2023	Dinas Kesehatan
255	Benzatin Benzil Penicillin	144.300,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/6162/102.5/HIV/XII/2023	Dinas Kesehatan
256	Rifapentin 300mg + Isoniazid 300mg	1.104.505,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/6162/102.5/HIV/XII/2023	Dinas Kesehatan
257	Cepheid Xpert HIV 1 VL Assay	19.825.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/6162/102.5/HIV/XII/2023	Dinas Kesehatan
258	Reagen Indec ZN TB	17.850.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	442/6193/102.5/Distribusi_TB/XII/2023	Dinas Kesehatan
259	Aftogen®Oleo (Vaksin PMK)	581.640.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05/VAKSIN PMK-I/KSWN/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
260	Vetadryl inj.(PT. Sanbe Farma / Obat-Obatan Penyakit LSD	172.485,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05/OBAT-OBATAN.APBD/P4H/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
261	Invomec Super	494.995,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05/OBAT-OBATAN.APBD/P4H/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
262	Flukicide Bolus	1.649.985,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05/OBAT-OBATAN.APBD/P4H/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
263	Albenol-2500 Bolus	222.900,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05/OBAT-OBATAN.APBD/P4H/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
264	Bio Energi inj.100 ml	9.000.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	027/BAST/PT.BJS/V/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
265	Fertilife inj.100 ml	10.200.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	027/BAST/PT.BJS/V/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
266	Pro B Plek Bolus Vitamin B Komplek Bolus	87.100.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	027/BAST/PT.BJS/V/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
267	Mefisto Insektisida dan Disinfektan Formula Paten 1 liter	11.988.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	027/BAST/PT.BJS/V/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
268	Antiparasit (anti-ektoparasit dan endoparasit) Agi 100 ml	11.985.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	027/BAST/PT.BJS/V/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
269	Kaloky LA inj.100 ml	10.200.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	BAST/027/CV.AS/V/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
270	Sulprodon inj. 100 ml	3.957.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	BAST/027/CV.AS/V/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
271	Prodryl inj.100 ml	3.690.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	BAST/027/CV.AS/V/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
272	Lagantor Bsa Bolus	173.530.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	BAST/027/CV.AS/V/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
273	Bovilis-Lumpyvax	19.000.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05/VAKSIN LSD-VI/KSWN/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
274	Cdac Aftosa®	24.561.600,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	23.6.05/VAKSIN PMK-II-T/KSWN/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
275	Aftogen®Oleo (Vaksin PMK)	727.050.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05/VAKSIN PMK-III/KSWN/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
276	Analdon inj.	6.096.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05/OBAT-PMK/KSWN/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
277	Phenhydril inj.	5.884.800,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05/OBAT-PMK/KSWN/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
278	Vet Oxy LA Antibiotik inj.	15.936.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05/OBAT-PMK/KSWN/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
279	Agi 100 ml	5.400.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05/OBAT-OBATAN-LSD/KSWN/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
280	Prodryl	681.072,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05/OBAT-OBATAN-LSD/KSWN/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
281	Fertilife	2.160.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05/OBAT-OBATAN-LSD/KSWN/2023	Dinas Peternakan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
					dan Perikanan
282	Obat Cacing (Anthelmintik) Lagantor BSA Bolus	86.054.400,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05/BAST/PAPBD/XI/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
283	Vitamin B Komplek Bolus Rasa Jeruk Probplek Bolus	178.750.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05/BAST/APBN/XI/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
284	Cavac FMD (China Animal Husbandry Industri Co,LTD)	404.260.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05/VAKSIN PMK-IV/KSWN/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
285	Cavac FMD (China Animal Husbandry Industri Co,LTD)	202.130.000,00	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	05/VAKSIN PMK V/KSWN/2023	Dinas Peternakan dan Perikanan
	JUMLAH	**11.540.132.900,34**			

Lampiran 6 : Rincian Penerimaan Hibah Barang Untuk Dijual/Diserahkan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
1	Tandon 1200 Liter	2.486.400,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.I-018/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Paket Sembako	21.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.IV-006/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Jerigen	44.410.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.V-013/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Glangsing	18.898.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.V-013/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Terpal	5.605.980,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.V-013/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Siap Saji Rendang	21.250.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.V-013/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Tambah Gizi Biskuit	33.566.400,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.V-013/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Tandon 1200 Liter	28.950.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.V-013/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Sandang Pria	41.625.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.XII-47/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Sandang Wanita	41.625.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.XII-47/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Biskuit Marie (Tambah Gizi)	25.678.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.XII-47/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Koktil Buah (Tambah Gizi)	25.678.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.XII-47/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Bubur Kacang Hijau (Tambah Gizi)	25.678.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.XII-47/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	Air Mineral	2.050.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.XII-47/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Makanan Siap Saji	137.280.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.XII-47/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	Paket Kebersihan	11.100.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.XII-47/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	Family Kids	22.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.XII-47/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18	Rendang Ayam (Lauk Pauk)	25.678.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.XII-47/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
19	Kare Ayam (Lauk Pauk)	25.678.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.XII-47/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20	Ikan Saus Cabe (Lauk Pauk)	25.678.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.XII-47/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21	Tangki Air / Tandon	20.300.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.XII-47/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	Terpal Plastik	98.105.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	360/C.XII-47/208.3/2023	Badan Penanggulangan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
			Provinsi Jawa Timur		Bencana Daerah
23	Gedek Bambu	14.145.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.XII-47/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24	Selimut	72.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	360/C.XII-47/208.3/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25	Suntik progestin	72.000.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	41/A/B/III/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
26	Implant 2 batang	300.030.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	41/A/B/III/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
27	Suntik Kombinasi	56.050.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	41/A/B/III/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
28	IUD Coper T	812.500,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	41/A/B/III/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
29	IUD Coper T	1.702.890,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	41/A/B/III/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
30	Syringe, 3 ml (Suntik KB)	15.620.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	41/A/B/III/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
31	Lidocaine, 2 persen, Injeksi, ampul	1.606.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	41/A/B/III/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
32	Spuit 5 ml	1.936.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	41/A/B/III/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
33	Kasa Steril	5.784.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	41/A/B/III/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
					Keluarga Berencana
34	Povidone Iodine, 30 ml	820.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	41/A/B/III/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
35	Alkohol, 70 % Antiseptik	250.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	41/A/B/III/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
36	Cairan Pemutih	110.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	41/A/B/III/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
37	Kasa Gulung	2.060.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	41/A/B/III/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
38	IUD Coper T	2.522.800,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	103/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
39	Suntik progestin	72.000.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	103/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
40	Implant 2 batang	300.030.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	103/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
41	Pil Progestin	26.584.506,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	103/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
42	Pil Progestin	13.585.494,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	103/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
43	Pil Kombinasi	11.530.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa	103/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
			Timur		Anak, Dan Keluarga Berencana
44	Kondom	5.700.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	103/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
45	Suntik Kombinasi	56.050.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	103/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
46	Syringe, 3 ml (Suntik KB)	17.182.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	103/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
47	Povidone Iodine, 30 ml	820.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	103/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
48	Dermafix	7.500.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	103/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
49	Kasa Steril	5.784.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	103/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
50	Kasa Pembalut 5 cm	2.378.380,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	103/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
51	Underpad Bed Matras	1.576.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	103/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
52	Asam Mefenamat, 500 mg, Tablet	888.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	103/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
53	Doek Steril Disposable	13.720.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	103/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
			(BKKBN) Provinsi Jawa Timur		Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
54	Lidocaine, 2 persen, Injeksi, ampul	1.606.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	103/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
55	Maxter Surgical Gloves 7	5.960.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	103/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
56	Fallopering	2.743.400,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	117/A/B/VII/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
57	Benang Catgut	857.600,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	117/A/B/VII/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
58	Underpad Bed Matras	1.576.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	117/A/B/VII/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
59	Asam Mefenamat, 500 mg, Tablet	355.200,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	117/A/B/VII/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
60	Handscoen	298.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	117/A/B/VII/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
61	Maxter Surgical Gloves 7.5, Kotak 50 pasang	894.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	117/A/B/VII/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
62	Maxter Surgical Gloves 7	894.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	117/A/B/VII/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
63	Pil Kombinasi	23.060.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga	169/A/B/IX/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
			Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur		Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
64	Artika Gerigi	22.315.200,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	169/A/B/IX/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
65	IUD	2.522.800,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	169/A/B/IX/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
66	Suntik progestin	48.000.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	169/A/B/IX/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
67	Implant 2 batang	300.030.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	169/A/B/IX/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
68	Kondom	5.700.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	169/A/B/IX/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
69	Dermafix	7.500.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	169/A/B/IX/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
70	Handscoen	1.788.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	169/A/B/IX/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
71	Maxter Surgical Gloves 7	2.086.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	169/A/B/IX/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
72	Maxter Surgical Gloves 7.5, Kotak 50 pasang	2.086.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	169/A/B/IX/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
73	Povidone Iodine, 30 ml	820.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	169/A/B/IX/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
74	Lidocaine, 2 persen, Injeksi, ampul	2.332.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	169/A/B/IX/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
75	Kasa Steril	2.050.840,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	169/A/B/IX/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
76	Kasa Steril	2.371.440,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	169/A/B/IX/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
77	Kasa Pembalut 5 cm	2.400.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	169/A/B/IX/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
78	Spuit 5 ml	1.936.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	169/A/B/IX/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
79	Doek Steril Disposable	13.720.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	169/A/B/IX/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
80	Syringe, 3 ml (Suntik KB)	7.810.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	169/A/B/IX/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
81	Plester Roll Ultrafix	1.188.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	169/A/B/IX/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
82	IUD	2.522.800,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	209/XI/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Instansi Pemberi	BAST	SKPD
					Berencana
83	Suntik progestin	96.000.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	209/XI/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
84	Pil Kombinasi	23.060.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	209/XI/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
85	Artika Gerigi	21.422.592,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	209/XI/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
86	Pil Progestin	16.068.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	209/XI/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
87	Syringe, 3 ml (Suntik KB)	15.620.000,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur	209/XI/A/B/2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
88	Endo Antropometri Kit 10	1.216.600.000,00	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	BJ.01.04/PPK4.1/196/2023	Dinas Kesehatan
89	Induk Nila	1.065.000,00	Dinas Peternakan dan Perikanan	523/ /430.9.4/2024	Dinas Peternakan dan Perikanan
90	Benih Nila 3-5 cm	180.000,00	Dinas Peternakan dan Perikanan	523/ /430.9.4/2024	Dinas Peternakan dan Perikanan
91	Benih Nila 7-9 cm	250.000,00	Dinas Peternakan dan Perikanan	523/ /430.9.4/2024	Dinas Peternakan dan Perikanan
	JUMLAH	**3.645.791.822,00**			

Lampiran 7 :Rincian Aset Tidak Berwujud

Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	665.294.500,00	0,00	0,00	665.294.500,00
	Software e-content Media Pendidikan	458.640.000,00	0,00	0,00	458.640.000,00
	Software Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	83.950.000,00	0,00	0,00	83.950.000,00
	Software Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	101.672.500,00	0,00	0,00	101.672.500,00
	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	21.032.000,00	0,00	0,00	21.032.000,00
2	Dinas Kesehatan	369.621.500,00	0,00	0,00	369.621.500,00
	Aplikasi Persediaan Obat Berbasis Web	99.500.000,00	0,00	0,00	99.500.000,00
	Software Antrian Pasien	34.820.500,00	0,00	0,00	34.820.500,00
	Software SIKDA	49.428.500,00	0,00	0,00	49.428.500,00
	Software PSC 119	185.872.500,00	0,00	0,00	185.872.500,00
3	RSUD dr. H. Koesnadi	236.777.475,00	516.625.745,00	0,00	753.403.220,00
	Software Absensi	14.850.000,00	0,00	0,00	14.850.000,00
	Software MMPI	12.783.925,00	0,00	0,00	12.783.925,00
	Software SIPERKASA	148.860.800,00	0,00	0,00	148.860.800,00
	Software Mobile Presensi	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	Software MMPI 2	15.282.750,00	0,00	0,00	15.282.750,00
	Software Aplikasi Surat Menyurat	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	Software Laboratory Informastion System (LIS)	0,00	295.625.745,00	0,00	295.625.745,00
	Software Modul E-Rekam Medik dan E-Resep (SIMRS)	0,00	221.000.000,00	0,00	221.000.000,00
4	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	275.841.500,00	98.702.000,00	0,00	374.543.500,00
	Aplikasi Pemetaan Aset Irigasi Kabupaten Bondowoso	185.658.000,00	0,00	0,00	185.658.000,00
	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	10.516.000,00	0,00	0,00	10.516.000,00
	Website Surat Perjanjian	79.667.500,00	0,00	0,00	79.667.500,00
	Website Database Peta Ruas Jalan	0,00	98.702.000,00	0,00	98.702.000,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	30.191.000,00	0,00	0,00	30.191.000,00
	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	10.516.000,00	0,00	0,00	10.516.000,00
	Sistem Informasi Rumah Tidak Huni (Berbasis Web)	6.775.000,00	0,00	0,00	6.775.000,00
	Sistem Informasi Rumah Tidak Huni (Berbasis Web)	12.900.000,00	0,00	0,00	12.900.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	142.169.500,00	0,00	138.253.500,00	3.916.000,00
	Aplikasi Pengaduan Gerdu Bersinar (Gerakan Terpadu Berantas Kemaksiatan dan Narkoba)	49.775.000,00	0,00	49.775.000,00	0,00
	Aplikasi Pengaduan Masyarakat	29.744.000,00	0,00	29.744.000,00	0,00
	Aplikasi LAKIP	29.150.000,00	0,00	29.150.000,00	0,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Aplikasi Jabatan Fungsional	29.584.500,00	0,00	29.584.500,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.711.000,00	0,00	0,00	13.711.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Sistem Informasi Tanggap Bencana	9.795.000,00	0,00	0,00	9.795.000,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	7.832.000,00	0,00	0,00	7.832.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
9	Dinas Lingkungan Hidup	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	115.553.000,00	0,00	0,00	115.553.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Aplikasi Pelaporan SIAK Desa (SILAPDES)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	Aplikasi Pendaftaran Akta Kelahiran	10.682.000,00	0,00	0,00	10.682.000,00
	Aplikasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Cek Data Kependudukan)	22.055.000,00	0,00	0,00	22.055.000,00
	Aplikasi Laporan Update Data Pindah Datang Penduduk	24.450.000,00	0,00	0,00	24.450.000,00
	Aplikasi Register Kartu Keluarga dan Akta Kematian	24.450.000,00	0,00	0,00	24.450.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
12	Dinas Perhubungan	149.873.900,00	0,00	0,00	149.873.900,00
	Software Aplikasi Web GIS	49.891.600,00	0,00	0,00	49.891.600,00
	Software Aplikasi Web GIS	99.982.300,00	0,00	0,00	99.982.300,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.537.958.200,00	0,00	109.725.000,00	1.428.233.200,00
	Aplikasi Informasi Daerah "Bondowosoku"	59.840.000,00	0,00	0,00	59.840.000,00
	Aplikasi Dashboard	109.725.000,00	0,00	109.725.000,00	0,00
	Website OPD	119.900.000,00	0,00	0,00	119.900.000,00
	Website OPD	119.900.000,00	0,00	0,00	119.900.000,00
	Website Desa	479.000.000,00	0,00	0,00	479.000.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Website Sistem Informasi Pemerintah	119.900.000,00	0,00	0,00	119.900.000,00
	Website Desa	377.000.000,00	0,00	0,00	377.000.000,00
	Sistem Informasi Organisasi Perangkat Daerah (www.geopark.bondowosokab.go.id)	24.875.400,00	0,00	0,00	24.875.400,00
	Sistem Informasi Organisasi Perangkat Daerah (www.humas.bondowosokab.go.id)	24.875.400,00	0,00	0,00	24.875.400,00
	Sistem Informasi Pemerintah Kecamatan (www.wonosari.bondowosokab.go.id)	24.875.400,00	0,00	0,00	24.875.400,00
	Software StreamX	28.875.000,00	0,00	0,00	28.875.000,00
	Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP)	45.276.000,00	0,00	0,00	45.276.000,00
14	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	706.222.000,00	0,00	612.606.000,00	93.616.000,00
	Software dan Updating Sistem Manajemen UMKM	215.300.000,00	0,00	215.300.000,00	0,00
	Software Database Koperasi	50.229.000,00	0,00	50.229.000,00	0,00
	Sistem Informasi Manajemen UMKM	170.550.000,00	0,00	170.550.000,00	0,00
	Software Sijeprak	74.227.000,00	0,00	74.227.000,00	0,00
	Website	49.850.000,00	0,00	0,00	49.850.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Database Data Industri	39.850.000,00	0,00	0,00	39.850.000,00
	Software Akuntansi Koperasi	77.550.000,00	0,00	77.550.000,00	0,00
	Software Industri	24.750.000,00	0,00	24.750.000,00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal, PTSP & Tenaga Kerja	712.130.000,00	0,00	0,00	712.130.000,00
	Aplikasi Program Penyediaan Layanan Perijinan	229.883.500,00	0,00	0,00	229.883.500,00
	Aplikasi Program Paten	263.055.000,00	0,00	0,00	263.055.000,00
	Pembelian Anti Virus	4.975.000,00	0,00	0,00	4.975.000,00
	Pengadaan Software Pengadaan Aplikasi Tenaga Kerja	99.621.500,00	0,00	0,00	99.621.500,00

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
	Software Hosting Domain Si Kerja, SMS Getway Si Kerja, Hosting Domain Si Jadwal	31.228.000,00	0,00	0,00	31.228.000,00
	Software Aplikasi E Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi Pengaduan Masyarakat	79.451.000,00	0,00	0,00	79.451.000,00
16	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	481.250.560,00	0,00	0,00	481.250.560,00
	Website Sistem Perpustakaan Online Berbasis E-book	152.603.000,00	0,00	0,00	152.603.000,00
	Software Aplikasi E Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Website Perpustakaan E-Beca	101.333.000,00	0,00	0,00	101.333.000,00
	Aplikasi E-Book Kubuku	59.862.600,00	0,00	0,00	59.862.600,00
	Software Kearsipan	126.789.960,00	0,00	0,00	126.789.960,00
	Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu (Siputer)	36.746.000,00	0,00	0,00	36.746.000,00
17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00	0,00
	Website Pariwisata	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00	0,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	138.096.000,00	0,00	134.180.000,00	3.916.000,00
	Software	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00
	Aplikasi Bondowoso Republik Kopi	48.550.000,00	0,00	48.550.000,00	0,00
	Software Aplikasi E Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Sotfware Aplikasi Si Buta Perawat Susi	36.630.000,00	0,00	36.630.000,00	0,00
19	Dinas Peternakan Dan Perikanan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
20	Sekretariat Daerah	495.230.685,00	81.869.271,00	0,00	577.099.956,00
	Paket Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi JDIH Bondowoso	77.406.000,00	0,00	0,00	77.406.000,00
	Website Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	85.656.600,00	0,00	0,00	85.656.600,00
	Aplikasi Hitung Cepat	49.643.000,00	0,00	0,00	49.643.000,00
	Update Data LPPD	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	Website Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	24.844.600,00	0,00	0,00	24.844.600,00
	Software Aplikasi Laporan Penggunaan Laporan Botanik (ELAPBONIC)	9.656.900,00	0,00	0,00	9.656.900,00
	Software Aplikasi SIBUK (Software Informasi Bantuan Keuangan)	49.627.000,00	0,00	0,00	49.627.000,00
	Aplikasi E-Barjas SMS Gateway	95.036.700,00	0,00	0,00	95.036.700,00
	Aplikasi One Stop Service	88.027.885,00	0,00	0,00	88.027.885,00
	Software Aplikasi E-Absensi	7.832.000,00	0,00	0,00	7.832.000,00
	Aplikasi QUICK COUNT	0,00	81.869.271,00	0,00	81.869.271,00
21	Inspektorat	104.501.500,00	0,00	0,00	104.501.500,00
	Website	39.622.000,00	0,00	0,00	39.622.000,00
	Aplikasi e-Audit	64.879.500,00	0,00	0,00	64.879.500,00
22	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	75.690.900,00	0,00	0,00	75.690.900,00
	Software SIMPEDAL	21.092.500,00	0,00	0,00	21.092.500,00
	Software SIADEK (Sistem Informasi Data Ekonomi)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Updating Website Bappeda	44.598.400,00	0,00	0,00	44.598.400,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	262.432.500,00	0,00	0,00	262.432.500,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Sistem Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Daerah (Sirekon)	49.750.000,00	0,00	0,00	49.750.000,00
	Software Sistem Informasi Barang Persediaan (Sibaper)	208.766.500,00	0,00	0,00	208.766.500,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.757.534.805,00	0,00	0,00	1.757.534.805,00
	Sistem Informasi Pengelolaan	98.000.000,00	0,00	0,00	98.000.000,00

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
	Pajak Daerah (Simpada)				
	Customisasi Software Simpada	49.700.000,00	0,00	0,00	49.700.000,00
	Software PBB	297.865.000,00	0,00	0,00	297.865.000,00
	Software Sismiop	49.636.000,00	0,00	0,00	49.636.000,00
	Aplikasi Penyetoran PBB P2	190.300.000,00	0,00	0,00	190.300.000,00
	Software Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB (Mobile Sismiop)	98.450.000,00	0,00	0,00	98.450.000,00
	Aplikasi Registrasi PBB dan BPHTB	149.050.000,00	0,00	0,00	149.050.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi SIM BPHTB	300.631.040,00	0,00	0,00	300.631.040,00
	Software Aplikasi E-SPTPD	92.935.000,00	0,00	0,00	92.935.000,00
	Software Aplikasi SIM-PAD	140.457.950,00	0,00	0,00	140.457.950,00
	E-SPTPD Berbasis Android	91.864.850,00	0,00	0,00	91.864.850,00
	Aplikasi Sigraku	97.731.615,00	0,00	0,00	97.731.615,00
	Software Esmart	96.997.350,00	0,00	0,00	96.997.350,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	745.449.150,00	277.175.631,00	0,00	1.022.624.781,00
	Website (bkd.bondowosokab.go.id)	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	Software Simpeg Webbase	355.642.150,00	138.662.488,00	0,00	494.304.638,00
	Software E-Dokumen	41.800.000,00	0,00	0,00	41.800.000,00
	Software e-SKP	214.230.000,00	39.537.773,00	0,00	253.767.773,00
	Aplikasi Sitapelegit	89.914.000,00	0,00	0,00	89.914.000,00
	Aplikasi Siraddin	39.963.000,00	0,00	0,00	39.963.000,00
	Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN	0,00	98.975.370,00	0,00	98.975.370,00
26	Kecamatan Bondowoso	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
27	Kecamatan Tamanan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
28	Kecamatan Tenggarang	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
29	Kecamatan Tegalampel	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
30	Kecamatan Curahdami	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
31	Kecamatan Wringin	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
32	Kecamatan Pakem	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
33	Kecamatan Binakal	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
34	Kecamatan Maesan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
35	Kecamatan Grujugan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
36	Kecamatan Pujer	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
37	Kecamatan Wonosari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
38	Kecamatan Tlogosari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
39	Kecamatan Sukosari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
40	Kecamatan Tapen	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
41	Kecamatan Sumberwringin	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
42	Kecamatan Prajekan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
43	Kecamatan Klabang	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
44	Kecamatan Cermee	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
45	Kecamatan Taman Krocok	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
46	Kecamatan Jambesari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
47	Kecamatan Botolinggo	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	52.426.000,00	0,00	0,00	52.426.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Pengembangan Website	48.510.000,00	0,00	0,00	48.510.000,00
	Jumlah	**9.223.187.675,00**	**974.372.647,00**	**1.044.264.500,00**	**9.153.295.822,00**

Lampiran 8 :Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	665.294.500,00	0,00	0,00	665.294.500,00
	Software e-content Media Pendidikan	458.640.000,00	0,00	0,00	458.640.000,00
	Software Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	83.950.000,00	0,00	0,00	83.950.000,00
	Software Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	101.672.500,00	0,00	0,00	101.672.500,00
	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	21.032.000,00	0,00	0,00	21.032.000,00
2	Dinas Kesehatan	352.771.700,00	16.849.800,00	0,00	369.621.500,00
	Aplikasi Persediaan Obat Berbasis Web	99.500.000,00	0,00	0,00	99.500.000,00
	Software Antrian Pasien	27.856.400,00	6.964.100,00	0,00	34.820.500,00
	Software SIKDA	39.542.800,00	9.885.700,00	0,00	49.428.500,00
	Software PSC 119	185.872.500,00	0,00	0,00	185.872.500,00
3	RSUD dr. H. Koesnadi	95.237.775,00	150.680.644,00	0,00	245.918.419,00
	Software Absensi	8.910.000,00	2.970.000,00	0,00	11.880.000,00
	Software MMPI	7.670.355,00	2.556.785,00	0,00	10.227.140,00
	Software SIPERKASA	59.544.320,00	29.772.160,00	0,00	89.316.480,00
	Software Mobile Presensi	8.000.000,00	4.000.000,00	0,00	12.000.000,00
	Software MMPI 2	6.113.100,00	3.056.550,00	0,00	9.169.650,00
	Software Aplikasi Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	Software Laboratory Informastion System (LIS)	0,00	59.125.149,00	0,00	59.125.149,00
	Software Modul E-Rekam Medik dan E-Resep (SIMRS)	0,00	44.200.000,00	0,00	44.200.000,00
4	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	243.974.500,00	35.673.900,00	0,00	279.648.400,00
	Aplikasi Pemetaan Aset Irigasi Kabupaten Bondowoso	185.658.000,00	0,00	0,00	185.658.000,00
	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	10.516.000,00	0,00	0,00	10.516.000,00
	Website Surat Perjanjian	47.800.500,00	15.933.500,00	0,00	63.734.000,00
	Website Database Peta Ruas Jalan	0,00	19.740.400,00	0,00	19.740.400,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	30.191.000,00	0,00	0,00	30.191.000,00
	Sistem Aplikasi Absensi terintegrasi	10.516.000,00	0,00	0,00	10.516.000,00
	Sistem Informasi Rumah Tidak Huni (Berbasis Web)	6.775.000,00	0,00	0,00	6.775.000,00
	Sistem Informasi Rumah Tidak Huni (Berbasis Web)	12.900.000,00	0,00	0,00	12.900.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	136.252.600,00	5.916.900,00	138.253.500,00	3.916.000,00
	Aplikasi Pengaduan Gerdu Bersinar (Gerakan Terpadu Berantas Kemaksiatan dan Narkoba)	49.775.000,00	0,00	49.775.000,00	0,00
	Aplikasi Pengaduan Masyarakat	29.744.000,00	0,00	29.744.000,00	0,00
	Aplikasi LAKIP	29.150.000,00	0,00	29.150.000,00	0,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Aplikasi Jabatan Fungsional	23.667.600,00	5.916.900,00	29.584.500,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.875.000,00	1.959.000,00	0,00	7.834.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Sistem Informasi Tanggap Bencana	1.959.000,00	1.959.000,00	0,00	3.918.000,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	7.832.000,00	0,00	0,00	7.832.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	69.254.600,00	22.327.400,00	0,00	91.582.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Aplikasi Pelaporan SIAK Desa (SILAPDES)	24.000.000,00	6.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	Aplikasi Pendaftaran Akta Kelahiran	8.545.600,00	2.136.400,00	0,00	10.682.000,00
	Aplikasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Cek Data Kependudukan)	13.233.000,00	4.411.000,00	0,00	17.644.000,00
	Aplikasi Laporan Update Data Pindah Datang Penduduk	9.780.000,00	4.890.000,00	0,00	14.670.000,00
	Aplikasi Register Kartu Keluarga dan Akta Kematian	9.780.000,00	4.890.000,00	0,00	14.670.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
12	Dinas Perhubungan	99.902.660,00	29.974.780,00	0,00	129.877.440,00
	Software Aplikasi Web GIS	39.913.280,00	9.978.320,00	0,00	49.891.600,00
	Software Aplikasi Web GIS	59.989.380,00	19.996.460,00	0,00	79.985.840,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.370.012.120,00	129.135.440,00	109.725.000,00	1.389.422.560,00
	Aplikasi Informasi Daerah "Bondowosoku"	59.840.000,00	0,00	0,00	59.840.000,00
	Aplikasi Dashboard	109.725.000,00	0,00	109.725.000,00	0,00
	Website OPD	119.900.000,00	0,00	0,00	119.900.000,00
	Website OPD	119.900.000,00	0,00	0,00	119.900.000,00
	Website Desa	479.000.000,00	0,00	0,00	479.000.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Website Sistem Informasi Pemerintah	95.920.000,00	23.980.000,00	0,00	119.900.000,00
	Website Desa	301.600.000,00	75.400.000,00	0,00	377.000.000,00
	Sistem Informasi Organisasi Perangkat Daerah (www.geopark.bondowosokab.go.id)	14.925.240,00	4.975.080,00	0,00	19.900.320,00
	Sistem Informasi Organisasi Perangkat Daerah (www.humas.bondowosokab.go.id)	14.925.240,00	4.975.080,00	0,00	19.900.320,00
	Sistem Informasi Pemerintah Kecamatan (www.wonosari.bondowosokab.go.id)	14.925.240,00	4.975.080,00	0,00	19.900.320,00
	Software StreamX	17.325.000,00	5.775.000,00	0,00	23.100.000,00
	Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP)	18.110.400,00	9.055.200,00	0,00	27.165.600,00
14	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	675.862.000,00	20.460.000,00	602.706.000,00	93.616.000,00
	Software dan Updating Sistem Manajemen UMKM	215.300.000,00	0,00	215.300.000,00	0,00
	Software Database Koperasi	50.229.000,00	0,00	50.229.000,00	0,00
	Sistem Informasi Manajemen UMKM	170.550.000,00	0,00	170.550.000,00	0,00
	Software Sijeprak	74.227.000,00	0,00	74.227.000,00	0,00
	Website	49.850.000,00	0,00	0,00	49.850.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Database Data Industri	39.850.000,00	0,00	0,00	39.850.000,00
	Software Akuntansi Koperasi	62.040.000,00	15.510.000,00	77.550.000,00	0,00
	Software Industri	9.900.000,00	4.950.000,00	14.850.000,00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal, PTSP & Tenaga Kerja	696.239.800,00	15.890.200,00	0,00	712.130.000,00
	Aplikasi Program Penyediaan Layanan Perijinan	229.883.500,00	0,00	0,00	229.883.500,00
	Aplikasi Program Paten	263.055.000,00	0,00	0,00	263.055.000,00
	Pembelian Anti Virus	4.975.000,00	0,00	0,00	4.975.000,00

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
	Pengadaan Software Pengadaan Aplikasi Tenaga Kerja	99.621.500,00	0,00	0,00	99.621.500,00
	Software Hosting Domain Si Kerja, SMS Getway Si Kerja, Hosting Domain Si Jadwal	31.228.000,00	0,00	0,00	31.228.000,00
	Software Aplikasi E Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi Pengaduan Masyarakat	63.560.800,00	15.890.200,00	0,00	79.451.000,00
16	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	374.254.261,00	66.939.907,00	0,00	441.194.168,00
	Website Sistem Perpustakaan Online Berbasis E-book	152.603.000,00	0,00	0,00	152.603.000,00
	Software Aplikasi E Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Website Perpustakaan E-Beca	81.066.400,00	20.266.600,00	0,00	101.333.000,00
	Aplikasi E-Book Kubuku	45.896.485,00	13.966.115,00	0,00	59.862.600,00
	Software Kearsipan	76.073.976,00	25.357.992,00	0,00	101.431.968,00
	Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu (Siputer)	14.698.400,00	7.349.200,00	0,00	22.047.600,00
17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00	0,00
	Website Pariwisata	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00	0,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	108.792.000,00	7.326.000,00	112.202.000,00	3.916.000,00
	Software	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00
	Aplikasi Bondowoso Republik Kopi	48.550.000,00	0,00	48.550.000,00	0,00
	Software Aplikasi E Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Sotfware Aplikasi Si Buta Perawat Susi	7.326.000,00	7.326.000,00	14.652.000,00	0,00
19	Dinas Peternakan Dan Perikanan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
20	Sekretariat Daerah	398.193.011,00	80.324.751,20	0,00	478.517.762,20
	Paket Belanja Modal Pengadaan	46.443.600,00	15.481.200,00	0,00	61.924.800,00
	Software Aplikasi JDIH Bondowoso				
	Website Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	85.656.600,00	0,00	0,00	85.656.600,00
	Aplikasi Hitung Cepat	49.643.000,00	0,00	0,00	49.643.000,00
	Update Data LPPD	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	Website Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	24.844.600,00	0,00	0,00	24.844.600,00
	Software Aplikasi Laporan Penggunaan Laporan Botanik (ELAPBONIC)	7.725.520,00	1.931.380,00	0,00	9.656.900,00
	Software Aplikasi SIBUK (Software Informasi Bantuan Keuangan)	39.701.600,00	9.925.400,00	0,00	49.627.000,00
	Aplikasi E-Barjas SMS Gateway	76.029.360,00	19.007.340,00	0,00	95.036.700,00
	Aplikasi One Stop Service	52.816.731,00	17.605.577,00	0,00	70.422.308,00
	Software Aplikasi E-Absensi	7.832.000,00	0,00	0,00	7.832.000,00
	Aplikasi QUICK COUNT	0,00	16.373.854,20	0,00	16.373.854,20
21	Inspektorat	52.597.900,00	12.975.900,00	0,00	65.573.800,00
	Website	39.622.000,00	0,00	0,00	39.622.000,00
	Aplikasi e-Audit	12.975.900,00	12.975.900,00	0,00	25.951.800,00
22	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	64.771.220,00	10.919.680,00	0,00	75.690.900,00
	Software SIMPEDAL	21.092.500,00	0,00	0,00	21.092.500,00
	Software SIADEK (Sistem Informasi Data Ekonomi)	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	Updating Website Bappeda	35.678.720,00	8.919.680,00	0,00	44.598.400,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	144.471.500,00	63.955.500,00	0,00	208.427.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Sistem Rekonsiliasi	39.800.000,00	9.950.000,00	0,00	49.750.000,00

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
	dan Konsolidasi Laporan Keuangan Daerah (Sirekon)				
	Software Sistem Informasi Barang Persediaan (Sibaper)	100.755.500,00	54.005.500,00	0,00	154.761.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.421.228.316,34	201.096.139,66	0,00	1.622.324.456,00
	Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah (Simpada)	98.000.000,00	0,00	0,00	98.000.000,00
	Customisasi Software Simpada	49.700.000,00	0,00	0,00	49.700.000,00
	Software PBB	297.865.000,00	0,00	0,00	297.865.000,00
	Software Sismiop	49.636.000,00	0,00	0,00	49.636.000,00
	Aplikasi Penyetoran PBB P2	190.300.000,00	0,00	0,00	190.300.000,00
	Software Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB (Mobile Sismiop)	98.450.000,00	0,00	0,00	98.450.000,00
	Aplikasi Registrasi PBB dan BPHTB	149.050.000,00	0,00	0,00	149.050.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi SIM BPHTB	218.150.953,34	82.480.086,66	0,00	300.631.040,00
	Software Aplikasi E-SPTPD	74.348.000,00	18.587.000,00	0,00	92.935.000,00
	Software Aplikasi SIM-PAD	97.747.660,00	42.710.290,00	0,00	140.457.950,00
	E-SPTPD Berbasis Android	55.118.910,00	18.372.970,00	0,00	73.491.880,00
	Aplikasi Sigraku	19.546.323,00	19.546.323,00	0,00	39.092.646,00
	Software Esmart	19.399.470,00	19.399.470,00	0,00	38.798.940,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	667.522.950,00	223.970.735,00	0,00	891.493.685,00
	Website (bkd.bondowosokab.go.id)	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	Software Simpeg Webbase	355.642.150,00	138.662.488,00	0,00	494.304.638,00
	Software E-Dokumen	41.800.000,00	0,00	0,00	41.800.000,00
	Software e-SKP	214.230.000,00	39.537.773,00	0,00	253.767.773,00
	Aplikasi Sitapelegit	35.965.600,00	17.982.800,00	0,00	53.948.400,00
	Aplikasi Siraddin	15.985.200,00	7.992.600,00	0,00	23.977.800,00
	Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN	0,00	19.795.074,00	0,00	19.795.074,00
26	Kecamatan Bondowoso	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
27	Kecamatan Tamanan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
28	Kecamatan Tenggarang	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
29	Kecamatan Tegalampel	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
30	Kecamatan Curahdami	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
31	Kecamatan Wringin	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
32	Kecamatan Pakem	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
33	Kecamatan Binakal	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
34	Kecamatan Maesan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
35	Kecamatan Grujugan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
36	Kecamatan Pujer	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
37	Kecamatan Wonosari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
38	Kecamatan Tlogosari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
39	Kecamatan Sukosari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
40	Kecamatan Tapen	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
41	Kecamatan Sumberwringin	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
42	Kecamatan Prajekan	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
43	Kecamatan Klabang	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
44	Kecamatan Cermee	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
45	Kecamatan Taman Krocok	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
46	Kecamatan Jambesari	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
47	Kecamatan Botolinggo	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42.724.000,00	9.702.000,00	0,00	52.426.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi	3.916.000,00	0,00	0,00	3.916.000,00
	Pengembangan Website	38.808.000,00	9.702.000,00	0,00	48.510.000,00
	Jumlah	**7.870.655.413,34**	**1.106.078.676,86**	**1.012.386.500,00**	**7.964.347.590,20**